PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

Karimun
Melaju dalam Harmoni

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat:
    a. LRA;
    b. LPSAL;
    c. Neraca;
    d. LO;
    e. LAK;
    f. LPE;
    g. CaLK.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.231.556.000.983,28
b. Belanja	Rp	1.202.669.868.413,96
c. Surplus/Defisit	Rp	28.886.132.569,32
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	44.255.490.538,18
- Pengeluaran	Rp	2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	41.755.490.538,18
e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
- Surplus/Defisit	Rp	28.886.132.569,32
- Pembiayaan Netto	Rp	41.755.490.538,18
SILPA	Rp	70.641.623.107,50

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp(29.818.050.687,72) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.261.374.051.671,00
2. Realisasi	Rp	1.231.556.000.983,28
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(29.818.050.687,72)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(100.368.194.829,22) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.303.038.063.243,18
2. Realisasi	Rp	1.202.669.868.413,96
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(100.368.194.829,22)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp70.550.144.141,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(41.664.011.572,18)
2. Realisasi	Rp	28.886.132.569,32
Selisih lebih/(kurang)	Rp	70.550.144.141,50

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp91.478.966,00 dengan rician sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	44.164.011.572,18
2. Realisasi	Rp	44.255.490.538,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp	91.478.966,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00
2. Realisasi	Rp	2.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp91.478.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	41.664.011.572,18
2. Realisasi	Rp	41.755.490.538,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp	91.478.966,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp70.641.623.107,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	70.641.623.107,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp	70.641.623.107,50

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	44.164.011.572,18
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	44.164.011.572,18
	Selisih	Rp	0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	70.641.623.107,50
	Sub Total	Rp	70.641.623.107,50
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	70.641.623.107,50

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	2.344.949.963.451,04
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	125.409.321.655,69
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	2.219.540.641.795,35

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	1.183.242.572.695,78
b.	Beban-LO	Rp	1.118.990.405.046,18
	Surplus/Defisit Operasi-LO	Rp	64.252.167.649,60
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(23.694.969.814,00)
d.	Pos Luar Biasa	Rp	(1.930.753.000,00)
e.	Surplus/Defisit	Rp	38.626.444.835,60

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	133.682.303.605,78
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(107.296.171.036,46)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	91.478.966,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(1.478.098,00)
5.	Kenaikan (Penurunan) Kas	Rp	26.476.133.437,32
b.	Saldo Kas Akhir		
1.	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	44.165.505.670,18
2.	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	70.641.639.107,50
3.	Saldo Akhir Kas	Rp	70.641.639.107,50

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.168.327.298.371,94
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	38.626.444.835,60
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	12.586.898.587,81
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.219.540.641.795,35

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 AGUSTUS 2026

BUPATI KARIMUN,

ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 AGUSTUS 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

SULARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (2 , 11 / 2026)

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	13-14
LAMPIRAN I.1	RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI	15-38
LAMPIRAN I.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	39-75
LAMPIRAN I.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	76-259
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76-86
2	DINAS KESEHATAN	87-96
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97-104
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	105-108
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	109-112
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	113-116
7	DINAS SOSIAL	117-119
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	120-124
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	125-128
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	129-132
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	133-138
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	139-141
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	142-145
14	DINAS PERHUBUNGAN	146-149
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	150-154
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	155-160
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	161-164
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	165-169
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	170-173
20	DINAS PERIKANAN	174-176
21	DINAS PARIWISATA	177-180
22	SEKRETARIAT DAERAH	181-187
23	SEKRETARIAT DPRD	188-195
24	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	196-200
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	201-204
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	205-209
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	210-214
28	INSPEKTORAT DAERAH	215-218
29	KECAMATAN KARIMUN	219-221
30	KECAMATAN MERAL	222-224
31	KECAMATAN MERAL BARAT	225-227
32	KECAMATAN TEBING	228-229
33	KECAMATAN KUNDUR	230-232
34	KECAMATAN UNGAR	233-235
35	KECAMATAN KUNDUR UTARA	236-237
36	KECAMATAN BELAT	238-239
37	KECAMATAN KUNDUR BARAT	240-242
38	KECAMATAN MORO	243-245
39	KECAMATAN BURU	246-247
40	KECAMATAN DURAI	248-249
41	KECAMATAN SELAT GELAM	250-252
42	KECAMATAN SUGIE BESAR	253-254
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	255-259
LAMPIRAN I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	260-360
LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	361
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL	362-363

LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	364
LAMPIRAN V	NERACA	365-366
LAMPIRAN VI	LAPORAN ARUS KAS	367-369
LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	370-626
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	627-633
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	634
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	635-636
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	637-639
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	640-641
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	642
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	643
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	644-645
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	646
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	647
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	648
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	649
LAMPIRAN XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	650-651
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	650
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	651

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(LRA)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95
Pendapatan Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	3.086.978.412,00
Lain-lain PAD Yang Sah	6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,27	5.726.619.877,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**414.997.456.943,00**	**404.244.487.765,50**	**97,41**	**372.697.795.861,97**
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	60.350.303.000,00	47.828.063.200,00	79,25	35.437.827.410,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	39.313.931.000,00	34.807.545.000,00	88,54	118.162.575.000,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00
Dana Alokasi Khusus	159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	207.991.198.275,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**730.968.534.000,00**	**699.953.956.027,00**	**95,76**	**807.544.910.421,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	22.469.981.000,00
Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,85	37.748.480.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**52.676.697.000,00**	**52.266.126.740,00**	**99,22**	**60.218.461.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.910.363.728,00	71.480.578.404,00	125,60	76.814.413.176,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	**62.731.363.728,00**	**72.658.338.404,00**	**115,82**	**76.814.413.176,00**
Jumlah Pendapatan Transfer	**846.376.594.728,00**	**824.878.421.171,00**	**97,46**	**944.577.784.597,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**0,00**	**2.433.092.046,78**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**1.261.374.051.671,00**	**1.231.556.000.983,28**	**97,64**	**1.317.275.580.458,97**
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00
Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00
Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	**1.082.283.388.424,77**	**1.001.939.323.828,50**	**92,58**	**1.095.223.926.705,47**
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00
Belanja Gedung dan Bangunan	37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,98	33.452.111.359,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,95	6.299.584.700,00
Belanja Aset Lainnya	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00
Jumlah Belanja Modal	**119.311.487.550,09**	**105.057.610.836,46**	**88,05**	**147.598.573.750,00**
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,62	697.401.200,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	**2.989.018.533,34**	**1.572.746.671,00**	**52,62**	**697.401.200,00**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
JUMLAH BELANJA	**1.204.583.894.508,20**	**1.108.569.681.335,96**	**92,03**	**1.243.519.901.655,47**
TRANSFER				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	88.613.046.778,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	**98.454.168.734,98**	**94.100.187.078,00**	**95,58**	**90.713.046.778,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.303.038.063.243,18**	**1.202.669.868.413,96**	**92,30**	**1.334.232.948.433,47**
SURPLUS/DEFISIT	**-41.664.011.572,18**	**28.886.132.569,32**	**-69,33**	**-16.957.367.974,50**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH				
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	100,00	61.037.956.210,68
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir	0,00	91.478.966,00	100,00	83.423.336,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**44.164.011.572,18**	**44.255.490.538,18**	**100,21**	**61.121.379.546,68**
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**41.664.011.572,18**	**41.755.490.538,18**	**100,22**	**61.121.379.546,68**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**70.641.623.107,50**	**0,00**	**44.164.011.572,18**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**1.261.374.051.671,00**	**1.231.556.000.983,28**	**(29.818.050.687,72)**	**97,64**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**96.045.192.664,00**	**85.221.320.914,50**	**(10.823.871.749,50)**	**88,73**
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	96.045.192.664,00	85.221.320.914,50	(10.823.871.749,50)	88,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RSUD MUHAMMAD SANI	80.000.000.000,00	70.877.542.340,00	(9.122.457.660,00)	88,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	80.000.000.000,00	70.877.542.340,00	(9.122.457.660,00)	88,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.000.000.000,00	70.877.542.340,00	(9.122.457.660,00)	88,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	78.200.000.000,00	69.788.939.305,00	(8.411.060.695,00)	89,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.800.000.000,00	1.088.603.035,00	(711.396.965,00)	60,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	2.000.000.000,00	1.988.441.881,50	(11.558.118,50)	99,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.988.441.881,50	(11.558.118,50)	99,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.988.441.881,50	(11.558.118,50)	99,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	1.995.729.396,00	1.979.921.606,50	(15.807.789,50)	99,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.270.604,00	8.520.275,00	4.249.671,00	199,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	513.000.000,00	398.480.720,00	(114.519.280,00)	77,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	513.000.000,00	398.480.720,00	(114.519.280,00)	77,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	513.000.000,00	398.480.720,00	(114.519.280,00)	77,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	512.900.000,00	398.480.720,00	(114.419.280,00)	77,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		UPT PUSKESMAS BURU	712.650.000,00	637.382.816,00	(75.267.184,00)	89,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	712.650.000,00	637.382.816,00	(75.267.184,00)	89,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	712.650.000,00	637.382.816,00	(75.267.184,00)	89,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	710.650.000,00	635.207.847,00	(75.442.153,00)	89,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000,00	2.174.969,00	174.969,00	108,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	1.007.809.000,00	737.840.854,00	(269.968.146,00)	73,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	1.007.809.000,00	737.840.854,00	(269.968.146,00)	73,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.007.809.000,00	737.840.854,00	(269.968.146,00)	73,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	1.007.309.000,00	737.086.107,00	(270.222.893,00)	73,17

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	754.747,00	254.747,00	150,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	520.000.000,00	468.307.153,00	(51.692.847,00)	90,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	520.000.000,00	468.307.153,00	(51.692.847,00)	90,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520.000.000,00	468.307.153,00	(51.692.847,00)	90,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	519.250.000,00	467.353.504,00	(51.896.496,00)	90,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	750.000,00	953.649,00	203.649,00	127,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPT PUSKESMAS TEBING	1.300.000.000,00	1.311.435.250,00	11.435.250,00	100,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	1.300.000.000,00	1.311.435.250,00	11.435.250,00	100,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.300.000.000,00	1.311.435.250,00	11.435.250,00	100,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	1.299.356.939,00	1.309.131.473,00	9.774.534,00	100,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	643.061,00	2.303.777,00	1.660.716,00	358,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	1.908.133.664,00	1.404.256.855,00	(503.876.809,00)	73,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	1.908.133.664,00	1.404.256.855,00	(503.876.809,00)	73,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.133.664,00	1.404.256.855,00	(503.876.809,00)	73,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	1.903.077.629,00	1.398.064.076,00	(505.013.553,00)	73,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.056.035,00	6.192.779,00	1.136.744,00	122,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		UPT PUSKESMAS UNGAR	420.000.000,00	351.271.982,00	(68.728.018,00)	83,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	420.000.000,00	351.271.982,00	(68.728.018,00)	83,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.000.000,00	351.271.982,00	(68.728.018,00)	83,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	420.000.000,00	350.676.285,00	(69.323.715,00)	83,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	595.697,00	595.697,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		UPT PUSKESMAS MORO	633.600.000,00	651.627.912,00	18.027.912,00	102,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	633.600.000,00	651.627.912,00	18.027.912,00	102,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	633.600.000,00	651.627.912,00	18.027.912,00	102,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	633.600.000,00	651.627.912,00	18.027.912,00	102,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	2.850.000.000,00	2.575.858.167,00	(274.141.833,00)	90,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	2.850.000.000,00	2.575.858.167,00	(274.141.833,00)	90,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.850.000.000,00	2.575.858.167,00	(274.141.833,00)	90,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	2.848.561.272,00	2.573.858.231,00	(274.703.041,00)	90,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.438.728,00	1.999.936,00	561.208,00	139,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		UPT PUSKESMAS BELAT	540.000.000,00	384.580.916,00	(155.419.084,00)	71,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	540.000.000,00	384.580.916,00	(155.419.084,00)	71,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	540.000.000,00	384.580.916,00	(155.419.084,00)	71,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	539.800.000,00	384.349.335,00	(155.450.665,00)	71,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000,00	231.581,00	31.581,00	115,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		UPT PUSKESMAS DURAI	490.000.000,00	533.718.927,00	43.718.927,00	108,92

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	490.000.000,00	533.718.927,00	43.718.927,00	108,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	490.000.000,00	533.718.927,00	43.718.927,00	108,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.02	Retribusi Daerah	489.000.000,00	532.823.496,00	43.823.496,00	108,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000,00	895.431,00	(104.569,00)	89,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	1.050.000.000,00	907.166.033,00	(142.833.967,00)	86,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	1.050.000.000,00	907.166.033,00	(142.833.967,00)	86,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000,00	907.166.033,00	(142.833.967,00)	86,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.02	Retribusi Daerah	1.049.400.000,00	905.680.588,00	(143.719.412,00)	86,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	600.000,00	1.485.445,00	885.445,00	247,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		UPT PUSKESMAS MERAL	2.100.000.000,00	1.993.409.108,00	(106.590.892,00)	94,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	2.100.000.000,00	1.993.409.108,00	(106.590.892,00)	94,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.100.000.000,00	1.993.409.108,00	(106.590.892,00)	94,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.02	Retribusi Daerah	2.098.500.000,00	1.990.690.170,00	(107.809.830,00)	94,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	2.718.938,00	1.218.938,00	181,26
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**4.942.440.000,00**	**3.926.367.118,00**	**(1.016.072.882,00)**	**79,44**
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,69
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,69
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,69
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,69
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	(906.369.800,00)	54,68
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,91
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,91
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,91
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,91
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,91
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	575.000.000,00	412.024.400,00	(162.975.600,00)	71,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13,00	13,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	353.338.000,00	53.338.000,00	117,78
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,13
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,13
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**5.000.000,00**	**0,00**	**(5.000.000,00)**	**0,00**
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.160.381.419.007,00**	**1.142.408.312.950,78**	**(17.973.106.056,22)**	**98,45**
5.02			KEUANGAN	1.160.381.419.007,00	1.142.408.312.950,78	(17.973.106.056,22)	98,45
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	854.199.899.716,00	834.253.740.034,51	(19.946.159.681,49)	97,66
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	854.199.899.716,00	834.253.740.034,51	(19.946.159.681,49)	97,66
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.823.304.988,00	6.942.226.816,73	(881.078.171,27)	88,74
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	33.000.000,00	58.808.000,00	25.808.000,00	178,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	(790.766.021,00)	77,40
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.291.708.980,00	4.175.588.829,73	(116.120.150,27)	97,29
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	(21.498.173.557,00)	97,46
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	783.645.231.000,00	752.220.082.767,00	(31.425.148.233,00)	95,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	9.926.974.676,00	115,82
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	306.181.519.291,00	308.154.572.916,27	1.973.053.625,27	100,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	306.181.519.291,00	308.154.572.916,27	1.973.053.625,27	100,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	306.181.519.291,00	308.154.572.916,27	1.973.053.625,27	100,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	1.770.966.572,09	100,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	226.195.000,00	425.882.053,18	199.687.053,18	188,28
		5	**Belanja**	**1.303.038.063.243,18**	**1.202.669.868.413,96**	**(100.368.194.829,22)**	**92,30**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**795.769.124.729,60**	**745.630.253.047,96**	**(50.138.871.681,64)**	**93,70**
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	360.903.358.494,00	348.699.679.266,00	(12.203.679.228,00)	96,62
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	290.487.398.760,00	280.752.836.609,00	(9.734.562.151,00)	96,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.116.475.499,00	51.880.262.457,00	(2.236.213.042,00)	95,87
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	16.299.484.235,00	16.066.580.200,00	(232.904.035,00)	98,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	26.391.990.590,00	22.417.343.690,63	(3.974.646.899,37)	84,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.133.144.950,00	8.293.111.107,00	(3.840.033.843,00)	68,35
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.162.330.450,00	8.032.021.303,63	(130.309.146,37)	98,40
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.751.515.190,00	5.748.365.190,00	(3.150.000,00)	99,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	345.000.000,00	343.846.090,00	(1.153.910,00)	99,67
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.703.970.645,70	248.141.588.546,83	(14.562.382.098,87)	94,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	115.898.316.610,60	108.783.690.658,00	(7.114.625.952,60)	93,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	115.898.316.610,60	108.783.690.658,00	(7.114.625.952,60)	93,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	115.176.726.610,60	108.065.090.658,00	(7.111.635.952,60)	93,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	69.445.951.430,00	67.641.668.970,00	(1.804.282.460,00)	97,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.330.775.180,60	40.029.482.588,00	(5.301.292.592,60)	88,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	393.939.100,00	(6.060.900,00)	98,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	721.590.000,00	718.600.000,00	(2.990.000,00)	99,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	721.590.000,00	718.600.000,00	(2.990.000,00)	99,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RSUD MUHAMMAD SANI	101.417.800.959,65	99.660.489.006,83	(1.757.311.952,82)	98,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	101.417.800.959,65	99.660.489.006,83	(1.757.311.952,82)	98,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.360.533.859,65	87.654.441.997,00	(1.706.091.862,65)	98,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.515.619.629,40	14.277.549.164,00	(1.238.070.465,40)	92,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.844.914.230,25	73.376.892.833,00	(468.021.397,25)	99,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	12.057.267.100,00	12.006.047.009,83	(51.220.090,17)	99,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.450.000.000,00	5.399.442.037,00	(50.557.963,00)	99,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	(662.127,17)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	6.201.375.355,12	5.499.520.964,00	(701.854.391,12)	88,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	6.201.375.355,12	5.499.520.964,00	(701.854.391,12)	88,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.662.230.895,12	5.009.371.045,00	(652.859.850,12)	88,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.320.849.616,33	2.183.910.230,00	(136.939.386,33)	94,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.341.381.278,79	2.825.460.815,00	(515.920.463,79)	84,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	539.144.460,00	490.149.919,00	(48.994.541,00)	90,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	539.144.460,00	490.149.919,00	(48.994.541,00)	90,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	2.125.467.090,83	1.580.868.368,00	(544.598.722,83)	74,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	2.125.467.090,83	1.580.868.368,00	(544.598.722,83)	74,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.087.057.090,83	1.559.479.250,00	(527.577.840,83)	74,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	712.460.091,00	611.143.233,00	(101.316.858,00)	85,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.374.596.999,83	948.336.017,00	(426.260.982,83)	68,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	38.410.000,00	21.389.118,00	(17.020.882,00)	55,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.410.000,00	21.389.118,00	(17.020.882,00)	55,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		UPT PUSKESMAS BURU	2.180.796.669,24	1.897.615.549,00	(283.181.120,24)	87,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.180.796.669,24	1.897.615.549,00	(283.181.120,24)	87,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.796.669,24	1.869.995.749,00	(280.800.920,24)	86,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	819.360.919,24	737.769.934,00	(81.590.985,24)	90,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.331.435.750,00	1.132.225.815,00	(199.209.935,00)	85,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	27.619.800,00	(2.380.200,00)	92,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	27.619.800,00	(2.380.200,00)	92,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	2.770.968.720,00	2.224.239.848,00	(546.728.872,00)	80,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	2.770.968.720,00	2.224.239.848,00	(546.728.872,00)	80,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.721.468.720,00	2.203.371.848,00	(518.096.872,00)	80,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.846.918,00	886.835.074,00	(128.011.844,00)	87,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.621.802,00	1.316.536.774,00	(390.085.028,00)	77,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.500.000,00	20.868.000,00	(28.632.000,00)	42,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.500.000,00	20.868.000,00	(28.632.000,00)	42,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	2.754.474.450,00	2.447.437.301,00	(307.037.149,00)	88,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	2.754.474.450,00	2.447.437.301,00	(307.037.149,00)	88,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.704.474.450,00	2.425.137.301,00	(279.337.149,00)	89,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	1.394.194.850,00	1.284.932.070,00	(109.262.780,00)	92,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.279.600,00	1.140.205.231,00	(170.074.369,00)	87,02

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	22.300.000,00	(27.700.000,00)	44,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	22.300.000,00	(27.700.000,00)	44,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPT PUSKESMAS TEBING	3.957.773.646,00	3.607.183.248,00	(350.590.398,00)	91,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	3.957.773.646,00	3.607.183.248,00	(350.590.398,00)	91,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.907.773.646,00	3.562.233.248,00	(345.540.398,00)	91,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.780.406,00	1.407.298.923,00	(227.481.483,00)	86,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.272.993.240,00	2.154.934.325,00	(118.058.915,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	44.950.000,00	(5.050.000,00)	89,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	44.950.000,00	(5.050.000,00)	89,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	3.500.751.464,82	3.188.804.864,00	(311.946.600,82)	91,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	3.500.751.464,82	3.188.804.864,00	(311.946.600,82)	91,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.355.751.464,82	3.085.749.999,00	(270.001.465,82)	91,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.307.541.315,82	1.218.778.589,00	(88.762.726,82)	93,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.048.210.149,00	1.866.971.410,00	(181.238.739,00)	91,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	145.000.000,00	103.054.865,00	(41.945.135,00)	71,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.000.000,00	103.054.865,00	(41.945.135,00)	71,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		UPT PUSKESMAS UNGAR	1.516.276.029,48	1.269.693.426,00	(246.582.603,48)	83,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.516.276.029,48	1.269.693.426,00	(246.582.603,48)	83,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.508.726.029,48	1.267.363.426,00	(241.362.603,48)	84,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	520.041.629,48	493.023.921,00	(27.017.708,48)	94,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.684.400,00	774.339.505,00	(214.344.895,00)	78,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	7.550.000,00	2.330.000,00	(5.220.000,00)	30,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.550.000,00	2.330.000,00	(5.220.000,00)	30,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		UPT PUSKESMAS MORO	2.165.747.757,00	1.803.939.176,00	(361.808.581,00)	83,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	2.165.747.757,00	1.803.939.176,00	(361.808.581,00)	83,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.117.573.257,00	1.760.038.676,00	(357.534.581,00)	83,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	843.509.724,00	764.013.657,00	(79.496.067,00)	90,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.274.063.533,00	996.025.019,00	(278.038.514,00)	78,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	48.174.500,00	43.900.500,00	(4.274.000,00)	91,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.174.500,00	43.900.500,00	(4.274.000,00)	91,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	7.014.526.917,48	6.461.328.427,00	(553.198.490,48)	92,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	7.014.526.917,48	6.461.328.427,00	(553.198.490,48)	92,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.884.526.917,48	6.341.806.027,00	(542.720.890,48)	92,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	2.579.568.583,48	2.506.776.983,00	(72.791.600,48)	97,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.304.958.334,00	3.835.029.044,00	(469.929.290,00)	89,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	130.000.000,00	119.522.400,00	(10.477.600,00)	91,94

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	69.594.000,00	(10.406.000,00)	86,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.928.400,00	(71.600,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		UPT PUSKESMAS BELAT	1.845.876.407,00	1.446.807.477,00	(399.068.930,00)	78,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	1.845.876.407,00	1.446.807.477,00	(399.068.930,00)	78,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.810.876.407,00	1.432.620.977,00	(378.255.430,00)	79,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	574.706.575,00	515.146.777,00	(59.559.798,00)	89,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.169.832,00	917.474.200,00	(318.695.632,00)	74,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	14.186.500,00	(20.813.500,00)	40,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	14.186.500,00	(20.813.500,00)	40,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		UPT PUSKESMAS DURAI	1.739.317.820,00	1.484.754.538,00	(254.563.282,00)	85,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.739.317.820,00	1.484.754.538,00	(254.563.282,00)	85,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.705.317.820,00	1.450.788.038,00	(254.529.782,00)	85,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	516.183.020,00	504.708.917,00	(11.474.103,00)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.134.800,00	946.079.121,00	(243.055.679,00)	79,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	34.000.000,00	33.966.500,00	(33.500,00)	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	33.966.500,00	(33.500,00)	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	2.775.200.285,00	2.285.910.175,00	(489.290.110,00)	82,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	2.775.200.285,00	2.285.910.175,00	(489.290.110,00)	82,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.754.200.285,00	2.264.910.175,00	(489.290.110,00)	82,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	956.346.585,00	810.333.364,00	(146.013.221,00)	84,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.797.853.700,00	1.454.576.811,00	(343.276.889,00)	80,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		UPT PUSKESMAS MERAL	4.275.811.615,48	4.024.879.465,00	(250.932.150,48)	94,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	4.275.811.615,48	4.024.879.465,00	(250.932.150,48)	94,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.225.811.615,48	3.976.181.855,00	(249.629.760,48)	94,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	1.565.996.846,76	1.491.880.417,00	(74.116.429,76)	95,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.659.814.768,72	2.484.301.438,00	(175.513.330,72)	93,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.697.610,00	(1.302.390,00)	97,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	48.697.610,00	(1.302.390,00)	97,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT	563.488.848,00	474.426.056,00	(89.062.792,00)	84,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	563.488.848,00	474.426.056,00	(89.062.792,00)	84,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	525.832.848,00	474.426.056,00	(51.406.792,00)	90,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.832.848,00	474.426.056,00	(51.406.792,00)	90,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	37.656.000,00	0,00	(37.656.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.656.000,00	0,00	(37.656.000,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	42.537.369.870,67	35.259.079.052,50	(7.278.290.818,17)	82,89
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	(433.470.340,06)	95,42
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.860.089.935,21	8.585.928.623,50	(3.274.161.311,71)	72,39
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	21.216.864.179,40	17.646.205.013,00	(3.570.659.166,40)	83,17
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	61.677.200.863,09	53.711.838.082,00	(7.965.362.781,09)	87,09
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.014.185.199,62	20.669.851.307,00	(344.333.892,62)	98,36
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.660.975.663,47	33.041.986.775,00	(7.618.988.888,47)	81,26
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.679.630.741,85	12.512.563.231,00	(2.167.067.510,85)	85,24
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	(105.258.984,45)	96,93
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.644.981.348,20	7.761.472.822,00	(1.883.508.526,20)	80,47
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.610.247.539,20	1.431.947.539,00	(178.300.000,20)	88,93
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.021.210.717,00	2.989.980.517,00	(31.230.200,00)	98,97
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.856.000,00	162.643.000,00	(30.213.000,00)	84,33
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.000.000,00	175.850.000,00	(150.000,00)	99,91
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.652.354.717,00	2.651.487.517,00	(867.200,00)	99,97
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.727.708.328,37	17.487.173.115,00	(1.240.535.213,37)	93,38
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.489.762.868,30	6.071.691.940,00	(418.070.928,30)	93,56
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	(102.801.456,98)	98,20
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.217.893,32	463.948.422,00	(315.269.471,32)	59,54
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	151.210.000,00	122.666.050,00	(28.543.950,00)	81,12
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.210.000,00	122.666.050,00	(28.543.950,00)	81,12

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.985.527.460,07	11.259.717.125,00	(725.810.335,07)	93,94
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	(530.667.835,07)	95,08
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.415.178,00	1.007.272.678,00	(195.142.500,00)	83,77
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	101.208.000,00	33.098.000,00	(68.110.000,00)	32,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.208.000,00	33.098.000,00	(68.110.000,00)	32,70
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	(186.583.800,92)	94,67
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.242.900,00	1.096.149.769,00	(529.093.131,00)	67,45
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**121.066.948.430,23**	**108.355.337.594,00**	**(12.711.610.836,23)**	**89,50**
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.228.288.575,00	6.633.368.275,00	(594.920.300,00)	91,77
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.510.364.975,00	4.342.730.609,00	(167.634.366,00)	96,28
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.670.573.600,00	2.243.287.666,00	(427.285.934,00)	84,00
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	100,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	(281.353.809,48)	93,48
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.710.900,00	467.734.053,00	(212.976.847,00)	68,71
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	(367.543.904,39)	95,13
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.119.130,00	452.883.415,00	(60.235.715,00)	88,26
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,67
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.827.689.007,90	20.247.706.757,00	(1.579.982.250,90)	92,76
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	(409.662.153,28)	90,33
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.592.322.210,62	16.422.002.113,00	(1.170.320.097,62)	93,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	(15.597.620,00)	99,68
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	(15.597.620,00)	99,68
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.240.964.579,00	5.919.197.667,00	(321.766.912,00)	94,84
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	(226.886.617,00)	95,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.406.366,00	1.055.526.071,00	(94.880.295,00)	91,75
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	161.314.000,00	158.707.800,00	(2.606.200,00)	98,38
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.314.000,00	158.707.800,00	(2.606.200,00)	98,38
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.820.140.013,96	5.216.029.273,00	(604.110.740,96)	89,62
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	(162.134.531,96)	95,44
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.889.772,00	1.823.913.563,00	(441.976.209,00)	80,49
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	71.034.000,00	60.750.000,00	(10.284.000,00)	85,52
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.034.000,00	60.750.000,00	(10.284.000,00)	85,52
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.725.802.770,34	18.539.058.698,00	(3.186.744.072,34)	85,33
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.607.237.070,82	7.142.020.266,00	(465.216.804,82)	93,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.318.565.699,52	10.597.038.432,00	(2.721.527.267,52)	79,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	370.656.450,00	34.598.700,00	(336.057.750,00)	9,33
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.656.450,00	34.598.700,00	(336.057.750,00)	9,33
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.390.748.385,00	6.586.370.259,00	(804.378.126,00)	89,12
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	(164.018.494,00)	95,87
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.422.522.428,00	2.782.162.796,00	(640.359.632,00)	81,29
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	119.957.700,00	(42.300,00)	99,96
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00	119.957.700,00	(42.300,00)	99,96
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.396.555.416,04	4.668.459.867,00	(728.095.549,04)	86,51
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	(124.468.449,02)	97,06
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.409.182,02	564.782.082,00	(303.627.100,02)	65,04
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	189.493.000,00	38.761.000,00	(150.732.000,00)	20,46
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.493.000,00	38.761.000,00	(150.732.000,00)	20,46
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	(314.032.233,10)	94,74

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.861.300,00	632.870.029,00	(57.991.271,00)	91,61
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.291.707.188,94	8.198.711.288,00	(1.092.995.900,94)	88,24
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	(170.419.519,94)	96,20
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.460.320.088,00	3.537.743.707,00	(922.576.381,00)	79,32
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	357.876.000,00	73.415.000,00	(284.461.000,00)	20,51
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.131.000,00	3.500.000,00	(9.631.000,00)	26,65
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.745.000,00	69.915.000,00	(274.830.000,00)	20,28
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.069.579.497,08	4.546.785.334,00	(522.794.163,08)	89,69
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	(217.193.699,08)	95,04
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.207.838,00	387.607.374,00	(305.600.464,00)	55,92
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	100,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**21.978.699.513,52**	**19.838.874.970,00**	**(2.139.824.543,52)**	**90,26**
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	(236.435.538,54)	96,07
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927.701.968,00	609.845.623,00	(317.856.345,00)	65,74
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.605.806.106,00	4.585.150.617,00	(20.655.489,00)	99,55
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.249.069.390,98	5.053.641.250,00	(195.428.140,98)	96,28
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.832.880.238,98	3.715.329.134,00	(117.551.104,98)	96,93
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.189.152,00	1.338.312.116,00	(77.877.036,00)	94,50
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	449.241.000,00	444.108.750,00	(5.132.250,00)	98,86
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.741.000,00	384.608.750,00	(5.132.250,00)	98,68
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.514.431.325,00	2.361.396.431,00	(1.153.034.894,00)	67,19
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.625.900,00	643.904.800,00	(225.721.100,00)	74,04
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.644.805.425,00	1.717.491.631,00	(927.313.794,00)	64,94
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.144.000,00	34.133.000,00	(11.000,00)	99,97
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.144.000,00	34.133.000,00	(11.000,00)	99,97
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	909.851.600,00	748.477.869,00	(161.373.731,00)	82,26
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.851.600,00	748.477.869,00	(161.373.731,00)	82,26
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	131.407.000,00	98.199.000,00	(33.208.000,00)	74,73
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.407.000,00	98.199.000,00	(33.208.000,00)	74,73
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**107.976.756.000,87**	**94.204.037.696,00**	**(13.772.718.304,87)**	**87,24**
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	67.752.790.172,05	57.817.328.028,00	(9.935.462.144,05)	85,34
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	24.981.288.509,00	23.218.831.649,00	(1.762.456.860,00)	92,94
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.421.501.663,05	31.148.496.379,00	(3.273.005.284,05)	90,49
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.350.000.000,00	3.450.000.000,00	(4.900.000.000,00)	41,32
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.254.328.600,00	1.110.991.440,00	(143.337.160,00)	88,57
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	979.629.440,00	837.228.440,00	(142.401.000,00)	85,46
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.996.160,00	199.060.000,00	(936.160,00)	99,53
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	74.703.000,00	74.703.000,00	0,00	100,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	35.014.617.728,82	31.522.434.873,00	(3.492.182.855,82)	90,03
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	19.765.502.174,82	18.484.933.009,00	(1.280.569.165,82)	93,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.249.115.554,00	13.037.501.864,00	(2.211.613.690,00)	85,50
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	(201.736.145,00)	94,90
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	(201.736.145,00)	94,90
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**162.895.556.379,42**	**152.266.586.731,00**	**(10.628.969.648,42)**	**93,47**
5.01			PERENCANAAN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.164.647.487,86	8.606.446.544,00	(558.200.943,86)	93,91
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.633.435.787,86	6.377.234.460,00	(256.201.327,86)	96,14
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.531.211.700,00	2.229.212.084,00	(301.999.616,00)	88,07
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	41.484.000,00	41.452.500,00	(31.500,00)	99,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.484.000,00	41.452.500,00	(31.500,00)	99,92
5.02			KEUANGAN	146.561.230.388,86	137.311.511.540,00	(9.249.718.848,86)	93,69
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	116.819.123.841,98	109.913.343.457,00	(6.905.780.384,98)	94,09

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	116.819.123.841,98	109.913.343.457,00	(6.905.780.384,98)	94,09
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.293.536.573,66	14.162.610.978,00	(1.130.925.595,66)	92,61
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.406.978.083,66	7.056.951.721,00	(350.026.362,66)	95,27
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.886.558.490,00	7.105.659.257,00	(780.899.233,00)	90,10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	82.400.000,00	77.798.730,00	(4.601.270,00)	94,42
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.400.000,00	77.798.730,00	(4.601.270,00)	94,42
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	(1.416.271.862,34)	52,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	(1.416.271.862,34)	52,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	(4.353.981.656,98)	95,58
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	(4.353.981.656,98)	95,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	29.074.751.546,88	26.834.288.083,00	(2.240.463.463,88)	92,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	(1.281.161.774,00)	95,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.209.725.730,88	2.250.424.041,00	(959.301.689,88)	70,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	667.355.000,00	563.880.000,00	(103.475.000,00)	84,49
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.855.000,00	365.880.000,00	(66.975.000,00)	84,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	234.500.000,00	198.000.000,00	(36.500.000,00)	84,43
5.03			KEPEGAWAIAN	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.845.708.602,70	6.103.198.747,00	(742.509.855,70)	89,15
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	(137.965.202,00)	97,12
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.051.496.399,70	1.446.951.746,00	(604.544.653,70)	70,53
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	124.734.000,00	123.650.000,00	(1.084.000,00)	99,13
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.734.000,00	123.650.000,00	(1.084.000,00)	99,13
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**13.652.481.880,31**	**11.799.656.868,00**	**(1.852.825.012,31)**	**86,43**
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.119.677.880,31	11.667.256.868,00	(1.452.421.012,31)	88,93
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	(258.848.603,31)	96,85
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.532.740,00	3.706.960.331,00	(1.193.572.409,00)	75,64
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	532.804.000,00	132.400.000,00	(400.404.000,00)	24,85
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.104.000,00	42.700.000,00	(400.404.000,00)	9,64
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	100,00
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**71.457.521.204,35**	**63.094.563.092,00**	**(8.362.958.112,35)**	**88,30**
7.01			KECAMATAN	71.457.521.204,35	63.094.563.092,00	(8.362.958.112,35)	88,30
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		KECAMATAN DURAI	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,24
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,24
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.579.302.473,00	2.422.105.398,00	(157.197.075,00)	93,91
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	(100.179.015,74)	94,68
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.562.989,26	639.544.930,00	(57.018.059,26)	91,81
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.411.000,00	0,00	(18.411.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.411.000,00	0,00	(18.411.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN KUNDUR	6.318.202.516,66	5.853.751.855,00	(464.450.661,66)	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	6.318.202.516,66	5.853.751.855,00	(464.450.661,66)	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.293.734.516,66	5.853.751.855,00	(439.982.661,66)	93,01
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	(306.345.172,66)	92,92
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.790.220,00	1.835.152.731,00	(133.637.489,00)	93,21
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.468.000,00	0,00	(24.468.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.468.000,00	0,00	(24.468.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN MERAL BARAT	4.749.445.620,48	4.561.662.062,00	(187.783.558,48)	96,05
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	4.749.445.620,48	4.561.662.062,00	(187.783.558,48)	96,05

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.740.531.620,48	4.552.762.062,00	(187.769.558,48)	96,04
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	(156.295.058,48)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.899.700,00	1.219.425.200,00	(31.474.500,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.914.000,00	8.900.000,00	(14.000,00)	99,84
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.914.000,00	8.900.000,00	(14.000,00)	99,84
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		KECAMATAN BURU	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	(468.576.480,00)	89,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	(468.576.480,00)	89,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	(468.576.480,00)	89,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	(163.434.959,00)	94,55
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.048.721,00	1.030.907.200,00	(305.141.521,00)	77,16
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN KARIMUN	8.101.232.155,42	7.491.311.504,00	(609.920.651,42)	92,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.101.232.155,42	7.491.311.504,00	(609.920.651,42)	92,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.927.711.155,42	7.343.084.204,00	(584.626.951,42)	92,63
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	(418.254.662,42)	92,82
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.105.245.734,00	1.938.873.445,00	(166.372.289,00)	92,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	173.521.000,00	148.227.300,00	(25.293.700,00)	85,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.521.000,00	148.227.300,00	(25.293.700,00)	85,42
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	(292.491.199,60)	91,44
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	(292.491.199,60)	91,44
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	(292.491.199,60)	91,44
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	(86.286.169,60)	96,69
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.138.270,00	603.933.240,00	(206.205.030,00)	74,55
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN TANJUNG BALAI	233.893.000,00	231.753.275,00	(2.139.725,00)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	233.893.000,00	231.753.275,00	(2.139.725,00)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	233.893.000,00	231.753.275,00	(2.139.725,00)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.280.000,00	111.590.300,00	(1.689.700,00)	98,51
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	120.613.000,00	120.162.975,00	(450.025,00)	99,63
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002		KELURAHAN TELUK AIR	233.481.000,00	226.225.057,00	(7.255.943,00)	96,89
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	233.481.000,00	226.225.057,00	(7.255.943,00)	96,89
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.481.000,00	226.225.057,00	(7.255.943,00)	96,89
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.901.000,00	103.151.060,00	(5.749.940,00)	94,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	124.580.000,00	123.073.997,00	(1.506.003,00)	98,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003		KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR	266.893.800,00	228.946.300,00	(37.947.500,00)	85,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	266.893.800,00	228.946.300,00	(37.947.500,00)	85,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	266.893.800,00	228.946.300,00	(37.947.500,00)	85,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.101.800,00	121.360.300,00	(4.741.500,00)	96,24

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	140.792.000,00	107.586.000,00	(33.206.000,00)	76,41
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004		KELURAHAN LUBUK SEMUT	236.307.360,00	231.813.906,00	(4.493.454,00)	98,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	236.307.360,00	231.813.906,00	(4.493.454,00)	98,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	236.307.360,00	231.813.906,00	(4.493.454,00)	98,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.555.000,00	113.130.755,00	(1.424.245,00)	98,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	121.752.360,00	118.683.151,00	(3.069.209,00)	97,48
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005		KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA	251.353.500,00	239.306.559,00	(12.046.941,00)	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	251.353.500,00	239.306.559,00	(12.046.941,00)	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	251.353.500,00	239.306.559,00	(12.046.941,00)	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.993.500,00	119.230.560,00	(11.762.940,00)	91,02
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	120.360.000,00	120.075.999,00	(284.001,00)	99,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006		KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT	244.943.600,00	242.956.700,00	(1.986.900,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	244.943.600,00	242.956.700,00	(1.986.900,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	244.943.600,00	242.956.700,00	(1.986.900,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.458.600,00	124.653.700,00	(1.804.900,00)	98,57
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	118.485.000,00	118.303.000,00	(182.000,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN MERAL	8.593.346.988,00	7.812.296.055,00	(781.050.933,00)	90,91
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.593.346.988,00	7.812.296.055,00	(781.050.933,00)	90,91
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.568.306.988,00	7.790.196.055,00	(778.110.933,00)	90,92
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	(386.322.711,00)	93,83
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.308.431.480,00	1.916.643.258,00	(391.788.222,00)	83,03
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.040.000,00	22.100.000,00	(2.940.000,00)	88,26
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.040.000,00	22.100.000,00	(2.940.000,00)	88,26
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN BELAT	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	(200.268.765,36)	84,50
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.631.732,00	318.512.632,00	(107.119.100,00)	74,83
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN UNGAR	3.477.871.053,83	3.177.856.084,00	(300.014.969,83)	91,37
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	3.477.871.053,83	3.177.856.084,00	(300.014.969,83)	91,37
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.455.129.903,83	3.177.856.084,00	(277.273.819,83)	91,98
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	(197.191.246,41)	92,93
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.578.773,42	586.496.200,00	(80.082.573,42)	87,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.741.150,00	0,00	(22.741.150,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.741.150,00	0,00	(22.741.150,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN MORO	4.491.912.260,00	3.981.601.326,00	(510.310.934,00)	88,64

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	4.491.912.260,00	3.981.601.326,00	(510.310.934,00)	88,64
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.435.546.260,00	3.981.601.326,00	(453.944.934,00)	89,77
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	(244.202.734,00)	92,54
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.404.600,00	951.662.400,00	(209.742.200,00)	81,94
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	56.366.000,00	0,00	(56.366.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.366.000,00	0,00	(56.366.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		KECAMATAN KUNDUR BARAT	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	(366.441.291,00)	93,22
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	(366.441.291,00)	93,22
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	(366.441.291,00)	93,22
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.224.502.278,00	2.990.613.978,00	(233.888.300,00)	92,75
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.201.546,00	2.051.648.555,00	(132.552.991,00)	93,93
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN TEBING	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	(404.474.571,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	(404.474.571,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	(404.474.571,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	(265.821.161,00)	94,55
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.557.493.989,00	1.418.840.579,00	(138.653.410,00)	91,10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002		KELURAHAN BARAN BARAT	286.964.354,00	46.000.000,00	(240.964.354,00)	16,03
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	286.964.354,00	46.000.000,00	(240.964.354,00)	16,03
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	286.964.354,00	46.000.000,00	(240.964.354,00)	16,03
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	46.000.000,00	(82.000.000,00)	35,94
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	158.964.354,00	0,00	(158.964.354,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003		KELURAHAN SUNGAI RAYA	247.746.000,00	37.000.000,00	(210.746.000,00)	14,93
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	5	BELANJA DAERAH	247.746.000,00	37.000.000,00	(210.746.000,00)	14,93
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	247.746.000,00	37.000.000,00	(210.746.000,00)	14,93
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	37.000.000,00	(82.000.000,00)	31,09
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	128.746.000,00	0,00	(128.746.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004		KELURAHAN BARAN TIMUR	232.946.180,00	32.000.000,00	(200.946.180,00)	13,74
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	232.946.180,00	32.000.000,00	(200.946.180,00)	13,74
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.946.180,00	32.000.000,00	(200.946.180,00)	13,74
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.349.000,00	32.000.000,00	(81.349.000,00)	28,23
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	119.597.180,00	0,00	(119.597.180,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005		KELURAHAN SUNGAI PASIR	333.574.000,00	42.000.000,00	(291.574.000,00)	12,59
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	5	BELANJA DAERAH	333.574.000,00	42.000.000,00	(291.574.000,00)	12,59
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	333.574.000,00	42.000.000,00	(291.574.000,00)	12,59
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	42.000.000,00	(88.000.000,00)	32,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	5.1.05	Belanja Hibah	203.574.000,00	0,00	(203.574.000,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006		KELURAHAN PARIT BENUT	319.030.000,00	30.000.000,00	(289.030.000,00)	9,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	5	BELANJA DAERAH	319.030.000,00	30.000.000,00	(289.030.000,00)	9,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	319.030.000,00	30.000.000,00	(289.030.000,00)	9,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	30.000.000,00	(82.000.000,00)	26,79
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	5.1.05	Belanja Hibah	207.030.000,00	0,00	(207.030.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001		KELURAHAN PASIR PANJANG	255.254.000,00	54.000.000,00	(201.254.000,00)	21,16
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	255.254.000,00	54.000.000,00	(201.254.000,00)	21,16
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	254.215.000,00	54.000.000,00	(200.215.000,00)	21,24
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.713.000,00	54.000.000,00	(80.713.000,00)	40,09
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	119.502.000,00	0,00	(119.502.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.039.000,00	0,00	(1.039.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.039.000,00	0,00	(1.039.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002		KELURAHAN DARUSSALAM	235.115.000,00	32.000.000,00	(203.115.000,00)	13,61
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	235.115.000,00	32.000.000,00	(203.115.000,00)	13,61
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.027.000,00	32.000.000,00	(200.027.000,00)	13,79
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.554.000,00	32.000.000,00	(80.554.000,00)	28,43
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	119.473.000,00	0,00	(119.473.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.088.000,00	0,00	(3.088.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.088.000,00	0,00	(3.088.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		KELURAHAN TEBING	229.769.000,00	217.501.477,00	(12.267.523,00)	94,66
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5	BELANJA DAERAH	229.769.000,00	217.501.477,00	(12.267.523,00)	94,66
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	229.769.000,00	217.501.477,00	(12.267.523,00)	94,66
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.261.000,00	111.171.480,00	(3.089.520,00)	97,30
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	115.508.000,00	106.329.997,00	(9.178.003,00)	92,05
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002		KELURAHAN TELUK UMA	269.853.000,00	263.275.100,00	(6.577.900,00)	97,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5	BELANJA DAERAH	269.853.000,00	263.275.100,00	(6.577.900,00)	97,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	269.853.000,00	263.275.100,00	(6.577.900,00)	97,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.982.000,00	115.856.000,00	(4.126.000,00)	96,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	149.871.000,00	147.419.100,00	(2.451.900,00)	98,36
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004		KELURAHAN PAMAK	260.382.950,00	193.869.265,00	(66.513.685,00)	74,46
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	5	BELANJA DAERAH	260.382.950,00	193.869.265,00	(66.513.685,00)	74,46
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	260.382.950,00	193.869.265,00	(66.513.685,00)	74,46
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.524.000,00	102.793.765,00	(6.730.235,00)	93,86
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	5.1.05	Belanja Hibah	150.858.950,00	91.075.500,00	(59.783.450,00)	60,37
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005		KELURAHAN HARJOSARI	256.837.425,00	96.012.372,00	(160.825.053,00)	37,38
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	5	BELANJA DAERAH	256.837.425,00	96.012.372,00	(160.825.053,00)	37,38

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	256.837.425,00	96.012.372,00	(160.825.053,00)	37,38
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.642.500,00	74.478.372,00	(47.164.128,00)	61,23
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	5.1.05	Belanja Hibah	135.194.925,00	21.534.000,00	(113.660.925,00)	15,93
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA	486.676.460,00	444.699.000,00	(41.977.460,00)	91,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5	BELANJA DAERAH	486.676.460,00	444.699.000,00	(41.977.460,00)	91,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	486.676.460,00	444.699.000,00	(41.977.460,00)	91,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.417.600,00	204.579.000,00	(41.838.600,00)	83,02
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1.05	Belanja Hibah	240.258.860,00	240.120.000,00	(138.860,00)	99,94
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002		KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT	447.245.780,00	423.252.000,00	(23.993.780,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	5	BELANJA DAERAH	447.245.780,00	423.252.000,00	(23.993.780,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	447.245.780,00	423.252.000,00	(23.993.780,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.383.600,00	184.587.000,00	(23.796.600,00)	88,58
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	5.1.05	Belanja Hibah	238.862.180,00	238.665.000,00	(197.180,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003		KELURAHAN GADING SARI	442.667.900,00	399.370.000,00	(43.297.900,00)	90,22
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	5	BELANJA DAERAH	442.667.900,00	399.370.000,00	(43.297.900,00)	90,22
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	442.667.900,00	399.370.000,00	(43.297.900,00)	90,22
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.198.900,00	193.860.000,00	(8.338.900,00)	95,88
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	5.1.05	Belanja Hibah	240.469.000,00	205.510.000,00	(34.959.000,00)	85,46
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001		KELURAHAN ALAI	374.605.900,00	123.128.000,00	(251.477.900,00)	32,87
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5	BELANJA DAERAH	374.605.900,00	123.128.000,00	(251.477.900,00)	32,87
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	374.605.900,00	123.128.000,00	(251.477.900,00)	32,87
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.001.900,00	59.231.000,00	(81.770.900,00)	42,01
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5.1.05	Belanja Hibah	233.604.000,00	63.897.000,00	(169.707.000,00)	27,35
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001		KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.179.500,00	113.388.009,00	(16.791.491,00)	87,10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5.1.05	Belanja Hibah	154.799.000,00	153.670.012,00	(1.128.988,00)	99,27
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001		KELURAHAN SAWANG	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,41
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,41
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,41
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.764.500,00	139.466.989,00	(2.297.511,00)	98,38
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5.1.05	Belanja Hibah	133.920.000,00	131.825.000,00	(2.095.000,00)	98,44
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001		KELURAHAN MORO	243.000.000,00	43.000.000,00	(200.000.000,00)	17,70
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	243.000.000,00	43.000.000,00	(200.000.000,00)	17,70
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	243.000.000,00	43.000.000,00	(200.000.000,00)	17,70

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.610.000,00	43.000.000,00	(80.610.000,00)	34,79
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5.1.05	Belanja Hibah	119.390.000,00	0,00	(119.390.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002		KELURAHAN MORO TIMUR	240.000.000,00	40.000.000,00	(200.000.000,00)	16,67
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	240.000.000,00	40.000.000,00	(200.000.000,00)	16,67
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	40.000.000,00	(200.000.000,00)	16,67
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.975.000,00	40.000.000,00	(80.975.000,00)	33,06
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	5.1.05	Belanja Hibah	119.025.000,00	0,00	(119.025.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001		KELURAHAN BURU	263.904.600,00	206.350.000,00	(57.554.600,00)	78,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	5	BELANJA DAERAH	263.904.600,00	206.350.000,00	(57.554.600,00)	78,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.904.600,00	206.350.000,00	(57.554.600,00)	78,19
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.177.600,00	100.660.000,00	(36.517.600,00)	73,38
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	5.1.05	Belanja Hibah	126.727.000,00	105.690.000,00	(21.037.000,00)	83,40
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002		KELURAHAN LUBUK PUDING	306.089.100,00	233.015.000,00	(73.074.100,00)	76,13
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	5	BELANJA DAERAH	306.089.100,00	233.015.000,00	(73.074.100,00)	76,13
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	306.089.100,00	233.015.000,00	(73.074.100,00)	76,13
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.057.600,00	109.755.000,00	(8.302.600,00)	92,97
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	5.1.05	Belanja Hibah	188.031.500,00	123.260.000,00	(64.771.500,00)	65,55
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001		KELURAHAN MERAL KOTA	324.751.000,00	38.000.000,00	(286.751.000,00)	11,70
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	324.751.000,00	38.000.000,00	(286.751.000,00)	11,70
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	324.751.000,00	38.000.000,00	(286.751.000,00)	11,70
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.997.000,00	38.000.000,00	(84.997.000,00)	30,90
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	201.754.000,00	0,00	(201.754.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003		KELURAHAN KAPLING	238.871.000,00	210.507.750,00	(28.363.250,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	5	BELANJA DAERAH	238.871.000,00	210.507.750,00	(28.363.250,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	238.871.000,00	210.507.750,00	(28.363.250,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	86.742.750,00	(23.257.250,00)	78,86
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	128.871.000,00	123.765.000,00	(5.106.000,00)	96,04
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		KECAMATAN SELAT GELAM	2.039.152.687,00	1.896.410.207,00	(142.742.480,00)	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	2.039.152.687,00	1.896.410.207,00	(142.742.480,00)	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.023.652.687,00	1.880.910.207,00	(142.742.480,00)	92,95
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.508.317.687,00	1.462.363.607,00	(45.954.080,00)	96,95
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.335.000,00	418.546.600,00	(96.788.400,00)	81,22
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		KECAMATAN SUGIE BESAR	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.405.391.561,00	1.265.285.257,00	(140.106.304,00)	90,03
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.001.397.861,00	898.120.257,00	(103.277.604,00)	89,69
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.993.700,00	367.165.000,00	(36.828.700,00)	90,88
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.606.000,00	17.495.000,00	(33.111.000,00)	34,57
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.606.000,00	17.495.000,00	(33.111.000,00)	34,57
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**8.240.975.104,88**	**7.480.558.415,00**	**(760.416.689,88)**	**90,77**
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.240.184.104,88	7.479.767.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.017.982.340,88	3.793.078.588,00	(224.903.752,88)	94,40
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.076.400,00	2.294.283.500,00	(270.792.900,00)	89,44
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.657.125.364,00	1.392.405.327,00	(264.720.037,00)	84,03
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	791.000,00	791.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.000,00	791.000,00	0,00	100,00
			Jumlah	**(41.664.011.572,18)**	**28.886.132.569,32**	**70.550.144.141,50**	**(69,33)**

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,63	1.317.275.580.458,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,40	372.697.795.861,97
4.1.01	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,57	271.348.014.857,95
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.857.879.083,50	132,70	1.589.732.351,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.011.080.000,00	1.560.793.169,50	154,36	1.156.235.685,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.011.080.000,00	1.560.793.169,50	154,36	1.156.235.685,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	364.920.000,00	259.073.945,00	70,99	404.135.369,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	364.920.000,00	259.073.945,00	70,99	404.135.369,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.000.000,00	21.185.694,00	141,23	12.159.506,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.000.000,00	21.185.694,00	141,23	12.159.506,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	9.000.000,00	16.826.275,00	186,95	17.201.791,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	9.000.000,00	16.826.275,00	186,95	17.201.791,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	212.000.000.000,00	221.688.350.600,00	104,56	207.713.960.295,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	205.000.000.000,00	212.093.049.600,00	103,46	195.472.098.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	205.000.000.000,00	212.093.049.600,00	103,46	195.472.098.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.000.000.000,00	6.344.501.000,00	126,89	9.234.352.195,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	5.000.000.000,00	6.344.501.000,00	126,89	9.234.352.195,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	3.250.800.000,00	162,54	3.007.510.100,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	3.250.800.000,00	162,54	3.007.510.100,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,37	11.118.164.370,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,37	11.118.164.370,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,37	11.118.164.370,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.200.000.000,00	17.120.678.553,00	186,09	12.857.938.104,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	8.884.703.272,00	98,71	12.553.748.484,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	8.884.703.272,00	98,71	12.553.748.484,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	8.235.975.281,00	4.117,98	304.189.620,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	8.235.975.281,00	4.117,98	304.189.620,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	35.255.000.000,00	41.174.359.233,59	116,79	37.896.189.718,95
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.000.000.000,00	9.412.089.917,59	134,45	7.347.748.782,95
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5.150.000.000,00	6.849.857.562,59	133,00	4.420.277.868,95
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.850.000.000,00	2.562.232.355,00	138,49	2.927.470.914,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	7.700.000.000,00	9.030.706.460,00	117,28	7.833.799.463,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	4.250.000.000,00	4.976.382.977,00	117,09	4.378.378.586,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	25.000.000,00	25.460.000,00	101,84	30.385.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	3.425.000.000,00	4.028.863.483,00	117,63	3.425.035.877,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	55.000.000,00	65.281.300,00	118,69	60.806.100,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	55.000.000,00	65.281.300,00	118,69	60.806.100,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.000.000.000,00	2.276.779.405,00	113,83	1.951.082.055,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	116.000.000,00	129.448.262,00	111,59	119.364.079,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	155.000.000,00	178.763.860,00	115,33	95.400.263,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2.500.000,00	8.386.500,00	335,46	9.651.500,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	160.000.000,00	184.117.214,00	115,07	170.377.527,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.566.500.000,00	1.773.438.570,00	113,21	1.556.288.686,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,62	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,62	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,62	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	94.967.134.236,00	84.721.337.055,50	89,21	88.757.760.425,10
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.092.134.236,00	83.955.974.655,50	89,22	87.807.160.003,10
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13.973.921.340,00	12.265.854.744,00	87,77	12.767.348.339,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	41.404.000,00	42.627.000,00	102,95	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	80.060.729.396,00	71.620.944.911,50	89,45	75.039.811.664,10
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	16.079.500,00	26.548.000,00	165,10	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00	412.024.400,00	71,65	544.918.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00	412.024.400,00	71,65	544.918.200,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	353.338.000,00	117,77	309.285.940,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	353.338.000,00	117,77	309.285.940,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	96.396.282,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	96.396.282,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	240.440.000,00	293.495.000,00	122,06	225.765.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.580.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.580.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	15.200.000,00	101,33	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	15.200.000,00	101,33	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	218.000.000,00	278.295.000,00	127,65	216.185.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	218.000.000,00	278.295.000,00	127,65	216.185.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	3.076.197.505,00	76,90	3.552.657.289,13
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	99,12	1.502.362.789,13
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	99,12	1.502.362.789,13
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	54,68	2.050.294.500,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	54,68	2.050.294.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,39	3.086.978.412,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,39	3.086.978.412,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.363.425.644,00	1.363.425.644,00	100,00	1.141.358.177,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.363.425.644,00	1.363.425.644,00	100,00	1.141.358.177,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.335.170.364,00	640.782.111,00	47,99	900.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.335.170.364,00	640.782.111,00	47,99	900.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	800.000.000,00	703.622.232,00	87,95	1.045.620.235,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	800.000.000,00	703.622.232,00	87,95	1.045.620.235,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,26	5.726.619.877,79
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	201.247.000,00	261.439.800,00	129,90	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	201.247.000,00	261.439.800,00	129,90	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	201.247.000,00	261.439.800,00	129,90	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	250.000.000,00	468.712.176,00	187,48	232.941.747,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	160.000.000,00	359.406.746,00	224,62	131.296.572,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	160.000.000,00	359.406.746,00	224,62	131.296.572,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.000.000,00	18.461.277,00	46,15	49.652.129,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.000.000,00	18.461.277,00	46,15	49.652.129,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	65.078.277,00	130,15	51.993.046,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	65.078.277,00	130,15	51.993.046,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.765.876,00	0,00	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.765.876,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	140.000.000,00	569.575.195,62	406,83	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	569.575.195,62	0,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	569.575.195,62	0,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	226.195.000,00	395.371.745,18	174,79	400.169.930,43

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	7.644.826,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	7.079.526,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	565.300,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	57.425.890,43
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	55.885.912,43
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.539.978,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.867.264,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.105.503,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	405.924,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	1.032.592,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	1.323.245,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	37.487.392,00	187,43	20.287.063,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	20.000.000,00	36.794.671,00	183,97	19.977.556,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	95.680,00	0,00	8.450,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	202.721,00	0,00	162.262,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0,00	394.320,00	0,00	138.795,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.753,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.753,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	300.000,00	413.827,00	137,94	702.022,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	300.000,00	413.827,00	137,94	702.022,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	265.800,00	88,60	473.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	265.800,00	88,60	473.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	25.301.800,00	126,50	21.299.220,00
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	20.000.000,00	25.178.200,00	125,89	19.906.220,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	123.600,00	0,00	1.345.200,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.800,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	131.835.000,00	207.067.362,00	157,06	287.936.892,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	131.835.000,00	207.067.362,00	157,06	287.936.892,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	53.760.000,00	103.160.164,18	191,89	0,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	28.000.000,00	56.878.526,18	203,13	0,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.300.000,00	1.987.431,00	152,87	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.700.000,00	17.771.017,00	100,40	0,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	3.000.000,00	12.416.936,00	413,89	0,00
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	250.000,00	826.000,00	330,40	0,00
4.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	160.000,00	279.715,00	174,82	0,00
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	250.000,00	584.362,00	233,74	0,00
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.000.000,00	1.931.524,00	193,15	0,00
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	50.000,00	6.970,00	13,94	0,00
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	550.000,00	810.250,00	147,31	0,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.500.000,00	9.662.433,00	644,16	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	21.675.400,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	21.675.400,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	164.000,00	0,00	6.795.292,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	164.000,00	0,00	6.795.292,00
4.1.04.13.01.0023	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	164.000,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	6.795.292,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	877.006.027,45	0,00	264.483.107,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	20.128.904,67	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	20.128.904,67	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	165.857.591,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	82.631.390,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	6.946.680,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	45.739.274,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	1.962.147,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	5.195.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	21.943.260,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	0,00	144.840,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.027.234,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	210.680,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	816.554,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	44.055.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	44.055.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	211.159.818,89	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	42.631.752,22	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0904	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	8.558.400,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	40.022.666,67	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.15.16.0910	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	36.702.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0911	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0912	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	53.635.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	8.660.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0940	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0945	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	375.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	149.286.029,60	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	149.286.029,60	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
4.1.04.15.34.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	18.089.947,45	0,00	18.158.022,00
4.1.04.15.61.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	337.150,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	17.752.797,45	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1.04.15.61.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	18.158.022,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	246.377.001,84	0,00	8.550.835,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	246.377.001,84	0,00	0,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.550.835,00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	8.300.340,00
4.1.04.15.84.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	8.300.340,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	21.024.500,00	0,00	226.933.910,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	21.024.500,00	0,00	226.933.910,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	61,46	1.587.245.481,81
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	61,46	1.587.245.481,81
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	558.058.428,00	217.519.505,00	38,97	259.070.719,81
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.260.000.000,00	893.874.446,00	70,94	1.328.154.134,00
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	6.036.308,00	0,00	20.628,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**414.997.456.943,00**	**404.244.487.765,50**	**97,40**	**372.697.795.861,97**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**846.376.594.728,00**	**824.878.421.171,00**	**97,45**	**944.577.784.597,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	783.645.231.000,00	752.220.082.767,00	95,98	867.763.371.421,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	807.544.910.421,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	153.600.402.410,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.140.906.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	29.244.174.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	1.047.236.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	5.511.410,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	23.387.866.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	73.589.072.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.385.496.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	12.323.159.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	3.524.170.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	3.952.812.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	445.953.309.736,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	382.827.580.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	5.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	7.637.004.736,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	27.738.015.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.602.875.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	6.347.835.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	83.656.032.600,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	1.092.489.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	10.339.458.600,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	6.657.064.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.658.092.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.042.866.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	23.917.735.000,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	10.601.269.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.685.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	823.600.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	21.838.459.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	124.335.165.675,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	45.397.857.440,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.855.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	53.393.122.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.545.712.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	6.103.506.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	1.901.452.368,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	6.780.973.317,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.448.469.450,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	527.776.900,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	3.694.389.700,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	1.046.906.500,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	101.529.744.000,00	84.501.118.200,00	83,22	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	60.350.303.000,00	47.828.063.200,00	79,25	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	17.407.876.000,00	13.640.478.100,00	78,35	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	42.942.206.000,00	32.629.080.700,00	75,98	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.558.431.400,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	221.000,00	73.000,00	33,03	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	39.313.931.000,00	34.807.545.000,00	88,53	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4.191.712.000,00	2.667.660.000,00	63,64	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	13.371.229.000,00	13.371.229.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	1.547.571.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	19.119.242.000,00	14.590.487.000,00	76,31	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.267.000,00	6.628.000,00	71,52	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	1.489.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	2.622.481.000,00	2.622.481.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,91	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	358.681.624.000,00	358.288.524.490,00	99,89	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	358.681.624.000,00	358.288.524.490,00	99,89	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	111.713.576.000,00	111.713.576.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.872.232.000,00	41.872.232.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.122.523.000,00	46.122.523.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.918.821.000,00	17.918.821.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	8.204.346.000,00	7.818.514.147,00	95,29	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	949.918.000,00	881.903.000,00	92,83	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	7.046.500.000,00	6.936.611.147,00	98,44	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	150.839.244.000,00	137.632.223.190,00	91,24	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.716.345.000,00	45.716.334.500,00	99,99	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.395.750.000,00	1.395.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.877.520.300,00	69.296.964.093,00	91,32	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	792.000.000,00	761.305.000,00	96,12	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.417.027.700,00	6.005.872.732,00	93,59	0,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.828.464.000,00	3.814.685.000,00	99,64	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	216.884.000,00	216.884.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.991.255.000,00	2.831.785.750,00	94,66	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	260.315.645,00	64,97	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	142.386.000,00	142.386.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.122.780.000,00	1.116.520.000,00	99,44	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.255.899.000,00	502.541.057,00	15,43	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.622.273.000,00	5.510.879.413,00	63,91	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**730.968.534.000,00**	**699.953.956.027,00**	**95,75**	**807.544.910.421,00**
4.2.01.05	Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,84	37.748.480.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,84	37.748.480.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,84	37.748.480.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	22.469.981.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.469.981.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.469.981.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**52.676.697.000,00**	**52.266.126.740,00**	**99,22**	**60.218.461.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	115,82	76.814.413.176,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56.910.363.728,00	71.480.578.404,00	125,60	76.814.413.176,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.910.363.728,00	71.480.578.404,00	125,60	76.814.413.176,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.769.660.988,00	8.542.179.789,00	226,60	15.965.593.454,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.066.989.536,00	6.170.294.590,00	578,29	10.791.213.685,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.822.172.205,00	39.371.432.017,00	116,40	34.475.095.550,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.454.601.016,00	1.191.346.714,00	81,90	44.765.930,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.796.939.983,00	16.205.325.294,00	96,47	15.537.744.557,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**62.731.363.728,00**	**72.658.338.404,00**	**115,82**	**76.814.413.176,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**846.376.594.728,00**	**824.878.421.171,00**	**97,45**	**944.577.784.597,00**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**2.433.092.046,78**	**0,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**2.433.092.046,78**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.261.374.051.671,00**	**1.231.556.000.983,28**	**97,63**	**1.317.275.580.458,97**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.303.038.063.243,18**	**1.202.669.868.413,96**	**92,29**	**1.334.232.948.433,47**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.082.283.388.424,77**	**1.001.939.323.828,50**	**92,57**	**1.095.223.926.705,47**
5.1.01	Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,73	552.879.729.959,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	394.084.327.549,38	382.382.922.829,00	97,03	331.290.685.368,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	294.821.584.852,54	288.401.894.437,00	97,82	248.442.702.729,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	193.395.133.762,72	190.271.832.876,00	98,38	191.625.599.534,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	101.426.451.089,82	98.130.061.561,00	96,74	56.817.103.195,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.351.474.125,87	26.420.989.399,00	96,59	23.405.336.805,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.391.074.248,46	18.069.408.300,00	98,25	18.503.269.805,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.960.399.877,41	8.351.581.099,00	93,20	4.902.067.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.857.019.494,34	5.594.685.000,00	95,52	6.444.544.950,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.857.019.494,34	5.594.685.000,00	95,52	6.444.544.950,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.952.683.236,80	13.771.371.510,00	98,70	14.631.758.450,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.834.144.708,88	13.681.626.510,00	98,89	14.606.348.450,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	118.538.527,92	89.745.000,00	75,70	25.410.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.773.672.136,04	8.412.300.596,00	95,88	5.887.170.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.544.963.247,92	2.469.087.500,00	97,01	2.612.135.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.228.708.888,12	5.943.213.096,00	95,41	3.275.035.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.191.398.633,62	16.646.962.899,00	96,83	14.238.345.409,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.607.915.447,42	10.386.186.746,00	97,90	10.768.776.159,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.583.483.186,20	6.260.776.153,00	95,09	3.469.569.250,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.786.068.176,97	1.982.545.520,00	71,15	362.767.430,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.432.182.872,99	1.807.483.586,00	74,31	362.767.430,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	353.885.303,98	175.061.934,00	49,46	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.306.031,18	4.568.137,00	72,44	3.735.055,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.866.709,26	2.558.306,00	66,16	2.645.825,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.439.321,92	2.009.831,00	82,39	1.089.230,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.851.831.568,10	18.730.667.850,00	89,82	15.826.374.555,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.917.693.472,88	12.983.351.899,00	87,03	12.914.345.522,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.934.138.095,22	5.747.315.951,00	96,85	2.912.029.033,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	629.573.389,70	604.538.788,00	96,02	511.780.358,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	404.709.386,42	390.836.717,00	96,57	392.771.913,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	224.864.003,28	213.702.071,00	95,03	119.008.445,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.862.715.904,22	1.812.398.693,00	97,29	1.536.169.627,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.204.987.050,90	1.172.568.383,00	97,30	1.178.785.526,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	657.728.853,32	639.830.310,00	97,27	357.384.101,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	227.276.928.605,40	213.357.975.072,00	93,87	123.406.819.641,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.067.267.484,48	43.844.072.666,00	95,17	65.498.971.952,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.967.477.729,13	33.849.261.439,00	94,11	56.028.997.491,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.099.789.755,35	9.994.811.227,00	98,96	9.469.974.461,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	28.982.543.924,47	27.153.885.864,20	93,69	17.177.985.924,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	28.225.947.587,63	26.443.748.308,20	93,68	16.909.648.636,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	756.596.336,84	710.137.556,00	93,85	268.337.288,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.433.066.130,00	3.230.025.873,00	94,08	5.386.550.183,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.433.066.130,00	3.230.025.873,00	94,08	5.352.364.589,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	0,00	0,00	34.185.594,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	35.423.296.225,45	32.618.953.776,80	92,08	35.343.311.582,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	33.351.692.174,43	30.610.453.794,80	91,78	34.245.543.222,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.071.604.051,02	2.008.499.982,00	96,95	1.097.768.360,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.370.754.841,00	106.511.036.892,00	93,94	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	52.596.002,00	52.077.092,00	99,01	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	9.276.802,00	9.122.483,00	98,33	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000,00	826.644,00	47,23	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.772.844.953,00	12.766.450.154,00	99,94	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	953.272.211,00	951.392.033,00	99,80	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	385.082.042,00	384.627.373,00	99,88	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	918.163.522,00	906.761.088,00	98,75	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	789.101.985,00	248.285.997,00	31,46	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	432.289.850,00	107.378.543,00	24,83	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.209.108.993,00	54.202.449.012,00	93,11	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.712.785.100,00	3.555.631.312,00	95,76	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	62.500.000,00	59.657.500,00	95,45	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	576.432.240,00	339.502.573,00	58,89	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	29.908.004.479,00	28.228.771.168,00	94,38	0,00
5.1.01.02.06.0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	4.193.046.662,00	3.996.455.420,00	95,31	0,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	394.500.000,00	701.647.500,00	177,85	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	77.655.484.804,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	6.607.877.789,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	23.292.674,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	3.575.294,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	493.310,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	5.803.242.596,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	336.449.672,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [([,PBJT],	0,00	0,00	0,00	440.824.243,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	45.169.913.900,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	45.169.913.900,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	2.353.862.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	2.353.862.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	385.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	385.500.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	127.177.786,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	127.177.786,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	12.042.473.029,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	11.859.553.029,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	182.920.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	7.699.458.700,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	0,00	0,00	7.699.458.700,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	0,00	0,00	2.688.721.600,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	0,00	0,00	0,00	2.688.721.600,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	528.000.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	528.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.491.115.360,00	13.500.526.225,00	93,16	14.956.215.185,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	670.320.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	670.320.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.277.588,00	88.758.600,00	81,22	89.134.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.277.588,00	88.758.600,00	81,22	89.134.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	117.610.080,00	97.332.480,00	82,75	98.129.100,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	117.610.080,00	97.332.480,00	82,75	98.129.100,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	59.304.000,00	57.582.000,00	97,09	57.435.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	59.304.000,00	57.582.000,00	97,09	57.435.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.006.068.000,00	974.095.500,00	96,82	971.964.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.006.068.000,00	974.095.500,00	96,82	971.964.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.168.100,00	98.109.900,00	89,05	77.617.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.168.100,00	98.109.900,00	89,05	77.617.050,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	5.292.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	5.292.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	630.000.000,00	66,66	441.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	630.000.000,00	66,66	441.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.699.200,00	232.823.597,00	88,62	99.512.244,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.699.200,00	232.823.597,00	88,62	99.512.244,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.767.288.392,00	2.496.034.148,00	90,19	2.523.578.291,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	210.000.000,00	60.506.276,00	28,81	65.564.531,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	60.000.000,00	1.381.968,00	2,30	1.378.440,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	67.288.392,00	4.145.904,00	6,16	4.135.320,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.430.000.000,00	2.430.000.000,00	100,00	2.452.500.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000,00	4.374.000.000,00	100,00	4.414.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.374.000.000,00	4.374.000.000,00	100,00	4.414.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.910.000,00	0,00	0,00	221.025.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.910.000,00	0,00	0,00	221.025.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	80,86	651.335.378,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	121.930.004,00	54.600.000,00	44,77	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	121.930.004,00	54.600.000,00	44,77	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.637.000,00	6.828.000,00	46,64	5.460.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.637.000,00	6.828.000,00	46,64	5.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	200.270.000,00	98.280.000,00	49,07	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	200.270.000,00	98.280.000,00	49,07	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.549.192,00	6.662.640,00	45,79	3.765.840,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.549.192,00	6.662.640,00	45,79	3.765.840,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.276.636,00	1.996.178,00	46,67	1.035.203,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.276.636,00	1.996.178,00	46,67	1.035.203,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	248.360,00	560,00	0,22	1.560,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	248.360,00	560,00	0,22	1.560,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.796.992,00	5.474.400,00	34,65	5.428.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.796.992,00	5.474.400,00	34,65	5.428.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	308.640,00	112.320,00	36,39	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	308.640,00	112.320,00	36,39	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	845.904,00	336.960,00	39,83	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	845.904,00	336.960,00	39,83	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.036.143.582,00	965.107.954,00	93,14	482.314.695,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	33.262.840,00	32.719.722,00	98,36	20.879.424,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	630.678.590,00	630.445.862,00	99,96	287.092.080,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	48.283.038,00	43.261.159,00	89,59	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	167.564.200,00	144.532.939,00	86,25	104.397.120,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	112.508.014,00	112.120.012,00	99,65	69.946.071,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(),PKB],	32.711.200,00	1.193.094,00	3,64	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(),BBNKB],	11.135.700,00	835.166,00	7,49	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	826.440.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	286.440.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	286.440.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	540.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	540.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.783.561.251,00	3.300.177.539,00	87,22	4.092.749.583,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.783.561.251,00	3.300.177.539,00	87,22	4.092.749.583,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.783.561.251,00	3.300.177.539,00	87,22	4.092.749.583,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34
5.1.02.01	Belanja Barang	47.611.127.680,16	36.421.770.848,00	76,49	41.185.292.986,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.563.373.680,16	36.404.454.848,00	76,53	40.722.346.986,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.416.079.000,00	1.356.938.900,00	56,16	1.265.485.373,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	78.037.000,00	47.675.800,00	61,09	3.300.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.142.223.285,88	1.989.854.848,00	63,32	7.039.479.680,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	42.676.500,00	38.994.700,00	91,37	45.523.250,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	42.421.000,00	33.470.110,00	78,89	8.312.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	82.102.612,00	55.183.098,00	67,21	159.566.108,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.508.278,00	24.573.578,00	77,99	210.994.971,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	261.451.224,00	167.217.500,00	63,95	252.450.350,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	92.810.400,00	41.749.030,00	44,98	1.038.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	101.650.000,00	101.650.000,00	100,00	102.200.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.741.900,00	16.476.900,00	72,45	3.475.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.110.000,00	655.000,00	12,81	1.546.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30.194.220,00	4.941.720,00	16,36	6.516.810,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.079.856.843,78	1.542.529.772,00	74,16	1.279.817.118,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.412.926.150,07	1.822.169.514,00	75,51	1.508.434.442,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.866.053.741,22	3.568.594.720,00	73,33	2.727.216.016,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.031.182,45	229.678.450,00	63,79	167.927.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.573.837.337,52	1.170.387.713,00	74,36	979.467.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	413.624.275,20	316.373.410,00	76,48	588.597.351,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	698.584.448,00	592.616.284,00	84,83	792.896.317,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.025.407.000,00	1.514.401.754,00	74,77	1.241.895.740,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	120.733.500,00	92.156.500,00	76,33	330.892.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	698.631.000,00	586.424.750,00	83,93	55.455.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	864.665.000,00	571.139.930,00	66,05	573.703.282,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.521.424.404,72	2.045.797.262,00	81,13	1.842.917.532,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.789.175.337,00	3.152.419.665,00	83,19	3.283.176.391,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.145.639.139,00	5.836.201.703,00	94,96	5.502.873.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	38.108.268,00	37.506.000,00	98,41	52.760.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	981.573.100,00	747.818.077,00	76,18	684.075.710,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.935.784.933,32	4.736.014.538,00	68,28	5.245.456.311,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	353.453.000,00	293.803.106,00	83,12	428.178.220,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.185.000,00	5.185.000,00	100,00	28.930.150,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.024.133.600,00	2.524.347.879,00	83,47	3.353.138.864,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	152.600.000,00	135.404.000,00	88,73	141.100.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	49.500.000,00	45.787.500,00	92,50	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	118.500.000,00	109.057.500,00	92,03	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000,00	107.392.500,00	95,46	110.700.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	479.140.000,00	394.285.137,00	82,29	124.765.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	393.301.000,00	347.581.000,00	88,37	440.086.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	47.754.000,00	17.316.000,00	36,26	462.946.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.256.000,00	5.976.000,00	29,50	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(),Home Use],	20.578.000,00	4.540.000,00	22,06	0,00
5.1.02.01.04.0295	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	0,00	0,00	0,00	283.500.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	6.920.000,00	6.800.000,00	98,26	0,00
5.1.02.01.04.0519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	179.446.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	166.611.549.632,08	148.832.922.944,50	89,32	222.696.454.701,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	109.274.881.041,32	98.050.056.048,00	89,72	170.696.096.575,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.704.031.800,00	1.990.646.800,00	73,61	2.320.297.700,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.574.000.000,00	833.250.000,00	52,93	4.593.440.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.630.900.000,00	9.460.274.625,00	98,22	21.252.797.945,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	71.970.000,00	34.300.000,00	47,65	345.650.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.350.000,00	15.150.000,00	92,66	55.950.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	693.600.000,00	655.495.000,00	94,50	531.300.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.933.850.000,00	1.866.400.000,00	96,51	17.003.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.573.208.925,00	1.331.288.925,00	51,73	5.214.133.828,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	155.550.000,00	154.028.000,00	99,02	156.648.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.588.000,00	4.440.000,00	46,30	870.210.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	100,00	1.659.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.200.000,00	19.800.000,00	98,01	30.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	25.800.000,00	25.200.000,00	97,67	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	44.000.000,00	0,00	0,00	108.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	142.080.000,00	117.040.000,00	82,37	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	225.401.000,00	167.186.000,00	74,17	447.838.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.565.453.000,00	16.380.076.750,00	93,25	59.313.368.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	86.400.000,00	68.400.000,00	79,16	1.150.750.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.161.774.000,00	10.203.012.000,00	91,41	14.596.020.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.558.150.000,00	2.123.169.140,00	82,99	2.948.544.045,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.619.440.000,00	18.151.477.137,00	97,48	10.959.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	805.750.000,00	690.870.000,00	85,74	939.785.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	541.675.000,00	508.224.958,00	93,82	941.350.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	161.050.000,00	88.950.000,00	55,23	225.500.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	26.640.000,00	26.640.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.228.180.000,00	1.044.480.000,00	85,04	1.218.601.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	14.275.000,00	14.275.000,00	100,00	4.125.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	122.820.000,00	122.820.000,00	100,00	208.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	14.400.000,00	11.625.000,00	80,72	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	36.587.500,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	47.250.000,00	20.463.800,00	43,30	1.551.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.468.680.000,00	2.989.678.838,00	86,19	2.254.302.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	52.020.000,00	52.020.000,00	100,00	288.750.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	46.400.000,00	20.016.200,00	43,13	42.087.685,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	475.192.800,02	384.953.500,00	81,00	420.551.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.989.464.791,80	15.489.088.826,00	91,16	15.828.910.684,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.037.525.000,00	853.965.000,00	82,30	738.760.200,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.410.858.150,00	1.908.332.758,00	79,15	2.464.475.361,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	424.738.000,00	357.704.370,00	84,21	228.708.610,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	35.291.336,00	14.267.892,00	40,42	8.856.667,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	261.980.000,00	100.002.290,00	38,17	78.243.250,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.623.092.238,50	3.880.928.239,00	83,94	1.015.291.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	158.412.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	450.000.000,00	83.600.000,00	18,57	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.020.402.000,00	3.685.045.000,00	91,65	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	522.240.000,00	418.260.000,00	80,08	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.409.204.183,60	30.697.100.725,00	91,88	20.306.875.806,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	888.782.544,00	781.651.360,00	87,94	750.727.200,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.368.037.098,60	24.549.735.000,00	93,10	14.845.130.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.762.816.000,00	2.384.998.000,00	86,32	1.914.833.200,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.971.506.550,00	2.698.076.336,00	90,79	2.325.687.250,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	185.363.759,00	130.117.297,00	70,19	230.781.096,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	211.298.232,00	152.123.971,00	71,99	239.717.060,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	6.400.000,00	398.761,00	6,23	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	22.500.000,00	22.110.000,00	98,26	22.110.000,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	7.500.000,00	7.370.000,00	98,26	7.370.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	15.000.000,00	14.740.000,00	98,26	14.740.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.358.727.831,00	3.496.929.457,00	80,22	6.928.700.946,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	150.042.681,00	147.741.000,00	98,46	576.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	376.624.000,00	314.612.062,00	83,53	400.959.615,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	135.050.000,00	85.648.500,00	63,41	73.750.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	493.415.000,00	439.971.000,00	89,16	449.779.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	31.250.000,00	25.501.595,00	81,60	28.928.500,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	248.000.000,00	44.000.000,00	17,74	491.395.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.718.500.650,00	1.398.279.800,00	81,36	3.185.532.310,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	798.603.000,00	708.033.000,00	88,65	724.575.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	477.183.171,00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	141.392.500,00	96.530.000,00	68,27	326.124.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	120.440.000,00	100.590.500,00	83,51	67.884.350,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	90.660.000,00	90.632.000,00	99,96	90.590.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	990.000,00	9,56	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.961.661.200,00	2.603.158.100,00	87,89	2.772.243.440,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	755.000.000,00	739.754.100,00	97,98	654.645.440,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	105.000.000,00	83.000.000,00	79,04	101.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.200.000,00	46.600.000,00	46,97	84.500.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	28.560.000,00	21.096.000,00	73,86	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	133.200.000,00
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	64.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	495.000.000,00	491.500.000,00	99,29	436.590.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.326.401.200,00	1.084.208.000,00	81,74	1.248.808.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	58.500.000,00	43.000.000,00	73,50	49.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.686.757.034,16	9.761.800.740,50	83,52	17.902.479.679,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	431.149.539,00	423.781.539,00	98,29	388.905.552,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.896.317.649,10	1.471.890.872,50	77,61	4.087.741.564,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	689.376.936,85	556.862.353,00	80,77	74.549.600,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	328.242.791,80	287.946.084,00	87,72	767.881.496,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	336.633.845,50	264.056.700,00	78,44	532.881.433,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.445.192.825,20	2.434.100.494,00	99,54	5.600.972.628,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	812.287.000,00	362.237.000,00	44,59	1.424.371.092,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	662.763.018,00	364.153.360,00	54,94	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	159.807.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.874.811.595,26	2.743.380.088,00	95,42	1.630.930.110,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	615.288.833,45	431.867.050,00	70,18	2.362.794.204,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	112.644.000,00	109.772.200,00	97,45	0,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	103.485.000,00	13.500.000,00	13,04	24.300.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	298.564.000,00	298.253.000,00	99,89	847.345.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.341.606.342,00	1.158.845.174,00	86,37	283.574.255,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	285.000.000,00	283.200.000,00	99,36	0,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	89.574.255,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	175.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	70.000.000,00	69.832.000,00	99,76	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	811.606.342,00	805.813.174,00	99,28	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.954.860.000,00	2.448.471.200,00	82,86	3.070.136.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.515.220.000,00	1.405.513.000,00	92,75	1.381.647.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	125.495.000,00	17.350.000,00	13,82	59.470.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.314.145.000,00	1.025.608.200,00	78,04	1.606.074.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	22.945.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	446.352.000,00	439.653.000,00	98,49	529.338.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	406.131.000,00	406.122.000,00	99,99	510.419.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.366.000,00	27.366.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.855.000,00	6.165.000,00	47,95	18.919.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.798.500,00	99,42	34.900.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	35.000.000,00	34.798.500,00	99,42	34.900.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.882.148.875,05	6.987.459.883,00	78,66	32.629.479.951,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	180.000.000,00	179.870.000,00	99,92	83.696.775,00
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	180.000.000,00	179.870.000,00	99,92	83.696.775,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.469.852.180,05	1.600.061.444,00	64,78	2.094.191.650,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	115.720.000,00	115.596.000,00	99,89	12.930.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	523.800.000,00	316.532.865,00	60,43	169.977.600,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	181.385.000,00	77.244.000,00	42,58	111.605.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.140.000,00	5.462.242,00	76,50	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	501.309.000,00	320.338.508,00	63,90	566.251.550,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	161.920.000,00	0,00	0,00	380.202.500,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	178.687.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	121.200.000,00	112.400.000,00	92,73	74.121.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	349.838.500,00	286.582.297,00	81,91	167.441.500,00
5.1.02.03.02.0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	50.000.000,00	49.850.000,00	99,70	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	88.399.680,05	85.399.680,00	96,60	205.680.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	129.940.000,00	88.983.059,00	68,48	43.519.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	113.850.000,00	79.162.793,00	69,53	39.250.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	52.680.000,00	29.515.000,00	56,02	81.396.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.370.000,00	32.995.000,00	72,72	54.630.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.705.467.695,00	5.138.258.439,00	90,05	29.948.343.475,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	247.512.000,00	209.181.081,00	84,51	82.424.050,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.971.250.195,00	4.790.277.358,00	96,35	8.404.465.400,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	347.450.000,00	0,00	0,00	20.941.066.025,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	7.890.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	512.498.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	139.255.500,00	138.800.000,00	99,67	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	457.329.000,00	0,00	0,00	497.420.551,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	307.329.000,00	0,00	0,00	497.420.551,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	69.500.000,00	69.270.000,00	99,66	5.827.500,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	19.770.000,00	98,85	5.827.500,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.811.827.315,10	23.621.407.498,00	79,23	24.188.450.919,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.811.827.315,10	23.621.407.498,00	79,23	24.188.450.919,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.529.550.617,00	17.225.888.733,00	83,90	18.864.151.669,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.206.774.198,10	6.331.796.265,00	68,77	5.124.009.550,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.502.500,00	63.722.500,00	84,39	200.289.700,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.782.100.500,00	2.635.708.000,00	94,73	1.129.100.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.746.100.500,00	2.622.908.000,00	95,51	1.087.100.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.497.600.500,00	1.403.408.000,00	93,71	1.087.100.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	564.000.000,00	546.000.000,00	96,80	0,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	173.000.000,00	171.000.000,00	98,84	0,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	339.000.000,00	330.000.000,00	97,34	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	12.800.000,00	35,55	42.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.000.000,00	12.800.000,00	80,00	12.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.219.256.187,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.219.256.187,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.219.256.187,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.836.237.860,00	27.831.318.264,00	99,98	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	27.446.840.860,00	27.441.921.264,00	99,98	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	26.348.090.860,00	26.343.171.264,00	99,98	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.098.750.000,00	1.098.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	389.397.000,00	389.397.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	374.397.000,00	374.397.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.014.148.080,00	6.132.529.719,00	76,52	6.036.750.527,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.014.148.080,00	6.132.529.719,00	76,52	6.036.750.527,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.014.148.080,00	6.132.529.719,00	76,52	6.036.750.527,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.925.413.249,00	83.851.890.837,00	98,73	84.415.445.840,34
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.925.413.249,00	83.851.890.837,00	98,73	84.415.445.840,34
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.925.413.249,00	83.851.890.837,00	98,73	84.415.445.840,34
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.533.668.712,50	16.317.818.000,00	75,77	45.492.421.996,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	80,00	32.285.571.500,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	80,00	32.285.571.500,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	19.533.668.712,50	14.717.818.000,00	75,34	13.206.850.496,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	19.533.668.712,50	14.717.818.000,00	75,34	13.206.850.496,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.299.792.081,10	26.072.083.631,00	78,29	48.011.901.117,13
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.199.175.000,00	3.772.681.000,00	89,84	5.694.920.581,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.587.700.000,00	3.350.000.000,00	93,37	5.385.240.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	611.475.000,00	422.681.000,00	69,12	309.680.581,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.800.611.531,00	7.596.581.348,00	86,31	8.195.003.377,13
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.250.000.000,00	1.000.000.000,00	80,00	180.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.550.611.531,00	6.596.581.348,00	87,36	8.015.003.377,13
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.250.005.550,10	14.652.821.283,00	72,35	34.121.977.159,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.534.904.000,00	4.514.865.000,00	99,55	5.586.296.200,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.715.101.550,10	10.137.956.283,00	64,51	28.535.680.959,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.843.560.000,00	4.843.558.200,00	99,99	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.664.810.000,00	4.664.808.200,00	99,99	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.664.810.000,00	4.664.808.200,00	99,99	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	178.750.000,00	178.750.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	178.750.000,00	178.750.000,00	100,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	919.425.364,00	842.405.327,00	91,62	537.523.433,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	919.425.364,00	842.405.327,00	91,62	537.523.433,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	919.425.364,00	842.405.327,00	91,62	537.523.433,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	7.764.773.398,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	7.764.773.398,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	7.764.773.398,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.082.283.388.424,77**	**1.001.939.323.828,50**	**92,57**	**1.095.223.926.705,47**
5.2	**BELANJA MODAL**	**119.311.487.550,09**	**105.057.610.836,46**	**88,05**	**147.598.573.750,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.848.650.000,00	1.811.760.000,00	98,00	407.602.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.794.000.000,00	1.792.000.000,00	99,88	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.794.000.000,00	1.792.000.000,00	99,88	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	54.650.000,00	19.760.000,00	36,15	407.602.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	54.650.000,00	19.760.000,00	36,15	8.726.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	398.876.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.323.542.500,00	4.203.715.056,00	97,22	1.508.498.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.323.542.500,00	4.203.715.056,00	97,22	1.508.498.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.092.600.000,00	1.981.075.056,00	94,67	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.230.942.500,00	2.222.640.000,00	99,62	167.398.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	698.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	506.431.460,00	490.500.000,00	96,85	28.580.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	489.144.460,00	485.000.000,00	99,15	22.280.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	489.144.460,00	485.000.000,00	99,15	22.280.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	17.287.000,00	5.500.000,00	31,81	6.300.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	17.287.000,00	5.500.000,00	31,81	6.300.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	803.814.120,00	799.200.000,00	99,42	99.600.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	803.814.120,00	799.200.000,00	99,42	99.600.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	803.814.120,00	799.200.000,00	99,42	99.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.515.576.540,00	5.064.411.596,00	53,22	4.941.000.620,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.574.645.290,00	1.339.418.439,00	85,06	708.654.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.574.645.290,00	1.339.418.439,00	85,06	703.104.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.521.376.090,00	3.611.540.857,00	48,01	4.106.708.720,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.825.283.000,00	2.991.469.707,00	43,82	3.316.550.510,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.298.550,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	352.348.590,00	301.201.600,00	85,48	267.116.060,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.912.000,00	14.097.000,00	78,70	6.685.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.228.500,00	180.114.000,00	89,95	511.058.600,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	125.604.000,00	124.658.550,00	99,24	3.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	419.555.160,00	113.452.300,00	27,04	125.637.900,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	189.340.020,00	29.855.300,00	15,76	44.137.900,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	145.402.140,00	6.000.000,00	4,12	3.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	79.920.000,00	72.927.000,00	91,25	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.893.000,00	4.670.000,00	95,44	78.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	238.027.000,00	164.655.300,00	69,17	666.691.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	163.303.000,00	95.805.300,00	58,66	614.991.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.731.000,00	8.841.000,00	47,19	497.075.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	24.050.000,00	68,71	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	109.572.000,00	62.914.300,00	57,41	117.916.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	74.724.000,00	68.850.000,00	92,13	51.700.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	74.724.000,00	68.850.000,00	92,13	0,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.044.577.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	4.044.577.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	253.850.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	1.130.000.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	2.658.092.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	332.035.000,00	327.957.000,00	98,77	360.993.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	34.144.000,00	34.133.000,00	99,96	306.107.000,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	138.938.000,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	119.313.000,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	47.856.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	34.144.000,00	34.133.000,00	99,96	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	297.891.000,00	293.824.000,00	98,63	54.886.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	297.891.000,00	293.824.000,00	98,63	54.886.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.931.433.000,00	1.082.753.100,00	56,05	1.962.775.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.453.168.000,00	888.806.200,00	61,16	1.560.077.300,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.453.168.000,00	888.806.200,00	61,16	1.560.077.300,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	478.265.000,00	193.946.900,00	40,55	402.698.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	478.265.000,00	193.946.900,00	40,55	346.458.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	490.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.476.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	7.476.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	3.324.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	4.152.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.071.000,00	3.500.000,00	28,99	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.071.000,00	3.500.000,00	28,99	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	8.566.000,00	3.500.000,00	40,85	0,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.581.679.509,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.581.679.509,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.581.679.509,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.179.671.950,00	6.176.171.950,00	99,94	760.000.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	6.112.356.950,00	6.108.856.950,00	99,94	760.000.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	6.112.356.950,00	6.108.856.950,00	99,94	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	67.315.000,00	67.315.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	67.315.000,00	67.315.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	95,76	2.320.165.469,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	95,76	2.320.165.469,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	95,76	2.320.165.469,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,97	33.452.111.359,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.226.113.909,62	36.471.902.583,46	97,97	33.140.865.126,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.873.276.206,20	36.119.216.583,46	97,95	32.946.204.015,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.580.756.704,00	18.572.612.134,00	99,95	9.451.211.865,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	99,98	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	721.590.000,00	718.600.000,00	99,58	1.499.294.262,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	193.672.000,00	193.672.000,00	100,00	1.651.534.087,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	186.807.000,00	186.807.000,00	100,00	4.265.429.736,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.072.330.450,00	7.949.720.873,63	98,48	13.008.765.813,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	159.915.000,00	69.915.000,00	43,72	161.508.121,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	687.068.142,26	687.067.003,00	99,99	179.615.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	1.089.480.545,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	362.967.000,00	184.332.000,00	50,78	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	926.072.809,94	759.885.600,00	82,05	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	374.830.000,00	190.000.000,00	50,68	99.666.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	1.539.698.586,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	352.837.703,42	352.686.000,00	99,95	194.661.111,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	352.837.703,42	352.686.000,00	99,95	194.661.111,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	261.446.233,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	261.446.233,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	261.446.233,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.928.400,00	99,85	49.800.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.928.400,00	99,85	49.800.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.928.400,00	99,85	49.800.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,40	85.742.815.793,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.766.920.180,47	32.861.479.692,00	84,76	78.484.245.792,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	38.766.920.180,47	32.861.479.692,00	84,76	78.121.044.792,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	38.766.920.180,47	32.861.479.692,00	84,76	78.121.044.792,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	363.201.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	363.201.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.625.760.600,00	2.274.849.100,00	62,74	6.735.673.001,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.625.760.600,00	2.274.849.100,00	62,74	6.648.249.001,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	986.273.000,00	818.600.000,00	82,99	3.108.831.201,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	55,17	3.539.417.800,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	87.424.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	87.424.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	920.649.600,00	557.145.500,00	60,51	522.897.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	920.649.600,00	557.145.500,00	60,51	522.897.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	920.649.600,00	557.145.500,00	60,51	522.897.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,94	6.299.584.700,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.262.000,00	41.112.000,00	92,88	225.962.300,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	44.262.000,00	41.112.000,00	92,88	225.962.300,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	38.400.000,00	35.250.000,00	91,79	202.164.600,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	4.387.500,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	5.862.000,00	5.862.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	7.568.500,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	4.164.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	4.834.700,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	724.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	2.119.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	144.966.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	144.966.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	144.966.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.928.656.400,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.928.656.400,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.928.656.400,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.713.115.190,00	5.713.115.190,00	100,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.643.487.190,00	5.643.487.190,00	100,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.643.487.190,00	5.643.487.190,00	100,00	0,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	69.628.000,00	69.628.000,00	100,00	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	69.628.000,00	69.628.000,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,24	419.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,24	419.500.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,24	419.500.000,00
5.2.06.01.01.0001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Goodwill	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	978.103.000,00	935.805.520,00	95,67	220.300.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	149.200.000,00	149.200.000,00	100,00	144.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**119.311.487.550,09**	**105.057.610.836,46**	**88,05**	**147.598.573.750,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.989.018.533,34**	**1.572.746.671,00**	**52,61**	**697.401.200,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,61	697.401.200,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,61	697.401.200,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,61	697.401.200,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,61	697.401.200,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.989.018.533,34**	**1.572.746.671,00**	**52,61**	**697.401.200,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**98.454.168.734,98**	**94.100.187.078,00**	**95,57**	**90.713.046.778,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,57	88.613.046.778,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,57	88.363.046.778,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,57	88.363.046.778,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,57	88.363.046.778,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**98.454.168.734,98**	**94.100.187.078,00**	**95,57**	**90.713.046.778,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.303.038.063.243,18**	**1.202.669.868.413,96**	**92,29**	**1.334.232.948.433,47**
	SURPLUS/DEFISIT	**(41.664.011.572,18)**	**28.886.132.569,32**	**(69,33)**	**(16.957.367.974,50)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**41.664.011.572,18**	**41.755.490.538,18**	**100,21**	**61.121.379.546,68**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**44.164.011.572,18**	**44.255.490.538,18**	**100,20**	**61.121.379.546,68**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	100,00	61.037.956.210,68
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	16.658.026,72	16.658.026,72	100,00	(88.365.716.270,64)
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	19.931.451.315,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	458.866.089,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	477.908.683,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	139.665.752,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	275.918.282,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	251.519.618,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	18.474.000,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	22.625.014,00
6.1.01.01.01.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	15.236.125.000,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	501.390.178,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	2.548.942.699,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	(4.067.580.143,10)
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	(3.433.513.427,10)
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	(48.870.000,00)
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	(585.196.716,00)
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	(275.447.305,00)
6.1.01.01.03.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	0,00	0,00	0,00	124.519.096,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	(399.966.401,00)
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	16.658.026,72	16.658.026,72	100,00	(103.954.140.137,54)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	897.054,00	897.054,00	100,00	(753.884.110,00)
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	446.830.326,00
6.1.01.01.04.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.760.972,72	15.760.972,72	100,00	(56.722.575.037,09)
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	525.602.891,82
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	(20.220.517.544,46)
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	(27.129.596.663,81)
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	(70.737.345.913,00)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	(67.566.862.678,00)
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	(7.184.497.590,00)
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	(7.872.011.266,00)
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	(66.834.395,00)
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	4.073.605,00
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	0,00	0,00	0,00	(108.414.039.115,00)
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	0,00	0,00	0,00	51.071.866.448,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.943.082.813,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	0,00	0,00	0,00	10.793.834.957,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	(4.338.179.225,00)
6.1.01.02.01.0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	895.104,00
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	4.474.842.000,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	0,00	0,00	468.733.545,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	(260.471.364,00)
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	(1.309.000,00)
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	(515.496.026,00)
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	(346.399.600,00)
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	(280.304.225,00)
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	(305.483.643,00)
6.1.01.02.01.0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	(418.313.012,00)
6.1.01.02.01.0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	(212.214.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	(895.490.445,00)
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	(493.101.000,00)
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	845.848.000,00
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	(63.355.000,00)
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	(441.348.000,00)
6.1.01.02.01.0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	(4.452.946.300,00)
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	0,00	0,00	(1.173.383.234,00)
6.1.01.02.01.0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa	0,00	0,00	0,00	1.256.778.000,00
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	(79.635.000,00)
6.1.01.02.01.0107	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	(2.850.500,00)
6.1.01.02.01.0111	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	(1.572.199.120,00)
6.1.01.02.01.0116	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	(22.962.690,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.01.02.01.0118	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	(13.993.400,00)
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	0,00	0,00	(3.170.483.235,00)
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	(3.170.483.235,00)
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	(1.463.440.161,00)
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	(650.000.000,00)
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	(650.000.000,00)
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	(813.440.161,00)
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	(813.440.161,00)
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	114.926.477,32
6.1.01.04.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	114.926.477,32
6.1.01.04.04.0010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	114.926.477,32
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	220.489.532.078,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	171.343.187.841,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	32.822.305.770,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	0,00	0,00	72.799.301.932,00
6.1.01.05.01.0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	6.247.843,00
6.1.01.05.01.0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	65.570.588.546,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	144.743.750,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	46.487.838.575,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	0,00	0,00	265.070.200,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	0,00	0,00	5.695.298.792,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	18.909.077.694,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	21.147.836.589,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	470.555.300,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	558.505.662,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	558.505.662,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	44.147.353.545,46	44.147.353.545,46	100,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	41.035.951.257,08	41.035.951.257,08	100,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	41.035.951.257,08	41.035.951.257,08	100,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	8.701,38	8.701,38	100,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	8.701,38	8.701,38	100,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	3.111.393.587,00	3.111.393.587,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	3.111.393.587,00	3.111.393.587,00	100,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**44.164.011.572,18**	**44.255.490.538,18**	**100,20**	**61.121.379.546,68**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**41.664.011.572,18**	**41.755.490.538,18**	**100,21**	**61.121.379.546,68**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**70.641.623.107,50**	**0,00**	**44.164.011.572,18**

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301.202.845.458,00	290.600.873.998,00	(10.601.971.460,00)	96,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	73.736.000,00	61.158.400,00	(12.577.600,00)	82,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.868.000,00	9.867.200,00	(800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.868.000,00	9.867.200,00	(800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.868.000,00	9.867.200,00	(800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	32.368.000,00	30.431.600,00	(1.936.400,00)	94,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.368.000,00	30.431.600,00	(1.936.400,00)	94,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.368.000,00	30.431.600,00	(1.936.400,00)	94,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.500.000,00	20.859.600,00	(10.640.400,00)	66,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	20.859.600,00	(10.640.400,00)	66,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	20.859.600,00	(10.640.400,00)	66,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	290.551.151.760,00	280.816.589.609,00	(9.734.562.151,00)	96,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	290.487.398.760,00	280.752.836.609,00	(9.734.562.151,00)	96,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	290.487.398.760,00	280.752.836.609,00	(9.734.562.151,00)	96,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	290.487.398.760,00	280.752.836.609,00	(9.734.562.151,00)	96,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	63.753.000,00	63.753.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.753.000,00	63.753.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.753.000,00	63.753.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	89.661.000,00	0,00	(89.661.000,00)	0	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	89.661.000,00	0,00	(89.661.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.661.000,00	0,00	(89.661.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.661.000,00	0,00	(89.661.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	260.670.000,00	252.756.489,00	(7.913.511,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.668.000,00	47.030.700,00	(637.300,00)	98,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	47.668.000,00	47.030.700,00	(637.300,00)	98,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.668.000,00	47.030.700,00	(637.300,00)	98,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000,00	45.590.000,00	(4.410.000,00)	91,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.590.000,00	(4.410.000,00)	91,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.590.000,00	(4.410.000,00)	91,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53.700.000,00	51.100.000,00	(2.600.000,00)	95,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	51.100.000,00	(2.600.000,00)	95,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	51.100.000,00	(2.600.000,00)	95,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	109.302.000,00	109.035.789,00	(266.211,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.302.000,00	109.035.789,00	(266.211,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.302.000,00	109.035.789,00	(266.211,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.197.636.698,00	9.470.369.500,00	(727.267.198,00)	92,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.586.698,00	14.469.500,00	(7.117.198,00)	67,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.778.698,00	13.661.500,00	(7.117.198,00)	65,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.778.698,00	13.661.500,00	(7.117.198,00)	65,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	808.000,00	808.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	808.000,00	808.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	10.176.050.000,00	9.455.900.000,00	(720.150.000,00)	92,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.176.050.000,00	9.455.900.000,00	(720.150.000,00)	92,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.050.000,00	9.455.900.000,00	(720.150.000,00)	92,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.990.000,00	0,00	(29.990.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	29.990.000,00	0,00	(29.990.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.990.000,00	0,00	(29.990.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.990.000,00	0,00	(29.990.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.620.774.626,00	80.128.190.878,63	(5.492.583.747,37)	93,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	42.054.768.220,00	40.333.400.856,00	(1.721.367.364,00)	95,9	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	808.240.000,00	789.288.500,00	(18.951.500,00)	97,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.240.000,00	74.347.500,00	(13.892.500,00)	84,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.240.000,00	74.347.500,00	(13.892.500,00)	84,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	720.000.000,00	714.941.000,00	(5.059.000,00)	99,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	720.000.000,00	714.941.000,00	(5.059.000,00)	99,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	416.800.000,00	415.161.500,00	(1.638.500,00)	99,6	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	56.800.000,00	55.927.500,00	(872.500,00)	98,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	55.927.500,00	(872.500,00)	98,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	360.000.000,00	359.234.000,00	(766.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.000.000,00	359.234.000,00	(766.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	2.372.060.000,00	2.313.001.182,00	(59.058.818,00)	97,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	635.240.000,00	610.598.752,00	(24.641.248,00)	96,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.765.000,00	277.478.752,00	(16.286.248,00)	94,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	341.475.000,00	333.120.000,00	(8.355.000,00)	97,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.736.820.000,00	1.702.402.430,00	(34.417.570,00)	98,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.736.820.000,00	1.702.402.430,00	(34.417.570,00)	98,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	400.520.000,00	386.267.000,00	(14.253.000,00)	96,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	400.520.000,00	386.267.000,00	(14.253.000,00)	96,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.520.000,00	386.267.000,00	(14.253.000,00)	96,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.620.261.000,00	526.132.707,00	(1.094.128.293,00)	32,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	208.495.000,00	17.166.200,00	(191.328.800,00)	8,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.495.000,00	17.166.200,00	(11.328.800,00)	60,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.411.766.000,00	508.966.507,00	(902.799.493,00)	36,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.411.766.000,00	508.966.507,00	(902.799.493,00)	36,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	182.117.000,00	170.762.750,00	(11.354.250,00)	93,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	182.117.000,00	170.762.750,00	(11.354.250,00)	93,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.117.000,00	170.762.750,00	(11.354.250,00)	93,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	96.664.000,00	95.155.000,00	(1.509.000,00)	98,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	96.664.000,00	95.155.000,00	(1.509.000,00)	98,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.664.000,00	95.155.000,00	(1.509.000,00)	98,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	60.664.000,00	60.253.000,00	(411.000,00)	99,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	60.664.000,00	60.253.000,00	(411.000,00)	99,32	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.664.000,00	60.253.000,00	(411.000,00)	99,32	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	151.239.000,00	143.745.817,00	(7.493.183,00)	95,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	151.239.000,00	143.745.817,00	(7.493.183,00)	95,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.239.000,00	143.745.817,00	(7.493.183,00)	95,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	30.252.945.000,00	30.252.943.200,00	(1.800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	22.195.091.150,00	22.195.089.350,00	(1.800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.530.281.150,00	17.530.281.150,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	4.664.810.000,00	4.664.808.200,00	(1.800,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	8.057.853.850,00	8.057.853.850,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.998.394.250,00	3.998.394.250,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.059.459.600,00	4.059.459.600,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	211.962.000,00	188.865.580,00	(23.096.420,00)	89,1	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	211.962.000,00	188.865.580,00	(23.096.420,00)	89,1	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.962.000,00	188.865.580,00	(23.096.420,00)	89,1	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	846.210.000,00	800.758.000,00	(45.452.000,00)	94,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	126.210.000,00	84.780.000,00	(41.430.000,00)	67,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.210.000,00	84.780.000,00	(41.430.000,00)	67,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	720.000.000,00	715.978.000,00	(4.022.000,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	720.000.000,00	715.978.000,00	(4.022.000,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	106.885.000,00	0,00	(106.885.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	106.885.000,00	0,00	(106.885.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.885.000,00	0,00	(106.885.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	115.756.000,00	112.113.100,00	(3.642.900,00)	96,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	60.756.000,00	58.267.000,00	(2.489.000,00)	95,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.756.000,00	58.267.000,00	(2.489.000,00)	95,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	53.846.100,00	(1.153.900,00)	97,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	53.846.100,00	(1.153.900,00)	97,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	81.410.000,00	61.569.000,00	(19.841.000,00)	75,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	81.410.000,00	61.569.000,00	(19.841.000,00)	75,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.410.000,00	61.569.000,00	(19.841.000,00)	75,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.867.322.000,00	1.838.737.800,00	(28.584.200,00)	98,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.867.322.000,00	1.838.737.800,00	(28.584.200,00)	98,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.867.322.000,00	1.838.737.800,00	(28.584.200,00)	98,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
1				2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	(Rp) 5	(%) 6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	178.276.000,00	155.168.322,00	(23.107.678,00)	87,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	178.276.000,00	155.168.322,00	(23.107.678,00)	87,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.276.000,00	155.168.322,00	(23.107.678,00)	87,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.780.217.220,00	1.747.106.578,00	(33.110.642,00)	98,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	1.780.217.220,00	1.747.106.578,00	(33.110.642,00)	98,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.217.220,00	1.657.545.578,00	(32.671.642,00)	98,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.05	Belanja Hibah	90.000.000,00	89.561.000,00	(439.000,00)	99,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH	48.820.000,00	28.099.420,00	(20.720.580,00)	57,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	48.820.000,00	28.099.420,00	(20.720.580,00)	57,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.820.000,00	28.099.420,00	(20.720.580,00)	57,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	448.926.000,00	240.798.400,00	(208.127.600,00)	53,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	998.000,00	798.400,00	(199.600,00)	80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.000,00	798.400,00	(199.600,00)	80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	447.928.000,00	240.000.000,00	(207.928.000,00)	53,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.928.000,00	0,00	(207.928.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	30.911.765.726,00	27.384.062.035,63	(3.527.703.690,37)	88,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	429.335.000,00	415.960.000,00	(13.375.000,00)	96,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.350.000,00	28.976.000,00	(12.374.000,00)	70,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.350.000,00	28.976.000,00	(12.374.000,00)	70,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	387.985.000,00	386.984.000,00	(1.001.000,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.985.000,00	386.984.000,00	(1.001.000,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	210.350.000,00	199.670.000,00	(10.680.000,00)	94,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	10.201.000,00	(10.149.000,00)	50,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	10.201.000,00	(10.149.000,00)	50,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	189.469.000,00	(531.000,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	189.469.000,00	(531.000,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	219.025.000,00	213.207.000,00	(5.818.000,00)	97,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.025.000,00	15.215.000,00	(4.810.000,00)	75,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.025.000,00	15.215.000,00	(4.810.000,00)	75,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	199.000.000,00	197.992.000,00	(1.008.000,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	197.992.000,00	(1.008.000,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	248.971.906,00	234.169.906,00	(14.802.000,00)	94,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.991.906,00	55.189.906,00	(14.802.000,00)	78,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.991.906,00	55.189.906,00	(14.802.000,00)	78,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	178.980.000,00	178.980.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.980.000,00	178.980.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS	2.281.449.781,00	2.194.428.654,63	(87.021.126,37)	96,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	865.490.781,00	843.291.781,00	(22.199.000,00)	97,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.807.781,00	162.108.781,00	(20.699.000,00)	88,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	682.683.000,00	681.183.000,00	(1.500.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.415.959.000,00	1.351.136.873,63	(64.822.126,37)	95,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.415.959.000,00	1.351.136.873,63	(64.822.126,37)	95,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.717.299.629,00	1.552.360.829,00	(164.938.800,00)	90,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.717.299.629,00	1.552.360.829,00	(164.938.800,00)	90,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.717.299.629,00	1.552.360.829,00	(164.938.800,00)	90,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	219.919.800,00	217.370.000,00	(2.549.800,00)	98,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	219.919.800,00	217.370.000,00	(2.549.800,00)	98,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.919.800,00	217.370.000,00	(2.549.800,00)	98,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	399.475.000,00	397.209.000,00	(2.266.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	399.475.000,00	397.209.000,00	(2.266.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.475.000,00	397.209.000,00	(2.266.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	169.350.000,00	165.557.000,00	(3.793.000,00)	97,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	169.350.000,00	165.557.000,00	(3.793.000,00)	97,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.350.000,00	165.557.000,00	(3.793.000,00)	97,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0023		REHABILITASI SEDANG/BERAT KANTIN SEKOLAH	268.789.000,00	263.358.000,00	(5.431.000,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	268.789.000,00	263.358.000,00	(5.431.000,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.789.000,00	263.358.000,00	(5.431.000,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	448.117.110,00	441.268.910,00	(6.848.200,00)	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	448.117.110,00	441.268.910,00	(6.848.200,00)	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.117.110,00	441.268.910,00	(6.848.200,00)	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	3.577.450.000,00	776.636.633,00	(2.800.813.367,00)	21,7	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	115.025.000,00	20.031.933,00	(94.993.067,00)	17,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.025.000,00	20.031.933,00	(94.993.067,00)	17,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	3.462.425.000,00	756.604.700,00	(2.705.820.300,00)	21,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.462.425.000,00	756.604.700,00	(2.705.820.300,00)	21,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	50.000.000,00	49.209.000,00	(791.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.209.000,00	(791.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.209.000,00	(791.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	273.627.000,00	229.587.000,00	(44.040.000,00)	83,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	273.627.000,00	229.587.000,00	(44.040.000,00)	83,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.627.000,00	229.587.000,00	(44.040.000,00)	83,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	295.560.000,00	207.440.709,00	(88.119.291,00)	70,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	295.560.000,00	207.440.709,00	(88.119.291,00)	70,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.560.000,00	207.440.709,00	(88.119.291,00)	70,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16.859.150.000,00	16.850.730.404,00	(8.419.596,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	13.161.159.710,00	13.156.240.114,00	(4.919.596,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.916.559.710,00	9.911.640.114,00	(4.919.596,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	3.244.600.000,00	3.244.600.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	3.697.990.290,00	3.694.490.290,00	(3.500.000,00)	99,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.113.962.700,00	2.110.462.700,00	(3.500.000,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.584.027.590,00	1.584.027.590,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	171.100.000,00	158.432.000,00	(12.668.000,00)	92,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	171.100.000,00	158.432.000,00	(12.668.000,00)	92,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.100.000,00	158.432.000,00	(12.668.000,00)	92,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	58.146.800,00	0,00	(58.146.800,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	58.146.800,00	0,00	(58.146.800,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.146.800,00	0,00	(58.146.800,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	116.200.000,00	109.479.990,00	(6.720.010,00)	94,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	66.200.000,00	59.480.000,00	(6.720.000,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	59.480.000,00	(6.720.000,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.999.990,00	(10,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.999.990,00	(10,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	146.664.000,00	78.904.000,00	(67.760.000,00)	53,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	146.664.000,00	78.904.000,00	(67.760.000,00)	53,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.664.000,00	78.904.000,00	(67.760.000,00)	53,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	676.096.700,00	659.167.000,00	(16.929.700,00)	97,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	88.725.000,00	72.126.000,00	(16.599.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.725.000,00	72.126.000,00	(16.599.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	587.371.700,00	587.041.000,00	(330.700,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	587.371.700,00	587.041.000,00	(330.700,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	146.664.000,00	56.037.000,00	(90.627.000,00)	38,2	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1	BELANJA OPERASI	146.664.000,00	56.037.000,00	(90.627.000,00)	38,2	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.664.000,00	56.037.000,00	(90.627.000,00)	38,2	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	1.900.000.000,00	1.892.052.000,00	(7.948.000,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000.000,00	1.892.052.000,00	(7.948.000,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	1.892.052.000,00	(7.948.000,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	29.025.000,00	21.827.000,00	(7.198.000,00)	75,2	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1	BELANJA OPERASI	29.025.000,00	21.827.000,00	(7.198.000,00)	75,2	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0057	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.025.000,00	21.827.000,00	(7.198.000,00)	75,2	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	11.323.408.680,00	11.113.686.329,00	(209.722.351,00)	98,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	2.079.142.450,00	2.053.217.450,00	(25.925.000,00)	98,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.136.014.900,00	1.126.864.450,00	(9.150.450,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.641.500,00	282.655.450,00	(8.986.050,00)	96,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	844.373.400,00	844.209.000,00	(164.400,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	943.127.550,00	926.353.000,00	(16.774.550,00)	98,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	943.127.550,00	926.353.000,00	(16.774.550,00)	98,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	688.080.000,00	666.560.250,00	(21.519.750,00)	96,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	261.415.000,00	253.779.000,00	(7.636.000,00)	97,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.843.000,00	18.007.000,00	(3.836.000,00)	82,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.05	Belanja Hibah	239.572.000,00	235.772.000,00	(3.800.000,00)	98,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	426.665.000,00	412.781.250,00	(13.883.750,00)	96,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.665.000,00	412.781.250,00	(13.883.750,00)	96,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	429.475.000,00	409.431.000,00	(20.044.000,00)	95,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	296.677.000,00	281.181.000,00	(15.496.000,00)	94,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.681.000,00	24.681.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	271.996.000,00	256.500.000,00	(15.496.000,00)	94,3	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	132.798.000,00	128.250.000,00	(4.548.000,00)	96,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.398.000,00	93.000.000,00	(1.398.000,00)	98,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.400.000,00	35.250.000,00	(3.150.000,00)	91,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	532.723.000,00	504.552.200,00	(28.170.800,00)	94,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	530.761.000,00	502.590.200,00	(28.170.800,00)	94,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.761.000,00	502.590.200,00	(28.170.800,00)	94,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	64.000.000,00	63.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	63.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	63.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	411.560.000,00	400.137.173,00	(11.422.827,00)	97,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	411.560.000,00	400.137.173,00	(11.422.827,00)	97,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.560.000,00	400.137.173,00	(11.422.827,00)	97,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	3.843.464.000,00	3.829.685.000,00	(13.779.000,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.706.521.000,00	3.692.742.000,00	(13.779.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.397.000,00	389.397.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	3.317.124.000,00	3.303.345.000,00	(13.779.000,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	136.943.000,00	136.943.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.315.000,00	67.315.000,00	0,00	100	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.628.000,00	69.628.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	193.978.000,00	176.049.256,00	(17.928.744,00)	90,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	192.016.000,00	174.087.256,00	(17.928.744,00)	90,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.016.000,00	174.087.256,00	(17.928.744,00)	90,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.2	BELANJA MODAL	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	100	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0022		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	59.666.000,00	0,00	(59.666.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0022	5.1	BELANJA OPERASI	59.666.000,00	0,00	(59.666.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.666.000,00	0,00	(59.666.000,00)	0	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	1.184.586.000,00	1.182.322.000,00	(2.264.000,00)	99,8	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	461.498.800,00	460.812.000,00	(686.800,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.861.000,00	110.507.000,00	(354.000,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	350.637.800,00	350.305.000,00	(332.800,00)	99,9	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2	BELANJA MODAL	723.087.200,00	721.510.000,00	(1.577.200,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	723.087.200,00	721.510.000,00	(1.577.200,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	673.919.000,00	665.316.000,00	(8.603.000,00)	98,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	376.028.000,00	371.492.000,00	(4.536.000,00)	98,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.601.000,00	179.801.000,00	(1.800.000,00)	99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.05	Belanja Hibah	194.427.000,00	191.691.000,00	(2.736.000,00)	98,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2	BELANJA MODAL	297.891.000,00	293.824.000,00	(4.067.000,00)	98,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.891.000,00	293.824.000,00	(4.067.000,00)	98,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.162.815.230,00	1.162.491.000,00	(324.230,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	1.162.815.230,00	1.162.491.000,00	(324.230,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.809.195,00	452.525.000,00	(284.195,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1.05	Belanja Hibah	710.006.035,00	709.966.000,00	(40.035,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.330.832.000,00	1.297.041.658,00	(33.790.342,00)	97,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	1.167.780.000,00	1.161.520.000,00	(6.260.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.167.780.000,00	1.161.520.000,00	(6.260.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	1.167.780.000,00	1.161.520.000,00	(6.260.000,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	163.052.000,00	135.521.658,00	(27.530.342,00)	83,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1	BELANJA OPERASI	163.052.000,00	135.521.658,00	(27.530.342,00)	83,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.052.000,00	135.521.658,00	(27.530.342,00)	83,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	184.440.000,00	141.083.080,00	(43.356.920,00)	76,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN	34.440.000,00	6.313.400,00	(28.126.600,00)	18,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	34.440.000,00	6.313.400,00	(28.126.600,00)	18,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.440.000,00	6.313.400,00	(28.126.600,00)	18,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.440.000,00	6.313.400,00	(28.126.600,00)	18,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	150.000.000,00	134.769.680,00	(15.230.320,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002		PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	150.000.000,00	134.769.680,00	(15.230.320,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	134.769.680,00	(15.230.320,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	134.769.680,00	(15.230.320,00)	89,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	287.289.000,00	246.875.000,00	(40.414.000,00)	85,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	287.289.000,00	246.875.000,00	(40.414.000,00)	85,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	287.289.000,00	246.875.000,00	(40.414.000,00)	85,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	287.289.000,00	246.875.000,00	(40.414.000,00)	85,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.289.000,00	246.875.000,00	(40.414.000,00)	85,93	
				JUMLAH BELANJA	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(387.295.349.084,00)	(371.117.022.956,63)	16.178.326.127,37	95,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(387.295.349.084,00)	(371.117.022.956,63)	16.178.326.127,37	95,82	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,18	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	399.025.000,00	281.204.412,00	(117.820.588,00)	70,47	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.025.000,00	94.945.474,00	(54.079.526,00)	63,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	149.025.000,00	94.945.474,00	(54.079.526,00)	63,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	149.025.000,00	94.945.474,00	(54.079.526,00)	63,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.025.000,00	94.945.474,00	(54.079.526,00)	63,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	186.258.938,00	(63.741.062,00)	74,5	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	250.000.000,00	186.258.938,00	(63.741.062,00)	74,5	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	186.258.938,00	(63.741.062,00)	74,5	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	186.258.938,00	(63.741.062,00)	74,5	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	24.612.900,00	24.612.900,00	0,00	100	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.612.900,00	24.612.900,00	0,00	100	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	24.612.900,00	24.612.900,00	0,00	100	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.612.900,00	24.612.900,00	0,00	100	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.612.900,00	24.612.900,00	0,00	100	
				JUMLAH BELANJA	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(423.637.900,00)	(305.817.312,00)	117.820.588,00	72,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(423.637.900,00)	(305.817.312,00)	117.820.588,00	72,18	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	96.045.192.664,00	85.221.320.914,50	(10.823.871.749,50)	88,73	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.045.192.664,00	85.221.320.914,50	(10.823.871.749,50)	88,73	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	94.227.134.236,00	84.103.890.655,50	(10.123.243.580,50)	89,25	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	(700.628.169,00)	61,46	
				JUMLAH PENDAPATAN	96.045.192.664,00	85.221.320.914,50	(10.823.871.749,50)	88,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	262.703.970.645,70	248.141.588.546,83	(14.562.382.098,87)	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.348.106.057,13	193.569.381.304,00	(6.778.724.753,13)	96,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.739.000,00	19.461.580,00	(41.277.420,00)	32,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	27.227.000,00	9.942.580,00	(17.284.420,00)	36,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.227.000,00	9.942.580,00	(17.284.420,00)	36,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.227.000,00	9.942.580,00	(17.284.420,00)	36,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.512.000,00	9.519.000,00	(23.993.000,00)	28,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.512.000,00	9.519.000,00	(23.993.000,00)	28,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.512.000,00	9.519.000,00	(23.993.000,00)	28,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	97.369.908.648,51	93.704.034.111,00	(3.665.874.537,51)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	97.361.964.648,51	93.696.090.111,00	(3.665.874.537,51)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	97.361.964.648,51	93.696.090.111,00	(3.665.874.537,51)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	97.361.964.648,51	93.696.090.111,00	(3.665.874.537,51)	96,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
1				2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	(Rp) 5	(%) 6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	10.773.400,00	10.382.500,00	(390.900,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	10.773.400,00	10.382.500,00	(390.900,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.773.400,00	10.382.500,00	(390.900,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.773.400,00	10.382.500,00	(390.900,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.724.086.927,07	1.477.946.541,00	(246.140.386,07)	85,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.789.000,00	24.070.000,00	(2.719.000,00)	89,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.789.000,00	24.070.000,00	(2.719.000,00)	89,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.789.000,00	24.070.000,00	(2.719.000,00)	89,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	770.128.955,07	709.030.717,00	(61.098.238,07)	92,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	280.984.495,07	224.030.717,00	(56.953.778,07)	79,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.984.495,07	224.030.717,00	(56.953.778,07)	79,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	489.144.460,00	485.000.000,00	(4.144.460,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.144.460,00	485.000.000,00	(4.144.460,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.839.600,00	13.950.000,00	(7.889.600,00)	63,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.839.600,00	13.950.000,00	(7.889.600,00)	63,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.839.600,00	13.950.000,00	(7.889.600,00)	63,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	213.915.212,00	189.090.498,00	(24.824.714,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.915.212,00	189.090.498,00	(24.824.714,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.915.212,00	189.090.498,00	(24.824.714,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	106.304.160,00	92.365.370,00	(13.938.790,00)	86,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	106.304.160,00	92.365.370,00	(13.938.790,00)	86,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.304.160,00	92.365.370,00	(13.938.790,00)	86,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
	1			2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	(Rp) 5	(%) 6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.158.400,00	11.558.500,00	(3.599.900,00)	76,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.158.400,00	11.558.500,00	(3.599.900,00)	76,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.158.400,00	11.558.500,00	(3.599.900,00)	76,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	564.951.600,00	432.881.456,00	(132.070.144,00)	76,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	564.951.600,00	432.881.456,00	(132.070.144,00)	76,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.951.600,00	432.881.456,00	(132.070.144,00)	76,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.703.000,00	1.300.000,00	(40.403.000,00)	3,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.703.000,00	1.300.000,00	(40.403.000,00)	3,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.047.000,00	1.300.000,00	(2.747.000,00)	32,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.047.000,00	1.300.000,00	(2.747.000,00)	32,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	37.656.000,00	0,00	(37.656.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.656.000,00	0,00	(37.656.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.020.406.081,55	5.106.799.547,00	(913.606.534,55)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.525.000,00	1.728.000,00	(2.797.000,00)	38,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.525.000,00	1.728.000,00	(2.797.000,00)	38,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	1.728.000,00	(2.797.000,00)	38,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	2.668.965.256,55	2.243.105.722,00	(425.859.534,55)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.668.965.256,55	2.243.105.722,00	(425.859.534,55)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.668.965.256,55	2.243.105.722,00	(425.859.534,55)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.341.915.825,00	2.856.965.825,00	(484.950.000,00)	85,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.341.915.825,00	2.856.965.825,00	(484.950.000,00)	85,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.341.915.825,00	2.856.965.825,00	(484.950.000,00)	85,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.880.000,00	159.016.400,00	(53.863.600,00)	74,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.029.000,00	27.506.000,00	(13.523.000,00)	67,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.029.000,00	27.506.000,00	(13.523.000,00)	67,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.029.000,00	27.506.000,00	(13.523.000,00)	67,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	128.028.000,00	98.667.400,00	(29.360.600,00)	77,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.028.000,00	98.667.400,00	(29.360.600,00)	77,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.028.000,00	98.667.400,00	(29.360.600,00)	77,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.230.000,00	22.030.000,00	(9.200.000,00)	70,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.230.000,00	22.030.000,00	(9.200.000,00)	70,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.230.000,00	22.030.000,00	(9.200.000,00)	70,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.593.000,00	10.813.000,00	(1.780.000,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.593.000,00	10.813.000,00	(1.780.000,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.593.000,00	10.813.000,00	(1.780.000,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	94.897.609.000,00	93.080.445.625,00	(1.817.163.375,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	94.897.609.000,00	93.080.445.625,00	(1.817.163.375,00)	98,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.708.974.500,00	87.152.068.376,00	(1.556.906.124,00)	98,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.783.561.251,00	3.300.177.539,00	(483.383.712,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.925.413.249,00	83.851.890.837,00	(1.073.522.412,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.188.634.500,00	5.928.377.249,00	(260.257.251,00)	95,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	(260.185.651,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.928.400,00	(71.600,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.356.057.938,57	50.856.506.402,83	(7.499.551.535,74)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH	13.948.464.361,97	12.845.195.541,83	(1.103.268.820,14)	92,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	300.000.000,00	293.939.100,00	(6.060.900,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	293.939.100,00	(6.060.900,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	293.939.100,00	(6.060.900,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	888.025.700,00	806.180.533,00	(81.845.167,00)	90,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	166.435.700,00	87.580.533,00	(78.855.167,00)	52,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.435.700,00	87.580.533,00	(78.855.167,00)	52,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	721.590.000,00	718.600.000,00	(2.990.000,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	721.590.000,00	718.600.000,00	(2.990.000,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	6.976.362.270,25	6.936.611.148,83	(39.751.121,42)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	369.095.170,25	330.006.176,00	(39.088.994,25)	89,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.095.170,25	330.006.176,00	(39.088.994,25)	89,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	(662.127,17)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	(662.127,17)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	5.463.601.391,72	4.507.282.370,00	(956.319.021,72)	82,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.463.601.391,72	4.507.282.370,00	(956.319.021,72)	82,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.463.601.391,72	4.507.282.370,00	(956.319.021,72)	82,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	320.475.000,00	301.182.390,00	(19.292.610,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	320.475.000,00	301.182.390,00	(19.292.610,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.475.000,00	301.182.390,00	(19.292.610,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.332.229.468,60	37.958.441.261,00	(6.373.788.207,60)	85,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	722.067.000,00	559.971.625,00	(162.095.375,00)	77,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	722.067.000,00	559.971.625,00	(162.095.375,00)	77,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.067.000,00	559.971.625,00	(162.095.375,00)	77,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	50.000.000,00	44.647.000,00	(5.353.000,00)	89,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.647.000,00	(5.353.000,00)	89,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.647.000,00	(5.353.000,00)	89,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	265.454.440,00	242.117.062,00	(23.337.378,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	265.454.440,00	242.117.062,00	(23.337.378,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.454.440,00	242.117.062,00	(23.337.378,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	78.175.000,00	77.039.550,00	(1.135.450,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.175.000,00	77.039.550,00	(1.135.450,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.175.000,00	77.039.550,00	(1.135.450,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	434.328.000,00	404.400.000,00	(29.928.000,00)	93,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	434.328.000,00	404.400.000,00	(29.928.000,00)	93,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.328.000,00	404.400.000,00	(29.928.000,00)	93,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA	199.307.250,00	158.897.900,00	(40.409.350,00)	79,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.307.250,00	158.897.900,00	(40.409.350,00)	79,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.307.250,00	158.897.900,00	(40.409.350,00)	79,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA	87.207.410,00	37.664.039,00	(49.543.371,00)	43,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	87.207.410,00	37.664.039,00	(49.543.371,00)	43,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.207.410,00	37.664.039,00	(49.543.371,00)	43,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	142.770.000,00	103.117.992,00	(39.652.008,00)	72,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.770.000,00	103.117.992,00	(39.652.008,00)	72,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.770.000,00	103.117.992,00	(39.652.008,00)	72,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	207.000.000,00	148.500.000,00	(58.500.000,00)	71,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	207.000.000,00	148.500.000,00	(58.500.000,00)	71,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.000.000,00	148.500.000,00	(58.500.000,00)	71,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	208.713.600,00	171.957.500,00	(36.756.100,00)	82,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	208.713.600,00	171.957.500,00	(36.756.100,00)	82,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.713.600,00	171.957.500,00	(36.756.100,00)	82,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	122.242.800,00	119.676.000,00	(2.566.800,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	122.242.800,00	119.676.000,00	(2.566.800,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.242.800,00	69.676.000,00	(2.566.800,00)	96,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI	3.160.911.760,00	2.272.966.511,00	(887.945.249,00)	71,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.160.911.760,00	2.272.966.511,00	(887.945.249,00)	71,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.160.911.760,00	2.272.966.511,00	(887.945.249,00)	71,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN	75.054.000,00	59.020.000,00	(16.034.000,00)	78,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	75.054.000,00	59.020.000,00	(16.034.000,00)	78,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.054.000,00	59.020.000,00	(16.034.000,00)	78,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	215.388.000,00	202.225.000,00	(13.163.000,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	215.388.000,00	202.225.000,00	(13.163.000,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.388.000,00	202.225.000,00	(13.163.000,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	220.968.000,00	116.043.450,00	(104.924.550,00)	52,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	220.968.000,00	116.043.450,00	(104.924.550,00)	52,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.968.000,00	116.043.450,00	(104.924.550,00)	52,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	6.607.400,00	2.124.951,00	(4.482.449,00)	32,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	6.607.400,00	2.124.951,00	(4.482.449,00)	32,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.607.400,00	2.124.951,00	(4.482.449,00)	32,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	262.959.000,00	157.502.000,00	(105.457.000,00)	59,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	262.959.000,00	157.502.000,00	(105.457.000,00)	59,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.959.000,00	157.502.000,00	(105.457.000,00)	59,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	124.700.000,00	107.200.000,00	(17.500.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	124.700.000,00	107.200.000,00	(17.500.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.700.000,00	107.200.000,00	(17.500.000,00)	85,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK	1.367.605.140,00	813.405.702,00	(554.199.438,00)	59,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.367.605.140,00	813.405.702,00	(554.199.438,00)	59,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.605.140,00	813.405.702,00	(554.199.438,00)	59,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	33.486.412.948,60	30.058.829.636,00	(3.427.583.312,60)	89,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	33.486.412.948,60	30.058.829.636,00	(3.427.583.312,60)	89,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.486.412.948,60	30.058.829.636,00	(3.427.583.312,60)	89,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	30.000.000,00	5.564.000,00	(24.436.000,00)	18,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	5.564.000,00	(24.436.000,00)	18,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	5.564.000,00	(24.436.000,00)	18,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	1.610.455.920,00	1.041.083.879,00	(569.372.041,00)	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.455.920,00	1.041.083.879,00	(569.372.041,00)	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	576.432.240,00	339.502.573,00	(236.929.667,00)	58,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.023.680,00	701.581.306,00	(332.442.374,00)	67,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	81.665.000,00	66.297.965,00	(15.367.035,00)	81,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	81.665.000,00	66.297.965,00	(15.367.035,00)	81,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.665.000,00	16.297.965,00	(15.367.035,00)	51,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	127.103.000,00	114.512.000,00	(12.591.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	127.103.000,00	114.512.000,00	(12.591.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.103.000,00	114.512.000,00	(12.591.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	201.396.000,00	151.656.500,00	(49.739.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	201.396.000,00	151.656.500,00	(49.739.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.396.000,00	151.656.500,00	(49.739.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	283.618.000,00	223.800.000,00	(59.818.000,00)	78,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	283.618.000,00	223.800.000,00	(59.818.000,00)	78,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.618.000,00	223.800.000,00	(59.818.000,00)	78,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	484.400.000,00	460.200.000,00	(24.200.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	484.400.000,00	460.200.000,00	(24.200.000,00)	95,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.400.000,00	460.200.000,00	(24.200.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	29.119.800,00	23.620.999,00	(5.498.801,00)	81,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	29.119.800,00	23.620.999,00	(5.498.801,00)	81,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.119.800,00	23.620.999,00	(5.498.801,00)	81,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	70.696.108,00	50.071.600,00	(20.624.508,00)	70,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	70.696.108,00	50.071.600,00	(20.624.508,00)	70,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.696.108,00	50.071.600,00	(20.624.508,00)	70,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.696.108,00	50.071.600,00	(20.624.508,00)	70,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.668.000,00	2.798.000,00	(1.870.000,00)	59,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	4.668.000,00	2.798.000,00	(1.870.000,00)	59,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.668.000,00	2.798.000,00	(1.870.000,00)	59,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.668.000,00	2.798.000,00	(1.870.000,00)	59,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	45.000.000,00	15.814.900,00	(29.185.100,00)	35,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	26,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001		PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	26,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	26,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	26,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	11.884.900,00	(18.115.100,00)	39,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	11.884.900,00	(18.115.100,00)	39,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	11.884.900,00	(18.115.100,00)	39,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	11.884.900,00	(18.115.100,00)	39,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	231.884.000,00	172.244.990,00	(59.639.010,00)	74,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	72.005.000,00	48.690.140,00	(23.314.860,00)	67,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	72.005.000,00	48.690.140,00	(23.314.860,00)	67,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.005.000,00	48.690.140,00	(23.314.860,00)	67,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.005.000,00	48.690.140,00	(23.314.860,00)	67,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	144.879.000,00	116.872.650,00	(28.006.350,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	144.879.000,00	116.872.650,00	(28.006.350,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.879.000,00	116.872.650,00	(28.006.350,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.879.000,00	116.872.650,00	(28.006.350,00)	80,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	15.000.000,00	6.682.200,00	(8.317.800,00)	44,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	15.000.000,00	6.682.200,00	(8.317.800,00)	44,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	6.682.200,00	(8.317.800,00)	44,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.682.200,00	(8.317.800,00)	44,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	3.722.922.650,00	3.527.640.950,00	(195.281.700,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	(123.134.000,00)	96,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	(123.134.000,00)	96,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	(123.134.000,00)	96,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	(123.134.000,00)	96,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.971.700,00	133.824.000,00	(72.147.700,00)	64,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	205.971.700,00	133.824.000,00	(72.147.700,00)	64,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.971.700,00	133.824.000,00	(72.147.700,00)	64,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.971.700,00	133.824.000,00	(72.147.700,00)	64,97	
				JUMLAH BELANJA	262.703.970.645,70	248.141.588.546,83	(14.562.382.098,87)	94,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(166.658.777.981,70)	(162.920.267.632,33)	3.738.510.349,37	97,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(166.658.777.981,70)	(162.920.267.632,33)	3.738.510.349,37	97,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.909.210.780,06	9.934.129.256,00	(975.081.524,06)	91,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	153.851.000,00	108.701.000,00	(45.150.000,00)	70,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.871.000,00	21.775.000,00	(29.096.000,00)	42,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.871.000,00	21.775.000,00	(29.096.000,00)	42,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.871.000,00	21.775.000,00	(29.096.000,00)	42,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	50.860.000,00	35.588.000,00	(15.272.000,00)	69,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.860.000,00	35.588.000,00	(15.272.000,00)	69,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.860.000,00	35.588.000,00	(15.272.000,00)	69,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	52.120.000,00	51.338.000,00	(782.000,00)	98,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.120.000,00	51.338.000,00	(782.000,00)	98,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.120.000,00	51.338.000,00	(782.000,00)	98,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	(433.470.340,06)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	(433.470.340,06)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	(433.470.340,06)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	(433.470.340,06)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	130.580.000,00	4.080.000,00	(126.500.000,00)	3,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	126.500.000,00	0,00	(126.500.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	126.500.000,00	0,00	(126.500.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	0,00	(126.500.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	640.341.800,00	396.855.300,00	(243.486.500,00)	61,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	111.457.500,00	103.325.500,00	(8.132.000,00)	92,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.457.500,00	103.325.500,00	(8.132.000,00)	92,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.457.500,00	103.325.500,00	(8.132.000,00)	92,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	48.340.000,00	40.162.400,00	(8.177.600,00)	83,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.340.000,00	40.162.400,00	(8.177.600,00)	83,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.340.000,00	40.162.400,00	(8.177.600,00)	83,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	101.200.000,00	83.850.000,00	(17.350.000,00)	82,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	101.200.000,00	83.850.000,00	(17.350.000,00)	82,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.200.000,00	83.850.000,00	(17.350.000,00)	82,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	379.344.300,00	169.517.400,00	(209.826.900,00)	44,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	379.344.300,00	169.517.400,00	(209.826.900,00)	44,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.344.300,00	169.517.400,00	(209.826.900,00)	44,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	102.330.000,00	101.650.000,00	(680.000,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	102.330.000,00	101.650.000,00	(680.000,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	102.330.000,00	101.650.000,00	(680.000,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.330.000,00	101.650.000,00	(680.000,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	208.950.000,00	165.026.550,00	(43.923.450,00)	78,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.200.000,00	57.701.550,00	(30.498.450,00)	65,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.200.000,00	57.701.550,00	(30.498.450,00)	65,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	57.701.550,00	(30.498.450,00)	65,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	120.750.000,00	107.325.000,00	(13.425.000,00)	88,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	120.750.000,00	107.325.000,00	(13.425.000,00)	88,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	107.325.000,00	(13.425.000,00)	88,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.742.224,00	130.870.990,00	(81.871.234,00)	61,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS	206.642.224,00	125.370.990,00	(81.271.234,00)	60,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.642.224,00	125.370.990,00	(81.271.234,00)	60,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.642.224,00	125.370.990,00	(81.271.234,00)	60,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.100.000,00	5.500.000,00	(600.000,00)	90,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	5.500.000,00	(600.000,00)	90,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.500.000,00	(600.000,00)	90,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.911.970.261,00	1.712.258.000,00	(1.199.712.261,00)	58,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.911.970.261,00	1.712.258.000,00	(1.199.712.261,00)	58,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	2.911.970.261,00	1.712.258.000,00	(1.199.712.261,00)	58,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1	BELANJA OPERASI	272.482.661,00	256.008.900,00	(16.473.761,00)	93,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.482.661,00	256.008.900,00	(16.473.761,00)	93,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2	BELANJA MODAL	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	(1.183.238.500,00)	55,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	(1.183.238.500,00)	55,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.418.135.684,50	911.594.000,00	(506.541.684,50)	64,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.418.135.684,50	911.594.000,00	(506.541.684,50)	64,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	1.418.135.684,50	911.594.000,00	(506.541.684,50)	64,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	497.486.084,50	354.448.500,00	(143.037.584,50)	71,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.766.084,50	158.290.000,00	(142.476.084,50)	52,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.05	Belanja Hibah	196.720.000,00	196.158.500,00	(561.500,00)	99,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	920.649.600,00	557.145.500,00	(363.504.100,00)	60,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.649.600,00	557.145.500,00	(363.504.100,00)	60,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	238.891.953,90	0,00	(238.891.953,90)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	238.891.953,90	0,00	(238.891.953,90)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0032		PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	238.891.953,90	0,00	(238.891.953,90)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	238.891.953,90	0,00	(238.891.953,90)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.042.000,00	0,00	(75.042.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0032	5.1.05	Belanja Hibah	163.849.953,90	0,00	(163.849.953,90)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.614.266.133,20	1.416.429.467,50	(197.836.665,70)	87,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.614.266.133,20	1.416.429.467,50	(197.836.665,70)	87,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	1.351.941.120,70	1.163.481.467,50	(188.459.653,20)	86,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	555.168.120,70	534.381.467,50	(20.786.653,20)	96,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.168.120,70	534.381.467,50	(20.786.653,20)	96,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	796.773.000,00	629.100.000,00	(167.673.000,00)	78,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	796.773.000,00	629.100.000,00	(167.673.000,00)	78,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	262.325.012,50	252.948.000,00	(9.377.012,50)	96,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	72.825.012,50	63.448.000,00	(9.377.012,50)	87,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.825.012,50	63.448.000,00	(9.377.012,50)	87,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	26.996.623.468,72	23.000.930.510,00	(3.995.692.958,72)	85,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	26.996.623.468,72	23.000.930.510,00	(3.995.692.958,72)	85,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017		PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.611.754.790,00	3.324.546.113,00	(3.287.208.677,00)	50,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.611.754.790,00	3.324.546.113,00	(3.287.208.677,00)	50,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.129.277,00	592.317.600,00	(96.811.677,00)	85,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.05	Belanja Hibah	5.922.625.513,00	2.732.228.513,00	(3.190.397.000,00)	46,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.793.764.074,16	1.767.338.500,00	(26.425.574,16)	98,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	139.003.934,90	114.848.500,00	(24.155.434,90)	82,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.003.934,90	114.848.500,00	(24.155.434,90)	82,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.654.760.139,26	1.652.490.000,00	(2.270.139,26)	99,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.654.760.139,26	1.652.490.000,00	(2.270.139,26)	99,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.255.124.104,56	17.688.659.397,00	(566.464.707,56)	96,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	15.493.233.954,20	15.268.832.000,00	(224.401.954,20)	98,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.565.241,70	551.014.000,00	(8.551.241,70)	98,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	14.933.668.712,50	14.717.818.000,00	(215.850.712,50)	98,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	2.761.890.150,36	2.419.827.397,00	(342.062.753,36)	87,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.761.890.150,36	2.419.827.397,00	(342.062.753,36)	87,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	335.980.500,00	220.386.500,00	(115.594.000,00)	65,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	335.980.500,00	220.386.500,00	(115.594.000,00)	65,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.980.500,00	220.386.500,00	(115.594.000,00)	65,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	18.345.939.880,26	18.164.484.231,00	(181.455.649,26)	99,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.345.939.880,26	18.164.484.231,00	(181.455.649,26)	99,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	18.345.939.880,26	18.164.484.231,00	(181.455.649,26)	99,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.748.404.970,26	1.566.950.321,00	(181.454.649,26)	89,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.404.970,26	1.566.950.321,00	(181.454.649,26)	89,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	16.597.534.910,00	16.597.533.910,00	(1.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.597.534.910,00	16.597.533.910,00	(1.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	39.386.554.372,12	32.957.061.470,00	(6.429.492.902,12)	83,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	39.386.554.372,12	32.957.061.470,00	(6.429.492.902,12)	83,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.887.517.631,20	1.864.077.500,00	(23.440.131,20)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.887.517.631,20	1.864.077.500,00	(23.440.131,20)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.887.517.631,20	1.864.077.500,00	(23.440.131,20)	98,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA	807.434.377,45	669.159.250,00	(138.275.127,45)	82,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	807.434.377,45	669.159.250,00	(138.275.127,45)	82,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.434.377,45	669.159.250,00	(138.275.127,45)	82,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	3.329.322.436,00	3.165.262.650,00	(164.059.786,00)	95,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	41.573.000,00	34.822.500,00	(6.750.500,00)	83,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.573.000,00	34.822.500,00	(6.750.500,00)	83,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	3.287.749.436,00	3.130.440.150,00	(157.309.286,00)	95,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.287.749.436,00	3.130.440.150,00	(157.309.286,00)	95,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	32.999.963.427,47	27.224.786.070,00	(5.775.177.357,47)	82,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	173.147.400,00	145.234.045,00	(27.913.355,00)	83,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.147.400,00	145.234.045,00	(27.913.355,00)	83,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	32.826.816.027,47	27.079.552.025,00	(5.747.264.002,47)	82,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.826.816.027,47	27.079.552.025,00	(5.747.264.002,47)	82,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	362.316.500,00	33.776.000,00	(328.540.500,00)	9,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	362.316.500,00	33.776.000,00	(328.540.500,00)	9,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.316.500,00	33.776.000,00	(328.540.500,00)	9,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	184.879.000,00	91.508.200,00	(93.370.800,00)	49,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	54.396.000,00	46.622.700,00	(7.773.300,00)	85,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	23.832.500,00	21.230.700,00	(2.601.800,00)	89,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.832.500,00	21.230.700,00	(2.601.800,00)	89,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.832.500,00	21.230.700,00	(2.601.800,00)	89,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0011		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI	4.357.000,00	1.929.000,00	(2.428.000,00)	44,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.357.000,00	1.929.000,00	(2.428.000,00)	44,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.357.000,00	1.929.000,00	(2.428.000,00)	44,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0014		PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	26.206.500,00	23.463.000,00	(2.743.500,00)	89,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	26.206.500,00	23.463.000,00	(2.743.500,00)	89,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.206.500,00	23.463.000,00	(2.743.500,00)	89,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.704.000,00	42.326.500,00	(78.377.500,00)	35,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	120.704.000,00	42.326.500,00	(78.377.500,00)	35,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	118.664.000,00	42.326.500,00	(76.337.500,00)	35,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.664.000,00	42.326.500,00	(76.337.500,00)	35,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.2	BELANJA MODAL	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	9.779.000,00	2.559.000,00	(7.220.000,00)	26,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006		PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI	9.779.000,00	2.559.000,00	(7.220.000,00)	26,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.779.000,00	2.559.000,00	(7.220.000,00)	26,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.779.000,00	2.559.000,00	(7.220.000,00)	26,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.208.099.200,00	782.522.000,00	(1.425.577.200,00)	35,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	897.566.100,00	346.287.500,00	(551.278.600,00)	38,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	792.827.400,00	340.150.000,00	(452.677.400,00)	42,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	792.827.400,00	340.150.000,00	(452.677.400,00)	42,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.827.400,00	340.150.000,00	(452.677.400,00)	42,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0008		PELAKSANAAN FASILITASI RDTR KABUPATEN/KOTA	6.137.500,00	6.137.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.137.500,00	6.137.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.137.500,00	6.137.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0013		SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	98.601.200,00	0,00	(98.601.200,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	98.601.200,00	0,00	(98.601.200,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.601.200,00	0,00	(98.601.200,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.177.300,00	18.063.000,00	(203.114.300,00)	8,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005		PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	221.177.300,00	18.063.000,00	(203.114.300,00)	8,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	221.177.300,00	18.063.000,00	(203.114.300,00)	8,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.177.300,00	18.063.000,00	(203.114.300,00)	8,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.089.355.800,00	418.171.500,00	(671.184.300,00)	38,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	541.097.800,00	390.646.500,00	(150.451.300,00)	72,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	541.097.800,00	390.646.500,00	(150.451.300,00)	72,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.097.800,00	390.646.500,00	(150.451.300,00)	72,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007		PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR	281.183.500,00	19.213.000,00	(261.970.500,00)	6,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	281.183.500,00	19.213.000,00	(261.970.500,00)	6,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.183.500,00	19.213.000,00	(261.970.500,00)	6,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0008		PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN/ATAU PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK	132.659.000,00	4.148.000,00	(128.511.000,00)	3,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	132.659.000,00	4.148.000,00	(128.511.000,00)	3,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.659.000,00	4.148.000,00	(128.511.000,00)	3,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009		OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG	134.415.500,00	4.164.000,00	(130.251.500,00)	3,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.415.500,00	4.164.000,00	(130.251.500,00)	3,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.415.500,00	4.164.000,00	(130.251.500,00)	3,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.214.570.733,76)	(88.970.917.134,50)	15.243.653.599,26	85,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(104.214.570.733,76)	(88.970.917.134,50)	15.243.653.599,26	85,37	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.096.152.954,45	3.799.014.266,00	(297.138.688,45)	92,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.528.000,00	66.121.000,00	(407.000,00)	99,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.581.000,00	21.424.000,00	(157.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.581.000,00	21.424.000,00	(157.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.581.000,00	21.424.000,00	(157.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	27.348.000,00	27.298.000,00	(50.000,00)	99,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.348.000,00	27.298.000,00	(50.000,00)	99,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.348.000,00	27.298.000,00	(50.000,00)	99,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.599.000,00	17.399.000,00	(200.000,00)	98,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.599.000,00	17.399.000,00	(200.000,00)	98,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.599.000,00	17.399.000,00	(200.000,00)	98,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	(105.258.984,45)	96,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	(105.258.984,45)	96,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	(105.258.984,45)	96,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	(105.258.984,45)	96,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	211.187.500,00	123.800.250,00	(87.387.250,00)	58,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.000.000,00	48.793.800,00	(21.206.200,00)	69,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	48.793.800,00	(21.206.200,00)	69,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	48.793.800,00	(21.206.200,00)	69,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	71.752.500,00	23.000.000,00	(48.752.500,00)	32,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.752.500,00	23.000.000,00	(48.752.500,00)	32,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.752.500,00	23.000.000,00	(48.752.500,00)	32,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	24,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	44.435.000,00	43.406.450,00	(1.028.550,00)	97,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.435.000,00	43.406.450,00	(1.028.550,00)	97,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.435.000,00	43.406.450,00	(1.028.550,00)	97,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	213.976.000,00	168.763.000,00	(45.213.000,00)	78,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	198.976.000,00	168.763.000,00	(30.213.000,00)	84,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	192.856.000,00	162.643.000,00	(30.213.000,00)	84,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.856.000,00	162.643.000,00	(30.213.000,00)	84,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.624.000,00	79.191.396,00	(13.432.604,00)	85,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.874.000,00	14.696.396,00	(4.177.604,00)	77,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.874.000,00	14.696.396,00	(4.177.604,00)	77,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.874.000,00	14.696.396,00	(4.177.604,00)	77,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	73.750.000,00	64.495.000,00	(9.255.000,00)	87,45	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	73.750.000,00	64.495.000,00	(9.255.000,00)	87,45	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	64.495.000,00	(9.255.000,00)	87,45	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.435.600,00	41.995.750,00	(15.439.850,00)	73,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.435.600,00	36.995.750,00	(15.439.850,00)	70,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.435.600,00	36.995.750,00	(15.439.850,00)	70,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.435.600,00	36.995.750,00	(15.439.850,00)	70,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	120.000.000,00	13.134.050,00	(106.865.950,00)	10,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	20.000.000,00	13.134.050,00	(6.865.950,00)	65,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	20.000.000,00	13.134.050,00	(6.865.950,00)	65,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.134.050,00	(6.865.950,00)	65,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.134.050,00	(6.865.950,00)	65,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.573.876.415,80	1.130.579.988,00	(443.296.427,80)	71,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	449.910.397,80	448.288.928,00	(1.621.469,80)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN	449.910.397,80	448.288.928,00	(1.621.469,80)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	449.910.397,80	448.288.928,00	(1.621.469,80)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.210.397,80	15.088.928,00	(121.469,80)	99,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	434.700.000,00	433.200.000,00	(1.500.000,00)	99,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	728.964.018,00	422.259.060,00	(306.704.958,00)	57,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	728.964.018,00	422.259.060,00	(306.704.958,00)	57,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	728.964.018,00	422.259.060,00	(306.704.958,00)	57,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.964.018,00	422.259.060,00	(306.704.958,00)	57,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	395.002.000,00	260.032.000,00	(134.970.000,00)	65,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	395.002.000,00	260.032.000,00	(134.970.000,00)	65,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	395.002.000,00	260.032.000,00	(134.970.000,00)	65,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.002.000,00	260.032.000,00	(134.970.000,00)	65,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.910.812.088,60	10.559.815.444,00	(1.350.996.644,60)	88,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	11.910.812.088,60	10.559.815.444,00	(1.350.996.644,60)	88,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	11.690.701.088,60	10.415.312.444,00	(1.275.388.644,60)	89,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.862.346.371,60	7.587.974.927,00	(1.274.371.444,60)	85,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.686.798.832,40	6.589.227.388,00	(1.097.571.444,40)	85,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.175.547.539,20	998.747.539,00	(176.800.000,20)	84,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.828.354.717,00	2.827.337.517,00	(1.017.200,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.000.000,00	175.850.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.652.354.717,00	2.651.487.517,00	(867.200,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010		VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG	220.111.000,00	144.503.000,00	(75.608.000,00)	65,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	220.111.000,00	144.503.000,00	(75.608.000,00)	65,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.111.000,00	144.503.000,00	(75.608.000,00)	65,65	
				JUMLAH BELANJA	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.700.841.458,85)	(15.502.543.748,00)	2.198.297.710,85	87,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.700.841.458,85)	(15.502.543.748,00)	2.198.297.710,85	87,58	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.103.761.668,30	5.960.950.830,00	(142.810.838,30)	97,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.039.600,00	6.836.000,00	(203.600,00)	97,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.076.000,00	2.044.000,00	(32.000,00)	98,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.076.000,00	2.044.000,00	(32.000,00)	98,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.076.000,00	2.044.000,00	(32.000,00)	98,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.880.600,00	2.812.000,00	(68.600,00)	97,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.600,00	2.812.000,00	(68.600,00)	97,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.600,00	2.812.000,00	(68.600,00)	97,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.083.000,00	1.980.000,00	(103.000,00)	95,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.083.000,00	1.980.000,00	(103.000,00)	95,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.083.000,00	1.980.000,00	(103.000,00)	95,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	(102.801.456,98)	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	(102.801.456,98)	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	(102.801.456,98)	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	(102.801.456,98)	98,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	61.399.093,32	50.733.382,00	(10.665.711,32)	82,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.129.000,00	16.395.000,00	(5.734.000,00)	74,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.129.000,00	16.395.000,00	(5.734.000,00)	74,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.129.000,00	16.395.000,00	(5.734.000,00)	74,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	5.410.000,00	4.303.000,00	(1.107.000,00)	79,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.410.000,00	4.303.000,00	(1.107.000,00)	79,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	4.303.000,00	(1.107.000,00)	79,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.110.093,32	30.035.382,00	(3.074.711,32)	90,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.110.093,32	30.035.382,00	(3.074.711,32)	90,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.110.093,32	30.035.382,00	(3.074.711,32)	90,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	149.440.000,00	144.942.790,00	(4.497.210,00)	96,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.440.000,00	8.742.790,00	(1.697.210,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	8.742.790,00	(1.697.210,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	8.742.790,00	(1.697.210,00)	83,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	139.000.000,00	136.200.000,00	(2.800.000,00)	97,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.000.000,00	136.200.000,00	(2.800.000,00)	97,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	136.200.000,00	(2.800.000,00)	97,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.338.000,00	150.695.140,00	(24.642.860,00)	85,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.000.000,00	23.953.040,00	(1.046.960,00)	95,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.953.040,00	(1.046.960,00)	95,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.953.040,00	(1.046.960,00)	95,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	145.468.000,00	124.442.100,00	(21.025.900,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.468.000,00	124.442.100,00	(21.025.900,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.468.000,00	124.442.100,00	(21.025.900,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.870.000,00	2.300.000,00	(2.570.000,00)	47,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.870.000,00	2.300.000,00	(2.570.000,00)	47,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	2.300.000,00	(2.570.000,00)	47,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	287.481.400,00	41.697.000,00	(245.784.400,00)	14,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	24.145.600,00	2.225.000,00	(21.920.600,00)	9,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	24.145.600,00	2.225.000,00	(21.920.600,00)	9,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.145.600,00	2.225.000,00	(21.920.600,00)	9,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.145.600,00	2.225.000,00	(21.920.600,00)	9,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	37.040.000,00	6.155.000,00	(30.885.000,00)	16,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	37.040.000,00	6.155.000,00	(30.885.000,00)	16,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.280.000,00	655.000,00	(3.625.000,00)	15,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000,00	655.000,00	(3.625.000,00)	15,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	32.760.000,00	5.500.000,00	(27.260.000,00)	16,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.760.000,00	5.500.000,00	(27.260.000,00)	16,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	144.623.600,00	10.895.000,00	(133.728.600,00)	7,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0001		RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH ZOONOSIS PRIORITAS	94.022.600,00	0,00	(94.022.600,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	94.022.600,00	0,00	(94.022.600,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.022.600,00	0,00	(94.022.600,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	50.601.000,00	10.895.000,00	(39.706.000,00)	21,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.601.000,00	10.895.000,00	(39.706.000,00)	21,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.601.000,00	10.895.000,00	(39.706.000,00)	21,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	81.672.200,00	22.422.000,00	(59.250.200,00)	27,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	81.672.200,00	22.422.000,00	(59.250.200,00)	27,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	81.672.200,00	22.422.000,00	(59.250.200,00)	27,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.672.200,00	22.422.000,00	(59.250.200,00)	27,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	249.729.800,00	191.710.160,00	(58.019.640,00)	76,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	249.729.800,00	191.710.160,00	(58.019.640,00)	76,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001		PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.003.400,00	27.206.110,00	(42.797.290,00)	38,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.657.400,00	27.206.110,00	(42.451.290,00)	39,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.657.400,00	27.206.110,00	(42.451.290,00)	39,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	346.000,00	0,00	(346.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346.000,00	0,00	(346.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.161.400,00	34.538.000,00	(623.400,00)	98,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.161.400,00	34.538.000,00	(623.400,00)	98,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.161.400,00	34.538.000,00	(623.400,00)	98,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003		PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	15.000.000,00	2.475.000,00	(12.525.000,00)	16,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	2.475.000,00	(12.525.000,00)	16,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.475.000,00	(12.525.000,00)	16,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007		PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	10.155.000,00	9.535.000,00	(620.000,00)	93,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.155.000,00	9.535.000,00	(620.000,00)	93,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.155.000,00	9.535.000,00	(620.000,00)	93,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	119.410.000,00	117.956.050,00	(1.453.950,00)	98,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.306.000,00	790.000,00	(516.000,00)	60,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.000,00	790.000,00	(516.000,00)	60,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	118.104.000,00	117.166.050,00	(937.950,00)	99,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.104.000,00	117.166.050,00	(937.950,00)	99,20	
				JUMLAH BELANJA	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.640.972.868,30)	(6.194.357.990,00)	446.614.878,30	93,27	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.640.972.868,30)	(6.194.357.990,00)	446.614.878,30	93,27	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.995.970.160,07	11.240.276.225,00	(755.693.935,07)	93,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.827.500,00	19.638.000,00	(1.189.500,00)	94,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.993.000,00	11.835.500,00	(1.157.500,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.993.000,00	11.835.500,00	(1.157.500,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.993.000,00	11.835.500,00	(1.157.500,00)	91,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.328.500,00	1.296.500,00	(32.000,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.328.500,00	1.296.500,00	(32.000,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.500,00	1.296.500,00	(32.000,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	(530.667.835,07)	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	(530.667.835,07)	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	(530.667.835,07)	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	(530.667.835,07)	95,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	214.406.278,00	125.565.878,00	(88.840.400,00)	58,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.185.000,00	922.000,00	(3.263.000,00)	22,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.185.000,00	922.000,00	(3.263.000,00)	22,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	922.000,00	(3.263.000,00)	22,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	94.960.200,00	28.928.400,00	(66.031.800,00)	30,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.236.200,00	16.344.400,00	(3.891.800,00)	80,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.236.200,00	16.344.400,00	(3.891.800,00)	80,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	74.724.000,00	12.584.000,00	(62.140.000,00)	16,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.724.000,00	12.584.000,00	(62.140.000,00)	16,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	877.878,00	877.878,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	877.878,00	877.878,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.878,00	877.878,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.612.000,00	5.202.000,00	(410.000,00)	92,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.612.000,00	5.202.000,00	(410.000,00)	92,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.612.000,00	5.202.000,00	(410.000,00)	92,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	106.371.200,00	87.235.600,00	(19.135.600,00)	82,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.371.200,00	87.235.600,00	(19.135.600,00)	82,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.371.200,00	87.235.600,00	(19.135.600,00)	82,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.385.000,00	22.324.000,00	(61.000,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	22.385.000,00	22.324.000,00	(61.000,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.871.000,00	1.810.000,00	(61.000,00)	96,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.871.000,00	1.810.000,00	(61.000,00)	96,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.514.000,00	20.514.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.514.000,00	20.514.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	844.767.100,00	767.462.500,00	(77.304.600,00)	90,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.217.100,00	0,00	(1.217.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.217.100,00	0,00	(1.217.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.100,00	0,00	(1.217.100,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.600.000,00	4.697.500,00	(11.902.500,00)	28,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.600.000,00	4.697.500,00	(11.902.500,00)	28,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	4.697.500,00	(11.902.500,00)	28,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	826.950.000,00	762.765.000,00	(64.185.000,00)	92,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	826.950.000,00	762.765.000,00	(64.185.000,00)	92,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.950.000,00	762.765.000,00	(64.185.000,00)	92,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.472.000,00	52.841.400,00	(57.630.600,00)	47,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	102.332.000,00	50.706.400,00	(51.625.600,00)	49,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.332.000,00	50.706.400,00	(51.625.600,00)	49,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.332.000,00	50.706.400,00	(51.625.600,00)	49,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.140.000,00	2.135.000,00	(6.005.000,00)	26,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.140.000,00	2.135.000,00	(6.005.000,00)	26,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.140.000,00	2.135.000,00	(6.005.000,00)	26,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.765.300,00	52.538.900,00	(38.226.400,00)	57,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.586.500,00	35.135.200,00	(30.451.300,00)	53,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	15.085.000,00	8.591.000,00	(6.494.000,00)	56,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.115.000,00	8.591.000,00	(524.000,00)	94,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.115.000,00	8.591.000,00	(524.000,00)	94,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.970.000,00	0,00	(5.970.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.970.000,00	0,00	(5.970.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	29.318.000,00	24.254.200,00	(5.063.800,00)	82,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	29.318.000,00	24.254.200,00	(5.063.800,00)	82,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.318.000,00	24.254.200,00	(5.063.800,00)	82,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	8.553.500,00	2.290.000,00	(6.263.500,00)	26,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.553.500,00	2.290.000,00	(6.263.500,00)	26,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.553.500,00	2.290.000,00	(6.263.500,00)	26,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.580.000,00	0,00	(9.580.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	9.580.000,00	0,00	(9.580.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.580.000,00	0,00	(9.580.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	25.178.800,00	17.403.700,00	(7.775.100,00)	69,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	25.178.800,00	17.403.700,00	(7.775.100,00)	69,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	25.178.800,00	17.403.700,00	(7.775.100,00)	69,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.178.800,00	17.403.700,00	(7.775.100,00)	69,12	
				JUMLAH BELANJA	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.086.735.460,07)	(11.292.815.125,00)	793.920.335,07	93,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.086.735.460,07)	(11.292.815.125,00)	793.920.335,07	93,43	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.757.238.878,92	3.481.308.738,00	(275.930.140,92)	92,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	(186.583.800,92)	94,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	(186.583.800,92)	94,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	(186.583.800,92)	94,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	(186.583.800,92)	94,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	167.317.300,00	114.492.300,00	(52.825.000,00)	68,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.530.000,00	3.465.000,00	(65.000,00)	98,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	3.465.000,00	(65.000,00)	98,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.465.000,00	(65.000,00)	98,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.963.300,00	10.244.200,00	(3.719.100,00)	73,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.963.300,00	10.244.200,00	(3.719.100,00)	73,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.963.300,00	10.244.200,00	(3.719.100,00)	73,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.652.000,00	6.254.000,00	(2.398.000,00)	72,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.652.000,00	6.254.000,00	(2.398.000,00)	72,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.652.000,00	6.254.000,00	(2.398.000,00)	72,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.100.000,00	3.140.000,00	(15.960.000,00)	16,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	3.140.000,00	(15.960.000,00)	16,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	3.140.000,00	(15.960.000,00)	16,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.072.000,00	91.389.100,00	(30.682.900,00)	74,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.072.000,00	91.389.100,00	(30.682.900,00)	74,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.072.000,00	91.389.100,00	(30.682.900,00)	74,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.980.000,00	34.551.860,00	(20.428.140,00)	62,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.980.000,00	10.286.860,00	(13.693.140,00)	42,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.980.000,00	10.286.860,00	(13.693.140,00)	42,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	10.286.860,00	(13.693.140,00)	42,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	31.000.000,00	24.265.000,00	(6.735.000,00)	78,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	24.265.000,00	(6.735.000,00)	78,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	24.265.000,00	(6.735.000,00)	78,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.500.000,00	17.406.800,00	(16.093.200,00)	51,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	30.660.000,00	14.611.800,00	(16.048.200,00)	47,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.660.000,00	14.611.800,00	(16.048.200,00)	47,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.660.000,00	14.611.800,00	(16.048.200,00)	47,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.840.000,00	2.795.000,00	(45.000,00)	98,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.795.000,00	(45.000,00)	98,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.795.000,00	(45.000,00)	98,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	598.012.600,00	419.825.673,00	(178.186.927,00)	70,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	598.012.600,00	419.825.673,00	(178.186.927,00)	70,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	79.949.800,00	67.256.500,00	(12.693.300,00)	84,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.949.800,00	67.256.500,00	(12.693.300,00)	84,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.949.800,00	67.256.500,00	(12.693.300,00)	84,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	89.550.000,00	83.920.133,00	(5.629.867,00)	93,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.550.000,00	83.920.133,00	(5.629.867,00)	93,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.550.000,00	83.920.133,00	(5.629.867,00)	93,71	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	102.499.600,00	53.551.140,00	(48.948.460,00)	52,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	102.499.600,00	53.551.140,00	(48.948.460,00)	52,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.499.600,00	53.551.140,00	(48.948.460,00)	52,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	87.439.500,00	68.919.000,00	(18.520.500,00)	78,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	87.439.500,00	68.919.000,00	(18.520.500,00)	78,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.439.500,00	68.919.000,00	(18.520.500,00)	78,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	85.720.000,00	72.642.200,00	(13.077.800,00)	84,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.720.000,00	72.642.200,00	(13.077.800,00)	84,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.720.000,00	72.642.200,00	(13.077.800,00)	84,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	16.750.000,00	10.648.000,00	(6.102.000,00)	63,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.750.000,00	10.648.000,00	(6.102.000,00)	63,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	10.648.000,00	(6.102.000,00)	63,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	134.653.700,00	62.888.700,00	(71.765.000,00)	46,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	134.653.700,00	62.888.700,00	(71.765.000,00)	46,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.653.700,00	62.888.700,00	(71.765.000,00)	46,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	286.163.000,00	133.872.936,00	(152.290.064,00)	46,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	286.163.000,00	133.872.936,00	(152.290.064,00)	46,78	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	172.473.000,00	53.488.936,00	(118.984.064,00)	31,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	172.473.000,00	53.488.936,00	(118.984.064,00)	31,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.473.000,00	53.488.936,00	(118.984.064,00)	31,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	113.690.000,00	80.384.000,00	(33.306.000,00)	70,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.690.000,00	80.384.000,00	(33.306.000,00)	70,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.690.000,00	80.384.000,00	(33.306.000,00)	70,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	485.270.000,00	376.000.200,00	(109.269.800,00)	77,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	485.270.000,00	376.000.200,00	(109.269.800,00)	77,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	336.245.000,00	235.300.200,00	(100.944.800,00)	69,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	336.245.000,00	235.300.200,00	(100.944.800,00)	69,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.245.000,00	235.300.200,00	(100.944.800,00)	69,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	149.025.000,00	140.700.000,00	(8.325.000,00)	94,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.025.000,00	140.700.000,00	(8.325.000,00)	94,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.025.000,00	140.700.000,00	(8.325.000,00)	94,41	
				JUMLAH BELANJA	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.126.684.478,92)	(4.411.007.547,00)	715.676.931,92	86,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.126.684.478,92)	(4.411.007.547,00)	715.676.931,92	86,04	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	(906.369.800,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.7.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.092.582.375,00	4.845.201.475,00	(247.380.900,00)	95,14	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.532.360.975,00	4.364.726.609,00	(167.634.366,00)	96,30	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.510.364.975,00	4.342.730.609,00	(167.634.366,00)	96,28	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.510.364.975,00	4.342.730.609,00	(167.634.366,00)	96,28	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.510.364.975,00	4.342.730.609,00	(167.634.366,00)	96,28	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	351.539.400,00	313.756.766,00	(37.782.634,00)	89,25	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.952.000,00	1.950.000,00	(2.000,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.952.000,00	1.950.000,00	(2.000,00)	99,89	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.000,00	1.950.000,00	(2.000,00)	99,89	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.678.900,00	43.576.000,00	(102.900,00)	99,76	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.878.900,00	19.776.000,00	(102.900,00)	99,48	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.878.900,00	19.776.000,00	(102.900,00)	99,48	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.987.500,00	2.985.000,00	(2.500,00)	99,91	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.987.500,00	2.985.000,00	(2.500,00)	99,91	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.500,00	2.985.000,00	(2.500,00)	99,91	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	77.100.000,00	60.662.000,00	(16.438.000,00)	78,67	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	77.100.000,00	60.662.000,00	(16.438.000,00)	78,67	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.100.000,00	60.662.000,00	(16.438.000,00)	78,67	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	94.121.000,00	72.883.766,00	(21.237.234,00)	77,43	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.121.000,00	72.883.766,00	(21.237.234,00)	77,43	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.121.000,00	72.883.766,00	(21.237.234,00)	77,43	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	131.700.000,00	131.700.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011	5.2	BELANJA MODAL	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	121.295.000,00	105.007.030,00	(16.287.970,00)	86,57	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.295.000,00	31.977.030,00	(317.970,00)	99,01	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.295.000,00	31.977.030,00	(317.970,00)	99,01	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.295.000,00	31.977.030,00	(317.970,00)	99,01	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	89.000.000,00	73.030.000,00	(15.970.000,00)	82,05	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.000.000,00	73.030.000,00	(15.970.000,00)	82,05	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	73.030.000,00	(15.970.000,00)	82,05	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	81.723.000,00	56.047.070,00	(25.675.930,00)	68,58	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.392.000,00	39.332.070,00	(8.059.930,00)	82,99	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.392.000,00	39.332.070,00	(8.059.930,00)	82,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.392.000,00	39.332.070,00	(8.059.930,00)	82,99	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	18.491.000,00	3.720.000,00	(14.771.000,00)	20,11	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.491.000,00	3.720.000,00	(14.771.000,00)	20,11	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.491.000,00	3.720.000,00	(14.771.000,00)	20,11	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.840.000,00	12.995.000,00	(2.845.000,00)	82,03	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	12.995.000,00	(2.845.000,00)	82,03	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	12.995.000,00	(2.845.000,00)	82,03	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.621.730.000,00	1.437.737.300,00	(183.992.700,00)	88,65	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	1.599.392.000,00	1.437.737.300,00	(161.654.700,00)	89,89	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	1.552.042.000,00	1.390.387.300,00	(161.654.700,00)	89,58	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.552.042.000,00	1.390.387.300,00	(161.654.700,00)	89,58	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.552.042.000,00	1.390.387.300,00	(161.654.700,00)	89,58	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003		PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05		PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.338.000,00	0,00	(22.338.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05.0001		PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	22.338.000,00	0,00	(22.338.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.338.000,00	0,00	(22.338.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.338.000,00	0,00	(22.338.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.7.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	380.825.200,00	270.722.700,00	(110.102.500,00)	71,08	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.564.700,00	112.574.700,00	(43.990.000,00)	71,90	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	42.495.000,00	0,00	(42.495.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.495.000,00	0,00	(42.495.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.495.000,00	0,00	(42.495.000,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005		PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	114.069.700,00	112.574.700,00	(1.495.000,00)	98,68	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.069.700,00	112.574.700,00	(1.495.000,00)	98,68	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.069.700,00	112.574.700,00	(1.495.000,00)	98,68	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	167.550.000,00	158.148.000,00	(9.402.000,00)	94,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0001		PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	167.550.000,00	158.148.000,00	(9.402.000,00)	94,38	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	167.550.000,00	158.148.000,00	(9.402.000,00)	94,38	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.550.000,00	158.148.000,00	(9.402.000,00)	94,38	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.710.500,00	0,00	(56.710.500,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0002		PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN	56.710.500,00	0,00	(56.710.500,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.710.500,00	0,00	(56.710.500,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.710.500,00	0,00	(56.710.500,00)	0,00	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	278.451.000,00	225.006.800,00	(53.444.200,00)	80,80	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.451.000,00	165.011.800,00	(53.439.200,00)	75,53	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	218.451.000,00	165.011.800,00	(53.439.200,00)	75,53	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	218.451.000,00	165.011.800,00	(53.439.200,00)	75,53	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.451.000,00	165.011.800,00	(53.439.200,00)	75,53	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	59.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	59.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.373.588.575,00)	(5.684.874.875,00)	(311.286.300,00)	105,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.373.588.575,00)	(5.684.874.875,00)	(311.286.300,00)	105,79	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	(906.369.800,00)	54,68	
	2.07.3.31.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	1.093.793.400,00	(906.206.600,00)	54,68	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	67.554.000,00	51.085.845,00	(16.468.155,00)	75,62	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.554.000,00	51.085.845,00	(16.468.155,00)	75,62	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.554.000,00	51.085.845,00	(16.468.155,00)	75,62	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	30.846.000,00	30.646.000,00	(200.000,00)	99,35	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.846.000,00	30.646.000,00	(200.000,00)	99,35	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.846.000,00	30.646.000,00	(200.000,00)	99,35	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	49.338.000,00	49.317.000,00	(21.000,00)	99,95	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.338.000,00	49.317.000,00	(21.000,00)	99,95	
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.338.000,00	49.317.000,00	(21.000,00)	99,95	
				JUMLAH BELANJA	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.852.262.000,00	962.744.555,00	(889.517.445,00)	51,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.852.262.000,00	962.744.555,00	(889.517.445,00)	51,97	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.8.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.558.345.814,48	4.179.346.321,00	(378.999.493,48)	91,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	(281.353.809,48)	93,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	(281.353.809,48)	93,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	(281.353.809,48)	93,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	(281.353.809,48)	93,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.529.900,00	36.502.300,00	(18.027.600,00)	66,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.408.000,00	703.100,00	(1.704.900,00)	29,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.408.000,00	703.100,00	(1.704.900,00)	29,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.408.000,00	703.100,00	(1.704.900,00)	29,19	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.794.900,00	14.291.500,00	(10.503.400,00)	57,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.794.900,00	14.291.500,00	(10.503.400,00)	57,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.794.900,00	14.291.500,00	(10.503.400,00)	57,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.163.000,00	1.921.000,00	(5.242.000,00)	26,81	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.163.000,00	1.921.000,00	(5.242.000,00)	26,81	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.163.000,00	1.921.000,00	(5.242.000,00)	26,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.164.000,00	19.586.700,00	(577.300,00)	97,13	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.164.000,00	19.586.700,00	(577.300,00)	97,13	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.164.000,00	19.586.700,00	(577.300,00)	97,13	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.730.000,00	68.880.000,00	(43.850.000,00)	61,10	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.980.000,00	36.400.000,00	(34.580.000,00)	51,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.980.000,00	36.400.000,00	(34.580.000,00)	51,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.980.000,00	36.400.000,00	(34.580.000,00)	51,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	41.750.000,00	32.480.000,00	(9.270.000,00)	77,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.750.000,00	32.480.000,00	(9.270.000,00)	77,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	32.480.000,00	(9.270.000,00)	77,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.652.000,00	39.883.916,00	(35.768.084,00)	52,72	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	59.822.000,00	31.633.916,00	(28.188.084,00)	52,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.822.000,00	31.633.916,00	(28.188.084,00)	52,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.822.000,00	31.633.916,00	(28.188.084,00)	52,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.950.000,00	7.900.000,00	(3.050.000,00)	72,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.950.000,00	7.900.000,00	(3.050.000,00)	72,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	7.900.000,00	(3.050.000,00)	72,14	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.880.000,00	350.000,00	(4.530.000,00)	7,17	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.880.000,00	350.000,00	(4.530.000,00)	7,17	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	350.000,00	(4.530.000,00)	7,17	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	225.998.000,00	163.411.197,00	(62.586.803,00)	72,30	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	94.284.000,00	(7.216.000,00)	92,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	94.284.000,00	(7.216.000,00)	92,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.500.000,00	94.284.000,00	(7.216.000,00)	92,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	94.284.000,00	(7.216.000,00)	92,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	95.046.000,00	49.822.761,00	(45.223.239,00)	52,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	95.046.000,00	49.822.761,00	(45.223.239,00)	52,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.046.000,00	49.822.761,00	(45.223.239,00)	52,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.046.000,00	49.822.761,00	(45.223.239,00)	52,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.452.000,00	19.304.436,00	(10.147.564,00)	65,54	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	13.384.050,00	(6.615.950,00)	66,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.384.050,00	(6.615.950,00)	66,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.384.050,00	(6.615.950,00)	66,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	9.452.000,00	5.920.386,00	(3.531.614,00)	62,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.452.000,00	5.920.386,00	(3.531.614,00)	62,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.452.000,00	5.920.386,00	(3.531.614,00)	62,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	6.641.000,00	6.641.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	6.641.000,00	6.641.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.641.000,00	6.641.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.641.000,00	6.641.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.641.000,00	6.641.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	204.110.000,00	151.365.640,00	(52.744.360,00)	74,15	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.094.000,00	96.831.140,00	(38.262.860,00)	71,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	135.094.000,00	96.831.140,00	(38.262.860,00)	71,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	135.094.000,00	96.831.140,00	(38.262.860,00)	71,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.094.000,00	96.831.140,00	(38.262.860,00)	71,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.016.000,00	54.534.500,00	(14.481.500,00)	79,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	69.016.000,00	54.534.500,00	(14.481.500,00)	79,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	69.016.000,00	54.534.500,00	(14.481.500,00)	79,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.016.000,00	54.534.500,00	(14.481.500,00)	79,01	
				JUMLAH BELANJA	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.995.094.814,48)	(4.500.764.158,00)	494.330.656,48	90,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.995.094.814,48)	(4.500.764.158,00)	494.330.656,48	90,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,50	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.327.100.925,00	2.267.548.831,00	(1.059.552.094,00)	68,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	2.822.459.425,00	1.869.060.631,00	(953.398.794,00)	66,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	2.822.459.425,00	1.869.060.631,00	(953.398.794,00)	66,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.822.459.425,00	1.869.060.631,00	(953.398.794,00)	66,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.434.000,00	323.169.000,00	(26.265.000,00)	92,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.473.025.425,00	1.545.891.631,00	(927.133.794,00)	62,51	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	504.641.500,00	398.488.200,00	(106.153.300,00)	78,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002		PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	12.000.000,00	9.819.000,00	(2.181.000,00)	81,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.819.000,00	(2.181.000,00)	81,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.819.000,00	(2.181.000,00)	81,82	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	492.641.500,00	388.669.200,00	(103.972.300,00)	78,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	458.497.500,00	354.536.200,00	(103.961.300,00)	77,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.717.500,00	182.936.200,00	(103.781.300,00)	63,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	171.780.000,00	171.600.000,00	(180.000,00)	99,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	34.144.000,00	34.133.000,00	(11.000,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.144.000,00	34.133.000,00	(11.000,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	221.474.400,00	127.980.600,00	(93.493.800,00)	57,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	221.474.400,00	127.980.600,00	(93.493.800,00)	57,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	12.546.000,00	10.940.600,00	(1.605.400,00)	87,20	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.546.000,00	10.940.600,00	(1.605.400,00)	87,20	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.546.000,00	10.940.600,00	(1.605.400,00)	87,20	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	66.542.400,00	0,00	(66.542.400,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.542.400,00	0,00	(66.542.400,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.542.400,00	0,00	(66.542.400,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	142.386.000,00	117.040.000,00	(25.346.000,00)	82,19	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	142.386.000,00	117.040.000,00	(25.346.000,00)	82,19	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.386.000,00	117.040.000,00	(25.346.000,00)	82,19	
				JUMLAH BELANJA	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.548.575.325,00)	(2.395.529.431,00)	1.153.045.894,00	67,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.548.575.325,00)	(2.395.529.431,00)	1.153.045.894,00	67,50	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,06	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.061.345.329,39	7.637.315.710,00	(424.029.619,39)	94,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.636.000,00	11.253.850,00	(1.382.150,00)	89,06	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.600.000,00	4.305.200,00	(1.294.800,00)	76,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	4.305.200,00	(1.294.800,00)	76,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	4.305.200,00	(1.294.800,00)	76,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.036.000,00	6.948.650,00	(87.350,00)	98,75	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.036.000,00	6.948.650,00	(87.350,00)	98,75	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.036.000,00	6.948.650,00	(87.350,00)	98,75	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	(367.543.904,39)	95,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	(367.543.904,39)	95,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	(367.543.904,39)	95,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	(367.543.904,39)	95,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	331.862.000,00	322.806.637,00	(9.055.363,00)	97,27	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.464.000,00	27.433.195,00	(7.030.805,00)	79,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.464.000,00	27.433.195,00	(7.030.805,00)	79,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.464.000,00	27.433.195,00	(7.030.805,00)	79,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.100.000,00	35.085.000,00	(2.015.000,00)	94,56	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.100.000,00	35.085.000,00	(2.015.000,00)	94,56	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	35.085.000,00	(2.015.000,00)	94,56	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	260.298.000,00	260.288.442,00	(9.558,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	260.298.000,00	260.288.442,00	(9.558,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.298.000,00	260.288.442,00	(9.558,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.031.130,00	116.612.928,00	(29.418.202,00)	79,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	43.601.130,00	25.352.928,00	(18.248.202,00)	58,14	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.601.130,00	25.352.928,00	(18.248.202,00)	58,14	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.601.130,00	25.352.928,00	(18.248.202,00)	58,14	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	102.430.000,00	91.260.000,00	(11.170.000,00)	89,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.430.000,00	91.260.000,00	(11.170.000,00)	89,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.430.000,00	91.260.000,00	(11.170.000,00)	89,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.840.000,00	2.210.000,00	(16.630.000,00)	11,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	18.840.000,00	2.210.000,00	(16.630.000,00)	11,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.840.000,00	2.210.000,00	(16.630.000,00)	11,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	2.210.000,00	(16.630.000,00)	11,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	66,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.265.095.329,39)	(8.437.315.710,00)	827.779.619,39	91,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.265.095.329,39)	(8.437.315.710,00)	827.779.619,39	91,06	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,65	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,65	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	575.000.000,00	412.024.400,00	(162.975.600,00)	71,65	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13,00	13,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	575.000.000,00	412.024.413,00	(162.975.587,00)	71,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.693.484.869,11	4.112.395.305,00	(581.089.564,11)	87,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.245.500,00	15.732.061,00	(20.513.439,00)	43,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.157.500,00	8.874.061,00	(16.283.439,00)	35,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.157.500,00	8.874.061,00	(16.283.439,00)	35,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.157.500,00	8.874.061,00	(16.283.439,00)	35,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.316.000,00	4.440.000,00	(1.876.000,00)	70,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.316.000,00	4.440.000,00	(1.876.000,00)	70,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.316.000,00	4.440.000,00	(1.876.000,00)	70,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.772.000,00	2.418.000,00	(2.354.000,00)	50,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.772.000,00	2.418.000,00	(2.354.000,00)	50,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.772.000,00	2.418.000,00	(2.354.000,00)	50,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	(409.662.153,28)	90,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	(409.662.153,28)	90,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	(409.662.153,28)	90,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	(409.662.153,28)	90,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	65.951.500,00	15.559.000,00	(50.392.500,00)	23,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	65.951.500,00	15.559.000,00	(50.392.500,00)	23,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	65.951.500,00	15.559.000,00	(50.392.500,00)	23,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.951.500,00	15.559.000,00	(50.392.500,00)	23,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	160.001.071,83	101.863.200,00	(58.137.871,83)	63,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	17.136.000,00	11.743.000,00	(5.393.000,00)	68,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.136.000,00	11.743.000,00	(5.393.000,00)	68,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.136.000,00	11.743.000,00	(5.393.000,00)	68,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.443.072,73	2.820.000,00	(4.623.072,73)	37,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.443.072,73	2.820.000,00	(4.623.072,73)	37,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.443.072,73	2.820.000,00	(4.623.072,73)	37,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42.450.000,00	22.920.000,00	(19.530.000,00)	53,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.450.000,00	22.920.000,00	(19.530.000,00)	53,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.450.000,00	22.920.000,00	(19.530.000,00)	53,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	92.971.999,10	64.380.200,00	(28.591.799,10)	69,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.971.999,10	64.380.200,00	(28.591.799,10)	69,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.971.999,10	64.380.200,00	(28.591.799,10)	69,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	160.250.000,00	153.536.400,00	(6.713.600,00)	95,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.000.000,00	40.106.400,00	(4.893.600,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	40.106.400,00	(4.893.600,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.106.400,00	(4.893.600,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	115.250.000,00	113.430.000,00	(1.820.000,00)	98,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.250.000,00	113.430.000,00	(1.820.000,00)	98,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.250.000,00	113.430.000,00	(1.820.000,00)	98,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.530.000,00	0,00	(28.530.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.130.000,00	0,00	(9.130.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.130.000,00	0,00	(9.130.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	0,00	(9.130.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0008		PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	442.823.342,00	407.654.991,00	(35.168.351,00)	92,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	442.823.342,00	407.654.991,00	(35.168.351,00)	92,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	442.823.342,00	407.654.991,00	(35.168.351,00)	92,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	442.823.342,00	407.654.991,00	(35.168.351,00)	92,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.823.342,00	407.654.991,00	(35.168.351,00)	92,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	132.449.500,00	20.140.000,00	(112.309.500,00)	15,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	92.999.500,00	20.140.000,00	(72.859.500,00)	21,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	88.696.000,00	20.140.000,00	(68.556.000,00)	22,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.696.000,00	20.140.000,00	(68.556.000,00)	22,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.696.000,00	20.140.000,00	(68.556.000,00)	22,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	4.303.500,00	0,00	(4.303.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.303.500,00	0,00	(4.303.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.303.500,00	0,00	(4.303.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001		PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	385.951.505,00	346.126.990,00	(39.824.515,00)	89,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	385.951.505,00	346.126.990,00	(39.824.515,00)	89,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	385.951.505,00	346.126.990,00	(39.824.515,00)	89,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	385.951.505,00	346.126.990,00	(39.824.515,00)	89,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.951.505,00	346.126.990,00	(39.824.515,00)	89,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.518.000,00	12.624.854,00	(27.893.146,00)	31,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.518.000,00	12.624.854,00	(27.893.146,00)	31,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	40.518.000,00	12.624.854,00	(27.893.146,00)	31,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.518.000,00	12.624.854,00	(27.893.146,00)	31,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.518.000,00	12.624.854,00	(27.893.146,00)	31,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	79.960.000,00	9.042.000,00	(70.918.000,00)	11,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.960.000,00	9.042.000,00	(70.918.000,00)	11,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	79.960.000,00	9.042.000,00	(70.918.000,00)	11,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.960.000,00	9.042.000,00	(70.918.000,00)	11,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.960.000,00	9.042.000,00	(70.918.000,00)	11,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	2.205.000,00	(22.795.000,00)	8,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	2.205.000,00	(22.795.000,00)	8,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	2.205.000,00	(22.795.000,00)	8,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	2.205.000,00	(22.795.000,00)	8,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	2.205.000,00	(22.795.000,00)	8,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.851.939.411,79	20.151.357.617,00	(700.581.794,79)	96,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	20.851.939.411,79	20.151.357.617,00	(700.581.794,79)	96,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	4.828.756.620,00	4.813.840.000,00	(14.916.620,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	4.828.756.620,00	4.813.840.000,00	(14.916.620,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.828.756.620,00	4.813.840.000,00	(14.916.620,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	51.983.500,00	0,00	(51.983.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.983.500,00	0,00	(51.983.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.983.500,00	0,00	(51.983.500,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN	489.642.000,00	415.261.900,00	(74.380.100,00)	84,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	489.642.000,00	415.261.900,00	(74.380.100,00)	84,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.642.000,00	415.261.900,00	(74.380.100,00)	84,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH	15.142.297.727,79	14.670.766.497,00	(471.531.230,79)	96,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	15.142.297.727,79	14.670.766.497,00	(471.531.230,79)	96,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.142.297.727,79	14.670.766.497,00	(471.531.230,79)	96,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	339.259.564,00	251.489.220,00	(87.770.344,00)	74,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	338.578.564,00	251.489.220,00	(87.089.344,00)	74,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.578.564,00	251.489.220,00	(87.089.344,00)	74,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	681.000,00	0,00	(681.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	681.000,00	0,00	(681.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(26.082.126.627,90)	(24.649.522.344,00)	1.432.604.283,90	94,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.082.126.627,90)	(24.649.522.344,00)	1.432.604.283,90	94,50	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.930.523.943,00	5.666.690.467,00	(263.833.476,00)	95,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.974.500,00	17.036.000,00	(1.938.500,00)	89,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.781.000,00	4.437.000,00	(1.344.000,00)	76,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.781.000,00	4.437.000,00	(1.344.000,00)	76,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.781.000,00	4.437.000,00	(1.344.000,00)	76,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.193.500,00	12.599.000,00	(594.500,00)	95,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.193.500,00	12.599.000,00	(594.500,00)	95,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.193.500,00	12.599.000,00	(594.500,00)	95,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	(226.886.617,00)	95,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	(226.886.617,00)	95,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	(226.886.617,00)	95,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	(226.886.617,00)	95,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	497.927.230,00	486.860.571,00	(11.066.659,00)	97,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.016.000,00	1.920.000,00	(96.000,00)	95,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.016.000,00	1.920.000,00	(96.000,00)	95,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.016.000,00	1.920.000,00	(96.000,00)	95,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	323.085.230,00	317.061.470,00	(6.023.760,00)	98,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	323.085.230,00	317.061.470,00	(6.023.760,00)	98,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.085.230,00	317.061.470,00	(6.023.760,00)	98,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	107.151.000,00	102.462.901,00	(4.688.099,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	107.151.000,00	102.462.901,00	(4.688.099,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.151.000,00	102.462.901,00	(4.688.099,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.675.000,00	65.416.200,00	(258.800,00)	99,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.675.000,00	65.416.200,00	(258.800,00)	99,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.675.000,00	65.416.200,00	(258.800,00)	99,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.134.000,00	124.569.300,00	(564.700,00)	99,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	125.134.000,00	124.569.300,00	(564.700,00)	99,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.340.000,00	2.880.000,00	(460.000,00)	86,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	2.880.000,00	(460.000,00)	86,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	121.794.000,00	121.689.300,00	(104.700,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.794.000,00	121.689.300,00	(104.700,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	135.600.000,00	115.570.000,00	(20.030.000,00)	85,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.600.000,00	18.540.000,00	(16.060.000,00)	53,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.600.000,00	18.540.000,00	(16.060.000,00)	53,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	18.540.000,00	(16.060.000,00)	53,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	101.000.000,00	97.030.000,00	(3.970.000,00)	96,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.000.000,00	97.030.000,00	(3.970.000,00)	96,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	97.030.000,00	(3.970.000,00)	96,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.330.000,00	58.983.000,00	(3.347.000,00)	94,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.500.000,00	(70.000,00)	98,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	58.760.000,00	55.483.000,00	(3.277.000,00)	94,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	58.760.000,00	55.483.000,00	(3.277.000,00)	94,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.760.000,00	55.483.000,00	(3.277.000,00)	94,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,00	354.972.500,00	(49.212.136,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,00	354.972.500,00	(49.212.136,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,00	354.972.500,00	(49.212.136,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	404.184.636,00	354.972.500,00	(49.212.136,00)	87,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.184.636,00	354.972.500,00	(49.212.136,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	59.370.000,00	48.907.500,00	(10.462.500,00)	82,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	59.370.000,00	48.907.500,00	(10.462.500,00)	82,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN	59.370.000,00	48.907.500,00	(10.462.500,00)	82,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.850.000,00	11.889.000,00	(7.961.000,00)	59,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	11.889.000,00	(7.961.000,00)	59,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	39.520.000,00	37.018.500,00	(2.501.500,00)	93,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.520.000,00	37.018.500,00	(2.501.500,00)	93,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,00	7.335.000,00	(865.000,00)	89,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,00	7.335.000,00	(865.000,00)	89,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,00	7.335.000,00	(865.000,00)	89,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	7.335.000,00	(865.000,00)	89,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	7.335.000,00	(865.000,00)	89,45	
				JUMLAH BELANJA	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.402.278.579,00)	(6.077.905.467,00)	324.373.112,00	94,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.402.278.579,00)	(6.077.905.467,00)	324.373.112,00	94,93	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.226.665.249,96	4.009.475.328,00	(217.189.921,96)	94,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.154.500,00	14.106.206,00	(48.294,00)	99,65	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.892.000,00	5.843.706,00	(48.294,00)	99,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.892.000,00	5.843.706,00	(48.294,00)	99,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.892.000,00	5.843.706,00	(48.294,00)	99,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.293.500,00	6.293.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.293.500,00	6.293.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.293.500,00	6.293.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	(162.134.531,96)	95,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	(162.134.531,96)	95,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	(162.134.531,96)	95,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	(162.134.531,96)	95,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	333.155.928,00	294.518.514,00	(38.637.414,00)	88,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	973.000,00	973.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	973.000,00	973.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.000,00	973.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.154.000,00	26.796.000,00	(3.358.000,00)	88,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.154.000,00	26.796.000,00	(3.358.000,00)	88,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.154.000,00	26.796.000,00	(3.358.000,00)	88,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	11.499.500,00	7.130.000,00	(4.369.500,00)	62,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.499.500,00	7.130.000,00	(4.369.500,00)	62,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.499.500,00	7.130.000,00	(4.369.500,00)	62,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.951.500,00	7.951.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.951.500,00	7.951.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.951.500,00	7.951.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	137.400.000,00	106.676.000,00	(30.724.000,00)	77,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	137.400.000,00	106.676.000,00	(30.724.000,00)	77,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	106.676.000,00	(30.724.000,00)	77,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	145.177.928,00	144.992.014,00	(185.914,00)	99,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	145.177.928,00	144.992.014,00	(185.914,00)	99,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.177.928,00	144.992.014,00	(185.914,00)	99,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	128.034.000,00	117.750.000,00	(10.284.000,00)	91,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.034.000,00	60.750.000,00	(10.284.000,00)	85,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	71.034.000,00	60.750.000,00	(10.284.000,00)	85,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.034.000,00	60.750.000,00	(10.284.000,00)	85,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.467.580,00	100.348.448,00	(1.119.132,00)	98,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.217.580,00	73.158.448,00	(59.132,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.217.580,00	73.158.448,00	(59.132,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.217.580,00	73.158.448,00	(59.132,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	28.250.000,00	27.190.000,00	(1.060.000,00)	96,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.250.000,00	27.190.000,00	(1.060.000,00)	96,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	27.190.000,00	(1.060.000,00)	96,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.603.000,00	90.636.450,00	(4.966.550,00)	94,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
	1			2	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
					3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	86.223.000,00	83.676.450,00	(2.546.550,00)	97,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.223.000,00	83.676.450,00	(2.546.550,00)	97,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.223.000,00	83.676.450,00	(2.546.550,00)	97,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.380.000,00	6.960.000,00	(2.420.000,00)	74,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.380.000,00	6.960.000,00	(2.420.000,00)	74,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	6.960.000,00	(2.420.000,00)	74,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.387.378.764,00	1.187.989.784,00	(199.388.980,00)	85,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.387.378.764,00	1.187.989.784,00	(199.388.980,00)	85,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	910.084.044,00	799.848.702,00	(110.235.342,00)	87,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	910.084.044,00	799.848.702,00	(110.235.342,00)	87,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.084.044,00	799.848.702,00	(110.235.342,00)	87,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	170.000.200,00	154.143.838,00	(15.856.362,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.200,00	154.143.838,00	(15.856.362,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.200,00	154.143.838,00	(15.856.362,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007		EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA	204.490.600,00	154.482.025,00	(50.008.575,00)	75,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	204.490.600,00	154.482.025,00	(50.008.575,00)	75,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.490.600,00	154.482.025,00	(50.008.575,00)	75,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	49.108.000,00	40.092.299,00	(9.015.701,00)	81,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.108.000,00	40.092.299,00	(9.015.701,00)	81,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.108.000,00	40.092.299,00	(9.015.701,00)	81,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016		FASILITASI PEMBINAAN LAPORAN KEPALA DESA	53.695.920,00	39.422.920,00	(14.273.000,00)	73,41	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	53.695.920,00	39.422.920,00	(14.273.000,00)	73,41	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.695.920,00	39.422.920,00	(14.273.000,00)	73,41	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	277.130.000,00	79.314.161,00	(197.815.839,00)	28,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	277.130.000,00	79.314.161,00	(197.815.839,00)	28,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	12.520.000,00	4.400.000,00	(8.120.000,00)	35,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.520.000,00	4.400.000,00	(8.120.000,00)	35,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	4.400.000,00	(8.120.000,00)	35,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	45.344.000,00	17.100.491,00	(28.243.509,00)	37,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.344.000,00	17.100.491,00	(28.243.509,00)	37,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.344.000,00	17.100.491,00	(28.243.509,00)	37,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	219.266.000,00	57.813.670,00	(161.452.330,00)	26,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	219.266.000,00	57.813.670,00	(161.452.330,00)	26,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.266.000,00	57.813.670,00	(161.452.330,00)	26,36	
				JUMLAH BELANJA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.891.174.013,96)	(5.276.779.273,00)	614.394.740,96	89,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.891.174.013,96)	(5.276.779.273,00)	614.394.740,96	89,57	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
1				2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	(Rp) 5	(%) 6	7
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	353.338.000,00	53.338.000,00	117,77	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	353.611.000,00	53.611.000,00	117,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.423.004.220,82	9.061.851.364,00	(1.361.152.856,82)	86,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.304.300,00	22.015.798,00	(25.288.502,00)	46,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.391.300,00	20.026.798,00	(5.364.502,00)	78,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.391.300,00	20.026.798,00	(5.364.502,00)	78,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.391.300,00	20.026.798,00	(5.364.502,00)	78,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.913.000,00	1.989.000,00	(19.924.000,00)	9,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.913.000,00	1.989.000,00	(19.924.000,00)	9,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.913.000,00	1.989.000,00	(19.924.000,00)	9,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.612.037.070,82	7.142.020.266,00	(470.016.804,82)	93,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.607.237.070,82	7.142.020.266,00	(465.216.804,82)	93,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.607.237.070,82	7.142.020.266,00	(465.216.804,82)	93,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.607.237.070,82	7.142.020.266,00	(465.216.804,82)	93,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	242.826.600,00	121.972.972,00	(120.853.628,00)	50,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.987.000,00	1.150.000,00	(3.837.000,00)	23,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.987.000,00	1.150.000,00	(3.837.000,00)	23,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.987.000,00	1.150.000,00	(3.837.000,00)	23,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.093.100,00	5.113.600,00	(27.979.500,00)	15,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.093.100,00	5.113.600,00	(27.979.500,00)	15,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.093.100,00	5.113.600,00	(27.979.500,00)	15,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	939.000,00	935.000,00	(4.000,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	939.000,00	935.000,00	(4.000,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.000,00	935.000,00	(4.000,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.995.000,00	3.034.220,00	(6.960.780,00)	30,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.995.000,00	3.034.220,00	(6.960.780,00)	30,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	3.034.220,00	(6.960.780,00)	30,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.692.500,00	1.738.999,00	(6.953.501,00)	20,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.692.500,00	1.738.999,00	(6.953.501,00)	20,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.692.500,00	1.738.999,00	(6.953.501,00)	20,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42.555.000,00	39.867.653,00	(2.687.347,00)	93,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.555.000,00	39.867.653,00	(2.687.347,00)	93,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.555.000,00	39.867.653,00	(2.687.347,00)	93,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	142.565.000,00	70.133.500,00	(72.431.500,00)	49,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.565.000,00	70.133.500,00	(72.431.500,00)	49,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.565.000,00	70.133.500,00	(72.431.500,00)	49,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.195.331.150,00	834.598.700,00	(360.732.450,00)	69,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	318.143.560,00	0,00	(318.143.560,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.744.700,00	0,00	(15.744.700,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.744.700,00	0,00	(15.744.700,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	302.398.860,00	0,00	(302.398.860,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.398.860,00	0,00	(302.398.860,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	877.187.590,00	834.598.700,00	(42.588.890,00)	95,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	808.930.000,00	800.000.000,00	(8.930.000,00)	98,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	0,00	(8.930.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	68.257.590,00	34.598.700,00	(33.658.890,00)	50,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.257.590,00	34.598.700,00	(33.658.890,00)	50,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	668.028.800,00	616.696.998,00	(51.331.802,00)	92,31	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	53.678.800,00	50.112.040,00	(3.566.760,00)	93,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.678.800,00	50.112.040,00	(3.566.760,00)	93,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.678.800,00	50.112.040,00	(3.566.760,00)	93,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	614.350.000,00	566.584.958,00	(47.765.042,00)	92,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	614.350.000,00	566.584.958,00	(47.765.042,00)	92,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.350.000,00	566.584.958,00	(47.765.042,00)	92,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	657.476.300,00	324.546.630,00	(332.929.670,00)	49,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.759.000,00	13.150.430,00	(28.608.570,00)	31,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.759.000,00	13.150.430,00	(28.608.570,00)	31,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.759.000,00	13.150.430,00	(28.608.570,00)	31,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	609.617.300,00	311.396.200,00	(298.221.100,00)	51,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	609.617.300,00	311.396.200,00	(298.221.100,00)	51,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.617.300,00	311.396.200,00	(298.221.100,00)	51,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.705.588.000,00	9.385.453.134,00	(1.320.134.866,00)	87,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	(751.276.277,00)	92,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	(751.276.277,00)	92,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	(751.276.277,00)	92,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	(751.276.277,00)	92,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	597.882.000,00	29.023.411,00	(568.858.589,00)	4,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	597.882.000,00	29.023.411,00	(568.858.589,00)	4,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	597.882.000,00	29.023.411,00	(568.858.589,00)	4,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.882.000,00	29.023.411,00	(568.858.589,00)	4,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	967.866.999,52	126.352.900,00	(841.514.099,52)	13,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07		PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.717.000,00	96.455.000,00	(42.262.000,00)	69,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07.0004		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JARINGAN TRAYEK SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.717.000,00	96.455.000,00	(42.262.000,00)	69,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07.0004	5.1	BELANJA OPERASI	138.717.000,00	96.455.000,00	(42.262.000,00)	69,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.717.000,00	96.455.000,00	(42.262.000,00)	69,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	829.149.999,52	29.897.900,00	(799.252.099,52)	3,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0002		PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	629.149.999,52	29.897.900,00	(599.252.099,52)	4,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	629.149.999,52	29.897.900,00	(599.252.099,52)	4,75	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.149.999,52	29.897.900,00	(599.252.099,52)	4,75	
				JUMLAH BELANJA	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.796.459.220,34)	(18.220.046.398,00)	3.576.412.822,34	83,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.796.459.220,34)	(18.220.046.398,00)	3.576.412.822,34	83,59	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.299.587.485,00	4.057.978.826,00	(241.608.659,00)	94,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.499.500,00	6.101.500,00	(398.000,00)	93,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.081.000,00	3.056.000,00	(25.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.081.000,00	3.056.000,00	(25.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.081.000,00	3.056.000,00	(25.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.635.000,00	2.262.000,00	(373.000,00)	85,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.635.000,00	2.262.000,00	(373.000,00)	85,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	2.262.000,00	(373.000,00)	85,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	783.500,00	783.500,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	783.500,00	783.500,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.500,00	783.500,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	(164.018.494,00)	95,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	(164.018.494,00)	95,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	(164.018.494,00)	95,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	(164.018.494,00)	95,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	76.685.500,00	33.009.181,00	(43.676.319,00)	43,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.077.000,00	406.000,00	(3.671.000,00)	9,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.077.000,00	406.000,00	(3.671.000,00)	9,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.077.000,00	406.000,00	(3.671.000,00)	9,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.797.000,00	5.992.800,00	(23.804.200,00)	20,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.797.000,00	5.992.800,00	(23.804.200,00)	20,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.797.000,00	5.992.800,00	(23.804.200,00)	20,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.045.000,00	1.201.000,00	(13.844.000,00)	7,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.045.000,00	1.201.000,00	(13.844.000,00)	7,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	1.201.000,00	(13.844.000,00)	7,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.554.500,00	4.218.000,00	(336.500,00)	92,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.554.500,00	4.218.000,00	(336.500,00)	92,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.554.500,00	4.218.000,00	(336.500,00)	92,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.212.000,00	21.191.381,00	(2.020.619,00)	91,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.212.000,00	21.191.381,00	(2.020.619,00)	91,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.212.000,00	21.191.381,00	(2.020.619,00)	91,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.176.528,00	124.660.682,00	(33.515.846,00)	78,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.136.528,00	40.155.682,00	(27.980.846,00)	58,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.136.528,00	40.155.682,00	(27.980.846,00)	58,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.136.528,00	40.155.682,00	(27.980.846,00)	58,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	88.000.000,00	82.465.000,00	(5.535.000,00)	93,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.000.000,00	82.465.000,00	(5.535.000,00)	93,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	82.465.000,00	(5.535.000,00)	93,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.360.726.700,00	2.035.071.533,00	(325.655.167,00)	86,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.360.726.700,00	2.035.071.533,00	(325.655.167,00)	86,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	1.249.689.000,00	1.194.594.000,00	(55.095.000,00)	95,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.249.689.000,00	1.194.594.000,00	(55.095.000,00)	95,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.689.000,00	1.194.594.000,00	(55.095.000,00)	95,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	24.419.200,00	14.517.000,00	(9.902.200,00)	59,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	24.419.200,00	14.517.000,00	(9.902.200,00)	59,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.419.200,00	14.517.000,00	(9.902.200,00)	59,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	18.695.500,00	9.930.533,00	(8.764.967,00)	53,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	18.695.500,00	9.930.533,00	(8.764.967,00)	53,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.695.500,00	9.930.533,00	(8.764.967,00)	53,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020		DISEMINASI INFORMASI	298.145.000,00	283.280.000,00	(14.865.000,00)	95,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	298.145.000,00	283.280.000,00	(14.865.000,00)	95,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.145.000,00	283.280.000,00	(14.865.000,00)	95,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	769.778.000,00	532.750.000,00	(237.028.000,00)	69,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	769.778.000,00	532.750.000,00	(237.028.000,00)	69,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.778.000,00	532.750.000,00	(237.028.000,00)	69,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	850.434.200,00	613.277.600,00	(237.156.600,00)	72,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	850.434.200,00	613.277.600,00	(237.156.600,00)	72,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016		PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH	3.000.000,00	2.811.000,00	(189.000,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.811.000,00	(189.000,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.811.000,00	(189.000,00)	93,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019		KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE	300.784.000,00	119.957.700,00	(180.826.300,00)	39,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	180.784.000,00	0,00	(180.784.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.784.000,00	0,00	(180.784.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	119.957.700,00	(42.300,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00	119.957.700,00	(42.300,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	546.650.200,00	490.508.900,00	(56.141.300,00)	89,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	546.650.200,00	490.508.900,00	(56.141.300,00)	89,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.650.200,00	490.508.900,00	(56.141.300,00)	89,72	
				JUMLAH BELANJA	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.510.748.385,00)	(6.706.327.959,00)	804.420.426,00	89,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.510.748.385,00)	(6.706.327.959,00)	804.420.426,00	89,28	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009		PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
				JUMLAH BELANJA	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(36.454.825,00)	(6.868.400,00)	29.586.425,00	18,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(36.454.825,00)	(6.868.400,00)	29.586.425,00	18,84	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
				JUMLAH BELANJA	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,47	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.451.000,00)	(12.137.000,00)	314.000,00	97,47	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.451.000,00)	(12.137.000,00)	314.000,00	97,47	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
				JUMLAH PENDAPATAN	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	114.069.000,00	104.986.000,00	(9.083.000,00)	92,03	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	114.069.000,00	104.986.000,00	(9.083.000,00)	92,03	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	114.069.000,00	104.986.000,00	(9.083.000,00)	92,03	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.269.000,00	60.626.000,00	(8.643.000,00)	87,52	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.269.000,00	60.626.000,00	(8.643.000,00)	87,52	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	44.800.000,00	44.360.000,00	(440.000,00)	99,01	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.800.000,00	44.360.000,00	(440.000,00)	99,01	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	294.911.300,00	230.319.300,00	(64.592.000,00)	78,09	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	33.067.000,00	10.000.000,00	(23.067.000,00)	30,24	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0003		PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	33.067.000,00	10.000.000,00	(23.067.000,00)	30,24	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.067.000,00	10.000.000,00	(23.067.000,00)	30,24	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.067.000,00	10.000.000,00	(23.067.000,00)	30,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	261.844.300,00	220.319.300,00	(41.525.000,00)	84,14	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	46.186.000,00	21.031.000,00	(25.155.000,00)	45,53	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.827.000,00	12.712.000,00	(115.000,00)	99,10	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.827.000,00	12.712.000,00	(115.000,00)	99,10	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	33.359.000,00	8.319.000,00	(25.040.000,00)	24,93	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.359.000,00	8.319.000,00	(25.040.000,00)	24,93	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	215.658.300,00	199.288.300,00	(16.370.000,00)	92,40	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	215.658.300,00	199.288.300,00	(16.370.000,00)	92,40	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.658.300,00	199.288.300,00	(16.370.000,00)	92,40	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	306.243.700,00	197.981.869,00	(108.261.831,00)	64,64	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	306.243.700,00	197.981.869,00	(108.261.831,00)	64,64	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	194.664.200,00	122.132.637,00	(72.531.563,00)	62,74	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	145.568.200,00	76.612.637,00	(68.955.563,00)	52,63	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.568.200,00	76.612.637,00	(68.955.563,00)	52,63	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	49.096.000,00	45.520.000,00	(3.576.000,00)	92,71	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.096.000,00	45.520.000,00	(3.576.000,00)	92,71	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	111.579.500,00	75.849.232,00	(35.730.268,00)	67,97	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.427.500,00	75.849.232,00	(31.578.268,00)	70,60	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.427.500,00	75.849.232,00	(31.578.268,00)	70,60	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.152.000,00	0,00	(4.152.000,00)	0,00	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.152.000,00	0,00	(4.152.000,00)	0,00	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	326.034.600,00	313.389.700,00	(12.644.900,00)	96,12	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01		PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	326.034.600,00	313.389.700,00	(12.644.900,00)	96,12	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0005		PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	209.963.000,00	197.364.000,00	(12.599.000,00)	93,99	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	209.963.000,00	197.364.000,00	(12.599.000,00)	93,99	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.963.000,00	197.364.000,00	(12.599.000,00)	93,99	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006		PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	116.071.600,00	116.025.700,00	(45.900,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	116.071.600,00	116.025.700,00	(45.900,00)	99,96	
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.071.600,00	116.025.700,00	(45.900,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(988.818.600,00)	(777.505.869,00	211.312.731,00	78,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(988.818.600,00)	(777.505.869,00)	211.312.731,00	78,62	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
	2.17.3.29.3.30.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
				JUMLAH PENDAPATAN	52.440.000,00	69.171.000,00	16.731.000,00	131,90	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,26	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.983.868.816,04	4.551.249.867,00	(432.618.949,04)	91,31	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	31.481.182,00	18.277.105,00	(13.204.077,00)	58,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.244.000,00	3.870.000,00	(374.000,00)	91,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.244.000,00	3.870.000,00	(374.000,00)	91,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.244.000,00	3.870.000,00	(374.000,00)	91,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.863.182,00	11.807.105,00	(12.056.077,00)	49,47	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.863.182,00	11.807.105,00	(12.056.077,00)	49,47	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.863.182,00	11.807.105,00	(12.056.077,00)	49,47	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.374.000,00	2.600.000,00	(774.000,00)	77,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.374.000,00	2.600.000,00	(774.000,00)	77,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.374.000,00	2.600.000,00	(774.000,00)	77,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	(124.468.449,02)	97,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	(124.468.449,02)	97,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	(124.468.449,02)	97,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	(124.468.449,02)	97,05	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	268.937.000,00	88.406.392,00	(180.530.608,00)	32,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.502.000,00	5.443.500,00	(1.058.500,00)	83,72	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.502.000,00	5.443.500,00	(1.058.500,00)	83,72	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.502.000,00	5.443.500,00	(1.058.500,00)	83,72	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.530.000,00	42.657.000,00	(17.873.000,00)	70,47	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.896.000,00	(104.000,00)	97,40	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.896.000,00	(104.000,00)	97,40	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.530.000,00	38.761.000,00	(17.769.000,00)	68,56	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.530.000,00	38.761.000,00	(17.769.000,00)	68,56	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.004.000,00	6.250.000,00	(21.754.000,00)	22,31	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.004.000,00	6.250.000,00	(21.754.000,00)	22,31	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.004.000,00	6.250.000,00	(21.754.000,00)	22,31	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.438.000,00	27.555.892,00	(6.882.108,00)	80,01	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.438.000,00	27.555.892,00	(6.882.108,00)	80,01	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.438.000,00	27.555.892,00	(6.882.108,00)	80,01	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	136.963.000,00	4.000.000,00	(132.963.000,00)	2,92	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0011	5.2	BELANJA MODAL	132.963.000,00	0,00	(132.963.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.963.000,00	0,00	(132.963.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	405.314.400,02	331.978.585,00	(73.335.815,02)	81,90	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	237.664.400,02	172.078.585,00	(65.585.815,02)	72,40	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.664.400,02	172.078.585,00	(65.585.815,02)	72,40	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.664.400,02	172.078.585,00	(65.585.815,02)	72,40	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	167.650.000,00	159.900.000,00	(7.750.000,00)	95,37	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	167.650.000,00	159.900.000,00	(7.750.000,00)	95,37	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.650.000,00	159.900.000,00	(7.750.000,00)	95,37	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.990.000,00	8.910.000,00	(41.080.000,00)	17,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.990.000,00	8.910.000,00	(1.080.000,00)	89,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	8.910.000,00	(1.080.000,00)	89,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	8.910.000,00	(1.080.000,00)	89,18	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	212.393.600,00	122.338.000,00	(90.055.600,00)	57,59	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	212.393.600,00	122.338.000,00	(90.055.600,00)	57,59	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	212.393.600,00	122.338.000,00	(90.055.600,00)	57,59	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	212.393.600,00	122.338.000,00	(90.055.600,00)	57,59	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.393.600,00	122.338.000,00	(90.055.600,00)	57,59	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	389.786.000,00	33.633.000,00	(356.153.000,00)	8,62	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	389.786.000,00	33.633.000,00	(356.153.000,00)	8,62	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	46.501.000,00	18.883.000,00	(27.618.000,00)	40,60	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.501.000,00	18.883.000,00	(27.618.000,00)	40,60	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.501.000,00	18.883.000,00	(27.618.000,00)	40,60	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	328.262.000,00	5.116.400,00	(323.145.600,00)	1,55	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	328.262.000,00	5.116.400,00	(323.145.600,00)	1,55	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.262.000,00	5.116.400,00	(23.145.600,00)	18,10	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	15.023.000,00	9.633.600,00	(5.389.400,00)	64,12	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	15.023.000,00	9.633.600,00	(5.389.400,00)	64,12	
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.023.000,00	9.633.600,00	(5.389.400,00)	64,12	
				JUMLAH BELANJA	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.533.608.416,04)	(4.638.049.867,00)	895.558.549,04	83,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.533.608.416,04)	(4.638.049.867,00)	895.558.549,04	83,81	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,12	
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,12	
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,12	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	(17.432.695,00)	99,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.325.361.558,10	5.973.903.696,00	(351.457.862,10)	94,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.095.500,00	16.004.211,00	(1.091.289,00)	93,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.999.000,00	8.997.211,00	(1.789,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.999.000,00	8.997.211,00	(1.789,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.000,00	8.997.211,00	(1.789,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.437.000,00	4.880.000,00	(557.000,00)	89,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.437.000,00	4.880.000,00	(557.000,00)	89,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.000,00	4.880.000,00	(557.000,00)	89,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.659.500,00	2.127.000,00	(532.500,00)	79,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.659.500,00	2.127.000,00	(532.500,00)	79,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.659.500,00	2.127.000,00	(532.500,00)	79,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	(314.032.233,10)	94,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	(314.032.233,10)	94,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	(314.032.233,10)	94,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	(314.032.233,10)	94,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	130.834.800,00	130.672.411,00	(162.389,00)	99,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.983.300,00	7.983.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.983.300,00	7.983.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.983.300,00	7.983.300,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.954.500,00	14.849.100,00	(105.400,00)	99,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.954.500,00	14.849.100,00	(105.400,00)	99,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.954.500,00	14.849.100,00	(105.400,00)	99,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	71.529.000,00	71.472.011,00	(56.989,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	71.529.000,00	71.472.011,00	(56.989,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.529.000,00	71.472.011,00	(56.989,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	183.960.000,00	149.279.803,00	(34.680.197,00)	81,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	11.608.553,00	(3.391.447,00)	77,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.608.553,00	(3.391.447,00)	77,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.608.553,00	(3.391.447,00)	77,39	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	168.960.000,00	137.671.250,00	(31.288.750,00)	81,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.960.000,00	137.671.250,00	(31.288.750,00)	81,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.960.000,00	137.671.250,00	(31.288.750,00)	81,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.612.000,00	27.120.246,00	(1.491.754,00)	94,78	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.112.000,00	22.620.246,00	(1.491.754,00)	93,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.112.000,00	22.620.246,00	(1.491.754,00)	93,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.112.000,00	22.620.246,00	(1.491.754,00)	93,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	156.112.000,00	154.361.958,00	(1.750.042,00)	98,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	156.112.000,00	154.361.958,00	(1.750.042,00)	98,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	144.856.000,00	143.131.958,00	(1.724.042,00)	98,80	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	144.856.000,00	143.131.958,00	(1.724.042,00)	98,80	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.856.000,00	143.131.958,00	(1.724.042,00)	98,80	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	11.256.000,00	11.230.000,00	(26.000,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.256.000,00	11.230.000,00	(26.000,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.256.000,00	11.230.000,00	(26.000,00)	99,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.130.000,00	65.755.400,00	(9.374.600,00)	87,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.130.000,00	65.755.400,00	(9.374.600,00)	87,52	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	15.436.000,00	13.800.000,00	(1.636.000,00)	89,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.436.000,00	13.800.000,00	(1.636.000,00)	89,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.436.000,00	13.800.000,00	(1.636.000,00)	89,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	32.660.000,00	25.911.000,00	(6.749.000,00)	79,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.660.000,00	25.911.000,00	(6.749.000,00)	79,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.660.000,00	25.911.000,00	(6.749.000,00)	79,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	27.034.000,00	26.044.400,00	(989.600,00)	96,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.034.000,00	26.044.400,00	(989.600,00)	96,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.034.000,00	26.044.400,00	(989.600,00)	96,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.117.000,00	89.676.000,00	(9.441.000,00)	90,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.117.000,00	89.676.000,00	(9.441.000,00)	90,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	99.117.000,00	89.676.000,00	(9.441.000,00)	90,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.117.000,00	89.676.000,00	(9.441.000,00)	90,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.117.000,00	89.676.000,00	(9.441.000,00)	90,47	
				JUMLAH BELANJA	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.655.720.558,10)	(4.301.129.749,00)	354.590.809,10	92,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.655.720.558,10)	(4.301.129.749,00)	354.590.809,10	92,38	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.000.000,00	15.200.000,00	200.000,00	101,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,72	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.213.455.662,94	4.905.744.334,00	(307.711.328,94)	94,09	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.738.500,00	4.610.500,00	(11.128.000,00)	29,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.468.000,00	2.340.000,00	(11.128.000,00)	17,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.468.000,00	2.340.000,00	(11.128.000,00)	17,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.468.000,00	2.340.000,00	(11.128.000,00)	17,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.270.500,00	2.270.500,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.270.500,00	2.270.500,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.500,00	2.270.500,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	(170.419.519,94)	96,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	(170.419.519,94)	96,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	(170.419.519,94)	96,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	(170.419.519,94)	96,19	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.348.000,00	0,00	(8.348.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8.348.000,00	0,00	(8.348.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.348.000,00	0,00	(8.348.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.348.000,00	0,00	(8.348.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	250.255.300,00	187.800.000,00	(62.455.300,00)	75,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.962.000,00	1.044.000,00	(2.918.000,00)	26,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.962.000,00	1.044.000,00	(2.918.000,00)	26,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.000,00	1.044.000,00	(2.918.000,00)	26,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.183.000,00	28.593.000,00	(9.590.000,00)	74,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.183.000,00	28.593.000,00	(9.590.000,00)	74,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.183.000,00	28.593.000,00	(9.590.000,00)	74,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.952.300,00	6.500.000,00	(13.452.300,00)	32,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.952.300,00	6.500.000,00	(13.452.300,00)	32,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.952.300,00	6.500.000,00	(13.452.300,00)	32,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	145.000.000,00	142.984.000,00	(2.016.000,00)	98,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	142.984.000,00	(2.016.000,00)	98,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	142.984.000,00	(2.016.000,00)	98,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.158.000,00	8.679.000,00	(34.479.000,00)	20,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.158.000,00	8.679.000,00	(34.479.000,00)	20,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.158.000,00	8.679.000,00	(34.479.000,00)	20,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.251.262,00	394.759.453,00	(14.491.809,00)	96,45	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	157.501.262,00	145.269.453,00	(12.231.809,00)	92,23	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.501.262,00	145.269.453,00	(12.231.809,00)	92,23	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.501.262,00	145.269.453,00	(12.231.809,00)	92,23	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	215.750.000,00	213.490.000,00	(2.260.000,00)	98,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	215.750.000,00	213.490.000,00	(2.260.000,00)	98,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.750.000,00	213.490.000,00	(2.260.000,00)	98,95	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.475.500,00	7.606.800,00	(40.868.700,00)	15,69	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.342.800,00	3.500.000,00	(21.842.800,00)	13,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.342.800,00	3.500.000,00	(21.842.800,00)	13,81	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.342.800,00	3.500.000,00	(21.842.800,00)	13,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	23.132.700,00	4.106.800,00	(19.025.900,00)	17,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.132.700,00	4.106.800,00	(19.025.900,00)	17,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.132.700,00	4.106.800,00	(19.025.900,00)	17,75	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	372.178.500,00	345.712.500,00	(26.466.000,00)	92,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	372.178.500,00	345.712.500,00	(26.466.000,00)	92,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	111.678.500,00	105.077.500,00	(6.601.000,00)	94,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	111.678.500,00	105.077.500,00	(6.601.000,00)	94,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.678.500,00	105.077.500,00	(6.601.000,00)	94,08	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	260.500.000,00	240.635.000,00	(19.865.000,00)	92,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	260.500.000,00	240.635.000,00	(19.865.000,00)	92,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.500.000,00	240.635.000,00	(19.865.000,00)	92,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.924.029.026,00	2.890.467.454,00	(1.033.561.572,00)	73,66	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	666.365.207,00	301.583.000,00	(364.782.207,00)	45,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	666.365.207,00	301.583.000,00	(364.782.207,00)	45,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	321.620.207,00	231.668.000,00	(89.952.207,00)	72,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.620.207,00	231.668.000,00	(89.952.207,00)	72,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	344.745.000,00	69.915.000,00	(274.830.000,00)	20,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.745.000,00	69.915.000,00	(274.830.000,00)	20,28	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.419.033.164,00	969.583.630,00	(449.449.534,00)	68,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.079.637.164,00	758.465.630,00	(321.171.534,00)	70,25	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.073.335.164,00	754.965.630,00	(318.369.534,00)	70,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.335.164,00	754.965.630,00	(318.369.534,00)	70,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	6.302.000,00	3.500.000,00	(2.802.000,00)	55,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.302.000,00	3.500.000,00	(2.802.000,00)	55,53	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	339.396.000,00	211.118.000,00	(128.278.000,00)	62,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	339.396.000,00	211.118.000,00	(128.278.000,00)	62,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.396.000,00	211.118.000,00	(128.278.000,00)	62,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	846.658.000,00	726.948.500,00	(119.709.500,00)	85,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	250.000.000,00	238.650.000,00	(11.350.000,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	238.650.000,00	(11.350.000,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	238.650.000,00	(11.350.000,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008		PEMUSATAN LATIHAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	596.658.000,00	488.298.500,00	(108.359.500,00)	81,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	593.334.000,00	488.298.500,00	(105.035.500,00)	82,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.334.000,00	488.298.500,00	(105.035.500,00)	82,29	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.2	BELANJA MODAL	3.324.000,00	0,00	(3.324.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.324.000,00	0,00	(3.324.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	741.972.655,00	642.352.324,00	(99.620.331,00)	86,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	144.700.000,00	115.974.624,00	(28.725.376,00)	80,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	144.700.000,00	115.974.624,00	(28.725.376,00)	80,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.700.000,00	115.974.624,00	(28.725.376,00)	80,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010		PEMASSALAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PADA TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	597.272.655,00	526.377.700,00	(70.894.955,00)	88,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	593.767.655,00	526.377.700,00	(67.389.955,00)	88,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.767.655,00	526.377.700,00	(67.389.955,00)	88,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.505.000,00	0,00	(3.505.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.505.000,00	0,00	(3.505.000,00)	0,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	139.920.000,00	130.202.000,00	(9.718.000,00)	93,05	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI	139.920.000,00	130.202.000,00	(9.718.000,00)	93,05	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008		PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN	39.920.000,00	30.202.000,00	(9.718.000,00)	75,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.920.000,00	30.202.000,00	(9.718.000,00)	75,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.920.000,00	30.202.000,00	(9.718.000,00)	75,65	
				JUMLAH BELANJA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.634.583.188,94)	(8.256.926.288,00)	1.377.656.900,94	85,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.634.583.188,94)	(8.256.926.288,00)	1.377.656.900,94	85,70	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.789.726.516,08	4.462.354.868,00	(327.371.648,08)	93,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.995.600,00	5.869.785,00	(3.125.815,00)	65,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.663.600,00	4.252.785,00	(2.410.815,00)	63,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.663.600,00	4.252.785,00	(2.410.815,00)	63,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.663.600,00	4.252.785,00	(2.410.815,00)	63,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	2.332.000,00	1.617.000,00	(715.000,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.332.000,00	1.617.000,00	(715.000,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.332.000,00	1.617.000,00	(715.000,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	(217.193.699,08)	95,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	(217.193.699,08)	95,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	(217.193.699,08)	95,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	(217.193.699,08)	95,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	142.225.300,00	89.265.311,00	(52.959.989,00)	62,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.986.000,00	0,00	(4.986.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.986.000,00	0,00	(4.986.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.986.000,00	0,00	(4.986.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.140.800,00	9.404.490,00	(5.736.310,00)	62,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.140.800,00	9.404.490,00	(5.736.310,00)	62,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.140.800,00	9.404.490,00	(5.736.310,00)	62,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.524.500,00	1.000.000,00	(8.524.500,00)	10,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.524.500,00	1.000.000,00	(8.524.500,00)	10,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.524.500,00	1.000.000,00	(8.524.500,00)	10,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.600.000,00	7.260.000,00	(2.340.000,00)	75,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	7.260.000,00	(2.340.000,00)	75,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	7.260.000,00	(2.340.000,00)	75,62	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	102.974.000,00	71.600.821,00	(31.373.179,00)	69,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	102.974.000,00	71.600.821,00	(31.373.179,00)	69,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.974.000,00	71.600.821,00	(31.373.179,00)	69,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	201.668.957,00	178.585.562,00	(23.083.395,00)	88,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.918.957,00	54.050.562,00	(9.868.395,00)	84,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.918.957,00	54.050.562,00	(9.868.395,00)	84,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.918.957,00	54.050.562,00	(9.868.395,00)	84,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	137.750.000,00	124.535.000,00	(13.215.000,00)	90,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	137.750.000,00	124.535.000,00	(13.215.000,00)	90,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.750.000,00	124.535.000,00	(13.215.000,00)	90,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.465.000,00	29.456.250,00	(31.008.750,00)	48,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA	33.986.000,00	12.124.350,00	(21.861.650,00)	35,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.986.000,00	12.124.350,00	(21.861.650,00)	35,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.986.000,00	12.124.350,00	(21.861.650,00)	35,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA	16.609.000,00	10.966.900,00	(5.642.100,00)	66,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.609.000,00	10.966.900,00	(5.642.100,00)	66,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.609.000,00	10.966.900,00	(5.642.100,00)	66,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.870.000,00	6.365.000,00	(3.505.000,00)	64,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.870.000,00	6.365.000,00	(3.505.000,00)	64,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	6.365.000,00	(3.505.000,00)	64,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	285.714.981,00	90.292.466,00	(195.422.515,00)	31,60	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	180.712.981,00	62.324.850,00	(118.388.131,00)	34,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN	29.919.000,00	12.244.000,00	(17.675.000,00)	40,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.919.000,00	12.244.000,00	(17.675.000,00)	40,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.919.000,00	12.244.000,00	(17.675.000,00)	40,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.408.000,00	37.025.460,00	(63.382.540,00)	36,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	100.408.000,00	37.025.460,00	(63.382.540,00)	36,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.408.000,00	37.025.460,00	(63.382.540,00)	36,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	50.385.981,00	13.055.390,00	(37.330.591,00)	25,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	44.523.981,00	7.193.390,00	(37.330.591,00)	16,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.523.981,00	7.193.390,00	(37.330.591,00)	16,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.002.000,00	27.967.616,00	(77.034.384,00)	26,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	46.664.000,00	2.048.616,00	(44.615.384,00)	4,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.664.000,00	2.048.616,00	(44.615.384,00)	4,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.664.000,00	2.048.616,00	(44.615.384,00)	4,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	58.338.000,00	25.919.000,00	(32.419.000,00)	44,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	58.338.000,00	25.919.000,00	(32.419.000,00)	44,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.338.000,00	25.919.000,00	(32.419.000,00)	44,42	
				JUMLAH BELANJA	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.075.441.497,08)	(4.552.647.334,00)	522.794.163,08	89,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.075.441.497,08)	(4.552.647.334,00)	522.794.163,08	89,69	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,09	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,09	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,09	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	32.551.000,00	10.439.500,00	(22.111.500,00)	32,07	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.551.000,00	10.439.500,00	(22.111.500,00)	32,07	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.551.000,00	10.439.500,00	(22.111.500,00)	32,07	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	20.997.000,00	5.142.500,00	(15.854.500,00)	24,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.997.000,00	5.142.500,00	(15.854.500,00)	24,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.997.000,00	5.142.500,00	(15.854.500,00)	24,49	
				JUMLAH BELANJA	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(53.548.000,00)	(15.582.000,00)	37.966.000,00	29,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(53.548.000,00)	(15.582.000,00)	37.966.000,00	29,09	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.502.207.323,54	6.193.512.456,00	(308.694.867,54)	95,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.472.000,00	(28.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	7.472.000,00	(28.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.472.000,00	(28.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.472.000,00	(28.000,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	(236.435.538,54)	96,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	(236.435.538,54)	96,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	(236.435.538,54)	96,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	(236.435.538,54)	96,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	163.541.000,00	127.368.073,00	(36.172.927,00)	77,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	41.421.000,00	28.014.990,00	(13.406.010,00)	67,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.421.000,00	28.014.990,00	(13.406.010,00)	67,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.421.000,00	28.014.990,00	(13.406.010,00)	67,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.615.000,00	4.627.000,00	(16.988.000,00)	21,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.615.000,00	4.627.000,00	(16.988.000,00)	21,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.615.000,00	4.627.000,00	(16.988.000,00)	21,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.750.000,00	21.540.000,00	(210.000,00)	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.750.000,00	21.540.000,00	(210.000,00)	99,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.540.000,00	(210.000,00)	99,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	78.755.000,00	73.186.083,00	(5.568.917,00)	92,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	78.755.000,00	73.186.083,00	(5.568.917,00)	92,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.755.000,00	73.186.083,00	(5.568.917,00)	92,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174.657.200,00	139.850.798,00	(34.806.402,00)	80,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	56.907.200,00	22.775.798,00	(34.131.402,00)	40,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.907.200,00	22.775.798,00	(34.131.402,00)	40,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.907.200,00	22.775.798,00	(34.131.402,00)	40,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	117.750.000,00	117.075.000,00	(675.000,00)	99,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	117.750.000,00	117.075.000,00	(675.000,00)	99,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	117.075.000,00	(675.000,00)	99,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	147.200.000,00	145.948.000,00	(1.252.000,00)	99,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	29.200.000,00	28.000.000,00	(1.200.000,00)	95,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	28.000.000,00	(1.200.000,00)	95,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	28.000.000,00	(1.200.000,00)	95,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	118.000.000,00	117.948.000,00	(52.000,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	117.948.000,00	(52.000,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	117.948.000,00	(52.000,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	(159.075.406,00)	96,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	(159.075.406,00)	96,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	(159.075.406,00)	96,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	(159.075.406,00)	96,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.101.500,00	128.714.302,00	(142.387.198,00)	47,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	4.025.911.500,00	4.009.223.292,00	(16.688.208,00)	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	615.896.874,00	611.278.325,00	(4.618.549,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	615.896.874,00	611.278.325,00	(4.618.549,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	615.896.874,00	611.278.325,00	(4.618.549,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	615.896.874,00	611.278.325,00	(4.618.549,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.002.268,00	35.351.000,00	(651.268,00)	98,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.05	Belanja Hibah	579.894.606,00	575.927.325,00	(3.967.281,00)	99,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127.700.000,00	25.141.450,00	(102.558.550,00)	19,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	127.700.000,00	25.141.450,00	(102.558.550,00)	19,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.700.000,00	25.141.450,00	(102.558.550,00)	19,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	127.700.000,00	25.141.450,00	(102.558.550,00)	19,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.700.000,00	25.141.450,00	(102.558.550,00)	19,68	
				JUMLAH BELANJA	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.542.817.197,54)	(10.967.869.825,00)	574.947.372,54	95,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.542.817.197,54)	(10.967.869.825,00)	574.947.372,54	95,01	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : DINAS PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.467.390.890,98	4.309.185.547,00	(158.205.343,98)	96,45	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	939.000,00	905.000,00	(34.000,00)	96,37	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	739.000,00	705.000,00	(34.000,00)	95,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	739.000,00	705.000,00	(34.000,00)	95,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.000,00	705.000,00	(34.000,00)	95,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.842.880.238,98	3.725.197.134,00	(117.683.104,98)	96,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.832.880.238,98	3.715.329.134,00	(117.551.104,98)	96,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.832.880.238,98	3.715.329.134,00	(117.551.104,98)	96,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.832.880.238,98	3.715.329.134,00	(117.551.104,98)	96,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.000.000,00	9.868.000,00	(132.000,00)	98,68	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.868.000,00	(132.000,00)	98,68	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.868.000,00	(132.000,00)	98,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	10.045.000,00	8.100.600,00	(1.944.400,00)	80,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0003		KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	10.045.000,00	8.100.600,00	(1.944.400,00)	80,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.045.000,00	8.100.600,00	(1.944.400,00)	80,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	8.100.600,00	(1.944.400,00)	80,64	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.043.652,00	5.043.652,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.043.652,00	5.043.652,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.043.652,00	5.043.652,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.043.652,00	5.043.652,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.446.000,00	58.781.500,00	(664.500,00)	98,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.972.000,00	1.969.000,00	(3.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.972.000,00	1.969.000,00	(3.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.000,00	1.969.000,00	(3.000,00)	99,84	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.399.000,00	14.187.000,00	(212.000,00)	98,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.399.000,00	14.187.000,00	(212.000,00)	98,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.399.000,00	14.187.000,00	(212.000,00)	98,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.391.000,00	4.328.000,00	(63.000,00)	98,56	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.391.000,00	4.328.000,00	(63.000,00)	98,56	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.391.000,00	4.328.000,00	(63.000,00)	98,56	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.410.000,00	3.385.000,00	(25.000,00)	99,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.410.000,00	3.385.000,00	(25.000,00)	99,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.385.000,00	(25.000,00)	99,26	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.900.000,00	9.540.000,00	(360.000,00)	96,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.540.000,00	(360.000,00)	96,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.540.000,00	(360.000,00)	96,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.374.000,00	25.372.500,00	(1.500,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.374.000,00	25.372.500,00	(1.500,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.374.000,00	25.372.500,00	(1.500,00)	99,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	396.005.000,00	390.539.750,00	(5.465.250,00)	98,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	200.000.000,00	197.907.750,00	(2.092.250,00)	98,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.524.000,00	2.399.000,00	(125.000,00)	95,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.000,00	2.399.000,00	(125.000,00)	95,04	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	197.476.000,00	195.508.750,00	(1.967.250,00)	99,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.476.000,00	195.508.750,00	(1.967.250,00)	99,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	196.005.000,00	192.632.000,00	(3.373.000,00)	98,27	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.740.000,00	3.532.000,00	(208.000,00)	94,43	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	3.532.000,00	(208.000,00)	94,43	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	192.265.000,00	189.100.000,00	(3.165.000,00)	98,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.265.000,00	189.100.000,00	(3.165.000,00)	98,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.290.000,00	95.007.451,00	(15.282.549,00)	86,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.540.000,00	14.302.451,00	(4.237.549,00)	77,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.540.000,00	14.302.451,00	(4.237.549,00)	77,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	14.302.451,00	(4.237.549,00)	77,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	91.750.000,00	80.705.000,00	(11.045.000,00)	87,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	91.750.000,00	80.705.000,00	(11.045.000,00)	87,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.750.000,00	80.705.000,00	(11.045.000,00)	87,96	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.742.000,00	25.610.460,00	(17.131.540,00)	59,91	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	32.592.000,00	16.190.460,00	(16.401.540,00)	49,67	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.592.000,00	16.190.460,00	(16.401.540,00)	49,67	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.592.000,00	16.190.460,00	(16.401.540,00)	49,67	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.150.000,00	9.420.000,00	(730.000,00)	92,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.150.000,00	9.420.000,00	(730.000,00)	92,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	9.420.000,00	(730.000,00)	92,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	33.139.500,00	30.119.000,00	(3.020.500,00)	90,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	33.139.500,00	30.119.000,00	(3.020.500,00)	90,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	33.139.500,00	30.119.000,00	(3.020.500,00)	90,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	33.139.500,00	30.119.000,00	(3.020.500,00)	90,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.139.500,00	30.119.000,00	(3.020.500,00)	90,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.197.780.000,00	1.158.445.453,00	(39.334.547,00)	96,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.197.780.000,00	1.158.445.453,00	(39.334.547,00)	96,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003		PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	820.500.000,00	800.763.453,00	(19.736.547,00)	97,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	761.000.000,00	741.263.453,00	(19.736.547,00)	97,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.000.000,00	741.263.453,00	(19.736.547,00)	97,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	261.720.000,00	249.682.000,00	(12.038.000,00)	95,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	261.720.000,00	249.682.000,00	(12.038.000,00)	95,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.720.000,00	249.682.000,00	(12.038.000,00)	95,40	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	114.000.000,00	108.000.000,00	(6.000.000,00)	94,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	108.000.000,00	(6.000.000,00)	94,73	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	108.000.000,00	(6.000.000,00)	94,73	
				JUMLAH BELANJA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.693.310.390,98)	(5.497.750.000,00)	195.560.390,98	96,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.693.310.390,98)	(5.497.750.000,00)	195.560.390,98	96,56	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.322.512.877,00	38.415.469.879,00	(3.907.042.998,00)	90,76	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	126.157.000,00	123.873.506,00	(2.283.494,00)	98,18	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.881.500,00	53.514.750,00	(366.750,00)	99,31	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.881.500,00	53.514.750,00	(366.750,00)	99,31	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.881.500,00	53.514.750,00	(366.750,00)	99,31	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.000.000,00	9.402.300,00	(597.700,00)	94,02	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.402.300,00	(597.700,00)	94,02	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.402.300,00	(597.700,00)	94,02	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	47.921.000,00	47.348.706,00	(572.294,00)	98,80	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.921.000,00	47.348.706,00	(572.294,00)	98,80	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.921.000,00	47.348.706,00	(572.294,00)	98,80	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.354.500,00	13.607.750,00	(746.750,00)	94,79	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.354.500,00	13.607.750,00	(746.750,00)	94,79	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.354.500,00	13.607.750,00	(746.750,00)	94,79	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	24.641.199.699,00	23.142.170.614,00	(1.499.029.085,00)	93,91	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	22.972.282.199,00	21.479.432.637,00	(1.492.849.562,00)	93,50	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.972.282.199,00	21.479.432.637,00	(1.492.849.562,00)	93,50	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	22.972.282.199,00	21.479.432.637,00	(1.492.849.562,00)	93,50	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI	1.650.584.500,00	1.645.758.977,00	(4.825.523,00)	99,70	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.584.500,00	1.645.758.977,00	(4.825.523,00)	99,70	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.584.500,00	1.645.758.977,00	(4.825.523,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.333.000,00	16.979.000,00	(1.354.000,00)	92,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.333.000,00	16.979.000,00	(1.354.000,00)	92,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.333.000,00	16.979.000,00	(1.354.000,00)	92,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	206.863.000,00	202.663.014,00	(4.199.986,00)	97,96	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0003		KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	86.893.000,00	86.349.700,00	(543.300,00)	99,37	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	86.893.000,00	86.349.700,00	(543.300,00)	99,37	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.893.000,00	86.349.700,00	(543.300,00)	99,37	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG	64.793.000,00	63.836.212,00	(956.788,00)	98,52	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.793.000,00	63.836.212,00	(956.788,00)	98,52	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.793.000,00	63.836.212,00	(956.788,00)	98,52	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.547.500,00	22.441.652,00	(2.105.848,00)	91,42	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.547.500,00	22.441.652,00	(2.105.848,00)	91,42	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.547.500,00	22.441.652,00	(2.105.848,00)	91,42	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	30.629.500,00	30.035.450,00	(594.050,00)	98,06	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.629.500,00	30.035.450,00	(594.050,00)	98,06	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.629.500,00	30.035.450,00	(594.050,00)	98,06	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	789.297.640,00	712.487.183,00	(76.810.457,00)	90,26	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	18.300.000,00	16.416.000,00	(1.884.000,00)	89,70	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.300.000,00	16.416.000,00	(1.884.000,00)	89,70	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	16.416.000,00	(1.884.000,00)	89,70	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	137.737.800,00	130.297.740,00	(7.440.060,00)	94,59	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	137.737.800,00	130.297.740,00	(7.440.060,00)	94,59	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.737.800,00	130.297.740,00	(7.440.060,00)	94,59	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	633.259.840,00	565.773.443,00	(67.486.397,00)	89,34	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	633.259.840,00	565.773.443,00	(67.486.397,00)	89,34	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.259.840,00	565.773.443,00	(67.486.397,00)	89,34	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	733.175.210,00	704.961.210,00	(28.214.000,00)	96,15	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	733.175.210,00	704.961.210,00	(28.214.000,00)	96,15	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.449.770,00	2.449.770,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.770,00	2.449.770,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	730.725.440,00	702.511.440,00	(28.214.000,00)	96,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	730.725.440,00	702.511.440,00	(28.214.000,00)	96,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.280.694.518,00	5.776.481.849,00	(504.212.669,00)	91,97	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	58.403.850,00	57.434.120,00	(969.730,00)	98,33	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.403.850,00	57.434.120,00	(969.730,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.403.850,00	57.434.120,00	(969.730,00)	98,33	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.661.123.218,00	3.436.175.743,00	(224.947.475,00)	93,85	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.661.123.218,00	3.436.175.743,00	(224.947.475,00)	93,85	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.661.123.218,00	3.436.175.743,00	(224.947.475,00)	93,85	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.281.017.450,00	1.098.966.986,00	(182.050.464,00)	85,78	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.281.017.450,00	1.098.966.986,00	(182.050.464,00)	85,78	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.017.450,00	1.098.966.986,00	(182.050.464,00)	85,78	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.280.150.000,00	1.183.905.000,00	(96.245.000,00)	92,48	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.280.150.000,00	1.183.905.000,00	(96.245.000,00)	92,48	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.150.000,00	1.183.905.000,00	(96.245.000,00)	92,48	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.775.029.000,00	3.238.790.280,00	(536.238.720,00)	85,79	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	215.130.000,00	55.772.150,00	(159.357.850,00)	25,92	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	215.130.000,00	55.772.150,00	(159.357.850,00)	25,92	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.130.000,00	55.772.150,00	(159.357.850,00)	25,92	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	444.441.000,00	112.817.820,00	(331.623.180,00)	25,38	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	444.441.000,00	112.817.820,00	(331.623.180,00)	25,38	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.441.000,00	112.817.820,00	(331.623.180,00)	25,38	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.957.618.000,00	2.912.614.000,00	(45.004.000,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.957.618.000,00	2.912.614.000,00	(45.004.000,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.957.618.000,00	2.912.614.000,00	(45.004.000,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	157.840.000,00	157.586.310,00	(253.690,00)	99,83	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	157.840.000,00	157.586.310,00	(253.690,00)	99,83	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.840.000,00	157.586.310,00	(253.690,00)	99,83	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.309.006.310,00	1.739.399.012,00	(569.607.298,00)	75,33	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	(269.607.298,00)	80,86	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	(269.607.298,00)	80,86	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	(269.607.298,00)	80,86	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,0	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,0	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,0	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.474.193.000,00	1.231.309.756,00	(242.883.244,00)	83,52	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	917.643.000,00	757.267.908,00	(160.375.092,00)	82,52	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	845.139.000,00	733.617.908,00	(111.521.092,00)	86,80	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.139.000,00	733.617.908,00	(111.521.092,00)	86,80	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	72.504.000,00	23.650.000,00	(48.854.000,00)	32,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.504.000,00	23.650.000,00	(48.854.000,00)	32,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA	556.550.000,00	474.041.848,00	(82.508.152,00)	85,17	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	556.550.000,00	474.041.848,00	(82.508.152,00)	85,17	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.550.000,00	474.041.848,00	(82.508.152,00)	85,17	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	396.320.000,00	206.008.865,00	(190.311.135,00)	51,98	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	96.862.000,00	47.480.899,00	(49.381.101,00)	49,01	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.074.000,00	42.263.899,00	(46.810.101,00)	47,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.074.000,00	42.263.899,00	(46.810.101,00)	47,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.788.000,00	5.217.000,00	(2.571.000,00)	66,98	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.788.000,00	5.217.000,00	(2.571.000,00)	66,98	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	155.403.000,00	72.177.936,00	(83.225.064,00)	46,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.403.000,00	72.177.936,00	(83.225.064,00)	46,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.403.000,00	72.177.936,00	(83.225.064,00)	46,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	94.178.000,00	52.974.559,00	(41.203.441,00)	56,24	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	94.178.000,00	52.974.559,00	(41.203.441,00)	56,24	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.178.000,00	52.974.559,00	(41.203.441,00)	56,24	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	41.400.000,00	30.072.471,00	(11.327.529,00)	72,63	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.400.000,00	30.072.471,00	(11.327.529,00)	72,63	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	30.072.471,00	(11.327.529,00)	72,63	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	8.477.000,00	3.303.000,00	(5.174.000,00)	38,96	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.477.000,00	3.303.000,00	(5.174.000,00)	38,96	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.477.000,00	3.303.000,00	(5.174.000,00)	38,96	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.590.577.500,00	1.337.324.590,00	(253.252.910,00)	84,07	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	508.350.000,00	372.548.530,00	(135.801.470,00)	73,28	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	508.350.000,00	372.548.530,00	(135.801.470,00)	73,28	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.350.000,00	372.548.530,00	(135.801.470,00)	73,28	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	982.415.500,00	879.642.900,00	(102.772.600,00)	89,53	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	982.415.500,00	879.642.900,00	(102.772.600,00)	89,53	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.415.500,00	879.642.900,00	(102.772.600,00)	89,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	99.812.000,00	85.133.160,00	(14.678.840,00)	85,29	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.300.000,00	16.283.160,00	(1.016.840,00)	94,12	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	16.283.160,00	(1.016.840,00)	94,12	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	82.512.000,00	68.850.000,00	(13.662.000,00)	83,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.512.000,00	68.850.000,00	(13.662.000,00)	83,44	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.495.475.286,00	16.631.181.070,00	(5.864.294.216,00)	73,93	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	6.940.795.800,00	2.094.646.202,00	(4.846.149.598,00)	30,17	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.706.619.000,00	1.701.799.602,00	(4.819.398,00)	99,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.706.619.000,00	1.701.799.602,00	(4.819.398,00)	99,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.706.619.000,00	1.701.799.602,00	(4.819.398,00)	99,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	4.826.098.000,00	18.759.800,00	(4.807.338.200,00)	0,38	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.826.098.000,00	18.759.800,00	(4.807.338.200,00)	0,38	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.098.000,00	18.759.800,00	(207.338.200,00)	8,29	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		Belanja Hibah	4.600.000.000,00	-	(4.600.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	408.078.800,00	374.086.800,00	(33.992.000,00)	91,67	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	408.078.800,00	374.086.800,00	(33.992.000,00)	91,67	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.078.800,00	374.086.800,00	(33.992.000,00)	91,67	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.507.459.800,00	13.895.075.813,00	(612.383.987,00)	95,77	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	8.748.020.000,00	8.621.553.662,00	(126.466.338,00)	98,55	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.748.020.000,00	8.621.553.662,00	(126.466.338,00)	98,55	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.748.020.000,00	8.621.553.662,00	(126.466.338,00)	98,55	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.365.033.100,00	3.006.885.942,00	(358.147.158,00)	89,35	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.365.033.100,00	3.006.885.942,00	(358.147.158,00)	89,35	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.033.100,00	756.885.942,00	(58.147.158,00)	92,86	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	2.550.000.000,00	2.250.000.000,00	(300.000.000,00)	88,23	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2.394.406.700,00	2.266.636.209,00	(127.770.491,00)	94,66	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.394.406.700,00	2.266.636.209,00	(127.770.491,00)	94,66	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.394.406.700,00	2.266.636.209,00	(127.770.491,00)	94,66	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.014.459.686,00	608.699.055,00	(405.760.631,00)	60,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	280.937.412,00	228.093.938,00	(52.843.474,00)	81,19	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	271.524.412,00	228.093.938,00	(43.430.474,00)	84,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.524.412,00	228.093.938,00	(43.430.474,00)	84,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	9.413.000,00	0,00	(9.413.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.413.000,00	0,00	(9.413.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	478.106.000,00	209.087.100,00	(269.018.900,00)	43,73	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	468.693.000,00	209.087.100,00	(259.605.900,00)	44,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.693.000,00	209.087.100,00	(259.605.900,00)	44,61	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.413.000,00	0,00	(9.413.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.413.000,00	0,00	(9.413.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	255.416.274,00	171.518.017,00	(83.898.257,00)	67,15	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	225.270.274,00	171.518.017,00	(53.752.257,00)	76,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.270.274,00	171.518.017,00	(53.752.257,00)	76,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	30.146.000,00	0,00	(30.146.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.146.000,00	0,00	(30.146.000,00)	0,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.189.130.609,05	3.881.668.519,00	(307.462.090,05)	92,66	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	2.582.919.600,00	2.461.585.060,00	(121.334.540,00)	95,3	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	667.876.200,00	602.081.000,00	(65.795.200,00)	90,14	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	667.876.200,00	602.081.000,00	(65.795.200,00)	90,14	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.876.200,00	602.081.000,00	(65.795.200,00)	90,14	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	368.528.000,00	343.747.060,00	(24.780.940,00)	93,27	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	368.528.000,00	343.747.060,00	(24.780.940,00)	93,27	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.528.000,00	343.747.060,00	(24.780.940,00)	93,27	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	1.546.515.400,00	1.515.757.000,00	(30.758.400,00)	98,01	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.546.515.400,00	1.515.757.000,00	(30.758.400,00)	98,01	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.515.400,00	315.757.000,00	(30.758.400,00)	91,12	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	202.791.000,00	167.972.879,00	(34.818.121,00)	82,83	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	65.000.000,00	64.009.800,00	(990.200,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.009.800,00	(990.200,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.009.800,00	(990.200,00)	98,47	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	85.000.000,00	53.903.779,00	(31.096.221,00)	63,41	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	53.903.779,00	(31.096.221,00)	63,41	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	53.903.779,00	(31.096.221,00)	63,41	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN	52.791.000,00	50.059.300,00	(2.731.700,00)	94,82	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.791.000,00	50.059.300,00	(2.731.700,00)	94,82	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.791.000,00	50.059.300,00	(2.731.700,00)	94,82	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.219.554.709,05	1.158.851.880,00	(60.702.829,05)	95,02	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	670.444.898,00	647.442.159,00	(23.002.739,00)	96,56	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	433.320.738,00	411.382.159,00	(21.938.579,00)	94,93	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.320.738,00	411.382.159,00	(21.938.579,00)	94,93	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	237.124.160,00	236.060.000,00	(1.064.160,00)	99,55	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.128.000,00	37.000.000,00	(128.000,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.996.160,00	199.060.000,00	(936.160,00)	99,53	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	207.020.380,05	196.340.985,00	(10.679.395,05)	94,84	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.317.380,05	121.637.985,00	(10.679.395,05)	91,92	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.317.380,05	121.637.985,00	(10.679.395,05)	91,92	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	74.703.000,00	74.703.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	74.703.000,00	74.703.000,00	0,00	100	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	342.089.431,00	315.068.736,00	(27.020.695,00)	92,1	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	342.089.431,00	315.068.736,00	(27.020.695,00)	92,1	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.089.431,00	315.068.736,00	(27.020.695,00)	92,1	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	183.865.300,00	93.258.700,00	(90.606.600,00)	50,72	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	120.000.000,00	40.452.300,00	(79.547.700,00)	33,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	40.452.300,00	(79.547.700,00)	33,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	40.452.300,00	(79.547.700,00)	33,71	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.001.900,00	27.413.100,00	(10.588.800,00)	72,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.001.900,00	27.413.100,00	(10.588.800,00)	72,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.001.900,00	27.413.100,00	(10.588.800,00)	72,13	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	25.863.400,00	25.393.300,00	(470.100,00)	98,18	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.863.400,00	25.393.300,00	(470.100,00)	98,18	
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.863.400,00	25.393.300,00	(470.100,00)	98,18	
				JUMLAH BELANJA	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(69.007.118.772,05)	(58.928.319.468,00)	10.078.799.304,05	85,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(69.007.118.772,05)	(58.928.319.468,00)	10.078.799.304,05	85,39	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DEWAN
Organisasi : SEKRETARIAT DEWAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.859.980.074,82	25.380.074.518,00	(2.479.905.556,82)	91,09	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	85.555.800,00	53.622.850,00	(31.932.950,00)	62,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.345.000,00	23.145.250,00	(6.199.750,00)	78,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.345.000,00	23.145.250,00	(6.199.750,00)	78,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.345.000,00	23.145.250,00	(6.199.750,00)	78,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	16.306.000,00	9.806.000,00	(6.500.000,00)	60,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.306.000,00	9.806.000,00	(6.500.000,00)	60,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.306.000,00	9.806.000,00	(6.500.000,00)	60,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.496.000,00	10.311.200,00	(9.184.800,00)	52,88	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.496.000,00	10.311.200,00	(9.184.800,00)	52,88	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.496.000,00	10.311.200,00	(9.184.800,00)	52,88	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.408.800,00	10.360.400,00	(10.048.400,00)	50,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.408.800,00	10.360.400,00	(10.048.400,00)	50,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.408.800,00	10.360.400,00	(10.048.400,00)	50,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.098.714.814,82	4.803.602.934,00	(295.111.880,82)	94,21	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.072.786.814,82	4.782.806.784,00	(289.980.030,82)	94,28	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.072.786.814,82	4.782.806.784,00	(289.980.030,82)	94,28	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.072.786.814,82	4.782.806.784,00	(289.980.030,82)	94,28	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.316.000,00	9.316.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.316.000,00	9.316.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	9.316.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	16.612.000,00	11.480.150,00	(5.131.850,00)	69,10	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.612.000,00	11.480.150,00	(5.131.850,00)	69,10	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.612.000,00	11.480.150,00	(5.131.850,00)	69,10	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	7.287.000,00	5.456.000,00	(1.831.000,00)	74,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.287.000,00	5.456.000,00	(1.831.000,00)	74,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.287.000,00	5.456.000,00	(1.831.000,00)	74,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.287.000,00	5.456.000,00	(1.831.000,00)	74,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	541.425.000,00	407.194.550,00	(134.230.450,00)	75,20	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	225.375.000,00	150.082.950,00	(75.292.050,00)	66,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	225.375.000,00	150.082.950,00	(75.292.050,00)	66,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.375.000,00	150.082.950,00	(75.292.050,00)	66,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	316.050.000,00	257.111.600,00	(58.938.400,00)	81,35	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	316.050.000,00	257.111.600,00	(58.938.400,00)	81,35	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.050.000,00	257.111.600,00	(58.938.400,00)	81,35	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	844.063.900,00	730.688.864,00	(113.375.036,00)	86,56	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	32.354.000,00	20.136.586,00	(12.217.414,00)	62,23	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.354.000,00	20.136.586,00	(12.217.414,00)	62,23	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.354.000,00	20.136.586,00	(12.217.414,00)	62,23	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	145.001.000,00	121.835.154,00	(23.165.846,00)	84,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.001.000,00	121.835.154,00	(23.165.846,00)	84,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.001.000,00	121.835.154,00	(23.165.846,00)	84,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.222.400,00	20.787.400,00	(1.435.000,00)	93,54	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.222.400,00	20.787.400,00	(1.435.000,00)	93,54	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.222.400,00	20.787.400,00	(1.435.000,00)	93,54	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	110.633.000,00	98.463.504,00	(12.169.496,00)	89,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	110.633.000,00	98.463.504,00	(12.169.496,00)	89,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.633.000,00	98.463.504,00	(12.169.496,00)	89,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	200.863.500,00	168.925.350,00	(31.938.150,00)	84,09	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	200.863.500,00	168.925.350,00	(31.938.150,00)	84,09	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.863.500,00	168.925.350,00	(31.938.150,00)	84,09	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	0,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	0,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	302.632.000,00	294.574.070,00	(8.057.930,00)	97,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	302.632.000,00	294.574.070,00	(8.057.930,00)	97,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.632.000,00	294.574.070,00	(8.057.930,00)	97,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	24.108.000,00	5.966.800,00	(18.141.200,00)	24,75	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	24.108.000,00	5.966.800,00	(18.141.200,00)	24,75	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.108.000,00	5.966.800,00	(18.141.200,00)	24,75	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.973.921.200,00	3.760.692.855,00	(213.228.345,00)	94,63	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.093.960.000,00	1.981.075.056,00	(112.884.944,00)	94,6	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0,00	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.092.600.000,00	1.981.075.056,00	(111.524.944,00)	94,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.092.600.000,00	1.981.075.056,00	(111.524.944,00)	94,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	1.066.300.500,00	1.039.980.500,00	(26.320.000,00)	97,53	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.588.000,00	2.685.500,00	(902.500,00)	74,84	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.588.000,00	2.685.500,00	(902.500,00)	74,84	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.062.712.500,00	1.037.295.000,00	(25.417.500,00)	97,60	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.062.712.500,00	1.037.295.000,00	(25.417.500,00)	97,60	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	283.531.000,00	271.874.299,00	(11.656.701,00)	95,88	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.881.000,00	3.364.000,00	(517.000,00)	86,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.881.000,00	3.364.000,00	(517.000,00)	86,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	279.650.000,00	268.510.299,00	(11.139.701,00)	96,01	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.650.000,00	268.510.299,00	(11.139.701,00)	96,01	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	530.129.700,00	467.763.000,00	(62.366.700,00)	88,23	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.072.700,00	1.360.000,00	(8.712.700,00)	13,50	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.072.700,00	1.360.000,00	(8.712.700,00)	13,50	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	520.057.000,00	466.403.000,00	(53.654.000,00)	89,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.057.000,00	466.403.000,00	(53.654.000,00)	89,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	734.441.000,00	596.526.584,00	(137.914.416,00)	81,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.960.000,00	5.400.000,00	(8.560.000,00)	38,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.960.000,00	5.400.000,00	(8.560.000,00)	38,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	5.400.000,00	(8.560.000,00)	38,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	398.331.000,00	295.846.989,00	(102.484.011,00)	74,27	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	398.331.000,00	295.846.989,00	(102.484.011,00)	74,27	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.331.000,00	295.846.989,00	(102.484.011,00)	74,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.900.000,00	21.394.595,00	(505.405,00)	97,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.900.000,00	21.394.595,00	(505.405,00)	97,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.394.595,00	(505.405,00)	97,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	300.250.000,00	273.885.000,00	(26.365.000,00)	91,21	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	300.250.000,00	273.885.000,00	(26.365.000,00)	91,21	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.250.000,00	273.885.000,00	(26.365.000,00)	91,21	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	607.118.200,00	401.787.483,00	(205.330.717,00)	66,17	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	199.805.500,00	164.177.645,00	(35.627.855,00)	82,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	199.805.500,00	164.177.645,00	(35.627.855,00)	82,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.805.500,00	164.177.645,00	(35.627.855,00)	82,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	264.622.500,00	152.635.608,00	(111.986.892,00)	57,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	264.622.500,00	152.635.608,00	(111.986.892,00)	57,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.622.500,00	152.635.608,00	(111.986.892,00)	57,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	102.958.000,00	72.683.149,00	(30.274.851,00)	70,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	102.958.000,00	72.683.149,00	(30.274.851,00)	70,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.958.000,00	72.683.149,00	(30.274.851,00)	70,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	39.732.200,00	12.291.081,00	(27.441.119,00)	30,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.732.200,00	12.291.081,00	(27.441.119,00)	30,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.732.200,00	12.291.081,00	(27.441.119,00)	30,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	15.202.337.160,00	14.119.943.025,00	(1.082.394.135,00)	92,88	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	14.692.715.360,00	13.702.126.225,00	(990.589.135,00)	93,25	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.692.715.360,00	13.702.126.225,00	(990.589.135,00)	93,25	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Pegawai	14.692.715.360,00	13.702.126.225,00	(990.589.135,00)	93,25	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	353.172.800,00	328.923.550,00	(24.249.250,00)	93,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	353.172.800,00	328.923.550,00	(24.249.250,00)	93,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.172.800,00	328.923.550,00	(24.249.250,00)	93,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	156.449.000,00	88.893.250,00	(67.555.750,00)	56,81	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.449.000,00	88.893.250,00	(67.555.750,00)	56,81	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.449.000,00	88.893.250,00	(67.555.750,00)	56,81	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	765.116.000,00	500.559.373,00	(264.556.627,00)	65,42	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	64.724.200,00	42.804.412,00	(21.919.788,00)	66,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.724.200,00	42.804.412,00	(21.919.788,00)	66,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.724.200,00	42.804.412,00	(21.919.788,00)	66,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	351.998.800,00	261.042.930,00	(90.955.870,00)	74,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	351.998.800,00	261.042.930,00	(90.955.870,00)	74,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.998.800,00	261.042.930,00	(90.955.870,00)	74,16	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	348.393.000,00	196.712.031,00	(151.680.969,00)	56,46	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	348.393.000,00	196.712.031,00	(151.680.969,00)	56,46	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.393.000,00	196.712.031,00	(151.680.969,00)	56,46	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.109.657.154,00	9.895.643.710,00	(1.214.013.444,00)	89,07	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	983.288.680,00	794.230.013,00	(189.058.667,00)	80,77	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	41.009.000,00	17.724.096,00	(23.284.904,00)	43,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.009.000,00	17.724.096,00	(23.284.904,00)	43,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.009.000,00	17.724.096,00	(23.284.904,00)	43,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	740.404.280,00	684.780.617,00	(55.623.663,00)	92,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	740.404.280,00	684.780.617,00	(55.623.663,00)	92,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.404.280,00	684.780.617,00	(55.623.663,00)	92,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	201.875.400,00	91.725.300,00	(110.150.100,00)	45,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	201.875.400,00	91.725.300,00	(110.150.100,00)	45,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.875.400,00	91.725.300,00	(110.150.100,00)	45,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.345.122.200,00	1.212.917.724,00	(132.204.476,00)	90,17	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	205.655.800,00	202.051.001,00	(3.604.799,00)	98,24	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.655.800,00	202.051.001,00	(3.604.799,00)	98,24	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.655.800,00	202.051.001,00	(3.604.799,00)	98,24	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	21.991.700,00	11.541.000,00	(10.450.700,00)	52,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.991.700,00	11.541.000,00	(10.450.700,00)	52,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.991.700,00	11.541.000,00	(10.450.700,00)	52,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	595.405.200,00	555.786.723,00	(39.618.477,00)	93,34	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	595.405.200,00	555.786.723,00	(39.618.477,00)	93,34	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.405.200,00	555.786.723,00	(39.618.477,00)	93,34	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	94.521.500,00	75.931.500,00	(18.590.000,00)	80,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.521.500,00	75.931.500,00	(18.590.000,00)	80,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.521.500,00	75.931.500,00	(18.590.000,00)	80,33	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	142.908.000,00	119.325.200,00	(23.582.800,00)	83,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	142.908.000,00	119.325.200,00	(23.582.800,00)	83,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.908.000,00	119.325.200,00	(23.582.800,00)	83,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	284.640.000,00	248.282.300,00	(36.357.700,00)	87,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	284.640.000,00	248.282.300,00	(36.357.700,00)	87,22	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.640.000,00	248.282.300,00	(36.357.700,00)	87,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2.210.967.500,00	2.071.198.903,00	(139.768.597,00)	93,67	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	313.463.500,00	283.661.900,00	(29.801.600,00)	90,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	313.463.500,00	283.661.900,00	(29.801.600,00)	90,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.463.500,00	283.661.900,00	(29.801.600,00)	90,49	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	344.061.000,00	336.942.950,00	(7.118.050,00)	97,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	344.061.000,00	336.942.950,00	(7.118.050,00)	97,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.061.000,00	336.942.950,00	(7.118.050,00)	97,93	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	228.420.000,00	198.018.731,00	(30.401.269,00)	86,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	228.420.000,00	198.018.731,00	(30.401.269,00)	86,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.420.000,00	198.018.731,00	(30.401.269,00)	86,69	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	265.782.500,00	245.663.886,00	(20.118.614,00)	92,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	265.782.500,00	245.663.886,00	(20.118.614,00)	92,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.782.500,00	245.663.886,00	(20.118.614,00)	92,43	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	312.893.500,00	304.715.019,00	(8.178.481,00)	97,38	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	312.893.500,00	304.715.019,00	(8.178.481,00)	97,38	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.893.500,00	304.715.019,00	(8.178.481,00)	97,38	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006		PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA	196.027.500,00	188.455.058,00	(7.572.442,00)	96,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	196.027.500,00	188.455.058,00	(7.572.442,00)	96,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.027.500,00	188.455.058,00	(7.572.442,00)	96,13	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	341.624.500,00	317.518.469,00	(24.106.031,00)	92,94	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	341.624.500,00	317.518.469,00	(24.106.031,00)	92,94	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.624.500,00	317.518.469,00	(24.106.031,00)	92,94	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	208.695.000,00	196.222.890,00	(12.472.110,00)	94,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	208.695.000,00	196.222.890,00	(12.472.110,00)	94,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.695.000,00	196.222.890,00	(12.472.110,00)	94,02	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.574.686.274,00	2.961.674.424,00	(613.011.850,00)	82,85	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001		ORIENTASI DPRD	519.691.400,00	466.954.000,00	(52.737.400,00)	89,85	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	519.691.400,00	466.954.000,00	(52.737.400,00)	89,85	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.691.400,00	466.954.000,00	(52.737.400,00)	89,85	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	769.040.874,00	683.496.534,00	(85.544.340,00)	88,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	769.040.874,00	683.496.534,00	(85.544.340,00)	88,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.040.874,00	683.496.534,00	(85.544.340,00)	88,87	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	190.925.000,00	108.500.000,00	(82.425.000,00)	56,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	190.925.000,00	108.500.000,00	(82.425.000,00)	56,82	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.925.000,00	108.500.000,00	(82.425.000,00)	56,82	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	431.248.000,00	408.664.000,00	(22.584.000,00)	94,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	431.248.000,00	408.664.000,00	(22.584.000,00)	94,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.248.000,00	408.664.000,00	(22.584.000,00)	94,76	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	225.208.000,00	125.210.505,00	(99.997.495,00)	55,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	225.208.000,00	125.210.505,00	(99.997.495,00)	55,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.208.000,00	125.210.505,00	(99.997.495,00)	55,59	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	21.237.000,00	6.728.400,00	(14.508.600,00)	31,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.237.000,00	6.728.400,00	(14.508.600,00)	31,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.237.000,00	6.728.400,00	(14.508.600,00)	31,68	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	1.417.336.000,00	1.162.120.985,00	(255.215.015,00)	81,99	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.417.336.000,00	1.162.120.985,00	(255.215.015,00)	81,99	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.336.000,00	1.162.120.985,00	(255.215.015,00)	81,99	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.319.136.200,00	1.262.774.754,00	(56.361.446,00)	95,72	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	30.000.000,00	15.142.000,00	(14.858.000,00)	50,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	15.142.000,00	(14.858.000,00)	50,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.142.000,00	(14.858.000,00)	50,47	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	100.624.800,00	93.773.810,00	(6.850.990,00)	93,19	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.624.800,00	93.773.810,00	(6.850.990,00)	93,19	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.624.800,00	93.773.810,00	(6.850.990,00)	93,19	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	1.188.511.400,00	1.153.858.944,00	(34.652.456,00)	97,08	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.188.511.400,00	1.153.858.944,00	(34.652.456,00)	97,08	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.511.400,00	1.153.858.944,00	(34.652.456,00)	97,08	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	144.378.500,00	143.634.640,00	(743.860,00)	99,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	144.378.500,00	143.634.640,00	(743.860,00)	99,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	144.378.500,00	143.634.640,00	(743.860,00)	99,48	
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.378.500,00	143.634.640,00	(743.860,00)	99,48	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	1.532.077.800,00	1.449.213.252,00	(82.864.548,00)	94,59	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	363.179.300,00	355.175.592,00	(8.003.708,00)	97,79	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	363.179.300,00	355.175.592,00	(8.003.708,00)	97,79	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.179.300,00	355.175.592,00	(8.003.708,00)	97,79	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	16.174.000,00	0,00	(16.174.000,00)	0,00	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.174.000,00	0,00	(16.174.000,00)	0,00	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.174.000,00	0,00	(16.174.000,00)	0,00	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	207.364.000,00	153.543.975,00	(53.820.025,00)	74,04	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	207.364.000,00	153.543.975,00	(53.820.025,00)	74,04	
	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.364.000,00	153.543.975,00	(53.820.025,00)	74,04	

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	945.360.500,00	940.493.685,00	(4.866.815,00)	99,48	
4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	945.360.500,00	940.493.685,00	(4.866.815,00)	99,48	
4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.360.500,00	940.493.685,00	(4.866.815,00)	99,48	
			JUMLAH BELANJA	38.969.637.229	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52	
			SURPLUS / (DEFISIT)	(38.969.637.228,82)	(35.275.718.228,00)	3.693.919.001	90,52	
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.969.637.228,82)	(35.275.718.228,00)	3.693.919.001	90,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.182.395.287,86	7.796.056.870,00	(386.338.417,86)	95,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.327.035.787,86	7.032.729.460,00	(294.306.327,86)	95,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.633.435.787,86	6.377.234.460,00	(256.201.327,86)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.633.435.787,86	6.377.234.460,00	(256.201.327,86)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.633.435.787,86	6.377.234.460,00	(256.201.327,86)	96,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	693.600.000,00	655.495.000,00	(38.105.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	693.600.000,00	655.495.000,00	(38.105.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.600.000,00	655.495.000,00	(38.105.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	436.416.500,00	405.537.210,00	(30.879.290,00)	92,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.988.000,00	9.771.000,00	(217.000,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.988.000,00	9.771.000,00	(217.000,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.988.000,00	9.771.000,00	(217.000,00)	97,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	105.621.500,00	103.397.210,00	(2.224.290,00)	97,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.621.500,00	103.397.210,00	(2.224.290,00)	97,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.621.500,00	103.397.210,00	(2.224.290,00)	97,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.660.000,00	16.510.000,00	(3.150.000,00)	83,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.660.000,00	16.510.000,00	(3.150.000,00)	83,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.660.000,00	16.510.000,00	(3.150.000,00)	83,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	21.690.000,00	(13.310.000,00)	61,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	21.690.000,00	(13.310.000,00)	61,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	21.690.000,00	(13.310.000,00)	61,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	254.187.000,00	246.169.000,00	(8.018.000,00)	96,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	254.187.000,00	246.169.000,00	(8.018.000,00)	96,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.187.000,00	246.169.000,00	(8.018.000,00)	96,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	11.960.000,00	8.000.000,00	(3.960.000,00)	66,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.960.000,00	8.000.000,00	(3.960.000,00)	66,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	8.000.000,00	(3.960.000,00)	66,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	66.484.000,00	66.452.500,00	(31.500,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.484.000,00	41.452.500,00	(31.500,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	41.484.000,00	41.452.500,00	(31.500,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.484.000,00	41.452.500,00	(31.500,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	229.016.000,00	222.762.400,00	(6.253.600,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	162.016.000,00	158.912.400,00	(3.103.600,00)	98,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.016.000,00	158.912.400,00	(3.103.600,00)	98,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.016.000,00	158.912.400,00	(3.103.600,00)	98,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	67.000.000,00	63.850.000,00	(3.150.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	63.850.000,00	(3.150.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	63.850.000,00	(3.150.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	115.043.000,00	68.575.300,00	(46.467.700,00)	59,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	55.720.000,00	40.045.300,00	(15.674.700,00)	71,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.720.000,00	40.045.300,00	(15.674.700,00)	71,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.720.000,00	40.045.300,00	(15.674.700,00)	71,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.840.000,00	27.780.000,00	(2.060.000,00)	93,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.840.000,00	27.780.000,00	(2.060.000,00)	93,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.840.000,00	27.780.000,00	(2.060.000,00)	93,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	29.483.000,00	750.000,00	(28.733.000,00)	2,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.483.000,00	750.000,00	(28.733.000,00)	2,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.483.000,00	750.000,00	(28.733.000,00)	2,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	811.425.600,00	727.680.774,00	(83.744.826,00)	89,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	424.264.300,00	367.102.100,00	(57.162.200,00)	86,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	6.625.700,00	6.625.700,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.625.700,00	6.625.700,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.625.700,00	6.625.700,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	32.064.000,00	31.931.000,00	(133.000,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.064.000,00	31.931.000,00	(133.000,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.064.000,00	31.931.000,00	(133.000,00)	99,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	16.138.700,00	15.987.700,00	(151.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.138.700,00	15.987.700,00	(151.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.138.700,00	15.987.700,00	(151.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	359.985.900,00	303.107.700,00	(56.878.200,00)	84,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	359.985.900,00	303.107.700,00	(56.878.200,00)	84,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.985.900,00	303.107.700,00	(56.878.200,00)	84,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	364.414.700,00	338.982.274,00	(25.432.426,00)	93,02	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.614.700,00	7.588.700,00	(12.026.000,00)	38,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.614.700,00	7.588.700,00	(12.026.000,00)	38,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.614.700,00	7.588.700,00	(12.026.000,00)	38,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.800.000,00	331.393.574,00	(13.406.426,00)	96,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	344.800.000,00	331.393.574,00	(13.406.426,00)	96,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.800.000,00	331.393.574,00	(13.406.426,00)	96,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.746.600,00	21.596.400,00	(1.150.200,00)	94,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.746.600,00	21.596.400,00	(1.150.200,00)	94,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.746.600,00	21.596.400,00	(1.150.200,00)	94,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.746.600,00	21.596.400,00	(1.150.200,00)	94,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	212.310.600,00	124.161.400,00	(88.149.200,00)	58,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	78.629.600,00	52.847.300,00	(25.782.300,00)	67,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	38.410.200,00	25.395.400,00	(13.014.800,00)	66,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.410.200,00	25.395.400,00	(13.014.800,00)	66,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.410.200,00	25.395.400,00	(13.014.800,00)	66,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	40.219.400,00	27.451.900,00	(12.767.500,00)	68,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.219.400,00	27.451.900,00	(12.767.500,00)	68,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.219.400,00	27.451.900,00	(12.767.500,00)	68,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	21.166.000,00	8.624.600,00	(12.541.400,00)	40,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	21.166.000,00	8.624.600,00	(12.541.400,00)	40,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.166.000,00	8.624.600,00	(12.541.400,00)	40,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.166.000,00	8.624.600,00	(12.541.400,00)	40,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	112.515.000,00	62.689.500,00	(49.825.500,00)	55,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	59.588.000,00	46.300.900,00	(13.287.100,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.588.000,00	46.300.900,00	(13.287.100,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.588.000,00	46.300.900,00	(13.287.100,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	52.927.000,00	16.388.600,00	(36.538.400,00)	30,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.927.000,00	16.388.600,00	(36.538.400,00)	30,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.927.000,00	16.388.600,00	(36.538.400,00)	30,96	
				JUMLAH BELANJA	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.206.131.487,86)	(8.647.899.044,00)	558.232.443,86	93,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.206.131.487,86)	(8.647.899.044,00)	558.232.443,86	93,93	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003		DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(62.575.900,00)	0,00	62.575.900	0,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(62.575.900,00)	0,00	62.575.900	0,00	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	306.181.519.291,00	308.154.572.916	1.973.053.625,27	100,64	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	306.181.519.291,00	308.154.572.916	1.973.053.625,27	100,64	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863	1.770.966.572,09	100,57	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.400.000	2.400.000,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	226.195.000,00	425.882.053,18	199.687.053,18	188,28	
				JUMLAH PENDAPATAN	306.181.519.291,00	308.154.572.916,27	1.973.053.625,27	100,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.366.035.346,88	26.639.215.000,00	(1.726.820.346,88)	93,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	64.195.500,00	36.490.094,00	(27.705.406,00)	56,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.868.500,00	16.449.450,00	(14.419.050,00)	53,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.868.500,00	16.449.450,00	(14.419.050,00)	53,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.868.500,00	16.449.450,00	(14.419.050,00)	53,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	28.327.000,00	15.961.444,00	(12.365.556,00)	56,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.327.000,00	15.961.444,00	(12.365.556,00)	56,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.327.000,00	15.961.444,00	(12.365.556,00)	56,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.079.200,00	(920.800,00)	81,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.079.200,00	(920.800,00)	81,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.079.200,00	(920.800,00)	81,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	(1.281.161.774,00)	95,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	(1.281.161.774,00)	95,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	(1.281.161.774,00)	95,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	(1.281.161.774,00)	95,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	582.631.800,00	409.160.939,00	(173.470.861,00)	70,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.194.000,00	14.913.500,00	(14.280.500,00)	51,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.194.000,00	14.913.500,00	(14.280.500,00)	51,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.194.000,00	14.913.500,00	(14.280.500,00)	51,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	222.173.000,00	144.017.500,00	(78.155.500,00)	64,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	222.173.000,00	144.017.500,00	(78.155.500,00)	64,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.173.000,00	144.017.500,00	(78.155.500,00)	64,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.415.000,00	3.413.000,00	(19.002.000,00)	15,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.415.000,00	3.413.000,00	(19.002.000,00)	15,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	37377	Belanja Barang dan Jasa	22.415.000,00	3.413.000,00	(19.002.000,00)	15,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	122.022.800,00	106.303.750,00	(15.719.050,00)	87,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	122.022.800,00	106.303.750,00	(15.719.050,00)	87,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.022.800,00	106.303.750,00	(15.719.050,00)	87,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36.900.000,00	21.230.000,00	(15.670.000,00)	57,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.900.000,00	21.230.000,00	(15.670.000,00)	57,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	21.230.000,00	(15.670.000,00)	57,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	149.927.000,00	119.283.189,00	(30.643.811,00)	79,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.927.000,00	119.283.189,00	(30.643.811,00)	79,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.927.000,00	119.283.189,00	(30.643.811,00)	79,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	513.015.000,00	437.770.000,00	(75.245.000,00)	85,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	441.015.000,00	373.360.000,00	(67.655.000,00)	84,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	7.480.000,00	(680.000,00)	91,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	7.480.000,00	(680.000,00)	91,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	432.855.000,00	365.880.000,00	(66.975.000,00)	84,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.855.000,00	365.880.000,00	(66.975.000,00)	84,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN	72.000.000,00	64.410.000,00	(7.590.000,00)	89,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	64.410.000,00	(7.590.000,00)	89,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	64.410.000,00	(7.590.000,00)	89,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.153.432.745,00	1.052.012.266,00	(101.420.479,00)	91,2	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.275.000,00	1.800.000,00	(475.000,00)	79,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.275.000,00	1.800.000,00	(475.000,00)	79,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	1.800.000,00	(475.000,00)	79,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	496.140.745,00	409.654.266,00	(86.486.479,00)	82,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	496.140.745,00	409.654.266,00	(86.486.479,00)	82,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.140.745,00	409.654.266,00	(86.486.479,00)	82,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	655.017.000,00	640.558.000,00	(14.459.000,00)	97,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	655.017.000,00	640.558.000,00	(14.459.000,00)	97,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.017.000,00	640.558.000,00	(14.459.000,00)	97,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.734.485,88	119.917.659,00	(67.816.826,88)	63,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.202.000,00	33.182.913,00	(19.019.087,00)	63,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.202.000,00	33.182.913,00	(19.019.087,00)	63,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.202.000,00	33.182.913,00	(19.019.087,00)	63,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.263.985,88	8.218.246,00	(35.045.739,88)	18,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.263.985,88	8.218.246,00	(35.045.739,88)	18,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.263.985,88	8.218.246,00	(35.045.739,88)	18,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	92.268.500,00	78.516.500,00	(13.752.000,00)	85,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	92.268.500,00	78.516.500,00	(13.752.000,00)	85,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.268.500,00	78.516.500,00	(13.752.000,00)	85,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.376.071.200,00	758.953.083,00	(617.118.117,00)	55,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.376.071.200,00	758.953.083,00	(617.118.117,00)	55,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	358.604.600,00	301.553.383,00	(57.051.217,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	358.604.600,00	301.553.383,00	(57.051.217,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.604.600,00	301.553.383,00	(57.051.217,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	284.491.000,00	247.280.000,00	(37.211.000,00)	86,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.991.000,00	49.280.000,00	(711.000,00)	98,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.000,00	49.280.000,00	(711.000,00)	98,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	234.500.000,00	198.000.000,00	(36.500.000,00)	84,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	234.500.000,00	198.000.000,00	(36.500.000,00)	84,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	309.037.000,00	125.665.000,00	(183.372.000,00)	40,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	309.037.000,00	125.665.000,00	(183.372.000,00)	40,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.037.000,00	125.665.000,00	(183.372.000,00)	40,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	112.167.800,00	59.514.700,00	(52.653.100,00)	53,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	112.167.800,00	59.514.700,00	(52.653.100,00)	53,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.167.800,00	59.514.700,00	(52.653.100,00)	53,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	261.918.800,00	15.271.000,00	(246.647.800,00)	5,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	261.918.800,00	15.271.000,00	(246.647.800,00)	5,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.918.800,00	15.271.000,00	(246.647.800,00)	5,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	49.852.000,00	9.669.000,00	(40.183.000,00)	19,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	49.852.000,00	9.669.000,00	(40.183.000,00)	19,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.852.000,00	9.669.000,00	(40.183.000,00)	19,39	
				JUMLAH BELANJA	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	276.439.412.744,12	280.756.404.833,27	4.316.992.089,15	101,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	276.439.412.744,12	280.756.404.833,27	4.316.992.089,15	101,56	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	854.199.899.716,00	834.253.740.034,51	(19.946.159.681,49)	97,66	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.823.304.988,00	6.942.226.816,73	(881.078.171,27)	88,73	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	33.000.000,00	58.808.000,00	25.808.000,00	178,2	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	(790.766.021,00)	77,39	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.291.708.980,00	4.175.588.829,73	(116.120.150,27)	97,29	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	(21.498.173.557,00)	97,45	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	783.645.231.000,00	752.220.082.767,00	(31.425.148.233,00)	95,98	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	9.926.974.676,00	115,82	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	116.819.123.841,98	109.913.343.457,00	(6.905.780.384,98)	94,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.516.728.443,66	11.589.521.899,00	(927.206.544,66)	92,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT	68.620.000,00	68.008.335,00	(611.665,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.929.000,00	30.928.815,00	(185,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.929.000,00	30.928.815,00	(185,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.929.000,00	30.928.815,00	(185,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.971.000,00	21.359.520,00	(611.480,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.971.000,00	21.359.520,00	(611.480,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.971.000,00	21.359.520,00	(611.480,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.329.766.083,66	10.519.096.721,00	(810.669.362,66)	92,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.406.978.083,66	7.056.951.721,00	(350.026.362,66)	95,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.406.978.083,66	7.056.951.721,00	(350.026.362,66)	95,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.406.978.083,66	7.056.951.721,00	(350.026.362,66)	95,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	3.922.788.000,00	3.462.145.000,00	(460.643.000,00)	88,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.922.788.000,00	3.462.145.000,00	(460.643.000,00)	88,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.922.788.000,00	3.462.145.000,00	(460.643.000,00)	88,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	394.317.500,00	375.093.050,00	(19.224.450,00)	95,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.012.000,00	42.745.798,00	(2.266.202,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.012.000,00	42.745.798,00	(2.266.202,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.012.000,00	42.745.798,00	(2.266.202,00)	94,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.241.500,00	30.241.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.241.500,00	30.241.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.241.500,00	30.241.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.500.000,00	28.276.899,00	(223.101,00)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	28.276.899,00	(223.101,00)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.276.899,00	(223.101,00)	99,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	72.456.000,00	72.456.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	72.456.000,00	72.456.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.456.000,00	72.456.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	218.108.000,00	201.372.853,00	(16.735.147,00)	92,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	218.108.000,00	201.372.853,00	(16.735.147,00)	92,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.108.000,00	201.372.853,00	(16.735.147,00)	92,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	681.802.140,00	585.539.957,00	(96.262.183,00)	85,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.815.000,00	123.110.859,00	(6.704.141,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.815.000,00	123.110.859,00	(6.704.141,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.815.000,00	123.110.859,00	(6.704.141,00)	94,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	399.987.140,00	310.429.098,00	(89.558.042,00)	77,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	399.987.140,00	310.429.098,00	(89.558.042,00)	77,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.987.140,00	310.429.098,00	(89.558.042,00)	77,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.222.720,00	41.783.836,00	(438.884,00)	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.222.720,00	41.783.836,00	(438.884,00)	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.222.720,00	41.783.836,00	(438.884,00)	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.222.720,00	41.783.836,00	(438.884,00)	98,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	103.226.571.098,32	97.310.988.191,00	(5.915.582.907,32)	94,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	711.504.700,00	656.622.187,00	(54.882.513,00)	92,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	125.559.000,00	110.292.057,00	(15.266.943,00)	87,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.559.000,00	110.292.057,00	(15.266.943,00)	87,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.559.000,00	110.292.057,00	(15.266.943,00)	87,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	78.202.000,00	78.201.750,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.202.000,00	78.201.750,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.202.000,00	78.201.750,00	(250,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	186.947.200,00	165.801.674,00	(21.145.526,00)	88,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	186.947.200,00	165.801.674,00	(21.145.526,00)	88,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.947.200,00	165.801.674,00	(21.145.526,00)	88,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	121.262.500,00	103.233.949,00	(18.028.551,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	121.262.500,00	103.233.949,00	(18.028.551,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.262.500,00	103.233.949,00	(18.028.551,00)	85,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	199.534.000,00	199.092.757,00	(441.243,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	199.534.000,00	199.092.757,00	(441.243,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.534.000,00	199.092.757,00	(441.243,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	366.474.300,00	358.204.860,00	(8.269.440,00)	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	43.443.700,00	41.613.800,00	(1.829.900,00)	95,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.443.700,00	41.613.800,00	(1.829.900,00)	95,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.443.700,00	41.613.800,00	(1.829.900,00)	95,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006		KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	22.714.000,00	22.019.028,00	(694.972,00)	96,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.714.000,00	22.019.028,00	(694.972,00)	96,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.714.000,00	22.019.028,00	(694.972,00)	96,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	60.365.000,00	60.072.760,00	(292.240,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.365.000,00	60.072.760,00	(292.240,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.365.000,00	60.072.760,00	(292.240,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI	239.951.600,00	234.499.272,00	(5.452.328,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	239.951.600,00	234.499.272,00	(5.452.328,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.951.600,00	234.499.272,00	(5.452.328,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	407.323.000,00	404.039.233,00	(3.283.767,00)	99,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	52.280.000,00	52.210.000,00	(70.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.280.000,00	52.210.000,00	(70.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	37377	Belanja Barang dan Jasa	52.280.000,00	52.210.000,00	(70.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	91.720.000,00	90.725.690,00	(994.310,00)	98,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	91.720.000,00	90.725.690,00	(994.310,00)	98,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.720.000,00	90.725.690,00	(994.310,00)	98,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	70.538.000,00	69.440.414,00	(1.097.586,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.538.000,00	69.440.414,00	(1.097.586,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.538.000,00	69.440.414,00	(1.097.586,00)	98,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	192.785.000,00	191.663.129,00	(1.121.871,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	192.785.000,00	191.663.129,00	(1.121.871,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.785.000,00	191.663.129,00	(1.121.871,00)	99,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	101.573.242.958,32	95.774.588.771,00	(5.798.654.187,32)	94,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0002		ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	99.990.690,00	72.125.034,00	(27.865.656,00)	72,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.990.690,00	72.125.034,00	(27.865.656,00)	72,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.990.690,00	72.125.034,00	(27.865.656,00)	72,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	98.484.233.734,98	94.129.717.066,00	(4.354.516.668,98)	95,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.065.000,00	29.529.988,00	(535.012,00)	98,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.065.000	29.529.988	(535.012,00)	98,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	98.454.168.735	94.100.187.078	(4.353.981.656,98)	95,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.454.168.735	94.100.187.078	(4.353.981.656,98)	95,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	2.989.018.533	1.572.746.671	(1.416.271.862,34)	52,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.989.018.533	1.572.746.671	(1.416.271.862,34)	52,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.989.018.533	1.572.746.671	(1.416.271.862,34)	52,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	168.026.140	117.533.140	(50.493.000,00)	69,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	70.200.000,00	33.000.000,00	(37.200.000,00)	47,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.200.000	33.000.000	(37.200.000,00)	47,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000	33.000.000	(37.200.000,00)	47,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	97.826.140	84.533.140	(13.293.000,00)	86,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.426.140	44.633.140	(8.793.000,00)	83,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.426.140	44.633.140	(8.793.000,00)	83,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003	5.2	BELANJA MODAL	44.400.000	39.900.000	(4.500.000,00)	89,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.400.000	39.900.000	(4.500.000,00)	89,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.075.824.300	1.012.833.367	(62.990.933,00)	94,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.075.824.300	1.012.833.367	(62.990.933,00)	94,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	179.022.000	179.008.915	(13.085,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	179.022.000	179.008.915	(13.085,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.022.000	179.008.915	(13.085,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	236.242.000	218.912.900	(17.329.100,00)	92,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	236.242.000	218.912.900	(17.329.100,00)	92,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.242.000	218.912.900	(17.329.100,00)	92,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK	48.900.000	48.900.000	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.900.000	48.900.000	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000	48.900.000	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	240.893.000	212.668.900	(28.224.100,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	240.893.000	212.668.900	(28.224.100,00)	88,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.893.000	212.668.900	(28.224.100,00)	88,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	370.767.300	353.342.652	(17.424.648,00)	95,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	332.767.300	315.443.922	(17.323.378,00)	94,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.767.300	315.443.922	(17.323.378,00)	94,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	38.000.000	37.898.730	(101.270,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	38.000.000	37.898.730	(101.270,00)	99,73	
				JUMLAH BELANJA	116.819.123.842	109.913.343.457	(6.905.780.384,98)	94,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	737.380.775.874	724.340.396.578	(13.040.379.296,51)	98,23	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	41.664.011.572	41.755.490.538	91.478.966,00	100,21	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.164.011.572	44.255.490.538	91.478.966,00	100,2	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.164.011.572	44.164.011.572	0,00	100	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	91.478.966	91.478.966,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.164.011.572	44.255.490.538	91.478.966,00	100,2	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	41.664.011.572	41.755.490.538	91.478.966,00	100,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	779.044.787.446	766.095.887.116	(12.948.900.330,51)	98,33	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.424.222.102,70	5.121.673.407,00	(302.548.695,70)	94,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.643.925,00	16.067.185,00	(8.576.740,00)	65,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.740.261,00	7.643.550,00	(4.096.711,00)	65,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.740.261,00	7.643.550,00	(4.096.711,00)	65,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.740.261,00	7.643.550,00	(4.096.711,00)	65,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.903.664,00	8.423.635,00	(4.480.029,00)	65,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.903.664,00	8.423.635,00	(4.480.029,00)	65,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.903.664,00	8.423.635,00	(4.480.029,00)	65,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	(137.965.202,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	(137.965.202,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	(137.965.202,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	(137.965.202,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	304.129.974,70	197.167.791,00	(106.962.183,70)	64,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.730.000,00	0,00	(15.730.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.730.000,00	0,00	(15.730.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.730.000,00	0,00	(15.730.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.431.000,00	12.862.450,00	(21.568.550,00)	37,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.431.000,00	12.862.450,00	(21.568.550,00)	37,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.431.000,00	12.862.450,00	(21.568.550,00)	37,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.054.500,00	8.131.353,00	(5.923.147,00)	57,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.054.500,00	8.131.353,00	(5.923.147,00)	57,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.054.500,00	8.131.353,00	(5.923.147,00)	57,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.428.474,70	540.000,00	(8.888.474,70)	5,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.428.474,70	540.000,00	(8.888.474,70)	5,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.428.474,70	540.000,00	(8.888.474,70)	5,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60.600.000,00	47.220.000,00	(13.380.000,00)	77,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	60.600.000,00	47.220.000,00	(13.380.000,00)	77,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	47.220.000,00	(13.380.000,00)	77,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	169.886.000,00	128.413.988,00	(41.472.012,00)	75,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	169.886.000,00	128.413.988,00	(41.472.012,00)	75,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.886.000,00	128.413.988,00	(41.472.012,00)	75,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.414.000,00	123.650.000,00	(1.764.000,00)	98,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	125.414.000,00	123.650.000,00	(1.764.000,00)	98,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	124.734.000,00	123.650.000,00	(1.084.000,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.734.000,00	123.650.000,00	(1.084.000,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.400.000,00	48.800.000,00	(8.600.000,00)	85,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.400.000,00	21.330.000,00	(6.070.000,00)	77,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	21.330.000,00	(6.070.000,00)	77,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	21.330.000,00	(6.070.000,00)	77,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	30.000.000,00	27.470.000,00	(2.530.000,00)	91,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.470.000,00	(2.530.000,00)	91,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.470.000,00	(2.530.000,00)	91,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	118.422.000,00	79.741.430,00	(38.680.570,00)	67,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	68.800.000,00	38.571.430,00	(30.228.570,00)	56,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.800.000,00	38.571.430,00	(30.228.570,00)	56,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	38.571.430,00	(30.228.570,00)	56,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.980.000,00	3.795.000,00	(6.185.000,00)	38,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	3.795.000,00	(6.185.000,00)	38,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	3.795.000,00	(6.185.000,00)	38,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	39.642.000,00	37.375.000,00	(2.267.000,00)	94,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	39.642.000,00	37.375.000,00	(2.267.000,00)	94,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.642.000,00	37.375.000,00	(2.267.000,00)	94,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	37379		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.546.220.500,00	1.105.175.340,00	(441.045.160,00)	71,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	373.433.100,00	270.996.641,00	(102.436.459,00)	72,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	123.526.000,00	105.298.167,00	(18.227.833,00)	85,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	123.526.000,00	105.298.167,00	(18.227.833,00)	85,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.526.000,00	105.298.167,00	(18.227.833,00)	85,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	37.287.000,00	32.963.685,00	(4.323.315,00)	88,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.287.000,00	32.963.685,00	(4.323.315,00)	88,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.287.000,00	32.963.685,00	(4.323.315,00)	88,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	71.930.000,00	0,00	(71.930.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	71.930.000,00	0,00	(71.930.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.930.000,00	0,00	(71.930.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	140.690.100,00	132.734.789,00	(7.955.311,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	140.690.100,00	132.734.789,00	(7.955.311,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.690.100,00	132.734.789,00	(7.955.311,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	903.606.000,00	619.014.023,00	(284.591.977,00)	68,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	903.606.000,00	619.014.023,00	(284.591.977,00)	68,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	903.606.000,00	619.014.023,00	(284.591.977,00)	68,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.606.000,00	619.014.023,00	(284.591.977,00)	68,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	123.790.400,00	123.489.000,00	(301.400,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	123.790.400,00	123.489.000,00	(301.400,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	123.790.400,00	123.489.000,00	(301.400,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.790.400,00	123.489.000,00	(301.400,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	145.391.000,00	91.675.676,00	(53.715.324,00)	63,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	21.513.500,00	15.637.583,00	(5.875.917,00)	72,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.513.500,00	15.637.583,00	(5.875.917,00)	72,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.513.500,00	15.637.583,00	(5.875.917,00)	72,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003		EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	37.754.500,00	35.668.071,00	(2.086.429,00)	94,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.754.500,00	35.668.071,00	(2.086.429,00)	94,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.754.500,00	35.668.071,00	(2.086.429,00)	94,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	35.238.000,00	19.217.300,00	(16.020.700,00)	54,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.238.000,00	19.217.300,00	(16.020.700,00)	54,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.238.000,00	19.217.300,00	(16.020.700,00)	54,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	41.509.000,00	14.623.972,00	(26.885.028,00)	35,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.509.000,00	14.623.972,00	(26.885.028,00)	35,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.509.000,00	14.623.972,00	(26.885.028,00)	35,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0009		PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	9.376.000,00	6.528.750,00	(2.847.250,00)	69,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.376.000,00	6.528.750,00	(2.847.250,00)	69,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.376.000,00	6.528.750,00	(2.847.250,00)	69,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.970.442.602,70)	(6.226.848.747,00)	743.593.855,70	89,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.970.442.602,70)	(6.226.848.747,00)	743.593.855,70	89,33	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
				JUMLAH BELANJA	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(34.696.000,00)	(19.853.000,00)	14.843.000,00	57,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.696.000,00)	(19.853.000,00)	14.843.000,00	57,21	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.146.057.640,31	8.942.437.565,00	(1.203.620.075,31)	88,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	257.156.000,00	32.986.600,00	(224.169.400,00)	12,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	130.000.000,00	22.278.600,00	(107.721.400,00)	17,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	22.278.600,00	(107.721.400,00)	17,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	22.278.600,00	(107.721.400,00)	17,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	127.156.000,00	10.708.000,00	(116.448.000,00)	8,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	127.156.000,00	10.708.000,00	(116.448.000,00)	8,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.156.000,00	10.708.000,00	(116.448.000,00)	8,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	(258.848.603,31)	96,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	(258.848.603,31)	96,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	(258.848.603,31)	96,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	(258.848.603,31)	96,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	351.298.500,00	338.183.668,00	(13.114.832,00)	96,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	351.298.500,00	338.183.668,00	(13.114.832,00)	96,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	351.298.500,00	338.183.668,00	(13.114.832,00)	96,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.298.500,00	338.183.668,00	(13.114.832,00)	96,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	440.616.000,00	385.810.585,00	(54.805.415,00)	87,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	74.827.000,00	(25.173.000,00)	74,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	74.827.000,00	(25.173.000,00)	74,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	74.827.000,00	(25.173.000,00)	74,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.476.000,00	33.315.000,00	(9.161.000,00)	78,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.476.000,00	33.315.000,00	(9.161.000,00)	78,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.476.000,00	33.315.000,00	(9.161.000,00)	78,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	275.940.000,00	259.398.585,00	(16.541.415,00)	94,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	275.940.000,00	259.398.585,00	(16.541.415,00)	94,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.940.000,00	259.398.585,00	(16.541.415,00)	94,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	691.092.000,00	177.400.000,00	(513.692.000,00)	25,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	37377	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	109.700.000,00	0,00	(109.700.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.700.000,00	0,00	(109.700.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	427.000.000,00	132.400.000,00	(294.600.000,00)	31,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.896.000,00	0,00	(3.896.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.896.000,00	0,00	(3.896.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	423.104.000,00	132.400.000,00	(290.704.000,00)	31,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.404.000,00	42.700.000,00	(290.704.000,00)	12,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	154.092.000,00	45.000.000,00	(109.092.000,00)	29,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	154.092.000,00	45.000.000,00	(109.092.000,00)	29,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.092.000,00	45.000.000,00	(109.092.000,00)	29,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	35.180.000,00	12.500.000,00	(22.680.000,00)	35,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.680.000,00	0,00	(22.680.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.680.000,00	0,00	(22.680.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	0,00	(22.680.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.570.000,00	35.260.175,00	(116.309.825,00)	23,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	86.570.000,00	33.230.175,00	(53.339.825,00)	38,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.570.000,00	33.230.175,00	(53.339.825,00)	38,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.570.000,00	33.230.175,00	(53.339.825,00)	38,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.000.000,00	2.030.000,00	(42.970.000,00)	4,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	2.030.000,00	(42.970.000,00)	4,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	2.030.000,00	(42.970.000,00)	4,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	37408		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.216.466.240,00	1.830.236.440,00	(386.229.800,00)	82,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.716.466.240,00	1.378.924.440,00	(337.541.800,00)	80,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	300.000.000,00	256.262.500,00	(43.737.500,00)	85,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	256.262.500,00	(43.737.500,00)	85,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	256.262.500,00	(43.737.500,00)	85,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	242.583.582,00	240.087.582,00	(2.496.000,00)	98,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.583.582,00	240.087.582,00	(2.496.000,00)	98,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.583.582,00	240.087.582,00	(2.496.000,00)	98,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	80.000.000,00	40.665.000,00	(39.335.000,00)	50,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	40.665.000,00	(39.335.000,00)	50,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	40.665.000,00	(39.335.000,00)	50,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	48.146.000,00	41.171.000,00	(6.975.000,00)	85,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.146.000,00	41.171.000,00	(6.975.000,00)	85,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.146.000,00	41.171.000,00	(6.975.000,00)	85,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	171.489.000,00	110.816.300,00	(60.672.700,00)	64,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	171.489.000,00	110.816.300,00	(60.672.700,00)	64,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.489.000,00	110.816.300,00	(60.672.700,00)	64,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	585.792.000,00	405.491.900,00	(180.300.100,00)	69,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	585.792.000,00	405.491.900,00	(180.300.100,00)	69,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.792.000,00	405.491.900,00	(180.300.100,00)	69,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	288.455.658,00	284.430.158,00	(4.025.500,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	288.455.658,00	284.430.158,00	(4.025.500,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.455.658,00	284.430.158,00	(4.025.500,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	500.000.000,00	451.312.000,00	(48.688.000,00)	90,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	50.000.000,00	3.300.000,00	(46.700.000,00)	6,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	3.300.000,00	(46.700.000,00)	6,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	3.300.000,00	(46.700.000,00)	6,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	450.000.000,00	448.012.000,00	(1.988.000,00)	99,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	448.012.000,00	(1.988.000,00)	99,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450000000	448012000	(1.988.000,00)	99,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	1.289.958.000,00	1.026.982.863,00	(262.975.137,00)	79,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1289958000	1026982863	(262.975.137,00)	79,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN	600.000.000,00	568.414.718,00	(31.585.282,00)	94,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	568.414.718	(31.585.282,00)	94,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	568.414.718	(31.585.282,00)	94,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	300.000.000	227.018.845	(72.981.155,00)	75,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000	227.018.845	(72.981.155,00)	75,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	227.018.845	(72.981.155,00)	75,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	200.982.000	145.966.100	(55.015.900,00)	72,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.982.000	145.966.100	(55.015.900,00)	72,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.982.000	145.966.100	(55.015.900,00)	72,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN	188.976.000	85.583.200	(103.392.800,00)	45,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	188.976.000	85.583.200	(103.392.800,00)	45,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.976.000,00	85.583.200,00	(103.392.800,00)	45,28	
				JUMLAH BELANJA	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.652.481.880,31)	(11.799.656.868,00)	1.852.825.012,31	86,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.652.481.880,31)	(11.799.656.868,00)	1.852.825.012,31	86,42	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KARIMUN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.568.104.415,42	8.892.313.301,00	(675.791.114,42)	92,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.800.179.155,42	6.223.655.604,00	(576.523.551,42)	91,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	(418.254.662,42)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	(418.254.662,42)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	(418.254.662,42)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	(418.254.662,42)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.107.500,00	4.995.000,00	(112.500,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.107.500,00	4.995.000,00	(112.500,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.107.500,00	4.995.000,00	(112.500,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.107.500,00	4.995.000,00	(112.500,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	221.867.200,00	159.353.943,00	(62.513.257,00)	71,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.092.000,00	4.092.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.454.000,00	9.000.000,00	(23.454.000,00)	27,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.454.000,00	9.000.000,00	(23.454.000,00)	27,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.454.000,00	9.000.000,00	(23.454.000,00)	27,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.941.000,00	9.422.000,00	(7.519.000,00)	55,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.941.000,00	9.422.000,00	(7.519.000,00)	55,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.941.000,00	9.422.000,00	(7.519.000,00)	55,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	90.302.200,00	84.259.943,00	(6.042.257,00)	93,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.302.200,00	84.259.943,00	(6.042.257,00)	93,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.302.200,00	84.259.943,00	(6.042.257,00)	93,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.562.000,00	18.020.000,00	(24.542.000,00)	42,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.562.000,00	18.020.000,00	(24.542.000,00)	42,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.562.000,00	18.020.000,00	(24.542.000,00)	42,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	35.516.000,00	34.560.000,00	(956.000,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.516.000,00	34.560.000,00	(956.000,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.516.000,00	34.560.000,00	(956.000,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	205.679.000,00	203.468.580,00	(2.210.420,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	175.679.000,00	173.468.580,00	(2.210.420,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.612.000,00	34.241.280,00	(370.720,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.612.000,00	34.241.280,00	(370.720,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	141.067.000,00	139.227.300,00	(1.839.700,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.067.000,00	139.227.300,00	(1.839.700,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	522.509.034,00	433.587.322,00	(88.921.712,00)	82,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.509.034,00	67.187.322,00	(43.321.712,00)	60,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.509.034,00	67.187.322,00	(43.321.712,00)	60,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.509.034,00	67.187.322,00	(43.321.712,00)	60,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	412.000.000,00	366.400.000,00	(45.600.000,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	412.000.000,00	366.400.000,00	(45.600.000,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.000.000,00	366.400.000,00	(45.600.000,00)	88,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.551.000,00	18.040.000,00	(4.511.000,00)	79,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	18.051.000,00	18.040.000,00	(11.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.051.000,00	18.040.000,00	(11.000,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.051.000,00	18.040.000,00	(11.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	(33.397.100,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	(33.397.100,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	(33.397.100,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	(33.397.100,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	(33.397.100,00)	97,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	1.466.872.260,00	1.401.001.797,00	(65.870.463,00)	95,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.466.872.260,00	1.401.001.797,00	(65.870.463,00)	95,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	748.381.360,00	708.798.122,00	(39.583.238,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	748.381.360,00	708.798.122,00	(39.583.238,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.000,00	913.000,00	(886.000,00)	50,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	746.582.360,00	707.885.122,00	(38.697.238,00)	94,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	718.490.900,00	692.203.675,00	(26.287.225,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	718.490.900,00	692.203.675,00	(26.287.225,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.490.900,00	692.203.675,00	(26.287.225,00)	96,34	
				JUMLAH BELANJA	9.568.104.415,42	8.892.313.301,00	(675.791.114,42)	92,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.568.104.415,42)	(8.892.313.301,00)	675.791.114,42	92,93	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.568.104.415,42)	(8.892.313.301,00)	675.791.114,42	92,93	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN MERAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	10.338.358.522,00	8.037.296.055,00	(2.301.062.467,00)	77,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.226.121.768,00	6.489.033.335,00	(737.088.433,00)	89,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	(386.322.711,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	(386.322.711,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	(386.322.711,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	(386.322.711,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	363.468.500,00	136.278.280,00	(227.190.220,00)	37,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.033.000,00	15.006.000,00	(27.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.033.000,00	15.006.000,00	(27.000,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.033.000,00	15.006.000,00	(27.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	277.065.500,00	81.904.625,00	(195.160.875,00)	29,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	277.065.500,00	81.904.625,00	(195.160.875,00)	29,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.065.500,00	81.904.625,00	(195.160.875,00)	29,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	35.000.000,00	34.329.000,00	(671.000,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.329.000,00	(671.000,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.329.000,00	(671.000,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	4.324.375,00	(30.675.625,00)	12,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	4.324.375,00	(30.675.625,00)	12,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	4.324.375,00	(30.675.625,00)	12,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.370.000,00	714.280,00	(655.720,00)	52,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.370.000,00	714.280,00	(655.720,00)	52,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	714.280,00	(655.720,00)	52,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	145.040.000,00	142.100.000,00	(2.940.000,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.040.000,00	22.100.000,00	(2.940.000,00)	88,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.040.000,00	22.100.000,00	(2.940.000,00)	88,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.040.000,00	22.100.000,00	(2.940.000,00)	88,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	387.393.760,00	287.854.258,00	(99.539.502,00)	74,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	151.643.760,00	81.524.258,00	(70.119.502,00)	53,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.643.760,00	81.524.258,00	(70.119.502,00)	53,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.643.760,00	81.524.258,00	(70.119.502,00)	53,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	235.750.000,00	206.330.000,00	(29.420.000,00)	87,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.750.000,00	206.330.000,00	(29.420.000,00)	87,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.750.000,00	206.330.000,00	(29.420.000,00)	87,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.744.000,00	42.648.000,00	(21.096.000,00)	66,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.648.000,00	42.648.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.648.000,00	42.648.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.648.000,00	42.648.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.096.000,00	0,00	(21.096.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.096.000,00	0,00	(21.096.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.096.000,00	0,00	(21.096.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	37438		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	(43.962.500,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	(43.962.500,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	(43.962.500,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	(43.962.500,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	(43.962.500,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	1.745.011.534,00	225.000.000,00	(1.520.011.534,00)	12,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.745.011.534,00	225.000.000,00	(1.520.011.534,00)	12,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.019.665.534,00	0,00	(1.019.665.534,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.019.665.534,00	0,00	(1.019.665.534,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.019.665.534,00	0,00	(1.019.665.534,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	725.346.000,00	225.000.000,00	(500.346.000,00)	31,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	725.346.000,00	225.000.000,00	(500.346.000,00)	31,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.346.000,00	225.000.000,00	(500.346.000,00)	31,01	
				JUMLAH BELANJA	10.338.358.522,00	8.037.296.055,00	(2.301.062.467,00)	77,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.338.358.522,00)	(8.037.296.055,00)	2.301.062.467,00	77,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.338.358.522,00)	(8.037.296.055,00)	2.301.062.467,00	77,74	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN MERAL BARAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	5.239.814.620,48	4.647.662.062,00	(592.152.558,48)	88,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.814.750.920,48	3.636.680.862,00	(178.070.058,48)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	(156.295.058,48)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	(156.295.058,48)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	(156.295.058,48)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	(156.295.058,48)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.380.000,00	16.290.000,00	(90.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT	16.380.000,00	16.290.000,00	(90.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.380.000,00	16.290.000,00	(90.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	16.290.000,00	(90.000,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	93.585.000,00	93.016.000,00	(569.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.065.000,00	5.975.000,00	(90.000,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.065.000,00	5.975.000,00	(90.000,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.065.000,00	5.975.000,00	(90.000,00)	98,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.914.000,00	8.900.000,00	(14.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.914.000,00	8.900.000,00	(14.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.914.000,00	8.900.000,00	(14.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	63.620.000,00	63.263.000,00	(357.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.620.000,00	63.263.000,00	(357.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.620.000,00	63.263.000,00	(357.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.986.000,00	14.878.000,00	(108.000,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.986.000,00	14.878.000,00	(108.000,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.986.000,00	14.878.000,00	(108.000,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176.434.000,00	155.329.000,00	(21.105.000,00)	88,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.440.000,00	5.434.000,00	(6.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	5.434.000,00	(6.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.434.000,00	(6.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.494.000,00	88.340.000,00	(154.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.494.000,00	88.340.000,00	(154.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.494.000,00	88.340.000,00	(154.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	82.500.000,00	61.555.000,00	(20.945.000,00)	74,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	82.500.000,00	61.555.000,00	(20.945.000,00)	74,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	61.555.000,00	(20.945.000,00)	74,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.720.000,00	38.709.000,00	(11.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	38.720.000,00	38.709.000,00	(11.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.720.000,00	38.709.000,00	(11.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.720.000,00	38.709.000,00	(11.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	37438		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	934.694.700,00	924.981.200,00	(9.713.500,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	934.694.700,00	924.981.200,00	(9.713.500,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	934.694.700,00	924.981.200,00	(9.713.500,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	934.694.700,00	924.981.200,00	(9.713.500,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.694.700,00	924.981.200,00	(9.713.500,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	37803		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	490.369.000,00	86.000.000,00	(404.369.000,00)	17,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	490.369.000,00	86.000.000,00	(404.369.000,00)	17,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	244.369.500,00	0,00	(244.369.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.242.500,00	0,00	(240.242.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.500,00	0,00	(1.267.500,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	238.975.000,00	0,00	(238.975.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.127.000,00	0,00	(4.127.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.127.000,00	0,00	(4.127.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	245.999.500,00	86.000.000,00	(159.999.500,00)	34,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	245.999.500,00	86.000.000,00	(159.999.500,00)	34,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.999.500,00	86.000.000,00	(159.999.500,00)	34,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				JUMLAH BELANJA	5.239.814.620,48	4.647.662.062,00	(592.152.558,48)	88,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.239.814.620,48)	(4.647.662.062,00)	592.152.558,48	88,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.239.814.620,48)	(4.647.662.062,00)	592.152.558,48	88,69	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN TEBING

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	7.689.411.310,00	7.010.389.328,00	(679.021.982,00)	91,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.607.149.935,00	5.207.553.564,00	(399.596.371,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	(265.821.161,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	(265.821.161,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	(265.821.161,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	(265.821.161,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	65.300.000,00	63.300.000,00	(2.000.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT	65.300.000,00	63.300.000,00	(2.000.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.300.000,00	63.300.000,00	(2.000.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	63.300.000,00	(2.000.000,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	288.361.500,00	189.782.800,00	(98.578.700,00)	65,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.515.000,00	6.261.000,00	(254.000,00)	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.515.000,00	6.261.000,00	(254.000,00)	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.515.000,00	6.261.000,00	(254.000,00)	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	179.903.500,00	102.424.800,00	(77.478.700,00)	56,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.903.500,00	102.424.800,00	(77.478.700,00)	56,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.903.500,00	102.424.800,00	(77.478.700,00)	56,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	70.126.000,00	65.881.000,00	(4.245.000,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.126.000,00	65.881.000,00	(4.245.000,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.126.000,00	65.881.000,00	(4.245.000,00)	93,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	31.817.000,00	15.216.000,00	(16.601.000,00)	47,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.817.000,00	15.216.000,00	(16.601.000,00)	47,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.817.000,00	15.216.000,00	(16.601.000,00)	47,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	363.751.489,00	330.604.979,00	(33.146.510,00)	90,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	106.251.489,00	97.064.979,00	(9.186.510,00)	91,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.251.489,00	97.064.979,00	(9.186.510,00)	91,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.251.489,00	97.064.979,00	(9.186.510,00)	91,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	257.500.000,00	233.540.000,00	(23.960.000,00)	90,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	257.500.000,00	233.540.000,00	(23.960.000,00)	90,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.500.000,00	233.540.000,00	(23.960.000,00)	90,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.533.000,00	13.483.000,00	(50.000,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	10.483.000,00	10.483.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.483.000,00	10.483.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.483.000,00	10.483.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	826.548.000,00	821.669.800,00	(4.878.200,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	826.548.000,00	821.669.800,00	(4.878.200,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	826.548.000,00	821.669.800,00	(4.878.200,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	826.548.000,00	821.669.800,00	(4.878.200,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.548.000,00	821.669.800,00	(4.878.200,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	1.255.713.375,00	981.165.964,00	(274.547.411,00)	78,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.255.713.375,00	981.165.964,00	(274.547.411,00)	78,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	680.303.875,00	490.123.597,00	(190.180.278,00)	72,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	680.303.875,00	490.123.597,00	(190.180.278,00)	72,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	680.303.875,00	490.123.597,00	(190.180.278,00)	72,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	575.409.500,00	491.042.367,00	(84.367.133,00)	85,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	575.409.500,00	491.042.367,00	(84.367.133,00)	85,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.409.500,00	491.042.367,00	(84.367.133,00)	85,33	
				JUMLAH BELANJA	7.689.411.310,00	7.010.389.328,00	(679.021.982,00)	91,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.689.411.310,00)	(7.010.389.328,00)	679.021.982,00	91,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.689.411.310,00)	(7.010.389.328,00)	679.021.982,00	91,16	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KUNDUR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	7.694.792.656,66	7.121.072.855,00	(573.719.801,66)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.240.093.716,66	4.799.762.055,00	(440.331.661,66)	91,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	(306.345.172,66)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	(306.345.172,66)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	(306.345.172,66)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	(306.345.172,66)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	249.854.800,00	191.209.000,00	(58.645.800,00)	76,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	144.311.400,00	144.098.000,00	(213.400,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	144.311.400,00	144.098.000,00	(213.400,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.311.400,00	144.098.000,00	(213.400,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	34.923.400,00	4.781.000,00	(30.142.400,00)	13,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.455.400,00	4.781.000,00	(5.674.400,00)	45,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.455.400,00	4.781.000,00	(5.674.400,00)	45,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	24.468.000,00	0,00	(24.468.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.468.000,00	0,00	(24.468.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	10.800.000,00	(24.200.000,00)	30,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	10.800.000,00	(24.200.000,00)	30,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	10.800.000,00	(24.200.000,00)	30,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.800.000,00	29.710.000,00	(4.090.000,00)	87,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.800.000,00	29.710.000,00	(4.090.000,00)	87,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	29.710.000,00	(4.090.000,00)	87,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.500.000,00	18.000.000,00	(1.500.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.500.000,00	18.000.000,00	(1.500.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	18.000.000,00	(1.500.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	18.000.000,00	(1.500.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	523.273.120,00	484.764.931,00	(38.508.189,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	77.523.120,00	46.894.931,00	(30.628.189,00)	60,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.523.120,00	46.894.931,00	(30.628.189,00)	60,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.523.120,00	46.894.931,00	(30.628.189,00)	60,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	445.750.000,00	437.870.000,00	(7.880.000,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	445.750.000,00	437.870.000,00	(7.880.000,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.750.000,00	437.870.000,00	(7.880.000,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.538.500,00	77.206.000,00	(35.332.500,00)	68,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	9.916.000,00	0,00	(9.916.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.916.000,00	0,00	(9.916.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.916.000,00	0,00	(9.916.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	60.164.000,00	60.000.000,00	(164.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.164.000,00	60.000.000,00	(164.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.164.000,00	60.000.000,00	(164.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	42.458.500,00	17.206.000,00	(25.252.500,00)	40,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.458.500,00	17.206.000,00	(25.252.500,00)	40,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.458.500,00	17.206.000,00	(25.252.500,00)	40,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	(24.119.000,00)	97,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	(24.119.000,00)	97,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	(24.119.000,00)	97,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	(24.119.000,00)	97,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	(24.119.000,00)	97,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	1.376.590.140,00	1.267.321.000,00	(109.269.140,00)	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.376.590.140	1.267.321.000	(109.269.140,00)	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	719.590.040	684.295.000	(35.295.040,00)	95,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	719.590.040	684.295.000	(35.295.040,00)	95,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	719.590.040	684.295.000	(35.295.040,00)	95,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	657.000.100	583.026.000	(73.974.100,00)	88,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	657.000.100	583.026.000	(73.974.100,00)	88,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.000.100	583.026.000	(73.974.100,00)	88,74	
				JUMLAH BELANJA	7.694.792.657	7.121.072.855	(573.719.801,66)	92,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.694.792.656,66)	(7.121.072.855,00)	573.719.801,66	92,54	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.694.792.656,66)	(7.121.072.855,00)	573.719.801,66	92,54	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN UNGAR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	3.852.476.953,83	3.300.984.084,00	(551.492.869,83)	85,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.142.280.553,86	2.895.156.884,00	(247.123.669,86)	92,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.750.000,00	12.200.000,00	(550.000,00)	95,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	(197.191.246,41)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	(197.191.246,41)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	(197.191.246,41)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	(197.191.246,41)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.977.575,20	135.404.500,00	(41.573.075,20)	76,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.200.000,00	4.190.400,00	(9.600,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.190.400,00	(9.600,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.190.400,00	(9.600,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.678.200,00	55.708.900,00	(969.300,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.678.200,00	55.708.900,00	(969.300,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.678.200,00	55.708.900,00	(969.300,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.976.575,20	0,00	(21.976.575,20)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.481.575,20	0,00	(3.481.575,20)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.575,20	0,00	(3.481.575,20)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.495.000,00	0,00	(18.495.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.495.000,00	0,00	(18.495.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.409.000,00	11.165.100,00	(243.900,00)	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.409.000,00	11.165.100,00	(243.900,00)	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.409.000,00	11.165.100,00	(243.900,00)	97,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	75.413.800,00	62.840.100,00	(12.573.700,00)	83,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.413.800,00	62.840.100,00	(12.573.700,00)	83,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.413.800,00	62.840.100,00	(12.573.700,00)	83,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	150.530.848,25	144.410.000,00	(6.120.848,25)	95,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.780.848,25	60.780.000,00	(848,25)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.780.848,25	60.780.000,00	(848,25)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.780.848,25	60.780.000,00	(848,25)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	89.750.000,00	83.630.000,00	(6.120.000,00)	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.750.000,00	83.630.000,00	(6.120.000,00)	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	83.630.000,00	(6.120.000,00)	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.471.000,00	11.782.500,00	(1.688.500,00)	87,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	10.453.000,00	9.585.500,00	(867.500,00)	91,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.453.000,00	9.585.500,00	(867.500,00)	91,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.453.000,00	9.585.500,00	(867.500,00)	91,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.018.000,00	2.197.000,00	(821.000,00)	72,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.018.000,00	2.197.000,00	(821.000,00)	72,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.018.000,00	2.197.000,00	(821.000,00)	72,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	335.590.499,97	282.699.200,00	(52.891.299,97)	84,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	335.590.500	282.699.200	(52.891.299,97)	84,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	335.590.500	282.699.200	(52.891.299,97)	84,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	331.344.350	282.699.200	(48.645.149,97)	85,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.344.350	282.699.200	(48.645.149,97)	85,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.246.150	0,00	(4.246.150,00)	0	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.246.150	0,00	(4.246.150,00)	0	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	374.605.900	123.128.000	(251.477.900,00)	32,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	374.605.900	123.128.000	(251.477.900,00)	32,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	236164400	63897000	(172.267.400,00)	27,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	236.164.400,00	63.897.000,00	(172.267.400,00)	27,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.400,00	0,00	(2.560.400,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	233.604.000,00	63.897.000,00	(169.707.000,00)	27,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	138.441.500	59.231.000	(79.210.500,00)	42,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	138.441.500	59.231.000	(79.210.500,00)	42,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.441.500	59.231.000	(79.210.500,00)	42,78	
				JUMLAH BELANJA	3.852.476.954	3.300.984.084	(551.492.869,83)	85,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.852.476.953,83)	(3.300.984.084,00)	551.492.869,83	85,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.852.476.953,83)	(3.300.984.084,00)	551.492.869,83	85,68	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KUNDUR UTARA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	3.701.357.255,60	3.390.945.577,00	(310.411.678,60)	91,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.973.956.755,60	2.786.933.556,00	(187.023.199,60)	93,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	(86.286.169,60)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	(86.286.169,60)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	(86.286.169,60)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	(86.286.169,60)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	139.577.400,00	83.796.000,00	(55.781.400,00)	60,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.039.000,00	0,00	(2.039.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.039.000,00	0,00	(2.039.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.039.000,00	0,00	(2.039.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.923.500,00	34.130.000,00	(6.793.500,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.923.500,00	34.130.000,00	(6.793.500,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.923.500,00	34.130.000,00	(6.793.500,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.489.000,00	4.800.000,00	(1.689.000,00)	73,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.489.000,00	4.800.000,00	(1.689.000,00)	73,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.000,00	4.800.000,00	(1.689.000,00)	73,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.188.500,00	10.864.000,00	(7.324.500,00)	59,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.188.500,00	10.864.000,00	(7.324.500,00)	59,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.188.500,00	10.864.000,00	(7.324.500,00)	59,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.937.400,00	34.002.000,00	(31.935.400,00)	51,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.937.400,00	34.002.000,00	(31.935.400,00)	51,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.937.400,00	34.002.000,00	(31.935.400,00)	51,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	201.619.870,00	176.703.240,00	(24.916.630,00)	87,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	43.869.870,00	26.813.240,00	(17.056.630,00)	61,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.869.870,00	26.813.240,00	(17.056.630,00)	61,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.869.870,00	26.813.240,00	(17.056.630,00)	61,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	157.750.000,00	149.890.000,00	(7.860.000,00)	95,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	157.750.000,00	149.890.000,00	(7.860.000,00)	95,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.750.000,00	149.890.000,00	(7.860.000,00)	95,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.519.000,00	6.480.000,00	(20.039.000,00)	24,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.159.000,00	3.080.000,00	(18.079.000,00)	14,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.159.000,00	3.080.000,00	(18.079.000,00)	14,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.159.000,00	3.080.000,00	(18.079.000,00)	14,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.360.000,00	3.400.000,00	(1.960.000,00)	63,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.360.000,00	3.400.000,00	(1.960.000,00)	63,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	3.400.000,00	(1.960.000,00)	63,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	442.422.000,00	336.954.000,00	(105.468.000,00)	76,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	442.422.000,00	336.954.000,00	(105.468.000,00)	76,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	442.422.000,00	336.954.000,00	(105.468.000,00)	76,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	442.422.000,00	336.954.000,00	(105.468.000,00)	76,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.422.000,00	336.954.000,00	(105.468.000,00)	76,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	154.986.000,00	153.670.012,00	(1.315.988,00)	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.986.000,00	153.670.012,00	(1.315.988,00)	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.000,00	0,00	(187.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	154.799.000,00	153.670.012,00	(1.128.988,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	129.992.500,00	113.388.009,00	(16.604.491,00)	87,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	129.992.500,00	113.388.009,00	(16.604.491,00)	87,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.992.500,00	113.388.009,00	(16.604.491,00)	87,22	
				JUMLAH BELANJA	3.701.357.255,60	3.390.945.577,00	(310.411.678,60)	91,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.701.357.255,60)	(3.390.945.577,00)	310.411.678,60	91,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.701.357.255,60)	(3.390.945.577,00)	310.411.678,60	91,61	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN BELAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.541.375.989,36	1.283.220.124,00	(258.155.865,36)	83,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.207.300,00	13.803.000,00	(2.404.300,00)	85,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.562.500,00	5.200.000,00	(1.362.500,00)	79,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.562.500,00	5.200.000,00	(1.362.500,00)	79,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.562.500,00	5.200.000,00	(1.362.500,00)	79,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.913.000,00	5.273.200,00	(639.800,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.913.000,00	5.273.200,00	(639.800,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.913.000,00	5.273.200,00	(639.800,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.731.800,00	3.329.800,00	(402.000,00)	89,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.731.800,00	3.329.800,00	(402.000,00)	89,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.731.800,00	3.329.800,00	(402.000,00)	89,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	(200.268.765,36)	84,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	(200.268.765,36)	84,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	(200.268.765,36)	84,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	(200.268.765,36)	84,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	115.308.800,00	68.381.000,00	(46.927.800,00)	59,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.061.000,00	0,00	(1.061.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.061.000,00	0,00	(1.061.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.000,00	0,00	(1.061.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.335.000,00	17.190.000,00	(145.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.335.000,00	17.190.000,00	(145.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.335.000,00	17.190.000,00	(145.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.627.000,00	13.198.000,00	(4.429.000,00)	74,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.627.000,00	13.198.000,00	(4.429.000,00)	74,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.627.000,00	13.198.000,00	(4.429.000,00)	74,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.358.800,00	223.000,00	(4.135.800,00)	5,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.358.800,00	223.000,00	(4.135.800,00)	5,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.358.800,00	223.000,00	(4.135.800,00)	5,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	74.927.000,00	37.770.000,00	(37.157.000,00)	50,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.927.000,00	37.770.000,00	(37.157.000,00)	50,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.927.000,00	37.770.000,00	(37.157.000,00)	50,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.067.632,00	108.512.632,00	(4.555.000,00)	95,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.567.632,00	22.567.632,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.567.632,00	22.567.632,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.567.632,00	22.567.632,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	90.500.000,00	85.945.000,00	(4.555.000,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.500.000,00	85.945.000,00	(4.555.000,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.500.000,00	85.945.000,00	(4.555.000,00)	94,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.900.000,00	900.000,00	(4.000.000,00)	18,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.840.000,00	900.000,00	(1.940.000,00)	31,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	900.000,00	(1.940.000,00)	31,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	900.000,00	(1.940.000,00)	31,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176.148.000,00	126.916.000,00	(49.232.000,00)	72,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	176.148.000,00	126.916.000,00	(49.232.000,00)	72,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	176.148.000,00	126.916.000,00	(49.232.000,00)	72,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	176.148.000,00	126.916.000,00	(49.232.000,00)	72,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.148.000,00	126.916.000,00	(49.232.000,00)	72,05	
				JUMLAH BELANJA	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.717.523.989,36)	(1.410.136.124,00)	307.387.865,36	82,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.717.523.989,36)	(1.410.136.124,00)	307.387.865,36	82,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KUNDUR BARAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	5.684.388.324,00	5.313.554.522,00	(370.833.802,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.706.999.236,00	3.402.870.094,00	(304.129.142,00)	91,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.556.000,00	6.000.000,00	(556.000,00)	91,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.556.000,00	2.000.000,00	(556.000,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.556.000,00	2.000.000,00	(556.000,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.556.000,00	2.000.000,00	(556.000,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.245.487.278,00	3.011.598.978,00	(233.888.300,00)	92,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.224.502.278,00	2.990.613.978,00	(233.888.300,00)	92,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.224.502.278,00	2.990.613.978,00	(233.888.300,00)	92,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.224.502.278,00	2.990.613.978,00	(233.888.300,00)	92,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	104.264.500,00	83.207.000,00	(21.057.500,00)	79,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.065.000,00	32.592.000,00	(5.473.000,00)	85,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.065.000,00	32.592.000,00	(5.473.000,00)	85,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.065.000,00	32.592.000,00	(5.473.000,00)	85,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.000.000,00	11.463.000,00	(3.537.000,00)	76,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.463.000,00	(3.537.000,00)	76,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.463.000,00	(3.537.000,00)	76,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.334.500,00	10.127.000,00	(5.207.500,00)	66,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.334.500,00	10.127.000,00	(5.207.500,00)	66,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.334.500,00	10.127.000,00	(5.207.500,00)	66,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.100.000,00	3.400.000,00	(4.700.000,00)	41,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	3.400.000,00	(4.700.000,00)	41,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	3.400.000,00	(4.700.000,00)	41,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	27.765.000,00	25.625.000,00	(2.140.000,00)	92,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.765.000,00	25.625.000,00	(2.140.000,00)	92,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.765.000,00	25.625.000,00	(2.140.000,00)	92,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	306.000.958,00	283.388.116,00	(22.612.842,00)	92,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	38.500.958,00	35.558.116,00	(2.942.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.500.958,00	35.558.116,00	(2.942.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.958,00	35.558.116,00	(2.942.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	267.500.000,00	247.830.000,00	(19.670.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	267.500.000,00	247.830.000,00	(19.670.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.500.000,00	247.830.000,00	(19.670.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.690.500,00	18.676.000,00	(26.014.500,00)	41,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.690.500,00	18.676.000,00	(26.014.500,00)	41,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.690.500,00	18.676.000,00	(26.014.500,00)	41,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.690.500,00	18.676.000,00	(26.014.500,00)	41,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	(62.312.149,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	(62.312.149,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	(62.312.149,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	(62.312.149,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	(62.312.149,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	134.550.000,00	131.825.000,00	(2.725.000,00)	97,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.550.000,00	131.825.000,00	(2.725.000,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	0,00	(630.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	133.920.000,00	131.825.000,00	(2.095.000,00)	98,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	141.134.500,00	139.466.989,00	(1.667.511,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	141.134.500,00	139.466.989,00	(1.667.511,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.134.500,00	139.466.989,00	(1.667.511,00)	98,81	
				JUMLAH BELANJA	5.684.388.324,00	5.313.554.522,00	(370.833.802,00)	93,47	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.684.388.324,00)	(5.313.554.522,00)	370.833.802,00	93,47	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.684.388.324,00)	(5.313.554.522,00)	370.833.802,00	93,47	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN MORO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	4.974.912.260,00	4.064.601.326,00	(910.310.934,00)	81,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.898.945.060,00	3.454.597.526,00	(444.347.534,00)	88,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.437.000,00	30.294.000,00	(15.143.000,00)	66,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.009.000,00	7.449.000,00	(3.560.000,00)	67,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.009.000,00	7.449.000,00	(3.560.000,00)	67,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.009.000,00	7.449.000,00	(3.560.000,00)	67,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.146.000,00	15.493.000,00	(5.653.000,00)	73,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.146.000,00	15.493.000,00	(5.653.000,00)	73,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.146.000,00	15.493.000,00	(5.653.000,00)	73,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.282.000,00	7.352.000,00	(5.930.000,00)	55,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.282.000,00	7.352.000,00	(5.930.000,00)	55,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.282.000,00	7.352.000,00	(5.930.000,00)	55,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	(244.202.734,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	(244.202.734,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	(244.202.734,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	(244.202.734,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	152.598.000,00	71.714.200,00	(80.883.800,00)	46,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.034.000,00	1.990.000,00	(1.044.000,00)	65,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.034.000,00	1.990.000,00	(1.044.000,00)	65,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	1.990.000,00	(1.044.000,00)	65,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.435.000,00	27.079.000,00	(68.356.000,00)	28,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.069.000,00	27.079.000,00	(11.990.000,00)	69,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.069.000,00	27.079.000,00	(11.990.000,00)	69,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.366.000,00	0,00	(56.366.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.366.000,00	0,00	(56.366.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.797.000,00	3.018.000,00	(779.000,00)	79,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.797.000,00	3.018.000,00	(779.000,00)	79,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.797.000,00	3.018.000,00	(779.000,00)	79,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.332.000,00	39.627.200,00	(10.704.800,00)	78,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.332.000,00	39.627.200,00	(10.704.800,00)	78,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.332.000,00	39.627.200,00	(10.704.800,00)	78,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	424.717.400,00	322.650.400,00	(102.067.000,00)	75,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	56.717.400,00	37.455.400,00	(19.262.000,00)	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.717.400,00	37.455.400,00	(19.262.000,00)	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.717.400,00	37.455.400,00	(19.262.000,00)	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	368.000.000,00	285.195.000,00	(82.805.000,00)	77,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	368.000.000,00	285.195.000,00	(82.805.000,00)	77,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.000.000,00	285.195.000,00	(82.805.000,00)	77,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.051.000,00	0,00	(2.051.000,00)	0,0	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.051.000,00	0,00	(2.051.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.051.000,00	0,00	(2.051.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.051.000,00	0,00	(2.051.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	592.967.200,00	527.003.800,00	(65.963.400,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	592.967.200,00	527.003.800,00	(65.963.400,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	592.967.200,00	527.003.800,00	(65.963.400,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	592.967.200,00	527.003.800,00	(65.963.400,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.967.200,00	527.003.800,00	(65.963.400,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	483.000.000,00	83.000.000,00	(400.000.000,00)	17,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	483.000.000,00	83.000.000,00	(400.000.000,00)	17,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.585.000,00	0,00	(1.585.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	238.415.000,00	0,00	(238.415.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	243.000.000,00	83.000.000,00	(160.000.000,00)	34,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	243.000.000,00	83.000.000,00	(160.000.000,00)	34,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	83.000.000,00	(160.000.000,00)	34,15	
				JUMLAH BELANJA	4.974.912.260,00	4.064.601.326,00	(910.310.934,00)	81,7	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.974.912.260,00)	(4.064.601.326,00)	910.310.934,00	81,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.974.912.260,00)	(4.064.601.326,00)	910.310.934,00	81,70	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN BURU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	4.903.517.176,00	4.304.311.996,00	(599.205.180,00)	87,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.462.963.576,00	3.134.415.796,00	(328.547.780,00)	90,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	(163.434.959,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	(163.434.959,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	(163.434.959,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	(163.434.959,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	228.123.500,00	104.798.952,00	(123.324.548,00)	45,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.994.000,00	2.900.000,00	(2.094.000,00)	58,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.994.000,00	2.900.000,00	(2.094.000,00)	58,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.000,00	2.900.000,00	(2.094.000,00)	58,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.842.200,00	50.813.000,00	(54.029.200,00)	48,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.842.200,00	50.813.000,00	(54.029.200,00)	48,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.842.200,00	50.813.000,00	(54.029.200,00)	48,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.540.000,00	2.912.000,00	(3.628.000,00)	44,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.540.000,00	2.912.000,00	(3.628.000,00)	44,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	2.912.000,00	(3.628.000,00)	44,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	39.388.300,00	15.746.952,00	(23.641.348,00)	39,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.388.300,00	15.746.952,00	(23.641.348,00)	39,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.388.300,00	15.746.952,00	(23.641.348,00)	39,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	72.359.000,00	32.427.000,00	(39.932.000,00)	44,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.359.000,00	32.427.000,00	(39.932.000,00)	44,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.359.000,00	32.427.000,00	(39.932.000,00)	44,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	219.871.321,00	189.207.048,00	(30.664.273,00)	86,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.121.321,00	17.149.548,00	(10.971.773,00)	60,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.121.321,00	17.149.548,00	(10.971.773,00)	60,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.121.321,00	17.149.548,00	(10.971.773,00)	60,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	191.750.000,00	172.057.500,00	(19.692.500,00)	89,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	191.750.000,00	172.057.500,00	(19.692.500,00)	89,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.750.000,00	172.057.500,00	(19.692.500,00)	89,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.494.000,00	6.370.000,00	(11.124.000,00)	36,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	7.595.000,00	0,00	(7.595.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.595.000,00	0,00	(7.595.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.595.000,00	0,00	(7.595.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.529.000,00	0,00	(3.529.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.529.000,00	0,00	(3.529.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.529.000,00	0,00	(3.529.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,0	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	870.559.900,00	730.531.200,00	(140.028.700,00)	83,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	870.559.900,00	730.531.200,00	(140.028.700,00)	83,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	870.559.900,00	730.531.200,00	(140.028.700,00)	83,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	870.559.900,00	730.531.200,00	(140.028.700,00)	83,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.559.900,00	730.531.200,00	(140.028.700,00)	83,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	569.993.700,00	439.365.000,00	(130.628.700,00)	77,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	569.993.700,00	439.365.000,00	(130.628.700,00)	77,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	314.758.500,00	228.950.000,00	(85.808.500,00)	72,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	314.758.500,00	228.950.000,00	(85.808.500,00)	72,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	314.758.500,00	228.950.000,00	(85.808.500,00)	72,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	255.235.200,00	210.415.000,00	(44.820.200,00)	82,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	255.235.200,00	210.415.000,00	(44.820.200,00)	82,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.235.200,00	210.415.000,00	(44.820.200,00)	82,43	
				JUMLAH BELANJA	4.903.517.176,00	4.304.311.996,00	(599.205.180,00)	87,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.903.517.176,00)	(4.304.311.996,00)	599.205.180,00	87,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.903.517.176,00)	(4.304.311.996,00)	599.205.180,00	87,78	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN DURAI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.143.576.682,74	2.022.123.728,00	(121.452.954,74)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	(100.179.015,74)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	(100.179.015,74)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	(100.179.015,74)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	(100.179.015,74)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	159.330.199,00	157.691.000,00	(1.639.199,00)	98,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	108.330.199,00	106.691.000,00	(1.639.199,00)	98,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.330.199,00	106.691.000,00	(1.639.199,00)	98,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.330.199,00	106.691.000,00	(1.639.199,00)	98,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	81.507.000,00	65.772.260,00	(15.734.740,00)	80,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	35.007.000,00	28.192.260,00	(6.814.740,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.007.000,00	28.192.260,00	(6.814.740,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.007.000,00	28.192.260,00	(6.814.740,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	46.500.000,00	37.580.000,00	(8.920.000,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.500.000,00	37.580.000,00	(8.920.000,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	37.580.000,00	(8.920.000,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.000.000,00	16.100.000,00	(3.900.000,00)	80,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.000.000,00	16.100.000,00	(3.900.000,00)	80,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.100.000,00	(3.900.000,00)	80,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.100.000,00	(3.900.000,00)	80,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	454.136.790,26	399.981.670,00	(54.155.120,26)	88,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	454.136.790,26	399.981.670,00	(54.155.120,26)	88,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	454.136.790,26	399.981.670,00	(54.155.120,26)	88,1	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	435.725.790,26	399.981.670,00	(35.744.120,26)	91,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.725.790,26	399.981.670,00	(35.744.120,26)	91,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.411.000,00	0,00	(18.411.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.411.000,00	0,00	(18.411.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.597.713.473,00)	(2.422.105.398,00)	175.608.075,00	93,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.597.713.473,00)	(2.422.105.398,00)	175.608.075,00	93,23	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN SELAT GELAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	2.039.152.687,00	1.896.410.207,00	(142.742.480,00)	92,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.774.945.687,00	1.667.865.207,00	(107.080.480,00)	93,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.422.500,00	12.282.500,00	(140.000,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.275.000,00	6.260.000,00	(15.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.275.000,00	6.260.000,00	(15.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	6.260.000,00	(15.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.290.500,00	4.165.500,00	(125.000,00)	97,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.290.500,00	4.165.500,00	(125.000,00)	97,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.500,00	4.165.500,00	(125.000,00)	97,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.539.446.687,00	1.493.492.607,00	(45.954.080,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.508.317.687,00	1.462.363.607,00	(45.954.080,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.508.317.687,00	1.462.363.607,00	(45.954.080,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.508.317.687,00	1.462.363.607,00	(45.954.080,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	31.129.000,00	31.129.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.129.000,00	31.129.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.129.000,00	31.129.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	113.663.000,00	69.190.100,00	(44.472.900,00)	60,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.987.000,00	0,00	(2.987.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.987.000,00	0,00	(2.987.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.000,00	0,00	(2.987.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	62.551.000,00	38.966.600,00	(23.584.400,00)	62,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.551.000,00	38.966.600,00	(23.584.400,00)	62,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.551.000,00	38.966.600,00	(23.584.400,00)	62,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.326.000,00	624.000,00	(1.702.000,00)	26,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.326.000,00	624.000,00	(1.702.000,00)	26,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.326.000,00	624.000,00	(1.702.000,00)	26,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.266.000,00	13.879.500,00	(15.386.500,00)	47,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.266.000,00	13.879.500,00	(15.386.500,00)	47,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.266.000,00	13.879.500,00	(15.386.500,00)	47,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	16.533.000,00	15.720.000,00	(813.000,00)	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.533.000,00	15.720.000,00	(813.000,00)	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.533.000,00	15.720.000,00	(813.000,00)	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	43.713.500,00	27.200.000,00	(16.513.500,00)	62,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	26.463.500,00	13.200.000,00	(13.263.500,00)	49,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.463.500	13.200.000	(13.263.500,00)	49,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.463.500	13.200.000	(13.263.500,00)	49,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.250.000	14.000.000	(3.250.000,00)	81,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.250.000	14.000.000	(3.250.000,00)	81,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000	14.000.000	(3.250.000,00)	81,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	264.207.000	228.545.000	(35.662.000,00)	86,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	264.207.000	228.545.000	(35.662.000,00)	86,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	264.207.000	228.545.000	(35.662.000,00)	86,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	264.207.000	228.545.000	(35.662.000,00)	86,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.207.000	228.545.000	(35.662.000,00)	86,50	
				JUMLAH BELANJA	2.039.152.687	1.896.410.207	(142.742.480,00)	92,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.039.152.687,00)	(1.896.410.207,00)	142.742.480,00	92,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.039.152.687,00)	(1.896.410.207,00)	142.742.480,00	92,99	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN SUGIE BESAR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.263.849.561,00	1.114.802.257,00	(149.047.304,00)	88,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.129.100,00	3.020.000,00	(109.100,00)	96,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.369.100,00	1.356.000,00	(13.100,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.369.100,00	1.356.000,00	(13.100,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.369.100,00	1.356.000,00	(13.100,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.760.000,00	1.664.000,00	(96.000,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.000,00	1.664.000,00	(96.000,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.664.000,00	(96.000,00)	94,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.001.397.861,00	898.120.257,00	(103.277.604,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.001.397.861,00	898.120.257,00	(103.277.604,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.001.397.861,00	898.120.257,00	(103.277.604,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.001.397.861,00	898.120.257,00	(103.277.604,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.631.500,00	71.326.000,00	(37.305.500,00)	65,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	59.622.500,00	35.571.500,00	(24.051.000,00)	59,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.988.500,00	18.076.500,00	(912.000,00)	95,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.988.500,00	18.076.500,00	(912.000,00)	95,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	40.634.000,00	17.495.000,00	(23.139.000,00)	43,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.634.000,00	17.495.000,00	(23.139.000,00)	43,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.999.000,00	4.060.500,00	(11.938.500,00)	25,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.027.000,00	4.060.500,00	(1.966.500,00)	67,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.027.000,00	4.060.500,00	(1.966.500,00)	67,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.972.000,00	0,00	(9.972.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.972.000,00	0,00	(9.972.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.010.000,00	31.694.000,00	(1.316.000,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.010.000,00	31.694.000,00	(1.316.000,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.010.000,00	31.694.000,00	(1.316.000,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	105.691.100,00	97.336.000,00	(8.355.100,00)	92,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	17.191.100,00	15.586.000,00	(1.605.100,00)	90,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.191.100,00	15.586.000,00	(1.605.100,00)	90,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.191.100,00	15.586.000,00	(1.605.100,00)	90,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	88.500.000,00	81.750.000,00	(6.750.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.500.000,00	81.750.000,00	(6.750.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	81.750.000,00	(6.750.000,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	192.148.000,00	167.978.000,00	(24.170.000,00)	87,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	192.148.000,00	167.978.000,00	(24.170.000,00)	87,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	192.148.000,00	167.978.000,00	(24.170.000,00)	87,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.148.000,00	167.978.000,00	(24.170.000,00)	87,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.148.000,00	167.978.000,00	(24.170.000,00)	87,42	
				JUMLAH BELANJA	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.455.997.561,00)	(1.282.780.257,00)	173.217.304,00	88,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.455.997.561,00)	(1.282.780.257,00)	173.217.304,00	88,10	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.352.905.740,88	4.080.156.388,00	(272.749.352,88)	93,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	78.421.900,00	64.457.200,00	(13.964.700,00)	82,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.583.000,00	16.944.600,00	(1.638.400,00)	91,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.583.000,00	16.944.600,00	(1.638.400,00)	91,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.583.000,00	16.944.600,00	(1.638.400,00)	91,18	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	17.434.000,00	15.083.000,00	(2.351.000,00)	86,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.434.000,00	15.083.000,00	(2.351.000,00)	86,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.434.000,00	15.083.000,00	(2.351.000,00)	86,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.085.900,00	13.562.600,00	(6.523.300,00)	67,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.085.900,00	13.562.600,00	(6.523.300,00)	67,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.085.900,00	13.562.600,00	(6.523.300,00)	67,52	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.319.000,00	18.867.000,00	(3.452.000,00)	84,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.319.000,00	18.867.000,00	(3.452.000,00)	84,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.319.000,00	18.867.000,00	(3.452.000,00)	84,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.039.117.340,88	3.812.205.688,00	(226.911.652,88)	94,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.017.982.340,88	3.793.078.588,00	(224.903.752,88)	94,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.017.982.340,88	3.793.078.588,00	(224.903.752,88)	94,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.017.982.340,88	3.793.078.588,00	(224.903.752,88)	94,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	21.135.000,00	19.127.100,00	(2.007.900,00)	90,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.135.000,00	19.127.100,00	(2.007.900,00)	90,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.135.000,00	19.127.100,00	(2.007.900,00)	90,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.476.500,00	105.715.932,00	(4.760.568,00)	95,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.998.000,00	2.911.000,00	(87.000,00)	97,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.998.000,00	2.911.000,00	(87.000,00)	97,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.000,00	2.911.000,00	(87.000,00)	97,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.056.000,00	40.963.000,00	(2.093.000,00)	95,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.056.000,00	40.963.000,00	(2.093.000,00)	95,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.056.000,00	40.963.000,00	(2.093.000,00)	95,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.333.500,00	9.316.000,00	(17.500,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.333.500,00	9.316.000,00	(17.500,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.333.500,00	9.316.000,00	(17.500,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.100.000,00	8.430.000,00	(670.000,00)	92,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	8.430.000,00	(670.000,00)	92,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	8.430.000,00	(670.000,00)	92,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.989.000,00	44.095.932,00	(1.893.068,00)	95,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.989.000,00	44.095.932,00	(1.893.068,00)	95,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.989.000,00	44.095.932,00	(1.893.068,00)	95,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	89.190.000,00	76.561.400,00	(12.628.600,00)	85,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	18.440.000,00	16.836.400,00	(1.603.600,00)	91,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.440.000,00	16.836.400,00	(1.603.600,00)	91,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.440.000,00	16.836.400,00	(1.603.600,00)	91,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	70.750.000,00	59.725.000,00	(11.025.000,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.750.000,00	59.725.000,00	(11.025.000,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.750.000,00	59.725.000,00	(11.025.000,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.700.000,00	21.216.168,00	(14.483.832,00)	59,42	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.010.000,00	16.326.168,00	(13.683.832,00)	54,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.010.000,00	16.326.168,00	(13.683.832,00)	54,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.010.000,00	16.326.168,00	(13.683.832,00)	54,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.690.000,00	4.890.000,00	(800.000,00)	85,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.690.000,00	4.890.000,00	(800.000,00)	85,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	4.890.000,00	(800.000,00)	85,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.225.372.500,00	2.163.199.700,00	(62.172.800,00)	97,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.225.372.500,00	2.163.199.700,00	(62.172.800,00)	97,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	183.541.700,00	157.354.000,00	(26.187.700,00)	85,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.541.700,00	157.354.000,00	(26.187.700,00)	85,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.541.700,00	157.354.000,00	(26.187.700,00)	85,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	33.600.000,00	32.850.200,00	(749.800,00)	97,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	32.850.200,00	(749.800,00)	97,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	32.850.200,00	(749.800,00)	97,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.458.230.800,00	1.422.995.500,00	(35.235.300,00)	97,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.457.439.800,00	1.422.204.500,00	(35.235.300,00)	97,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.457.439.800,00	1.422.204.500,00	(35.235.300,00)	97,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	791.000,00	791.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.000,00	791.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.136.689.864,00	1.040.539.327,00	(96.150.537,00)	91,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.136.689.864,00	1.040.539.327,00	(96.150.537,00)	91,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	919.425.364,00	842.405.327,00	(77.020.037,00)	91,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	919.425.364,00	842.405.327,00	(77.020.037,00)	91,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	919.425.364,00	842.405.327,00	(77.020.037,00)	91,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	111.093.500,00	100.753.900,00	(10.339.600,00)	90,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.093.500,00	100.753.900,00	(10.339.600,00)	90,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.093.500,00	100.753.900,00	(10.339.600,00)	90,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	106.171.000,00	97.380.100,00	(8.790.900,00)	91,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	106.171.000,00	97.380.100,00	(8.790.900,00)	91,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.171.000,00	97.380.100,00	(8.790.900,00)	91,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	215.225.000,00	16.547.000,00	(198.678.000,00)	7,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	215.225.000,00	16.547.000,00	(198.678.000,00)	7,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	187.700.000,00	0,00	(187.700.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	187.700.000,00	0,00	(187.700.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	187.700.000,00	0,00	(187.700.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	27.525.000,00	16.547.000,00	(10.978.000,00)	60,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.525.000,00	16.547.000,00	(10.978.000,00)	60,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.525.000,00	16.547.000,00	(10.978.000,00)	60,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	56.566.000,00	51.616.000,00	(4.950.000,00)	91,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	56.566.000,00	51.616.000,00	(4.950.000,00)	91,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	56.566.000,00	51.616.000,00	(4.950.000,00)	91,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.566.000,00	51.616.000,00	(4.950.000,00)	91,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.566.000,00	51.616.000,00	(4.950.000,00)	91,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	254.216.000,00	128.500.000,00	(125.716.000,00)	50,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	254.216.000,00	128.500.000,00	(125.716.000,00)	50,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	226.938.000,00	122.744.500,00	(104.193.500,00)	54,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	226.938.000,00	122.744.500,00	(104.193.500,00)	54,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.938.000,00	122.744.500,00	(104.193.500,00)	54,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	27.278.000,00	5.755.500,00	(21.522.500,00)	21,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.278.000,00	5.755.500,00	(21.522.500,00)	21,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.278.000,00	5.755.500,00	(21.522.500,00)	21,09	
				JUMLAH BELANJA	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.240.975.104,88)	(7.480.558.415,00)	760.416.689,88	90,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.240.975.104,88)	(7.480.558.415,00)	760.416.689,88	90,77	

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	690.382.012.499,51	652.616.744.486,50	105.387.112.230,09	93.013.508.561,46	0	0	0	0
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	360.903.358.494,00	348.699.679.266,00	26.391.990.590,00	22.417.343.690,63	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	360.903.358.494,00	348.699.679.266,00	26.391.990.590,00	22.417.343.690,63	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301.154.369.458,00	290.553.035.298,00	48.476.000,00	47.838.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.736.000,00	61.158.400,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.868.000,00	9.867.200,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.368.000,00	30.431.600,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.500.000,00	20.859.600,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	290.551.151.760,00	280.816.589.609,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	290.487.398.760,00	280.752.836.609,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.753.000,00	63.753.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.661.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.661.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.002.000,00	205.725.789,00	47.668.000,00	47.030.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	47.668.000,00	47.030.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	45.590.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.700.000,00	51.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.302.000,00	109.035.789,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.196.828.698,00	9.469.561.500,00	808.000,00	808.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.778.698,00	13.661.500,00	808.000,00	808.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.176.050.000,00	9.455.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.990.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.990.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.277.260.036,00	57.758.685.888,00	26.343.514.590,00	22.369.504.990,63	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.545.400.370,00	27.980.178.969,00	13.509.367.850,00	12.353.221.887,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	88.240.000,00	74.347.500,00	720.000.000,00	714.941.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	56.800.000,00	55.927.500,00	360.000.000,00	359.234.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	635.240.000,00	610.598.752,00	1.736.820.000,00	1.702.402.430,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	7.474.000,00	7.474.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	400.520.000,00	386.267.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	208.495.000,00	17.166.200,00	1.411.766.000,00	508.966.507,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	182.117.000,00	170.762.750,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96.664.000,00	95.155.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60.664.000,00	60.253.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	151.239.000,00	149.745.817,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.195.091.150,00	22.195.089.350,00	8.057.853.850,00	8.057.853.850,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.962.000,00	188.865.580,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	126.210.000,00	84.780.000,00	720.000.000,00	715.978.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	106.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.756.000,00	58.267.000,00	55.000.000,00	53.846.100,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	81.410.000,00	61.569.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.867.322.000,00	1.838.737.800,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	178.276.000,00	155.168.322,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.780.217.220,00	1.747.106.578,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	48.820.000,00	28.099.420,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	998.000,00	798.400,00	447.928.000,00	240.000.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.742.054.736,00	19.991.364.182,00	10.169.710.990,00	7.392.697.853,63	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	41.350.000,00	28.976.000,00	387.985.000,00	386.984.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	20.350.000,00	10.201.000,00	190.000.000,00	189.469.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	20.025.000,00	15.215.000,00	199.000.000,00	197.992.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	69.991.906,00	55.189.906,00	178.980.000,00	178.980.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	865.490.781,00	843.291.781,00	1.415.959.000,00	1.351.136.873,63	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.717.299.529,00	1.552.360.829,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	219.919.800,00	217.370.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	399.475.000,00	397.209.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	169.350.000,00	165.557.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	268.789.000,00	263.358.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	448.117.110,00	441.268.910,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	115.025.000,00	20.031.933,00	3.462.425.000,00	756.604.700,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	49.209.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	273.627.000,00	229.587.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	295.560.000,00	207.440.709,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.161.159.710,00	13.156.240.114,00	3.697.990.290,00	3.694.490.290,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	171.100.000,00	158.432.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	58.146.800,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.200.000,00	59.480.000,00	50.000.000,00	49.999.990,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	146.664.000,00	78.904.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	88.725.000,00	72.126.000,00	587.371.700,00	587.041.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	146.664.000,00	56.037.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.900.000.000,00	1.892.052.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	29.025.000,00	21.827.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.658.972.930,00	8.490.101.079,00	2.664.435.750,00	2.623.585.250,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.136.014.900,00	1.126.864.450,00	943.127.550,00	926.353.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	261.415.000,00	253.779.000,00	426.665.000,00	412.781.250,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	296.677.000,00	281.181.000,00	132.798.000,00	128.250.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	530.761.000,00	502.590.200,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	64.000.000,00	63.925.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	411.560.000,00	400.137.173,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.706.521.000,00	3.692.742.000,00	136.943.000,00	136.943.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	192.016.000,00	174.087.256,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	59.666.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	461.498.800,00	460.812.000,00	723.087.200,00	721.510.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	376.028.000,00	371.492.000,00	297.891.000,00	293.824.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.162.815.230,00	1.162.491.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.330.832.000,00	1.297.041.658,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.167.780.000,00	1.161.520.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	163.052.000,00	135.521.658,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	184.440.000,00	141.083.080,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.440.000,00	6.313.400,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.440.000,00	6.313.400,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000,00	134.769.680,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000,00	134.769.680,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	287.289.000,00	246.875.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	287.289.000,00	246.875.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	287.289.000,00	246.875.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	248.659.678.585,70	234.403.006.325,00	14.044.292.060,00	13.738.582.221,83	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	115.176.726.610,60	108.065.090.658,00	721.590.000,00	718.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.942.154.830,00	68.063.636.639,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.500.000,00	19.461.580,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.190.000,00	9.942.580,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.310.000,00	9.519.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.445.951.430,00	67.641.668.970,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.445.951.430,00	67.641.668.970,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.773.400,00	10.382.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.773.400,00	10.382.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.995.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	4.995.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.011.000,00	143.591.689,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.000,00	2.487.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.932.000,00	20.469.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000,00	21.052.750,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	2.709.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.080.000,00	91.873.439,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.552.000,00	237.066.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.992.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.310.000,00	12.811.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.250.000,00	218.055.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.367.000,00	1.470.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.367.000,00	1.470.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.386.905.830,60	36.405.119.179,00	721.590.000,00	718.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.429.619.982,00	4.755.274.610,00	721.590.000,00	718.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	300.000.000,00	293.939.100,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	166.435.700,00	87.580.533,00	721.590.000,00	718.600.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.963.184.282,00	4.373.754.977,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.891.189.848,60	31.605.774.969,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.463.000,00	87.901.625,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	44.647.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	265.454.440,00	242.117.062,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	78.175.000,00	77.039.550,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	199.307.250,00	158.897.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87.207.410,00	37.664.039,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	142.770.000,00	103.117.992,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	49.913.600,00	41.357.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	122.242.800,00	119.676.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.000.000,00	11.855.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.675.000,00	4.320.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000,00	1.725.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	220.968.000,00	116.043.450,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.607.400,00	2.124.951,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.987.000,00	9.802.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	631.757.200,00	241.528.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.486.412.948,60	30.058.829.636,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	21.600.000,00	14.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	30.000.000,00	5.564.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	62.181.000,00	60.785.965,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	186.348.000,00	142.756.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	29.119.800,00	23.620.999,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	61.428.000,00	41.271.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	61.428.000,00	41.271.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.668.000,00	2.798.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.668.000,00	2.798.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	45.000.000,00	15.814.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	3.930.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	3.930.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	11.884.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	11.884.900,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	231.884.000,00	172.244.990,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	72.005.000,00	48.690.140,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	72.005.000,00	48.690.140,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144.879.000,00	116.872.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144.879.000,00	116.872.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	15.000.000,00	6.682.200,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	15.000.000,00	6.682.200,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.570.781.950,00	3.408.274.950,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.516.950.950,00	3.393.816.950,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.831.000,00	14.458.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	53.831.000,00	14.458.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RSUD MUHAMMAD SANI	89.360.533.859,65	87.654.441.997,00	12.057.267.100,00	12.006.047.009,83	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.991.438.689,40	87.324.435.821,00	5.450.000.000,00	5.399.442.037,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.239.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.037.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.202.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.275.047.629,40	11.423.727.809,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.275.047.629,40	11.423.727.809,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.991.600,00	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.991.600,00	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.106.160.460,00	1.896.697.792,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.411.910.460,00	1.310.217.792,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.250.000,00	586.480.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	74.550.000.000,00	73.976.810.220,00	5.450.000.000,00	5.399.442.037,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	74.550.000.000,00	73.976.810.220,00	5.450.000.000,00	5.399.442.037,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	369.095.170,25	330.006.176,00	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	369.095.170,25	330.006.176,00	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	369.095.170,25	330.006.176,00	6.607.267.100,00	6.606.604.972,83	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	5.662.230.895,12	5.009.371.045,00	539.144.460,00	490.149.919,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.161.813.785,40	4.875.843.652,00	539.144.460,00	490.149.919,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.320.849.616,33	2.183.910.230,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.320.849.616,33	2.183.910.230,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.717.667,07	271.583.350,00	489.144.460,00	485.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.595.895,07	33.695.335,00	489.144.460,00	485.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.158.812,00	129.917.498,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.996.960,00	16.979.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.966.000,00	90.991.517,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.246.502,00	476.107.718,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.996.502,00	201.077.718,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.250.000,00	275.030.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.950.000.000,00	1.944.242.354,00	50.000.000,00	5.149.919,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.950.000.000,00	1.944.242.354,00	50.000.000,00	5.149.919,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	500.417.109,72	133.527.393,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.417.109,72	133.527.393,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	500.417.109,72	133.527.393,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	2.087.057.090,83	1.559.479.250,00	38.410.000,00	21.389.118,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.373.166.090,83	1.150.340.645,00	38.410.000,00	21.389.118,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	625.276.091,00	567.008.043,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	625.276.091,00	567.008.043,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.420.500,00	96.943.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.026.000,00	4.020.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.628.500,00	33.844.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.639.000,00	19.799.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.053.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.074.000,00	34.780.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.239.499,83	109.298.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.439.499,83	8.663.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.800.000,00	100.635.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.640.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.640.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	474.590.000,00	377.091.602,00	38.410.000,00	21.389.118,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	474.590.000,00	377.091.602,00	38.410.000,00	21.389.118,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.575.000,00	397.849.605,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.575.000,00	397.849.605,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.850.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.000.000,00	31.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.800.000,00	7.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000,00	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	278.841.000,00	112.050.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.600.000,00	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Survellans Kesehatan	17.200.000,00	10.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.800.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.186.000,00	59.899.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.242.000,00	77.500.105,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.400.000,00	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.356.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.200.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.300.000,00	23.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.316.000,00	11.289.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.316.000,00	11.289.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.316.000,00	11.289.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		UPT PUSKESMAS BURU	2.150.796.669,24	1.869.995.749,00	30.000.000,00	27.619.800,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.610.679.669,24	1.442.325.057,00	30.000.000,00	27.619.800,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	723.559.919,24	686.997.765,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	723.559.919,24	686.997.765,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.092.000,00	48.330.100,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.177.000,00	18.755.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.383.000,00	4.374.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.324.000,00	8.285.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.208.000,00	4.102.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000.000,00	12.813.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.387.750,00	163.094.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.287.750,00	45.379.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.100.000,00	117.715.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.440.000,00	2.425.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.425.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	643.200.000,00	541.477.792,00	30.000.000,00	27.619.800,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	643.200.000,00	541.477.792,00	30.000.000,00	27.619.800,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	528.524.000,00	417.040.692,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	528.524.000,00	417.040.692,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.704.000,00	27.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.500.000,00	17.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	11.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.600.000,00	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.526.000,00	153.025.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.400.000,00	16.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.100.000,00	6.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.400.000,00	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.429.000,00	37.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	106.965.000,00	80.065.692,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.600.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12.000.000,00	8.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	38.200.000,00	38.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.593.000,00	10.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.593.000,00	10.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.593.000,00	10.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	2.721.468.720,00	2.203.371.848,00	49.500.000,00	20.868.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.115.170.220,00	1.710.577.360,00	49.500.000,00	20.868.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	916.846.918,00	802.179.809,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	916.846.918,00	802.179.809,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.153.000,00	29.234.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.390.000,00	1.286.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.868.000,00	4.582.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.864.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.625.000,00	3.905.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.906.000,00	2.820.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000,00	16.066.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.047.000,00	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.047.000,00	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.814.302,00	166.718.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.302,00	35.094.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.814.000,00	131.624.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	958.309.000,00	711.145.551,00	49.500.000,00	20.868.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	958.309.000,00	711.145.551,00	49.500.000,00	20.868.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	594.546.500,00	481.164.488,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.546.500,00	481.164.488,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.500.000,00	39.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.000.000,00	31.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.800.000,00	12.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.100.000,00	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.406.500,00	138.375.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.479.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.800.000,00	22.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.380.000,00	36.850.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.681.000,00	87.039.488,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.800.000,00	15.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0045	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	51.000.000,00	51.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.752.000,00	11.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.752.000,00	11.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.752.000,00	11.630.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	2.704.474.450,00	2.425.137.301,00	50.000.000,00	22.300.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.010.373.850,00	1.812.882.545,00	50.000.000,00	22.300.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.313.593.850,00	1.214.247.964,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.313.593.850,00	1.214.247.964,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.413.000,00	16.640.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.090.000,00	7.295.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.585.000,00	473.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700.000,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.688.000,00	3.292.650,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.350.000,00	5.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.080.000,00	157.617.540,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.330.000,00	50.357.540,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.750.000,00	107.260.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.287.000,00	3.284.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.287.000,00	3.284.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	470.000.000,00	421.091.991,00	50.000.000,00	22.300.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	470.000.000,00	421.091.991,00	50.000.000,00	22.300.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	680.969.600,00	600.959.756,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	680.969.600,00	600.959.756,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.400.000,00	47.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.800.000,00	20.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.200.000,00	17.800.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	262.604.600,00	237.665.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.800.000,00	21.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.800.000,00	17.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.000.000,00	7.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.879.000,00	50.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.386.000,00	113.494.756,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.800.000,00	6.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.000.000,00	17.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	33.600.000,00	31.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.131.000,00	11.295.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.131.000,00	11.295.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.131.000,00	11.295.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		UPT PUSKESMAS TEBING	3.907.773.646,00	3.562.233.248,00	50.000.000,00	44.950.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.070.677.146,00	2.794.048.984,00	50.000.000,00	44.950.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.509.177.046,00	1.365.610.923,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.177.046,00	1.365.610.923,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.680.300,00	20.629.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.374.100,00	9.323.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.106.200,00	4.106.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.157.800,00	180.511.880,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.507.800,00	44.711.880,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.650.000,00	135.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.662.000,00	26.036.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.662.000,00	26.036.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.230.000.000,00	1.201.260.581,00	50.000.000,00	44.950.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.230.000.000,00	1.201.260.581,00	50.000.000,00	44.950.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	828.876.500,00	760.804.264,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	828.876.500,00	760.804.264,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.000.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.400.000,00	40.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.200.000,00	6.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.000.000,00	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	362.040.500,00	360.870.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.688.000,00	20.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64.300.000,00	48.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	157.808.000,00	116.034.264,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.332.000,00	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.408.000,00	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.200.000,00	47.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.220.000,00	7.380.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.220.000,00	7.380.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.220.000,00	7.380.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	3.355.751.464,82	3.085.749.999,00	145.000.000,00	103.054.865,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.691.186.864,82	2.496.030.313,00	145.000.000,00	103.054.865,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.184.160.864,82	1.095.469.392,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.184.160.864,82	1.095.469.392,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.534.000,00	30.510.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.638.000,00	10.858.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.896.000,00	8.880.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000.000,00	10.772.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.052.000,00	169.575.300,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.102.000,00	39.675.300,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.950.000,00	129.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.440.000,00	7.424.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.440.000,00	7.424.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.235.000.000,00	1.193.051.621,00	145.000.000,00	103.054.865,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.235.000.000,00	1.193.051.621,00	145.000.000,00	103.054.865,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	649.139.600,00	577.319.686,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	649.139.600,00	577.319.686,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.450.000,00	49.920.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57.628.000,00	55.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.000.000,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.600.000,00	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.653.600,00	176.844.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.100.000,00	19.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.200.000,00	12.400.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.448.000,00	53.036.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	102.950.000,00	87.819.686,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.200.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	47.500.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	27.000.000,00	24.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.425.000,00	12.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.425.000,00	12.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.425.000,00	12.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		UPT PUSKESMAS UNGAR	1.508.726.029,48	1.267.363.426,00	7.550.000,00	2.330.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.106.283.829,48	998.378.279,00	7.550.000,00	2.330.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	458.973.829,48	432.213.730,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	458.973.829,48	432.213.730,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.198.500,00	38.328.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.415.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.113.000,00	5.181.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.172.000,00	1.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.498.500,00	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000.000,00	25.597.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.955.500,00	150.035.433,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.955.500,00	42.585.439,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.000.000,00	107.450.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.706.000,00	79.879.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.706.000,00	79.879.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	302.450.000,00	297.922.116,00	7.550.000,00	2.330.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	302.450.000,00	297.922.116,00	7.550.000,00	2.330.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	397.350.200,00	265.229.147,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397.350.200,00	265.229.147,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.500.000,00	22.730.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.000.000,00	11.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000,00	8.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.975.200,00	64.303.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.000.000,00	14.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.600.000,00	11.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.600.000,00	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.766.000,00	27.493.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.291.000,00	64.173.147,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	4.530.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	9.618.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	23.600.000,00	19.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.092.000,00	3.756.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.092.000,00	3.756.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.092.000,00	3.756.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		UPT PUSKESMAS MORO	2.117.573.257,00	1.760.038.676,00	48.174.500,00	43.900.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.662.114.257,00	1.555.418.676,00	48.174.500,00	43.900.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	793.409.724,00	754.187.368,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	793.409.724,00	754.187.368,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.724.000,00	31.238.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.356.000,00	1.255.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.903.000,00	8.953.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.155.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.610.000,00	8.097.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.200.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00	12.182.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.855.033,00	186.228.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.005.033,00	32.453.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.850.000,00	153.775.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.700.000,00	4.510.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000,00	4.510.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	585.425.500,00	579.254.908,00	48.174.500,00	43.900.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	585.425.500,00	579.254.908,00	48.174.500,00	43.900.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	444.359.000,00	204.620.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	444.359.000,00	204.620.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.000.000,00	19.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.700.000,00	17.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.200.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.600.000,00	17.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.021.000,00	43.620.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	6.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.672.000,00	6.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000,00	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.350.000,00	26.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	101.324.000,00	22.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.200.000,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	492.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.000.000,00	11.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	30.000.000,00	28.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	6.884.526.917,48	6.341.806.027,00	130.000.000,00	119.522.400,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.711.971.917,48	5.382.600.328,00	130.000.000,00	119.522.400,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.572.903,48	2.446.239.150,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.572.903,48	2.446.239.150,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.394.000,00	38.809.152,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.077.000,00	34.294.782,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.317.000,00	4.514.370,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.005.014,00	412.948.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.005.014,00	138.998.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.000.000,00	273.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.720.000.000,00	2.484.603.326,00	130.000.000,00	119.522.400,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.720.000.000,00	2.484.603.326,00	130.000.000,00	119.522.400,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.155.658.000,00	942.308.699,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.155.658.000,00	942.308.699,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.400.000,00	19.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.500.000,00	52.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	56.400.000,00	32.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.200.000,00	17.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	493.177.000,00	469.973.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000,00	14.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.800.000,00	6.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	33.600.000,00	24.200.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.111.000,00	75.854.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	174.328.000,00	99.681.699,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.742.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.600.000,00	8.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	81.000.000,00	56.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	67.800.000,00	57.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.897.000,00	16.897.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.897.000,00	16.897.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.897.000,00	16.897.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		UPT PUSKESMAS BELAT	1.810.876.407,00	1.432.620.977,00	35.000.000,00	14.186.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.235.272.507,00	1.068.890.977,00	35.000.000,00	14.186.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	502.103.575,00	483.698.293,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	502.103.575,00	483.698.293,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.952.400,00	49.368.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.990.000,00	5.990.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.064.000,00	8.128.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.780.000,00	3.748.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.950.400,00	4.747.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.168.000,00	26.755.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.216.532,00	163.670.218,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.714.707,00	30.718.393,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.501.825,00	132.951.825,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	505.000.000,00	372.153.966,00	35.000.000,00	14.186.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	505.000.000,00	372.153.966,00	35.000.000,00	14.186.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	567.400.900,00	357.330.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	567.400.900,00	357.330.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.000.000,00	17.350.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.200.000,00	21.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.800.000,00	11.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.632.900,00	127.030.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.200.000,00	16.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.500.000,00	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.600.000,00	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.753.000,00	32.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.065.000,00	45.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.250.000,00	4.250.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.400.000,00	13.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.000.000,00	39.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.203.000,00	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.203.000,00	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.203.000,00	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		UPT PUSKESMAS DURAI	1.705.317.820,00	1.450.788.038,00	34.000.000,00	33.966.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.251.811.620,00	1.126.756.618,00	34.000.000,00	33.966.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	453.241.620,00	443.687.707,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	453.241.620,00	443.687.707,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.225.500,00	63.715.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.903.000,00	1.622.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.590.000,00	9.991.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.680.600,00	6.578.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.088.400,00	14.572.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.413.500,00	5.412.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.550.000,00	24.540.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.344.500,00	167.903.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.594.500,00	21.268.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.750.000,00	146.635.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	456.000.000,00	451.450.411,00	34.000.000,00	33.966.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	456.000.000,00	451.450.411,00	34.000.000,00	33.966.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	449.804.200,00	320.599.420,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449.804.200,00	320.599.420,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.000.000,00	39.570.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.000.000,00	22.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.343.200,00	57.007.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.200.000,00	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.600.000,00	9.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.356.000,00	27.690.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	99.577.000,00	72.232.420,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.628.000,00	17.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.500.000,00	31.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.702.000,00	3.432.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.702.000,00	3.432.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.702.000,00	3.432.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	2.754.200.285,00	2.264.910.175,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.026.378.785,00	1.828.086.593,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	875.972.785,00	743.504.798,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	875.972.785,00	743.504.798,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.700.000,00	28.432.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.700.000,00	28.432.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.706.000,00	180.421.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.156.000,00	47.556.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.550.000,00	132.865.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	879.000.000,00	875.728.395,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	879.000.000,00	875.728.395,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	720.108.500,00	433.138.582,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	720.108.500,00	433.138.582,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.000.000,00	98.850.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.800.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	5.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.000.000,00	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	278.535.500,00	42.480.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.700.000,00	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.400.000,00	9.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.100.000,00	36.430.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.267.000,00	81.378.582,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.206.000,00	20.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.600.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.713.000,00	3.685.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.713.000,00	3.685.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.713.000,00	3.685.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		UPT PUSKESMAS MERAL	4.225.811.615,48	3.976.181.855,00	50.000.000,00	48.697.610,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.476.087.295,48	3.361.307.902,00	50.000.000,00	48.697.610,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.490.170.846,76	1.419.682.160,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.482.226.846,76	1.411.738.160,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.944.000,00	7.944.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.008.000,00	11.008.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.008.000,00	11.008.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.908.448,72	205.834.200,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.708.448,72	98.994.200,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.200.000,00	106.840.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.750.000.000,00	1.724.783.542,00	50.000.000,00	48.697.610,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.750.000.000,00	1.724.783.542,00	50.000.000,00	48.697.610,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	728.727.620,00	594.301.953,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.727.620,00	594.301.953,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.800.000,00	24.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.800.000,00	38.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000,00	4.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300.154.760,00	277.869.111,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.200.000,00	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.500.000,00	12.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.789.940,00	60.624.802,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.561.920,00	94.564.040,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.410.000,00	3.212.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.011.000,00	8.232.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0045	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	1.800.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.600.000,00	25.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.996.700,00	20.572.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.996.700,00	20.572.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.996.700,00	20.572.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	525.832.848,00	474.426.056,00	37.656.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	196.089.740,00	164.443.666,00	37.656.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.727.000,00	47.385.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.790.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.030.000,00	4.191.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.072.000,00	25.779.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	37.656.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	37.656.000,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.724.740,00	83.070.666,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	533.000,00	528.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.941.740,00	82.542.666,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.638.000,00	33.988.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.595.000,00	8.080.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000,00	15.095.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.593.000,00	10.813.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	329.743.108,00	309.982.390,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	320.475.000,00	301.182.390,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	320.475.000,00	301.182.390,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.268.108,00	8.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.268.108,00	8.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42.537.369.870,67	35.259.079.052,50	61.677.200.863,09	53.711.838.082,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	42.537.369.870,67	35.259.079.052,50	61.677.200.863,09	53.711.838.082,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.909.210.780,06	9.934.129.256,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.851.000,00	108.701.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.871.000,00	21.775.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.860.000,00	35.588.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.120.000,00	51.338.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.460.415.756,06	9.026.945.416,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.580.000,00	4.080.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.080.000,00	4.080.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.341.800,00	396.855.300,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.457.500,00	103.325.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.340.000,00	40.162.400,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	101.200.000,00	83.850.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.344.300,00	169.517.400,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.330.000,00	101.650.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.330.000,00	101.650.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.950.000,00	165.026.550,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.200.000,00	57.701.550,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.750.000,00	107.325.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.742.224,00	130.870.990,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.642.224,00	125.370.990,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	272.482.661,00	256.008.900,00	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	272.482.661,00	256.008.900,00	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	272.482.661,00	256.008.900,00	2.639.487.600,00	1.456.249.100,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	497.486.084,50	354.448.500,00	920.649.600,00	557.145.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	497.486.084,50	354.448.500,00	920.649.600,00	557.145.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	497.486.084,50	354.448.500,00	920.649.600,00	557.145.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	238.891.953,90	0	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.891.953,90	0	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	238.891.953,90	0	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	627.993.133,20	597.829.467,50	986.273.000,00	818.600.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.993.133,20	597.829.467,50	986.273.000,00	818.600.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	555.168.120,70	534.381.467,50	796.773.000,00	629.100.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	72.825.012,50	63.448.000,00	189.500.000,00	189.500.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	22.579.973.179,10	18.928.613.113,00	4.416.650.289,62	4.072.317.397,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.579.973.179,10	18.928.613.113,00	4.416.650.289,62	4.072.317.397,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.611.754.790,00	3.324.546.113,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	139.003.934,90	114.848.500,00	1.654.760.139,26	1.652.490.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.493.233.954,20	15.268.832.000,00	2.761.890.150,36	2.419.827.397,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	335.980.500,00	220.386.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.748.404.970,26	1.566.950.321,00	16.597.534.910,00	16.597.533.910,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.748.404.970,26	1.566.950.321,00	16.597.534.910,00	16.597.533.910,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.748.404.970,26	1.566.950.321,00	16.597.534.910,00	16.597.533.910,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.271.988.908,65	2.747.069.295,00	36.114.565.463,47	30.209.992.175,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.271.988.908,65	2.747.069.295,00	36.114.565.463,47	30.209.992.175,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.887.517.631,20	1.864.077.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	807.434.377,45	669.159.250,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	41.573.000,00	34.822.500,00	3.287.749.436,00	3.130.440.150,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	173.147.400,00	145.234.045,00	32.826.816.027,47	27.079.552.025,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	362.316.500,00	33.776.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	182.839.000,00	91.508.200,00	2.040.000,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	54.396.000,00	46.622.700,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	23.832.500,00	21.230.700,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	4.357.000,00	1.929.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	26.206.500,00	23.463.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.664.000,00	42.326.500,00	2.040.000,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	118.664.000,00	42.326.500,00	2.040.000,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.779.000,00	2.559.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	9.779.000,00	2.559.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.208.099.200,00	782.522.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	897.566.100,00	346.287.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	792.827.400,00	340.150.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	6.137.500,00	6.137.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	98.601.200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	221.177.300,00	18.063.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	221.177.300,00	18.063.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.089.355.800,00	418.171.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	541.097.800,00	390.646.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	281.183.500,00	19.213.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	132.659.000,00	4.148.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	134.415.500,00	4.164.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.679.630.741,85	12.512.563.231,00	3.021.210.717,00	2.989.980.517,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.679.630.741,85	12.512.563.231,00	3.021.210.717,00	2.989.980.517,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.903.296.954,45	3.636.371.266,00	192.856.000,00	162.643.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.528.000,00	66.121.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.581.000,00	21.424.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.348.000,00	27.298.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.599.000,00	17.399.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.424.401.854,45	3.319.142.870,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.187.500,00	123.800.250,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	48.793.800,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.752.500,00	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.435.000,00	43.406.450,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.120.000,00	6.120.000,00	192.856.000,00	162.643.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.120.000,00	6.120.000,00	192.856.000,00	162.643.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.624.000,00	79.191.396,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.874.000,00	14.696.396,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.750.000,00	64.495.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.435.600,00	41.995.750,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.435.600,00	35.995.750,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	120.000.000,00	13.134.050,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20.000.000,00	13.134.050,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20.000.000,00	13.134.050,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.573.876.415,80	1.130.579.988,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	449.910.397,80	448.288.928,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	449.910.397,80	448.288.928,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	728.964.018,00	422.259.060,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	728.964.018,00	422.259.060,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	395.002.000,00	260.032.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	395.002.000,00	260.032.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.082.457.371,60	7.732.477.927,00	2.828.354.717,00	2.827.337.517,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.082.457.371,60	7.732.477.927,00	2.828.354.717,00	2.827.337.517,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.862.346.371,60	7.587.974.927,00	2.828.354.717,00	2.827.337.517,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	220.111.000,00	144.503.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.475.290.328,37	17.331.409.065,00	252.418.000,00	155.764.050,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.489.762.868,30	6.071.691.940,00	151.210.000,00	122.666.050,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.103.761.668,30	5.960.950.830,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.039.600,00	6.836.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.076.000,00	2.044.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.880.600,00	2.812.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.083.000,00	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.710.544.974,98	5.607.743.518,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.399.093,32	50.733.382,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.129.000,00	16.395.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.410.000,00	4.303.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.110.093,32	30.035.382,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.440.000,00	144.942.790,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.440.000,00	8.742.790,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.000.000,00	136.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.338.000,00	150.695.140,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	23.953.040,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.468.000,00	124.442.100,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.870.000,00	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	254.721.400,00	36.197.000,00	32.760.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	24.145.600,00	2.225.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.145.600,00	2.225.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.280.000,00	655.000,00	32.760.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.280.000,00	655.000,00	32.760.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	144.623.600,00	10.895.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	94.022.600,00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.601.000,00	10.895.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	81.672.200,00	22.422.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	81.672.200,00	22.422.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	131.279.800,00	74.544.110,00	118.450.000,00	117.166.050,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	131.279.800,00	74.544.110,00	118.450.000,00	117.166.050,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.657.400,00	27.206.110,00	346.000,00	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.161.400,00	34.538.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	15.000.000,00	2.475.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	10.155.000,00	9.535.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.306.000,00	790.000,00	118.104.000,00	117.166.050,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.985.527.460,07	11.259.717.125,00	101.208.000,00	33.098.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.900.732.160,07	11.207.178.225,00	95.238.000,00	33.098.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.827.500,00	19.638.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.993.000,00	11.835.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.506.000,00	6.506.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.328.500,00	1.296.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.783.112.282,07	10.252.444.447,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.682.278,00	112.981.878,00	74.724.000,00	12.584.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.185.000,00	922.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.236.200,00	16.344.400,00	74.724.000,00	12.584.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	877.878,00	877.878,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.612.000,00	5.202.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.371.200,00	87.235.600,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.871.000,00	1.810.000,00	20.514.000,00	20.514.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.871.000,00	1.810.000,00	20.514.000,00	20.514.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.767.100,00	767.462.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.217.100,00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.600.000,00	4.697.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	826.950.000,00	762.765.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.472.000,00	52.841.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.332.000,00	50.706.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.140.000,00	2.135.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	84.795.300,00	52.538.900,00	5.970.000,00	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.616.500,00	35.135.200,00	5.970.000,00	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.115.000,00	8.591.000,00	5.970.000,00	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	29.318.000,00	24.254.200,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	8.553.500,00	2.290.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	3.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.178.800,00	17.403.700,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.178.800,00	17.403.700,00	0	0	0	0	0	0
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.757.238.878,92	3.481.308.738,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.501.441.578,92	3.314.857.778,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.317.300,00	114.492.300,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.530.000,00	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.963.300,00	10.244.200,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.652.000,00	6.254.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.100.000,00	3.140.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.072.000,00	91.389.100,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.980.000,00	34.551.860,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.980.000,00	10.286.860,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.000.000,00	24.265.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000,00	17.406.800,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.660.000,00	14.611.800,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	2.795.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	598.012.600,00	419.825.673,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	598.012.600,00	419.825.673,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	79.949.800,00	67.256.500,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	89.550.000,00	83.920.133,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	102.499.600,00	53.551.140,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	87.439.500,00	68.919.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	85.720.000,00	72.642.200,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.750.000,00	10.648.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	134.653.700,00	62.888.700,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	286.163.000,00	133.872.936,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	286.163.000,00	133.872.936,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	172.473.000,00	53.488.936,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	113.690.000,00	80.384.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	485.270.000,00	376.000.200,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	485.270.000,00	376.000.200,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	336.245.000,00	235.300.200,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	149.025.000,00	140.700.000,00	0	0	0	0	0	0
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	114.815.975.360,23	102.904.145.394,00	6.250.973.070,00	5.451.192.200,00	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.228.288.575,00	6.633.368.275,00	145.300.000,00	145.300.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	7.228.288.575,00	6.633.368.275,00	145.300.000,00	145.300.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.947.282.375,00	4.699.901.475,00	145.300.000,00	145.300.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.664.000,00	5.664.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.664.000,00	5.664.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.532.360.975,00	4.364.726.609,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.364.975,00	4.342.730.609,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.996.000,00	21.996.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.239.400,00	168.456.766,00	145.300.000,00	145.300.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.952.000,00	1.950.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.878.900,00	19.776.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.987.500,00	2.985.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.100.000,00	60.662.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.121.000,00	72.883.766,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.295.000,00	105.007.030,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.295.000,00	31.977.030,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.000.000,00	73.030.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.723.000,00	56.047.070,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.392.000,00	39.332.070,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.491.000,00	3.720.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	12.995.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.621.730.000,00	1.437.737.300,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.599.392.000,00	1.437.737.300,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.552.042.000,00	1.390.387.300,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	47.350.000,00	47.350.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.338.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	22.338.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	380.825.200,00	270.722.700,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	156.564.700,00	112.574.700,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	42.495.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	114.069.700,00	112.574.700,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.550.000,00	158.148.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	167.550.000,00	158.148.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	56.710.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	56.710.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	278.451.000,00	225.006.800,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.451.000,00	165.011.800,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	218.451.000,00	165.011.800,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.995.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.31.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.995.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.558.345.814,48	4.179.346.321,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.314.383.914,48	4.033.030.105,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.529.900,00	36.502.300,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.408.000,00	703.100,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.794.900,00	14.291.500,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.163.000,00	1.921.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.164.000,00	19.586.700,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.730.000,00	68.880.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.980.000,00	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.750.000,00	32.480.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.652.000,00	39.883.916,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.822.000,00	31.633.916,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000,00	7.900.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000,00	350.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	225.998.000,00	163.411.197,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	94.284.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	94.284.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.046.000,00	49.822.761,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.046.000,00	49.822.761,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.452.000,00	19.304.436,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	13.384.050,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.452.000,00	5.920.386,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	6.641.000,00	6.641.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6.641.000,00	6.641.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.641.000,00	6.641.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	204.110.000,00	151.365.640,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.094.000,00	96.831.140,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	135.094.000,00	96.831.140,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.016.000,00	54.534.500,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.016.000,00	54.534.500,00	0	0	0	0	0	0
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.061.345.329,39	7.637.315.710,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.636.000,00	11.253.850,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.600.000,00	4.805.200,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.036.000,00	6.948.650,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.551.976.199,39	7.184.432.295,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.862.000,00	322.805.637,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.464.000,00	27.433.195,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.100.000,00	35.085.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.298.000,00	260.288.442,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.031.130,00	116.612.928,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.601.130,00	25.352.928,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.430.000,00	91.260.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.840.000,00	2.210.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.840.000,00	2.210.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.200.000.000,00	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.200.000.000,00	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	3.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.827.689.007,90	20.247.706.757,00	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.827.689.007,90	20.247.706.757,00	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.693.484.869,11	4.112.395.305,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.245.500,00	15.732.061,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.157.500,00	8.874.061,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.316.000,00	4.440.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.772.000,00	2.418.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.235.366.797,28	3.825.704.644,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	65.951.500,00	15.559.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	65.951.500,00	15.559.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.001.071,83	101.863.200,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.136.000,00	11.743.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.443.072,73	2.820.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.450.000,00	22.920.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.971.999,10	64.380.200,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.250.000,00	153.536.400,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	40.106.400,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.250.000,00	113.430.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.530.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.130.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	442.823.342,00	407.654.991,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	442.823.342,00	407.654.991,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	442.823.342,00	407.654.991,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	132.449.500,00	20.140.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	92.999.500,00	20.140.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	88.696.000,00	20.140.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	4.303.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	39.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	39.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	385.951.505,00	346.126.990,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	385.951.505,00	346.126.990,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	385.951.505,00	346.126.990,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.518.000,00	12.624.854,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.518.000,00	12.624.854,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.518.000,00	12.624.854,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	79.960.000,00	9.042.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.960.000,00	9.042.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	79.960.000,00	9.042.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	2.205.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.000.000,00	2.205.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00	2.205.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.022.501.791,79	15.337.517.617,00	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	16.022.501.791,79	15.337.517.617,00	4.829.437.620,00	4.813.840.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0	4.828.755.620,00	4.813.840.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	51.983.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	489.642.000,00	415.261.900,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	15.142.297.727,79	14.670.766.497,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	338.578.564,00	251.489.220,00	681.000,00	0	0	0	0	0
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.240.964.579,00	5.919.197.667,00	161.314.000,00	158.707.800,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.240.964.579,00	5.919.197.667,00	161.314.000,00	158.707.800,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.808.729.943,00	5.545.001.167,00	121.794.000,00	121.689.300,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.974.500,00	17.036.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.781.000,00	4.437.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.193.500,00	12.599.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.090.558.213,00	4.863.671.596,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.927.230,00	486.860.571,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.016.000,00	1.920.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.085.230,00	317.061.470,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.151.000,00	102.462.901,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.675.000,00	65.416.200,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.340.000,00	2.880.000,00	121.794.000,00	121.689.300,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.340.000,00	2.880.000,00	121.794.000,00	121.689.300,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.600.000,00	115.570.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.000,00	18.540.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.000.000,00	97.030.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.330.000,00	58.983.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.570.000,00	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.760.000,00	55.483.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,00	354.972.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	404.184.636,00	354.972.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	404.184.636,00	354.972.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	19.850.000,00	11.889.000,00	39.520.000,00	37.018.500,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	19.850.000,00	11.889.000,00	39.520.000,00	37.018.500,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	19.850.000,00	11.889.000,00	39.520.000,00	37.018.500,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,00	7.335.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000,00	7.335.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000,00	7.335.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.820.140.013,96	5.216.029.273,00	71.034.000,00	60.750.000,00	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.820.140.013,96	5.216.029.273,00	71.034.000,00	60.750.000,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.155.631.249,96	3.948.725.328,00	71.034.000,00	60.750.000,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.154.500,00	14.106.206,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.892.000,00	5.843.706,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.969.000,00	1.969.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.293.500,00	6.293.500,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.554.250.241,96	3.392.115.710,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.155.928,00	294.518.514,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	973.000,00	973.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.154.000,00	26.796.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.499.500,00	7.130.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.951.500,00	7.951.500,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137.400.000,00	106.676.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.177.928,00	144.992.014,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	71.034.000,00	60.750.000,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	71.034.000,00	60.750.000,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.000.000,00	57.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.467.580,00	100.348.448,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.217.580,00	73.158.448,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.250.000,00	27.190.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.603.000,00	90.636.450,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.223.000,00	83.676.450,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.380.000,00	6.960.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.387.378.764,00	1.187.989.784,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.387.378.764,00	1.187.989.784,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	910.084.044,00	799.848.702,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	170.000.200,00	154.143.838,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	204.490.600,00	154.482.025,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	49.108.000,00	40.092.299,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	53.695.920,00	39.422.920,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	277.130.000,00	79.314.161,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.130.000,00	79.314.161,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12.520.000,00	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	45.344.000,00	17.100.491,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	219.266.000,00	57.813.670,00	0	0	0	0	0	0
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	454.200.000,00	121.444.267,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	454.200.000,00	121.444.267,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	56.744.267,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	58.200.000,00	46.700.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.756.130.000,00	1.513.856.572,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.475.000,00	507.837.184,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	59.675.000,00	45.433.707,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	103.800.000,00	61.967.075,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000,00	227.664.484,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	80.000.000,00	53.696.250,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	20.000.000,00	19.980.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000,00	99.095.668,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	433.800.000,00	396.660.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	433.800.000,00	396.660.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	574.505.000,00	481.098.791,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16.200.000,00	14.253.756,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	544.805.000,00	453.393.084,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.451.951,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	144.350.000,00	128.260.597,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	144.350.000,00	128.260.597,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.172.167.500,00	1.150.975.503,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	162.367.500,00	160.975.503,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	129.800.003,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32.367.500,00	31.175.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.009.800.000,00	990.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	459.000.000,00	450.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	550.800.000,00	540.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.725.802.770,34	18.539.058.698,00	370.656.450,00	34.598.700,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	21.725.802.770,34	18.539.058.698,00	370.656.450,00	34.598.700,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.052.347.770,82	9.027.252.664,00	370.656.450,00	34.598.700,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.304.300,00	22.015.798,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.391.300,00	20.026.798,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.913.000,00	1.989.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.612.037.070,82	7.142.020.266,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.607.237.070,82	7.142.020.266,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.826.600,00	121.972.972,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.987.000,00	1.150.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.093.100,00	5.113.600,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	939.000,00	935.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.995.000,00	3.034.220,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.692.500,00	1.738.999,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.555.000,00	39.867.653,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.565.000,00	70.133.500,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	824.674.700,00	800.000.000,00	370.656.450,00	34.598.700,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.744.700,00	0	302.398.860,00	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.930.000,00	800.000.000,00	68.257.590,00	34.598.700,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.028.800,00	616.696.998,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.678.800,00	50.112.040,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.350.000,00	566.584.958,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.476.300,00	324.546.630,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.759.000,00	13.150.430,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	609.617.300,00	311.396.200,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.705.588.000,00	9.385.453.134,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.107.706.000,00	9.356.429.723,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	597.882.000,00	29.023.411,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	597.882.000,00	29.023.411,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	967.866.999,52	126.352.900,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.717.000,00	96.455.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.717.000,00	96.455.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	829.149.999,52	29.897.900,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	629.149.999,52	29.897.900,00	0	0	0	0	0	0
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.390.748.385,00	6.586.370.259,00	120.000.000,00	119.957.700,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.390.748.385,00	6.586.370.259,00	120.000.000,00	119.957.700,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.299.587.485,00	4.057.978.826,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.499.500,00	6.101.500,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.081.000,00	3.056.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.695.000,00	2.262.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	783.500,00	783.500,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.968.225.957,00	3.804.207.463,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.685.500,00	33.009.181,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.077.000,00	406.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.797.000,00	5.992.800,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.045.000,00	1.201.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.554.500,00	4.218.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.212.000,00	21.191.381,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.176.528,00	124.660.682,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.136.528,00	40.155.682,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.000.000,00	82.465.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.360.726.700,00	2.035.071.533,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.360.726.700,00	2.035.071.533,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	1.249.689.000,00	1.194.594.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	24.419.200,00	14.517.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	18.695.500,00	9.930.533,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	298.145.000,00	283.280.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	769.778.000,00	532.750.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	730.434.200,00	493.319.900,00	120.000.000,00	119.957.700,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	730.434.200,00	493.319.900,00	120.000.000,00	119.957.700,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.000.000,00	2.811.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	180.784.000,00	0	120.000.000,00	119.957.700,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	546.650.200,00	490.508.900,00	0	0	0	0	0	0
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.396.555.416,04	4.668.459.867,00	189.493.000,00	38.761.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	5.396.555.416,04	4.668.459.867,00	189.493.000,00	38.761.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.794.375.816,04	4.512.488.867,00	189.493.000,00	38.761.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.481.182,00	18.277.105,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.244.000,00	3.870.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.863.182,00	11.807.105,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.374.000,00	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.228.146.234,02	4.103.677.785,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.444.000,00	49.645.392,00	189.493.000,00	38.761.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.502.000,00	5.443.500,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.896.000,00	56.530.000,00	38.761.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.004.000,00	6.250.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.438.000,00	27.555.892,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	132.963.000,00	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.314.400,02	331.978.585,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.664.400,02	172.078.585,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.650.000,00	159.900.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.990.000,00	8.910.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	8.910.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	212.393.600,00	122.338.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	212.393.600,00	122.338.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	212.393.600,00	122.338.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	389.786.000,00	33.633.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	389.786.000,00	33.633.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	46.501.000,00	18.883.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	328.262.000,00	5.116.400,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.29.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15.023.000,00	9.633.600,00	0	0	0	0	0	0
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.325.361.558,10	5.973.903.696,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.095.500,00	16.004.211,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.999.000,00	8.997.211,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.000,00	4.880.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.659.500,00	2.127.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.964.859.258,10	5.650.827.025,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.834.800,00	130.672.411,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.983.300,00	7.983.300,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.984.000,00	29.984.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.584.000,00	1.584.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.954.500,00	14.849.100,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.529.000,00	71.472.011,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.960.000,00	149.279.803,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	11.608.553,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.960.000,00	137.671.250,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.612.000,00	27.120.246,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.112.000,00	22.620.246,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	156.112.000,00	154.361.958,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	156.112.000,00	154.361.958,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	144.856.000,00	143.131.958,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	11.256.000,00	11.230.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.130.000,00	65.755.400,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.130.000,00	65.755.400,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15.436.000,00	13.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	32.660.000,00	25.911.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	27.034.000,00	26.044.400,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.117.000,00	89.676.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.117.000,00	89.676.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99.117.000,00	89.676.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.291.707.188,94	8.198.711.288,00	357.876.000,00	73.415.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.291.707.188,94	8.198.711.288,00	357.876.000,00	73.415.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.213.455.662,94	4.905.744.334,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.738.500,00	4.610.500,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.468.000,00	2.340.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.270.500,00	2.270.500,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.481.387.100,94	4.310.967.581,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.348.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.348.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.255.300,00	187.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.962.000,00	1.044.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.183.000,00	28.593.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.952.300,00	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.000.000,00	142.984.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.158.000,00	8.679.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.251.262,00	394.759.453,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.501.262,00	145.269.453,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.750.000,00	213.490.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.475.500,00	7.606.800,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.342.800,00	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.132.700,00	4.106.800,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	372.178.500,00	345.712.500,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	372.178.500,00	345.712.500,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	111.678.500,00	105.077.500,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	260.500.000,00	240.635.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.566.153.026,00	2.817.052.454,00	357.876.000,00	73.415.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	321.620.207,00	231.668.000,00	344.745.000,00	69.915.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	321.620.207,00	231.668.000,00	344.745.000,00	69.915.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.412.731.164,00	966.083.630,00	6.302.000,00	3.500.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.073.335.164,00	754.965.630,00	6.302.000,00	3.500.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	339.396.000,00	211.118.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	843.334.000,00	726.948.500,00	3.324.000,00	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	250.000.000,00	238.650.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	593.334.000,00	488.298.500,00	3.324.000,00	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	738.467.655,00	642.352.324,00	3.505.000,00	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	144.700.000,00	115.974.524,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	593.767.655,00	526.377.700,00	3.505.000,00	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	139.920.000,00	130.202.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	139.920.000,00	130.202.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	39.920.000,00	30.202.000,00	0	0	0	0	0	0
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	36.454.825,00	6.868.400,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.454.825,00	6.868.400,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	36.454.825,00	6.868.400,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	36.454.825,00	6.868.400,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	36.454.825,00	6.868.400,00	0	0	0	0	0	0
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	12.451.000,00	12.137.000,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.451.000,00	12.137.000,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12.451.000,00	12.137.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	399.025.000,00	281.204.412,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.025.000,00	94.945.474,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	149.025.000,00	94.945.474,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	186.258.938,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	250.000.000,00	186.258.938,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	24.612.900,00	24.612.900,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.612.900,00	24.612.900,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	24.612.900,00	24.612.900,00	0	0	0	0	0	0
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.069.579.497,08	4.546.785.334,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.069.579.497,08	4.546.785.334,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.789.726.516,08	4.462.354.868,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.995.600,00	5.869.785,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.663.600,00	4.252.785,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.332.000,00	1.617.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.376.371.659,08	4.159.177.960,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.225.300,00	89.265.311,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.140.800,00	9.404.490,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.524.500,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	7.260.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.974.000,00	71.600.821,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.668.957,00	178.585.562,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.918.957,00	54.050.562,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.750.000,00	124.535.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.465.000,00	29.456.250,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.986.000,00	12.124.350,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.609.000,00	10.966.900,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.870.000,00	6.365.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	279.852.981,00	84.430.465,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.850.981,00	56.462.850,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	29.919.000,00	12.244.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.408.000,00	37.025.460,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	44.523.981,00	7.193.390,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.002.000,00	27.967.616,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	46.664.000,00	2.048.616,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	58.338.000,00	25.919.000,00	0	0	0	0	0	0
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	53.548.000,00	15.582.000,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	53.548.000,00	15.582.000,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	32.551.000,00	10.439.500,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20.997.000,00	5.142.500,00	0	0	0	0	0	0
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.363.907.513,52	19.262.434.220,00	614.792.000,00	576.440.750,00	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.502.207.323,54	6.193.512.456,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.472.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.472.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.009.309.123,54	5.772.873.585,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.541.000,00	127.368.073,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.421.000,00	28.014.990,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.615.000,00	4.627.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.750.000,00	21.540.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.755.000,00	73.186.083,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.657.200,00	139.850.798,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.907.200,00	22.775.798,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.750.000,00	117.075.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.200.000,00	145.948.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.200.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.000.000,00	117.948.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.297.013.000,00	4.137.937.594,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	615.896.874,00	611.278.325,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	615.896.874,00	611.278.325,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	615.896.874,00	611.278.325,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127.700.000,00	25.141.450,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	127.700.000,00	25.141.450,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.700.000,00	25.141.450,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.249.069.390,98	5.053.641.250,00	449.241.000,00	444.108.750,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	5.249.069.390,98	5.053.641.250,00	449.241.000,00	444.108.750,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.077.649.890,98	3.924.576.797,00	389.741.000,00	384.608.750,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	939.000,00	905.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	739.000,00	705.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.842.880.238,98	3.725.197.134,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.832.880.238,98	3.715.329.134,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.868.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.045.000,00	8.100.600,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.045.000,00	8.100.600,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.043.652,00	5.043.652,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.043.652,00	5.043.652,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.446.000,00	58.781.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.972.000,00	1.969.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.399.000,00	14.187.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.391.000,00	4.328.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.410.000,00	3.385.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000,00	9.540.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.374.000,00	25.372.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.264.000,00	5.931.000,00	389.741.000,00	384.608.750,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.524.000,00	2.399.000,00	197.476.000,00	195.508.750,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.740.000,00	3.532.000,00	192.265.000,00	189.100.000,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.290.000,00	95.007.451,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.540.000,00	14.302.451,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.750.000,00	80.705.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.742.000,00	25.610.460,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.592.000,00	16.190.460,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000,00	9.420.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	33.139.500,00	30.119.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	33.139.500,00	30.119.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	33.139.500,00	30.119.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.138.280.000,00	1.098.945.453,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.138.280.000,00	1.098.945.453,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	761.000.000,00	741.263.453,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	261.720.000,00	249.682.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	114.000.000,00	108.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.514.431.325,00	2.361.396.431,00	34.144.000,00	34.133.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.514.431.325,00	2.361.396.431,00	34.144.000,00	34.133.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.292.956.925,00	2.233.415.831,00	34.144.000,00	34.133.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.822.459.425,00	1.869.060.631,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.822.459.425,00	1.869.060.631,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	470.497.500,00	354.355.200,00	34.144.000,00	34.133.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	12.000.000,00	9.819.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	458.497.500,00	354.536.200,00	34.144.000,00	34.133.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	221.474.400,00	127.980.600,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	221.474.400,00	127.980.600,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	12.546.000,00	10.940.600,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	66.542.400,00	0	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	142.386.000,00	117.040.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	909.851.600,00	748.477.869,00	131.407.000,00	98.199.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	909.851.600,00	748.477.869,00	131.407.000,00	98.199.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	69.269.000,00	60.626.000,00	44.800.000,00	44.360.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	69.269.000,00	60.626.000,00	44.800.000,00	44.360.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	69.269.000,00	60.626.000,00	44.800.000,00	44.360.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	261.552.300,00	222.000.300,00	33.359.000,00	8.319.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	33.067.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	33.067.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	228.485.300,00	212.000.300,00	33.359.000,00	8.319.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12.827.000,00	12.712.000,00	33.359.000,00	8.319.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	215.658.300,00	199.288.300,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	252.995.700,00	152.461.869,00	53.248.000,00	45.520.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	252.995.700,00	152.461.869,00	53.248.000,00	45.520.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	145.568.200,00	76.612.637,00	49.096.000,00	45.520.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	107.427.500,00	75.849.232,00	4.152.000,00	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	326.034.600,00	313.389.700,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	326.034.600,00	313.389.700,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	209.963.000,00	197.364.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.29.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	116.071.600,00	116.025.700,00	0	0	0	0	0	0
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	147.738.000,00	131.048.845,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	147.738.000,00	131.048.845,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	67.554.000,00	51.085.845,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.846.000,00	30.646.000,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.07.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	49.338.000,00	49.317.000,00	0	0	0	0	0	0
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.767.407.900,87	89.339.762.901,00	5.209.348.100,00	4.864.274.795,00	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	67.752.790.172,05	57.817.328.028,00	1.254.328.600,00	1.110.991.440,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	67.752.790.172,05	57.817.328.028,00	1.254.328.600,00	1.110.991.440,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.428.983.437,00	37.615.241.439,00	893.529.440,00	800.228.440,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.157.000,00	123.873.506,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.881.500,00	53.514.750,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	9.402.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.921.000,00	47.348.706,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.354.500,00	13.607.750,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.641.199.699,00	23.142.170.614,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.972.282.199,00	21.479.432.637,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.650.584.500,00	1.645.758.977,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.333.000,00	16.979.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	206.863.000,00	202.663.014,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	86.893.000,00	86.349.700,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	64.793.000,00	63.836.212,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.547.500,00	22.441.652,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.629.500,00	30.035.450,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.297.640,00	712.487.183,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.300.000,00	16.416.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.737.800,00	130.297.740,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.259.840,00	565.773.443,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.449.770,00	2.449.770,00	730.725.440,00	702.511.440,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.449.770,00	2.449.770,00	730.725.440,00	702.511.440,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.280.694.518,00	5.776.481.849,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.403.850,00	57.434.120,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.661.123.218,00	3.436.175.743,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.281.017.450,00	1.098.966.986,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.280.150.000,00	1.183.905.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.775.029.000,00	3.238.790.280,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.130.000,00	55.772.150,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.441.000,00	112.817.820,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.957.618.000,00	2.912.614.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.840.000,00	157.586.310,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.309.006.310,00	1.739.399.012,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.401.689.000,00	1.207.659.756,00	72.504.000,00	23.650.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	845.139.000,00	733.617.908,00	72.504.000,00	23.650.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	556.550.000,00	474.041.848,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	388.532.000,00	200.791.865,00	7.788.000,00	5.217.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	89.074.000,00	42.263.899,00	7.788.000,00	5.217.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	155.403.000,00	72.177.936,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	94.178.000,00	52.974.559,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.400.000,00	30.072.471,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8.477.000,00	3.303.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.508.065.500,00	1.268.474.590,00	82.512.000,00	68.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	508.350.000,00	372.548.530,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	982.415.500,00	879.642.900,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	17.300.000,00	16.283.160,00	82.512.000,00	68.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.446.503.286,00	16.631.181.070,00	48.972.000,00	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	6.940.795.800,00	2.094.646.202,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.706.619.000,00	1.701.799.602,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.826.098.000,00	18.759.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	408.078.800,00	374.086.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.507.459.800,00	13.895.075.813,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.748.020.000,00	8.621.553.662,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.365.033.100,00	3.006.885.942,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.394.406.700,00	2.266.636.209,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	965.487.686,00	608.699.055,00	48.972.000,00	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	271.524.412,00	228.093.938,00	9.413.000,00	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	468.693.000,00	209.087.100,00	9.413.000,00	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	225.270.274,00	171.518.017,00	30.146.000,00	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	32.760.000,00	32.760.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	32.760.000,00	32.760.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.877.303.449,05	3.570.905.519,00	311.827.160,00	310.763.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.582.919.600,00	2.461.585.060,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	667.876.200,00	602.081.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	368.528.000,00	343.747.060,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.546.515.400,00	1.515.757.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	202.791.000,00	167.972.879,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	65.000.000,00	64.009.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	85.000.000,00	53.903.779,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.791.000,00	50.059.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	907.727.549,05	848.088.880,00	311.827.160,00	310.763.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	433.320.738,00	411.382.159,00	237.124.160,00	236.060.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	132.317.380,05	121.637.985,00	74.703.000,00	74.703.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	342.089.431,00	315.068.736,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	183.865.300,00	93.258.700,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	120.000.000,00	40.452.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	38.001.900,00	27.413.100,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.5.06.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.863.400,00	25.393.300,00	0	0	0	0	0	0
4.02			SEKRETARIAT DPRD	35.014.617.728,82	31.522.434.873,00	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	35.014.617.728,82	31.522.434.873,00	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.904.960.574,82	21.626.791.163,00	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.555.800,00	53.622.850,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.345.000,00	23.145.250,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.306.000,00	9.806.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.496.000,00	10.311.200,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.408.800,00	10.360.400,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.098.714.814,82	4.803.602.934,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.072.786.814,82	4.782.806.784,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.316.000,00	9.316.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.612.000,00	11.480.150,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.287.000,00	5.456.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.287.000,00	5.456.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	541.425.000,00	407.194.550,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	225.375.000,00	150.082.950,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316.050.000,00	257.111.600,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.063.900,00	730.688.864,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.954.000,00	20.136.586,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.001.000,00	121.835.154,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.222.400,00	20.787.400,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.633.000,00	98.463.504,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.863.500,00	168.925.350,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.632.000,00	294.574.070,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.108.000,00	5.966.800,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.901.700,00	7.409.500,00	3.955.019.500,00	3.753.283.355,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.360.000,00	0	2.092.600.000,00	1.981.075.056,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.588.000,00	2.685.500,00	1.062.712.500,00	1.037.295.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.881.000,00	3.364.000,00	279.650.000,00	268.510.299,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.072.700,00	1.360.000,00	520.057.000,00	466.403.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.441.000,00	596.526.584,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.960.000,00	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.331.000,00	295.846.989,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.900.000,00	21.394.595,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.250.000,00	273.885.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.118.200,00	401.787.483,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.805.500,00	164.177.645,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.622.500,00	152.635.608,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.958.000,00	72.683.149,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.732.200,00	12.291.081,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.202.337.160,00	14.119.943.025,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.692.715.360,00	13.702.126.225,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	353.172.800,00	328.923.550,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	156.449.000,00	88.893.250,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	765.116.000,00	500.559.373,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	64.724.200,00	42.804.412,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	351.998.800,00	261.042.930,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	348.393.000,00	196.712.031,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.109.657.154,00	9.895.643.710,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	983.288.680,00	794.230.013,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	41.009.000,00	17.724.096,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	740.404.280,00	684.780.617,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	201.875.400,00	91.725.300,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.345.122.200,00	1.212.917.724,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	205.655.800,00	202.051.001,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.991.700,00	11.541.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	595.405.200,00	555.786.723,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	94.521.500,00	75.931.500,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	142.908.000,00	119.325.200,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	284.640.000,00	248.282.300,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.210.967.500,00	2.071.198.903,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	313.463.500,00	283.661.900,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	344.061.000,00	336.942.950,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	228.420.000,00	198.018.731,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	265.782.500,00	245.663.886,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	312.893.500,00	304.715.019,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	196.027.500,00	188.455.058,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	341.624.500,00	317.518.469,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	208.695.000,00	196.222.890,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.574.686.274,00	2.961.674.424,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	519.691.400,00	466.954.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	769.040.874,00	683.496.534,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	190.925.000,00	108.500.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	431.248.000,00	408.664.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	225.208.000,00	125.210.505,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	21.237.000,00	6.728.400,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.417.396.000,00	1.162.120.985,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.319.136.200,00	1.262.774.754,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	30.000.000,00	15.142.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100.624.800,00	93.773.810,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.188.511.400,00	1.153.858.944,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	144.378.500,00	143.634.640,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	144.378.500,00	143.634.640,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.532.077.800,00	1.449.213.252,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	363.179.300,00	355.175.592,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	16.174.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	207.364.000,00	153.543.975,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	945.360.500,00	940.493.685,00	0	0	0	0	0	0
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	60.536.396.111,10	55.786.871.752,00	915.973.000,00	806.781.230,00	2.989.018.533,34	1.572.745.671,00	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.01			PERENCANAAN	9.164.647.487,86	8.606.446.544,00	41.484.000,00	41.452.500,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	9.164.647.487,86	8.606.446.544,00	41.484.000,00	41.452.500,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.140.911.287,86	7.754.604.370,00	41.484.000,00	41.452.500,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.327.035.787,86	7.032.729.460,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.633.435.787,86	6.377.234.460,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	693.600.000,00	655.495.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.416.500,00	405.537.210,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.000,00	9.771.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.621.500,00	103.397.210,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.660.000,00	16.510.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	21.690.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.187.000,00	246.169.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.960.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	41.484.000,00	41.452.500,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	41.484.000,00	41.452.500,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.016.000,00	222.762.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.016.000,00	158.912.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.000.000,00	63.850.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.043.000,00	68.575.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.720.000,00	40.045.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.840.000,00	27.780.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.483.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	811.425.600,00	727.680.774,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	424.264.300,00	367.102.100,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	6.625.700,00	6.625.700,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.450.000,00	9.450.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	32.064.000,00	31.931.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	16.138.700,00	15.987.700,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	359.985.900,00	303.107.700,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	364.414.700,00	338.982.274,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	19.614.700,00	7.588.700,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	344.800.000,00	331.393.574,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	22.746.600,00	21.596.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	22.746.600,00	21.596.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	212.310.600,00	124.161.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78.629.600,00	52.847.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.410.200,00	25.395.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.219.400,00	27.451.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21.166.000,00	8.624.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.166.000,00	8.624.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	112.515.000,00	62.689.500,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.588.000,00	46.300.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	52.927.000,00	16.388.600,00	0	0	0	0	0	0
5.02			KEUANGAN	44.368.288.120,54	40.996.899.061,00	749.755.000,00	641.678.730,00	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.074.751.546,88	26.834.288.083,00	667.355.000,00	563.880.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.933.180.346,88	26.273.335.000,00	432.855.000,00	365.880.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.195.500,00	36.490.094,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.868.500,00	16.449.450,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.327.000,00	15.961.444,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.079.200,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.865.025.816,00	24.583.864.042,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.631.800,00	409.160.939,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.194.000,00	14.913.500,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.173.000,00	144.017.500,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.415.000,00	3.413.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	122.022.800,00	106.303.750,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.900.000,00	21.230.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.927.000,00	119.283.189,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.160.000,00	71.890.000,00	432.855.000,00	365.880.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00	7.480.000,00	432.855.000,00	365.880.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000,00	64.410.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.432.745,00	1.052.012.266,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.275.000,00	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.140.745,00	409.654.266,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.017.000,00	640.558.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.734.485,88	119.917.659,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.202.000,00	33.182.913,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.269.985,88	8.218.246,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.268.500,00	78.516.500,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.141.571.200,00	560.953.083,00	234.500.000,00	198.000.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.571.200,00	560.953.083,00	234.500.000,00	198.000.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	358.604.600,00	301.553.383,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49.991.000,00	49.280.000,00	234.500.000,00	198.000.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	309.037.000,00	125.665.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	112.167.800,00	59.514.700,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	261.918.800,00	15.271.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	49.852.000,00	9.669.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	15.293.536.573,66	14.162.610.978,00	82.400.000,00	77.798.730,00	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.516.728.443,66	11.589.521.899,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.620.000,00	68.008.335,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.929.000,00	30.928.815,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.720.000,00	15.720.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.971.000,00	21.359.520,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.329.766.083,66	10.519.096.721,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.406.978.083,66	7.056.951.721,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.922.788.000,00	3.462.145.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.317.500,00	375.093.050,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.012.000,00	42.745.798,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.241.500,00	30.241.500,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.500.000,00	28.276.899,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.456.000,00	72.456.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.108.000,00	201.372.853,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.802.140,00	585.539.957,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.815.000,00	123.110.859,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.000.000,00	152.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.987.140,00	310.429.098,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.222.720,00	41.783.836,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.222.720,00	41.783.836,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.738.983.830,00	1.598.154.442,00	44.400.000,00	39.900.000,00	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	711.504.700,00	656.622.187,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	125.559.000,00	110.292.057,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.202.000,00	78.201.750,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	185.947.200,00	165.801.674,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	121.262.500,00	103.233.949,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	199.534.000,00	199.092.757,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	366.474.300,00	358.204.860,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	43.443.700,00	41.613.800,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	22.714.000,00	22.019.028,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.365.000,00	60.072.760,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	239.951.600,00	234.499.272,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	407.323.000,00	404.039.233,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.280.000,00	52.210.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	91.720.000,00	90.725.690,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.538.000,00	69.440.414,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	192.785.000,00	191.663.129,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	130.055.690,00	101.655.022,00	0	0	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	99.990.690,00	72.125.034,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30.065.000,00	29.529.988,00	0	0	0	0	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0	0	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	123.626.140,00	77.633.140,00	44.400.000,00	39.900.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	70.200.000,00	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53.426.140,00	44.633.140,00	44.400.000,00	39.900.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.037.824.300,00	974.934.637,00	38.000.000,00	37.898.730,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.037.824.300,00	974.934.637,00	38.000.000,00	37.898.730,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	179.022.000,00	179.008.915,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	236.242.000,00	218.912.900,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.900.000,00	48.900.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	240.893.000,00	212.668.900,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	332.767.300,00	315.443.922,00	38.000.000,00	37.898.730,00	0	0	0	0
5.03			KEPEGAWAIAN	6.845.708.602,70	6.103.198.747,00	124.734.000,00	123.650.000,00	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.845.708.602,70	6.103.198.747,00	124.734.000,00	123.650.000,00	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.299.488.102,70	4.998.023.407,00	124.734.000,00	123.650.000,00	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.643.925,00	16.057.185,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.740.261,00	7.643.550,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.903.664,00	8.423.635,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.794.212.203,00	4.656.247.001,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.129.974,70	197.167.791,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.730.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.431.000,00	12.862.450,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.054.500,00	8.131.353,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.428.474,70	540.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.600.000,00	47.220.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.886.000,00	128.413.988,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	0	124.734.000,00	123.650.000,00	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	0	124.734.000,00	123.650.000,00	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.400.000,00	48.800.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.400.000,00	21.330.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	27.470.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.422.000,00	79.741.430,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.800.000,00	38.571.430,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000,00	3.795.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.642.000,00	37.375.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.546.220.500,00	1.105.175.340,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	373.433.100,00	270.996.641,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	123.526.000,00	105.298.167,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	37.287.000,00	32.963.685,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	71.930.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	140.690.100,00	132.734.789,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	903.606.000,00	619.014.023,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	903.606.000,00	619.014.023,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	123.790.400,00	123.489.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	123.790.400,00	123.489.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	145.391.000,00	91.675.676,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.513.500,00	15.637.583,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	37.754.500,00	35.668.071,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	35.238.000,00	19.217.300,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	41.509.000,00	14.623.972,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	9.376.000,00	6.528.750,00	0	0	0	0	0	0
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.696.000,00	19.853.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	34.696.000,00	19.853.000,00	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	34.696.000,00	19.853.000,00	0	0	0	0	0	0
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	62.575.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	62.575.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	62.575.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	62.575.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	62.575.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	60.480.000,00	60.474.400,00	0	0	0	0	0	0
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	60.480.000,00	60.474.400,00	0	0	0	0	0	0
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	60.480.000,00	60.474.400,00	0	0	0	0	0	0
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	60.480.000,00	60.474.400,00	0	0	0	0	0	0
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	22.950.000,00	22.944.400,00	0	0	0	0	0	0
5.06	4.01.5.06.0.00.01.0000	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	37.530.000,00	37.530.000,00	0	0	0	0	0	0
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.119.677.880,31	11.667.256.868,00	532.804.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.119.677.880,31	11.667.256.868,00	532.804.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	13.119.677.880,31	11.667.256.868,00	532.804.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.613.253.640,31	8.810.037.565,00	532.804.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.156.000,00	32.986.600,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000,00	22.278.600,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.156.000,00	10.708.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.219.145.140,31	7.960.296.537,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	351.298.500,00	338.183.668,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	351.298.500,00	338.183.668,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.616.000,00	385.810.585,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.670.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	74.827.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.476.000,00	33.315.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.940.000,00	259.398.585,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.288.000,00	45.000.000,00	532.804.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	300.000,00	0	109.700.000,00	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.896.000,00	0	423.104.000,00	132.400.000,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.092.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.180.000,00	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.570.000,00	35.260.175,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.570.000,00	33.230.175,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	2.030.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.216.466.240,00	1.830.236.440,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.716.466.240,00	1.378.924.440,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	300.000.000,00	256.262.500,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	242.583.582,00	240.087.582,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	80.000.000,00	40.665.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	48.146.000,00	41.171.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	171.489.000,00	110.816.300,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	585.792.000,00	405.491.900,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	288.455.658,00	284.430.158,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	500.000.000,00	451.312.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	450.000.000,00	448.012.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.289.958.000,00	1.026.982.863,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.289.958.000,00	1.026.982.863,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	568.414.718,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	300.000.000,00	227.018.845,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	200.982.000,00	145.966.100,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	188.976.000,00	85.583.200,00	0	0	0	0	0	0
7			UNSUR KEWILAYAHAN	71.057.827.054,35	62.882.340.792,00	399.694.150,00	212.222.300,00	0	0	0	0
7.01			KECAMATAN	71.057.827.054,35	62.882.340.792,00	399.694.150,00	212.222.300,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN KARIMUN	7.927.711.155,42	7.343.084.204,00	173.521.000,00	148.227.300,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.626.658.155,42	6.075.428.304,00	173.521.000,00	148.227.300,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.822.465.421,42	5.404.210.759,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.107.500,00	4.995.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.107.500,00	4.995.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.413.200,00	150.353.943,00	32.454.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.092.000,00	4.092.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	32.454.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.941.000,00	9.422.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.302.200,00	84.259.943,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.562.000,00	18.020.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.516.000,00	34.560.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.612.000,00	64.241.280,00	141.067.000,00	139.227.300,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.612.000,00	34.241.280,00	141.067.000,00	139.227.300,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.509.034,00	433.587.322,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.509.034,00	67.187.322,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	412.000.000,00	366.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.551.000,00	18.040.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.051.000,00	18.040.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.301.053.000,00	1.267.655.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN TANJUNG BALAI	233.893.000,00	231.753.275,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.893.000,00	231.753.275,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.893.000,00	231.753.275,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.613.000,00	120.162.975,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	113.280.000,00	111.590.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002		KELURAHAN TELUK AIR	233.481.000,00	226.225.057,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.481.000,00	226.225.057,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.481.000,00	226.225.057,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.580.000,00	123.073.997,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.901.000,00	103.151.060,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003		KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR	266.893.800,00	228.946.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	266.893.800,00	228.946.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	266.893.800,00	228.946.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.792.000,00	107.586.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.101.800,00	121.360.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004		KELURAHAN LUBUK SEMUT	236.307.360,00	231.813.906,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	236.307.360,00	231.813.906,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	236.307.360,00	231.813.906,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	121.752.360,00	118.683.151,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.555.000,00	113.130.755,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005		KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA	251.353.500,00	239.306.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.353.500,00	239.306.559,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	251.353.500,00	239.306.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.360.000,00	120.075.999,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.993.500,00	119.230.560,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006		KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT	244.943.600,00	242.956.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	244.943.600,00	242.956.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	244.943.600,00	242.956.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.284.000,00	119.216.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0006	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.659.600,00	123.740.700,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN MERAL	8.568.306.988,00	7.790.196.055,00	25.040.000,00	22.100.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.201.081.768,00	6.466.933.335,00	25.040.000,00	22.100.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.259.875.508,00	5.873.552.797,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.468.500,00	136.278.280,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.033.000,00	15.006.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.065.500,00	81.904.625,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.329.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	4.324.375,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.370.000,00	714.280,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	25.040.000,00	22.100.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	25.040.000,00	22.100.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.393.760,00	287.854.258,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.643.760,00	81.524.258,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.750.000,00	206.330.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.744.000,00	42.648.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.648.000,00	42.648.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.096.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.367.225.220,00	1.323.262.720,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001		KELURAHAN MERAL KOTA	324.751.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324.751.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324.751.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.997.000,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002		KELURAHAN BARAN BARAT	286.964.354,00	46.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	286.964.354,00	46.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	286.964.354,00	46.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	158.964.354,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	128.000.000,00	46.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003		KELURAHAN SUNGAI RAYA	247.746.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	247.746.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	247.746.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	128.746.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.000.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004		KELURAHAN BARAN TIMUR	232.946.180,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	232.946.180,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	232.946.180,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	119.597.180,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	113.349.000,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005		KELURAHAN SUNGAI PASIR	333.574.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	333.574.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	333.574.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	203.574.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006		KELURAHAN PARIT BENUT	319.030.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	319.030.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	319.030.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	207.030.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0006	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN MERAL BARAT	4.740.531.620,48	4.552.762.062,00	8.914.000,00	8.900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.805.836.920,48	3.627.780.862,00	8.914.000,00	8.900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.489.631.920,48	3.333.336.862,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.380.000,00	16.290.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.380.000,00	16.290.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.671.000,00	84.116.000,00	8.914.000,00	8.900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.065.000,00	5.975.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	8.914.000,00	8.900.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.620.000,00	63.263.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.986.000,00	14.878.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.434.000,00	155.329.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.440.000,00	5.434.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.494.000,00	88.340.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.500.000,00	61.555.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.720.000,00	38.709.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.720.000,00	38.709.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	934.694.700,00	924.981.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	934.694.700,00	924.981.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	934.694.700,00	924.981.200,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001		KELURAHAN PASIR PANJANG	254.215.000,00	54.000.000,00	1.039.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	254.215.000,00	54.000.000,00	1.039.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	254.215.000,00	54.000.000,00	1.039.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.215.500,00	0	1.039.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.999.500,00	54.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002		KELURAHAN DARUSSALAM	232.027.000,00	32.000.000,00	3.088.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	232.027.000,00	32.000.000,00	3.088.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	232.027.000,00	32.000.000,00	3.088.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.027.000,00	0	3.088.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.000.000,00	32.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN TEBING	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.607.149.935,00	5.207.553.564,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.876.203.946,00	4.610.382.785,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.300.000,00	63.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.300.000,00	63.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.361.500,00	189.782.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.515.000,00	6.261.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.903.500,00	102.424.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.126.000,00	65.881.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.817.000,00	15.216.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.751.489,00	330.604.979,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.251.489,00	97.064.979,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.500.000,00	233.540.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.533.000,00	13.483.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.483.000,00	10.483.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	826.548.000,00	821.669.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	826.548.000,00	821.669.800,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	826.548.000,00	821.669.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		KELURAHAN TEBING	229.769.000,00	217.501.477,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229.769.000,00	217.501.477,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	229.769.000,00	217.501.477,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.508.000,00	106.329.997,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.261.000,00	111.171.480,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002		KELURAHAN TELUK UMA	269.853.000,00	263.275.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	269.853.000,00	263.275.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	269.853.000,00	263.275.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.871.000,00	147.419.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.982.000,00	115.856.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003		KELURAHAN KAPLING	238.871.000,00	210.507.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	238.871.000,00	210.507.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	238.871.000,00	210.507.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	128.871.000,00	123.765.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000,00	86.742.750,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004		KELURAHAN PAMAK	260.382.950,00	193.869.265,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	260.382.950,00	193.869.265,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	260.382.950,00	193.869.265,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.858.950,00	91.075.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.524.000,00	102.793.765,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005		KELURAHAN HARJOSARI	256.837.425,00	96.012.372,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	256.837.425,00	96.012.372,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	256.837.425,00	96.012.372,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.194.925,00	21.534.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.642.500,00	74.478.372,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN KUNDUR	6.293.734.516,66	5.853.751.855,00	24.468.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.215.625.716,66	4.799.762.055,00	24.468.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.983.000,00	9.983.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.000,00	9.983.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.324.944.296,66	4.018.599.124,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.986.800,00	191.209.000,00	24.468.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.911.400,00	144.098.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.455.400,00	4.781.000,00	24.468.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.820.000,00	1.820.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	10.800.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.800.000,00	29.710.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.500.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.273.120,00	484.764.931,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.523.120,00	46.894.931,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.750.000,00	437.870.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.538.500,00	77.206.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.916.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.164.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.458.500,00	17.206.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.078.108.800,00	1.053.989.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA	486.676.460,00	444.699.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	486.676.460,00	444.699.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	486.676.460,00	444.699.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	240.258.860,00	240.120.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	246.417.600,00	204.579.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002		KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT	447.245.780,00	423.252.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	447.245.780,00	423.252.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	447.245.780,00	423.252.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	238.862.180,00	238.665.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.383.600,00	184.587.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003		KELURAHAN GADING SARI	442.667.900,00	399.370.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	442.667.900,00	399.370.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	442.667.900,00	399.370.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	240.469.000,00	205.510.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.198.900,00	193.860.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN UNGAR	3.455.129.903,83	3.177.856.084,00	22.741.150,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.785.553,86	2.895.156.884,00	18.495.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.750.000,00	12.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.550.000,00	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.950.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.551.130,41	2.591.359.884,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.482.575,20	135.404.500,00	18.495.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000,00	4.190.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.678.200,00	55.708.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.481.575,20	0	18.495.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.409.000,00	11.165.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.413.800,00	62.840.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.530.848,25	144.410.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.780.848,25	60.780.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.750.000,00	83.630.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.471.000,00	11.782.500,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.453.000,00	9.585.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.018.000,00	2.197.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	331.344.349,97	282.699.200,00	4.246.150,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	331.344.349,97	282.699.200,00	4.246.150,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	331.344.349,97	282.699.200,00	4.246.150,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001		KELURAHAN ALAI	374.605.900,00	123.128.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	374.605.900,00	123.128.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	374.605.900,00	123.128.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	236.164.400,00	63.897.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	138.441.500,00	59.231.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.973.956.755,60	2.786.933.556,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.606.240.485,60	2.519.954.316,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.577.400,00	83.796.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.039.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.923.500,00	34.130.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.489.000,00	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.188.500,00	10.864.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.937.400,00	34.002.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.619.870,00	176.703.240,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.869.870,00	26.813.240,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.750.000,00	149.890.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.519.000,00	6.480.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.159.000,00	3.080.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000,00	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	442.422.000,00	336.954.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	442.422.000,00	336.954.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	442.422.000,00	336.954.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001		KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA	284.978.500,00	267.058.021,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	284.978.500,00	267.058.021,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	284.978.500,00	267.058.021,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	154.986.000,00	153.670.012,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.992.500,00	113.388.009,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN BELAT	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.541.375.989,36	1.283.220.124,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.207.300,00	13.803.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.562.500,00	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.913.000,00	5.273.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.731.800,00	3.329.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.291.892.257,36	1.091.623.492,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.308.800,00	68.381.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.061.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.335.000,00	17.190.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.527.000,00	13.198.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.358.800,00	223.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.927.000,00	37.770.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.067.632,00	108.512.632,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.567.632,00	22.567.632,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.500.000,00	85.945.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.900.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.060.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176.148.000,00	126.916.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	176.148.000,00	126.916.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	176.148.000,00	126.916.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		KECAMATAN KUNDUR BARAT	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.706.999.236,00	3.402.870.094,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.556.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.556.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.245.487.278,00	3.011.598.978,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.224.502.278,00	2.990.613.978,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.985.000,00	20.985.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.264.500,00	83.207.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.065.000,00	32.592.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	11.463.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.334.500,00	10.127.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000,00	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.765.000,00	25.625.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.000.958,00	283.388.116,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.500.958,00	35.558.116,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.500.000,00	247.830.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.690.500,00	18.676.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.690.500,00	18.676.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.701.704.588,00	1.639.392.439,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001		KELURAHAN SAWANG	275.684.500,00	271.291.989,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.684.500,00	271.291.989,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.684.500,00	271.291.989,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.550.000,00	131.825.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.134.500,00	139.466.989,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN MORO	4.435.546.260,00	3.981.601.326,00	56.366.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.842.579.060,00	3.454.597.526,00	56.366.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.437.000,00	30.294.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.009.000,00	7.449.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.146.000,00	15.493.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.282.000,00	7.352.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.274.141.660,00	3.029.938.926,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.232.000,00	71.714.200,00	56.366.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.084.000,00	1.990.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.069.000,00	27.079.000,00	56.366.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.797.000,00	3.018.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.332.000,00	39.627.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.717.400,00	322.650.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.717.400,00	37.455.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.000.000,00	285.195.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.051.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.051.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	592.957.200,00	527.003.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	592.957.200,00	527.003.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	592.957.200,00	527.003.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001		KELURAHAN MORO	243.000.000,00	43.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	243.000.000,00	43.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	243.000.000,00	43.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123.000.000,00	43.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002		KELURAHAN MORO TIMUR	240.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		KECAMATAN BURU	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.462.963.576,00	3.134.415.796,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.474.755,00	2.834.039.796,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.123.500,00	104.798.952,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.000,00	2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.842.200,00	50.813.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.540.000,00	2.912.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.388.300,00	15.746.952,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.359.000,00	32.427.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.871.321,00	189.207.048,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.121.321,00	17.149.548,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.750.000,00	172.057.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.494.000,00	6.970.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.595.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.529.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.370.000,00	6.370.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	870.559.900,00	730.531.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	870.559.900,00	730.531.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	870.559.900,00	730.531.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001		KELURAHAN BURU	263.904.600,00	206.350.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	263.904.600,00	206.350.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	263.904.600,00	206.350.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	126.727.000,00	105.690.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137.177.600,00	100.660.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002		KELURAHAN LUBUK PUDING	306.089.100,00	233.015.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	306.089.100,00	233.015.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	306.089.100,00	233.015.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	188.031.500,00	123.260.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.057.600,00	109.755.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		KECAMATAN DURAI	2.579.302.473,00	2.422.105.398,00	18.411.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.143.576.682,74	2.022.123.728,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.739.483,74	1.782.560.468,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.330.199,00	157.691.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.330.199,00	106.691.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.507.000,00	65.772.260,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.007.000,00	28.192.260,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.500.000,00	37.580.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	16.100.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	16.100.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	435.725.790,26	399.981.670,00	18.411.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	435.725.790,26	399.981.670,00	18.411.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0009	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	435.725.790,26	399.981.670,00	18.411.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		KECAMATAN SELAT GELAM	2.023.652.687,00	1.880.910.207,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.759.445.687,00	1.652.365.207,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.422.500,00	12.282.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.275.000,00	6.260.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.857.000,00	1.857.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.290.500,00	4.165.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.539.446.687,00	1.493.492.607,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.508.317.687,00	1.462.363.607,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.129.000,00	31.129.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.200.000,00	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.663.000,00	69.190.100,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.987.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.551.000,00	38.966.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000,00	624.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.266.000,00	13.879.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.533.000,00	15.720.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	15.500.000,00	15.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.713.500,00	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.463.500,00	13.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.250.000,00	14.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	264.207.000,00	228.545.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	264.207.000,00	228.545.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	264.207.000,00	228.545.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		KECAMATAN SUGIE BESAR	1.405.391.561,00	1.265.285.257,00	50.606.000,00	17.495.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.213.243.561,00	1.097.307.257,00	50.606.000,00	17.495.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.129.100,00	3.020.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.369.100,00	1.356.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.760.000,00	1.664.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.001.397.861,00	898.120.257,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.001.397.861,00	898.120.257,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.025.500,00	53.831.000,00	50.606.000,00	17.495.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.988.500,00	18.076.500,00	40.634.000,00	17.495.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.027.000,00	4.060.500,00	9.972.000,00	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.010.000,00	31.694.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.691.100,00	97.336.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.191.100,00	15.586.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.500.000,00	81.750.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	192.148.000,00	167.978.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	192.148.000,00	167.978.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	192.148.000,00	167.978.000,00	0	0	0	0	0	0
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.240.184.104,88	7.479.767.415,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.184.104,88	7.479.767.415,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.184.104,88	7.479.767.415,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.352.905.740,88	4.080.156.388,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.421.900,00	64.457.200,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.583.000,00	16.944.600,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.434.000,00	15.083.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.085.900,00	13.562.600,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.319.000,00	18.867.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.039.117.340,88	3.812.205.688,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.982.340,88	3.793.078.588,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.135.000,00	19.127.100,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.476.500,00	105.715.932,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.000,00	2.911.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.056.000,00	40.963.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.333.500,00	9.316.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.100.000,00	8.430.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.989.000,00	44.095.932,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.190.000,00	76.561.400,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.440.000,00	16.836.400,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.750.000,00	59.725.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.700.000,00	21.216.168,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.010.000,00	16.326.168,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.690.000,00	4.890.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.224.581.500,00	2.162.408.700,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.224.581.500,00	2.162.408.700,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550.000.000,00	550.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	183.541.700,00	157.354.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	33.600.000,00	32.850.200,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.457.439.800,00	1.422.204.500,00	791.000,00	791.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.136.689.864,00	1.040.539.327,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.136.689.864,00	1.040.539.327,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	919.425.364,00	842.405.327,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111.093.500,00	100.753.900,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	106.171.000,00	97.380.100,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	215.225.000,00	16.547.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	215.225.000,00	16.547.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	187.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.525.000,00	16.547.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	56.566.000,00	51.616.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	56.566.000,00	51.616.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	56.566.000,00	51.616.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	254.216.000,00	128.500.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	254.216.000,00	128.500.000,00	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	226.938.000,00	122.744.500,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.278.000,00	5.755.500,00	0	0	0	0	0	0
			Jumlah	**1.082.283.388.424,77**	**1.001.939.323.828,50**	**119.311.487.550,09**	**105.057.610.836,46**	**2.989.018.533,34**	**1.572.746.671,00**	**98.454.168.734,98**	**94.100.187.078,00**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	44.164.011.572,18	61.037.956.210,68
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	44.164.011.572,18	61.037.956.210,68
Sub Total	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	70.641.623.107,50	44.164.011.572,18
Sub Total	**70.641.623.107,50**	**44.164.011.572,18**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**70.641.623.107,50**	**44.164.011.572,18**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	290.149.395.746,50	294.339.547.110,60	-4.190.151.364,10	-1,42
Pendapatan Retribusi Daerah	94.100.066.476,50	92.043.071.201,10	2.056.995.275,40	2,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.269.494.656,00	3.525.313.743,00	-1.255.819.087,00	-35,62
Lain-lain PAD yang Sah	5.086.518.867,00	5.661.795.545,30	-575.276.678,30	-10,16
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**391.605.475.746,00**	**395.569.727.600,00**	**-3.964.251.854,00**	**-1,00**
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	47.816.211.200,00	28.324.822.410,00	19.491.388.790,00	68,81
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.931.613.000,00	51.296.977.000,00	-17.365.364.000,00	-33,85
Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	470.002.100.490,00	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00	5,39
Dana Alokasi Khusus	145.450.737.337,00	207.991.198.275,00	-62.540.460.938,00	-30,07
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**699.066.172.027,00**	**733.566.307.421,00**	**-34.500.135.394,00**	**-4,70**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Otonomi Daerah Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	-6.406.532.000,00	-28,51
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**16.063.449.000,00**	**22.469.981.000,00**	**-6.406.532.000,00**	**-28,51**
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.967.047.052,00	80.936.428.268,00	-24.969.381.216,00	-30,85
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.177.760.000,00	0,00	1.177.760.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	**57.144.807.052,00**	**80.936.428.268,00**	**-23.791.621.216,00**	**-29,40**
Jumlah Pendapatan Transfer	**772.274.428.079,00**	**836.972.716.689,00**	**-64.698.288.610,00**	**-7,73**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.433.092.046,78	0,00	2.433.092.046,78	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	**19.362.668.870,78**	**0,00**	**19.362.668.870,78**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**1.183.242.572.695,78**	**1.232.542.444.289,00**	**-49.299.871.593,22**	**-4,00**
BEBAN				
Beban Pegawai	611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48
Beban Persediaan	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
Beban Jasa	107.728.795.145,21	360.935.396.081,12	-253.206.600.935,91	-70,15
Beban Pemeliharaan	6.715.931.883,00	20.518.995.031,00	-13.803.063.148,00	-67,27
Beban Perjalanan Dinas	20.217.294.547,00	27.307.352.537,33	-7.090.057.990,33	-25,96
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BOSP	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	37.345.691,00	-37.345.691,00	-100,00
Beban Hibah	47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	-38.454.119.560,13	-44,83
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.529.381.717,56	109.926.669.484,78	-6.397.287.767,22	-5,82
Beban Transfer	55.205.280.700,00	59.539.114.220,00	-4.333.833.520,00	-7,28
Beban Penyisihan Piutang	2.269.249.187,05	2.728.734.346,00	-459.485.158,95	-16,84
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	**1.118.990.405.046,18**	**1.270.339.983.802,52**	**-151.349.578.756,34**	**-11,91**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**64.252.167.649,60**	**-37.797.539.513,52**	**102.049.707.163,12**	**-269,99**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.425.055.550,00	21.520.456.889,00	-19.095.401.339,00	-88,73
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26.120.025.364,00	33.225.182.532,48	-7.105.157.168,48	-21,38
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**-23.694.969.814,00**	**-11.704.725.643,48**	**-11.990.244.170,52**	**102,44**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**40.557.197.835,60**	**-49.502.265.157,00**	**90.059.462.992,60**	**-181,93**
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	1.930.753.000,00	1.392.101.771,81	538.651.228,19	38,69
JUMLAH POS LUAR BIASA	**-1.930.753.000,00**	**-1.392.101.771,81**	**-538.651.228,19**	**38,69**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**38.626.444.835,60**	**-50.894.366.928,81**	**89.520.811.764,41**	**-175,90**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN IV

LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

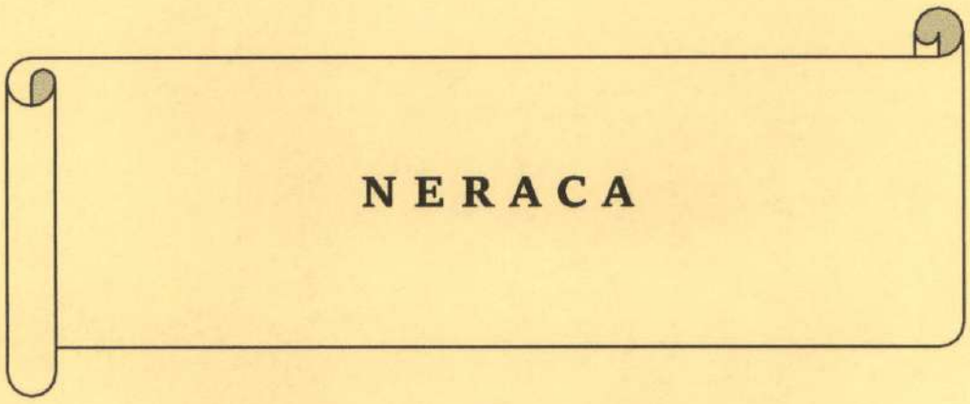
Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	2.168.327.298.371,94	2.218.246.782.972,87
Surplus/Defisit - LO	38.626.444.835,60	(50.894.366.928,81)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	12.586.898.587,81	974.882.327,88
Ekuitas Akhir	2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN V



Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	35.204.761.814,54	15.760.972,72
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.723.900,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	33.179.711.774,58	41.035.951.257,08
Kas Dana Bos	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	13.781.313,00	2.391.152,00
Kas Dana BOSP	8.419.597,38	8.701,38
Kas Dana BOK	2.150.240.708,00	3.111.393.587,00
Kas Dana Desa	0,00	0,00
Piutang Pajak	34.997.304.087,00	52.632.306.662,60
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	-23.347.085.430,25	-21.454.172.672,95
Piutang Retribusi	12.747.288.873,17	6.903.875.090,17
Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	-2.045.392.955,52	-1.669.056.525,77
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	438.335.331,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97
Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00
Piutang Lainnya	0,00	4.642.050,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	85.692.777,79	25.017.500,00
Persediaan	17.132.037.684,64	25.567.875.098,60
Jumlah Aset Lancar	**117.525.795.717,03**	**128.981.273.125,80**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	9.914.418.270,00	10.005.897.236,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-9.914.418.270,00	-10.005.897.236,00
Jumlah Investasi Non Permanen	**0,00**	**0,00**
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah (PMP)	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	**38.024.590.033,00**	**32.559.734.267,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**38.024.590.033,00**	**32.559.734.267,00**
ASET TETAP		
Tanah	452.539.579.643,00	499.673.759.643,00
Peralatan dan Mesin	519.133.997.576,50	509.604.512.267,50
Gedung dan Bangunan	958.807.621.610,35	911.770.548.482,89

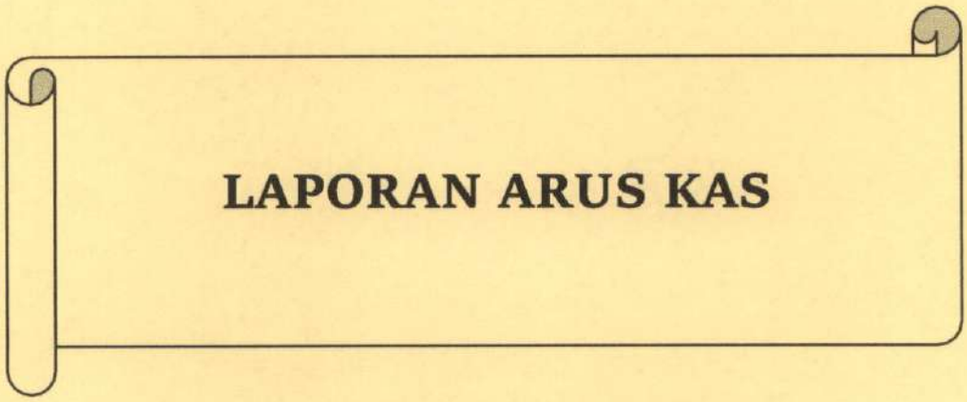
Uraian	2025	2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07
Aset Tetap Lainnya	58.685.782.320,00	52.986.691.130,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.836.078.683,55	14.579.307.073,55
Akumulasi Penyusutan	-1.959.220.141.615,53	-1.874.328.259.128,97
Jumlah Aset Tetap	**2.123.167.793.151,94**	**2.168.117.332.869,04**
ASET LAINNYA		
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.105.101.144,69
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	13.578.073.020,00	4.591.768.000,00
Aset Lain-lain	20.599.677.402,07	16.756.887.763,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-26.353.395.258,00	-11.983.797.344,00
Jumlah Aset Lainnya	**7.824.355.164,07**	**10.469.959.563,69**
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah	48.151.091.000,00	0,00
Properti Investasi Bangunan Gedung	14.524.239.702,00	0,00
Akumulasi Penyu	-4.267.901.317,00	0,00
Jumlah Properti Investasi	**58.407.429.385,00**	**0,00**
JUMLAH ASET	**2.344.949.963.451,04**	**2.340.128.299.825,53**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.000,00	1.494.098,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	551.365.500,00	620.394.600,00
Utang Belanja	124.857.940.155,69	171.179.112.755,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**125.409.321.655,69**	**171.801.001.453,60**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**125.409.321.655,69**	**171.801.001.453,60**
EKUITAS		
Ekuitas	2.219.540.641.795,35	2.168.327.298.371,94
JUMLAH EKUITAS	**2.219.540.641.795,35**	**2.168.327.298.371,94**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.344.949.963.451,04**	**2.340.128.299.825,54**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN VI



LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	307.726.290.863,09	271.348.014.857,95
Penerimaan Retribusi Daerah	88.091.029.560,50	92.535.490.214,23
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.707.829.987,00	3.086.978.412,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.457.897.554,91	5.727.312.377,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.828.063.200,00	35.437.827.410,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.807.545.000,00	118.162.575.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	470.002.100.490,00	445.953.309.736,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	145.450.737.337,00	207.991.198.275,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	52.266.126.740,00	60.218.461.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.480.578.404,00	76.814.413.176,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	1.177.760.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	2.433.092.046,78	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**1.231.294.561.183,28**	**1.317.275.580.458,97**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	614.482.600.677,00	552.879.729.959,00
Pembayaran Barang dan Jasa	336.315.007.993,50	440.500.231.111,34
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	37.345.691,00
Pembayaran Hibah	51.141.715.158,00	101.806.619.944,13
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	1.572.746.671,00	697.401.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	2.100.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	94.100.187.078,00	88.613.046.778,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.097.612.257.577,50**	**1.186.634.374.683,47**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**133.682.303.605,78**	**130.641.205.775,50**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

Uraian	2025	2024
Penjualan atas Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lain-lain	261.439.800,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Dearah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**261.439.800,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	26.003.072.851,00	21.684.561.898,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	36.521.830.983,46	33.452.111.359,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.693.474.292,00	85.742.815.793,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.754.227.190,00	6.299.584.700,00
Perolehan Aset Lainnya	1.085.005.520,00	419.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**107.557.610.836,46**	**147.598.573.750,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**-107.296.171.036,46**	**-147.598.573.750,00**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir	91.478.966,00	83.423.336,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**91.478.966,00**	**83.423.336,00**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00

Uraian	2025	2024
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**91.478.966,00**	**83.423.336,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.344.054.680,20	86.135.393.253,69
Jumlah Arus Masuk Kas	**71.344.054.680,20**	**86.135.393.253,69**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.345.532.778,20	86.142.438.101,69
Jumlah Arus Keluar Kas	**71.345.532.778,20**	**86.142.438.101,69**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**-1.478.098,00**	**-7.044.848,00**
Kenaikan / Penurunan Kas	**26.476.133.437,32**	**-16.880.989.486,50**
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	**44.165.505.670,18**	**61.046.495.156,68**
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	**70.641.639.107,50**	**44.165.505.670,18**
Jumlah Saldo Akhir Kas	**70.641.639.107,50**	**44.165.505.670,18**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terus mengusahakan tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu laporan keuangan juga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholders*, seperti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawasan, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government* yang diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 telah disusun berdasarkan basis akrual yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang spesifik.

Tujuan pelaporan keuangan, tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna *(users)* dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;

5. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
8. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat dari output laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran *(budgetary reports)*, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 52);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 92);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63);
32. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 34).

7.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas:

7.1 Pendahuluan

Menguraikan tentang informasi umum berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan serta Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Terdiri atas, *Pertama:* Kebijakan Fiskal/Keuangan, memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca. *Kedua:* Ekonomi Makro, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya

dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. *Ketiga:* Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program untuk setiap urusan kewenangan pemerintahan daerah pada tahun pelaporan.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD. Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan/atau gambar. Pada bab ini dijelaskan juga faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

7.4 Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang terbagi atas empat bagian, sebagai berikut :

7.4.1 Entitas pelaporan keuangan, menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah serta kewajiban yang harus dipenuhi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai asumsi dasar, prinsip akuntansi, dan pelaporan keuangan serta proses penyusunan laporan keuangan.

7.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

7.4.3 Basis pengakuan dan pengukuran terhadap unsur laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengakuan dan pengukuran yang diterapkan dalam penyajian pos-pos laporan keuangan.

7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah atau belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.

7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terbagi atas tiga bagian yakni:

7.5.1 penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan surplus/defisit serta pembiayaan.

7.5.2 penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang mencakup saldo awal SAL, SiLPA Tahun Berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain.

7.5.3 penjelasan atas pos-pos Neraca yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.

7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang mencakup pendapatan LO, beban LO dan surplus/defisit LO.

7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran

7.5.6 penjelasan atas pos-pos atas Laporan Perubahan Ekuitas yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

7.6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal penting lain yang belum diinformasikan dalam bagian pokok laporan keuangan ataupun untuk mempertegas informasi yang telah disajikan dalam pokok pembahasan sebelumnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.7 Penutup

Merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan simpulan-simpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan serta hal-hal lain yang perlu diungkapkan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang dalam hal ini adalah periode Tahun 2025.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun) dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun) serta Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran) yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer).

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2021-2026 dan RKPD tahun 2025. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalian potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

a) Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal dengan penyesuaian tarif dan memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan basis sektor pariwisata;
b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
c) Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

e) Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f) Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;

g) Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi;

h) Peningkatan efektivitas pembinaan, penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Daerah, dan Wajib Retribusi Daerah, antara lain meningkatkan efektivitas dan kepastian *call center* dan *website*, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media luar ruangan, media elektronik dan media sosial;

i) Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi, optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinu dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi;

j) Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melalui pemetaan wilayah potensi, manajemen resiko penagihan.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan di bawah ini:

a) Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya.

b) Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 bahwa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan mencakup:

   (1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI);

   (2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeasilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR);

   (3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA);

   (4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP);

   (5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (BERKEAILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK).

   Prioritas pembangunan di atas dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Karimun yakni: ***"Terwujudnya Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya".***

c) Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

   Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu:

   1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

   2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan fokus pada pelayanan dasar:

1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan
6) Sosial

e) Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:

1) Hibah merupakan bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaaan tertentu dapat berkelanjutan.
3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemapuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemeritahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan., kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup kondisi defisit atau memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Karimun adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan Dana Cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja sehingga terdapat keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2) Penganggaran dana bergulir dalam APBD, pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu dimaksud antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan batasan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

1. Penganggaran investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
2. Penyertaan modal pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Penambahan modal disetor dan/atau penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang.
4. Penyertaan modal pada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

7.2.2 Ekonomi Makro

7.2.2.1 Keadaan Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35' Lintang Utara sampai dengan 1° 10' Lintang Utara dan 103° 30' Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 km2 . Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. Posisi strategis Kabupaten

Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu:

1. Utara : Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia;
2. Selatan : Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
4. Timur : Kota Batam.

Tabel 1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan *District*	Ibukota Kecamatan *Capital of District*	Luas *Total Area* (km²/sq. km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten *Percentage to Regency Area*	Jumlah Pulau *Number of Islands*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Moro	Moro	447,92	29,39	36
Durai	Tanjung Kilang	62,98	4,13	47
Sugie Besar	Rawajaya	NA	NA	49
Kundur	Tanjung Batu Kota	83,74	5,49	—
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	245,65	16,12	—
Kundur Barat	Sawang	189,92	12,46	11
Ungar	Sei Buluh	55,53	3,64	26
Belat	Sebele	109,34	7,17	22
Karimun	Tanjungbalai	59,76	3,92	—
Buru	Buru	73,40	4,82	7
Meral	Meral	57,85	3,80	4
Tebing	Tebing	76,35	5,01	6
Meral Barat	Darussalam	61,55	4,04	19
Selat Gelam	Parit	NA	NA	24
Kabupaten Karimun *Karimun Regency*		1.524	100,00	251

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.2 Wilayah Administratif

Kabupaten Karimun secara administratif dikembangkan sebagai daerah otonom tingkat II sejak tahun 1999. Sebelumnya Kabupaten Karimun berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari tiga kecamatan. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2013, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan. Perkembangan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan jumlah kecamatan menjadi 14.

Ke-14 (Empat Belas) kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Sugie Besar (pemekaran dari Moro), Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral), Kecamatan Tebing dan Kecamatan Selat Gelam (pemekaran dari Kecamatan Karimun).

Tabel 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Kecamatan / District	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moro	12	12	12	5	5
Durai	4	4	4	4	4
Sugie Besar	NA	NA	NA	7	7
Kundur	6	6	6	6	6
Kundur Utara	5	5	5	5	5
Kundur Barat	5	5	5	5	5
Ungar	4	4	4	4	4
Belat	6	6	6	6	6
Karimun	9	9	9	6	6
Buru	4	4	4	4	4
Meral	6	6	6	6	6
Tebing	6	6	6	6	6
Meral Barat	4	4	4	4	4
Selat Gelam	NA	NA	NA	3	3
Kabupaten Karimun / Karimun Regency	71	71	71	71	71

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun pada tahun 2025 memiliki anggota sebanyak 30 orang yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didominasi oleh kelompok umur 36-49 tahun juga didominasi dengan latar Pendidikan SMA/sederajat. Pada tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah mengeluarkan sebanyak enam peraturan daerah. Selain itu, jumlah keputusan bupati yang dikeluarkan selama tahun 2025 tercatat sebanyak 700 keputusan.

Tabel 3

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Partai Politik *Political Parties*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya	5	1	6
Partai Demokrat	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat	4	-	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	-	3
Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	-	4
Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
Partai Amanat Nasional	2	-	2
Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-
Partai Nasional Demokrat	3	-	3
Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	27	3	30

Sumber : Kabupeten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun mencapai 7.710 orang, yang terdiri dari 3.553 pegawai negeri sipil (PNS) dan 4.157 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari sisi pendidikan, mayoritas ASN memiliki kualifikasi S1/sarjana, diikuti oleh lulusan Diploma dan SMA.

Tabel 4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Tingkat Pendidikan *Educational Level*	Aparatur Sipil Negara *State Civil Service*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(7)	(8)	(9)	(10)
Sekolah Dasar (SD) *Primary School*	18	8	26
Sekolah Menengah Pertama (SMP) *Junior High School*	37	13	50
Sekolah Menengah Atas (SMA) *Senior High School*	1.294	890	2.184
Diploma I/Akta I *Diploma I/Akta I*	3	5	8
Diploma II/Akta II *Diploma II/Akta II*	49	28	77
Diploma III/Akta III *Diploma III/Akta III*	212	671	883
Diploma IV/Akta IV *Diploma IV/Akta IV*	40	95	135
S1/Sarjana *Under Graduate/Bachelor*	1.390	2.588	3.978
S2/Pasca Sarjana *Graduate*	194	169	363
S3/Doktor/Ph.D *Post Graduate*	5	1	6
Jumlah/*Total*	3.242	4.468	7.710

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.5 Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2025 yaitu 276.650 jiwa, yang terdiri atas 141.304 laki-laki dan 135.346 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104, artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Meral sebanyak 55.495 jiwa, diikuti Kecamatan Karimun sebanyak 52.087 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Ungar sebanyak 5.977 jiwa.

Tabel 5
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kecamatan *District*	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2025 (%) *Annual Population Growth Rate 2020-2025 (%)*	Rasio Jenis Kelamin Penduduk *Population Sex Ratio*
(1)	(5)	(6)
Moro	1,274	106
Durai	0,032	105
Kundur	0,014	100
Kundur Utara	0,019	106
Kundur Barat	0,030	105
Ungar	0,010	105
Belat	0,020	109
Karimun	0,001	104
Buru	0,029	104
Meral	0,130	105
Tebing	0,272	103
Meral Barat	0,139	107
Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	0,075	104

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.6 Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karimun sebanyak 132.799 orang, dimana sebesar 124.419 orang bekerja dan 8.380 orang menganggur, dimana pengangguran laki-laki lebih sedikit dibanding pengangguran perempuan. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor jasa sebanyak 73.277 orang, diikuti sektor industri sebanyak 32.963 orang dan sektor pertanian sebanyak 18.179 orang. Tenaga kerja laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Kegiatan Utama *Main Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Laki-laki + Perempuan *Male + Female*
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/*Economically active*	84.128	48.671	132.799
1. Bekerja/*Working*	77.782	46.637	124.419
2. Penganggguran terbuka/*Unemployment*	6.346	2.034	8.380
II. Bukan angkatan kerja/*Not economically active*	17.800	48.167	65.967
1. Sekolah/*Attending school*	6.486	6.358	12.844
2. Mengurus rumah tangga/*Housekeeping*	5.071	39.697	44.768
3. Lainnya/*Others*	6.243	2.112	8.355
Jumlah/*Total*	101.928	96.838	198.766

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 7

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri *Own account worker*	14.404	9.729	24.133
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker*	6.917	4.571	11.488
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/ paid worker*	3.561	1.368	4.929
Buruh/Karyawan/Pegawai/*Employee*	48.268	24.472	72.740
Pekerja bebas *Casual worker*	2.269	232	2.501
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	2.363	6.265	8.628
Jumlah/*Total*	77.782	46.637	124.419

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan Masyarakat. Pada tahun 2025, garis kemiskinan di Kabupaten Karimun adalah 524.326 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,16 persen atau sebanyak 12,56 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,49 dan indeks keparahan kemiskinan 0,09.

Tabel 8
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun
Tahun 2017-2025

Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	338.341	13,35	6,77
2018	354.526	16,94	7,41
2019	376.853	15,36	6,61
2020	411.052	15,99	6,83
2021	422.961	16,28	6,85
2022	466.856	16,44	6,87
2023	468.332	14,33	5,95
2024	492.654	13,99	5,78
2025	524.326	12,56	5,16

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.8 Pariwisata

Di Kabupaten Karimun terdapat 41 destinasi wisata buatan dan 39 destinasi wisata alam yang tersebar di 14 kecamatan. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 10.212 jiwa, sedangkan bulan Maret menjadi yang terendah dengan jumlah 5.773 jiwa. Secara keseluruhan, tingkat kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sekitar 28,19 persen, dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 30,20 persen. Namun demikian, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 saat tidak terdapat kunjungan wisatawan akibat pandemi Covid-19.

Tabel 9
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2025

Tahun *Year*	Jumlah *Total*
(1)	(2)
2016	89.107
2017	85.771
2018	84.718
2019	112.753
2020	21.836
2021	15
2022	28.984
2023	58.093
2024	75.638
2025	96.963

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 10
Jumlah Wisatawan Mancanegara Datang Menurut Asal Negara Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Asal Negara *Origin*	Jumlah Wisatawan *Number of Tourist*	Persentase *Percentage*
(1)	(2)	(3)
Malaysia	40.140	41,40
Singapore	15.013	15,48
India	2.654	2,74
Philippines	76	0,08
Bangladesh	43	0,04
China	524	0,54
Thailand	60	0,06
Italy	162	0,17
France	36	0,04
Taiwan	149	0,15
United Kingdom	108	0,11
Australia	51	0,05
United States of America	38	0,04
Myanmar/Burma	92	0,09
Germany	21	0,02
Srilanka	0	0,00
Lainnya/*Others*	37.796	38,98
Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	96.963	100,00

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.9 Sarana Perdagangan

Perdagangan merupakan elemen krusial dalam dinamika ekonomi suatu masyarakat. Sarana perdagangan menjadi fondasi utama dalam menjembatani produsen dan konsumen, menciptakan suatu ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan sarana perdagangan, terdapat berbagai jenis seperti pasar, toko, kios, dan warung, yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik unik.

Sarana perdagangan, seperti pasar, toko, kios, dan warung, memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi lokal. Dalam keberagaman jenisnya, setiap sarana perdagangan memberikan kontribusi yang unik terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan peran masing-masing sarana perdagangan, kita dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 11
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Jenis Sarana Perdagangan *Type of Trading Facilities*	2025
(1)	(2)
Pasar/*Market*	9
Toko/*Store*	869
Kios/*Kiosk*	437
Warung/*Stall*	1.429
Jumlah/*Total*	2.744

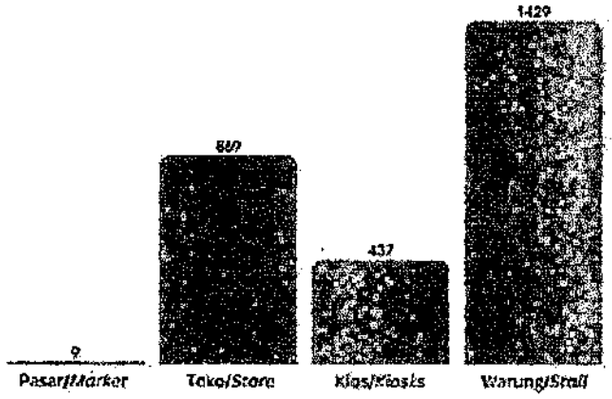
Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 12
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Pelabuhan *Sea Port*	Volume *Volume (kg)*	Nilai *Value (USD)*
(1)	(2)	(3)
Tanjung Batu	2.743.000,00	3.122.296,98
Tanjung Balai Karimun	11.845.613.103,32	1.847.533.702,00
Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Grafik 1
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2025



Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 13
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Bulan di Kabupaten Karimun Tahun 2025

Bulan *Month*	Volume *Volume (kg)*	Nilai *Value (USD)*
(1)	(2)	(3)
Januari/*January*	823.052.788,53	126.435.264,95
Februari/*February*	760.979.896,88	89.990.177,04
Maret/*March*	1.212.394.222,79	308.080.636,80
April/*April*	1.118.762.218,45	238.893.616,00
Mei/*May*	1.151.168.886,72	370.823.474,96
Juni/*June*	1.006.376.956,44	155.851.617,95
Juli/*July*	918.922.155,12	36.783.189,87
Agustus/*August*	935.875.964,52	86.380.773,57
September/*September*	904.749.563,90	60.253.743,03
Oktober/*October*	899.341.207,18	148.603.436,08
November/*November*	856.792.905,94	42.137.952,15
Desember/*December*	1.259.939.342,85	186.421.886,58
Karimun	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 14
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Negara Tujuan *Destination Country*	Volume *Volume (kg)*	Nilai *Value (USD)*
(1)	(2)	(3)
Bangladesh	32.985.942,00	21.228.153,30
Belanda	370.000,00	12.526.150,00
Belgia	25.000,00	851.125,00
Italia	25.000,00	816.750,00
Jepang	570.000,00	19.999.125,00
Korea Selatan	59.635.292,00	26.500.731,06
Malaysia	792.252.782,32	396.187.287,92
Marshall Islands	505.498.004,00	328.082.364,87
Oman	35.463.888,00	24.708.235,61
Panama	4.412.000,00	24.017,47
Peru	6.310.672,00	4.038.075,36
Philipina	687.452,00	417.943,80
Qatar	28.595.028,00	263.134.997,10
Singapura	10.266.353.893,00	690.581.484,10
Taiwan	8.650.898,00	5.688.328,92
Thailand	110.000,00	33.000,00
Timor Leste	10.917.239,00	7.254.497,70
Tiongkok	95.443.013,00	46.878.481,77
Turki	50.000,00	1.705.250,00
Karimun	11.848.356.103,32	1.850.655.998,98

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

Tabel 15
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Kabupaten Karimun
Tahun 2025

Negara Tujuan *Destination Country*	Volume *Volume (kg)*	Nilai *Value (USD)*
(1)	(2)	(3)
Afrika Selatan	5.506,53	142.178,98
Albania	2.658,00	91.400,54
Amerika Serikat	379.095,93	48.252.088,01
Angola	6.712,00	209.710,80
Australia	1.366.586,07	728.252,44
Austria	21.757,61	632.929,50
Bahrain	568.942,00	515.678,85
Bangladesh	241,00	20.438,07
Belanda	95.766,54	2.823.250,95
Belgia	43.122,96	769.087,60
Belize	170,00	447,56
Bosnia & Herzegovina	4,00	894,87
Brazil	20.418,14	44.863,51
Bulgaria	12.949,02	787.321,19

Lanjutan

Negara Tujuan *Destination Country*	Volume *Volume (kg)*	Nilai *Value (USD)*
(7)	(8)	(9)
Denmark	3.404,92	129.091,80
Estonia	0,40	223,25
Fed Russia	1.620.713.642,00	860.275.634,08
Finlandia	4.764,54	550.816,06
Ghana	0,90	200,50
Hongkong	8.500,00	27.252,93
Hungaria	72,08	47.893,39
India	483.555,37	4.738.159,38
Indonesia	3.404.599,97	5.757.944,30
Inggris	285.777,74	10.155.979,65
Irak	85.107.666,00	35.139.253,14
Iran	426,00	72.175,41
Irlandia	695,10	680.246,03
Israil	132,00	27.235,91
Italia	2.162.751,50	76.062.439,88
Jepang	8.277.607,82	7.986.317,96
Jerman	2.982.986,01	24.163.048,40
Kamerun	6,00	654,47
Kanada	345.144,05	380.369,35
Korea Selatan	17.664.536,09	16.244.904,14
Kroasia	93,00	8.345,65
Liechtenstein	300,50	54.845,57
Luksemburg	272.653,82	761.240,34
Malaysia	196.251.946,96	134.245.164,77
Malta	8.131.905,00	5.477.104,46
Maroko	43,80	1.300,70
Meksiko	4.287,08	1.633.082,57
Mesir	367.022.145,00	226.616.617,32
Namibia	65,00	7.703,33
Nauru	15.620,00	170.515,25
Nikaragua	2,00	51,97
Norwegia	200.026,58	22.390.015,79
Oman	42.328.926,19	29.062.034,15
Pakistan	9.890,40	320.028,51
Perancis	47.072,67	428.422,35
Philipina	95,51	3.165,56

Lanjutan

Negara Tujuan Destination Country	Volume Volume (kg)	Nilai Value (USD)
(7)	(8)	(9)
Polandia	183.947,01	1.036.217,45
Portugal	3,40	1.087,41
Qatar	145.459,50	1.161.338,36
Rep Ceko	30.692,67	391.371,04
Rumania	401.772,10	2.543.819,71
Saint Barthelemy	20,00	6.512,79
Saudi Arabia	10.201,00	8.176,85
Selandia Baru	857,90	18.527,26
Senegal	117,00	9.571,02
Serbia	10,00	156,81
Sierra Leone	1.903,40	10.719,54
Singapura	227.766.951,03	110.437.227,52
Slovakia	2.599,69	41.404,56
Slovenia	2.893,50	18.909,81
Spanyol	314.717,33	761.087,23
Srilanka	30,00	962,38
Swaziland	228,00	3.092,66
Swedia	66.832,53	1.111.645,40
Swiss	4.158,30	161.105,16
Taiwan	430.286,24	1.348.485,65
Thailand	628.100,28	756.500,91
Timor Leste	1.052,00	2.077,29
Tiongkok	139.274.287,14	206.264.244,71
Tunisia	5.794,88	220.240,38
Turki	596.926,91	5.428.254,52
Ukraina	9.833,44	662.444,80
Uni Emirat Arab	36.727.829,70	20.195.696,63
Viet Nam	74.484,32	213.935,34
Jumlah/Total	2.764.937.261,07	1.871.452.834,36

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2025, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 19.945,96 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) sebesar 11.535,57 miliar rupiah. Dalam

menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2025, sedangkan untuk menilai PDRB atas dasar harga konstan data yang digunakan adalah harga tahun 2010. Dengan menggunakan data harga pada tahun dasar diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Pada tahun 2025 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 19,23 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,82 persen, industri pengolahan sebesar 14,48 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,61 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 9,22 persen.

Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun pada tahun 2025 mencapai 5,44 persen. Jika dilihat masing-masing sektor, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan listrik, dan gas serta pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 10,56 persen masing masing sektor, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,35 persen, serta jasa perusahaan sebesar 5,23 persen.

Tabel 16
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	2.160,76	2.286,35	2.462,37	2.537,09	2.914,70
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1.686,58	1.847,31	1.955,00	1.865,95	1.839,78
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1.766,05	1.894,58	2.097,83	2.640,56	2.898,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	35,42	39,80	45,98	51,92	58,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	5,32	5,63	5,70	6,13	7,00
F	Konstruksi/*Construction*	2.842,05	3.102,08	3.236,57	3.431,45	3.835,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	2.499,05	2.849,88	3.214,68	3.424,77	3.754,17
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	367,07	461,70	583,98	624,03	708,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	250,23	328,26	394,26	441,49	481,45
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	428,95	453,35	572,64	612,45	625,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	232,62	243,94	267,45	288,57	307,37
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	426,13	446,29	479,47	510,74	547,87
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	2,44	2,70	3,30	3,40	3,81

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2026

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja keuangan APBD terhadap perekonomian daerah.

Tabel 17

Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

(Miliar Rupiah)

Anggaran	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
PAD	496,53	408,16	403,11	372,70	414,99	404,24
Pendapatan Transfer	1.006,08	935,35	1.010,12	944,57	846,37	824,89
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,19	4,72	0,00	0,00	0,00	2,43
Pendapatan Daerah	**1.508,81**	**1.348,24**	**1.413,23**	**1.317,27**	**1.261,37**	**1.231,57**

Berdasarkan ketentuan Bab IV Urusan Pemerintah Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintah pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah, (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum; (2) urusan Pemerintahan konskuren sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sesuai pasal 9 ayat 3 di atas yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Yang dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan wajib Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (e) ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; dan (f) sosial, ayat (2) urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) Persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Ayat (3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

(a) Kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energy dan sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian dan (h) transmigrasi.

Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi belanja daerah mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung, pengelolaan perbatasan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, kota administrasi, kabupaten administrasi, kesatuan bangsa dan politik, serta urusan kekhususan.

Sebagai informasi tambahan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Rekapitulasi capaian kinerja yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	795.769.124.729,60	745.630.253.047,96	(50.138.871.681,64)	93,70
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.295.349.084,00	371.117.022.956,63	(16.178.326.127,37)	95,82
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.703.970.645,70	248.141.588.546,83	(14.562.382.098,87)	94,46
1.02	DINAS KESEHATAN	115.898.316.610,60	108.783.690.658,00	(7.114.625.952,60)	93,86
1.02	RSUD MUHAMMAD SANI	101.417.800.959,65	99.660.489.006,83	(1.757.311.952,82)	98,27
1.02	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	6.201.375.355,12	5.499.520.964,00	(701.854.391,12)	88,68
1.02	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	2.125.467.090,83	1.580.868.368,00	(544.598.722,83)	74,38
1.02	UPT PUSKESMAS BURU	2.180.796.669,24	1.897.615.549,00	(283.181.120,24)	87,01
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	2.770.968.720,00	2.224.239.848,00	(546.728.872,00)	80,27
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	2.754.474.450,00	2.447.437.301,00	(307.037.149,00)	88,85
1.02	UPT PUSKESMAS TEBING	3.957.773.646,00	3.607.183.248,00	(350.590.398,00)	91,14
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	3.500.751.464,82	3.188.804.864,00	(311.946.600,82)	91,09
1.02	UPT PUSKESMAS UNGAR	1.516.276.029,48	1.269.693.426,00	(246.582.603,48)	83,74
1.02	UPT PUSKESMAS MORO	2.165.747.757,00	1.803.939.176,00	(361.808.581,00)	83,29
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	7.014.526.917,48	6.461.328.427,00	(553.198.490,48)	92,11
1.02	UPT PUSKESMAS BELAT	1.845.876.407,00	1.446.807.477,00	(399.068.930,00)	78,38
1.02	UPT PUSKESMAS DURAI	1.739.317.820,00	1.484.754.538,00	(254.563.282,00)	85,36
1.02	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	2.775.200.285,00	2.285.910.175,00	(489.290.110,00)	82,37
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL	4.275.811.615,48	4.024.879.465,00	(250.932.150,48)	94,13
1.02	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	563.488.848,00	474.426.056,00	(89.062.792,00)	84,19
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.214.570.733,76	88.970.917.134,50	(15.243.653.599,26)	85,37
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.700.841.458,85	15.502.543.748,00	(2.198.297.710,85)	87,58
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.727.708.328,37	17.487.173.115,00	(1.240.535.213,37)	93,38
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.640.972.868,30	6.194.357.990,00	(446.614.878,30)	93,27
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.086.735.460,07	11.292.815.125,00	(793.920.335,07)	93,43

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
1.06	DINAS SOSIAL	5.126.684.478,92	4.411.007.547,00	(715.676.931,92)	86,04
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.066.948.430,23	108.355.337.594,00	(12.711.610.836,23)	89,50
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.07	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	7.373.588.575,00	6.778.668.275,00	(594.920.300,00)	91,93
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.995.094.814,48	4.500.764.158,00	(494.330.656,48)	90,10
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.09	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	9.265.095.329,39	8.437.315.710,00	(827.779.619,39)	91,07
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.657.126.627,90	25.061.546.757,00	(1.595.579.870,90)	94,01
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.402.278.579,00	6.077.905.467,00	(324.373.112,00)	94,93
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.891.174.013,96	5.276.779.273,00	(614.394.740,96)	89,57
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.382.497.500,00	2.786.276.342,00	(596.221.158,00)	82,37
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	22.096.459.220,34	18.573.657.398,00	(3.522.801.822,34)	84,06
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.510.748.385,00	6.706.327.959,00	(804.420.426,00)	89,29
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
2.17	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	5.586.048.416,04	4.707.220.867,00	(878.827.549,04)	84,27
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.655.720.558,10	6.283.697.054,00	(372.023.504,10)	94,41
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.649.583.188,94	8.272.126.288,00	(1.377.456.900,94)	85,73
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.454.825,00	6.868.400,00	(29.586.425,00)	18,84
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.451.000,00	12.137.000,00	(314.000,00)	97,48
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	423.637.900,00	305.817.312,00	(117.820.588,00)	72,19
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.075.441.497,08	4.552.647.334,00	(522.794.163,08)	89,70
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	53.548.000,00	15.582.000,00	(37.966.000,00)	29,10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.978.699.513,52	19.838.874.970,00	(2.139.824.543,52)	90,26
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.25	DINAS PERIKANAN	11.542.817.197,54	10.967.869.825,00	(574.947.372,54)	95,02
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.26	DINAS PARIWISATA	5.698.310.390,98	5.497.750.000,00	(200.560.390,98)	96,48
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.27	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.548.575.325,00	2.395.529.431,00	(1.153.045.894,00)	67,51
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.30	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.041.258.600,00	846.676.869,00	(194.581.731,00)	81,31
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70
3.31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	147.738.000,00	131.048.845,00	(16.689.155,00)	88,70

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	107.976.756.000,87	94.204.037.696,00	(13.772.718.304,87)	87,24
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.007.118.772,05	58.928.319.468,00	(10.078.799.304,05)	85,39
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.969.637.228,82	35.275.718.228,00	(3.693.919.000,82)	90,52
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	162.895.556.379,42	152.266.586.731,00	(10.628.969.648,42)	93,47
5.01	PERENCANAAN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.01	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	9.206.131.487,86	8.647.899.044,00	(558.232.443,86)	93,94
5.02	KEUANGAN	146.561.230.388,86	137.311.511.540,00	(9.249.718.848,86)	93,69
5.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	116.819.123.841,98	109.913.343.457,00	(6.905.780.384,98)	94,09
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.742.106.546,88	27.398.168.083,00	(2.343.938.463,88)	92,12
5.03	KEPEGAWAIAN	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.970.442.602,70	6.226.848.747,00	(743.593.855,70)	89,33
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.696.000,00	19.853.000,00	(14.843.000,00)	57,22
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.05	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	62.575.900,00	0,00	(62.575.900,00)	0,00
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
5.06	SEKRETARIAT DAERAH	60.480.000,00	60.474.400,00	(5.600,00)	99,99
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.652.481.880,31	11.799.656.868,00	(1.852.825.012,31)	86,43
7	UNSUR KEWILAYAHAN	71.457.521.204,35	63.094.563.092,00	(8.362.958.112,35)	88,30
7.01	KECAMATAN	71.457.521.204,35	63.094.563.092,00	(8.362.958.112,35)	88,30
7.01	KECAMATAN DURAI	2.597.713.473,00	2.422.105.398,00	(175.608.075,00)	93,24
7.01	KECAMATAN KUNDUR	6.318.202.516,66	5.853.751.855,00	(464.450.661,66)	92,65
7.01	KECAMATAN MERAL BARAT	4.749.445.620,48	4.561.662.062,00	(187.783.558,48)	96,05
7.01	KECAMATAN BURU	4.333.523.476,00	3.864.946.996,00	(468.576.480,00)	89,19
7.01	KECAMATAN KARIMUN	8.101.232.155,42	7.491.311.504,00	(609.920.651,42)	92,47
7.01	KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.416.378.755,60	3.123.887.556,00	(292.491.199,60)	91,44
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI	233.893.000,00	231.753.275,00	(2.139.725,00)	99,09
7.01	KELURAHAN TELUK AIR	233.481.000,00	226.225.057,00	(7.255.943,00)	96,89
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR	266.893.600,00	228.946.300,00	(37.947.500,00)	85,78

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
7.01	KELURAHAN LUBUK SEMUT	236.307.360,00	231.813.906,00	(4.493.454,00)	98,10
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA	251.353.500,00	239.306.559,00	(12.046.941,00)	95,21
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT	244.943.600,00	242.956.700,00	(1.986.900,00)	99,19
7.01	KECAMATAN MERAL	8.593.346.988,00	7.812.296.055,00	(781.050.933,00)	90,91
7.01	KECAMATAN BELAT	1.717.523.989,36	1.410.136.124,00	(307.387.865,36)	82,10
7.01	KECAMATAN UNGAR	3.477.871.053,83	3.177.856.084,00	(300.014.969,83)	91,37
7.01	KECAMATAN MORO	4.491.912.260,00	3.981.601.326,00	(510.310.934,00)	88,64
7.01	KECAMATAN KUNDUR BARAT	5.408.703.824,00	5.042.262.533,00	(366.441.291,00)	93,22
7.01	KECAMATAN TEBING	6.433.697.935,00	6.029.223.364,00	(404.474.571,00)	93,71
7.01	KELURAHAN BARAN BARAT	286.964.354,00	46.000.000,00	(240.964.354,00)	16,03
7.01	KELURAHAN SUNGAI RAYA	247.746.000,00	37.000.000,00	(210.746.000,00)	14,93
7.01	KELURAHAN BARAN TIMUR	232.946.180,00	32.000.000,00	(200.946.180,00)	13,74
7.01	KELURAHAN SUNGAI PASIR	333.574.000,00	42.000.000,00	(291.574.000,00)	12,59
7.01	KELURAHAN PARIT BENUT	319.030.000,00	30.000.000,00	(289.030.000,00)	9,40
7.01	KELURAHAN PASIR PANJANG	255.254.000,00	54.000.000,00	(201.254.000,00)	21,16
7.01	KELURAHAN DARUSSALAM	235.115.000,00	32.000.000,00	(203.115.000,00)	13,61
7.01	KELURAHAN TEBING	229.769.000,00	217.501.477,00	(12.267.523,00)	94,66
7.01	KELURAHAN TELUK UMA	269.853.000,00	263.275.100,00	(6.577.900,00)	97,56
7.01	KELURAHAN PAMAK	260.382.950,00	193.869.265,00	(66.513.685,00)	74,46
7.01	KELURAHAN HARJOSARI	256.837.425,00	96.012.372,00	(160.825.053,00)	37,38
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA	486.676.460,00	444.699.000,00	(41.977.460,00)	91,37
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT	447.245.780,00	423.252.000,00	(23.993.780,00)	94,64
7.01	KELURAHAN GADING SARI	442.667.900,00	399.370.000,00	(43.297.900,00)	90,22
7.01	KELURAHAN ALAI	374.605.900,00	123.128.000,00	(251.477.900,00)	32,87
7.01	KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA	284.978.500,00	267.058.021,00	(17.920.479,00)	93,71
7.01	KELURAHAN SAWANG	275.684.500,00	271.291.989,00	(4.392.511,00)	98,41
7.01	KELURAHAN MORO	243.000.000,00	43.000.000,00	(200.000.000,00)	17,70
7.01	KELURAHAN MORO TIMUR	240.000.000,00	40.000.000,00	(200.000.000,00)	16,67
7.01	KELURAHAN BURU	263.904.600,00	206.350.000,00	(57.554.600,00)	78,19
7.01	KELURAHAN LUBUK PUDING	306.089.100,00	233.015.000,00	(73.074.100,00)	76,13
7.01	KELURAHAN MERAL KOTA	324.751.000,00	38.000.000,00	(286.751.000,00)	11,70
7.01	KELURAHAN KAPLING	238.871.000,00	210.507.750,00	(28.363.250,00)	88,13
7.01	KECAMATAN SELAT GELAM	2.039.152.687,00	1.896.410.207,00	(142.742.480,00)	93,00
7.01	KECAMATAN SUGIE BESAR	1.455.997.561,00	1.282.780.257,00	(173.217.304,00)	88,10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.240.975.104,88	7.480.558.415,00	(760.416.689,88)	90,77
JUMLAH		1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	(100.368.194.829,22)	92,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.303.038.063.243,18 dan terealisasi sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau 92,30%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dari masing-masing urusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Urusan Wajib

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah untuk urusan wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada belanja daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar, total anggaran yang digunakan sebesar Rp795.769.124.729,60 dan terealisasi sebesar Rp745.630.253.047,96 atau 93,70%. Sedangkan belanja daerah untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, total anggaran belanja yang digunakan sebesar Rp121.066.948.430,23 dan terealisasi sebesar Rp108.355.337.594,00 atau 89,50%.

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp21.978.699.513,52 terealisasi sebesar Rp19.838.874.970,00 atau 90,26%.

3) Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pendukung urusan pemerintahan adalah sebesar Rp107.976.756.000,87 dan terealisasi sebesar Rp94.204.037.696,00 atau 87,24%.

4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan penunjang urusan pemerintahan adalah sebesar Rp162.895.556.379,42 dan terealisasi sebesar Rp152.266.586.731,00 atau 93,47%.

5) Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pengawasan urusan pemerintahan adalah sebesar Rp13.652.481.880,31 dan terealisasi sebesar Rp11.799.656.868,00 atau 86,43%.

6) Urusan Kewilayahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan kewilayahan adalah sebesar Rp71.457.521.204,35 dan terealisasi sebesar Rp63.094.563.092,00 atau 88,30%.

7) Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp8.240.975.104,88 dan terealisasi sebesar Rp7.480.558.415,00 atau 90,77%.

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dalam pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada APBD ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, maka harus dilakukan perubahan atas APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat disebabkan: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025. Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Karimun secara umum, pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2025 dapat diikhtisarkan dalam tabel 19 berikut:

Tabel 19
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Di atas/(di bawah) Anggaran		Realisasi 2024
		Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*(5)=(4-3)*	*(6)=(5/3) x100*	*7*
1	Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	(10.752.969.177,50)	(2,59)	372.697.795.861,97
2	Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	(21.498.173.557,00)	(2,54)	944.577.784.597,00

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Di atas/(di bawah) Anggaran		Realisasi 2024
		Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	(5)=(4-3)	(6)=(5/3) x100	7
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	2.433.092.046,78	0,00	0,00
4	**Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)**	**1.261.374.051.671,00**	**1.231.556.000.983,28**	**(29.818.050.687,72)**	**(2,36)**	**1.317.275.580.458,97**
5	Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	(27.363.938.398,78)	(4,26)	552.879.729.959,00
6	Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	(40.159.545.197,89)	(10,67)	440.500.231.111,34
7	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	37.345.691,00
9	Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	(12.520.580.999,60)	(19,67)	101.806.619.944,13
10	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal	119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	(14.253.876.713,63)	(11,95)	147.598.573.750,00
12	Belanja Tak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	(1.416.271.862,34)	(47,38)	697.401.200,00
13	Belanja Transfer, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	(4.353.981.656,98)	(4,42)	90.713.046.778,00
14	**Jumlah Belanja (5 s/d 13)**	**1.303.038.063.243,18**	**1.202.669.868.413,96**	**(100.368.194.829,22)**	**(7,70)**	**1.334.232.948.433,47**
15	**Surplus/(Defisit) (4 - 14)**	**(41.664.011.572,18)**	**28.886.132.569,32**	**70.550.144.141,50**	**(169,33)**	**(16.957.367.974,50)**
16	Penerimaan Pembiayaan	44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	91.478.966,00	0,21	61.121.379.546,68
17	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Pembiayaan Netto (16 - 17)**	**41.664.011.572,18**	**41.755.490.538,18**	**91.478.966,00**	**0,22**	**61.121.379.546,68**
19	**SiLPA (15 + 18)**	**0,00**	**70.641.623.107,50**	**70.641.623.107,50**	**0,00**	**44.164.011.572,18**

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

7.3.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Karimun, telah diupayakan dana secara maksimal melalui usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggungjawab pengelolaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun 2025.

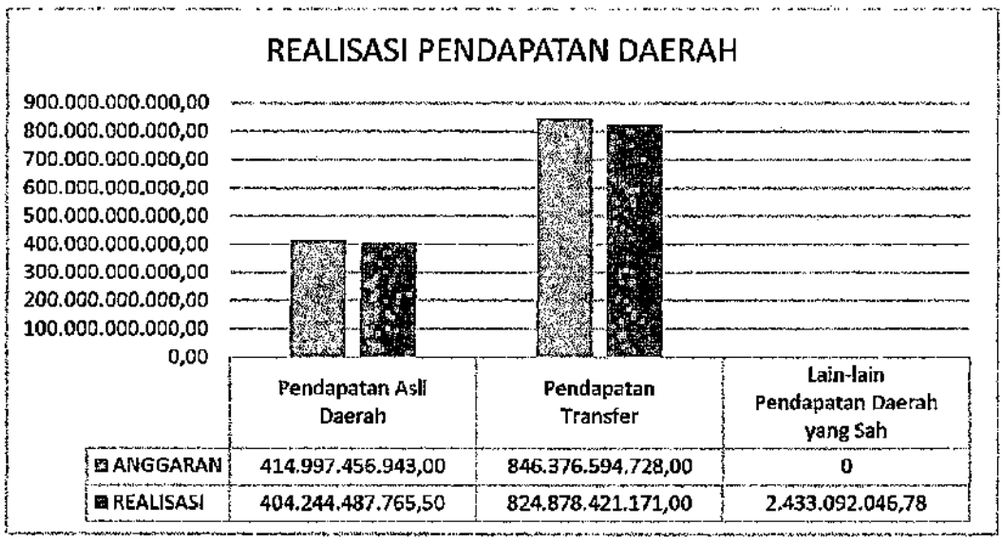
Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.231.570.240.992,38 atau sebesar 97,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Pendapatan Daerah			
a. Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41
b. Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	0,00

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memberikan kontribusi sebesar Rp404.244.487.765,50 atau sebesar 32,82% dari total pendapatan daerah, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp824.878.421.171,00 atau sebesar 66,98% dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2.433.092.046,78 atau sebesar 0,20% dari total pendapatan daerah. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH



Secara umum, realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp404.244.487.765,50 atau 97,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp414.997.456.943,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp10.752.969.177,50. Realisasi ini berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp307.726.290.863,09, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp88.091.029.560,50, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.707.829.987,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.719.337.354,91.

2) Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp824.878.421.171,00 atau 97,46% dari yang dianggaran sebesar Rp846.376.594.728,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp21.498.173.557,00. Realisasi ini berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp699.953.956.027,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp52.266.126.740,00, pencapaian target Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp72.658.338.404,00.

3) Realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp2.433.092.046,78 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau melebihi target sebesar Rp2.433.092.046,78.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Karimun akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD khususnya melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1) Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak retribusi daerah, menghitung kapasitas penerimaan (potensi) dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah.

2) Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain: memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah maupun meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupuan Pemerintah Pusat terkait dengan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan kebijaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan, pengendalian belanja yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan *preventif* secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi belanja daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau sebesar 92,30% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp1.303.038.063.243,18.

Rincian realisasi belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	1.082.283.388.424,77	1.001.939.323.828,50	92,58
b. Belanja Modal	119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05
c. Belanja Tak Terduga	2.989.018.533,34	1.572.746.671,00	52,62
d. Belanja Transfer	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58

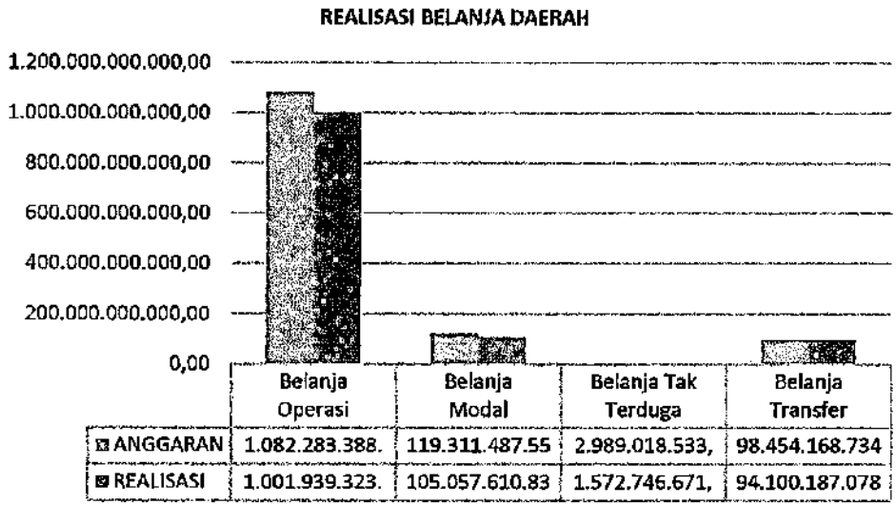
Realisasi belanja secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1) Ditinjau dari kelompok dan Jenis belanja:
   (a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.001.939.323.828,50 atau 92,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.082.283.388.424,77. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp614.482.600.677,00 dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp336.315.007.993,50, serta Belanja Hibah sebesar Rp51.141.715.158,00.
   (b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp105.057.610.836,46 atau 88,05% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp119.311.487.550,09. Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin Rp26.003.072.851,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.521.830.983,46, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.693.474.292,00, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.754.227.190,00, dan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp1.085.005.520,00.

(c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.572.746.671,00 atau 52,62% dari anggarannya sebesar Rp2.989.018.533,34.

(d) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp94.100.187.078,00 atau 95,58% dari anggarannya sebesar Rp98.454.168.734,98.

Grafik 3
REALISASI BELANJA DAERAH



	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer
ANGGARAN	1.082.283.388.	119.311.487.55	2.989.018.533,	98.454.168.734
REALISASI	1.001.939.323.	105.057.610.83	1.572.746.671,	94.100.187.078

7.3.1.3 Surplus/Defisit

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami Surplus sebesar Rp28.886.132.569,32, Realisasi pendapatan sebesar Rp1.231.556.000.983,28 lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp1.202.669.868.413,96.

7.3.1.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp41.755.490.538,18 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama tahun 2025.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025 sebesar Rp44.255.490.538,18 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Dana Bergulir sebesar Rp91.478.966,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

7.3.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Jumlah SiLPA untuk akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp70.641.623.107,50 yang merupakan selisih lebih selama satu periode pelaporan antara:

1) Realisasi penerimaan yang mencakup: Pendapatan Daerah sebesar Rp1.231.556.000.983,28 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp44.255.490.538,18.

2) Realisasi pengeluaran mencakup Belanja Daerah sebesar Rp1.202.669.868.413,96 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7.3.2.1 Pendapatan Daerah

Beberapa komponen pendapatan daerah tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Namun secara keseluruhan target pendapatan mencapai 97,64% dari anggaran yang telah ditetapkan.

7.3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2025 antara lain:

a. Terkait adanya rasionalisasi anggaran perubahan ABPD berimbas pada pelaksanaan realisasi belanja kegiatan yang dilakukan rasionalisasi sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat pelaksanaannya.
b. Kondisi keuangan yang belum optimal untuk menunjang pelaksanaan belanja kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terealisasi dan belanja modal yang sudah realisasi fisik sudah 100% akan tetapi realisasi keuangannya belum dapat direalisasikan sehingga tercatat sebagai utang belanja.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi online dan program *tax monitoring*;
4. Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;

6. Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Karimun, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya;
7. Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
8. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis data dan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan adalah untuk tujuan umum *(general purpose financial statements)* dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dengan identitas sebagai berikut:

a. Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
b. Alamat : Jl. Jend. Sudirman – Poros Tanjung Balai Karimun
c. Bupati : **ISKANDARSYAH**
d. Wakil Bupati : **ROCKY MARCIANO BAWOLE**
e. Pj. Sekretaris Daerah : **DJUNAIDI**

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan Pemerintahan Kabupaten Karimun terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Dinas Sosial merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
10. Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
14. Dinas Perhubungan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
15. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga meupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
20. Dinas Perikanan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
21. Dinas Pariwisata meupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
22. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
23. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertangung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
25. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
28. Inspektorat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
29. Kecamatan Karimun merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

30. Kecamatan Meral merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
31. Kecamatan Meral Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
32. Kecamatan Tebing merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
33. Kecamatan Kundur merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
34. Kecamatan Ungar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
35. Kecamatan Kundur Utara merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
36. Kecamatan Belat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
37. Kecamatan Kundur Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
38. Kecamatan Moro merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
39. Kecamatan Buru merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
40. Kecamatan Durai merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
41. Kecamatan Selat Gelam merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
42. Kecamatan Sugie Besar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.2.1 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

7.4.2.2 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas;
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.4.3.1 Kebijakan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02.Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

2) Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer - LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer - LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pendapatan Transfer mencakup 1) transfer dari pemerintah pusat berupa (a) dana perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, (b) dana lainnya yakni dana penyesuaian serta 2) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendaptan Transfer - LRA (Dana Perimbangan). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah - LRA, Dana Darurat - LRA, dan Pendapatan Lainnya - LRA.

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

B. Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pada dasarnya belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

a) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau bendahara pengeluaran

berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

(3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

(4) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (PSAP 02 Paragraf 7). Transfer terbagi ke dalam 2 (Dua) bagian antara lain:

a. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat (PSAP 02 Paragraf 40), transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.
b. Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. (PSAP 02 Paragraf 40).

Sesuai dengan PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari: Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

b) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja.

c) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

d) Klasifikasi menurut Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

(1) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

(2) Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

C. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan *asas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

7.4.3.2 Kebijakan Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

a. Surplus/Defisit – LRA

   adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).

b. Pembiayaan Neto

   adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)

   adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

d. Perubahan SAL

   adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

7.4.3.3 Kebijakan Penyajian Neraca

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. (PSAP 01 paragraf 54 dan 55). Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
2. Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Aset lancar terdiri atas:

(1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (PSAP 03 Paragraf 8). Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan terdiri atas:

(a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
(b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah;
(c) Uang tunai (uang tunai dan logam) di Bendahara Umum Daerah. Kebijakan akuntansi:
(d) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
(e) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember;
(f) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara;
(g) Tidak termasuk kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, iuran bapetarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek);
(h) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 22 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

Kebijakan akuntansi meliputi:

(a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

(b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan);

(c) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 23 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

(4) Kas Lainnya

Merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(6) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

(b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

(c) Berisiko rendah.

(7) Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis No. 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010, yang dibedakan menjadi:

a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah.Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang – PP No. 24 Tahun 2005).

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b) Jumlah piutang dapat diukur;
c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.
b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.

e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

(8) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:

a. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

b. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum

daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.

b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

(9) Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a. paling sedikit sebesar 5% (lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(11) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

(12) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

(a) Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

(b) Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;

(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

(13) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yang terbagi atas investasi nonpermanen dan permanen.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(a) Investasi dalam Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (Permendagri Nomor 73 tahun 2015).

Kebijakan akuntansi: Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidah tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

(b) Penyisihan dana bergulir

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a. paling sedikit sebesar 5% (*lima permil*) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% (*sepuluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (*lima puluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (*seratus perseratus*) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(c) Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara (SUN)

Investasi dalam obligasi/SUN yang dimaksud disini adalah pembelian obligasi/SUN untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya, misalnya pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat sebesar nilai nominal obligasi.

Kebijakan akuntansi Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

(d) Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

Penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

Kebijakan akuntansi, Investasi dalam Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(e) Investasi nonpermanen lainnya,

Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Kebijakan akuntansi:mengatur Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi ini dilakukan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Bentuk investasi permanen tersebut antara lain:

- Penyertaan modal pemerintah daerah;
- Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

Penyertaan modal pemerintah tersebut dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

(3) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

Kebijakan akuntansi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruh besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih direalisasikan.

(14) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Nilai rupiah pembelian barang/ material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;

a) bertambah ekonomis/efisien dan/atau

b) bertambah umur ekonomis dan/atau

c) bertambah volume dan/atau

d) bertambah kapasitas produksi dan/atau

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut, sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh puluh juta rupiah*).

d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

(1) Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akun peralatan dan mesin, meliputi alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-alat keamanan.

(c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi bangunan gedung dan bangunan monumen.

Untuk akun bangunan gedung, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah dan gedung lainnya yang sejenis.

Sedangkan untuk akun bangunan monumen, meliputi candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Untuk akun jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, dan lain sejenisnya. Akun bangunan air/irigasi meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan *polde*, bangunan air kotor dan bangunan air lain sejenisnya. Akun instalasi meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain sejenisnya. Akun jaringan liputi jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain-lain sejenisnya.

(e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, dan hewan ternak serta tanaman.

(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(2) Pengukuran Aset Tetap

(a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

(b) Pengukuran dan penyajian aset tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada belanja modal tanpa memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi *(capitalization treshold)* mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi;

(c) Selain itu, terhadap seluruh aset tetap tersebut hingga saat ini tidak disusutkan baik dalam hal penyajian pada Neraca maupun pengakuan beban;

(d) Biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap (belanja pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan;

(e) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Karimun;

(f) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang, dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
b. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, *appraisal* dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
c. Aset tetap yang akan disusutkan agar dapat memperhatikan hasil revaluasi. Untuk menghitung penyusutannya, aset tetap yang diperoleh sebelum dilakukan revaluasi harus ditetapkan sisa masa manfaat pada saat dilakukan revaluasi. Selanjutnya dihitung sisa masa manfaat antara dilakukan revaluasi dan penerapan penyusutan.
d. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
   (1) Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
   (2) Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
   (3) Penentuan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
   (4) Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
e. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
f. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
g. Untuk perhitungan penyusutan, dilakukan dengan pendekatan sebulanan yang mana penyajian pelaporan penyusutan aset tetap per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.

h. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

i. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

j. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

(15) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (PSAP 01 paragraf 65).

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(16) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (*dua belas*) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

c. Aset Tidak Berwujud;

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (PSAP 01 Paragraf 8).

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas.
3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4) *Software* berupa *software* komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

(17) Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun akumulasi amortisasi.

Untuk penghitungan amortisasi aset dilakukan dengan pendekatan bulanan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya yang mana penyajian pelaporan amortisasi aset lainnya per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan

tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban muncul antara lain karena:

a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
d. Pendapatan Diterima Dimuka;
e. Utang Belanja; dan
f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah

(dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.4 Kebijakan Penyajian Laporan Operasional

A. Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

   Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

   Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

   Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

   Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan: *1). Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek dan 2). Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi.*

c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan–LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Akun pada Pendapatan LO meliputi: 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Pendapatan Transfer, 3). Lain-lain Pendapatan yang sah, 4). Surplus Non Operasional, dan 5). Pendapatan Luar Biasa.

B. Definisi Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak siginfikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pelakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Akun pada Beban terdiri dari: 1) Beban Operasi, 2) Beban Transfer, 3). Defisit Non Operasional, dan 4). Beban Luar Biasa.

7.4.3.5 Kebijakan Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan akuntasi pemerintah Kabupaten Karimun tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.6 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua peneriman kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivas berikut:

a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *brutto* yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari (a) penerimaan perpajakan, (b) penerimaan retribusi, (c) penerimaan hibah, (d) penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya, (e) lain-lain PAD yang sah dan (f) transfer masuk.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran (a) belanja pegawai, (b) belanja barang, (c) bunga, (d) subsidi, (e) hibah, (f) bantuan sosial, (g) belanja lain-lain/tak terduga, dan (h) transfer keluar.

b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) penjualan aset tetap dan (b) penjualan aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) perolehan aset tetap dan (b) perolehan aset lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penggunaan SiLPA tahun lalu, (b) penerimaan pinjaman, (c) penerimaan hasil penjualan obligasi/surat utang negara, (d) penerimaan dari divestasi, (e) penerimaan kembali pinjaman, dan (f) pencairan dana cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penyertaan modal pemerintah, (b) pembayaran pokok pinjaman, (c) pemberian pinjaman jangka panjang, dan (d) pembentukan dana cadangan.

d) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7.4.3.7 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Berikut adalah contoh properti investasi:

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti.

Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    iii. pelepasan;
    iv. penyusutan;
    v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    vi. perubahan lain.
f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
    ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
    iii. tanggal efektif penilaian kembali;
    iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
    v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
    vi. nilai tercatat properti investasi
g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

   i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

   ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

   iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

7.4.3.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah

Kriteria Pendapatan Hibah sebagai berikut:

a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;

b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;

c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung daripenerima hibah kepada pemberi hibah;

d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

Pengakuan Pendapatan Hibah

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;

b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan

c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:

i. Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah.
ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutary report*. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Satker K/L atau SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Satker/SKPD penerima.

a. Pencatatan di LRA

   Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Daerah pada saat Kas diterima adalah sebagai berikut:

   DR Akun Perantara xxx.xxx

   CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah) LRA xxx.xxx

b. Pencatatan di Laporan Operasional

   Pengakuan pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan uraian di atas pada kriteria pengakuan pendapatan hibah-LO, jurnal yang dilakukan untuk mencatat pendapatan hibah pada Laporan Operasional adalah:

Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:

DR Kas di Kas Daerah xxx.xxx

CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

DR Aset Tetap - Jenis Aset xxx.xxx

CR Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO xxx.xxx

Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Penyajian

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Kabupaten Karimun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025, serta realisasi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41	372.697.795.861,97	31.546.691.903,53
2	Pendapatan Transfer	846.376.594.728,00	824.878.421.171,00	97,46	944.577.784.597,00	(119.699.363.426,00)
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
Jumlah		1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,64	1.317.275.580.458,97	(85.719.579.475,69)

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.261.374.051.671,00 dan terealisasi sebesar Rp1.231.556.000.983,28 atau 97,64% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.317.275.580.458,97 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp85.719.579.475,69.

Masing – masing realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp404.244.487.765,50 atau sebesar 97,41% dari anggaran sebesar Rp414.997.456.943,00 yang terdiri atas:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Daerah	305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95	36.378.276.005,14
2	Retribusi Daerah	99.207.574.236,00	88.091.029.560,50	88,79	92.536.182.714,23	(4.445.153.153,73)
3	Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.498.596.008,00	2.707.829.987,00	77,40	3.086.978.412,00	(379.148.425,00)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.335.962.408,00	5.719.337.354,91	90,27	5.726.619.877,79	(7.282.522,88)
Jumlah		414.997.456.943,00	404.244.487.765,50	97,41	372.697.795.861,97	31.546.691.903,53

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak (WP) kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp307.726.290.863,09 atau sebesar 100,58% dari anggaran sebesar Rp305.955.324.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2024 (Rp)	(Rp)
1	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.857.879.083,50	132,71	1.589.732.351,00	268.146.732,50
2	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00	9.617.367,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00	(9.036.000,00)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	212.000.000.000,00	221.888.350.600,00	104,57	207.713.960.295,00	13.974.390.305,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,38	11.118.164.370,00	583.419.259,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.200.000.000,00	17.120.678.553,00	186,09	12.857.938.104,00	4.262.740.449,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	35.255.000.000,00	41.174.359.233,59	116,79	37.896.189.718,95	3.278.169.514,64
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00	9.624.799.678,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,63	0,00	4.386.028.700,00
Jumlah		305.955.324.291,00	307.726.290.863,09	100,58	271.348.014.857,95	36.378.276.005,14

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp36.378.276.005,14.

7.5.1.1.1.1.1 Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang yang menggunakan reklame, sedangkan obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), dilakukan petugas dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.857.879.083,50 atau sebesar 132,71% dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Pajak Reklame

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron	1.011.080.000,00	1.560.793.169,50	154,37	1.156.235.685,00	404.557.484,50
2	Reklame Kain	364.920.000,00	259.073.945,00	70,99	404.135.369,00	(145.061.424,00)
3	Reklame Melekat/Stiker	15.000.000,00	21.185.694,00	141,24	12.159.506,00	9.026.188,00
4	Reklame Berjalan	9.000.000,00	16.826.275,00	186,96	17.201.791,00	(375.516,00)
Jumlah		**1.400.000.000,00**	**1.857.879.083,50**	**132,71**	**1.589.732.351,00**	**268.146.732,50**

Realisasi pendapatan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.857.879.083,50, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Reklame sebesar Rp143.584.040,00, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar Rp1.714.295.043,50.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.857.879.083,50 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.589.732.351,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Reklame, antara lain:

1. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron mengalami kenaikan dikarenakan perpanjangan masa tayang WP reklame pada bulan Oktober s.d desember Tahun 2025.
2. Pajak Reklame Kain mengalami penurunan dikarenakan kurangnya WP yang melakukan iklan melalui reklame kain.
3. Pajak Reklame Melekat/Stiker mengalami kenaikan dikarenakan WP melakukan promosi melalui reklame.
4. Pajak Reklame Berjalan mencapai target dikarenakan WP melakukan promosi melalui reklame.

7.5.1.1.1.1.2 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau permanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp150.071.386,00 atau sebesar 105,68% dari anggaran sebesar Rp142.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26

Pajak Air Tanah

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Air Tanah	142.000.000,00	150.071.386,00	105,68	140.454.019,00	9.617.367,00
Jumlah		**142.000.000,00**	**150.071.386,00**	**105,68**	**140.454.019,00**	**9.617.367,00**

Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp150.071.386,00, diperoleh dari pembayaran atas SKPD yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar Rp 150.155.206,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp150.071.386,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp142.000.000,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah adalah adanya peningkatan komsumsi air dan mempengaruhi pembayaran dikarenakan jumlah WP pada perumahan yang meningkat dari beberapa perumahan khususnya bagi penghuni baru.

7.5.1.1.1.3 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00 atau sebesar 64,40% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Pajak Sarang Burung Walet

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	22.540.000,00	64,40	31.576.000,00	(9.036.000,00)
Jumlah		**35.000.000,00**	**22.540.000,00**	**64,40**	**31.576.000,00**	**(9.036.000,00)**

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp22.540.000,00. Dimana didalamnya terdapat penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp7.080.000,00

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tidak memenuhi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.036.000,00. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah penangkaran yang menjadi Wajib Pajak Sarang Burung Walet banyak yang tutup.

7.5.1.1.1.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak MBLB dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00 atau sebesar 104,57% dari anggaran sebesar Rp212.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Batu Granit (Granit/Andesit)	205.000.000.000,00	212.093.049.600,00	103,46	195.472.098.000,00	16.620.951.600,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil	5.000.000.000,00	6.344.501.000,00	126,89	9.234.352.195,00	(2.889.851.195,00)
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	3.250.800.000,00	162,54	3.007.510.100,00	243.289.900,00
Jumlah		**212.000.000.000,00**	**221.688.350.600,00**	**104,57**	**207.713.960.295,00**	**13.974.390.305,00**

Realisasi pendapatan Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00, penerimaan tersebut diperoleh dari pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp20.154.625.050,00 dan penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp201.533.725.550,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp221.688.350.600,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp212.000.000.000,00 dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp13.974.390.305,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak MBLB dikarenakan oleh:

1. Pajak Granit/Andesit Penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan pada akhir tahun mengalami peningkatan sesuai dengan permintaan dan perusahaan yang tutup sudah beroperasi kembali.
2. Pajak Pasir dan Kerikil Meningkatnya aktifitas penjualan oleh perusahaan akibat adanya pekerjaan oleh pihak ketiga.
3. Pajak MBLB Lainnya Meningkatnya aktifitas penjualan oleh perusahaan akibat adanya pekerjaan oleh pihak ketiga.

7.5.1.1.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan ObyekPBB-P2 adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan dipungut. PBB-P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) s/d 1.000.000.000,00 dan 0,3% untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,3%, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu NJOP, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00 atau sebesar 106,38% dari anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBB-P2	11.000.000.000,00	11.701.583.629,00	106,38	11.118.164.370,00	583.419.259,00
Jumlah		**11.000.000.000,00**	**11.701.583.629,00**	**106,38**	**11.118.164.370,00**	**583.419.259,00**

Realisasi pendapatan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp11.701.583.629,00 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp10.295.758.421,00, dan SPPT yang diterbitkan di tahun sebelumnya sebesar Rp1.405.825.208,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.701.583.629,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp583.419.259,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan PBB-P2 adalah bertambahnya WP baru dan adanya pembayaran piutang tertagih oleh WP.

7.5.1.1.1.6 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang terdiri dari pemindahan hak dan pemberian hak baru. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan, sedangkan Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. BPHTB ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak

yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi BPHTB Tahun 2025 sebesar Rp17.120.678.553,00 atau sebesar 186,09% dari anggaran sebesar Rp9.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	8.884.703.272,00	98,72	12.553.748.484,00	(3.669.045.212,00)
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	8.235.975.281,00	4.117,99	304.189.620,00	7.931.785.661,00
Jumlah		**9.200.000.000,00**	**17.120.678.553,00**	**186,09**	**12.857.938.104,00**	**4.262.740.449,00**

Realisasi pendapatan BPHTB Tahun 2025 sebesar Rp17.120.678.553,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 17.120.678.553,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp17.120.678.553,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.262.740.449,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan BPHTB adalah:

1. Karena adanya pembayaran oleh PT Agro Karimun Mandiri terhadap pemindahan hak baru maka terjadi peningkatan penerimaan pada BPHTB;
2. Adanya program Pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembayaran BPHTB nol rupiah; dan
3. Adanya pembayaran oleh PT Agro Karimun Mandiri dengan jumlah yg signifikan sehingga pemberian hak baru menjadi meningkat.

7.5.1.1.1.1.7 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman

PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Subjek PBJT Makanan dan/ atau Minuman adalah adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa makanan dan/ atau minuman. PBJT Makanan dan/ atau Minuman ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Realisasi PBJT Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp9.412.089.917,59 atau sebesar 134,46% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Makanan dan/ atau Minuman

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Restoran	5.150.000.000,00	6.849.857.562,59	133,01	4.420.277.868,95	2.429.579.693,64
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.850.000.000,00	2.562.232.355,00	138,50	2.927.470.914,00	(365.238.559,00)
Jumlah		7.000.000.000,00	9.412.089.917,59	134,46	7.347.748.782,95	2.064.341.134,64

Realisasi pendapatan PBJT Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp9.412.089.917,59 diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Restoran sebesar Rp306.259.449,59 penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp9.001.839.008,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp103.991.460,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Makanan dan/ atau Minuman melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.064.341.134,64. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak PBJTMakanan dan/ atau Minuman adalah adanya penambahan WP baru, daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.1.8 PBJT Tenaga Listrik

PBJT Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa atas konsumsi tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek PBJT Tenaga Listrik adalah konsumen tenaga listrik. PBJT Tenaga Listrik ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 6% untuk pengguna golongan sosial, rumah tangga dan publik, 7,5% untuk pengguna bisnis dan layanan khusus, 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, 1,5% konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.

Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00 atau sebesar 110,21% dari anggaran sebesar Rp18.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tenaga Listrik

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)
Jumlah		18.500.000.000,00	20.389.502.150,00	110,21	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)

Realisasi pendapatan PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp20.389.502.150,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik memenuhi target pendapatan yang dianggarkan, namun menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp313.251.168,00. Hal-hal yang menyebabkan penurunan penerimaan PBJT Tenaga Listrik adalah disebabkan oleh faktor kurangnya ketaatan masyarakat pengguna, tunggakan dan kurangnya penagihan oleh pihak PLN atas tunggakan tersebut.

7.5.1.1.1.1.9 PBJT Jasa Perhotelan

PBJT Jasa Perhotelan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Subjek PBJT Jasa Perhotelan adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00 atau sebesar 117,28% dari anggaran sebesar Rp7.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Perhotelan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Hotel	4.250.000.000,00	4.976.382.977,00	117,09	4.378.378.586,00	598.004.391,00
2	PBJT-Losmen	25.000.000,00	25.460.000,00	101,84	30.385.000,00	(4.925.000,00)
3	PBJT-Rumah Penginapan/Guest house/Bungalo/ Resort/Cottage	3.425.000.000,00	4.028.863.483,00	117,63	3.425.035.877,00	603.827.606,00
Jumlah		7.700.000.000,00	9.030.706.460,00	117,28	7.833.799.463,00	1.196.906.997,00

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Perhotelan sebesar Rp23.506.990,00, penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp8.959.186.869,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp48.012.601,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp9.030.706.460,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.196.906.997,00, yang disebabkan oleh adanya penambahan WP baru , daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.1.10 PBJT Jasa Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek PBJT Jasa Parkir adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan /atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). PBJT Jasa Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp65.281.300,00 atau sebesar 118,69% dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Parkir

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	55.000.000,00	65.281.300,00	118,69	60.806.100,00	4.475.200,00
Jumlah		**55.000.000,00**	**65.281.300,00**	**118,69**	**60.806.100,00**	**4.475.200,00**

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp65.281.300,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 65.281.300,00. Jumlah tersebut sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp 13.049.300,00.

7.5.1.1.1.1.11 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp2.276.779.406,00 atau sebesar 113,84% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Kesenian dan Hiburan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
2	PBJT-Permainan Ketangkasan	116.000.000,00	129.448.262,00	111,59	119.364.079,00	10.084.183,00
3	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	155.000.000,00	178.763.860,00	115,33	95.400.263,00	83.363.597,00
4	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2.500.000,00	8.386.500,00	335,46	9.651.500,00	(1.265.000,00)
5	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	160.000.000,00	184.117.214,00	115,07	170.377.527,00	13.739.687,00
6	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.566.500.000,00	1.773.438.570,00	113,21	1.556.288.686,00	217.149.884,00
Jumlah		**2.000.000.000,00**	**2.276.779.406,00**	**113,84**	**1.951.082.055,00**	**326.697.351,00**

Realisasi pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp2.276.779.406,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp 2.750.000,00, penerimaan pembayaran atas SPTPD yang diterbitkan di Tahun 2025 sebesar Rp 2.234.394.743,00. Dimana didalamnya sudah termasuk penerimaan pembayaran atas SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp 39.634.663,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp325.697.351,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah adanya penambahan WP baru ,daya beli masyarakat dan tingkat kunjungan.

7.5.1.1.1.1.12 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB adalah tambahan pajak sebesar 66% dari pokok PKB yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupaten/ kota, efektif berlaku mulai 5 Januari 2025 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pajak MBLB dan Opsen MBLB. Ini bertujuan mempercepat bagi hasil pajak ke daerah.

Realisasi Opsen PKB Tahun 2025 sebesar Rp9.624.799.678,00 atau sebesar 40,99% dari anggaran sebesar Rp23.480.376.713,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.480.376.713,00	9.624.799.678,00	40,99	0,00	9.624.799.678,00
Jumlah		**23.480.376.713,00**	**9.624.799.678,00**	**40,99**	**0,00**	**9.624.799.678,00**

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan dari Opsen PKB sebesar Rp9.624.799.678,00 tidak mencapai target pendapatan yang dianggarkan, dikarenakan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepri namun transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepri.

7.5.1.1.1.13 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan pajak atas pokok BBNKB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, berlaku efektif per 5 Januari 2025 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pajak MBLB dan Opsen MBLB. Tujuannya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan memperbaiki infrastruktur serta pelayanan publik.

Realisasi Opsen BBNKB Tahun 2025 sebesar Rp4.386.028.700,00 atau sebesar 32,63% dari anggaran sebesar Rp13.442.947.578,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.442.947.578,00	4.386.028.700,00	32,63	0,00	4.386.028.700,00
Jumlah		**13.442.947.578,00**	**4.386.028.700,00**	**32,63**	**0,00**	**4.386.028.700,00**

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan dari Opsen BBNKB sebesar Rp4.386.028.700,00 tidak mencapai target pendapatan yang dianggarkan.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Retribusi Daerah yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp88.091.029.560,50 atau 88,79% dari anggaran sebesar Rp99.207.574.236,00 berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Jasa Umum	94.967.134.236,00	84.721.337.055,50	89,21	88.757.760.425,10	(4.036.423.369,60)
2	Retribusi Jasa Usaha	240.440.000,00	293.495.000,00	122,07	225.765.000,00	67.730.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	3.076.197.505,00	76,90	3.552.657.289,13	(476.459.784,13)
Jumlah		**99.207.574.236,00**	**88.091.029.560,50**	**88,79**	**92.536.182.714,23**	**(4.445.153.153,73)**

Data tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp99.207.574.236,00 terealisasi sebesar Rp88.091.029.560,50 atau 88,79%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp92.536.182.714,23 mengalami penurunan sebesar Rp4.445.153.153,73.

Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut diatas, diantaranya sebesar Rp84.721.337.055,50 atau 89,21% dari total realisasi pendapatan Retribusi Daerah diperoleh dari obyek Retribusi Jasa Umum yang merupakan pemberi kontribusi Retribusi Daerah terbesar.

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp84.721.337.055,50 atau sebesar 89,21% dari anggaran sebesar Rp94.967.134.236,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.092.134.236,00	83.955.974.655,50	89,23	87.807.160.003,10	(3.851.185.347,60)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00	412.024.400,00	71,66	544.918.200,00	(132.893.800,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	353.338.000,00	117,78	309.285.940,00	44.052.060,00
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	0,00	0,00	0,00	96.396.282,00	(96.396.282,00)
JUMLAH		**94.967.134.236,00**	**84.721.337.055,50**	**89,21**	**88.757.760.425,10**	**(4.036.423.369,60)**

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 sebesar Rp94.967.134.236,00 terealisasi sebesar Rp84.721.337.055,50 atau 89,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.757.760.425,10 mengalami penurunan sebesar Rp4.036.423.369,60.

Kontribusi realisasi terbesar terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp83.955.974.655,50 atau sebesar 99,10% dari total Retribusi Jasa Umum. Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga dalam mengelola parkir berdasarkan PKS Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dengan PT. MSM TIGA MATRA SATRIA tentang pengelolaan Parkir Nomor 00.1.11/596/DISHUB-PT. MSM. PKS/2025 Nomor 001/PKS-MSMTMS/VII/2025 dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keutungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, pelayanan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp293.495.000,00 atau sebesar 122,07% dari anggaran sebesar Rp240.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.580.000,00	(9.580.000,00)
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	15.000.000,00	15.200.000,00	101,33	0,00	15.200.000,00
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	218.000.000,00	278.295.000,00	127,66	216.185.000,00	62.110.000,00
JUMLAH		**240.440.000,00**	**293.495.000,00**	**122,07**	**225.765.000,00**	**67.730.000,00**

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp240.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp293.495.000,00 atau 122,07%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp225.765.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp67.730.000,00. Kontribusi terbesar pada realisasi Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp278.295.000,00 atau sebesar 122,07% dari total Retribusi Jasa Usaha. Tarif Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pribadi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp3.076.197.505,00 atau sebesar 76,90% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00. Pendapatan ini direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.982.567.305,00	99,13	1.502.362.789,13	480.204.515,87
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	1.093.630.200,00	54,68	2.050.294.500,00	(956.664.300,00)
Jumlah		4.000.000.000,00	3.076.197.505,00	76,90	3.552.657.289,13	(476.459.784,13)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.076.197.505,00 atau 76,90%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.552.657.289,13 mengalami penurunan sebesar Rp476.459.784,13. Kontribusi yang terbesar pada realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1.982.567.305,00 atau sebesar 99,13% dari total Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan. Tarif Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi PBG Tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan menurunnya permohonan PBG, sehingga tidak ada tagihan retribusinya. Sedangkan pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan Perusahaan Pengguna TKA tidak melakukan perpanjangan izin kerja TKA-nya.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp2.707.829.987,00 atau sebesar 77,40% dari anggaran sebesar Rp3.498.596.008,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.086.978.412,00 mengalami penurunan sebesar Rp379.148.425,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan deviden yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	1.363.425.644,00	100,00	1.141.358.177,00	222.067.467,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.335.170.364,00	640.782.111,00	47,99	900.000.000,00	(259.217.889,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM Tirta Karimun	800.000.000,00	703.622.232,00	87,95	1.045.620.235,00	(341.998.003,00)
Jumlah		**3.498.596.008,00**	**2.707.829.987,00**	**77,40**	**3.086.978.412,00**	**(379.148.425,00)**

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 mencapai Rp5.719.337.354,91 atau sebesar 90,27% dari anggaran sebesar Rp6.335.962.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2026			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	201.247.000,00	261.439.800,00	129,91	0,00	261.439.800,00
2	Jasa Giro	250.000.000,00	468.712.176,00	187,48	232.941.747,00	235.770.429,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	140.000.000,00	569.575.195,62	406,84	0,00	569.575.195,62
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87	(7.482.141,21)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68	(339.008.400,68)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	226.195.000,00	395.371.745,18	174,79	400.169.930,43	(4.798.185,25)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	164.000,00	0,00	6.795.292,00	(6.631.292,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	877.006.027,45	0,00	264.483.107,00	612.522.920,45
10	Pendapatan BLUD	1.818.058.428,00	1.117.430.259,00	61,46	1.567.245.481,81	(469.815.222,81)
Jumlah		**6.335.962.408,00**	**5.719.337.354,91**	**90,27**	**5.726.819.877,79**	**(7.282.522,88)**

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp5.719.337.354,91 di atas, sebagian besar realisasi berasal dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu sebesar Rp1.987.642.127,66 atau 53,71% dari total penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

7.5.1.1.1.4.1 Jasa Giro

Jasa Giro adalah keuntungan yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah atas penyimpanan dana pada rekening tabungan. Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Kas di Bendahara, dan Jasa Giro pada Rekening Dana Bos. Dasar pembukaan Rekening Giro tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 228 Tahun 2025. Total realisasi Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp468.712.176,00 atau sebesar 187,48% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Jasa Giro Kas Daerah	160.000.000,00	359.406.746,00	224,63	131.296.572,00	228.110.174,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.000.000,00	18.461.277,00	46,15	49.652.129,00	(31.190.852,00)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	65.078.277,00	130,16	51.993.046,00	13.085.231,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	25.765.876,00	0,00	0,00	25.765.876,00
Jumlah		**250.000.000,00**	**468.712.176,00**	**187,48**	**232.941.747,00**	**235.770.429,00**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp468.712.176,00 atau 187,48%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp232.941.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.770.429,00.

7.5.1.1.1.4.2 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp11.441.033,00 merupakan Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang diperoleh dari bunga yang dibayarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lain kepada pemerintah daerah atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito atau investasi jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Pendapatan Bunga Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	11.441.033,00	0,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)
Jumlah		**0,00**	**11.441.033,00**	**0,00**	**870.296.659,00**	**(858.855.626,00)**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp11.441.033,00 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp870.296.659,00 mengalami penurunan sebesar Rp858.855.626,00.

7.5.1.1.1.4.3 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp569.575.195,62 atau sebesar 406,83% dari anggaran sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2026			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	569.575.195,62	0,00	0,00	569.575.195,62
Jumlah		**140.000.000,00**	**569.575.195,62**	**406,84**	**0,00**	**569.575.195,62**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp569.575.195,62 atau 406,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp569.575.195,62.

7.5.1.1.1.4.4 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar Rp1.987.642.127,66 atau sebesar 53,71% dari anggaran sebesar Rp3.700.461.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.700.461.980,00	1.987.642.127,66	53,71	1.995.124.268,87	(7.482.141,21)
Jumlah		**3.700.461.980,00**	**1.987.642.127,66**	**53,71**	**1.995.124.268,87**	**(7.482.141,21)**

Realisasi penerimaan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada Bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar Rp1.987.642.127,66. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.995.124.268,87 mengalami penurunan sebesar Rp7.482.141,21. Nilai pendapatan yang hanya terealisasi sebesar 53,71% dari anggarannya tersebut dikarenakan proyeksi penganggaran pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang kurang optimal serta dasar asumsi yang digunakan kurang tepat.

7.5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp30.554.991,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Pendapatan Denda atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	0,00	30.554.991,00	0,00	369.563.391,68	(339.008.400,68)
Jumlah		**0,00**	**30.554.991,00**	**0,00**	**369.563.391,68**	**(339.008.400,68)**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp30.554.991,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp369.563.391,68 mengalami penurunan sebesar Rp339.008.400,68.

7.5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp395.371.745,18 atau 174,79% dari anggaran sebesar Rp226.195.000,00 merupakan denda dari Pajak Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 49
Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	7.644.826,00	(7.644.826,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	57.425.890,43	(57.425.890,43)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.867.264,00	(3.867.264,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	37.487.392,00	187,44	20.287.063,00	17.200.329,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	533.753,00	(533.753,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	300.000,00	413.827,00	137,94	702.022,00	(288.195,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00	265.800,00	88,60	473.000,00	(207.200,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	25.301.800,00	126,51	21.299.220,00	4.002.580,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	131.835.000,00	207.067.362,00	157,07	287.936.892,00	(80.869.530,00)
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	53.760.000,00	103.160.164,18	191,89	0,00	103.160.164,18
11	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	21.675.400,00	0,00	0,00	21.675.400,00
Jumlah		**226.195.000,00**	**395.371.745,18**	**174,79**	**400.169.930,43**	**(4.798.185,25)**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 sebesar Rp226.195.000,00 dan realisasi sebesar Rp395.371.745,18. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp400.169.930,43 mengalami penurunan sebesar Rp4.798.185,25.

7.5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Denda Retribusi Daerah sebesar Rp164.000,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 merupakan denda dari pembayaran Retribusi Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 50
Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	6.795.292,00	(6.795.292,00)
Jumlah		**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**6.795.292,00**	**(6.631.292,00)**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp164.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.795.292,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.631.292,00.

7.5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp877.006.027,45 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	20.128.904,67	0,00	0,00	20.128.904,67
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	165.857.591,00	0,00	0,00	165.857.591,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.027.234,00	0,00	0,00	1.027.234,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	44.055.000,00	0,00	0,00	44.055.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	211.159.818,89	0,00	0,00	211.159.818,89
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	149.286.029,60	0,00	0,00	149.286.029,60
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	(2.540.000,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	18.089.947,45	0,00	18.158.022,00	(68.074,55)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	246.377.001,84	0,00	8.550.835,00	237.826.166,84

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	8.300.340,00	(8.300.340,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	21.024.500,00	0,00	226.933.910,00	(205.909.410,00)
Jumlah		**0,00**	***877.006.027,45***	**0,00**	***264.483.107,00***	***612.522.920,45***

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp877.006.027,45. Merupakan pendapatan dari pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas, Belanja Pegawai, Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Barang dan Jasa BOS.

7.5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah terdiri dari pendapatan yang diperoleh diluar dari Jasa Pelayanan Umum BLUD RSUD Muhammad Sani, RSUD Tanjung Batu Kundur, dan pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dari UPT Puskesmas Tanjung Balai, UPT Puskesmas Meral, UPT Puskesmas Tanjung Batu, UPT Puskesmas Kundur Barat, UPT Puskesmas Tanjung Berlian, UPT Puskesmas Tebing, UPT Puskesmas Buru, UPT Puskesmas Moro, UPT Puskesmas Durai, UPT Puskesmas Niur Permai, UPT Puskesmas Meral Barat, UPT Puskesmas Belat, dan UPT Puskesmas Ungar. Realisasi Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp1.117.430.259,00 dari anggaran sebesar Rp1.818.058.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	558.058.428,00	217.519.505,00	38,98	259.070.719,81	(41.551.214,81)
2	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.260.000.000,00	893.874.446,00	70,94	1.328.154.134,00	(434.279.688,00)
3	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	6.036.308,00	0,00	20.628,00	6.015.680,00
Jumlah		**1.818.058.428,00**	**1.117.430.259,00**	**61,46**	**1.587.245.481,81**	**(469.815.222,81)**

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp1.818.058.428,00 dan realisasi sebesar Rp1.117.430.259,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.587.245.481,81 mengalami penurunan sebesar Rp469.815.222,81.

7.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karimun dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah. Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 430 tahun 2025 Tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Provinsi Kepualauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 431 Tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp824.878.421.171,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp846.376.594.728,00 yang terdiri atas:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	730.968.534.000,00	699.953.956.027,00	95,76	807.544.910.421,00	(107.590.954.394,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	52.676.697.000,00	52.266.126.740,00	99,22	60.218.461.000,00	(7.952.334.260,00)
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	62.731.363.728,00	72.658.338.404,00	115,82	76.814.413.176,00	(4.156.074.772,00)
	Jumlah	**846.376.594.728,00**	**824.878.421.171,00**	**97,46**	**944.577.784.597,00**	**(119.699.363.426,00)**

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp699.953.956.027,00 atau sebesar 95,76% dari anggaran sebesar Rp730.968.534.000,00 yang terdiri atas:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	60.350.303.000,00	47.828.063.200,00	79,25	35.437.827.410,00	12.390.235.790,00
2	Dana Bagi Hasil/SDA	39.313.931.000,00	34.807.545.000,00	88,54	118.162.575.000,00	(83.355.030.000,00)
3	Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	0,00	1.865.510.000,00
4	Dana Alokasi Umum	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00
5	Dana Alokasi Khusus	159.043.590.000,00	145.450.737.337,00	91,45	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)
	Jumlah	**730.968.534.000,00**	**699.953.956.027,00**	**95,76**	**807.544.910.421,00**	**(107.590.954.394,00)**

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2025 sebesar Rp699.953.956.027,00 mengalami penurunan sebesar Rp107.590.954.394,00. Dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp807.544.910.421,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp699.953.956.027,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun.

7.5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penyajian pada CaLK atas kedua akun ini disajikan bersamaan karena merupakan jenis transfer serupa yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DBH Pajak Tahun 2025 sebesar Rp47.828.063.200,00 dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp36.673.055.000,00 atau 83,23% mengalami penurunan sebesar Rp69.099.284.210,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp153.600.402.410,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.407.876.000,00	13.640.478.100,00	78,36	5.140.906.000,00	8.499.572.100,00
2	DBH PPh Pasal 21	42.942.206.000,00	32.629.080.700,00	75,98	29.244.174.000,00	3.384.906.700,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.558.431.400,00	0,00	1.047.236.000,00	511.195.400,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	221.000,00	73.000,00	33,03	5.511.410,00	(5.438.410,00)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.191.712.000,00	2.667.660.000,00	63,64	23.387.866.000,00	(20.720.206.000,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.229.000,00	13.371.229.000,00	100,00	73.589.072.000,00	(60.217.843.000,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.547.571.000,00	0,00	1.385.496.000,00	162.075.000,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.119.242.000,00	14.590.487.000,00	76,31	12.323.159.000,00	2.267.328.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.267.000,00	6.628.000,00	71,52	0,00	6.628.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	2.622.481.000,00	100,00	3.524.170.000,00	(901.689.000,00)
12	DBH Sawit	1.865.510.000,00	1.865.510.000,00	100,00	3.952.812.000,00	(2.087.302.000,00)
	Jumlah	**101.529.744.000,00**	**84.501.118.200,00**	**83,23**	**153.600.402.410,00**	**(69.099.284.210,00)**

7.5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAU adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaanya dan DAU Yang Ditentukan Penggunaanya yang targetnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DAU Tahun 2025 sebesar Rp470.002.100.490,00 dari anggaran sebesar Rp470.395.200.000,00 atau 99,92%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.048.790.754,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00.

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Alokasi Umum	358.661.624.000,00	358.288.524.490,00	99,89	382.827.580.000,00	(24.539.055.510,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	5.800.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.872.232.000,00	41.872.232.000,00	100,00	7.637.004.736,00	34.235.227.264,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.122.523.000,00	46.122.523.000,00	100,00	27.738.015.000,00	18.384.508.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.918.821.000,00	17.918.821.000,00	100,00	15.602.875.000,00	2.315.946.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	6.347.835.000,00	(6.347.835.000,00)
	Jumlah	470.395.200.000,00	470.002.100.490,00	99,92	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00

7.5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang tertuang dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - DAK Tahun 2025 sebesar Rp145.450.737.337,00 atau 91,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp159.043.590.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp62.540.460.938,00 dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp207.991.198.275,00, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	949.818.000,00	881.903.000,00	92,84	1.092.489.000,00	(210.586.000,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	0,00	0,00	10.339.458.600,00	(10.339.458.600,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	6.657.064.000,00	(6.657.064.000,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	7.046.500.000,00	6.936.611.147,00	98,44	0,00	6.936.611.147,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.658.092.000,00	(2.658.092.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.042.866.000,00	(4.042.866.000,00)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	23.917.735.000,00	(23.917.735.000,00)
8	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	10.601.269.000,00	(10.601.269.000,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.685.000.000,00	(1.685.000.000,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	823.600.000,00	(823.600.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	21.838.459.000,00	(21.838.459.000,00)
12	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.716.345.000,00	45.716.334.500,00	100,00	45.397.857.440,00	318.477.060,00
13	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.395.750.000,00	1.395.750.000,00	100,00	1.855.000.000,00	(459.250.000,00)
14	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.877.520.300,00	69.296.964.093,00	91,33	53.393.122.000,00	15.903.842.093,00
15	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	792.000.000,00	761.305.000,00	96,12	1.545.712.000,00	(784.407.000,00)
16	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.417.027.700,00	6.005.872.732,00	93,59	6.103.506.000,00	(97.633.268,00)
17	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.828.464.000,00	3.814.685.000,00	99,64	0,00	3.814.685.000,00
18	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	1.901.452.368,00	(1.901.452.368,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	216.884.000,00	216.884.000,00	100,00	0,00	216.884.000,00
20	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	6.780.973.317,00	(6.780.973.317,00)
21	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.991.255.000,00	2.831.785.750,00	94,67	1.448.469.450,00	1.383.316.300,00
22	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	527.776.900,00	(527.776.900,00)
23	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	260.315.645,00	64,97	520.000.000,00	(259.684.355,00)
24	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	142.386.000,00	142.386.000,00	100,00	0,00	142.386.000,00
25	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	3.694.389.700,00	(3.694.389.700,00)
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.122.780.000,00	1.116.520.000,00	99,44	1.046.906.500,00	69.613.500,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	90.000.000,00	(45.000.000,00)
29	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.255.899.000,00	502.541.057,00	15,43	0,00	502.541.057,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.622.273.000,00	5.510.879.413,00	63,91	0,00	5.510.879.413,00
	Jumlah	**159.043.590.000,00**	**145.450.737.337,00**	**91,45**	**207.991.198.275,00**	**(62.540.460.938,00)**

7.5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Desa dan Insentif Fiskal yang tertuang dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Dana Desa, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp52.266.126.740,00 atau sebesar 99,22% dari anggaran sebesar Rp52.676.697.000,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Desa	36.624.884.000,00	36.202.677.740,00	98,85	37.748.480.000,00	(1.545.802.260,00)
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	22.469.981.000,00	(22.469.981.000,00)
3	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	16.051.813.000,00	16.063.449.000,00	100,07	0,00	16.063.449.000,00
	Jumlah	**52.676.697.000,00**	**52.266.126.740,00**	**99,22**	**60.218.461.000,00**	**(7.952.334.260,00)**

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 431 Tahun 2025. Adapaun total realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp71.480.578.404,00 atau sebesar 125,60% dari anggaran sebesar Rp56.910.363.728,00 yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang bersumber dari:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.769.660.988,00	8.542.179.769,00	226,60	15.965.593.454,00	(7.423.413.685,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.066.989.536,00	6.170.294.590,00	578,29	10.791.213.685,00	(4.620.919.095,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.822.172.205,00	39.371.432.017,00	116,41	34.475.095.550,00	4.896.336.467,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.454.601.016,00	1.191.346.714,00	81,90	44.765.930,00	1.146.580.784,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.796.939.983,00	16.205.325.294,00	96,48	15.537.744.557,00	667.580.737,00
Jumlah		**56.910.363.728,00**	**71.480.578.404,00**	**125,60**	**76.814.413.176,00**	**(5.333.834.772,00)**

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tersebut merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp71.480.578.404,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran tunda salur Tahun 2024 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, kepada Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 sebesar Rp21.289.602.585,00 dan Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp50.190.975.819.

7.5.1.1.2.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya berupa pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp1.177.760.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.821.000.000,00. Tahun 2024 realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp0,00.

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.821.000.000,00	1.177.760.000,00	20,23	0,00	1.177.760.000,00
Jumlah		**5.821.000.000,00**	**1.177.760.000,00**	**20,23**	**0,00**	**1.177.760.000,00**

7.5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.433.092.046,78 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Atas Pengembalian Hibah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
Jumlah		**0,00**	**2.433.092.046,78**	**0,00**	**0,00**	**2.433.092.046,78**

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp2.433.092.046,78 atau 0%. Dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.433.092.046,78.

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tak Terduga hanya meliputi Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/ Kota kepada Desa. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.202.669.868.413,96 atau sebesar 92,30% dari anggaran sebesar Rp1.303.038.063.243,18 rincian sebagai berikut:

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.001.939.323.828,50 atau sebesar 92,58% dari anggaran sebesar Rp1.082.283.388.424,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2024 (Rp)	
1	Belanja Pegawai	641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00	61.602.870.718,00
2	Belanja Barang dan Jasa	376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34	(104.185.223.117,84)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)
5	Belanja Hibah	63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13	(50.664.904.786,13)
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.082.283.388.424,77	1.001.939.323.828,50	92,58	1.095.223.928.705,47	(93.284.602.876,97)

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 mencapai Rp614.482.600.677,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp641.846.539.075,78. Belanja Pegawai tersebut terdiri atas:

Tabel 63
Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2024 (Rp)	
1	Gaji dan Tunjangan	394.084.327.549,38	382.382.922.829,00	97,03	331.290.685.368,00	51.092.237.461,00
2	Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS	227.276.928.805,40	213.357.975.072,00	93,88	123.406.819.641,00	89.951.155.431,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	77.655.484.804,00	(77.655.484.804,00)
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	826.440.000,00	(24.840.000,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.491.115.360,00	13.500.526.225,00	93,16	14.956.215.185,00	(1.455.688.960,00)
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.409.006.310,00	1.139.399.012,00	80,87	651.335.378,00	488.063.634,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BLUD	3.783.551.251,00	3.300.177.539,00	87,22	4.092.749.583,00	(792.572.044,00)
Jumlah		641.846.539.075,78	614.482.600.677,00	95,74	552.879.729.959,00	61.602.870.718,00

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mencapai sebesar Rp336.315.007.993,50 atau sebesar 89,33 % dari anggaran sebesar Rp376.474.553.191,39 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 64

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	47.563.373.680,16	36.404.454.848,00	76,54	40.722.346.986,00	(4.317.892.138,00)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	47.754.000,00	17.316.000,00	36,26	462.946.000,00	(445.630.000,00)
4	Belanja Jasa Kantor	109.274.881.041,32	98.050.056.048,00	89,73	170.696.096.575,00	(72.646.040.527,00)
5	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	33.409.204.183,60	30.697.100.725,00	91,88	20.306.875.806,00	10.390.224.919,00
6	Belanja Sewa Tanah/ Sewa Tabah Lapangan Parkir/ Sewa Lapangan Lainnya	22.500.000,00	22.110.000,00	98,27	22.110.000,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.358.727.831,00	3.496.929.457,00	80,23	6.928.700.946,00	(3.431.771.489,00)
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.961.661.200,00	2.603.158.100,00	87,90	2.772.243.440,00	(169.085.340,00)
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.686.757.034,16	9.761.800.740,50	83,53	17.902.479.679,00	(8.140.678.938,50)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.341.606.342,00	1.156.845.174,00	86,38	283.574.255,00	875.270.919,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	150.000.000,00	-30.000.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	2.954.860.000,00	2.448.471.200,00	82,86	3.070.136.000,00	(621.664.800,00)
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	448.352.000,00	439.653.000,00	98,50	529.338.000,00	(89.685.000,00)
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.798.500,00	99,42	34.900.000,00	(101.500,00)
15	Belanja Pemeliharaan	8.882.148.875,05	6.987.459.883,00	78,67	32.629.479.951,00	(25.642.020.068,00)
16	Belanja Perjalanan Dinas	29.811.827.315,10	23.621.407.498,00	79,24	24.188.450.919,00	(567.043.421,00)
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.782.100.500,00	2.635.708.000,00	94,74	1.129.100.000,00	1.506.608.000,00

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	28.219.256.187,00	(28.219.256.187,00)
19	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.836.237.860,00	27.831.318.264,00	99,98	0,00	27.831.318.264,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.014.148.080,00	6.132.529.719,00	76,52	6.036.750.527,00	95.779.192,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	84.925.413.249,00	83.651.690.837,00	98,74	84.415.445.840,34	(563.555.003,34)
Jumlah		376.474.553.191,39	336.315.007.993,50	89,33	440.500.231.111,34	(104.185.223.117,84)

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 65

Belanja Subsidi Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Subsidi Kepada BUMD	300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)
Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp51.141.715.158,00 atau sebesar 80,33% dari anggaran sebesar Rp63.662.296.157,60 atau merupakan Belanja Hibah yang terdiri atas:

Tabel 66

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	21.533.668.712,50	16.317.818.000,00	75,78	45.492.421.996,00	(29.174.603.996,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.299.792.081,10	26.072.083.631,00	78,30	48.011.901.117,13	(21.939.817.486,13)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.843.560.000,00	4.843.558.200,00	99,99	0,00	4.843.558.200,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	919.425.364,00	842.405.327,00	91,62	537.523.433,00	304.881.894,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	7.764.773.398,00	(4.698.923.398,00)
Jumlah		63.662.296.157,60	51.141.715.158,00	80,33	101.806.619.944,13	(50.664.904.786,13)

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 yang merupakan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang terdiri atas :

Tabel 67

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 sama dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp105.057.610.836,46 atau 88,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.311.487.550,09 terdiri atas:

Tabel 68

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	31.837.363.070,00	26.003.072.851,00	81,67	21.684.561.898,00	4.318.510.953,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	37.276.113.909,62	36.521.630.983,46	97,98	33.452.111.359,00	3.069.719.624,46
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00	(50.049.341.501,00)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.757.377.190,00	5.754.227.190,00	99,95	6.299.584.700,00	(545.357.510,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00	665.505.520,00
Jumlah		119.311.487.550,09	105.057.610.836,46	88,05	147.698.573.750,00	(42.540.962.913,54)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun 2025 realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00, sama dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar 0,00%. Adapun Realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 69

Belanja Modal Tanah Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.003.072.851,00 atau sebesar 81,67% dari anggaran sebesar Rp31.837.363.070,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.318.510.953,00 dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp21.684.561.898,00. Adapun Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Alat Besar	1.848.650.000,00	1.811.760.000,00	98,00	407.602.000,00	1.404.158.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.323.542.500,00	4.203.715.056,00	97,23	1.508.498.000,00	2.695.217.056,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	506.431.460,00	490.500.000,00	96,85	28.580.000,00	461.920.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	803.814.120,00	799.200.000,00	99,43	99.600.000,00	699.600.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9.515.576.540,00	5.064.411.596,00	53,22	4.941.000.620,00	123.410.976,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	238.027.000,00	164.655.300,00	69,18	666.691.000,00	(502.035.700,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.044.577.000,00	(4.044.577.000,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	332.035.000,00	327.957.000,00	98,77	360.993.000,00	(33.036.000,00)
9	Belanja Modal Komputer	1.931.433.000,00	1.082.753.100,00	56,06	1.962.775.300,00	(880.022.200,00)
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.476.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
11	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.071.000,00	3.500.000,00	29,00	0,00	3.500.000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.581.679.509,00	(4.581.679.509,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.179.671.950,00	6.176.171.950,00	99,94	760.000.000,00	5.416.171.950,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.138.634.500,00	5.878.448.849,00	95,76	2.320.165.469,00	3.558.283.380,00
Jumlah		**31.837.363.070,00**	**26.003.072.851,00**	**81,67**	**21.684.561.898,00**	**4.318.510.953,00**

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.521.830.983,46 atau sebesar 97,98% dari anggaran sebesar Rp37.276.113.909,62. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.069.719.624,46 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp33.452.111.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.873.276.206,20	36.119.216.583,46	97,95	32.946.204.015,00	3.173.012.568,46

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	352.837.703,42	352.686.000,00	99,96	194.661.111,00	158.024.889,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	261.446.233,00	(261.446.233,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.928.400,00	99,86	49.800.000,00	128.400,00
Jumlah		37.276.113.909,62	36.521.830.983,46	97,98	33.452.111.359,00	3.069.719.624,46

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.693.474.292,00 atau sebesar 82,41% dari anggaran sebesar Rp43.313.330.380,47. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp50.049.341.501,00 dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp85.742.815.793,00. Adapun realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 72
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.766.920.180,47	32.861.479.692,00	84,77	78.484.245.792,00	(45.622.766.100,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air	3.625.760.600,00	2.274.848.100,00	62,74	6.735.673.001,00	(4.460.823.901,00)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan	920.649.600,00	557.145.500,00	60,52	522.897.000,00	34.248.500,00
Jumlah		43.313.330.380,47	35.693.474.292,00	82,41	85.742.815.793,00	(50.049.341.501,00)

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.754.227.190,00 atau sebesar 99,95% dari anggaran sebesar Rp5.757.377.190,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp545.357.510,00 dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp6.299.584.700,00.

Tabel 73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.262.000,00	41.112.000,00	92,88	225.962.300,00	(184.850.300,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	144.966.000,00	(144.966.000,00)
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.928.656.400,00	(5.928.656.400,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.713.115.190,00	5.713.115.190,00	100,00	0,00	5.713.115.190,00
Jumlah		**5.757.377.190,00**	**5.754.227.190,00**	**99,95**	**6.299.584.700,00**	**(545.357.510,00)**

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.085.005.520,00 atau sebesar 96,25% dari anggaran sebesar Rp1.127.303.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp665.505.520,00 dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp419.500.000,00.

Tabel 74
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	1.127.303.000,00	1.085.005.520,00	96,25	419.500.000,00	665.505.520,00
Jumlah		***1.127.303.000,00***	***1.085.005.520,00***	***96,25***	***419.500.000,00***	***665.505.520,00***

7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp1.572.746.671,00 atau 52,62% dari anggaran sebesar Rp2.989.018.533,34. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 sebesar Rp697.401.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp875.345.471,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karimun untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan realisasi belanja pada SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang disalurkan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
A	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		
1	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ARISHA SHAKILA RAMADHANI	21.02/04.0/000255/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/5/2025	20.000.000,00

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
2	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan Banjir di Wilayah Jalan Hang Jebat RT.02 RW. 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	21.02/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P3/5/2025	100.000.000,00
3	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana banjir dan gelombang pasang air laut di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025	21.02/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P3/5/2025	378.560.630,00
4	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ASYIFA MARTADINATA	21.02/04.0/000536/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P3/7/2025	10.000.000,00
5	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana banjir Dusun IV Jalan Parit Tegak Sungai Ungar RT.002 RW. 001 di Kecamatan Kundur Kab. Karimun Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025.	21.02/04.0/000572/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P3/7/2025	212.416.041,00
6	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk Bencana Alam Wilayah Tanjung Sesup Laut Kelurahan Gading Sari dan Dwikora Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2025	21.02/04.0/000584/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P3/8/2025	296.782.000,00
7	Dibayar Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk Bencana Angin Puting Beliung Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Tahun 2025	21.02/04.0/000753/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/9/2025	36.817.000,00
8	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. ANDY AZHUARI PUTRA.	21.02/04.0/001170/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	15.000.000,00
9	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. SYUHAIDA	21.02/04.0/001224/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	5.000.000,00
10	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. AGUS SUMARNO.	21.02/04.0/001225/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	15.000.000,00
11	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan Lansia Terlantar An. ASMAH	21.02/04.0/001234/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	7.500.000,00
12	Dibayar Belanja tidak terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Bencana Pasang Surut Air Laut di Kecamatan Kundur Barat Kab. Karimun Tahap I sebesar 29,99% Tahun 2025	21.02/04.0/001241/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	449.421.000,00
13	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Bantuan Sosial bantuan yang tidak direncanakan untuk bantuan pengobatan An. Yani	21.02/04.0/001303/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	7.500.000,00
14	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Yaitu Musibah Kebakaran di Wilayah Perum Dang Merdu Kel. Baran Barat Kec. Meral	21.02/04.0/001302/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	3.750.000,00
15	Dibayar Belanja tidak terduga pada Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak Bantuan pengobatan An. NIAR	21.02/04.0/001305/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR4/12/2025	15.000.000,00
JUMLAH			**1.572.746.671,00**

7.5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp94.100.187.078,00 atau sebesar 95,58% dari anggaran sebesar Rp98.454.168.734,98. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer pada Tahun 2024 sebesar Rp90.713.046.778,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.387.140.300,00.

Realisasi Belanja Transfer tersebut terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 36.202.677.740,00, Transfer dari Pemerintah Kabupaten Karimun berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp57.897.509.338,00 dan Bagi Hasil Pajak senilai Rp0,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2025. Ketiga sumber dana tersebut diperuntukkan untuk 42 Desa di wilayah Kabupaten Karimun dimana Dana Desa langsung ditransfer oleh Rekening Kas Umum Negara. Sub Rincian Objek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 76
Transfer Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	(2.100.000.000,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)
5	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.454.168.734,98	94.100.187.078,00	95,58	88.363.046.778,00	5.737.140.300,00
JUMLAH		**98.454.168.734,98**	**94.100.187.078,00**	**95,58**	**90.713.046.778,00**	**3.387.140.300,00**

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa terdiri dari Belanja Alokasi dana Desa (ADD) sebagai berikut:

Tabel 77
Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Desa Pauh	1.259.668.076,19	1.249.235.413,00	99,17	1.200.390.888,00	48.844.525,00
2	Desa Sugie	1.306.432.076,19	1.212.520.588,00	92,81	1.199.622.647,00	12.897.941,00
3	Desa Keban	1.306.997.576,19	1.226.475.143,00	93,84	1.194.883.979,00	31.591.164,00
4	Desa Selat Mie	1.290.564.776,19	1.185.408.130,00	91,85	1.196.605.523,00	(11.197.393,00)
5	Desa Tanjung Pelanduk	1.273.522.176,19	1.188.692.212,00	93,34	1.127.230.548,00	61.461.664,00
6	Desa Jang	1.355.026.076,19	1.279.922.358,00	94,46	1.371.518.100,00	(91.595.742,00)
7	Desa Niur Permai	1.263.018.376,19	1.214.030.400,00	96,12	1.204.824.636,00	9.205.764,00
8	Desa Rawa Jaya	1.287.522.276,19	1.174.503.272,00	91,22	1.184.090.661,00	(9.587.389,00)
9	Desa Buluh Patah	1.298.625.976,19	1.187.379.667,00	91,43	1.212.553.188,00	(25.173.521,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
10	Desa Pulau Moro	1.284.783.776,19	1.182.684.665,00	92,05	1.185.738.267,00	(3.053.602,00)
11	Desa Sungai Sebesi	1.365.878.976,19	1.280.922.348,00	93,78	1.208.171.450,00	72.750.898,00
12	Desa Sungai Ungar	1.304.099.376,19	1.254.542.133,00	96,20	1.219.461.590,00	35.080.543,00
13	Desa Lubuk	1.362.145.076,19	1.246.355.023,00	91,50	1.241.249.496,00	5.105.527,00
14	Desa Parit	1.304.078.976,19	1.225.153.480,00	93,95	1.220.932.802,00	4.220.678,00
15	Desa Tulang	1.289.560.276,19	1.188.409.251,00	91,45	1.128.227.044,00	60.182.207,00
16	Desa Selat Mendaun	1.277.097.976,19	1.167.768.612,00	91,44	1.174.189.032,00	(6.420.420,00)
17	Desa Pongkar	1.394.810.376,19	1.312.712.412,00	94,11	1.156.780.257,00	155.932.155,00
18	Desa Tanjung Hutan	1.414.644.776,19	1.285.722.940,00	90,89	1.211.608.294,00	74.114.646,00
19	Desa Tanjung Batu Kecil	1.335.680.376,19	1.224.641.970,00	91,69	1.201.172.262,00	23.469.708,00
20	Desa Sungai Ungar Utara	1.363.786.576,19	1.258.580.471,00	92,29	1.195.409.811,00	63.170.660,00
21	Desa Teluk Radang	1.328.542.576,19	1.249.501.037,00	94,05	1.188.727.403,00	60.773.634,00
22	Desa Perayun	1.309.483.376,19	1.111.644.636,00	84,89	1.022.089.134,00	89.555.502,00
23	Desa Tanjung Berlian Barat	1.293.215.076,19	1.230.081.554,00	95,12	1.242.528.695,00	(12.447.141,00)
24	Desa Sawang Selatan	1.363.832.776,19	1.271.979.014,00	93,27	1.273.965.816,00	(1.986.802,00)
25	Desa Sawang Laut	1.384.444.076,19	1.296.683.240,00	93,66	1.259.486.022,00	37.197.218,00
26	Desa Kundur	1.415.091.268,19	1.315.538.715,00	92,96	1.360.801.623,00	(45.262.908,00)
27	Desa Gemuruh	1.353.446.376,19	1.264.869.112,00	93,46	1.231.701.203,00	33.167.909,00
28	Desa Sanglar	1.299.799.676,19	1.190.437.546,00	91,59	1.192.790.082,00	(2.352.536,00)
29	Desa Tanjung Kilang	1.307.486.376,19	1.222.456.039,00	93,50	1.199.401.176,00	23.054.863,00
30	Desa Semembang	1.289.568.876,19	1.189.891.251,00	92,27	1.188.036.052,00	1.855.199,00
31	Desa Telaga Tujuh	1.271.392.376,19	1.161.913.289,00	92,96	1.148.682.001,00	33.231.288,00
32	Desa Pangke	1.344.531.476,19	1.269.300.542,00	94,40	1.151.421.403,00	117.879.139,00
33	Desa Pangke Barat	1.295.563.876,19	1.201.858.259,00	92,77	1.194.141.827,00	7.716.432,00
34	Desa Batu Limau	1.271.480.176,19	1.176.593.342,00	92,54	1.186.462.404,00	(9.869.062,00)
35	Desa Ngal	1.251.340.276,19	1.165.931.871,00	93,17	1.149.286.632,00	16.645.239,00
36	Desa Sungai Buluh	1.305.133.576,19	1.188.052.971,00	91,03	1.171.216.974,00	16.835.997,00
37	Desa Sebele	1.307.154.976,19	1.188.292.578,00	90,91	1.174.063.124,00	14.229.454,00
38	Desa Lebuh	1.328.830.476,19	1.257.394.212,00	94,62	1.273.988.564,00	(16.594.352,00)
39	Desa Penarah	1.301.200.876,19	1.200.818.343,00	92,29	1.232.712.591,00	(31.894.248,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
40	Desa Sungai Asam	1.281.820.876,19	1.183.744.433,00	92,35	1.171.017.083,00	12.727.350,00
41	Desa Tebias	1.273.794.876,19	1.204.214.222,00	94,54	1.224.814.744,00	(20.600.522,00)
42	Desa Degong	1.280.184.476,19	1.216.105.202,00	94,99	1.154.889.950,00	61.215.252,00
43	JKN KIS 1%	0,00	0,00	0,00	187.681.800,00	(187.681.800,00)
44	Hutang ADD Tahun 2024	6.624.004.043,00	6.574.547.442,00	99,25	0,00	6.574.547.442,00
TOTAL		61.829.284.734,98	57.897.509.338,00	93,64	50.614.566.778,00	7.282.942.560,00

Sedangkan untuk rincian Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 78
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Desa Batu Limau	817.659.000,00	817.659.000,00	100,00	851.512.000,00	(33.853.000,00)
2	Desa Buluh Patah	764.105.000,00	764.105.000,00	100,00	827.554.000,00	(63.449.000,00)
3	Desa Degong	767.048.000,00	767.048.000,00	100,00	814.128.000,00	(47.080.000,00)
4	Desa Gemuruh	1.170.323.000,00	1.170.323.000,00	100,00	1.074.246.000,00	96.077.000,00
5	Desa Jang	902.850.000,00	902.850.000,00	100,00	1.069.952.000,00	(167.102.000,00)
6	Desa Keban	843.011.000,00	843.011.000,00	100,00	934.325.000,00	(91.314.000,00)
7	Desa Kundur	964.478.000,00	964.478.000,00	100,00	977.962.000,00	(13.484.000,00)
8	Desa Lebuh	743.756.000,00	743.756.000,00	100,00	945.577.000,00	(201.821.000,00)
9	Desa Lubuk	845.529.000,00	845.529.000,00	100,00	810.580.000,00	34.949.000,00
10	Desa Ngal	781.667.000,00	781.667.000,00	100,00	816.084.000,00	(34.417.000,00)
11	Desa Nitur Permai	728.030.000,00	728.030.000,00	100,00	735.393.000,00	(7.363.000,00)
12	Desa Pangke	969.860.000,00	969.860.000,00	100,00	924.487.000,00	45.373.000,00
13	Desa Pangke Barat	1.155.305.000,00	1.155.305.000,00	100,00	1.039.477.000,00	115.828.000,00
14	Desa Parit	1.068.285.000,00	1.068.285.000,00	100,00	805.932.000,00	262.353.000,00
15	Desa Pauh	760.430.000,00	760.430.000,00	100,00	805.391.000,00	(44.961.000,00)
16	Desa Penarah	727.430.000,00	711.358.972,00	97,79	895.346.000,00	(183.987.028,00)
17	Desa Perayun	786.126.000,00	471.675.600,00	60,00	978.594.000,00	(506.918.400,00)
18	Desa Pongkar	919.079.000,00	919.079.000,00	100,00	841.987.000,00	77.092.000,00
19	Desa Pulau Moro	723.233.000,00	723.233.000,00	100,00	766.488.000,00	(43.255.000,00)
20	Desa Rawa Jaya	797.690.000,00	797.690.000,00	100,00	824.150.000,00	(26.460.000,00)
21	Desa Sanglar	926.217.000,00	926.217.000,00	100,00	1.026.678.000,00	(100.461.000,00)

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
22	Desa Sawang Laut	887.486.000,00	887.486.000,00	100,00	977.450.000,00	(89.964.000,00)
23	Desa Sawang Selatan	1.231.487.000,00	1.231.487.000,00	100,00	930.496.000,00	300.991.000,00
24	Desa Sebele	742.700.000,00	742.700.000,00	100,00	770.739.000,00	(28.039.000,00)
25	Desa Selat Mendaun	693.857.000,00	693.857.000,00	100,00	691.043.000,00	2.814.000,00
26	Desa Selat Mie	751.241.000,00	751.241.000,00	100,00	732.991.000,00	18.250.000,00
27	Desa Semembang	1.003.541.000,00	911.856.168,00	90,86	755.147.000,00	156.709.168,00
28	Desa Sugie	865.608.000,00	865.608.000,00	100,00	874.826.000,00	(9.218.000,00)
29	Desa Sungai Asam	1.090.052.000,00	1.090.052.000,00	100,00	1.031.021.000,00	59.031.000,00
30	Desa Sungai Buluh	700.940.000,00	700.940.000,00	100,00	926.487.000,00	(225.547.000,00)
31	Desa Sungai Sebesi	949.151.000,00	949.151.000,00	100,00	1.124.244.000,00	(175.093.000,00)
32	Desa Sungai Ungar	919.415.000,00	919.415.000,00	100,00	1.085.117.000,00	(165.702.000,00)
33	Desa Sungai Ungar Utara	1.090.293.000,00	1.090.293.000,00	100,00	964.962.000,00	125.331.000,00
34	Desa Tanjung Batu Kecil	837.288.000,00	837.288.000,00	100,00	1.018.172.000,00	(180.884.000,00)
35	Desa Tanjung Berlian Barat	926.238.000,00	926.238.000,00	100,00	912.699.000,00	13.539.000,00
36	Desa Tanjung Hutan	1.055.919.000,00	1.055.919.000,00	100,00	1.125.235.000,00	(69.316.000,00)
37	Desa Tanjung Kilang	871.413.000,00	871.413.000,00	100,00	1.096.475.000,00	(225.062.000,00)
38	Desa Tanjung Pelanduk	750.773.000,00	750.773.000,00	100,00	731.279.000,00	19.494.000,00
39	Desa Tebias	753.242.000,00	753.242.000,00	100,00	929.814.000,00	(176.572.000,00)
40	Desa Telaga Tujuh	766.764.000,00	766.764.000,00	100,00	746.063.000,00	20.701.000,00
41	Desa Teluk Radang	813.813.000,00	813.813.000,00	100,00	791.570.000,00	22.243.000,00
42	Desa Tulang	761.552.000,00	761.552.000,00	100,00	766.807.000,00	(5.255.000,00)
Jumlah		**36.624.884.000,00**	**36.202.677.740,00**	**98,85**	**37.748.480.000,00**	**(1.545.802.260,00)**

7.5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Berdasarkan realisasi Surplus/ Defisit pada APBD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 diketahui bahwa terdapat Surplus sebesar Rp28.886.132.569,32 atau sebesar 69,33% dari anggaran sebesar (Rp41.664.011.572,18). Dibandingkan dengan Defisit Tahun 2024 sebesar (Rp16.957.367.974,50) terdapat kenaikan sebesar Rp45.843.500.543,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79
Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan	1.261.374.051.671,00	1.231.556.000.983,28	97,64	1.317.275.580.458,97	(85.719.579.475,69)
2	Belanja dan Transfer	1.303.038.063.243,18	1.202.669.868.413,96	92,30	1.334.232.948.433,47	(131.563.080.019,51)
Jumlah		**(41.664.011.572,18)**	**28.886.132.569,32**	**(69,33)**	**(16.957.367.974,50)**	**45.843.500.543,82**

7.5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp44.255.490.538,18 atau 100,21% dari anggaran sebesar Rp44.164.011.572,18. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 mengalami penurunan sebesar Rp16.865.889.008,50, yang terdiri atas:

Tabel 80
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	100,00	61.037.956.210,68	(16.873.944.638,50)
2	Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	91.478.966,00	0,00	83.423.336,00	8.055.630,00
Jumlah		**44.164.011.572,18**	**44.255.490.538,18**	**100,21**	**61.121.379.546,68**	**(16.865.889.008,50)**

7.5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00, yang terdiri atas:

Tabel 81
Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00	2.500.000.000,00
Jumlah		**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**2.500.000.000,00**

7.5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp41.755.490.538,18,00 atau 100,22% dari anggaran sebesar Rp41.664.011.572,18. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 mengalami penurunan sebesar Rp19.365.889.008,50, yang terdiri atas:

Tabel 82
Pembiayaan Netto

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Penerimaan Pembiayaan	44.164.011.572,18	44.255.490.538,18	100,21	61.121.379.546,68	(16.865.889.008,50)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	100,00	0,00	(2.500.000.000,00)
Pembiayaan Netto		**41.664.011.572,18**	**41.755.490.538,18**	**100,21**	**61.121.379.546,68**	**(19.365.889.008,50)**

7.5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Pada Tahun 2025 realisasi SiLPA sebesar Rp70.641.623.107,50 yang terdiri dari Surplus/ Defisit atas Pendapatan dan Belanja sebesar Rp28.886.132.569,32 ditambah Penggunaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir sebesar Rp91.478.966,00 serta dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Komponen SiLPA pada LRA senilai Rp70.641.623.107,50 merupakan seluruh kas pada Neraca Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karimun selain saldo kas lainnya sebesar Rp16.000,00 yang merupakan utang PFK pada Dinas Pariwisata, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah senilai Rp35.207.647.042,54
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp84.723.900,00
3. Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas senilai Rp33.179.711.774,58, didalamnya terdapat koreksi saldo awal kas BLUD sebesar Rp2.885.228,00 yang tidak tercatat pada LRA:
   - RSUD Tanjung Batu sebesar Rp2.865.000,00
   - Puskesmas Niur Permai sebesar Rp20.228,00
4. Kas Lainnya diluar utang PFK senilai Rp13.765.313,00 terdiri dari:
   - Pengembalian dana TPG dan uang disetor ke kasda tanggal 2 September 2025 sebesar Rp13.765.313,00
   - Kecuali kas tunai berupa pajak PPh 23 pas Dinas Pariwisata dan sudah disetor ke RKUN tanggal 3 Februari 2026 sebesar Rp16.000,00.
5. Kas Dana BOSP senilai Rp8.419.597,38;
6. Kas Dana BOK senilai Rp2.150.240.708,00.

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun - tahun anggaran sebelumnya dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44.164.011.572,18

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025 berjalan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.164.011.572,18 dimana nilai tersebut merupakan nilai SiLPA pada Tahun 2024 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 sebesar Rp70.641.623.107,50. SiLPA merupakan nilai yang terdiri dari Surplus LRA sebesar Rp28.886.132.569,32 ditambah dengan Penggunaan SAL tahun lalu sebesar Rp44.164.011.572,18 beserta Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp91.478.966,00 dan dikurangi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 Nilai tersebut belum ditambah/kurang dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

7.5.2.5 Lain-Lain

Nilai lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.641.623.107,50, nilai tersebut merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp44.164.011.572,18 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp44.164.011.572,18 ditambah dengan total SiLPA sebesar Rp70.641.623.107,50. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut:

Tabel 83

Rincian Saldo Anggaran Lebih Per OPD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		371.422.840.268,63	0,00	-371.422.840.268,63
2	Dinas Kesehatan	85.221.320.914,50	108.783.690.658,00	0,00	-23.562.369.743,50
3	Rsud Muhammad Sani		99.660.489.006,83	0,00	-99.660.489.006,83
4	Rsud Tanjung Batu Kundur		5.499.520.964,00	0,00	-5.499.520.964,00
5	UPT Puskesmas Belat		1.446.807.477,00	0,00	-1.446.807.477,00
6	UPT Puskesmas Buru		1.897.615.549,00	0,00	-1.897.615.549,00
7	UPT Puskesmas Durai		1.484.754.538,00	0,00	-1.484.754.538,00
8	UPT Puskesmas Kundur Barat		2.285.910.175,00	0,00	-2.285.910.175,00
9	UPT Puskesmas Meral		4.024.879.465,00	0,00	-4.024.879.465,00
10	UPT Puskesmas Meral Barat		2.447.437.301,00	0,00	-2.447.437.301,00
11	UPT Puskesmas Moro		1.803.939.176,00	0,00	-1.803.939.176,00
12	UPT Puskesmas Niur Permai		1.580.868.368,00	0,00	-1.580.868.368,00
13	UPT Puskesmas Tanjung Balai		6.461.328.427,00	0,00	-6.461.328.427,00
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu		3.188.804.864,00	0,00	-3.188.804.864,00
15	UPT Puskesmas Tanjung Berlian		2.224.239.848,00	0,00	-2.224.239.848,00
16	UPT Puskesmas Tebing		3.607.183.248,00	0,00	-3.607.183.248,00
17	UPT Puskesmas Ungar		1.269.693.426,00	0,00	-1.269.693.426,00
18	UPT Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan		474.426.056,00		-474.426.056,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	88.970.917.134,50	0,00	-88.970.917.134,50
20	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	0,00	15.502.543.748,00	0,00	-15.502.543.748,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.292.815.125,00	0,00	-11.292.815.125,00
22	Badan Penanggulangi Bencana Daerah dan Pemedam Kebakaran	0,00	6.194.357.990,00	0,00	-6.194.357.990,00
23	Dinas Sosial	0,00	4.411.007.547,00	0,00	-4.411.007.547,00
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	1.093.793.400,00	6.909.717.120,00	0,00	-5.815.923.720,00
25	Dinas Pangan Dan Pertanian	0,00	10.832.845.141,00	0,00	-10.832.845.141,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	412.024.413,00	25.061.546.757,00	0,00	-24.649.522.344,00
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	6.077.905.467,00	0,00	-6.077.905.467,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	5.276.779.273,00	0,00	-5.276.779.273,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	7.267.040.500,00	0,00	-7.267.040.500,00
30	Dinas Perhubungan	353.611.000,00	18.573.657.398,00	0,00	-18.220.046.398,00

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
31	Dinas Komunikasi Informatika Statisk dan Persandian	0,00	6.725.333.359,00	0,00	-6.725.333.359,00
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.982.567.305,00	6.283.697.054,00	0,00	-4.301.129.749,00
33	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	15.200.000,00	8.272.126.288,00	0,00	-8.256.926.288,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	4.568.229.334,00	0,00	-4.568.229.334,00
35	Dinas Perikanan	0,00	10.967.869.825,00	0,00	-10.967.869.825,00
36	Dinas Pariwisata	0,00	5.497.750.000,00	0,00	-5.497.750.000,00
37	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	69.171.000,00	5.553.897.736,00	0,00	-5.484.726.736,00
38	Sekretariat Daerah	0,00	58.988.793.868,00	0,00	-58.988.793.868,00
39	Sekretariat DPRD	0,00	35.275.718.228,00	0,00	-35.275.718.228,00
40	Inspektorat Daerah	0,00	11.799.656.868,00	0,00	-11.799.656.868,00
41	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	0,00	8.647.899.044,00	0,00	-8.647.899.044,00
42	Badan Pendapatan Daerah	308.154.572.916,27	27.398.168.083,00	0,00	280.756.404.833,27
43	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	834.253.740.034,51	109.913.343.457,00	41.755.490.538,18	766.095.887.115,69
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.246.701.747,00	0,00	-6.246.701.747,00
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	7.480.558.415,00	0,00	-7.480.558.415,00
46	Kecamatan Karimun	0,00	8.892.313.301,00	0,00	-8.892.313.301,00
47	Kecamatan Meral	0,00	8.037.296.055,00	0,00	-8.037.296.055,00
48	Kecamatan Meral Barat	0,00	4.647.662.062,00	0,00	-4.647.662.062,00
49	Kecamatan Tebing	0,00	7.010.389.328,00	0,00	-7.010.389.328,00
50	Kecamatan Kundur	0,00	7.121.072.855,00	0,00	-7.121.072.855,00
51	Kecamatan Ungar	0,00	3.300.984.084,00	0,00	-3.300.984.084,00
52	Kecamatan Kundur Utara	0,00	3.390.945.577,00	0,00	-3.390.945.577,00
53	Kecamatan Belat	0,00	1.410.136.124,00	0,00	-1.410.136.124,00
54	Kecamatan Kundur Barat	0,00	5.313.554.522,00	0,00	-5.313.554.522,00
55	Kecamatan Moro	0,00	4.064.601.326,00	0,00	-4.064.601.326,00
56	Kecamatan Buru	0,00	4.304.311.996,00	0,00	-4.304.311.996,00
57	Kecamatan Durai	0,00	2.422.105.398,00	0,00	-2.422.105.398,00
58	Kecamatan Selat Gelam	0,00	1.896.410.207,00	0,00	-1.896.410.207,00
59	Kecamatan Sugie Besar	0,00	1.282.780.257,00	0,00	-1.282.780.257,00
JUMLAH		1.231.556.000.983,28	1.202.669.868.413,96	41.755.490.538,18	70.641.623.107,50

7.5.3 NERACA

Pos-pos neraca Pemerintah Kabupaten Karimun yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta yang diperoleh dari sumber dana yang berasal pada kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.344.949.963.451,04 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.821.663.625,51 atau 0,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.340.128.299.825,53. Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp125.409.321.655,69 atau mengalami penurunan sebesar Rp46.391.679.797,91 atau 27,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.801.001.453,60. Sedangkan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.219.540.641.795,35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp51.213.343.423,41 atau 2,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.168.327.298.371,94, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 84
Neraca

No	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	**Aset**	**2.344.949.963.451,04**	**2.340.128.299.825,53**	**4.821.663.625,51**	**0,21**
	Aset Lancar	117.525.795.717,03	128.981.273.125,80	(11.455.477.408,77)	(8,88)
	Invetasi Jangka Panjang	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78
	Aset Tetap	2.123.167.793.151,94	2.168.117.332.669,04	(44.949.539.717,10)	(2,07)
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Lainnya	7.824.355.164,07	10.469.959.563,69	(2.645.604.399,62)	(25,27)
	Properti Investasi	58.407.429.385,00	0,00	58.407.429.385,00	0,00
2	**Kewajiban**	**125.409.321.655,69**	**171.801.001.453,60**	**(46.391.679.797,91)**	**(27,00)**
	Kewajiban Jangka Pendek	125.409.321.655,69	171.801.001.453,60	(46.391.679.797,91)	(27,00)
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Ekuitas**	**2.219.540.641.795,35**	**2.168.327.298.371,94**	**51.213.343.423,41**	**2,36**

7.5.3.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp117.525.795.717,03 mengalami penurunan sebesar Rp11.455.477.408,77 atau 8,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.981.273.125,80. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 85
Aset Lancar

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang	55.056.904.532,87	82.346.104.055,74	(27.287.199.522,87)	(33,14)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(25.392.478.385,77)	(23.123.229.198,72)	(2.269.249.187,05)	9,81
Beban Dibayar Dimuka	85.692.777,79	25.017.500,00	60.675.277,79	242,53
Persediaan	17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	(32,99)
Jumlah	**117.525.795.717,03**	**128.981.273.125,80**	**(11.455.477.408,77)**	**(8,88)**

7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, serta Bendahara pada OPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.641.639.107,50 mengalami kenaikan sebesar Rp26.476.133.437,32 atau 59,95% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.165.505.670,18 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 86
Kas dan Setara Kas

Akun	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	35.204.761.814,54	15.760.972,72	35.189.000.841,82	223.266,68
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.723.900,00	0,00	84.723.900,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	33.179.711.774,56	41.035.951.257,06	(7.856.239.482,50)	(19,14)
Kas Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	13.761.313,00	2.391.152,00	11.370.161,00	475,35
Kas Dana BOSP	8.419.597,38	8.701,38	8.410.896,00	96.661,63
Kas Dana BOK	2.150.240.708,00	3.111.393.587,00	(961.152.879,00)	(30,89)
Kas Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**70.641.639.107,50**	**44.165.505.670,18**	**26.476.133.437,32**	**59,95**

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	**35.204.761.814,54**	**15.760.972,72**	**35.189.000.841,82**	**223.266,68**

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 merupakan rekening giro dalam penguasaan BUD. Total Kas di Kas Daerah pada Neraca sebesar Rp35.204.761.814,54 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 Rp15.760.972,72 mengalami kenaikan sebesar Rp35.189.000.841,82 atau 223.266,68%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.211.005.626,54, di dalamnya termasuk sisa DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana sebesar Rp22.636.730.737,00 dan sebesar Rp12.574.274.889,10 merupakan Non-Mandatory.

Terdapat perbedaan antara Saldo Kas Daerah pada Neraca dengan Saldo rekening Kas Daerah pada Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 87
Rincian Kas di Kas Daerah dan selisih antara Kas Daerah Neraca dengan Kasda Rekening Koran Tahun 2025

No.	Kas di Kas Daerah	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Kas Daerah pada Neraca	35.204.761.814,54	15.760.972,72	35.189.000.841,82	223.266,68
2	Bank Riau Kepri (No.Rek 111-02-00043)	35.211.005.626,54	26.351.667,92	35.184.653.958,62	133.519,65
	Selisih Kas pada Neraca dan Saldo Bank	(6.243.812,00)	(10.590.695,20)		

Selisih antara Kas di Kas Daerah pada Neraca dan Saldo di Kas Daerah pada Bank sebesar Rp6.243.812,00 terdiri koreksi kurang atas saldo awal Kas di BLUD RSUD Tanjung Batu sebesar Rp20.228,00 dan Puskesmas Niur Permai sebesar Rp2.865.000,00 serta merupakan bagian dari *subsequent event* sebesar Rp3.358.584,00 yaitu kejadian transaksi setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi saldo tanggal 31 Desember 2025 namun sebelum diterbitkannya laporan keuangan (dhi. laporan keuangan audited), dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Subsequent event* yang mempengaruhi nilai Kas di Kas Daerah**:

(1) Kekurangan setor atas Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Kelurahan Sungai Raya Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Meral sebesar Rp1.575.000,00 dimana nilai tersebut merupakan pajak yang telah disetor ke kas negara;

(2) Double posting untuk SP2D yang sudah terhapus Nomor 21.02/04.0/000186/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2025 tanggal 25 September 2025 sebesar Rp8.828.829,00 dan uang tersebut sudah disetor ke Kasda 8 April 2026;

(3) Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD An. Arban, S.Pd sebesar Rp13.762.413,00;

Rekening Giro Nomor 111-02-00043 pada PT Bank Riau Kepri Cabang Karimun merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.211.005.626,54 mengalami kenaikan sebesar Rp35.184.653.958,62 atau 133.519,65% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.351.667,92.

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	84.723.900,00	0,00	84.723.900,00	100,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.723.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp84.723.900,00 atau 100,00% dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 88
Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal	Saldo per 31 Desember 2025			Tanggal Disetor
			Uang Tunai	Uang di Bank	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3+4+5)*	*7*
1	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	50.900,00	50.900,00	02 Jan 2026
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	84.673.000,00	0,00	84.673.000,00	20 Jan 2026
Jumlah		**0,00**	**84.673.000,00**	**50.900,00**	**84.723.900,00**	

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dimana saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas tunai pada bendahara penerimaan yang berasal dari perangkat daerah yang memiliki mengelola pendapatan daerah.

7.5.3.1.1.4 Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	33.179.711.774,58	41.035.951.257,08	(7.856.239.482,50)	(19,14)

Saldo Kas BLUD adalah kas yang berada pada BLUD RSUD dan Puskesmas BLUD Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.179.711.774,58 mengalami penurunan sebesar Rp7.856.239.482,50 atau 19,14% dari saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.035.951.257,08 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 85
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

No.	Nama OPD/Unit OPD	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
I	RSUD				
	RSUD Muh Sani	30.252.640.329,32	38.751.350.246,32	(8.498.709.917,00)	(21,93)
	RSUD Tanjung Batu	775.778.056,26	736.708.219,76	39.069.836,50	5,30
II	Puskesmas				
	Puskesmas Tanjung Balai	9.311.380,00	37.578.939,00	(28.267.559,00)	(75,22)
	Puskesmas Meral	470.547.959,00	250.620.003,00	219.927.956,00	87,75
	Puskesmas Tebing	298.676.398,00	233.451.729,00	65.224.669,00	27,94
	Puskesmas Tanjung Batu	636.284.033,00	528.133.664,00	108.150.369,00	20,48
	Puskesmas Kundur Barat	168.371.420,00	157.933.782,00	10.437.638,00	6,61
	Puskesmas Tanjung Berlian	21.697.591,00	15.870.288,00	5.827.303,00	36,72
	Puskesmas Buru	192.571.054,00	124.285.830,00	68.285.224,00	54,94
	Puskesmas Moro	93.874.385,00	65.401.881,00	28.472.504,00	43,53
	Puskesmas Dural	89.454.639,00	41.152.623,00	48.302.016,00	117,37
	Puskesmas Niur Permai	3.567.393,00	702.393,00	2.865.000,00	407,89
	Puskesmas Belat	456.260,00	2.215.810,00	(1.759.550,00)	(79,41)
	Puskesmas Meral Barat	71.874.332,00	46.959.170,00	24.915.162,00	53,06
	Puskesmas Ungar	94.606.545,00	43.586.679,00	51.019.866,00	117,05
JUMLAH		33.179.711.774,58	41.035.951.257,08	(7.856.239.482,50)	(19,14)

7.5.3.1.1.5 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya	13.781.313,00	2.391.152,00	11.390.161,00	476,35

Saldo Kas lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.781.313,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.390.161,00 dari Saldo Kas Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.391.152,00. Rincian Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 90
Kas Lainnya

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Kundur Barat	1.494.098,00	0,00	1.494.098,00	0,00
2	Kelurahan Tanjung Batu Kota	618,00	0,00	618,00	0,00
3	Kelurahan Tanjung Berlian Kota	872,00	0,00	872,00	0,00
4	Kelurahan Sawang	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
5	Kelurahan Tanjung Batu Barat	378,00	0,00	378,00	0,00
6	Kecamatan Sugie Besar	85.752,00	0,00	85.752,00	0,00
7	Puskesmas Niur Permai	92,00	0,00	92,00	0,00
8	Puskesmas Belat	13.085,00	0,00	13.085,00	0,00
9	Puskesmas Belat	692.500,00	0,00	692.500,00	0,00
10	Puskesmas Durai	11.548,00	0,00	11.548,00	0,00
11	Dinas Pendidikan	90.893,00	13.762.413,00	87.993,00	13.765.313,00
12	Dinas Pariwisata	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
JUMLAH		**2.391.152,00**	**13.778.413,00**	**2.388.252,00**	**13.781.313,00**

7.5.3.1.1.6 Kas BOSP

Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp8.419.597,38 yang seluruhnya berada di Sekolah Negeri.

Tabel 91
Kas Dana BOSP Negeri

NO	OPD	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	SD NEGERI	8.701,38	25.588.126.300,00	25.588.135.000,00	1,38
2	SMP NEGERI	0,00	13.614.550.000,00	13.606.130.404,00	8.419.596,00
3	TK NEGERI	0,00	526.340.000,00	526.340.000,00	0,00
JUMLAH		**8.701,38**	**39.729.016.300,00**	**39.720.605.404,00**	**8.419.597,38**

Tabel 92
Kas Dana BOSP Swasta

NO	OPD	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja Hibah Swasta (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	SD SWASTA	0,00	4.664.808.200,00	4.664.808.200,00	0,00
2	SMP SWASTA	0,00	3.244.600.000,00	3.244.600.000,00	0,00
3	TK SWASTA	0,00	4.464.865.000,00	4.464.865.000,00	0,00
JUMLAH		**0,00**	**12.374.273.200,00**	**12.374.273.200,00**	**0,00**

7.5.3.1.1.7 Kas Dana BOK

Saldo Kas Dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.150.240.708,00 mengalami penurunan sebesar Rp961.152.879,00 atau 30,89% dari saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.111.393.587,00. Saldo Kas Dana BOK tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 93
Kas Dana BOK

Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Puskesmas Tanjung Balai	252.554.000,00	917.401.000,00	959.205.699,00	210.749.301,00
Puskesmas Meral	282.317.000,00	469.700.000,00	614.873.953,00	137.143.047,00
Puskesmas Tebing	84.247.458,00	752.849.042,00	768.184.264,00	68.912.236,00
Puskesmas Tanjung Batu	298.364.187,00	395.600.413,00	589.719.686,00	104.244.914,00
Puskesmas Kuba	236.597.000,00	491.224.500,00	436.823.582,00	290.997.918,00
Puskesmas Tanjung Berlian	227.211.000,00	379.087.500,00	492.794.488,00	113.504.012,00
Puskesmas Buru	263.149.000,00	276.968.000,00	427.670.692,00	112.446.308,00
Puskesmas Moro	19.755.900,00	435.703.100,00	204.620.000,00	250.839.000,00
Puskesmas Dural	300.161.584,00	153.344.616,00	324.031.420,00	129.474.780,00
Puskesmas Niur Permai	395.663.000,00	318.228.000,00	409.138.605,00	304.752.395,00
Puskesmas Belat	318.640.000,00	256.963.900,00	363.730.000,00	211.873.900,00
Puskesmas Meral Barat	157.487.458,00	536.613.142,00	612.254.756,00	81.845.844,00
Puskesmas Ungar	275.246.000,00	127.196.200,00	268.985.147,00	133.457.053,00
Jumlah	**3.111.393.587,00**	**5.510.879.413,00**	**6.472.032.292,00**	**2.150.240.708,00**

7.5.3.1.2 Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Karimun yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.058.904.532,87 mengalami penurunan sebesar Rp27.287.199.522,87 atau 33,14% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.346.104.055,74. Piutang daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang dana bagi hasil provinsi dan piutang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94
Piutang Daerah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak	34.997.304.087,00	52.632.306.662,60	(17.635.002.575,60)	(33,51)
2	Piutang Retribusi	12.747.288.873,17	6.903.875.090,17	5.843.413.783,00	84,64
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97	460.898.002,73	42,78
5	Piutang DBH Provinsi	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	(15.513.531.352,00)	(72,87)
6	Piutang Lainnya	0,00	4.642.050,00	(4.642.050,00)	(100,00)
Jumlah		**55.058.904.532,87**	**82.346.104.055,74**	**(27.287.199.522,87)**	**(33,14)**

7.5.3.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak menggambarkan hak pemerintah terhadap pendapatan dan terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.997.304.087,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.635.002.575,60 atau 33,51% dari piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.632.306.662,60 dapat dijelaskan pada mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 95
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4-5+6-7)*
1	Pajak Reklame	260.610.830,00	215.833.437,00	143.584.040,00	0,00	0,00	332.860.227,00
2	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	83.820,00	0,00	0,00	0,00	83.820,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.154.625.050,00	0,00	20.109.921.300,00	0,00	0,00	44.703.750,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2)	31.487.735.988,00	12.888.793.751,00	11.701.583.629,00	0,00	58.107.459,00	32.616.838.651,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	29.138.375,00	0,00	0,00	0,00	29.138.375,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	729.334.794,60	1.576.860.909,00	332.516.439,59	0,00	0,01	1.973.679.264,00
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)	*587.020.384,60*	*402.950.549,00*	*306.259.449,59*	*0,00*	*0,01*	*683.711.484,00*
	PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)	*139.564.410,00*	*545.805.740,00*	*23.505.990,00*	*0,00*	*0,00*	*661.863.160,00*
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)	*2.750.000,00*	*628.104.620,00*	*2.750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*628.104.620,00*
Jumlah		**52.632.306.662,60**	**14.710.710.292,00**	**32.287.605.408,59**	**0,00**	**58.107.459,01**	**34.997.304.087,00**

7.5.3.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Saldo penyisihan piutang pajak tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.347.085.430,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.892.912.757,30 atau 8,82% dibandingkan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.454.172.672,95.

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.347.085.430,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak reklame tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.424.115,25 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 96
Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	93.181.012,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	85.691.925,00	5	4.284.596,25
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	93.234.190,00	10	9.323.419,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	25.874.000,00	50	12.937.000,00
> 60	> 5 Tahun	34.879.100,00	100	34.879.100,00
Jumlah		**332.860.227,00**		**61.424.115,25**

(2) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak air tanah tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 97
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	83.820,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		**83.820,00**		0,00

(3) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.703.750,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 98
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	44.703.750,00	100	44.703.750,00
Jumlah		**44.703.750,00**		**44.703.750,00**

(4) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak PBB P2 tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.177.827.268,60 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 99
Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	2.546.173.498,00	5	127.308.674,90
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	5.639.725.002,00	10	563.972.500,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	3.888.788.115,00	50	1.944.394.057,50
> 60	> 5 Tahun	20.542.152.036,00	100	20.542.152.036,00
Jumlah		**32.616.838.651,00**		**23.177.827.268,60**

(5) Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tak Tertagih

Penyisihan piutang BPHTB tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.456.918,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 100
Penyisihan Piutang BPHTB Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2025 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	29.138.375,00	5	1.456.918,75
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		**29.138.375,00**		**1.456.918,75**

(6) Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.673.377,65 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 101
Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2025 ++	Tidak Lancar	12.005.940,00	0	0,00
	Lancar	1.818.338.391,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	44.089.393,00	5	2.204.469,65
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	30.411.880,00	10	3.041.188,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.811.880,00	50	12.405.940,00
> 60	> 5 Tahun	44.021.760,00	100	44.021.760,00
Jumlah		**1.973.679.264,00**		**61.673.377,65**

Penyisihan piutang PBJT ini terdiri dari penyisihan piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran), penyisihan piutang PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel) dan penyisihan piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.554.172,65 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 102
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2025 ++	Lancar	645.628.031,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	31.483.453,00	5	1.574.172,65
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	5.800.000,00	10	580.000,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	800.000,00	50	400.000,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		**683.711.484,00**		**2.554.172,65**

b. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.119.205,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 103
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2025 ++	Tidak Lancar	12.005.940,00	0	0,00
	Lancar	544.605.740,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	12.605.940,00	5	630.297,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	24.611.880,00	10	2.461.188,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.011.880,00	50	12.005.940,00
> 60	> 5 Tahun	44.021.780,00	100	44.021.780,00
Jumlah		661.863.160,00		59.119.205,00

c. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 104
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2025 ++	Lancar	628.104.620,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		628.104.620,00		0,00

7.5.3.1.2.3 Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah retribusi yang dipungut pada pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa pada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib retribusi, saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.747.288.873,17 mengalami kenaikan sebesar Rp5.843.413.783 atau 84,64% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.903.875.090,17. Adapun nilai piutang lainnya yang direklasifikasi ke piutang retribusi pada retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp3.162.050,00.

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada mutasi piutang retribusi dibawah ini:

Tabel 105
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang Retribusi		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.200.000,00	87.043.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	87.043.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.853.159.468,17	76.456.855.556,00	70.633.511.740,00	0,00	99.756.083,00	12.576.747.201,17
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.922.000,00	0,00	11.660.000,00	0,00	0,00	30.262.000,00

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang Retribusi		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Tambah	Kurang	
4.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.593.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.622,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.162.050,00	0,00	3.162.050,00
6.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	47.481.000,00	0,00	0,00	0,00	47.481.000,00
Jumlah		6.903.875.090,17	76.591.379.556,00	70.651.371.740,00	3.162.050,00	99.758.083,00	12.747.288.873,17

7.5.3.1.2.4 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.045.392.955,52 mengalami kenaikan sebesar Rp376.336.429,75 atau 22,55% dibandingkan saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.669.056.525,77.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2025 terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Tabel 106
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	87.043.000,00	5	4.352.150,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		87.043.000,00		4.352.150,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 107
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	10.509.488.937,00	5	525.474.446,85
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	552.980.383,00	10	55.298.038,30
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	150.083.946,00	50	75.041.973,00
> 60	> 5 Tahun	1.364.193.935,17	100	1.364.193.935,17
Jumlah		12.576.747.201,17		2.020.008.393,32

3. Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 108
Penyisihan Piutang Retribusi
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	4.300.000,00	10	430.000,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	17.562.000,00	50	8.781.000,00
> 60	> 5 Tahun	8.400.000,00	100	8.400.000,00
Jumlah		30.262.000,00		17.611.000,00

4. Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 109
Penyisihan Piutang Retribusi
Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	2.593.622,00	10	259.362,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		**2.593.622,00**		**259.362,20**

5. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan

Tabel 110
Penyisihan Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (BPJS) di Dinas Kesehatan Tahun 2025

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	3.162.050,00	100	3.162.050,00
Jumlah		**3.162.050,00**		**3.162.050,00**

7.5.3.1.2.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2025 terdapat Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha). Saldo piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan pada mutasi piutang dibawah ini:

Tabel 111
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	0,00	0,00
Jumlah	**438.335.331,00**	**0,00**	**438.335.331,00**	**0,00**	**0,00**

7.5.3.1.2.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur, terdapat akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Akun tersebut digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dan merupakan bagian dari Akun Lain-lain PAD yang sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Secara pengakuan akrual, telah diketahui informasi kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan fisik, kekurangan pendapatan dan denda pendapatan serta kelebihan pembayaran belanja yang pada periode mendatang, pendapatan atas piutang-piutang tersebut berpotensi besar akan diterima.

Adapun saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.538.240.339,70 mengalami kenaikan sebesar Rp460.898.002,73 atau 42,78% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.077.342.336,97, dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 112
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.262.968,00	0,00	1.262.968,00		0,00
		Badan Pendapatan Daerah	1.799.144,00	2.647.102,00	1.799.144,00		2.647.102,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	998.520,00	0,00	998.520,00		0,00
		Dinas Kesehatan	4.319.284,00	832.690,00	4.319.284,00		832.690,00
		Dinas Pariwisata	1.384.440,00	0,00	1.384.440,00		0,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.894.460,00	0,00	1.894.460,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.770.214,00	8.191.982,00	22.770.214,00		8.191.982,00
		Dinas Perhubungan	928.976,00	465.420,00	928.976,00		465.420,00
		Inspektorat Daerah	528.980,00	0,00	528.980,00		0,00
		RSUD M. Sani	0,00	873.654,00	0,00		873.654,00
		Dinas Sosial	0,00	200.900,00	0,00		200.900,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	642.618,00	0,00		642.618,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	285.608,00	0,00		285.608,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	502.250,00	0,00		502.250,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	358.648,00	0,00		358.648,00
		Sekretariat DPRD	0,00	725.480,00	0,00		725.480,00
		Kecamatan Belat	695.492,00	0,00	695.492,00		0,00
		Kecamatan Kundur	105.796,00	0,00	105.796,00		0,00
		Kecamatan Kundur Barat	996.440,00	0,00	996.440,00		0,00
		Kecamatan Meral	640.096,00	0,00	640.096,00		0,00
		Kecamatan Meral Barat	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00		0,00
		Kecamatan Karimun	0,00	451.212,00	0,00		451.212,00
		Kecamatan Ungar	351.256,00	0,00	351.256,00		0,00
JUMLAH			40.685.566,00	16.177.564,00	40.685.566,00		16.177.564,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga PPPK	Dinas Kesehatan	640.720,00	0,00	640.720,00		0,00
JUMLAH			640.720,00	0,00	640.720,00		0,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00		0,00
		Badan Pendapatan Daerah	362.100,00	2.172.600,00	362.100,00		2.172.600,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	869.040,00	0,00	869.040,00		0,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PNS	Dinas Kesehatan	1.158.720,00	724.200,00	1.158.720,00		724.200,00
		Dinas Periwisata	289.680,00	0,00	289.680,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.339.160,00	6.879.900,00	14.339.160,00		6.879.900,00
		Dinas Perhubungan	869.040,00	0,00	869.040,00		0,00
		Inspektorat Daerah	362.100,00	0,00	362.100,00		0,00
		RSUD M. Sani	0,00	651.780,00	0,00		651.780,00
		Dinas Perhubungan	0,00	434.520,00	0,00		434.520,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	362.100,00	0,00		362.100,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	289.680,00	0,00		289.680,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	289.680,00	0,00		289.680,00
		Dinas Sosial	0,00	144.840,00	0,00		144.840,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	651.780,00	0,00		651.780,00
		Sekretariat DPRD	0,00	506.940,00	0,00		506.940,00
		Kecamatan Belat	506.940,00	0,00	506.940,00		0,00
		Kecamatan Kundur	72.420,00	0,00	72.420,00		0,00
		Kecamatan Kundur Barat	724.200,00	0,00	724.200,00		0,00
		Kecamatan Meral	579.360,00	0,00	579.360,00		0,00
		Kecamatan Meral Barat	434.520,00	0,00	434.520,00		0,00
		Kecamatan Karimun	0,00	434.520,00	0,00		434.520,00
		Kecamatan Ungar	289.680,00	0,00	289.680,00		0,00
JUMLAH			21.943.260,00	13.542.540,00	21.943.260,00		13.542.540,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PPPK	Dinas Kesehatan	144.840,00	0,00	144.840,00		0,00
JUMLAH			144.840,00	0,00	144.840,00		0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	RSUD Tg. Batu	0,00	1.625.000,00	0,00		1.625.000,00
		Dinas Kesehatan	0,00	2.025.000,00	0,00		2.025.000,00
		Sekretariat Daerah	0,00	920.000,00	0,00		920.000,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	4.140.000,00	0,00		4.140.000,00
JUMLAH			0,00	8.710.000,00	0,00		8.710.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN - Tunjangan Fungsional Umum PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00		0,00
		Puskesmas Tebing	0,00	740.000,00	0,00		740.000,00
		Kecamatan Kundur Barat	0,00	540.000,00	0,00		540.000,00
		Dinas Kesehatan	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00		0,00
JUMLAH			4.235.000,00	1.280.000,00	4.235.000,00		1.280.000,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN - Tunjangan Jabatan PNS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	810.000,00	0,00	810.000,00		0,00
		Dinas Perhubungan	735.000,00	0,00	735.000,00		0,00
JUMLAH			1.545.000,00	0,00	1.545.000,00		0,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00		0,00
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	329.000,00	0,00	329.000,00		0,00
		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	466.666,67	0,00	466.666,67		0,00
		Dinas Pariwisata	278.400,00	0,00	278.400,00		0,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	425.000,00	0,00	425.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.198.500,00	22.419.000,00	1.198.500,00		22.419.000,00
		Dinas Perhubungan	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	619.000,00	0,00	619.000,00		0,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.217.500,00	0,00		1.217.500,00
		Sekretariat DPRD	0,00	19.476.000,00	0,00		19.476.000,00
		Sekretariat Daerah	6.002.942,00	1.611.500,00	6.002.942,00		1.611.500,00
JUMLAH			**10.797.008,67**	**44.724.000,00**	**10.797.008,67**		**44.724.000,00**
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	Inspektorat Daerah	0,00	2.476.000,00	0,00		2.476.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	90.350.206,00	0,00		90.350.206,00
		Sekretariat Daerah	0,00	291.000,00	0,00		291.000,00
TOTAL			**0,00**	**93.117.206,00**	**0,00**		**93.117.206,00**
10	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/ atau Minuman - Restoran	Badan Pendapatan Daerah	94.298.624,32	108.197.394,00	24.459.845,46	(10.417.408,37)	167.618.964,49
JUMLAH			**94.298.624,32**	**108.197.394,00**	**24.459.845,46**	**(10.417.408,37)**	**167.618.964,49**
11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan	Badan Pendapatan Daerah	0,00	124.140.047,00	0,00		124.140.047,00
JUMLAH			**0,00**	**124.140.047,00**	**0,00**		**124.140.047,00**
12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pendapatan Daerah	0,00	134.675.574,00	0,00		134.675.574,00
JUMLAH			**0,00**	**134.675.574,00**	**0,00**		**134.675.574,00**
13	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	Sekretariat DPRD	44.055.000,00	0,00	44.055.000,00		0,00
JUMLAH			**44.055.000,00**	**0,00**	**44.055.000,00**		**0,00**
14	Piutang Pendapatan dari Pngembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	42.631.752,22	0,00	42.631.752,22		0,00
JUMLAH			**42.631.752,22**	**0,00**	**42.631.752,22**		**0,00**
15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.558.400,00	0,00	5.558.400,00		0,00
JUMLAH			**8.558.400,00**	**0,00**	**8.558.400,00**		**0,00**

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
16	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja JasaKonsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.560.000,00	0,00	1.150.000,00		4.410.000,00
		Dinas Perhubungan	800.000,00	0,00	800.000,00		0,00
		Dinas Perhubungan	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00
JUMLAH			8.660.000,00	0,00	4.250.000,00		4.410.000,00
17	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.886.720,00	0,00	9.886.720,00		0,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.119.275,00	0,00	31.119.275,00		0,00
JUMLAH			41.005.995,00	0,00	41.005.995,00		0,00
18	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	653.717.849,00	0,00		653.717.849,00
JUMLAH			0,00	653.717.849,00	0,00		653.717.849,00
19	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.217.105,00	0,00	29.217.105,00		0,00
JUMLAH			29.217.105,00	0,00	29.217.105,00		0,00
20	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.851.065,00	150.973.000,00	153.851.065,00		150.973.000,00
JUMLAH			153.851.065,00	150.973.000,00	153.851.065,00		150.973.000,00
21	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	886.855,21	0,00	0,00	(257.696,00)	629.159,21
JUMLAH			886.855,21	0,00	0,00	(257.696,00)	629.159,21
22	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa KOnsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.872.666,67	0,00	37.872.666,67		2.000.000,00
		Dinas Perhubungan	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00
JUMLAH			40.022.666,67	0,00	38.022.666,67		2.000.000,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
23	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00		0,00
JUMLAH			7.450.000,00	0,00	7.450.000,00		0,00
24	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transport	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.635.000,00	0,00	53.635.000,00		0,00
JUMLAH			53.635.000,00	0,00	53.635.000,00		0,00
25	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00		0,00
JUMLAH			2.625.000,00	0,00	2.625.000,00		0,00
26	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	24.519.000,00	0,00		24.519.000,00
JUMLAH			0,00	24.519.000,00	0,00		24.519.000,00
27	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	337.150,00	0,00	337.150,00		0,00
JUMLAH			337.150,00	0,00	337.150,00		0,00
28	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.377.001,84	33.181.000,00	246.377.001,84		33.181.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	2.012.000,00	0,00		2.012.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.171.000,00	0,00		2.171.000,00
JUMLAH			246.377.001,84	37.364.000,00	246.377.001,84		37.364.000,00
29	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi-Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.702.000,00	0,00	36.702.000,00		0,00
JUMLAH			36.702.000,00	0,00	36.702.000,00		0,00

NO.	URAIAN PIUTANG	OPD	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI / REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
30	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi-Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375.000,00	0,00	0,00		375.000,00
JUMLAH			**375.000,00**	**0,00**	**0,00**		**375.000,00**
31	Piutang Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Belanaj Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.467.915,92	0,00	2.467.915,92		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.883.881,53	0,00	13.883.881,53		0,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.397.000,00	0,00		2.397.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.153.000,00	0,00		17.153.000,00
JUMLAH			**16.351.797,45**	**19.550.000,00**	**16.351.797,45**		**19.550.000,00**
32	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-BOS Reguler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.024.500,00	6.320.000,00	21.024.500,00		6.320.000,00
JUMLAH			**21.024.500,00**	**6.320.000,00**	**21.024.500,00**		**6.320.000,00**
33	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	9.122.000,00	0,00		9.122.000,00
JUMLAH			**0,00**	**9.122.000,00**	**0,00**		**9.122.000,00**
34	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara	Dinas Perhubungan	149.286.029,60	0,00	149.286.029,60		0,00
JUMLAH			**149.286.029,60**	**0,00**	**149.286.029,60**		**0,00**
35	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	RSUD M. Sani	0,00	12.233.000,00	0,00		12.233.000,00
JUMLAH			**0,00**	**12.233.000,00**	**0,00**		**12.233.000,00**
36	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan	0,00	10.223.000,00	0,00		10.223.000,00
		Dinas Kesehatan	0,00	1.338.436,00	0,00		1.338.436,00
JUMLAH			**0,00**	**11.561.436,00**	**0,00**		**11.561.436,00**
Direklasifikasi dari piutang lainnya							
37	Piutang Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
JUMLAH			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**

NO	URAIAN PIUTANG	SALDO AWAL	MUTASI PIUTANG		KOREKSI/ REKLASIFIKASI	SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
JUMLAH KESELURUHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		**1.077.342.336,97**	**1.469.924.610,00**	**988.831.502,91**	**(9.195.104,36)**	**1.538.240.339,70**

7.5.3.1.2.7 Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

Akun piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang transfer dari pemerintah pusat. Jumlah piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi tahun 2025 sebesar Rp5.776.071.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.513.531.352,00 atau 72,87% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.289.602.585,00 dapat dijelaskan pada mutasi piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 113
Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.152.271.199,00	486.838.561,00	6.152.271.199,00	0,00	486.838.561,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.316.702.961,00	220.510.478,00	5.316.702.961,00	0,00	220.510.478,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.802.820.372,00	5.052.209.987,00	9.802.820.372,00	0,00	5.052.209.987,00
Pajak Air Permukaan	17.808.053,00	16.512.207,00	17.808.053,00	0,00	16.512.207,00
Jumlah	**21.289.602.585,00**	**5.776.071.233,00**	**21.289.602.585,00**	**0,00**	**5.776.071.233,00**

7.5.3.1.2.8 Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi. Jumlah piutang lainnya tahun 2025 sebesar Rp0,00. Sebelumnya tercatat jumlah piutang lainnya sebesar Rp4.642.050,00 pada neraca tahun 2024, yang terdiri dari piutang BPJS pada Dinas Kesehatan dan piutang lainnya atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar, untuk itu dilakukan reklasifikasi terhadap piutang tersebut, dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

a. Piutang BPJS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun direklasifikasi menjadi piutang retribusi dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 114
Mutasi Piutang Lainnya Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Reklasifikasi ke Piutang Retribusi	Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5-6)*
1	BPJS	3.162.050,00	0,00	0,00	3.162.050,00	0,00
Jumlah		**3.162.050,00**	**0,00**	**0,00**	**3.162.050,00**	**0,00**

b. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar direklasifikasi menjadi piutang lain-lain PAD yang sah, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 115
Mutasi Piutang Lainnya Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5-6)*
1	PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI TUGAS BELAJAR	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
Jumlah		**1.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**0,00**

7.5.3.1.2.9 Penyisihan Piutang Lainnya

Tidak terdapat penyisihan piutang lainnya tak tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

7.5.3.1.2.10 Piutang Bersih

Piutang Bersih merupakan total piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025. Piutang Bersih didapat dari penjumlahan Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi dan Piutang Lainnya setelah dikurangkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Saldo Piutang Bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.666.426.147,10, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.556.448.709,92 atau 49,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.222.874.857,02. Adapun rinciannya Piutang Bersih sebagai berikut :

Tabel 116
Piutang Bersih Tahun 2025

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak	34.997.304.087,00	52.632.306.662,60	(17.635.002.575,60)	(33,51)
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(23.347.085.430,25)	(21.454.172.672,95)	(1.892.912.757,30)	8,82
Jumlah	**11.650.218.656,75**	**31.178.133.989,65**	**(19.527.915.332,90)**	**(62,63)**
Piutang Retribusi	12.747.289.873,17	6.903.875.090,17	5.843.413.783,00	84,64
Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	(2.045.392.955,52)	(1.669.056.525,77)	(376.336.429,75)	22,55
Jumlah	**10.701.896.917,65**	**5.234.818.564,40**	**5.467.077.353,25**	**104,44**
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**438.335.331,00**	**(438.335.331,00)**	**(100,00)**
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.538.240.339,70	1.077.342.336,97	460.898.002,73	42,78
Jumlah	**1.538.240.339,70**	**1.077.342.336,97**	**460.898.002,73**	**42,78**
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	5.776.071.233,00	21.289.602.585,00	(15.513.531.352,00)	(72,87)
Jumlah	**5.776.071.233,00**	**21.289.602.585,00**	**(15.513.531.352,00)**	**(72,87)**
Piutang Lainnya	0,00	4.642.050,00	(4.642.050,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**4.642.050,00**	**(4.642.050,00)**	**(100,00)**
PIUTANG BERSIH	**29.666.426.147,10**	**59.222.874.857,02**	**(29.556.448.709,92)**	**(49,91)**

7.5.3.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.692.777,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.675.277,79 atau 242,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.017.500,00, dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

Tabel 117
Beban Dibayar Di Muka pada Organisasi Perangkat Daerah

No.	OPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Keterangan
				Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
1	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	3.611.111,11	4.000.000,00	3.611.111,11	4.000.000,00	Yuliana,SE
2	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	Said Darwin

No.	OPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Keterangan
				Penambahan	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
3	BPKAD	Belanja Sewa Bangunan Gedung	11.375.000,00	11.250.000,00	11.375.000,00	11.250.000,00	Said Darwin
4	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	8.148.888,89	0,00	8.148.888,89	Cui Meng
5	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	Aloysius
6	BAPENDA	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	3.091.305,56	Giok King
7	BAPENDA	Belanja Sewa Bangunan Gedung	3.848.777,78	3.848.777,78	3.848.777,78	3.848.777,78	Willy
8	DINSOS	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	Said Darwin
9	DINSOS	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	10.762.500,00	0,00	10.762.500,00	Nurasyid
10	INSPEKTORAT DAERAH	Belanja Sewa Bangunan Gedung	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	Said Darwin
Jumlah			25.017.500,00	85.692.777,79	25.017.500,00	85.692.777,79	

7.5.3.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Persediaan	17.132.037.684,64	25.567.875.098,60	(8.435.837.413,96)	32,99

Akun Persediaan menunjukkan saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.132.037.684,64 mengalami penurunan sebesar Rp8.435.837.413,96 atau 32,99% dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.567.875.098,60. Persediaan tersebut berada dalam pengelolaan pengurus barang OPD atau Unit OPD. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 116
Rincian Saldo Persediaan

No	Jenis Persediaan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	214.194.746,33	144.106.546,00	70.088.200,33	48,64
2	Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat Listrik	64.563.953,30	57.758.669,00	6.805.284,30	11,78
4	Benda Pos	6.478.000,00	3.404.000,00	3.074.000,00	90,31
5	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bahan bakar dan pelumas	49.831.400,00	59.383.067,05	(9.551.667,05)	(16,08)
8	Bahan isi Tabung Gas	8.280.000,00	4.430.000,00	3.850.000,00	86,91
9	Gas Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bahan Pakai Habis Lainnya (FARMASI)	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Persediaan	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
12	Obat-Obatan	7.786.055.023,44	5.599.916.750,72	2.186.138.272,72	39,04
13	Bahan Farmasi (APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bahan bangunan dan kontruksi	0,00	717.000,00	(717.000,00)	(100,00)
17	Makan Minum Fasilitas urusan Kesehatan	125.587.040,00	6.947.000,00	118.640.040,00	1.707,79
18	Bahan Material Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cetak	520.596.564,70	449.084.152,00	71.512.412,70	15,92
20	Bahan Komputer	18.103.970,00	5.765.000,00	12.338.970,00	214,03
21	Kertas dan Cover	97.132.160,00	28.610.259,00	68.521.901,00	239,50
22	Perlengkapan Dinas	0,00	20.820.000,00	(20.820.000,00)	(100,00)
23	Belanja Pakan Natura dan Pakan Lainnya	2.394.000,00	2.340.100,00	53.900,00	2,30
24	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.029.671,00	30.112.863,00	16.916.808,00	56,18
25	Bahan bibit ternak/ikan	0,00	5.220.000,00	(5.220.000,00)	(100,00)
26	Bahan Baku	102.000,00	135.000,00	(33.000,00)	(24,44)
27	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Perabot Kantor	249.080,00	1.751.000,00	(1.501.920,00)	(85,77)
29	Barang Serah Pihak Ketiga	447.676.437,32	10.801.278.820,00	(10.353.602.382,68)	(95,86)
30	Obat-obatan Lainnya	7.704.684.468,55	7.942.089.251,83	(237.404.783,28)	(2,99)
31	Bahan-Bahan Lainnya	8.032.120,00	403.455.120,00	(395.423.000,00)	(98,01)
32	Makan Minum Jamuan Tamu	216.000,00	550.500,00	(334.500,00)	(60,76)
33	Suku cadang alat kedokteran	30.831.050,00	0,00	30.831.050,00	0,00
Jumlah		**17.132.037.684,64**	**25.567.875.098,60**	**(8.435.837.413,96)**	**(32,99)**

Sedangkan Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 berada pada OPD Pemerintah Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

Tabel 119
Persediaan Per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.977.377.058,55	3.053.738.286,30	(76.361.227,75)	(2,50)
3	UPT Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (BPFAK)	2.686.435.242,04	1.867.098.170,92	819.337.071,12	43,88
4	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (APBD)	225.745.913,66	145.243.969,00	80.501.944,66	55,43
5	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (BLUD)	34.244.183,65	1.164.266,00	33.079.917,65	2.841,27
6	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (APBD)	258.431.069,00	275.731.574,00	(17.300.505,00)	(6,27)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
7	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BLUD)	16.130.323,00	19.690.319,00	(3.559.996,00)	(18,08)
8	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (APBD)	102.720.562,97	70.636.054,54	32.084.508,43	45,42
10	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (BLUD)	7.911.941,39	11.235.845,00	(3.323.903,61)	(29,58)
11	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (APBD)	125.881.391,79	64.163.634,00	61.717.757,79	96,19
13	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (BLUD)	10.494.884,25	5.808.734,00	4.686.150,25	80,67
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (APBD)	116.686.977,06	260.950.409,54	(144.263.432,48)	(55,28)
16	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (BLUD)	923.670,00	3.468.851,00	(2.545.181,00)	(73,37)
17	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (APBD)	108.364.265,15	88.917.899,17	19.446.365,98	21,87
19	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (BLUD)	3.727.996,42	5.070.474,00	(1.342.477,58)	(26,48)
20	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (APBD)	43.535.027,23	62.945.967,86	(19.410.940,63)	(30,84)
21	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (BLUD)	7.000,00	141.000,00	(134.000,00)	(95,04)
22	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (APBD)	203.145.836,00	131.669.874,00	71.475.962,00	54,28
23	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BLUD)	6.366.263,00	7.468.395,00	(1.102.132,00)	(14,76)
24	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (APBD)	89.607.617,80	85.678.016,80	3.929.601,00	4,59
26	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (APBD)	93.545.355,30	87.916.002,86	5.629.352,44	6,40
28	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (BLUD)	14.607.127,00	158.750,00	14.448.377,00	9.101,34
29	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (APBD)	59.009.492,00	77.493.239,00	(18.483.747,00)	(23,85)
30	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (BLUD)	1.205.000,00	1.154.000,00	51.000,00	4,42
31	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (APBD)	100.246.090,14	59.711.454,65	40.534.635,49	67,88
32	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (BLUD)	0,00	130.000,00	(130.000,00)	(100,00)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / *Penurunan* (Rp)	%
33	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (APBD)	168.185.570,05	121.043.766,18	47.141.803,87	38,95
35	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BLUD)	7.910.950,00	0,00	7.910.950,00	0,00
36	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RSUD Tg. Batu Kundur	411.214.444,00	629.472.672,00	(218.258.228,00)	(34,67)
38	RSUD Tg. Batu Kundur (BLUD)	27.304.906,00	0,00	27.304.906,00	0,00
39	RSUD Muhammad Sani (APBD)	296.300.822,00	371.629.822,00	(75.329.000,00)	(20,27)
40	RSUD Muhammad Sani (BLUD)	7.939.998.303,17	6.400.737.255,73	1.539.261.047,44	24,05
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.571.500,00	2.502.630,00	1.068.870,00	42,71
42	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	228.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dinas Sosial	232.793.400,00	16.558.500,00	216.234.900,00	1.305,88
46	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Pangan Dan Pertanian	20.519.000,00	78.279.300,00	(57.760.300,00)	(73,79)
48	Dinas Lingkungan Hidup	733.500,00	13.312.567,05	(12.579.067,05)	(94,49)
49	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	122.154.030,00	62.199.000,00	59.955.030,00	96,39
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.484.000,00	13.393.408,00	(9.909.408,00)	(73,99)
51	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	150.000,00	208.000,00	(58.000,00)	(27,88)
52	Dinas Perhubungan	15.990.000,00	11.193.164.320,00	(11.177.174.320,00)	(99,86)
53	Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	490.770,00	395.000,00	95.770,00	24,25
57	Dinas Perikanan	2.040.000,00	6.447.200,00	(4.407.200,00)	(68,36)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
58	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	443.792.606,02	1.070.000,00	442.722.606,02	41.375,94
59	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Sekretariat Daerah	4.328.000,00	641.100,00	3.686.900,00	575,09
61	Sekretariat DPRD	4.172.276,00	4.020.000,00	152.276,00	3,79
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	716.000,00	4.133.500,00	(3.417.500,00)	(82,68)
63	Kecamatan Karimun	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Kecamatan Meral	797.600,00	703.000,00	94.600,00	13,46
65	Kecamatan Meral Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Kecamatan Tebing	1.232.450,00	0,00	1.232.450,00	0,00
67	Kecamatan Kundur	83.000,00	937.000,00	(854.000,00)	(91,14)
68	Kecamatan Ungar	743.000,00	130.000,00	613.000,00	471,54
69	Kecamatan Kundur Utara	322.000,00	73.000,00	249.000,00	341,10
70	Kecamatan Belat	65.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
71	Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kecamatan Moro	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kecamatan Buru	562.000,00	775.000,00	(213.000,00)	(27,48)
74	Kecamatan Durai	321.250,00	0,00	321.250,00	0,00
75	Kecamatan Selat Gelam	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Inspektorat Daerah	666.000,00	337.500,00	328.500,00	97,33
78	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.110.000,00	295.000,00	815.000,00	276,27
79	Badan Pendapatan Daerah	132.088.240,00	257.107.371,00	(125.019.131,00)	(48,63)
80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	534.780,00	225.000,00	309.780,00	137,68
81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	601.000,00	535.000,00	66.000,00	12,34
TOTAL		**17.132.037.684,64**	**25.567.875.098,60**	**(8.435.837.413,96)**	**(32,99)**

Persediaan sebesar Rp17.132.037.684,64 tersebut dicatat berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan dan Laporan Mutasi Persediaan yang diserahkan masing-masing OPD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.024.590.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.464.855.766,00 atau sebesar 16,78% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00. Investasi Jangka Panjang tersebut, terdiri atas:

Tabel 120
Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1) Investasi Non Permanen				
Dana Bergulir	9.914.418.270,00	10.005.897.236,00	(91.478.966,00)	(0,91)
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(9.914.418.270,00)	(10.005.897.236,00)	91.478.966,00	0,91
Jumlah Nilai Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78
Jumlah	38.024.590.033,00	32.559.734.267,00	5.464.855.766,00	16,78

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.914.418.270,00 turun sebesar Rp91.478.966,00 atau 0,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.005.897.236,00

Investasi non permanen lainnya-dana bergulir dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*) sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. Dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.914.418.270,00 turun sebesar Rp91.478.966 atau 0,91% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.005.897.236,00.

Sedangkan nilai bersih (NRV) investasi non permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2025 tidak ada penambahan investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir.

Penyaluran Dana bergulir di Kabupaten Karimun dimulai sejak Tahun Anggaran 2002. Untuk pengelola dana bergulir tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk suatu forum dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) sedangkan untuk pelaksanaan dan pencairan dana bergulir diatur pada Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Pinjaman Modal dari APBD Kabupaten Karimun tanggal 1 April 2002. Dana bergulir tidak disalurkan kembali sejak tahun 2006 hingga sekarang. Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-dana bergulir per 31 Desember 2025, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 121
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir

Pengelola	Saldo / Baki Debet (Rp)	Pencadangan (Rp)
Bank Riau Kepri	9.011.848.776,00	9.011.848.776,00
BPR Karimun	202.569.494,00	202.569.494,00
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah	9.914.418.270,00	9.914.418.270,00

a) Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri

Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dimulai sejak Tahun 2002 berdasarkan atas pedoman umum penyelenggaraan pinjaman modal Kabupaten Karimun Tahun 2002 Bulan Februari 2002 sampai dengan 31 Desember 2005 nilai dana bergulir yang telah disalurkan adalah sebesar Rp16.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122
Penyaluran Dana Bergulir Melalui Bank Riau Kepri

No.	Tahun Penyaluran	Nilai Penyaluran (Rp)
1	2002	12.000.000.000,00
2	2003	3.600.000.000,00
3	2005	1.000.000.000,00
Jumlah		16.600.000.000,00

Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pokok dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp7.647.172.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di Bank Riau Kepri

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Sampai dengan tahun 2013	5.484.384.931,00
2	2014	227.519.902,00
3	2015	107.884.513,00
4	2016	431.594.939,00
5	2017	313.564.193,00
6	2018	188.985.641,00
7	2019	130.073.963,00
8	2020	245.026.860,00
9	2021	79.400.603,00
10	2022	170.933.306,00
11	2023	112.901.477,00
12	2024	83.423.336,00
13	2025	91.478.996,00
Jumlah		7.647.172.660,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debet dana bergulir di Bank Riau Kepri per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.011.848.776,00 dengan 768 debitur. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.011.848.776,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 124
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di Bank Riau Kepri

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2025				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase (%)	Pencadangan (Rp)	NRV (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10	0,00	0,00
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50	0,00	0,00
4	Macet	> 5 Tahun	768	9.011.848.776,00	100	9.011.848.776,00	0,00
Jumlah			768	9.011.848.776,00		9.011.848.776,00	0,00

b) Dana bergulir melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (PD. BPR Karimun)

Dana bergulir melalui PD BPR Karimun disalurkan pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 sebesar Rp600.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pokok pengembalian dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp397.430.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di PD. BPR Karimun

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Sampai dengan tahun 2011	311.293.954,00
2	2012 yang disetor tahun 2013	9.085.700,00
3	Tahun 2014	10.235.812,00
4	Tahun 2016	7.918.500
5	Tahun 2017	0,00
6	Tahun 2018	0,00
7	Tahun 2019	0,00
8	Tahun 2020	0,00
9	Tahun 2021	0,00
10	Tahun 2022	56.873.540,00
11	Tahun 2023	2.025.000,00
12	Tahun 2024	0,00
13	Tahun 2025	0,00
	Jumlah	Rp397.430.506,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debet dana bergulir di PD BPR Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp202.569.494,00 dengan 70 debitur. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp202.569.494,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 126
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di PD BPR Karimun

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2025				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase Pencadangan	Pencadangan	NRV
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5%	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10%	0,00	0,00

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2025				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase Pencadangan	Pencadangan	NRV
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50%	0,00	0,00
4	Macet	diatas 5 Tahun	70	202.569.494,00	100%	202.569.494,00	0,00
Jumlah			70	202.569.494,00		202.569.494,00	0,00

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Bank BPR Karimun merupakan dana bergulir yang dikategorikan Macet sebesar Rp202.569.494,00.

c) Dana bergulir melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM

Dana bergulir yang disalurkan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM (dulu bernama Dinas Koperasi dan UKM) pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 adalah sebesar Rp800.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 dana yang sudah dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp100.000.000,00.

Dengan demikian saldo akhir atau baki debet dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.000.000,00 (Rp800.000.000,00 - Rp100.000.000,00) dengan jumlah debitur satu kelompok dan keberadaannya belum diketahui.

Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diperkirakan diragukan dapat direalisasikan adalah Rp700.000.000,00 atau 100% dari sisa baki debet karena umur piutang tersebut lebih dari sepuluh tahun.

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM setelah dikurangi dengan nilai yang diragukan tertagih adalah sebesar Rp0,00 (Rp700.000.000,00 - Rp700.000.000,00). Yang menagih terkait dana bergulir diatas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada pengembalian dari sisa baki debet sebesar Rp700.000.000,00.

7.5.3.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.024.590.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.464.855.766 atau 16,78% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00 yang terdiri atas:

Tabel 127
Investasi Permanen Tahun 2025

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.559.734.267,00	6.871.269.348,55	1.406.413.582,55	38.024.590.033,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**32.559.734.267,00**	**6.871.269.348,55**	**1.406.413.582,55**	**38.024.590.033,00**

Akun Investasi Permanen menunjukkan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan perusahaan lainnya serta investasi permanen lainnya. Seluruh dari saldo investasi permanen tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan perusahaan lainnya, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 128
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

NO	PENYERTAAN	PERSENTASE KEPEMILIKAN	SALDO AWAL PER 01-01-2025	KOREKSI/ELIMINASI		SALDO AKHIR PER 31-12-2025
				DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	0,60%	7.190.000.000,00	0,00	0,00	7.190.000.000,00
2	Perumda BPR Tuah Karimun	100%	3.901.935.060,00	3.884.343.705,55	193.214.160,55	7.593.064.605,00
3	Perumda Bumi Berazam Jaya	100%	9.004.322.526,00	273.944.921,00	0,00	9.278.267.447,00
4	PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)	100%	5.618.578.892,00	1.722.066.249,00	353.215.028,00	6.987.430.113,00
5	Perumda Tirta Mulia Karimun	100%	6.844.897.789,00	990.914.473,00	859.984.394,00	6.975.827.868,00
Jumlah			**32.559.734.267,00**	**6.871.269.348,55**	**1.406.413.582,55**	**38.024.590.033,00**

1) PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah Provinsi Riau yang bergerak dalam bidang perbankan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Kabupaten Karimun pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp7.190.000.000,00. Metode penilaian investasi atas PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah metode biaya dengan jumlah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karimun atas PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar 0,60%. Pendapatan deviden Pemerintah Kabupaten Karimun atas Laba Tahun 2024 telah dibukukan pada tahun 2025 sebesar Rp1.363.425.644,00. Untuk pendapatan deviden tahun buku 2025 akan dibukukan pada tahun 2026 menunggu neraca keuangan audited dan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Perumda BPR Tuah Karimun

Pembentukan PD BPR Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun, PD BPR Karimun berubah menjadi Perumda BPR Tuah Karimun.

Adapun maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah:

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Mengembangkan Perumda BPR Tuah Karimun dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
e. Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Peruma BPR Tuah Karimun menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

a. Menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyaraka dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. Menyalurkan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
c. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
d. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan daerah, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penilaian investasi atas Perumda BPR Tuah Karimun menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda BPR Tuah Karimun tahun 2025 yaitu Rp7.593.064.605,00 meningkat sebesar Rp3.691.129.545,00 atau 94,60% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp3.901.935.060,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda BPR Tuah Karimun tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitas Perumda BPR Tuah Karimun terdiri dari modal saham sebesar Rp7.500.000.000,00, cadangan sebesar Rp249.187.720,00, dan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar minus Rp156.123.115,00 dengan total ekuitas sebesar Rp7.593.064.605,00. Peningkatan tersebut berasal dari penyertaan modal daerah tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan penyesuaian atas saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.191.129.545,00.

3) Perumda Bumi Berazam Jaya

Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun (Perusda Karimun) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 08 Februari 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Pada tahun 2013 terbit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001

kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah kemudian pada tahun 2022 terbit Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun. Maka sejak tahun 2022 nama Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Berazam Jaya. Maksud dan tujuan pendirian Perumda Bumi Berazam Jaya yaitu:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode penilaian investasi atas Perumda Bumi Berazam Jaya menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda Bumi Berazam Jaya tahun 2025 yaitu Rp9.278.267.447,00 meningkat sebesar Rp273.944.921,00 atau 3,04% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp9.004.322.526,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda Bumi Berazam Jaya tahun 2025 (*unaudited*), dapat diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari modal Pemkab Karimun sebesar Rp7.912.956.944,00, saldo laba/rugi sebesar Rp932.882.966,00, setoran PAD kepada Pemkab sebesar minus Rp70.129.380,00 dan laba/(rugi) periode berjalan sebesar Rp502.556.917 dengan total ekuitas sebesar Rp9.278.267.447,00. Sampai dengan berakhirnya batas waktu pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun, Perumda Bumi Berazam Jaya belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga nilai ekuitas atas penyertaan modal yang disajikan masih menggunakan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025.

4) PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)

Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yaitu PT Karya Karimun Mandiri (selanjutnya disebut BUP) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dan kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan. PT. Karya Karimun Mandiri didirikan berdasarkan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., Nomor 39 tanggal 24 April 2009. Terdapat perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Zulkhainen,S.H.,M.H., Nomor 16 tanggal 16 Februari 2024 sehubungan dengan perubahan nama PT. Karya Karimun Mandiri menjadi PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda). Adapun maksud dan tujuan pendirian yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Pelabuhan Karimun, modal dasar PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp135.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah).

Sedangkan modal disetor sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar PT. Pelabuhan Karimun. Pemenuhan Modal Dasar dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Metode penilaian investasi atas PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) tahun 2025 yaitu Rp6.987.430.113,00 meningkat sebesar Rp1.368.851.221,00 atau 24,36% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp5.618.578.892,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda) tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari Modal Saham sebesar Rp500.000.000,00 dan laba ditahan sebesar Rp6.487.430.113,00 dengan total ekuitas sebesar Rp6.987.430.113,00.

5) Perumda Tirta Mulia Karimun

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun dahulu bernama PDAM Tirta Karimun merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih untuk memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun, yang bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum dalam memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

Perusahaan PDAM Tirta Karimun diserahterimakan oleh Perusda Kabupaten Karimun pada tanggal 25 Mei 2017. Berdasarkan berita acara serah terima nomor 022/BA/V/2017 dimana penyerahan tersebut meliputi data aset, data karyawan dan data keuangan unit usaha air bersih perusahaan daerah kabupaten karimun yang berada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Kundur dan Moro. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun kepada PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah berupa Aset dan Kewajiban yang bersumber dari Perusahaan daerah Karimun dengan nilai total masing-masing sebesar Rp2.378.258.796,00 dan Rp724.702.000,00, sesuai dengan penyertaan modal pemerintah diakui sebesar uang yang diterima, utang yang dikonversi atau nilai wajar aset yang diterima/nilai buku. Maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun pada awal pendirian PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah sebesar Rp1.653.556.796,00.

Metode penilaian investasi atas Perumda Tirta Mulia Karimun menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas Perumda Tirta Mulia Karimun tahun 2025 yaitu Rp6.975.827.868,00 meningkat sebesar Rp130.930.079,00 atau 1,91% dibandingkan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp6.844.897.789,00. Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perumda Tirta Mulia Karimun tahun 2025 (*audited*), dapat diketahui bahwa ekuitasnya terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2.283.556.796,00, hibah sebesar Rp190.451.000,00, dan laba/(rugi) ditahan sebesar Rp4.501.820.072,00 dengan total ekuitas sebesar Rp6.975.827.868,00.

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.123.167.793.151,94 meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan aset tetap, yang terdiri atas:

Tabel 129
Aset Tetap

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	452.539.579.643,00	499.673.759.643,00	-47.134.180.000,00	-9,43
Peralatan dan Mesin	519.133.997.576,50	509.604.512.267,50	9.529.485.309,00	1,87
Gedung dan Bangunan	958.807.621.610,35	911.770.548.482,89	47.037.073.127,46	5,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07	28.554.101.533,00	1,39
Aset Tetap Lainnya	58.685.782.320,00	52.986.691.130,00	5.699.091.190,00	10,76
Konstruksi dalam Pengerjaan	10.836.078.683,55	14.579.307.073,55	-3.743.228.390,00	-25,67
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.959.220.141.615,53	-1.874.328.259.128,97	-84.891.882.486,56	4,53
Jumlah	**2.123.167.793.151,94**	**2.168.117.332.869,04**	**-44.949.539.717,10**	**2,07**

7.5.3.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Akun aset tetap tanah menunjukkan aset tetap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan dinilai dengan harga perolehan. Jumlah aset tetap tanah tersebut terdiri atas saldo tahun sebelumnya ditambah dengan penambahan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	452.539.579.643,00	499.673.759.643,00	-47.134.180.000,00	-9,43

Aset tetap tanah tahun 2025 sebesar Rp452.539.579.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.134.180.000,00 atau -9,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp499.673.759.643,00

Tabel 130
Data Mutasi Aset Tanah Tahun 2025

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP TANAH			
		Saldo Awal Tahun 2025 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Jumlah Aset Tetap (Rp)
1	Tanah	499.673.759.643,00	2.011.310.000,00	49.145.490.000,00	452.539.579.643,00
	Jumlah	**499.673.759.643,00**	**2.011.310.000,00**	**49.145.490.000,00**	**452.539.579.643,00**

Terdapat penambahan nilai aset tanah sebesar Rp2.011.310.000,00 yang berasal dari hibah sebesar Rp2.011.310.000,00 dan pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp49.145.490.000,00 yang berasal dari penghapusan sebesar Rp193.599.000,00, hibah sebesar Rp800.800.000,00 dan reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp48.151.091.000,00. Rekapitulasi aset tetap tanah pada OPD sebagai berikut:

Tabel 131
Rekapitulasi Aset Tanah per OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	86.100.027.620,00
2.	Dinas Kesehatan	31.490.112.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.301.324.311,00
4.	Dinas Perhubungan	15.251.983.000,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	8.773.975.233,00
6.	Dinas Sosial	604.800.000,00
7.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	23.324.338.000,00
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.804.084.000,00
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.043.400.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	1.182.070.000,00
11.	Sekretariat Daerah	98.891.140.779,00
12.	Sekretariat DPRD	2.594.240.000,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	1.019.048.000,00
14.	Kecamatan Karimun	2.487.508.000,00
15.	Kecamatan Meral	516.760.000,00
16.	Kecamatan Meral Barat	80.448.000,00
17.	Kecamatan Tebing	3.398.497.000,00
18.	Kecamatan Kundur	4.363.734.000,00
19.	Kecamatan Ungar	220.000.000,00
20.	Kecamatan Kundur Utara	2.876.280.000,00
21.	Kecamatan Belat	2.400.000,00
22.	Kecamatan Kundur Barat	840.000.000,00
23.	Kecamatan Moro	506.316.000,00
24.	Kecamatan Buru	90.246.000,00
25.	Kecamatan Durai	182.160.000,00
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.423.384.000,00
27.	Dinas Pangan dan Pertanian	2.292.199.700,00
28.	Dinas Lingkungan Hidup	5.950.855.000,00
29.	Dinas Pariwisata	964.693.000,00
30.	Dinas Perikanan	350.560.000,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola barang)	81.501.521.000,00
32	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	111.475.000,00
	Jumlah	**452.539.579.643,00**

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Peralatan dan Mesin	519.133.997.576,50	509.604.512.267,50	9.529.485.309,00	1,87

Akun peralatan dan mesin menunjukkan nilai aset peralatan dan mesin dari seluruh OPD yang terdiri atas alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132
Data Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	26.726.507.662,00	1.836.389.419,00	6.038.593.000,00	22.524.304.081,00
2	Alat-alat Angkutan	69.880.536.950,00	5.338.450.056,00	8.562.284.000,00	66.656.703.006,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.365.638.894,00	40.076.000,00	6.716.000,00	9.398.998.894,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	4.137.132.222,00	849.804.000,00	800.150.000,00	4.186.786.222,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	132.140.159.418,00	11.678.855.011,00	4.380.097.252,00	139.439.717.177,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.161.395.263,00	1.478.428.773,00	701.389.300,00	16.938.434.736,00
7	Alat-alat Kedokteran	136.508.643.393,50	6.674.921.282,00	1.141.298.035,00	142.042.266.640,50
8	Alat Laboratorium	19.687.639.153,00	271.147.650,00	35.756.000,00	19.923.030.803,00
9	Alat-alat Pesenjataan	242.242.000,00	99.448.550,00	71.082.800,00	270.607.750,00
10	Komputer	89.879.992.622,00	3.329.817.955,00	381.988.000,00	92.827.822.577,00
11	Alat Eksplorasi	76.600.000,00	0,00	0,00	76.600.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	217.342.160,00	0,00	0,00	217.342.160,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	544.694.000,00	70.221.000,00	53.940.000,00	560.975.000,00
16	Alat Peraga	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
17	Peralatan Proses/Produksi	27.750.000,00	24.420.000,00	0,00	52.170.000,00
18	Rambu-rambu	1.902.145.150,00	0,00	0,00	1.902.145.150,00
19	Peralatan Olah Raga	2.103.775.380,00	11.800.000,00	1.800.000,00	2.113.775.380,00
	Jumlah	**509.604.512.267,50**	**31.704.579.696,00**	**22.175.094.387,00**	**519.133.997.576,50**

Mutasi penambahan aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal, koreksi pencatatan, hibah, reklasifikasi antar rekening, dan hutang. Secara garis besar mutasi penambahan aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 133
Data Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	1.829.451.919,00	0,00	0,00	6.937.500,00	0,00	1.836.389.419,00
2	Alat-alat Angkutan	4.203.715.056,00	0,00	394.635.000,00	0,00	740.100.000,00	5.338.450.056,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.966.000,00	0,00	350.000,00	19.760.000,00	0,00	40.076.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	846.354.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	849.804.000,00

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	9.894.741.461,00	105.150.000,00	815.998.250,00	1.063.765.300,00	0,00	11.679.655.011,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	799.428.773,00	0,00	0,00	679.000.000,00	0,00	1.478.428.773,00
7	Alat-alat Kedokteran	5.136.853.237,00	0,00	408.068.045,00	0,00	1.130.000.000,00	6.674.921.282,00
8	Alat Laboratorium	97.147.650,00	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00	271.147.650,00
9	Alat-alat Pesenjataan	16.605.800,00	0,00	0,00	82.842.750,00	0,00	99.448.550,00
10	Komputer	3.253.867.955,00	0,00	7.100.000,00	68.850.000,00	0,00	3.329.817.955,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	68.721.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	70.221.000,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
18	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
	Jumlah	***26.003.072.851,00***	***105.150.000,00***	***1.805.101.295,00***	***1.921.155.550,00***	***1.870.100.000,00***	***31.704.579.696,00***

Adapun Mutasi penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.704.579.696,00 merupakan penambahan dari belanja modal sebesar Rp26.003.072.851,00, belanja barang jasa sebesar Rp105.150.000,00, hibah sebesar Rp1.805.101.295,00, reklasifikasi sebesar Rp1.921.155.550,00 dan mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.100.000,00.

Tabel 134
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	8.293.111.107,00
2	Dinas Kesehatan	6.363.448.849,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	162.643.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	33.098.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	122.666.050,00
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23.800.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	0,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	34.133.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.813.840.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	158.707.600,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.750.000,00

NO	OPD	Nilai
14	Dinas Perhubungan	34.598.700,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	136.960.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00
17	Dinas Perikanan	0,00
18	Dinas Pariwisata	384.608.750,00
19	Sekretariat Daerah	837.228.440,00
20	Sekretariat DPRD	3.753.283.355,00
21	Inspektorat Daerah	42.700.000,00
22	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	41.452.500,00
23	Badan Pendapatan Daerah	365.860.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	123.650.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
27	Kecamatan Karimun	148.227.300,00
28	Kecamatan Meral	22.100.000,00
29	Kecamatan Tebing	0,00
30	Kecamatan Kundur	0,00
31	Kecamatan Ungar	0,00
32	Kecamatan Belat	0,00
33	Kecamatan Kundur Utara	0,00
34	Kecamatan Kundur Barat	0,00
35	Kecamatan Moro	0,00
36	Kecamatan Buru	0,00
37	Kecamatan Durai	0,00
38	Kecamatan Meral Barat	8.900.000,00
39	Dinas Perpustakaan	0,00
40	Kecamatan Selat Gelam	15.500.000,00
41	Kecamatan Sugie Besar	17.495.000,00
	Jumlah	**26.003.072.851,00**

Tabel 135
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	105.150.000,00
	Jumlah	**105.150.000,00**

Tabel 136
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	829.698.250,00
2	Dinas Kesehatan	975.403.045,00
	Jumlah	**1.805.101.295,00**

Tabel 137
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00
2	Sekretariat Daerah	974.260.000,00
3	Sekretariat DPRD	24.564.300,00
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	19.760.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	80.780.250,00
7	Dinas Pariwisata	11.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	799.200.000,00
9	Dinas Pendidikan	0,00
10	Kecamatan Karimun	9.000.000,00
	Jumlah	**1.921.155.550,00**

Tabel 138
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Mutasi Antar OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	1.130.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	279.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	461.100.000,00
	Jumlah	**1.870.100.000,00**

Mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar berasal dari koreksi pencatatan, pelunasan hutang, penghapusan, mutasi antar OPD, reklasifikasi, ekstrakomtable. Secara garis besar mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 139
Data Mutasi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi	Ekstrakomtable	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar					6.038.593.000,00		6.038.593.000,00
2	Alat-alat Angkutan			1.400.800.000,00	740.100.000,00	6.421.384.000,00		8.562.284.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur						6.716.000,00	6.716.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan					799.200.000,00	950.000,00	800.150.000,00
5	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	101.650.000,00	42.511.440,00	242.046.000,00		788.180.250,00	3.205.709.562,00	4.380.097.252,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi		485.000.000,00	74.334.000,00		132.555.300,00	9.500.000,00	701.389.300,00
7	Alat-alat Kedokteran		1.937.403,00		1.130.000.000,00		9.360.632,00	1.141.298.035,00
8	Alat Laboratorium		34.133.000,00				1.623.000,00	35.756.000,00
9	Alat-alat Pesenjataan			70.550.000,00			532.800,00	71.082.800,00
10	Komputer		20.300.000,00	359.000.000,00			2.688.000,00	381.988.000,00
11	Alat Eksplorasi							0,00
12	Alat Pengeboran							0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian							0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi							0,00
15	Alat Keselamatan Kerja			53.940.000,00				53.940.000,00
16	Alat Peraga							0,00
17	Peralatan Proses/Produksi							0,00
18	Rambu-rambu							0,00
19	Peralatan Olah Raga					1.800.000,00		1.800.000,00
	Jumlah	101.650.000,00	583.881.843,00	2.200.670.000,00	1.870.100.000,00	14.181.712.550,00	3.237.079.994,00	22.175.094.387,00

Adapun Mutasi pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.175.094.387,00 merupakan pengurangan dari koreksi pencatatan sebesar Rp101.650.000,00, pelunasan hutang sebesar Rp583.881.843,00, penghapusan sebesar Rp2.200.670.000,00, mutasi antar OPD sebesar Rp1.870.100.000,00, reklasifikasi sebesar Rp14.181.712.550,00, dan ekstrakomtable sebesar Rp3.237.079.994,00.

Tabel 140
Rekapitulasi Pengurangan – Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum	101.650.000,00
	Jumlah	**101.650.000,00**

Tabel 141
Rekapitulasi Pengurangan - Pelunasan Hutang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	486.937.403,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23.800.000,00
3	Dinas Pangan dan Pertanian	34.133.000,00
4	Sekretariat Daerah	23.511.440,00
5	Kecamatan Selat Gelam	15.500.000,00
	Jumlah	**583.881.843,00**

Tabel 142
Rekapitulasi Pengurangan - Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	500.400.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	352.483.000,00
3	Sekretariat DPRD	900.400.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	310.587.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.800.000,00
	Jumlah	**2.200.670.000,00**

Tabel 143
Rekapitulasi Pengurangan – Mutasi Antar OPD Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	461.100.000,00
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	279.000.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.130.000.000,00
	Jumlah	**1.870.100.000,00**

Tabel 144
Rekapitulasi Pengurangan - Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	124.774.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	426.562.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	2.091.100.000,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	198.499.000,00
5	Dinas Parawisata	11.000.000,00

NO	OPD	Nilai
6	Sekretariat Daerah	1.244.116.000,00
7	Sekretariat DPRD	172.088.300,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
9	Kecamatan Karimun	9.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	80.780.250,00
11	Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah	87.812.000,00
12	Dinas Kesehatan	1.231.062.000,00
13	Dinas Perhubungan	1.369.368.000,00
14	Dnas Tenaga Kerja dan Perindustrain	87.812.000,00
15	Kecamatan Belat	105.374.000,00
16	Kecamatan Buruh	242.149.000,00
17	Kecamatan Durai	64.298.000,00
18	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
19	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
20	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
21	Kecamatan Meral	175.624.000,00
22	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
23	Kecamatan Moro	436.249.000,00
24	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
25	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruangan	4.912.512.000,00
27	Dinas Pangan Pertanian	108.887.000,000
	Jumlah	**14.181.712.550,00**

Tabel 145
Rekapitulasi Pengurangan – Ekstrakomtable Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	3.163.123.073,00
2	Dinas Kesehatan	34.719.781,00
3	Dinas Kependudukan & Capil	3.385.500,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.800.000,00
5	Sekretariat Daerah	5.648.740,00
6	Sekretariat DPRD	3.330.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.750.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	791.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	15.306.900,00
10	Kecamatan Sugie Besar	3.225.000,00
	Jumlah	**3.237.079.994,00**

Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp531.104.275.601,50 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 146
Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	86.776.913.173,00
2.	Dinas Kesehatan	219.194.667.633,50
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.260.071.452,00
4.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	6.766.624.817,00
5.	Dinas Perhubungan	22.380.749.500,00
6.	Badan Lingkungan Hidup	14.091.470.782,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	4.483.927.508,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	3.569.822.425,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.978.267.937,00
10.	Dinas Sosial	1.595.987.431,00
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.881.576.900,00
12.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	7.739.046.871,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.104.892.984,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.128.620.500,00
15.	Sekretariat Daerah	43.100.556.263,00
16.	Sekretariat DPRD	16.582.155.039,00
17.	Inspektorat Daerah	1.670.942.209,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	7.766.765.061,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.271.125.785,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.859.627.500,00
21.	Kecamatan Karimun	2.883.238.750,00
22.	Kecamatan Meral	2.625.530.200,00
23.	Kecamatan Meral Barat	1.536.681.000,00
24.	Kecamatan Tebing	2.608.627.000,00
25.	Kecamatan Kundur	2.244.365.500,00
26.	Kecamatan Ungar	615.680.000,00
27.	Kecamatan Kundur Utara	1.010.860.200,00
28.	Kecamatan Belat	553.371.050,00
29.	Kecamatan Kundur Barat	1.245.521.000,00
30.	Kecamatan Moro	1.662.339.153,00
31.	Kecamatan Buru	3.055.253.000,00
32.	Kecamatan Durai	1.095.838.000,00
33.	Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa	597.520.400,00
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	994.298.692,00
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.699.215.450,00
36.	Dinas Pangan dan Pertanian	7.266.026.650,00
37.	Dinas Pariwisata	3.480.515.750,00
38.	Dinas Perikanan	5.821.525.350,00
39.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.485.884.281,00
40.	Dinas Komunikasi. Informatika, Statistik dan Persandian	815.241.130,00
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.478.843.250,00
42.	Kecamatan Selat Gelam	66.310.000,00
43.	Kecamatan Sugie Besar	67.500.000,00
	Jumlah	**519.133.997.576,50**

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp958.807.621.610,35 meningkat sebesar Rp47.037.073.127,46 atau 5,16% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 911.770.548.482,89.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Gedung dan Bangunan	958.807.621.610,35	911.770.548.482,89	47.037.073.127,46	5,16

Akun gedung dan bangunan menunjukkan nilai aset tetap gedung dan bangunan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri atas aset berupa bangunan gedung dan aset berupa monumen dan tugu. dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 147

Data Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	901.880.832.346,89	133.544.330.472,58	88.344.803.054,12	947.080.359.765,35
2.	Bangunan Monumen	9.235.216.922,00	1.444.042.775,00	312.636.065,00	10.366.623.632,00
3.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	654.499.214,00	713.101.999,00	6.963.000,00	1.360.638.213,00
	Jumlah	**911.770.548.482,89**	**135.701.475.246,58**	**88.664.402.119,12**	**958.807.621.610,35**

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan berasal dari belanja modal, belanja barang jasa, koreksi penyelesaian KDP, koreksi pencatatan dan mutasi antar OPD, Secara garis besar mutasi penambahan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 148

Data Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan					Total Penambahan Aset
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2024					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	Penyelesaian KDP	Koreksi Pencatatan	Mutasi Antar OPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	36.836.520.983,46	6.146.542.334,00	2.457.970.615,00	26.230.234.729,00	62.872.961.811,12	133.544.330.472,58
2.	Bangunan Monumen	0,00	0,00	1.285.257.775,00	0,00	158.765.000,00	1.444.042.775,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	685.310.000,00	27.791.999,00	0,00	0,00	0,00	713.101.999,00
	Jumlah	36.521.830.983,46	6.174.434.333,00	3.743.228.390,00	26.230.234.729,00	63.031.746.811,12	135.701.475.246,58

Penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp135.701.475.246,58. Adapun rincian dari penambahan tersebut adalah belanja modal sebesar Rp36.521.830.983,46 belanja barang jasa sebesar Rp6.174.434.333,00, koreksi penyelesaian KDP sebesar Rp3.743.228.390,00, koreksi pencatatan sebesar Rp26.230.234.729,00, dan mutasi antar OPD sebesar Rp63.031.746.811,12.

Penambahan aset gedung dan bangunan dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp36.521.830.983,46 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 149

Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	8.032.021.303,63
2	Dinas Kesehatan	7.375.133.372,83
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.869.851.307,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	69.915.000,00
5	Sekretariat Daerah	199.060.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	175.850.000,00
	Jumlah	**36.521.830.983,46**

Penambahan aset bangunan gedung dari belanja barang jasa tahun 2025 sebesar Rp6.174.434.333,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 150
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Belanja Barang Jasa OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	456.630.000,00
2	Dinas Pendidikan	5.093.991.563,00
3	Dinas Kesehatan	392.519.176,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	3.705.594,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	227.586.000,00
	Jumlah	**6.174.434.333,00**

Penambahan aset bangunan gedung dari penyelesaian KDP sebesar Rp3.743.228.390,00 OPD tahun 2025 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 151
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Penyelesaian KDP Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.743.228.390,00
	Jumlah	**3.743.228.390,00**

Penambahan aset bangunan gedung dari koreksi pencatatan sebesar Rp26.230.234.729,00tahun 2025 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 152
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi Pencatatan Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	13.113.165.529,00
2	Dinas Perhubungan	12.885.321.200,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	231.748.000,00
	Jumlah	**26.230.234.729,00**

Penambahan aset gedung dan bangunan dari mutasi antar OPD tahun 2025 sebesar Rp63.031.746.811,12 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 153
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Mutasi antar OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	1.254.135.586,41
2	Dinas Lingkungan Hidup	172.968.350,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	58.264.707.060,00
4	Sekretariat Daerah	3.181.130.814,71
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	158.785.000,00
	Jumlah	**63.031.746.811,12**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Koreksi Pencatatan, Pelunasan Hutang, Penghapusan, Hibah, Reklasifikasi dan Mutasi atar OPD. Secara garis besar mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 154
Data Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Hibah	Reklasifikasi	Mutasi Antar OPD	Total Pengurangan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)
1	GEDUNG DAN BANGUNAN							
a	Bangunan Gedung	373.456.370,37	6.133.820.170,63	1.686.054.000,00	2.077.674.000,00	15.207.799.702,00	62.872.961.811,12	88.351.766.054,12
b	Bangunan Monumen	153.851.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.785.000,00	312.636.065,00
c	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	527.307.435,37	6.133.820.170,63	1.686.054.000,00	2.077.674.000,00	15.207.799.702,00	63.031.746.811,12	88.664.402.119,12

Pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 sebesar Rp88.664.402.119,12 berasal dari koreksi pencatatan Rp527.307.435,37, pelunasan hutang Rp6.133.820.170,63, penghapusan Rp1.686.054.000,00, hibah Rp2.077.674.000,00, dan reklasifikasi Rp15.207.799.702,00 serta mutasi antar OPD Rp63.031.746.811,12.

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp527.307.435,37, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 155
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikam	81.267.968,37
2	Dinas Kesehatan	23.794.436,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	343.208.031,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	9.122.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	69.915.000,00
	Jumlah	**527.307.435,37**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari Pelunasan Hutang sebesar Rp6.133.820.170,63, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 156
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Pelunasan Hutang OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikam	494.756.873,63
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.639.061.297,00
	Jumlah	**6.133.820.170,63**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan Penghapusan Rp1.686.054.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut

Tabel 157
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Penghapusan OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.686.054.000,00
	Jumlah	**1.686.054.000,00**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung Hibah Rp 2.077.674.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 158
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perikanan	179.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	172.774.000,00
3	Sekretariat Daerah	1.725.400.000,00
	Jumlah	**2.077.674.000,00**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung reklasifikasi Rp15.207.799.702,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 159
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	484.500.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.495.939.702,00
3	Sekretariat Daerah	2.227.360.000,00
	Jumlah	**15.207.799.702,00**

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2025 berasal dari aset bangunan gedung Mutasi Antar OPD Rp63.031.746.811,12, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 160
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari Hibah OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	62.872.961.811,12
2	Baperlitbang	158.785.000,00
	Jumlah	**63.031.746.811,12**

Aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2025 sebesar Rp958.807.621.610,35 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 161
Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	306.467.969.469,31
2.	Dinas Kesehatan	178.569.439.910,89
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	156.233.431.922,04
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.740.124.201,00
5.	Dinas Perhubungan	87.284.537.622,40
6.	Badan Lingkungan Hidup	4.730.715.541,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	6.759.797.216,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	173.803.000,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.051.309.969,00

NO	OPD	NILAI (Rp)
10.	Dinas Sosial	302.500.000,00
11.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	77.503.588.134,00
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.790.494.811,00
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	79.000.000,00
14.	Sekretariat Daerah	49.653.932.991,71
15.	Sekretariat DPRD	7.453.636.000,00
16.	Inspektorat Daerah	6.046.400.000,00
17.	Badan Pendapatan Daerah	1.669.981.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.978.190.000,00
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.249.600.000,00
20.	Kecamatan Karimun	3.633.500.000,00
21.	Kecamatan Meral	1.463.804.864,00
22.	Kecamatan Meral Barat	2.703.000.545,00
23.	Kecamatan Tebing	1.985.190.000,00
24.	Kecamatan Kundur	5.655.990.000,00
25.	Kecamatan Ungar	2.090.614.655,00
26.	Kecamatan Kundur Utara	2.974.500.000,00
27.	Kecamatan Belat	1.486.717.804,00
28.	Kecamatan Kundur Barat	974.900.000,00
29.	Kecamatan Moro	3.406.627.421,00
30.	Kecamatan Buru	1.379.182.000,00
31.	Kecamatan Durai	594.395.000,00
32.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.126.400.000,00
33.	Dinas Pangan dan Pertanian	5.443.755.436,00
34.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.262.610.170,00
35.	Dinas Perikanan	7.589.011.857,00
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	940.980.050,00
37.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	357.790.000,00
	Jumlah	958.807.621.610,35

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.082.384.874.934,07	2.053.830.773.401,07	28.554.101.533,00	1,39

Akun jalan, irigasi dan jaringan menunjukkan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang terdiri atas aset berupa jalan dan jembatan. Bangunan air (irigasi) instalasi dan jaringan pada Tahun 2025 sebesar Rp2.082.384.874.934,07 meningkat sebesar Rp28.554.101.533,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.053.830.773.401,07 atau 1,39 % dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 162
Data Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

NO	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	1.647.425.449.939,61	39.493.249.328,00	24.927.076.534,00	1.661.991.622.733,61
2.	Bangunan Irigasi (AIR)	314.271.798.513,46	13.224.640.199,00	379.525.400,00	327.116.813.312,46
3.	Instalasi	35.012.269.449,39	0,00	149.745.000,00	34.862.524.449,39
4.	Jaringan	57.121.255.498,61	1.292.658.940,00	0,00	58.413.914.438,61
	Jumlah	2.053.830.773.401,07	54.010.448.467,00	25.456.346.934,00	2.082.384.874.934,07

Mutasi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal, belanja barang jasa, koreksi pencatatan, reklasifikasi dan hutang. Secara garis besar mutasi penambahan aset jalan, irigasi, dan jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 163
Data Mutasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan					
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2025					
		Belanja Modal	Belanja Barang Jasa	koreksi pencatatan	Reklasifikasi	Hutang	Total Penambahan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jalan dan Jembatan	32.861.479.692,00	982.269.236,00	0,00	0,00	5.649.600.400,00	39.493.249.328,00
2	Bangunan Irigasi (AIR)	2.274.849.100,00	266.425.799,00	9.712.521.500,00	484.500.000,00	486.243.800,00	13.224.540.199,00
3	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jaringan	557.145.500,00	145.253.000,00	0,00	590.260.440,00	0,00	1.292.658.940,00
	Jumlah	**35.693.474.292,00**	**1.393.948.035,00**	**9.712.521.500,00**	**1.074.760.440,00**	**6.135.744.200,00**	**54.010.448.467,00**

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp54.010.448.467,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp35.693.474.292,00, belanja barang jasa sebesar Rp1.393.948.035,00, koreksi pencatatan sebesar Rp9.712.521.500,00, reklasifikasi sebesar Rp1.074.760.440,00 dan hutang sebesar Rp6.135.744.200,00.

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal tahun 2025 sebesar Rp35.693.474.292,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 164
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.041.986.775,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	2.651.487.517,00
	Jumlah	**35.693.474.292,00**

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Belanja Barang Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.393.948.035,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 165
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Barang Jasa pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.350.306.800,00
2	Dinas Pendidikan	7.942.999,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	35.698.236,00
	Jumlah	**1.393.948.035,00**

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Koreksi Pencatatan tahun 2025 sebesar Rp9.712.521.500,00 terletak pada OPD sebagai berikut :

Tabel 166
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Koreksi Pencatatan OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	9.712.521.500,00
	Jumlah	**9.712.521.500,00**

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Reklasifikasi belanja tahun 2025 sebesar Rp1.074.760.440,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 167
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Reklasifikasi pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	484.500.000,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	590.260.440,00
	Jumlah	**1.074.760.440,00**

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari Hutang belanja tahun 2025 sebesar Rp6.135.744.200,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 168
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.959.944.200,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	175.800.000,00
	Jumlah	**6.135.744.200,00**

Mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp25.456.346.934,00. Secara garis besar mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 169
Data Mutasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN			
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025			
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Hibah	Total Pengurangan Aset
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*
a	Jalan dan Jembatan	37.364.527,00	11.661.284.187,00	13.241.487.820,00	24.940.136.534,00
b	Bangunan Irigasi (AIR)	0,00	366.465.400,00	0,00	366.465.400,00
c	Instalasi	0,00	0,00	149.745.000,00	149.745.000,00
d	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**37.364.527,00**	**12.027.749.587,00**	**13.391.232.820,00**	**25.456.346.934,00**

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari koreksi pencatatan sebesar Rp37.364.527,00, pelunasan hutang sebesar Rp12.027.749.587,00, dan hibah sebesar Rp13.391.232.820,00.

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari koreksi pencatatan tahun 2025 sebesar Rp37.364.527,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 170
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. Irigasi. dan jaringan Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.171.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.181.527,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	2.012.000,00
	Jumlah	**37.364.527,00**

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari pelunasan hutang tahun 2025 sebesar Rp12.027.749.587,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 171
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.229.862.070,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1.797.887.517,00
	Jumlah	**12.027.749.587,00**

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari hibah tahun 2025 sebesar Rp13.391.232.820,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 172
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. Irigasi. dan jaringan Dari Hibah pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.391.232.820,00
	Jumlah	**13.391.232.820,00**

Selanjutnya Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp2.082.384.874.934,07 merupakan aset tetap pada OPD. sebagai berikut:

Tabel 173
Rekapitulasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	8.596.569.499,00
2.	Dinas Kesehatan	19.177.557.406,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.822.363.826.124,68
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	160.449.000,00
5.	Dinas Perhubungan	127.729.350.622,05
6.	Dinas Lingkungan Hidup	289.306.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	76.026.201.525,34
8.	Dinas Sosial	2.800.000,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	370.870.000,00
10.	Sekretariat Daerah	571.775.000,00
11.	Sekretariat DPRD	99.911.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.950.000,00
13.	Kecamatan Meral Barat	104.933.000,00
14.	Kecamatan Kundur	224.349.000,00
15.	Kecamatan Kundur Utara	2.319.571.000,00
16.	Kecamatan Moro	156.663.750,00
17.	Kecamatan Buru	168.416.000,00
18.	Dinas Pangan dan Pertanian	1.295.010.718,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.374.434.867,00
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	15.013.327.100,00
21.	Dinas Perikanan	1.671.595.322,00
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pengelola	4.642.008.000,00
Jumlah		**2.082.384.874.934,07**

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan. Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Tetap Lainnya	58.685.782.320,00	52.986.691.130,00	5.699.091.190,00	10,76

Akun Aset tetap lainnya menunjukkan nilai aset tetap lainnya dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. yang terdiri atas aset berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset renovasi dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 174
Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Buku Perpustakaan	43.303.891.541,00	5.741.743.190,00	76.252.000,00	48.969.382.731,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4.382.503.240,00	33.600.000,00	0,00	4.416.103.240,00
3	Hewan /Ternak	495.858.000,00	0,00	0,00	495.858.000,00
4	Biota Perairan	91.226.700,00	0,00	0,00	91.226.700,00
5	Tanaman	4.267.313.649,00	0,00	0,00	4.267.313.649,00
6	Aset Renovasi	445.898.000,00	0,00	0,00	445.898.000,00
Jumlah		**52.986.691.130,00**	**5.775.343.190,00**	**76.252.000,00**	**58.685.782.320,00**

Mutasi penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp5.775.343.190,00 berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.755.943.190,00, Reklasifikasi sebesar Rp19.400.000,00. Secara garis besar mutasi penambahan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 175
Data Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN		
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2025		
		Belanja Modal	Reklasifikasi	Total Penambahan Aset
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*
1	ASET TETAP LAINNYA			
2	Buku Perpustakaan	5.737.943.190,00	3.800.000,00	5.741.743.190,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	18.000.000,00	15.600.000,00	33.600.000,00
4	Hewan /Ternak dan	0,00	0,00	0,00
5	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
6	Tanaman	0,00	0,00	0,00
7	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.755.943.190,00**	**19.400.000,00**	**5.775.343.190,00**

Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal tahun 2025 sebesar Rp5.755.943.190,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 176
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	5.750.081.190,00
2	Dinas Perpustakaan	5.862.000,00
	Jumlah	**5.755.943.190,00**

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi tahun 2025 sebesar Rp19.400.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 177
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	19.400.000,00
	Jumlah	**19.400.000,00**

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp76.252.000,00, terdapat pada Pelunasan Hutang sebesar Rp5.862.000,00, penghapusan sebear Rp70.390.000,00, Secara garis besar mutasi pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 178
Data Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN		
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025		
		Pelunasan Utang Belanja	Penghapusan	Total Pengurangan Aset
	ASET TETAP LAINNYA	*(Rp)*	*(Rp)*	
1	Bahan Perpustakaan	5.862.000,00	70.390.000,00	76.252.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3	Hewan /Ternak	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	0,00	0,00	0,00
6	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.862.000,00**	**70.390.000,00**	**76.252.000,00**

Pengurangan aset tetap lainnya dari Pelunasan Hutang tahun 2025 sebesar Rp5.862.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 179
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perpustakaan	5.862.000,00
	Jumlah	**5.862.000,00**

Pengurangan aset tetap lainnya dari Penghapusan tahun 2025 sebesar Rp70.390.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 180
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari Penghapusan pada OPD Tahun 2025

NO	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	64.640.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.750.000,00
	Jumlah	**70.390.000,00**

Aset tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp58.685.782.320,00 merupakan aset tetap pada OPD yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 181
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	50.265.398.861,00
2.	Dinas Kesehatan	23.285.000,00
3.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1.534.016.778,00

No	OPD	Nilai (Rp)
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.440.000,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	539.189.000,00
6.	Sekretariat Daerah	161.234.000,00
7.	Sekretariat DPRD	55.891.000,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	8.723.000,00
9.	Kecamatan Karimun	94.170.871,00
10.	Kecamatan Meral	119.000,00
11.	Kecamatan Meral Barat	87.421.000,00
13.	Kecamatan Kundur	27.984.000,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	862.894.927,00
15.	Dinas Pertanian	3.498.540.000,00
16.	Dinas Pariwisata	263.335.000,00
17.	Dinas Perikanan	91.226.700,00
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.147.932.183,00
Jumlah		**58.685.782.320,00**

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pekerjaan	10.836.078.683,55	14.579.307.073,55	-3.743.228.390,00	-25,67

Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menunjukkan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal 31 Desember 2025 belum selesai. Saldo KDP per 31 Desember 2025 senilai Rp 10.836.078.683,55, mengalami penurunan sebesar Rp3.743.228.390,00 atau 25,67% bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp14.579.307.073,55.

Mutasi penambahan saldo akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp0,00 dan Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu sebesar Rp3.743.228.390,00 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 182
Data Uraian Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP Tahun 2025

No	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2025	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konstruksi Dalam Pekerjaan	14.579.307.073,55	0,00	3.743.228.390,00	10.836.078.683,55
Jumlah		14.579.307.073,55	**0,00**	**3.743.228.390,00**	**10.836.078.683,55**

Mutasi atas penambahan KDP tahun 2025 sebesar Rp0,00. Jadi tidak ada penambahan dari KDP tahun 2025.

Mutasi atas pengurangan KDP tahun 2025 sebesar Rp3.743.228.390,00 berasal dari penyelesaian KDP atas aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.743.228.390,00. terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saldo KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.836.078.683,55 terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 183
Rekapitulasi KDP pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp9.806.478.683,55
2	Dinas Perhubungan	Rp1.029.600.000,00
	Jumlah	**Rp10.836.078.683,55**

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah garis lurus (*straightline method*).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	(Kenaikan)/ Penurunan (Rp)	%
Akumulasi Penyusutan	**(1.959.220.141.615,53)**	**(1.874.328.259.128,97)**	**84.891.882.486,56**	**4,53**

Total Akumulasi Penyusutan tahun 2025 Rp1.959.220.141.615,53 meningkat sebesar Rp84.891.882.486,56 atau 4,53% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.874.328.259.128,97 terdiri atas OPD sebagai berikut:

Tabel 184
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan pada OPD Tahun 2025

NO	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
1	Dinas Pendidikan	70.606.510.925,00	75.552.876.261,00	4.990.468.136,00	151.149.855.322,00
2	Dinas Kesehatan	168.423.884.716,50	36.004.686.732,00	3.227.138.390,00	207.655.709.838,50
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.406.047.532,00	20.253.170.010,00	1.285.444.307.750,03	1.313.103.525.292,03
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.531.895.242,00	1.022.989.930,00	52.660.259,00	7.607.545.431,00
5	Dinas Perhubungan	8.272.497.006,00	15.526.623.353,00	39.211.819.191,00	63.010.939.550,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	7.316.605.134,00	367.199.956,00	93.143.633,00	7.776.948.723,00
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	3.865.103.372,00	718.162.304,00	19.393.237.295,00	23.976.502.971,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.110.246.621,00	10.717.852,00	-	3.120.964.473,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.219.415.747,00	120.831.228,00	-	2.340.246.975,00
10	Dinas Sosial	1.536.179.648,00	75.497.734,00	1.528.334,00	1.613.205.716,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	2.538.662.086,00	-	-	2.538.662.086,00
12	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Sumber Daya Mineral	6.871.509.116,00	9.889.328.031,00	3.086.485.525,00	19.847.322.672,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.580.032.935,00	2.060.358.398,00	202.119.870,00	4.842.509.203,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	2.071.588.984,00	79.000.000,00	-	2.150.588.984,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	1.798.179.096,00	-	-	1.798.179.096,00

NO	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
16	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	443.813.901,00	47.998.600,00	-	491.812.501,00
17	Sekretariat Daerah	37.378.533.503,00	14.767.320.666,00	153.838.398,00	52.299.692.567,00
18	Sekretariat DPRD	11.846.101.185,00	2.467.725.200,00	33.858.740,00	14.347.685.125,00
19	Inspektorat Daerah	1.427.597.247,00	2.089.203.245,00	-	3.516.840.492,00
20	Badan Pendapatan Daerah	6.983.310.408,00	615.625.216,00	-	7.598.935.624,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.224.952.873,00	2.142.368.042,00	5.763.334,00	4.373.084.249,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.749.038.541,00	2.139.638.897,00	-	3.888.677.438,00
23	Kecamatan Karimun	2.299.358.094,00	651.158.785,00	-	2.950.516.879,00
24	Kecamatan Meral	1.971.570.017,00	455.224.793,00	-	2.426.794.810,00
25	Kecamatan Meral Barat	1.440.154.416,00	493.534.190,00	104.933.000,00	2.038.621.606,00
26	Kecamatan Tebing	2.311.702.048,00	669.175.360,00	-	2.980.877.408,00
27	Kecamatan Kundur	2.036.703.166,00	1.824.151.202,00	173.730.586,00	4.034.584.954,00
28	Kecamatan Ungar	509.122.274,00	370.679.047,00	-	879.801.321,00
29	Kecamatan Kundur Utara	637.217.200,00	924.157.432,00	960.859.255,00	2.522.233.887,00
30	Kecamatan Belat	436.287.383,00	202.111.863,00	-	638.399.246,00
31	Kecamatan Kundur Barat	906.281.334,00	292.647.817,00	-	1.198.929.151,00
32	Kecamatan Moro	1.096.682.286,00	1.352.268.704,00	43.409.000,00	2.492.359.990,00
33	Kecamatan Buru	2.803.435.250,00	380.942.680,00	168.416.000,00	3.352.793.930,00
34	Kecamatan Durai	920.092.267,00	181.904.230,00	-	1.101.996.497,00
35	Kecamatan Sugie Besar	297.292,00	-	-	297.292,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	334.681.022,00	-	-	334.681.022,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	831.354.142,00	-	-	831.354.142,00
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.652.151.293,00	615.185.346,00	-	3.267.336.639,00
38	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.744.448.109,00	1.320.553.694,00	971.737.439,00	9.036.739.242,00
39	Dinas Pariwisata	2.230.564.063,00	535.189.195,00	383.518.466,00	3.149.271.724,00
40	Dinas Perikanan	5.481.676.599,00	1.982.413.604,00	1.148.040.751,00	8.612.130.954,00
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.523.389.226,00	258.425.234,00	1.539.172.133,00	8.320.986.593,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	399.368.913.299,50	198.461.042.831,00	1.361.390.185.485,03	1.959.220.141.615,53

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.824.355.164,07 menurun sebesar Rp2.645.604.399,62 atau 25,27% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp10.469.959.563,69, terdiri atas:

Tabel 185
Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2025

Uraian	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.105.101.144,69	(1.105.101.144,69)	(100,00)
Aset Tak Berwujud	13.578.073.020,00	4.591.768.000,00	8.986.305.020,00	195,70
Aset Lain-lain	20.599.677.402,07	16.756.887.763,00	3.842.789.639,07	22,93
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(26.353.395.258,00)	(11.983.797.344,00)	(14.369.597.914,00)	119,91
Jumlah	**7.824.355.164,07**	**10.469.959.563,69**	**(2.645.604.399,62)**	**(25,27)**

7.5.3.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan pencatatan atas tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung merugikan keuangan daerah atau tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Adapun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tercatat pada neraca tahun 2024 sebesar Rp1.105.101.144,69 dan telah dibayar sebesar Rp440.177.345,62, sedangkan sisa tuntutan ganti kerugian daerah tersebut sebesar Rp664.923.799,07 per 31 Desember 2025 ini, direklasifikasikan ke aset lain-lain pada akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Sehingga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada neraca Tahun 2025 adalah Rp0,00.

Tabel 186
Rincian Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025

OPD dan Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.092.500,00	0,00	26.092.500,00	0,00
Subtotal	**26.092.500,00**	**0,00**	**26.092.500,00**	**0,00**
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.662.500,00	0,00	34.000.000,00	31.662.500,00
Subtotal	**65.662.500,00**	**0,00**	**34.000.000,00**	**31.662.500,00**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	108.940.000,00	0,00	47.260.000,00	61.680.000,00
Subtotal	**108.940.000,00**	**0,00**	**47.260.000,00**	**61.680.000,00**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Kekurangan penyetoran belanja modal	1,38	0,00	0,00	1,38
Koreksi lebih catat Beban Jasa Konsultansi atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi	20.843.550,00	0,00	20.843.550,00	0,00
Koreksi lebih catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat kerja dan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor	258.163.859,22	0,00	227.527.789,44	30.636.069,78
Koreksi lebih catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Pertemuan	140.454.945,91	0,00	0,00	140.454.945,91
Subtotal	**419.462.356,51**	**0,00**	**248.371.339,44**	**171.091.017,07**

OPD dan Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
DINAS KESEHATAN				
Tuntutan Ganti Rugi an. dr. Ridwan yang telah mendapatkan putusan pengadilan	141.881.262,00	0,00	0,00	141.881.262,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga	1.441.300,00	0,00	0,00	1.441.300,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan beras	1.158.720,00	0,00	0,00	1.158.720,00
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.040.000,00	0,00	9.549.000,00	27.491.000,00
Subtotal	**181.521.282,00**	**0,00**	**9.549.000,00**	**171.972.282,00**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga	5.348.572,00	0,00	5.348.572,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan beras	1.738.080,00	0,00	1.738.080,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Jasa Konsultansi atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi	16.873.350,00	0,00	16.873.350,00	0,00
Koreksi lebih catat nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.664.504,18	0,00	6.664.504,18	0,00
Subtotal	**30.624.506,18**	**0,00**	**30.624.506,18**	**0,00**
DINAS PERHUBUNGAN				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.392.500,00	0,00	5.400.000,00	5.992.500,00
Subtotal	**11.392.500,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**5.992.500,00**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Koreksi lebih catat Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	2.275.000,00	2.825.000,00
Subtotal	**7.620.000,00**	**0,00**	**4.795.000,00**	**2.825.000,00**
SEKRETARIAT DAERAH				
Koreksi lebih catat Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	253.785.500,00	0,00	34.085.000,00	219.700.500,00
Subtotal	**253.785.500,00**	**0,00**	**34.085.000,00**	**219.700.500,00**
TOTAL	**1.105.101.144,69**	**0,00**	**440.177.345,62**	**664.923.799,07**

7.5.3.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise. Aset tak berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp13.578.073.020,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.986.305.020,00 atau 195,70% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.591.768.000,00. Mutasi aset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Tak Berwujud	**4.591.768.000,00**	**9.414.691.020,00**	**428.386.000,00**	**13.578.073.020,00**

Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp9.414.691.020,00, berasal dari belanja modal sebesar Rp1.085.005.520,00 dan reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp8.329.685.500,00. Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal tersebut terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 187
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Bapenda	198.000.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.798.730,00
3	Dinas Pendidikan	343.846.090,00
4	Dinas Tenaga Kerja	121.500.000,00
5	Inspektorat Daerah	89.700.000,00
6	Dinas Parawisata	59.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	74.703.000,00
8	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	119.957.700,00
	Jumlah	**1.085.005.520,00**

Sedangkan penambahan aset tak berwujud yang berasal dari reklasifikasi terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 188
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari Reklasifikasi pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.450.000,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.350.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.261.440.500,00
	Jumlah	**8.329.685.500,00**

Mutasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp428.386.000,00, yang merupakan koreksi pengurangan atas aset tak berwujud dimana telah dicatat pada tahun 2024 atas perolehannya dari hutang, dan tahun 2025 dilakukan pembayaran hutang tersebut dan tercatat kembali pada tahun 2025 sebesar Rp389.200.000,00. Dan terdapat penghapusan aset tidak terwujud sebesar Rp39.186.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 189
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Dari Pengakuan Hutang pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Inspektorat Daerah	89.700.000,00
2	Dinas Pariwisata	59.500.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	240.000.000,00
	Jumlah	**389.200.000,00**

Tabel 190
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Dari Penghapusan pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	39.186.000,00
	Jumlah	**39.186.000,00**

Aset tak berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp 13.578.073.020,00, terdapat pada OPD, sebgai berikut:

Tabel 191
Rekapitulasi Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	979.489.090,00
2	Dinas Kesehatan	206.658.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.172.462.000,00
4	Dinas Perhubungan	83.849.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	146.500.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	13.400.000,00
8	Sekretariat Daerah	230.484.000,00
9	Sekretariat DPRD	201.850.000,00
10	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	565.800.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.465.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.850.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	125.946.500,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	59.500.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	170.861.730,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
18	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
19	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	119.957.700,00
	Jumlah	**13.578.073.020,00**

7.5.3.4.3 Aset Lain - Lain

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain – lain tahun 2025 sebesar Rp20.599.677.402,07 mengalami kenaikan sebesar Rp3.842.789.639,07 atau 22,93% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp16.756.887.763,00. Mutasi aset lain - lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 192
Data Mutasi Aset Lain - Lain Tahun 2025

No.	Jenis Aktiva	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Jumlah
			Penambahan	Pengurangan	
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*
1.	Aset Rusak Berat/Usang	16.756.887.763,00	12.440.217.000,00	9.262.351.160,00	19.934.753.603,00
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	664.923.799,07	0,00	664.923.799,07
	Jumlah	**16.756.887.763,00**	**13.105.140.799,07**	**9.262.351.160,00**	**20.599.677.402,07**

Saldo akun Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp20.599.677.402,07 terdiri dari saldo awal sebesar Rp16.756.887.763,00, ditambah aset rusak berat/usang sebesar Rp12.440.217.000,00 dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp664.923.799,07 serta terdapat pengurangan sebesar Rp887.784.000,00, reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp8.329.685.500,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp44.881.600,00.

Tabel 193
Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain
Aset Rusak Berat/Usang
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	468.916.000,00
2	Sekretariat Dprd	147.524.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.912.512.000,00
4	Dinas Perhubungan	1.369.368.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.097.588.000,00
6	Rsud M. Sani	133.474.000,00
7	Dinas Pendidikan	105.374.000,00
8	Dinas Pemuda Dan Olahraga	196.699.000,00
9	Dinas Pangan Dan Pertanian	108.887.000,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja	87.812.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	87.812.000,00
13	Kecamatan Meral	175.624.000,00
14	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
15	Kecamatan Moro	436.249.000,00
16	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
17	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
18	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
19	Kecamatan Buru	242.149.000,00
20	Kecamatan Durai	84.299.000,00
21	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
22	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
23	Kecamatan Belat	105.374.000,00
24	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
	Jumlah	**12.440.217.000,00**

Tabel 194
Rekapitulasi Penambahan Aset Lain-lain
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	31.662.500,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.680.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171.091.017,07
4	Dinas Kesehatan	171.972.282,00
5	Dinas Perhubungan	5.992.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.825.000,00
7	Sekretariat Daerah	219.700.500,00
	Jumlah	**664.923.799,07**

Tabel 195
Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	887.784.000,00
	Jumlah	**887.784.000,00**

Tabel 196
Rekapitulasi Pengurangan Aset Lain-lain
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.445.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.450.000,00
3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	15.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.350.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.261.440.500,00
	Jumlah	**8.329.685.500,00**

Tabel 197
Rekapitulasi Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain
pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.881.660,00
	Jumlah	**44.881.660,00**

Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp20.600.909.822,07 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 198
Rekapitulasi Aset Lain-lain pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	705.579.500,00
2	Sekretariat DPRD	147.524.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.175.172.603,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	171.091.017,07
5	Dinas Perhubungan	1.523.753.500,00
6	Dinas Kesehatan	1.317.080.282,00
7	Rsud M. Sani	133.474.000,00
8	Dinas Pendidikan	105.374.000,00
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	196.699.000,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	127.887.000,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja	87.812.000,00

No	OPD	Nilai
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	87.812.000,00
14	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	31.662.500,00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.560.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	2.625.000,00
17	Kecamatan Meral	175.624.000,00
18	Kecamatan Tebing	73.762.000,00
19	Kecamatan Moro	436.249.000,00
20	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
21	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
22	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
23	Kecamatan Buru	242.149.000,00
24	Kecamatan Durai	84.299.000,00
25	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
26	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
27	Kecamatan Belat	105.374.000,00
28	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
	Jumlah	**20.699.677.402,07**

7.5.3.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud dan aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp26.353.395.258,00, nilai tersebut naik sebesar Rp14.369.597.914,00 atau 119,91% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11.983.797.344,00.

Akumulasi penyusutan Aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud dan aset lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp26.353.395.258,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 199
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya pada OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Badan Pendapatan Daerah	178.145.834,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	192.702.208,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	139.452.068,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	7.705.000,00
6	Dinas Perhubungan	1.543.614.442,00
7	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian	23.325.108,00
8	Dinas Tenaga Kerja	109.020.333,00
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	226.778.042,00
10	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.548.750,00
12	Dinas Kesehatan	1.429.322.000,00
13	Dinas Pangan Dan Pertanian	127.887.000,00
14	Dinas Pariwisata	12.395.833,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.724.167.630,00
16	Dinas Pendidikan	726.401.667,00
17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	11.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	121.372.333,00
19	Sekretariat Daerah	567.828.260,00
20	Sekretariat DPRD	291.922.750,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	406.802.000,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	1.291.900.000,00
23	Kecamatan Meral	175.624.000,00
24	Kecamatan Tebing	73.762.000,00

No	OPD	Nilai
25	Kecamatan Moro	436.249.000,00
26	Kecamatan Kundur	196.699.000,00
27	Kecamatan Kundur Barat	328.534.000,00
28	Kecamatan Kundur Utara	189.673.000,00
29	Kecamatan Buru	242.149.000,00
30	Kecamatan Durai	84.299.000,00
31	Kecamatan Meral Barat	87.812.000,00
32	Kecamatan Ungar	105.374.000,00
33	Kecamatan Belat	105.374.000,00
	Jumlah	26.353.395.258,00

7.5.3.5 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.407.429.385,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian properti investasi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 200

Properti Investasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Properti Investasi Tanah	48.151.091.000,00	0,00
Properti Investasi Bangunan Gedung	14.524.239.702,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(4.267.901.317,00)	0,00
Total	**58.407.429.385,00**	**0,00**

Tabel 201

Rincian Properti Investasi Tanah

KIB	TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET
A	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	9.427.200.000	Stadion Olahraga
A	Dinas Pariwisata	Pembelian	3.395.172.000	Kawasan Wisata Pantai Pelawan
A	Dinas Perikanan	Pembelian	149.000.000	Lahan Cluster Industri Pengembangan Rumput Laut
A	Dinas Perikanan	Pembelian	94.598.000	Lahan Cluster Industri Pengembangan Rumput Laut
A	Dinas Pangan Dan Pertanian	Pembelian	6.950.000.000	Lahan Pertanian
A	Dinas Perhubungan	Pembelian	597.016.000	Lahan Terminal Meral
A	Sekretariat Daerah	Pembelian	11.751.025.000	Lahan Rumah Dinas Jabatan

KIB	TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET
A	Sekretariat Daerah	Pembelian	1.501.185.000	Lahan Gedung Pertemuan (Gedung Nasional)
A	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Hibah	2.877.525.000	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (ABMA) Lapangan
A	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	Pembelian	6.295.168.000	Lahan Pasar Puakang
A	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pembelian	2.620.416.000	Koperasi Merah Putih
A	Kecamatan Kundur Barat	Pembelian	750.000.000	Lahan Kantor Camat Kundur Barat
A	Kecamatan Kundur Utara	Pembelian	782.040.000	Lahan Kantor Camat Kundur Utara
A	Kecamatan Kundur	Pembelian	310.746.000	Lahan Kantor UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan dan Rumah Dinas 2
A	Kecamatan Meral	Pembelian	650.000.000	Lahan Kantor Lurah Sei Raya
Jumlah			**48.151.091.000**	

Tabel 202

Rincian Properti Investasi Bangunan Gedung

KIB	GEDUNG DAN BANGUNAN	ASAL USUL	HARGA	KET
C	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	4.030.649.000	(Stadion Badang Perkasa) Kantor & Tribun 2004
C	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pembelian	8.465.290.702	(Stadion Badang Perkasa) Gedung Indor 2010
C	Sekda (Bagian Perlengkapan)	Pembelian	1.277.800.000	Gedung Serba Guna 2002
C	Sekda (Bagian Perlengkapan)	Pembelian	750.500.000	Gedung Nasional 2009
Jumlah			**14.524.239.702**	

Tabel 203

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung

No	OPD	Properti Investasi	Nilai (Rp)
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1.211.218.072,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2.393.665.253,00
3	Sekretariat Daerah	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	441.516.264,00
4	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	221.501.728,00
		Total	**4.267.901.317,00**

7.5.3.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp125.409.321.655,69 atau mengalami penurunan sebesar Rp46.391.679.797,91 atau 27,00% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp171.801.001.453,60 terdiri atas:

	2025	2024	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.000,00	1.494.098,00	(1.478.098,00)	(98,93)
Pendapatan Diterima Dimuka	551.365.500,00	620.394.600,00	(69.029.100,00)	(11,13)
Utang Belanja	124.857.940.155,69	171.179.112.755,60	(46.321.172.599,91)	(27,06)
Jumlah	**125.409.321.655,69**	**171.801.001.453,60**	**(46.391.679.797,91)**	**(27,00)**

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2025 sebesar Rp125.409.321.655,69 dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	16.000,00	1.494.098,00	(1.478.098,00)	(98,93)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.478.098,00 atau 98,83% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.494.098,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.494.098,00 telah disetor dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 204
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Utang	Keterangan
1.	PPh Pasal 23	250.900,00	Telah disetor pada tanggal 10 Januari 2025
2.	PPN	1.243.198,00	Telah disetor pada tanggal 10 Januari 2025
Total		**1.494.098,00**	

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.000,00 merupakan PPh Pasal 23 atas belanja sewa kendaraan roda 4 pada Dinas Pariwisata dan telah disetor pada tanggal 3 Februari 2026. Rincian Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 205
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5-6)*
1	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.427.091,00	4.427.091,00	0,00	0,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	34.236.827,00	34.236.827,00	0,00	0,00
3	Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.190.818,00	12.190.818,00	0,00	0,00
4	Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	102.113.542,00	102.113.542,00	0,00	0,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	344.093.189,00	344.093.189,00	0,00	0,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	118.112.523,00	118.112.523,00	0,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	566.116.230,00	566.116.230,00	0,00	0,00
8	Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.697.938.409,00	1.697.938.409,00	0,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	0,00	15.444.915.590,00	15.444.915.590,00	0,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai	0,00	2.160.923,00	2.160.923,00	0,00	0,00
11	Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	4.163.252.355,00	4.163.252.355,00	0,00	0,00
12	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	12.810.519.184,00	12.810.519.184,00	0,00	0,00
13	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	6.288.146,00	6.288.146,00	0,00	0,00
14	Taspen	0,00	1.458.237.584,00	1.458.237.584,00	0,00	0,00
15	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	12.691.546.222,00	12.691.546.222,00	0,00	0,00
16	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	588.357.348,00	588.357.348,00	0,00	0,00
17	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	706.959.220,00	706.959.220,00	0,00	0,00
18	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	2.075.325.951,00	2.075.325.951,00	0,00	0,00
19	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
20	Pajak Penghasilan Ps Ps 25	0,00	282.162,00	282.162,00	0,00	0,00
21	Pajak Pertambahan Nilai	0,00	17.536.900.454,00	17.536.900.454,00	0,00	0,00
22	Lainnya	0,00	549.136.756,00	549.136.756,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**70.914.630.524,00**	**70.914.630.524,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 206
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) OPD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4-5+6)*
1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	0,00	92.865.393,50	92.865.393,50	0,00	0,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	0,00	25.542.339,33	25.542.339,33	0,00	0,00
3	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	250.900,00	54.279.876,86	54.514.776,86	0,00	16.000,00
4	Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2	0,00	5.034.565,00	5.034.565,00	0,00	0,00
5	Pajak Penghasilan PPh Pasal 15	0,00	108.108,00	108.108,00	0,00	0,00
6	Pajak Penambahan Nilai (PPN-Pusat)	1.243.198,00	251.593.873,51	252.837.071,51	0,00	0,00
7	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.494.098,00**	**429.424.156,20**	**430.902.254,20**	**0,00**	**16.000,00**

7.5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	551.365.500,00	620.394.600,00	(69.029.100,00)	(11,13)

Adapun rincian pendapatan diterima dimuka senilai Rp551.365.500,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 207
Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3+4-5)*
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	620.394.600,00	531.777.600,00	618.806.700,00	533.365.500,00
2	Reribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD Muhammad Sani	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Jumlah		**620.394.600,00**	**549.777.600,00**	**618.806.700,00**	**551.365.500,00**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp551.365.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp69.029.100,00 atau 11,13% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp620.394.600,00. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan setoran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 sebesar Rp1.714.024.800,00 sedangkan realisasi untuk tahun 2025 sebesar Rp1.180.659.300,00 sehingga terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp533.365.500,00. Sedangkan Rp18.000.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari retribusi pemanfaatan aset daerah pada RSUD Muhammad Sani.

7.5.3.6.1.3 Utang Belanja

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja	124.857.940.155,69	171.179.112.755,60	(46.321.172.599,91)	(27,06)

Jumlah utang belanja tahun 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69 mengalami penurunan sebesar Rp46.321.172.599,91 atau 27,06% dari utang belanja tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60.

Utang tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60 telah dibayarkan sebesar Rp78.079.228.916,13 pada tahun 2025 dan terdapat koreksi atau eliminasi sebesar Rp897.158.534,18, masih terdapat sisa utang tahun 2024 sebesar Rp93.084.016.685,29 ditambahkan utang pada tahun 2025 sebesar Rp31.624.935.947,40, sehingga total utang per 31 Desember 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69.

Utang belanja tahun 2025 sebesar Rp124.857.940.155,69 terdiri dari utang belanja BLUD sebesar Rp16.834.952.632,40 dan utang belanja BOK sebesar Rp6.336.000,00, sedangkan utang belanja selain utang belanja BLUD dan BOK sebesar Rp108.016.651.523,29 merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2025 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Utang Belanja tahun 2025 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, Utang Belanja Hibah, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Transfer, dan Utang Belanja Tidak Terduga yang dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.6.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	5.365.242.584,00	8.007.553.074,00	(2.642.310.490,00)	(33,00)

Utang Belanja Pegawai terdiri atas Utang Belanja Pegawai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Saldo akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5.365.242.584,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp2.642.310.490,00 atau 33,00% dari Utang Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp8.007.553.074,00.

Tabel 208
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per Objek Belanja

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.726.630,00	17.612.330,00	730.397.702,00	0,00	731.512.002,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.121.400,00	0,00	841.597.715,00	0,00	848.719.115,00
3	Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.629.853.532,00	3.981.795.532,00	0,00	(53.336.000,00)	3.594.722.000,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	151.319.451,00	0,00	0,00	0,00	151.319.451,00
5	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.176.682,00	189.176.682,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**7.996.197.695,00**	**4.188.584.544,00**	**1.571.995.417,00**	**(53.336.000,00)**	**5.326.272.568,00**

Tabel 209
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	164.985.000,00	0,00	0,00	0,00	164.985.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	80.481.000,00	0,00	0,00	0,00	80.481.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.592.875.532,00	3.592.875.532,00	0,00	0,00	-
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47.804.000,00	0,00	0,00	0,00	47.804.000,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86.634.000,00	0,00	0,00	0,00	86.634.000,00
6	DINAS KESEHATAN	192.325.000,00	0,00	0,00	0,00	192.325.000,00
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	40.824.000,00	0,00	0,00	0,00	40.824.000,00
8	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	11.917.683,00	0,00	11.917.683,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.169.000,00	0,00	1.706.700,00	0,00	91.875.700,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	82.805.000,00	0,00	0,00	0,00	82.805.000,00
11	DINAS PARIWISATA	61.923.000,00	16.995.000,00	0,00	0,00	44.928.000,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	392.154.000,00	175.190.000,00	0,00	0,00	216.964.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	133.148.000,00	0,00	0,00	0,00	133.148.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.448.300,00	0,00	0,00	0,00	8.448.300,00
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	162.223.000,00	55.065.000,00	1.551.585.555,00	0,00	1.658.743.555,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	56.747.000,00	0,00	0,00	(4.752.000,00)	51.995.000,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	99.086.000,00	0,00	0,00	0,00	99.086.000,00
18	DINAS PERIKANAN	106.984.000,00	0,00	0,00	0,00	106.984.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54.936.000,00	0,00	0,00	0,00	54.936.000,00
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	666.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
21	DINAS SOSIAL	17.612.330,00	17.612.330,00	0,00	0,00	-
22	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	58.302.000,00	23.886.000,00	0,00	0,00	34.416.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	127.670.000,00	0,00	0,00	0,00	127.670.000,00
24	KECAMATAN BELAT	56.084.000,00	0,00	0,00	0,00	56.084.000,00
25	KECAMATAN BURU	76.354.000,00	0,00	0,00	0,00	76.354.000,00
26	KECAMATAN DURAI	31.236.000,00	0,00	0,00	0,00	31.236.000,00
27	KECAMATAN KARIMUN	199.744.400,00	0,00	0,00	0,00	199.744.400,00
28	KECAMATAN KUNDUR	35.169.000,00	0,00	0,00	0,00	35.169.000,00
29	KECAMATAN KUNDUR BARAT	27.653.000,00	20.985.000,00	0,00	0,00	6.668.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	31.055.000,00	0,00	0,00	0,00	31.055.000,00
31	KECAMATAN MERAL BARAT	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239.000,00
32	KECAMATAN MORO	96.380.000,00	0,00	5.187.764,00	0,00	101.567.764,00
33	KECAMATAN SELAT GELAM	32.998.000,00	32.998.000,00	0,00	0,00	-
34	KECAMATAN TEBING	190.528.000,00	0,00	935.491,00	0,00	191.463.491,00
35	KECAMATAN UNGAR	69.903.000,00	0,00	0,00	0,00	69.903.000,00
36	RSUD MUHAMMAD SANI	74.412.000,00	0,00	0,00	0,00	74.412.000,00
37	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	58.032.000,00	0,00	0,00	0,00	58.032.000,00
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.939.000,00	2.784.000,00	0,00	0,00	16.155.000,00
39	SEKRETARIAT DAERAH	656.117.682,00	189.176.682,00	0,00	(47.918.000,00)	419.023.000,00
40	SEKRETARIAT DPRD	209.648.451,00	53.073.000,00	0,00	(666.000,00)	155.909.451,00
41	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	19.848.000,00	0,00	0,00	0,00	19.848.000,00
42	UPT PUSKESMAS BELAT	32.714.000,00	0,00	0,00	0,00	32.714.000,00
43	UPT PUSKESMAS BURU	37.409.000,00	0,00	0,00	0,00	37.409.000,00
44	UPT PUSKESMAS DURAI	43.375.000,00	0,00	0,00	0,00	43.375.000,00
45	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	56.229.000,00	0,00	0,00	0,00	56.229.000,00
46	UPT PUSKESMAS MERAL	37.341.000,00	7.944.000,00	0,00	0,00	29.397.000,00
47	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	26.838.000,00	0,00	0,00	0,00	26.838.000,00
48	UPT PUSKESMAS MORO	33.324.000,00	0,00	0,00	0,00	33.324.000,00
49	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00
50	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	42.741.000,00	0,00	0,00	0,00	42.741.000,00
51	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	7.494.000,00	0,00	0,00	0,00	7.494.000,00
52	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	33.876.000,00	0,00	0,00	0,00	33.876.000,00
53	UPT PUSKESMAS TEBING	38.913.000,00	0,00	0,00	0,00	38.913.000,00
54	UPT PUSKESMAS UNGAR	29.121.000,00	0,00	662.224,00	0,00	29.783.224,00
	TOTAL	7.996.197.695,00	4.188.584.644,00	1.571.995.417,00	(53.336.000,00)	5.326.272.568,00

Tabel 210
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	0,00	38.970.016,00
	TOTAL	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	0,00	38.970.016,00

Tabel 211
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS BELAT (BLUD)	-	-	1.450.567,00	-	1.450.567,00
2	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	2.653.640,00	2.653.640,00	2.537.446,00	-	2.537.446,00
3	UPT PUSKESMAS MORO (BLUD)	-	-	1.074.255,00	-	1.074.255,00
4	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	8.034.281,00	-	20.007.683,00	-	28.041.964,00
5	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	667.458,00	658.550,00	5.856.876,00	-	5.865.784,00
	TOTAL	11.355.379,00	3.312.190,00	30.926.827,00	-	38.970.016,00

7.5.3.6.1.3.2 Utang Belanja Barang Dan Jasa

	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Utang Belanja Barang dan Jasa	42.426.063.655,35	66.713.905.599,45	(24.287.841.944,10)	(36,41)

Saldo akhir Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 tercatat sebesar Rp42.426.063.655,35 yang mengalami penurunan sebesar Rp24.287.841.944,10 atau 36,41% dari Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp66.713.905.599,45.

Tabel 212
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Lainnya Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Barang	12.208.869.797,45	1.895.134.398,00	120.826.528,00	(387.909.850,00)	10.046.652.077,45
2	Utang Belanja Jasa	31.206.669.552,00	20.229.319.232,50	1.115.286.568,00	(164.624.640,00)	11.928.022.247,50
3	Utang Belanja Barang Dan Jasa BOK	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00
4	Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD	16.060.325.774,00	16.025.404.612,00	16.761.061.454,40	0,00	16.795.982.616,40
5	Utang Belanja Pemeliharaan	1.068.274.619,00	402.036.000,00	130.508.000,00	0,00	816.746.619,00
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	6.134.929.857,00	3.299.526.213,00	33.254.468,00	(36.334.017,00)	2.832.324.095,00
7	Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.713.905.599,45	41.859.920.455,50	18.160.947.018,40	(588.868.507,00)	42.426.063.655,35

Tabel 213
Mutasi Utang Belanja Barang Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	188.878.458,00	16.106.000,00	0,00	0,00	172.772.458,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.099.970,00	0,00	0,00	0,00	6.099.970,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	274.398.700,00	274.398.700,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.279.500,00	11.089.000,00	0,00	0,00	20.190.500,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	211.957.230,00	211.957.230,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS KESEHATAN	72.342.850,00	20.881.950,00	0,00	0,00	51.460.900,00
7	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	47.653.000,00	0,00	0,00	0,00	47.653.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	444.917.312,00	26.350.000,00	0,00	0,00	418.567.312,00
9	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	155.589.100,00	0,00	0,00	0,00	155.589.100,00
10	DINAS PARIWISATA	135.604.333,00	2.197.652,00	0,00	0,00	133.406.681,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.569.500,00	190.942.250,00	0,00	(3.978.050,00)	24.649.200,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	159.652.959,00	47.208.000,00	0,00	0,00	112.444.959,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	41.509.300,00	34.243.300,00	0,00	0,00	7.266.000,00
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	195.684.400,00	20.783.900,00	0,00	(4.372.000,00)	170.528.500,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.692.300,00	0,00	0,00	(5.095.000,00)	27.597.300,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	660.345.569,45	0,00	41.291.380,00	0,00	701.636.949,45
17	DINAS PERIKANAN	147.017.950,00	0,00	0,00	0,00	147.017.950,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19.778.700,00	0,00	0,00	0,00	19.778.700,00
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.817.577.706,00	343.050.000,00	0,00	200.000,00	4.474.727.706,00
20	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	65.062.018,00	17.930.000,00	0,00	0,00	47.132.018,00
21	INSPEKTORAT DAERAH	141.006.000,00	132.722.000,00	0,00	(8.284.000,00)	0,00
22	KECAMATAN BELAT	4.899.000,00	0,00	0,00	0,00	4.899.000,00
23	KECAMATAN BURU	49.812.000,00	0,00	0,00	0,00	49.812.000,00
24	KECAMATAN DURAI	35.637.000,00	0,00	0,00	0,00	35.637.000,00
25	KECAMATAN KARIMUN	132.271.180,00	0,00	0,00	0,00	132.271.180,00
26	KECAMATAN KUNDUR BARAT	114.011.500,00	38.260.000,00	0,00	0,00	75.751.500,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
27	KECAMATAN KUNDUR UTARA	27.890.000,00	0,00	0,00	0,00	27.890.000,00
28	KECAMATAN MERAL BARAT	76.065.000,00	0,00	0,00	0,00	76.065.000,00
29	KECAMATAN MORO	77.607.300,00	0,00	0,00	0,00	77.607.300,00
30	KECAMATAN SELAT GELAM	35.286.000,00	35.161.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00
31	KECAMATAN TEBING	97.302.700,00	0,00	0,00	0,00	97.302.700,00
32	KECAMATAN UNGAR	142.247.604,00	0,00	0,00	0,00	142.247.604,00
33	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	137.284.911,00	8.640.388,00	0,00	0,00	128.644.523,00
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.179.878,00	877.878,00	0,00	0,00	32.302.000,00
35	SEKRETARIAT DAERAH	3.015.737.239,00	357.305.170,00	79.535.148,00	(366.255.800,00)	2.371.711.417,00
36	SEKRETARIAT DPRD	114.931.980,00	105.029.980,00	0,00	0,00	9.902.000,00
37	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	6.926.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926.000,00
38	UPT PUSKESMAS BELAT	9.287.500,00	0,00	0,00	0,00	9.287.500,00
39	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	29.876.150,00	0,00	0,00	0,00	29.876.150,00
	TOTAL	**12.208.869.797,45**	**1.895.134.398,00**	**120.826.528,00**	**(387.909.850,00)**	**10.046.652.077,45**

Tabel 214
Mutasi Utang Belanja Jasa Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	317.424.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	300.524.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	73.910.000,00	0,00	0,00	0,00	73.910.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	246.897.000,00	246.897.000,00	0,00	0,00	0,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	218.543.960,00	132.531.760,00	4.795.200,00	(200,00)	90.807.200,00
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	113.396.837,00	19.500.000,00	12.649.200,00	0,00	106.546.037,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.177.500,00	0,00	0,00	0,00	18.177.500,00
7	DINAS KESEHATAN	8.297.445.350,00	8.081.920.350,00	0,00	0,00	215.525.000,00
8	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	92.250.000,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00
9	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	199.354.400,00	95.155.400,00	0,00	0,00	104.199.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	297.486.550,00	59.416.230,00	35.204.070,00	0,00	273.274.390,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	25.988.158,00	8.100.000,00	0,00	0,00	17.888.158,00
12	DINAS PARIWISATA	560.861.000,00	62.318.960,00	0,00	(847.040,00)	497.695.000,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.654.590.768,00	2.570.224.467,50	174.444.000,00	0,00	3.258.810.300,50
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57.525.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	56.525.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	139.461.059,00	26.640.000,00	0,00	(6.600.000,00)	106.221.059,00
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.198.946.216,00	3.703.074.446,00	0,00	(33.000.000,00)	1.462.871.770,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	46.828.000,00	0,00	0,00	(4.224.000,00)	42.604.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	119.043.620,00	14.255.000,00	0,00	0,00	104.788.620,00
19	DINAS PERIKANAN	283.748.836,00	61.947.000,00	0,00	0,00	221.801.836,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23.135.000,00	0,00	0,00	0,00	23.135.000,00
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	944.077.775,00	420.757.794,00	888.204.098,00	(300,00)	1.411.523.779,00
22	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	60.304.000,00	19.554.000,00	0,00	0,00	40.750.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	151.216.000,00	16.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	133.816.000,00
24	KECAMATAN BELAT	34.076.000,00	0,00	0,00	0,00	34.076.000,00
25	KECAMATAN BURU	148.140.000,00	115.050.000,00	0,00	0,00	33.090.000,00
26	KECAMATAN DURAI	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
27	KECAMATAN KARIMUN	371.120.000,00	255.606.000,00	0,00	0,00	115.514.000,00
28	KECAMATAN KUNDUR	235.944.000,00	235.944.000,00	0,00	0,00	0,00
29	KECAMATAN KUNDUR BARAT	119.171.200,00	91.071.200,00	0,00	0,00	28.100.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	86.976.600,00	64.884.600,00	0,00	0,00	22.092.000,00
31	KECAMATAN MERAL	292.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN MERAL BARAT	153.089.200,00	91.190.400,00	0,00	(2.980.800,00)	58.918.000,00
33	KECAMATAN MORO	144.850.800,00	94.377.600,00	0,00	0,00	50.473.200,00
34	KECAMATAN SELAT GELAM	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN TEBING	196.215.200,00	167.127.200,00	0,00	0,00	29.088.000,00
36	KECAMATAN UNGAR	100.728.598,00	49.020.000,00	0,00	0,00	51.708.598,00
37	RSUD MUHAMMAD SANI	332.600.000,00	0,00	0,00	0,00	332.600.000,00
38	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500.000,00
39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111.124.800,00	27.822.000,00	0,00	0,00	83.302.800,00
40	SEKRETARIAT DAERAH	3.819.767.300,00	2.556.763.000,00	0,00	(115.106.300,00)	1.147.898.000,00
41	SEKRETARIAT DPRD	709.738.000,00	570.000.000,00	0,00	(666.000,00)	139.072.000,00
42	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
43	UPT PUSKESMAS BELAT	104.816.825,00	37.651.825,00	0,00	0,00	67.165.000,00
44	UPT PUSKESMAS BURU	78.745.000,00	0,00	0,00	0,00	78.745.000,00
45	UPT PUSKESMAS DURAI	154.994.000,00	0,00	0,00	0,00	154.994.000,00
46	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	53.232.000,00	0,00	0,00	0,00	53.232.000,00
47	UPT PUSKESMAS MERAL	43.564.000,00	0,00	0,00	0,00	43.564.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
48	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
49	UPT PUSKESMAS MORO	124.870.000,00	0,00	0,00	0,00	124.870.000,00
50	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	132.230.000,00	0,00	0,00	0,00	132.230.000,00
51	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
52	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	81.776.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	62.112.000,00
53	UPT PUSKESMAS TEBING	64.374.000,00	0,00	0,00	0,00	64.374.000,00
54	UPT PUSKESMAS UNGAR	54.510.000,00	0,00	0,00	0,00	54.510.000,00
	TOTAL	31.206.669.552,00	20.229.319.232,50	1.115.296.568,00	(164.624.640,00)	11.928.022.247,50

Tabel 215
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00
	TOTAL	6.336.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336.000,00

Tabel 216
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	15.111.111.048,00	15.111.111.048,00	15.984.899.513,00	0,00	15.984.899.513,00
2	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR (BLUD)	466.267.124,00	454.899.624,00	335.175.318,40	0,00	346.542.818,40
3	UPT PUSKESMAS BELAT (BLUD)	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
4	UPT PUSKESMAS DURAI (BLUD)	3.557.000,00	0,00	15.070.600,00	0,00	18.627.600,00
5	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT (BLUD)	119.753.238,00	119.753.238,00	7.922.160,00	0,00	7.922.160,00
6	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	181.496.593,00	181.496.593,00	174.323.418,00	0,00	174.323.418,00
7	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT (BLUD)	15.298.200,00	0,00	0,00	0,00	15.298.200,00
8	UPT PUSKESMAS MORO (BLUD)	0,00	0,00	35.401.875,00	0,00	35.401.875,00
9	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI (BLUD)	55.547.000,00	55.547.000,00	100.790.747,00	0,00	100.790.747,00
10	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU (BLUD)	19.253.217,00	14.554.755,00	2.175.000,00	0,00	6.873.462,00
11	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	61.426.054,00	61.426.054,00	54.865.914,00	0,00	54.865.914,00
12	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	26.616.300,00	26.616.300,00	48.363.909,00	0,00	48.363.909,00
	TOTAL	16.060.326.774,00	16.025.404.612,00	16.781.061.454,40	0,00	16.795.982.616,40

Tabel 217
Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	254.405.089,00	0,00	6.770.000,00	0,00	261.175.089,00
3	DINAS PARIWISATA	55.190.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	282.486.000,00	260.626.000,00	0,00	0,00	21.860.000,00
6	DINAS PERIKANAN	2.558.550,00	0,00	0,00	0,00	2.558.550,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
7	INSPEKTORAT DAERAH	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
8	KECAMATAN BURU	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
9	KECAMATAN KARIMUN	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
10	KECAMATAN UNGAR	3.194.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194.000,00
11	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	1.104.600,00	0,00	0,00	0,00	1.104.600,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	384.006.380,00	10.350.000,00	123.738.000,00	0,00	497.394.380,00
13	SEKRETARIAT DPRD	80.175.000,00	80.175.000,00	0,00	0,00	0,00
14	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	TOTAL	**1.088.274.619,00**	**402.036.000,00**	**130.508.000,00**	**0,00**	**816.746.619,00**

Tabel 218
Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48.108.700,00	27.810.300,00	0,00	0,00	20.298.400,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.229.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229.000,00
3	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.510.800,00	0,00	0,00	0,00	5.510.800,00
5	DINAS KESEHATAN	66.017.256,00	3.042.200,00	0,00	0,00	64.975.056,00
6	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	61.598.956,00	0,00	15.884.468,00	0,00	77.483.424,00
7	DINAS PARIWISATA	46.076.000,00	8.549.000,00	0,00	0,00	37.527.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	181.470.797,00	142.799.000,00	17.370.000,00	(7.415.000,00)	48.626.797,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	152.434.640,00	96.255.348,00	0,00	0,00	56.179.292,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.761.896,00	0,00	0,00	(312.178,00)	3.449.718,00
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.584.000,00	2.860.000,00	0,00	(190.000,00)	29.534.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.488.000,00	0,00	0,00	0,00	16.488.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	168.672.767,00	0,00	0,00	0,00	168.672.767,00
14	DINAS PERIKANAN	208.846.255,00	0,00	0,00	0,00	208.846.255,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35.720.340,00	0,00	0,00	0,00	35.720.340,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.926.400,00	9.926.400,00	0,00	0,00	0,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	57.891.047,00	54.143.845,00	0,00	0,00	3.747.202,00
18	INSPEKTORAT DAERAH	908.553.644,00	892.878.325,00	0,00	(15.675.319,00)	0,00
19	KECAMATAN KARIMUN	48.954.500,00	0,00	0,00	0,00	48.954.500,00
20	KECAMATAN KUNDUR UTARA	11.496.000,00	0,00	0,00	0,00	11.496.000,00
21	KECAMATAN TEBING	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00
22	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	88.024.498,00	0,00	0,00	0,00	88.024.498,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	1.194.137.237,00	975.652.021,00	0,00	(9.266.520,00)	209.218.696,00
24	SEKRETARIAT DPRD	2.737.087.124,00	1.070.791.774,00	0,00	(2.202.500,00)	1.664.092.850,00
25	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	8.441.000,00	0,00	0,00	(1.272.500,00)	7.168.500,00
26	UPT PUSKESMAS BELAT	7.668.000,00	7.668.000,00	0,00	0,00	0,00
27	UPT PUSKESMAS DURAI	7.153.000,00	0,00	0,00	0,00	7.153.000,00
28	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	UPT PUSKESMAS UNGAR	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
	TOTAL	**6.134.929.857,00**	**3.299.526.213,00**	**33.254.468,00**	**(36.334.017,00)**	**2.832.324.095,00**

Tabel 219
Mutasi Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakata Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.5.3.6.1.3.3 Utang Belanja Hibah

	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Utang Belanja Hibah	17.159.888.787,00	21.146.993.216,00	(3.987.104.429,00)	(18,85)

Utang belanja hibah tahun 2025 sebesar Rp17.159.888.787,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.987.104.429,00 atau 18,85% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp21.146.993.216,00. Utang belanja hibah terdiri dari belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah barang kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan belanja hibah lainnya.

Tabel 220
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.432.656.000,00	500.791.000,00	0,00	0,00	1.931.865.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.714.337.216,00	5.120.583.013,00	1.824.299.584,00	(190.030.000,00)	15.228.023.787,00
	TOTAL	**21.146.993.216,00**	**5.621.374.013,00**	**1.824.299.584,00**	**(190.030.000,00)**	**17.159.888.787,00**

Tabel 221
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	234.715.000,00	69.915.000,00	0,00	0,00	164.800.000,00
2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	108.810.000,00	0,00	0,00	0,00	108.810.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.032.410.716,00	2.449.482.513,00	1.824.299.584,00	0,00	15.407.227.787,00
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	987.854.000,00	625.552.000,00	0,00	(190.000.000,00)	172.302.000,00
5	DINAS PERIKANAN	2.419.441.500,00	2.121.396.500,00	0,00	0,00	298.045.000,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	856.490.000,00	307.678.000,00	0,00	(30.000,00)	548.782.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	0,00	0,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	459.922.000,00	0,00	0,00	0,00	459.922.000,00
	TOTAL	**21.146.993.216,00**	**5.621.374.013,00**	**1.824.299.584,00**	**(190.030.000,00)**	**17.159.888.787,00**

7.5.3.6.1.3.4 Utang Belanja Modal

	31-Des-25 (Rp)	31-Des-24 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Modal	52.868.230.490,34	65.934.200.017,34	(13.065.969.527,00)	(19,82)

Saldo akhir Utang Belanja Modal Tahun 2025 tercatat Rp52.868.230.490,34 mengalami penurunan sebesar Rp13.065.969.527,00 atau 19,82% dari Utang Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp65.934.200.017,34.

Tabel 222
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per Obek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Modal Tanah	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.945.925.431,00	581.944.440,00	0,00	0,00	5.363.980.991,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanaj Modal Gedung dan Bangunan	14.081.351.246,34	6.133.820.170,63	0,00	(61.200.126,37)	7.886.330.951,34
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.471.423.935,00	12.027.749.587,00	6.135.744.200,00	0,00	39.579.418.548,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
6	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	65.934.200.017,34	19.140.513.600,63	6.135.744.200,00	(61.200.126,37)	52.868.230.490,34

Tabel 223
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	81.833.000,00	34.133.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
5	DINAS PARIWISATA	445.430.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	385.930.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.754.736.119,00	15.868.923.367,00	5.959.944.200,00	0,00	40.845.756.952,00
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.472.649.000,00	734.758.873,63	0,00	(61.200.126,37)	676.690.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00	58.280.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	1.402.064.519,34	0,00	0,00	0,00	1.402.064.519,34
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.602.123.545,00	1.797.887.517,00	175.800.000,00	0,00	4.980.036.028,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
13	INSPEKTORAT DAERAH	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	0,00
14	KECAMATAN KARIMUN	124.664.750,00	0,00	0,00	0,00	124.664.750,00
15	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
16	KECAMATAN KUNDUR UTARA	98.280.000,00	0,00	0,00	0,00	98.280.000,00
17	KECAMATAN MORO	62.520.000,00	0,00	0,00	0,00	62.520.000,00
18	KECAMATAN SELAT GELAM	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	KECAMATAN SUGIE BESAR	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
20	KECAMATAN TEBING	34.950.000,00	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
21	KECAMATAN UNGAR	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
22	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
23	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	3.865.120.241,00	485.000.000,00	0,00	0,00	3.380.120.241,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	666.055.440,00	23.511.440,00	0,00	0,00	642.544.000,00
	TOTAL	**65.934.200.017,34**	**19.140.513.600,63**	**6.135.744.200,00**	**(61.200.126,37)**	**52.868.230.490,34**

Utang Belanja Modal Tahun 2025 dapat diuraikan per jenis utang belanja sebagai berikut:

1. Utang Belanja Modal Tanah

Tabel 224
Mutasi Utang Belanja Modal – Tanah Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	TOTAL	**38.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500.000,00**

2. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 225
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700.000,00
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	81.833.000,00	34.133.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
5	DINAS PARIWISATA	385.930.000,00	0,00	0,00	0,00	385.930.000,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	400.298.000,00	0,00	0,00	0,00	400.298.000,00
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00	58.280.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	KECAMATAN KARIMUN	124.664.750,00	0,00	0,00	0,00	124.664.750,00
10	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
11	KECAMATAN KUNDUR UTARA	98.280.000,00	0,00	0,00	0,00	98.280.000,00
12	KECAMATAN MORO	62.520.000,00	0,00	0,00	0,00	62.520.000,00
13	KECAMATAN SELAT GELAM	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
14	KECAMATAN SUGIE BESAR	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	48.950.000,00
15	KECAMATAN TEBING	34.950.000,00	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
16	KECAMATAN UNGAR	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
17	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	3.865.120.241,00	485.000.000,00	0,00	0,00	3.380.120.241,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	666.055.440,00	23.511.440,00	0,00	0,00	642.544.000,00
	TOTAL	**5.945.925.431,00**	**581.944.440,00**	**0,00**	**0,00**	**5.363.980.991,00**

3. Utang Belanja Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 226
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.937.403,00	1.937.403,00	0,00	0,00	0,00

4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 227
Mutasi Utang Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.846.935.729,00	5.639.061.297,00	0,00	0,00	6.207.874.432,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	832.351.000,00	494.758.873,63	0,00	(61.200.126,37)	276.392.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	1.402.064.519,34	0,00	0,00	0,00	1.402.064.519,34
	TOTAL	14.081.351.248,34	6.133.820.170,63	0,00	(61.200.126,37)	7.886.330.951,34

5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 228
Mutasi Utang Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.869.300.390,00	10.229.862.070,00	5.959.944.200,00	-	34.599.382.520,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.602.123.545,00	1.797.887.517,00	175.800.000,00	-	4.980.036.028,00
	TOTAL	45.471.423.935,00	12.027.749.587,00	6.135.744.200,00	-	39.579.418.548,00

6. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 229
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Tabel 230
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PARIWISATA	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	INSPEKTORAT DAERAH	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.6.1.3.5 Utang Belanja Transfer

Utang belanja transfer tahun 2025 sebesar Rp5.989.531.639,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.692.228.638,00 atau 31,01% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp8.681.760.277,00. Utang belanja transfer terdiri dari utang belanja hasil hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

Tabel 231
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.212.835,00	0,00	0,00	0,00	7.212.835,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	6.574.547.442,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	3.882.318.804,00
	TOTAL	**8.681.760.277,00**	**6.574.547.442,00**	**3.882.318.804,00**	**0,00**	**5.989.531.639,00**

Tabel 232
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.681.760.277,00	6.574.547.442,00	3.882.318.804,00	0,00	5.989.531.639,00
	TOTAL	**8.681.760.277,00**	**6.574.547.442,00**	**3.882.318.804,00**	**0,00**	**5.989.531.639,00**

7.5.3.6.1.3.6 Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Tidak Terduga adalah utang belanja untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Tahun ini terdapat Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.048.983.000,00 per 31 Desember 2025.

Tabel 233
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Status Bencana Banjir Dan Gelombang Pasang Air Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	378.560.630,00	378.560.630,00	0,00	0,00	0,00
2	Status Bencana Banjir Dusun IV Jalan Parit Tegak Sungai Ungar RT.002 RW.001 Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	216.139.941,81	212.416.041,00	0,00	(3.723.900,81)	0,00
3	Status Bencana Banjir Jalan Gang Hang Jebat RT. 02 RW. 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak untuk musibah bencana Pasang Surut Air Laut di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2025	0,00	0,00	1.048.983.000	0,00	1.048.983.000
	TOTAL	**694.700.571,81**	**690.976.671,00**	**1.048.983.000,00**	**(3.723.900,81)**	**1.048.983.000,00**

Tabel 234
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	694.700.571,81	690.976.671,00	1.048.983.000,00	(3.723.900,81)	1.048.983.000,00
	TOTAL	**694.700.571,81**	**690.976.671,00**	**1.048.983.000,00**	**(3.723.900,81)**	**1.048.983.000,00**

7.5.3.7 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.219.540.641.795,35 mengalami kenaikan sebesar Rp51.213.343.423,41 atau 2,36% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.168.327.298.371,94. Jumlah Ekuitas di Neraca senilai Rp2.219.540.641.795,35 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Dengan realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.183.242.572.695,78 mengalami penurunan sebesar Rp49.299.871.593,22 atau sekitar 4,00% dari Tahun 2024 yaitu Rp1.232.542.444.289,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	391.605.475.746,00	395.569.727.600,00	(3.964.251.854,00)	(1,00)
2	Pendapatan Transfer – LO	772.274.428.079,00	836.972.716.689,00	(64.698.288.610,00)	(7,73)
5	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	19.362.668.870,78	0,00	19.362.668.870,78	0,00
Jumlah		**1.183.242.572.695,78**	**1.232.542.444.289,00**	**(49.299.871.593,22)**	**(4,00)**

Masing - masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun PAD – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp391.605.475.746,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.964.251.854,00 atau 1,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp395.569.727.600 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	290.149.395.746,50	294.339.547.110,60	(4.190.151.364,10)	(1,42)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	94.100.066.476,50	92.043.071.201,10	2.056.995.275,40	2,23
3	Pendapatan Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan –LO	2.269.494.656,00	3.525.313.743,00	(1.255.819.087,00)	(35,62)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	5.086.518.867,00	5.661.795.545,30	(575.276.678,30)	(10,16)
Jumlah		**391.605.475.746,00**	**395.569.727.600,00**	**(3.964.251.854,00)**	**(1,00)**

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2025 dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD) Tahun 2025 yang telah dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan – LO melainkan masuk pada Pendapatan - LRA.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 sebesar Rp290.149.395.746,50 mengalami penurunan sebesar Rp4.190.151.364,10 atau 1,42% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp294.339.547.110,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 237
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Reklame	1.930.128.480,50	1.781.969.745,00	148.158.735,50	8,31
2	Pajak Air Tanah	150.155.206,00	137.086.839,00	13.068.367,00	9,53
3	Pajak Sarang Burung Walet	22.540.000,00	31.576.000,00	(9.036.000,00)	(28,62)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	201.578.429.300,00	227.823.881.595,00	(26.245.452.295,00)	(11,52)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2)	12.888.793.751,00	13.349.331.048,00	(460.537.297,00)	(3,45)
6	BPHTB	17.149.816.928,00	12.857.938.104,00	4.291.878.824,00	33,38
7	PBJT- Makanan dan /Minuman	9.508.781.017,00	7.827.566.886,60	1.681.214.130,40	21,48
8	PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.389.502.150,00	20.702.753.318,00	(313.251.168,00)	(1,51)
9	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	9.553.005.210,00	7.819.380.420,00	1.733.624.790,00	22,17
10	PBJT-Jasa Parkir-LO	65.281.300,00	60.806.100,00	4.475.200,00	7,36
11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.902.134.026,00	1.947.257.055,00	954.876.971,00	49,04
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.624.799.678,00	0,00	9.624.799.678,00	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.386.028.700,00	0,00	4.386.028.700,00	0,00
Jumlah		**290.149.395.746,50**	**294.339.547.110,60**	**(4.190.151.364,10)**	**(1,42)**

Pada Tahun 2025 Pajak Restoran, masuk ke Rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mana selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2025 merupakan selisih tambah dan kurang dari Piutang Pajak Daerah. Yang mana penambahan Pajak Daerah - LRA sebesar Rp 14.710.710.292,00 dan selisih kurang dari Piutang Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp32.287.605.408,59. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 238
Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pajak Daerah				
Pajak Reklame	1.857.879.083,50	215.833.437,00	143.584.040,00	1.930.128.480,50
Pajak Air Tanah	150.071.386,00	83.820,00	0,00	150.155.206,00
Pajak Sarang Burung Walet	22.540.000,00	0,00	0,00	22.540.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	221.688.350.600,00	0,00	20.109.921.300,00	201.578.429.300,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.701.583.629,00	12.888.793.751,00	11.701.583.629,00	12.888.793.751,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.120.678.553,00	29.138.375,00	0,00	17.149.816.928,00
PBJT- Makanan dan /Minuman	9.412.089.917,59	402.950.549,00	306.259.449,59	9.508.781.017,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.389.502.150,00	0,00	0,00	20.389.502.150,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	9.030.706.460,00	545.805.740,00	23.506.990,00	9.553.005.210,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	65.281.300,00	0,00	0,00	65.281.300,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	2.276.779.406,00	628.104.620,00	2.750.000,00	2.902.134.026,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.624.799.678,00	0,00	0,00	9.624.799.678,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.386.028.700,00	0,00	0,00	4.386.028.700,00
TOTAL	**307.726.290.863,09**	**14.710.710.292,00**	**32.287.605.408,59**	**290.149.395.746,50**

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp290.149.395.746,50 merupakan nilai dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp307.726.290.863,09 ditambah dengan penambahan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp14.710.710.292,00 dan pengurangan atas Pajak Daerah sebesar Rp32.287.605.408,59.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp94.100.066.476,50 mengalami kenaikan sebesar Rp2.056.995.275,40 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp92.043.071.201,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.346.697.744,00	12.773.548.339,00	(426.850.595,00)	(3,34)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	42.627.000,00	0,00	42.627.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	77.444.288.727,50	74.552.360.401,10	2.891.928.326,40	3,88
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	26.548.000,00	0,00	26.548.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	412.024.400,00	544.918.200,00	(132.893.800,00)	(24,39)
6	Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	341.676.000,00	308.105.940,00	33.572.060,00	(10,90)
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.200.000,00	9.580.000,00	5.620.000,00	58,66
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	307.776.000,00	216.185.000,00	91.591.000,00	42,37
9	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.180.659.300,00	2.145.972.000,00	(965.312.700,00)	(44,98)
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.982.567.305,00	1.492.401.321,00	490.165.984,00	32,84
JUMLAH		**94.100.066.476,50**	**92.043.071.201,10**	**2.056.995.275,40**	**2,23**

Adapun selisih antara Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi - LRA Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 240
Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Daerah				
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.265.854.744,00	87.043.000,00	6.200.000,00	12.346.697.744,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	42.627.000,00	0,00	0,00	42.627.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	71.620.944.911,50	76.457.957.556,00	70.634.613.740,00	77.444.288.727,50

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	26.548.000,00	0,00	0,00	26.548.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	412.024.400,00	0,00	0,00	412.024.400,00
Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	353.338.000,00	0,00	11.660.000,00	341.678.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	278.295.000,00	47.481.000,00	18.000.000,00	307.776.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.093.630.200,00	618.806.700,00	531.777.600,00	1.180.659.300,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.982.567.305,00	0,00	0,00	1.982.567.305,00
JUMLAH	**88.091.029.560,50**	**77.211.288.256,00**	**71.202.251.340,00**	**94.100.066.476,50**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp94.100.066.476,50 merupakan hasil dari nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp88.091.029.560,50 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp77.211.288.256,00 yang terdiri atas penambahan Piutang Retribusi Pelayanan di Puskesmas sebesar Rp87.043.000,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp76.457.957.556,00, penambahan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp47.481.000, Retribusi Penggunaan IMTA sebesar Rp618.806.700,00, dikurangi dengan mutasi kurang sebesar Rp77.211.288.256,00 terdiri atas pengurangan piutang pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp6.200.000, Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp70.634.613.740,00, Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp11.660.000,00, dan pengurangan pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp18.000.000,00 dan Retribusi Penggunaan TKA sebesar Rp531.777.600.

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 sebesar Rp2.269.494.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.255.819.087,00 atau 35,62% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.525.313.743,00. Rincian dari Pendapatan Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 241
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	1.141.358.177,00	222.067.467,00	19,46
2	Perumda Bumi Berazam Jaya	202.446.780,00	0,00	202.446.780,00	0,00
3	BUP PT. Karya Karimun Mandiri	0,00	1.338.335.331,00	(1.338.335.331,00)	(100)
4	PDAM Tirta Mulia	703.622.232,00	1.045.620.235,00	(341.998.003,00)	(32,71)
	Jumlah	**2.269.494.656,00**	**3.525.313.743,00**	**(1.255.819.087,00)**	**(35,62)**

Terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dikarenakan adanya pelunasan Piutang Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 242
Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2025

URAIAN	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
PT Bank Riau Kepri	1.363.425.644,00	0,00	0,00	1.363.425.644,00
Perumda Bumi Berazam Jaya	640.782.111,00	0,00	0,00	640.782.111,00
BUP PT. Karya Karimun Mandiri	0,00	0,00	438.335.331,00	(438.335.331,00)
PDAM Tirta Mulia	703.622.232,00	0,00	0,00	703.622.232,00
Jumlah	**2.707.829.987,00**	**0,00**	**438.335.331,00**	**2.269.494.656,00**

7.5.4.1.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 sebesar Rp5.086.518.867,00 mengalami penurunan sebesar Rp575.276.678,30 atau 10,16% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.661.795.545,30. Rincian dari Lain-lain PAD yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 243
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	261.439.800,00	0,00	261.439.800,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	468.712.176,00	232.941.747,00	235.770.429,00	101,21
3	Pendapatan Bunga	11.441.033,00	870.296.659,00	(858.855.626,00)	(98,69)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	569.575.195,62	0,00	569.575.195,62	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.987.642.127,66	1.995.111.268,87	(7.469.141,21)	(0,37)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.554.991,00	149.171.108,68	(118.616.117,68)	(79,52)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	395.371.745,18	482.720.125,03	(87.348.379,85)	(18,10)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	164.000,00	6.795.292,00	(6.631.292,00)	(97,59)
9	Pendapatan dari Pengembalian	244.187.539,54	337.513.862,91	(93.326.323,37)	(27,65)
10	Pendapatan BLUD	1.117.430.259,00	1.567.245.481,81	(469.815.222,81)	(29,60)
	Jumlah	**5.086.518.867,00**	**5.661.795.545,30**	**(575.276.678,30)**	**(10,16)**

Lain-Lain PAD yang Sah – LO senilai Rp5.086.518.867,00 terdiri dari Lain–Lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp5.719.337.354,91 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp367.013.015,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 999.831.512,01. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 244
Mutasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	261.439.800,00	0,00	0,00	261.439.800,00
Penerimaan Jasa Giro	468.712.176,00	0,00	0,00	468.712.176,00
Pendapatan Bunga	11.441.033,00	0,00	0,00	11.441.033,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	569.575.195,62	0,00	0,00	569.575.195,62
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.987.642.136,76	0,00	9,10	1.987.642.127,66
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.554.991,00	0,00	0,00	30.554.991,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	395.371.745,18	0,00	0,00	395.371.745,18
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	877.006.027,45	367.013.015,00	999.831.502,91	244.187.539,54
Pendapatan BLUD	1.117.430.259,00	0,00	0,00	1.117.430.259,00
TOTAL	**5.719.337.364,01**	**367.013.015,00**	**999.831.512,01**	**5.086.518.867,00**

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp772.274.428.079,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.698.288.610,00 atau 7,73% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp836.972.716.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245
Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	715.129.621.027,00	756.036.288.421,00	(40.906.667.394,00)	(5,41)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)
Jumlah		**772.274.428.079,00**	**836.972.716.689,00**	**(64.698.288.610,00)**	**(7,73)**

Selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp16.415.555.352,00 terdiri dari penambahan atas Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp5.776.071.233,00 dan pengurangan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Transfer TDF Tahun 2025 sebesar Rp887.784.000,00 dan pengurangan dari Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sebesar Rp 21.303.842.585 yang mana dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 246
Mutasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Transfer – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	716.017.405.027,00	0,00	887.784.000,00	715.129.621.027,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	72.672.578.404,00	5.776.071.233,00	21.303.842.585,00	57.144.807.052,00
TOTAL	**788.689.983.431,00**	**5.776.071.233,00**	**22.191.626.585,00**	**772.274.428.079,00**

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp 715.129.621.027,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.906.667.394,00 atau 5,41% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp756.036.288.421,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 247
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.816.211.200,00	28.324.822.410,00	19.491.388.790,00	68,81
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.931.613.000,00	51.296.977.000,00	(17.365.364.000,00)	(33,85)
3	Dana Bagi Hasil Lainnya	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum	470.002.100.490,00	445.953.309.736,00	24.048.790.754,00	5,39
5	Dana Alokasi Khusus	145.450.737.337,00	207.991.198.275,00	(62.540.460.938,00)	(30,07)
6	Dana Penyesuaian	16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	(6.406.532.000,00)	(28,51)
	Jumlah	**715.129.621.027,00**	**756.036.288.421,00**	**(40.906.667.394,00)**	**(5,41)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 sebesar Rp715.129.621.027,00 terdiri dari DBH Pajak – LO sebesar Rp47.816.211.200,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) – LO sebesar Rp33.931.613.00, DBH Lainnya Rp1.865.510,000.00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp470.002.100.490,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp145.450.737.337,00, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp16.063.449.000,00

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.816.211.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.491.388.790,00 atau 68,81% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp28.324.822.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248
Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bagi hasil dari pajak Bumi dan Bangunan	13.628.626.100,00	2.640.430.000,00	10.988.196.100,00	416,15
2	Bagi hasil dari PPH Pasal 21	32.629.080.700,00	24.654.773.000,00	7.974.307.700,00	32,34
3	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.558.431.400,00	1.024.108.000,00	534.323.400,00	52,17
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	73.000,00	5.511.410,00	(5.438.410,00)	(98,68)
	JUMLAH	**47.816.211.200,00**	**28.324.822.410,00**	**19.491.388.790,00**	**68,81**

DBH Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp47.816.211.200,00 terdiri atas Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp13.628.626.100,00, Bagi Hasil dari PPH Pasal 21 sebesar Rp32.629.080.700,00, Bagi Hasil PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp1.558.431.400,00 dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp73.000,00 dapat dijelaskan dengan mutasi tabel sebagai berikut:

Tabel 249
Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.640.478.100,00	0,00	11.852.000,00	13.628.626.100,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	32.629.080.700,00	0,00	0,00	32.629.080.700,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.558.431.400,00	0,00	0,00	1.558.431.400,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL	**47.828.063.200,00**	**0,00**	**11.852.000,00**	**47.816.211.200,00**

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LRA Rp47.828.063.200,00 dan DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LO adalah Rp47.816.211.200,00 selisih DBH Pajak dari Pendapatan Transfer – LRA terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang DBH sebesar Rp11.852.000,00

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.931.613.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.365.364.000,00 atau 33,85% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp51.296.977.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250
Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.846.023.000,00	4.935.779.000,00	(3.089.756.000,00)	(62,60)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.228.000,00	29.883.909.000,00	(16.512.681.000,00)	(55,26)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.493.898.000,00	1.086.856.000,00	407.042.000,00	37,45
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.590.487.000,00	7.912.830.000,00	6.677.657.000,00	84,39
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.007.000,00	621.000,00	5.386.000,00	867,31
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	3.524.170.000,00	(901.689.000,00)	(25,59)
9	DBH Sawit	0,00	3.952.812.000,00	(3.952.812.000,00)	(100,00)
	TOTAL	**33.931.613.000,00**	**51.296.977.000,00**	**(17.365.364.000,00)**	**(33,85)**

DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.931.613.000,00 terdiri dari DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp1.846.023.000,00, DBH SDA Gas Bumi Rp13.371.228.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara – *Landrent* Rp1.439.898.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara – *Royalty* Rp14.590.487.000,00, DBH SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp6.007.000,00, DBH SDA Perikanan Rp2.622.481.000,00 dan DBH SDA Sawit Rp0,00

Selisih antara Pendapatan Transfer DBH SDA dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 251
Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.667.660.000,00	0,00	821.637.000,00	1.846.023.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	13.371.229.000,00	0,00	1.000,00	13.371.228.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.547.571.000,00	0,00	53.673.000,00	1.493.898.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.590.487.000,00	0,00	0,00	14.590.487.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.628.000,00	0,00	621.000,00	6.007.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.622.481.000,00	0,00	0,00	2.622.481.000,00
DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**34.807.545.000,00**	**0,00**	**875.932.000,00**	**33.931.613.000,00**

7.5.4.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya

DBH Lainnya dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.865.510.000,00 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 252
Realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Sawit	1.865.510.000,00	0,00	1.865.510.000,00	0,00
	JUMLAH	**1.865.510.000,00**	**0,00**	**1.865.510.000,00**	**0,00**

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DBH Lainnya – LRA Lainnya dengan Pendapatan DBH Lainnya – LO.

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum

DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp470.002.100.490,00 dibandingkan DAU Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.048.790.754,00 atau 5,39%.

Tabel 253
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	DAU	358.288.524.490,00	382.827.580.000,00	(24.539.055.510,00)	(6,41)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.872.232.000,00	7.637.004.736,00	34.235.227.264,00	448,28
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.122.523.000,00	27.738.015.000,00	18.384.508.000,00	66,28
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.918.821.000,00	15.602.875.000,00	2.315.946.000,00	14,84
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	6.347.835.000,00	(6.347.835.000,00)	(100)
TOTAL		**470.002.100.490,00**	**445.953.309.736,00**	**24.048.790.754,00**	**5,39**

Tidak ada selisih antara DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan DAU dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.

7.5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus

DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 sebesar Rp145.450.737.337,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.540.460.938,00 atau 30,07% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp207.991.198.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 254
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.818.514.147,00	83.656.032.600,00	(75.837.518.453,00)	(90,65)
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137.632.223.190,00	124.335.165.675,00	13.297.057.515,00	10,69
JUMLAH		**145.450.737.337,00**	**207.991.198.275,00**	**(62.540.460.938,00)**	**(30,07)**

Tidak Terdapat selisih antara DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan DAK dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025 sebesar Rp16.063.449.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.406.532.000,00 atau 28,51% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp22.469.981.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 255
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	16.063.449.000,00	22.469.981.000,00	(6.406.532.000,00)	(28,51)
JUMLAH		**16.063.449.000,00**	**22.469.981.000,00**	**(6.406.532.000,00)**	**(28,51)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO sebesar Rp16.063.449.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal yang diterima dari Pemerintah Pusat dimana tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO.

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025 sebesar Rp57.144.807.052,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.791.621.216,00 atau 29,40% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp80.936.428.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 256
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Bagi Hasil Pajak	57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)
JUMLAH		**57.144.807.052,00**	**80.936.428.268,00**	**(23.791.621.216,00)**	**(29,40)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp57.159.047.052,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari PKB sebesar Rp2.876.747.151,00, Pendapatan Bagi Hasil dari BBNKB sebesar Rp1.074.102.107,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp34.620.821.632,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp1.190.050.868,00, Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Rp16.205.325.294,00, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp1.177.760.000,00 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 257
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.876.747.151,00	17.287.232.084,00	(14.410.484.933,00)	(83,36)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.074.102.107,00	13.379.081.925,00	(12.304.979.818,00)	(91,97)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.620.821.632,00	34.681.264.432,00	(60.442.800,00)	(0,17)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.190.050.868,00	51.105.270,00	1.138.945.598,00	2228,63
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.205.325.294,00	15.537.744.557,00	667.580.737,00	4,30
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.177.760.000,00	0,00	1.177.760.000,00	0,00
JUMLAH		57.144.807.052,00	80.936.428.268,00	(23.791.621.216,00)	(29,40)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA sebesar Rp72.672.578.404,00 ditambah mutasi piutang sebesar Rp5.776.071.233,00, dikurang dengan Rp21.303.842.585,00, dimana penjelasan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 258
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.542.179.789,00	486.838.561,00	6.152.271.199,00	2.876.747.151,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.170.294.590,00	220.510.478,00	5.316.702.961,00	1.074.102.107,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.371.432.017,00	5.052.209.987,00	9.802.820.372,00	34.620.821.632,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.191.346.714,00	16.512.207,00	17.808.053,00	1.190.050.868,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.205.325.294,00	0,00	0,00	16.205.325.294,00
Bantuan Keuangan	1.177.760.000,00	0,00	0,00	1.177.760.000,00
TOTAL	72.658.338.404,00	5.776.071.233,00	21.289.802.585,00	57.144.807.052,00

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.362.668.870,78 mengalami kenaikan sebesar Rp19.362.668.870,78 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

Tabel 259
Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00	0,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.433.092.046,78	0,00	2.433.092.046,78	0,00
	TOTAL	19.362.668.870,78	0,00	19.362.668.870,78	0,00

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA merupakan adanya penambahan pada Pendapatan Hibah sebesar Rp16.929.576.824,00 dimana penjelasan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 260
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA	MUTASI PIUTANG		NILAI LO
	(Rp)	TAMBAH	KURANG	(Rp)
		(RP)	(RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Hibah	0,00	16.929.576.824,00	0,00	16.929.576.824,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.433.092.046,78	0,00	0,00	2.433.092.046,78
TOTAL	2.433.092.046,78	16.929.576.824,00	0,00	19.362.668.870,78

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban – LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban – LO dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Namun beban tidak selalu menimbulkan uang dari kas negara atau daerah. Misalnya, Beban Penyusutan Aset atau Barang Milik Daerah, beban penyusutan muncul berdasarkan hasil dari perhitungan mengenai harga perolehan yang dibandingkan dengan masa manfaat aset tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan angka yang dicantumkan dalam Laporan Operasional suatu entitas pelaporan.

Realisasi Beban – LO Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.118.990.405.046,18 mengalami penurunan sebesar Rp151.349.578.756,34 atau 11,91% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.270.339.983.802,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 261
Beban – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48
2	Beban Persediaan (Barang)	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
3	Beban Jasa	107.728.795.145,21	360.935.396.081,12	(253.206.600.935,91)	(70,15)
4	Beban Pemeliharaan	6.715.931.883,00	20.518.995.031,00	(13.803.063.148,00)	(67,27)
5	Beban dan Barang Jasa BOSP	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	0,00
6	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8	Beban Perjalanan Dinas	20.217.294.547,00	27.307.352.537,33	(7.090.057.990,33)	(25,96)
9	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09
10	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Subsidi	0,00	37.345.691,00	(37.345.691,00)	(100,00)
12	Beban Hibah	47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	(38.454.119.560,13)	(44,83)
13	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.529.381.717,56	109.926.669.484,78	(6.397.287.767,22)	(5,82)
15	Beban Transfer	55.205.280.700,00	59.539.114.220,00	(4.333.833.520,00)	(7,28)
16	Beban Penyisihan Piutang	2.269.249.187,05	2.728.734.346,00	(459.485.158,95)	(16,84)
17	Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.118.990.405.046,18	1.270.339.983.802,52	(151.349.578.756,34)	(11,91)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025 sebesar Rp611.853.916.083,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.970.559.942,00 atau 9,48% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp558.883.356.141,00 terdiri dari beban-beban di bawah ini:

Tabel 262
Beban Pegawai – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	383.055.998.097,00	337.292.124.171,00	45.763.873.926,00	13,57
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	106.848.535.895,00	123.406.819.641,00	(16.558.283.746,00)	(13,42)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	15.252.348.555,00	16.433.990.563,00	(1.181.642.008,00)	(7,19)
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	103.369.241.360,00	77.655.484.804,00	25.713.756.556,00	33,11
5	Beban Pegawai BLUD	3.327.792.176,00	4.094.936.962,00	(767.144.786,00)	(18,73)
	JUMLAH	611.853.916.083,00	558.883.356.141,00	52.970.559.942,00	9,48

Terdapat selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA Tahun 2025, dimana selisihnya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 263
Mutasi Beban Pegawai – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan	382.382.922.829,00	730.397.702,00	57.322.434,00	383.055.998.097,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	106.846.938.180,00	1.597.715,00	0,00	106.848.535.895,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	15.441.525.237,00	0,00	189.176.682,00	15.252.348.555,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	106.511.036.892,00	840.000.000,00	3.981.795.532,00	103.369.241.360,00
Beban Pegawai BLUD	3.300.177.539,00	30.955.496,00	3.340.859,00	3.327.792.176,00
TOTAL	**614.482.600.677,00**	**1.602.950.913,00**	**4.231.635.507,00**	**611.853.916.083,00**

Sedangkan realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2025 per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 264
Beban Pegawai – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.656.247.001,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.793.078.588,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.607.743.518,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.990.988.510,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.056.951.721,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.377.234.460,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.310.967.581,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.863.671.596,00
9	DINAS KESEHATAN	97.349.842.320,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.804.207.463,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	4.115.595.468,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.827.411.344,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	7.184.432.295,00
14	DINAS PARIWISATA	3.698.334.134,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.851.755.416,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.392.115.710,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.650.827.025,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	282.233.179.600,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.033.030.105,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	7.142.020.266,00
21	DINAS PERIKANAN	5.772.873.585,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.159.177.960,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.319.142.870,00
24	DINAS SOSIAL	3.297.245.448,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.317.564.609,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	7.960.296.537,00
27	KECAMATAN BELAT	1.091.623.492,00
28	KECAMATAN BURU	2.634.039.796,00

NO	OPD	NILAI
29	KECAMATAN DURAI	1.782.560.468,00
30	KECAMATAN KARIMUN	5.404.210.759,00
31	KECAMATAN KUNDUR	4.018.599.124,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	2.969.628.978,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	2.519.954.316,00
34	KECAMATAN MERAL	5.865.608.797,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	3.333.336.862,00
36	KECAMATAN MORO	3.036.724.405,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	1.429.365.607,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	898.120.257,00
39	KECAMATAN TEBING	4.610.382.785,00
40	KECAMATAN UNGAR	2.591.359.884,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.249.660.447,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	23.020.944.967,00
43	SEKRETARIAT DEWAN	18.431.860.009,00
TOTAL		**611.853.916.083,00**

7.5.4.2.2 Beban Pakai Habis (Persediaan – LO)

Realisasi Beban Persediaan – LO Tahun 2025 sebesar Rp44.593.902.943,11 mengalami kenaikan sebesar Rp972.723.961,95 atau 2,23% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp43.621.178.981,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265
Beban Pakai Habis – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bahan Pakai Habis (Persediaan)	44.593.902.943,11	43.621.178.981,16	972.723.961,95	2,23
JUMLAH		**44.593.902.943,11**	**43.621.178.981,16**	**972.723.961,95**	**2,23**

Adapun Rincian Beban Persediaan adalah:

Tabel 266
Beban Persediaan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.003.516.900,00	6.582.427.689,45	(5.578.910.789,45)	(84,75)
2	Belanja Bahan - Bahan Kimia	47.675.800,00	7.428.000,00	40.247.800,00	541,83
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.013.066.848,00	4.024.851.276,95	(2.011.784.428,95)	(49,98)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	39.129.700,00	46.438.250,00	(7.308.550,00)	(15,73)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	(13.879.000,00)	23.879.000,00	(37.758.000,00)	(158,12)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.470.110,00	8.312.000,00	25.158.110,00	302,68

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	57.723.098,00	119.135.491,00	(61.412.393,00)	(51,55)
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	426.200.420,00	206.666.961,00	219.533.459,00	106,23
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	167.217.500,00	247.771.620,00	(80.554.120,00)	(32,51)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.476.900,00	7.483.000,00	8.993.900,00	120,19
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	(4.994.900,00)	7.195.900,00	(12.190.800,00)	(169,41)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.372.590.032,67	1.340.404.286,00	32.185.746,67	2,40
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.613.164.273,00	1.607.931.683,00	5.232.590,00	0,33
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.466.934.663,30	2.721.341.020,00	745.593.643,30	27,40
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	213.738.250,00	178.941.000,00	34.797.250,00	19,45
16	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	32.780.000,00	(32.780.000,00)	(100)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.064.117.590,00	1.085.781.070,00	(21.663.480,00)	(2,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	285.018.910,00	638.474.219,00	(353.455.309,00)	(55,36)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	581.032.079,70	582.428.278,00	(1.396.198,30)	(0,24)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	92.156.500,00	339.328.000	(247.171.500,00)	(72,84)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.489.201.754,00	1.381.977.000,00	107.224.754,00	7,76
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	575.816.750,00	66.063.000,00	509.753.750,00	771,61
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.373.122,00	555.440.419,00	(10.067.297,00)	(1,81)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat Obatan Lainnya	7.607.826.939,66	1.802.475.489,04	5.805.351.450,62	322,08
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.983.600.926,10	3.609.614.193,72	(1.626.013.268,62)	(45,05)
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.554.054.582,68	5.024.740.320,00	5.529.314.262,68	110,04
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.317.100,00	52.760.000,00	(30.442.900,00)	(57,70)
28	Belanja Natura dan Pakan Natura Lainnya	726.728.077,00	732.486.610,00	(5.758.533,00)	(0,79)
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.558.598.538,00	4.919.502.311,00	(360.903.773,00)	(7,34)
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	405.018.254,00	538.703.720,00	(133.685.466,00)	(24,82)
31	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	89.687.600,00	(89.687.600,00)	(100)
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	(118.640.040,00)	5.165.900,00	(123.805.940,00)	(2396,60)

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.566.136.879,00	3.462.314.864,00	(896.177.985,00)	(25,88)
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.404.000,00	141.100.000,00	(5.696.000,00)	(4,04)
35	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	45.787.500,00	90.000.000,00	(44.212.500,00)	(49,13)
36	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	109.057.500,00	0,00	109.057.500,00	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	107.392.500,00	140.700.000,00	(33.307.500,00)	(23,67)
41	Belanja Pakaian Adat Daerah	394.285.137,00	72.195.000,00	322.090.137,00	446,14
43	Belanja Pakaian Olahraga	347.581.000,00	451.663.000,00	(104.082.000,00)	(23,04)
44	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.316.000,00	462.946.000,00	(445.630.000,00)	(96,26)
45	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.941.720,00	6.516.810,00	(1.575.090,00)	(24,17)
46	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	203.850.000,00	(203.850.000,00)	(100)
47	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	41.749.030,00	2.278.000,00	39.471.030,00	1732,70
	TOTAL	**44.693.902.943,11**	**43.621.178.961,16**	**972.723.961,95**	**2,23**

Tabel 267
Mutasi Beban Persediaan (Barang) – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
	2	3	4	5=2+3-4
Beban Persediaan (Barang)	36.404.454.848,00	60.009.448.193,29	51.837.316.098,18	44.576.586.943,11
Beban Aset Tetap Tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.316.000,00	0,00	0,00	17.316.000,00
TOTAL	**36.421.770.848,00**	**60.009.448.193,29**	**51.837.316.098,18**	**44.593.902.943,11**

Sedangkan realisasi Beban Pakai Habis – LO Tahun 2025 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 268
Beban Pakai Habis (Persediaan) – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	155.259.818,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.099.596.668,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	194.426.950,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	638.991.781,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.312.506.901,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	345.129.210,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	859.007.454,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	497.069.111,00
9	DINAS KESEHATAN	5.040.777.711,67

NO	OPD	NILAI
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	335.867.300,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	287.613.945,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	421.168.767,05
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	227.936.945,00
14	DINAS PARIWISATA	562.130.853,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	441.345.080,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	172.509.359,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	126.219.100,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.813.780.702,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	689.051.778,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	11.263.631.493,39
21	DINAS PERIKANAN	207.471.905,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	101.259.871,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.392.971.626,00
24	DINAS SOSIAL	529.281.609,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	430.745.909,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	285.667.933,00
27	KECAMATAN BELAT	118.614.000,00
28	KECAMATAN BURU	386.583.452,00
29	KECAMATAN DURAI	346.972.420,00
30	KECAMATAN KARIMUN	561.192.898,00
31	KECAMATAN KUNDUR	669.146.000,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	598.631.481,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	165.587.009,00
34	KECAMATAN MERAL	277.060.120,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	583.657.000,00
36	KECAMATAN MORO	137.651.000,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	175.089.600,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	96.872.000,00
39	KECAMATAN TEBING	493.702.717,00
40	KECAMATAN UNGAR	182.361.400,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.001.400,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	3.303.660.528,00
43	SEKRETARIAT DPRD	2.937.700.236,00
TOTAL		**44.593.902.943,11**

7.5.4.2.3 Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp107.728.795.145,21 mengalami penurunan sebesar Rp253.206.600.935,91 atau 70,15% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp360.935.396.081,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 269
Beban Jasa – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	87.920.632.214,00	178.863.610.640,78	(90.942.978.426,78)	(50,84)
2	Beban Jasa Konsultasi dan Kontruksi	6.300.122.656,00	18.021.049.632,00	(11.720.926.976,00)	(65,04)
3	Beban Jasa Konsultasi dan Non Kontruksi	1.064.345.174,00	213.410.055,00	850.935.119,00	398,73
4	Beban Iuran Jaminan /Asuransi	24.176.038.655,00	24.794.766.266,00	(618.727.611,00)	(2,49)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Gedung Bangunan	(17.371.650.710,79)	3.185.857.440,00	(20.557.508.150,79)	(645,27)
7	Beban Sewa Tanah	22.110.000,00	22.110.000,00	0,00	0,00
8	Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.995.866.457,00	5.724.511.136,00	(2.728.644.679,00	(47,67)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	2.263.471.200,00	3.244.847.000,00	(981.375.800,00)	(30,24)
13	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/ masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	28.219.256.187,00	(28.219.256.187,00)	(100)
15	Belanja Barang Jasa BOK	0,00	6.043.086.527,00	(6.043.086.527,00)	(100)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	91.652.061.197,34	(91.652.061.197,34)	(100)
17	Beban Aset tetap lainnya	34.798.500,00	34.900.000,00	(101.500,00)	(0,29)
18	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	203.061.000,00	765.930.000,00	(562.869.000,00)	(73,49)
	JUMLAH	**107.728.795.145,21**	**360.936.396.081,12**	**(253.206.600.935,91)**	**(70,15)**

Selisih antara Beban Jasa – LO dengan Beban Jasa – LRA Tahun 2025 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp1.147.961.976,00 dan mutasi kurang sebesar Rp41.000.463.578,29. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 270
Mutasi Beban Jasa – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Jasa				
Beban Jasa Kantor	98.050.056.048,00	545.094.228,00	10.674.518.062,00	87.920.632.214,00
Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	30.697.100.725,00	7.240.590,00	6.528.302.660,00	24.176.038.655,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
Beban Sewa Tanah	22.110.000,00	0,00	0,00	22.110.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.496.929.457,00	0,00	501.063.000,00	2.995.866.457,00
Beban Sewa Gedung Bangunan	2.603.158.100,00	25.017.500,00	19.999.826.310,79	(17.371.650.710,79)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	34.798.500,00	0,00	0,00	34.798.500,00
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	9.761.800.740,50	570.609.658,00	4.032.287.742,50	6.300.122.656,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.158.845.174,00	0,00	94.500.000,00	1.064.345.174,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0.00	0,00	0,00	0.00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	439.653.000,00	0,00	236.592.000,00	203.061.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.448.471.200,00	0,00	185.000.000,00	2.263.471.200,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000	0,00	0,00	120.000.000
TOTAL	**148.832.922.944,50**	**1.147.961.976,00**	**42.252.089.775,29**	**107.728.795.145,21**

Sedangkan Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 271
Beban Jasa – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	750.473.270,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	886.566.400,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	156.498.090,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.234.079.369,11
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.537.556.424,10
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.434.130.274,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.412.235.453,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	117.610.000,00
9	DINAS KESEHATAN	31.132.381.678,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.320.259.682,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	605.330.285,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.089.767.498,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	553.187.928,00
14	DINAS PARIWISATA	449.364.451,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.457.703.861,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.206.081.208,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	275.718.049,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.833.412.738,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.967.901.817,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	-2.792.466.315,00

NO	OPD	NILAI
21	DINAS PERIKANAN	193.617.798,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	193.276.912,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.538.915.778,00
24	DINAS SOSIAL	110.887.760,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.656.350.900,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	294.628.000,00
27	KECAMATAN BELAT	153.042.632,00
28	KECAMATAN BURU	606.130.248,00
29	KECAMATAN DURAI	160.432.260,00
30	KECAMATAN KARIMUN	1.566.161.322,00
31	KECAMATAN KUNDUR	1.293.582.731,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	1.074.692.863,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	392.248.840,00
34	KECAMATAN MERAL	1.317.074.258,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	511.452.800,00
36	KECAMATAN MORO	665.171.600,00
37	KECAMATAN TEBING	1.033.844.578,00
38	KECAMATAN SELAT GELAM	162.318.000,00
39	KECAMATAN SUGIE BESAR	229.219.000,00
40	KECAMATAN UNGAR	311.953.800,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	774.246.500,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	19.337.214.994,00
43	SEKRETARIAT DPRD	2.524.539.610,00
TOTAL		**107.729.795.145,21**

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2025 sebesar Rp6.715.931.883,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.803.063.148,00 atau 67,26% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp20.518.995.031,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 272
Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	179.870.000,00	0,00	179.870.000,00	0,00
2	Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.638.659.444,00	2.188.020.080,00	(549.360.636,00)	(25,11)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.877.632.439,00	17.827.726.900,00	(12.950.094.461,00)	(72,64)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	497.420.551,00	(497.420.551,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	19.770.000,00	5.827.500,00	13.942.500,00	239,25
6	Penambah Utang Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**6.715.931.883,00**	**20.518.995.031,00**	**(13.803.063.148,00)**	**(67,26)**

Selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Beban Pemeliharaan – LRA Tahun 2025 terdiri dari penambahan sebesar Rp131.628.000,00 dan pengurangan sebesar Rp403.156.000,00 dimana selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 273
Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pemeliharaan				
Beban Pemeliharaan Tanah	179.870.000,00	0,00	0,00	179.870.000,00
Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.061.444,00	131.628.000,00	93.030.000,00	1.638.659.444,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.138.258.439,00	0,00	260.626.000,00	4.877.632.439,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	69.270.000,00	0,00	49.500.000,00	19.770.000,00
TOTAL	**6.987.469.883,00**	**131.628.000,00**	**403.156.000,00**	**6.715.931.883,00**

Sedangkan realisasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 274
Beban Pemeliharaan – LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	68.380.000,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.890.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	46.396.000,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	86.566.500,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.965.000,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	36.410.000,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	209.300.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.183.000,00
9	DINAS KESEHATAN	28.480.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	99.000.000,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	58.760.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	107.023.900,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.220.000,00
14	DINAS PARIWISATA	9.420.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.500.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.760.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.500.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.529.651.358,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.250.000,00

NO	OPD	NILAI
20	DINAS PERHUBUNGAN	5.486.430,00
21	DINAS SOSIAL	2.795.000,00
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.870.000,00
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	34.607.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	21.142.242,00
25	KECAMATAN BURU	6.370.000,00
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.135.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	765.512.680,00
28	SEKRETARIAT DPRD	294.057.773,00
29	KECAMATAN TEBING	3.000.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	3.400.000,00
31	KECAMATAN BELAT	900.000,00
	TOTAL	**6.715.931.883,00**

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp20.217.294.547,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.090.057.990,33 atau 25,96% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27.307.352.537,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 275
Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Biasa	14.589.668.932,00	21.610.603.129,33	(7.020.934.197,33)	(32,49)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.563.903.115,00	5.517.059.708,00	46.843.407,00	0,85
3	Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam Kota	63.722.500,00	179.689.700,00	(115.967.200,00)	(64,54)
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**20.217.294.547,00**	**27.307.352.537,33**	**(7.090.057.990,33)**	**(25,96)**

Tabel 276
Mutasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Perjalanan Dinas Dalam Biasa	17.224.525.733,00	33.254.468,00	2.668.111.269,00	14.589.668.932,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.333.159.265,00	0,00	769.256.150,00	5.563.903.115,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	63.722.500,00	0,00	0,00	63.722.500,00
TOTAL	**23.621.407.498,00**	**33.254.468,00**	**3.437.367.419,00**	**20.217.294.547,00**

Sedangkan realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 277
Beban Perjalanan Dinas– LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	492.625.658,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	198.431.632,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	66.627.382,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	160.759.633,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.239.476.500,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	690.425.098,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	56.290.457,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	107.751.700,00
9	DINAS KESEHATAN	605.625.056,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	46.041.214,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	282.284.789,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	119.111.006,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	364.103.642,00
14	DINAS PARIWISATA	60.594.200,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	185.200.345,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	273.009.056,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	165.549.580,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.861.261.799,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	588.864.800,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	198.844.098,00
21	DINAS PERIKANAN	151.216.220,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.591.821,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	129.407.050,00
24	DINAS SOSIAL	194.188.000,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	161.004.857,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	2.476.000,00
27	KECAMATAN BELAT	36.341.000,00
28	KECAMATAN BURU	38.401.500,00
29	KECAMATAN DURAI	106.691.000,00
30	KECAMATAN KARIMUN	32.829.900,00
31	KECAMATAN KUNDUR	50.455.329,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	43.840.000,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	28.552.000,00
34	KECAMATAN MERAL	190.420.831,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	40.490.335,00
36	KECAMATAN MORO	42.382.200,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	19.948.000,00

NO	OPD	NILAI
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	24.994.000,00
39	KECAMATAN TEBING	90.379.458,00
40	KECAMATAN UNGAR	58.179.000,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	51.706.900,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	4.424.866.286,00
43	SEKRETARIAT DPRD	5.455.055.215,00
TOTAL		20.217.294.547,00

7.5.4.2.6 Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO

Realisasi Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp2.627.208.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.559.608.000,00 atau 146,09% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.067.600.000,00

Tabel 278
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.614.408.000,00	1.067.600.000,00	1.546.808.000,00	144,89
2	Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00
JUMLAH		2.627.208.000,00	1.067.600.000,00	1.559.608.000,00	146,09

Tabel 279
Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.622.908.000,00	0,00	8.500.000,00	2.614.408.000,00
Beban Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.800.000,00	0,00	0,0	12.800.000,00
TOTAL	2.635.708.000,00	0,00	8.500.000,00	2.627.208.000,00

Tabel 280

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.500.000,00
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	772.300.000,00
3	Dinas Pariwisata	135.000.000,000
4	Sekretariat Daerah	43.500.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	12.800.000,00
6	Kecamatan Belat	9.600.000,00
7	Kecamatan Buru	89.000.000,00
8	Kecamatan Durai	25.128.000,00
9	Kecamatan Karimun	216.200.000,00
10	Kecamatan Kundur	175.000.000,000
11	Kecamatan Kundur Barat	346.620.000,00
12	Kecamatan Kundur Utara	62.400.000,00
13	Kecamatan Meral	251.200.000,00
14	Kecamatan Meral Barat	105.900.000,00
15	Kecamatan Moro	95.080.000,00
16	Kecamatan Selat Gelam	21.900.000,000
17	Kecamatan Sugie Besar	16.080.000,00
18	Kecamatan Tebing	148.000.000,00
19	Kecamatan Ungar	43.600.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.400.000,00
	TOTAL	**2.627.208.000,00**

7.5.4.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOSP – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp27.824.998.264,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.824.998.264,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 281

Beban Barang dan Jasa BOSP LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BOSP	27.824.998.264,00	0,00	27.824.998.264,00	100,00
	TOTAL	**27.824.998.264,00**	**0,00**	**27.824.998.264,00**	**100,00**

Tabel 282

Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BOSP	27.831.318.264,00	0,00	6.320.000,00	27.824.998.264,00
TOTAL	**27.831.318.264,00**	**0,00**	**6.320.000,00**	**27.824.998.264,00**

Tabel 283

Beban Barang dan Jasa BOSP - LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27.824.998.264,00
	TOTAL	**27.824.998.264,00**

7.5.4.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOK – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp6.132.529.719,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.132.529.719,00 atau 0% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 284
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	0,00	6.132.529.719,00	0,00
	TOTAL	**6.132.529.719,00**	**0,00**	**6.132.529.719,00**	**0,00**

Tabel 285
Mutasi Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.132.529.719,00	1.504.309.320,00	1.504.309.320,00	6.132.529.719,00
TOTAL	**6.132.529.719,00**	**1.504.309.320,00**	**1.504.309.320,00**	**6.132.529.719,00**

Tabel 286
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	Puskesmas Tg Balai Karimun	941.474.016,00
2	Puskesmas Meral	567.239.304,00
3	Puskesmas Meral Barat	550.300.000,00
4	Puskesmas Tebing	768.184.264,00
5	Puskesmas Tg Batu	536.780.486,00
6	Puskesmas Buru	427.670.692,00
7	Puskesmas Ungar	238.144.675,00
8	Puskesmas Durai	292.878.791,00
9	Puskesmas Niur Permai	372.388.825,00
10	Puskesmas Belat	363.730.000,00
11	Puskesmas Moro	204.620.000,00
12	Puskesmas Tg Berlian	460.110.000,00
13	Puskesmas Kundur Barat	409.008.666,00
	TOTAL	**6.132.529.719,00**

7.5.4.2.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD – LO Tahun 2025 mencapai sebesar Rp82.971.795.128,25 mengalami kenaikan sebesar Rp82.971.795.128,25 atau 0% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 287
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	82.971.795.128,25	0,00	82.971.795.128,25	0,00
	Total	**82.971.795.128,25**	**0,00**	**82.971.795.128,25**	**0,00**

Tabel 288
Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	83.851.890.837,00	48.331.120.767,28	49.211.216.476,03	82.971.795.128,25
TOTAL	**83.851.890.837,00**	**48.331.120.767,28**	**49.211.216.476,03**	**82.971.795.128,25**

Tabel 289
Beban Barang dan Jasa BLUD LO per OPD Tahun 2025

NO	OPD	NILAI
1	RSUD M SANI	70.457.516.282,56
2	RSUD TANJUNG BATU	1.797.213.142,40
3	PUSKESMASANJUNG BALAI	2.487.040.923,00
4	PUSKESMAS MERAL	1.688.662.755,00
5	PUSKESMAS TEBING	1.153.416.173,00
6	PUSKESMAS TANJUNG BATU	1.105.615.718,75
7	PUSKESMAS KUNDUR BARAT	727.403.348,00
8	PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	627.064.340,93
9	PUSKESMAS BURU	494.029.526,61
10	PUSKESMAS MORO	604.913.494,00
11	PUSKESMAS DURAI	436.652.430,00
12	PUSKESMAS NIUR PERMAI	355.257.815,00
13	PUSKESMAS BELAT	342.727.482,00
14	PUSKESMAS MERAL BARAT	404.451.691,00
15	PUSKESMAS UNGAR	289.830.006,00
	TOTAL	**82.971.795.128,25**

7.5.4.2.10 Beban Bunga - LO

Tidak terdapat Beban Bunga – LO pada tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bunga – LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.2.11 Beban Subsidi - LO

Realisasi Beban Subsidi – LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.345.691,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp37.345.691,00.

7.5.4.2.12 Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.320.121.729,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.454.119.560,13 atau 44,83% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp85.774.241.289,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 290
Beban Hibah – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	16.293.299.000,00	41.463.330.500,00	(25.170.031.500,00)	(60,70)
2	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.275.009.202,00	36.008.613.958,13	(13.733.604.756,13)	(38,14)
3	Beban Hibah Dana BOSP	7.909.408.200,00	7.764.773.398,00	144.634.802,00	1,86
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	842.405.327,00	537.523.433,00	304.881.894,00	56,72
Jumlah		47.320.121.729,00	85.774.241.289,13	(38.454.119.560,13)	(44,83)

Tabel 291
Mutasi Beban Hibah – LO Tahun 2025

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Hibah				
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	16.317.818.000,00	0,00	24.519.000,00	16.293.299.000,00
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.072.083.631,00	1.838.616.188,00	5.635.690.617,00	22.275.009.202,00
Beban Hibah Dana BOSP	7.909.408.200,00	0,00	0,00	7.909.408.200,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	842.405.327,00	0,00	0,00	842.405.327,00
TOTAL	**51.141.715.158,00**	**1.838.616.188,00**	**5.660.209.617,00**	**47.320.121.729,00**

Beban Hibah – LRA Tahun 2025 sebesar Rp51.141.715.158,00 sedangkan Beban Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp47.320.121.729,00 terdapat penambahan sebesar Rp1.838.616.188,00 sementara pengurangan sebesar Rp 5.660.209.617,00

Tabel 292
Beban Hibah–LO per OPD Tahun 2025

No	OPD	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.441.028.200,00
2	DINAS KESEHATAN	393.939.100,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.996.503.084,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.124.269.539,00

No	OPD	Nilai
5	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	0,00
6	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.517.491.631,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	800.000.000,00
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	280.085.000,00
9	DINAS PERIKANAN	2.463754.117,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	3.450.000.000,00
11	KECAMATAN KARIMUN	707.885.122,00
12	KECAMATAN TEBING	490.123.597,00
13	KECAMATAN KUNDUR	684.295.000,00
14	KECAMATAN UNGAR	63.897.000,00
15	KECAMATAN KUNDUR UTARA	153.670.012,00
16	KECAMATAN KUNDUR BARAT	131.825.000,00
17	KECAMATAN BURU	228.950.000,00
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.382.405.327,00
	TOTAL	**47.320.121.729,00**

7.5.4.2.13 Beban Bantuan Sosial – LO

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial – LO pada tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.2.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap maupun aset tidak berwujud. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025 sebesar Rp103.529.381.717,56, mengalami penurunan sebesar Rp6.397.287.767,22 atau 5,82% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp109.926.669.484,78.

Tabel 293
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Penyusutan	101.600.000.803,56
2	Beban Amortisasi	1.929.380.914,00
	JUMLAH	**103.529.381.717,56**

7.5.4.2.15 Beban Transfer – LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini adalah transfer dari Pemerintah Kabupaten ke Desa. Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2025 sebesar Rp55.205.280.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.333.833.520,00 atau 7,28% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59.539.114.220,00.

Beban Transfer – LRA Tahun 2025 terdiri dari realisasi Beban Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp57.897.509.338,00, sedangkan Beban Transfer – LO Tahun 2025 sebesar Rp55.205.280.700,00 karena terdapat penyesuaian atas penambahan beban dari penambahan utang Tahun 2025 sebesar Rp3.882.318.804,00 dan pengurangan beban atas pelunasan utang Tahun 2024 sebesar Rp6.574.547.442,00.

7.5.4.2.16 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp2.269.249.187,05 mengalami penurunan sebesar Rp459.485.158,95 atau 16,84% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.728.734.346,00.

Tabel 294
Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.892.912.757,30
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	376.336.429,75
	JUMLAH	**2.269.249.187,05**

7.5.4.2.17 Beban lain-lain – LO

Tidak terdapat Beban Lain-Lain – LO pada Tahun 2025, demikian juga Tahun 2024 tercatat Beban Bantuan Lain-Lain – LO sebesar Rp0,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2025 tercatat Surplus sebesar Rp64.252.167.649,60. Nilai tersebut merupakan selisih antara Pendapatan – LO senilai Rp1.183.242.572.695,78 dan Beban – LO senilai Rp1.118.990.405.046,18 selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2025 senilai Rp64.252.167.649,60 mengalami kenaikan sebesar Rp102.049.707.163,12 atau 269,99% dibandingkan Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun 2024 dimana tercatat Defisit sebesar Rp37.797.539.513,52.

7.5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 tercatat Defisit sebesar Rp23.694.969.814,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.425.055.550,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp26.120.025.364,00 selama satu periode pelaporan dari kegiatan non operasional.

Defisit pada Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp23.694.969.814,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.990.244.170,52 atau 102,44% dibandingkan Defisit pada Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp11.704.725.643,48.

Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp40.557.197.835,60 merupakan selisih antara Surplus/ Defisit dari Operasi sebesar Rp64.252.167.649,60 dan dikurangi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp23.694.969.814,00 selama satu periode pelaporan.

Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp40.557.197.835,60 mengalami kenaikan sebesar Rp90.059.462.992,60 atau 181,93% dibandingkan Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 yang mengalami Defisit sebesar Rp49.502.265.157,00.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.930.753.000,00 merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.930.753.000,00 selama satu periode pelaporan dari pos luar biasa.

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.930.753.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp538.651.228,19 atau 38,69% dibandingkan Beban Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp1.392.101.771,81.

7.5.4.6 Surplus/ Defisit–LO

Surplus/ Defisit - LO Tahun 2025 tercatat Surplus sebesar Rp38.626.444.835,60 merupakan selisih antara Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp40.557.197.835,60 dan dikurangi beban Pos Luar Biasa sebesar Rp1.930.753.000,00.

Surplus/ Defisit - LO Tahun 2025 sebesar Rp38.626.444.835,60 mengalami kenaikan sebesar Rp89.520.811.764,41 atau 175,90% dibandingkan Surplus/ Defisit - LO Tahun 2024 yang tercatat Defisit sebesar Rp50.894.366.928,81.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Karimun menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	1.231.294.561.183,28	1.317.275.580.458,97	-85.981.019.275,69	-6,53
Arus Kas Keluar	1.097.612.257.577,50	1.186.634.374.683,47	-89.022.117.105,97	-7,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	133.682.303.605,78	130.641.205.775,50	3.041.097.830,28	2,33

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp133.682.303.605,78 mengalami kenaikan sebesar Rp3.041.097.830,28 atau 2.33% dibandingkan dengan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp130.641.205.775,50.

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.231.294.561.183,28 terdiri atas:

Penerimaan Pajak Daerah	Rp	307.726.290.863,09
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	88.091.029.560,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	2.707.829.987,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	5.457.897.554,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	47.828.063.200,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	34.807.545.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp	1.865.510.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	470.002.100.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	145.450.737.337,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	52.266.126.740,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	71.480.578.404,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	Rp	1.177.760.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Penerimaan Hibah	Rp	0,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp	0,00
Penerimaan Lainnya	Rp	2.433.092.046,78
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**1.231.294.561.183,28**

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.097.612.257.577,50 terdiri atas:

Pembayaran Pegawai	Rp	614.482.600.677,00
Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	336.315.007.993,50
Pembayaran Bunga	Rp	0,00
Pembayaran Subsidi	Rp	0,00
Pembayaran Hibah	Rp	51.141.715.158,00
Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	0,00
Pembayaran Tak Terduga	Rp	1.572.746.671,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	94.100.187.078,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**Rp**	**1.097.612.257.577,50**

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah total bersih dari arus kas aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2025 adalah minus Rp107.296.171.036,46. Angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Karimun lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi aset non keuangan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	261.439.800,00	0,00	261.439.800,00	0,00
Arus Kas Keluar	107.557.610.836,46	147.598.573.750,00	-40.040.962.913,54	-27,13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	-107.296.171.036,46	-147.598.573.750,00	40.302.402.713,54	-27,31

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi non keuangan tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk sebesar Rp261.439.800,00 terdiri atas:

Penjualan Atas Aset Lain-lain	Rp	261.439.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**261.439.800,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp107.557.610.836,46 terdiri atas:

Perolehan Modal Tanah	Rp	0,00
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	Rp	26.003.072.851,00
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	Rp	36.521.830.983,46
Perolehan Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp	35.693.474.292,00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.754.227.190,00
Perolehan Modal Aset Lainnya	Rp	1.085.005.520,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	2.500.000.000,00
Jumlah	**Rp**	**107.557.610.836,46**

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp91.478.966,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp91.478.966,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66

Arus kas masuk sebesar Rp91.478.966,00 tersebut merupakan penerimaan pembayaran pokok dana bergulir selama Tahun 2025 sebesar Rp91.478.966,00

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	71.344.054.680,20	86.135.393.253,69	-14.791.338.573,49	-17,17
Arus Kas Keluar	71.345.532.778,20	86.142.438.101,69	-14.796.905.323,49	-17,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-1.478.098,00	-7.044.848,00	5.566.750,00	-79,02

Aktivitas transitoris anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran penerimaan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah arus kas aktivitas transitoris anggaran adalah minus Rp1.478.098,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp71.344.054.680,20 dikurangi arus kas keluar Rp71.345.532.778,20.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp71.344.054.680,20 merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025, mengalami penurunan sebesar Rp14.791.338.573,49 atau minus 17,17% dibandingkan dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp86.135.393.253,69. Sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp71.345.532.778,20 merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) mengalami penurunan sebesar Rp14.796.905.323,49 atau minus 17,18% dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp86.142.438.101,69.

7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat penurunan kas pada Tahun 2025 sebesar Rp26.490.373.437,32 yang diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset, arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris, dan aktivitas non anggaran. Penurunan kas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	133.682.303.605,78	130.641.205.775,50	3.055.337.630,28	2,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-107.296.171.036,46	-147.598.573.750,00	40.302.402.713,54	-27,31
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	91.478.966,00	83.423.336,00	8.055.630,00	9,66
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	-1.478.098,00	-7.044.848,00	5.566.750,00	-79,02
Kenaikan/Penurunan Kas	26.476.133.437,32	-16.880.989.486,50	43.357.122.923,82	-256,84

7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.165.505.670,18 terdapat selisih sebesar minus Rp16.880.989.486,50 dibandingkan dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp61.046.495.156,68.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95
Saldo akhir Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	70.641.639.107,50	44.165.505.670,18	26.476.133.437,32	59,95

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp70.641.639.107,50 yang merupakan penjumlahan dari nilai kenaikan kas tahun 2025 sebesar Rp26.476.133.437,32 dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tahun 2025 sebesar Rp44.165.505.670,18.

7.5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp70.641.639.107,50 merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2025.

Terdapat selisih sebesar Rp16.000,00 antara saldo akhir kas pada LAK sebesar Rp70.641.639.107,50 dengan SiLPA pada LRA sebesar Rp70.641.623.107,50 yang merupakan utang perhitungan pihak ketiga tahun 2025, yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPh pasal 23) pada Dinas Pariwisata sebesar Rp16.000,00.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas Awal, ditambah Surplus/Defisit periode yang bersangkutan, ditambah dengan koreksi-koreksi yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap maupun koreksi ekuitas lainnya.

Tabel 295
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**2.168.327.298.371,94**	**2.218.246.782.972,87**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**38.626.444.835,60**	**(50.894.366.928,81)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	12.586.898.587,81	974.882.327,88
EKUITAS AKHIR	**2.219.540.641.795,35**	**2.168.327.298.371,94**

Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.168.327.298.371,94 yang merupakan saldo Ekuitas pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 ditambah Surplus dari Laporan Operasional periode 2025 sebesar Rp38.626.444.835,60 kemudian ditambah dengan Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp12.586.898.587,81 sehingga diperoleh saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 senilai Rp2.219.540.641.795,35.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.168.327.298.371,94 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2024, sesuai dengan Neraca *Audited* Tahun 2024.
2. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp38.626.444.835,60 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional Tahun 2025 yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025.
3. Selain adanya penambahan Ekuitas dari Surplus atas Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan Ekuitas yang berasal dari koreksi pencatatan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 296
Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Nilai
A.	**Koreksi Tambah**	**17.572.628.348,73**
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Cadangan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2025	91.478.966,00

No	Uraian	Nilai
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda BPR Tuah Karimun	3.884.343.705,55
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Bumi Berazam Jaya	273.944.921,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PT. Pelabuhan Indonesia (Perseroda)	1.722.066.249,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Tirta Mulia Karimun	990.914.473,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Pegawai Tahun 2024	48.584.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Barang Tahun 2024	383.014.850,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Jasa Tahun 2024	160.400.640,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Barang Jasa BLUD Tahun 2024	36.334.017,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Hibah Tahun 2024	190.030.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	3.723.900,81
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	61.200.126,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penghapusan Hutang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.071.000,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Aset Tetap Tahun 2024	9.712.521.500,00
B.	**Koreksi Kurang**	**4.985.729.760,92**
	Pembayaran sebagian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024	440.177.345,62
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda BPR Tuah Karimun	2.693.214.160,55
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PT. Pelabuhan Indonesia (Perseroda)	353.215.028,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas Perumda Tirta Mulia Karimun	859.984.394,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Pajak PBB dan PBJT Makanan dan/atau Minuman	58.107.459,01
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Retribusi pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024	99.756.083,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Piutang Denda PBJT Makanan dan atau Minuman)	10.417.408,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah)	257.696,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Aset Lainnya di Satpol PP	44.881.660,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Peralatan dan Mesin pada Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.650.000,00

No	Uraian	Nilai
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Bangunan Gedung	170.016.934,37
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Gedund Bangunan pada Bangunan Monumen	153.851.065,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Pencatatan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Bangunan Irigasi	527,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Saji Hutang Belanja Dinas Perkim Tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 (Belanja Pembangunan Jalan RW. 04 Desa Parit Kec. Selat Gelam)	200.000,00
	Jumlah (A-B)	**12.586.898.587,81**

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa catatan penting lain yang perlu diungkap ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Status dan Kedudukan Pemerintah Kabupaten Karimun

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana diuraikan berikut ini:

a) Pemerintah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Karimun;

b) Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Karimun agar terwujud visi Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu "Terwujudnya Karimun yang maju, sejahtera dan berbudaya";

c) Pemerintah Kabupaten Karimun dipimpin oleh Iskandarsyah selaku Bupati/Kepala Daerah dan Rocky Marciano Bawole selaku Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah;

d) Pada saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun terdapat 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun. OPD ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

e) Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas:
   (1) Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   (2) Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup tiga Asisten;
   (3) Sekretariat DPRD;
   (4) Inspektorat Daerah;
   (5) Badan Daerah yang mencakup eenam Badan;
   (6) Dinas yang mencakup 20 (dua puluh) Dinas;
   (7) Kantor Camat yang terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan;
   (8) BLUD yang mencakup dua RSUD dan 13 (tiga belas) Puskesmas.

f) Tempat kedudukan/domisili Pemerintah Kabupaten Karimun bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Poros – Tanjung Balai Karimun.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 selaku entitas pelaporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan maupun catatan menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Saldo Utang Belanja dan Piutang Pendapatan BLUD yang Dieliminasi

Terdapat saldo Utang Belanja pada Dinas Kesehatan yaitu Utang Belanja Jasa tenaga kesehatan terhadap klaim pasien Jamkesda Kabupaten Karimun dari Maret 2023 sampai dengan Desember 2025 dan Piutang Pendapatan BLUD RSUD Muhammad Sani yaitu klaim terhadap Dinas Kesehatan sebesar Rp6.603.875.140,00. Utang dan Piutang tersebut bersifat resiprokal pada Laporan Keuangan Konsolidasi (Gabungan) Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga dilakukan eliminasi terhadap kedua perkiraan tersebut. Demikian juga Utang Belanja Dinas Kesehatan atas klaim Jamkesda Puskesmas Tanjung Balai bulan Februari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp4.434.000,00 dieliminasi dari Laporan Keuangan Konsolidasi.

7.7 PENUTUP

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025) agar Laporan Keuangan ini dapat disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik *(feed back)* dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya dan penyempurnaan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada khususnya untuk periode mendatang.

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN



ISKANDARSYAH

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
PIUTANG PAJAK							
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Reklame	260.610.830,00	215.833.437,00	143.584.040,00	0,00	332.860.227,00
		Pajak Air Bawah Tanah	0,00	83.820,00	0,00	0,00	83.820,00
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.154.625.050,00	0,00	20.109.921.300,00	0,00	44.703.750,00
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2)	31.487.735.988,00	12.888.793.751,00	11.701.583.629,00	(58.107.459,00)	32.616.838.651,00
		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	29.138.375,00	0,00	0,00	29.138.375,00
		Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	729.334.794,60	1.576.860.909,00	332.516.439,59	(0,01)	1.973.679.264,00
		PBJT-Makanan dan/atau Minuman	*587.020.384,60*	*402.950.549,00*	*306.259.449,59*	*(0,01)*	*683.711.484,00*
		PBJT-Jasa Perhotelan	*139.564.410,00*	*545.805.740,00*	*23.506.990,00*	*0,00*	*661.863.160,00*
		PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	*2.750.000,00*	*628.104.620,00*	*2.750.000,00*	*0,00*	*628.104.620,00*
JUMLAH PIUTANG PAJAK (I)			**52.632.306.662,60**	**14.710.710.292,00**	**32.287.605.408,59**	**(58.107.459,01)**	**34.997.304.087,00**
PIUTANG RETRIBUSI							
1	UPT PUSKESMAS MERAL	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.200.000,00	5.445.000,00	6.200.000,00	0,00	5.445.000,00
2	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.625.000,00	0,00	0,00	3.625.000,00
3	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	53.115.000,00	0,00	0,00	53.115.000,00
4	UPT PUSKESMAS TEBING	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	14.158.000,00	0,00	0,00	14.158.000,00
5	UPT PUSKESMAS MORO	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
6	UPT PUSKESMAS UNGAR	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
7	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00	4.820.000,00
8	RSUD MUHAMMAD SANI	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.853.159.468,17	76.456.855.556,00	70.633.511.740,00	(99.756.083,00)	12.576.747.201,17
9	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.922.000,00	0,00	11.660.000,00	0,00	30.262.000,00

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.593.622,00	0,00	0,00	0,00	2.593.622,00
11	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	3.162.050,00	3.162.050,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pemanfaat Aset Daerah	0,00	47.481.000,00	0,00	0,00	47.481.000,00
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI (II)			**6.903.875.090,17**	**76.591.379.556,00**	**70.651.371.740,00**	**-96.594.033,00**	**12.747.288.873,17**
PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	0,00	0,00
JUMLAH PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN (III)			**438.335.331,00**	**0,00**	**438.335.331,00**	**0,00**	**0,00**
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.289.268,00	0,00	5.289.268,00	0,00	0,00
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.161.244,00	4.819.702,00	2.161.244,00	0,00	4.819.702,00
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	94.298.624,32	367.013.015,00	24.459.645,46	(10.417.408,37)	426.434.585,49
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	1.217.500,00	0,00	0,00	1.217.500,00
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.867.560,00	0,00	1.867.560,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00	0,00	0,00
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	575.288,00	0,00	0,00	575.288,00
7	DINAS KESEHATAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.558.564,00	3.581.890,00	7.558.564,00	1.480.000,00	5.061.890,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	0,00	11.561.436,00	0,00	0,00	11.561.436,00
8	RSUD MUHAMMAD SANI	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.525.434,00	0,00	0,00	1.525.434,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	12.233.000,00	0,00	0,00	12.233.000,00
9	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00
10	PUSKESMAS TEBING	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
11	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	42.631.752,22	0,00	42.631.752,22	0,00	0,00
12	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	0,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	653.717.849,00	0,00	0,00	653.717.849,00
14	DINAS PARIWISATA	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	278.400,00	0,00	278.400,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.674.120,00	0,00	1.674.120,00	0,00	0,00

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.294.398,00	0,00	0,00	1.294.398,00
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.005.995,00	0,00	41.005.995,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	886.855,21	24.519.000,00	0,00	(257.696,00)	25.148.159,21
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	103.582.666,67	0,00	101.582.666,67	0,00	2.000.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	183.405.320,00	150.973.000,00	183.405.320,00	0,00	150.973.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	246.377.001,84	33.181.000,00	246.377.001,84	0,00	33.181.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.460,00	0,00	1.694.460,00	0,00	0,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.198.500,00	112.769.206,00	1.198.500,00	0,00	112.769.206,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	37.109.374,00	15.071.882,00	37.109.374,00	0,00	15.071.882,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	48.195.400,00	0,00	43.410.400,00	0,00	4.785.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	16.351.797,45	19.550.000,00	16.351.797,45	0,00	19.550.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	21.024.500,00	6.320.000,00	21.024.500,00	0,00	6.320.000,00

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	864.350,00	0,00	0,00	864.350,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan	2.533.016,00	899.940,00	2.533.016,00	0,00	899.940,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	149.286.029,60	0,00	149.286.029,60	0,00	0,00
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	9.122.000,00	0,00	0,00	9.122.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	2.012.000,00	0,00	0,00	2.012.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	648.328,00	0,00	0,00	648.328,00
22	DINAS SOSIAL	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	345.740,00	0,00	0,00	345.740,00
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	891.080,00	0,00	891.080,00	0,00	0,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	2.476.000,00	0,00	0,00	2.476.000,00
25	KECAMATAN BELAT	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.202.432,00	0,00	1.202.432,00	0,00	0,00

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
26	KECAMATAN KARIMUN	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	885.732,00	0,00	0,00	885.732,00
27	KECAMATAN KUNDUR	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	178.216,00	0,00	178.216,00	0,00	0,00
28	KECAMATAN KUNDUR BARAT	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.720.640,00	540.000,00	1.720.640,00	0,00	540.000,00
29	KECAMATAN MERAL	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.219.456,00	0,00	1.219.456,00	0,00	0,00
30	KECAMATAN MERAL BARAT	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.020,00	0,00	2.644.020,00	0,00	0,00
31	KECAMATAN UNGAR	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	640.936,00	0,00	640.936,00	0,00	0,00
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.002.942,00	1.902.500,00	6.002.942,00	0,00	1.902.500,00
34	SEKRETARIAT DPRD	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.232.420,00	0,00	0,00	1.232.420,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	19.476.000,00	0,00	0,00	19.476.000,00
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	44.055.000,00	0,00	44.055.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH (IV)			**1.077.342.336,97**	**1.469.924.610,00**	**999.831.502,91**	**(9.195.104,37)**	**1.538.240.339,70**

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Koreksi/Reklasifikasi Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
PIUTANG DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI							
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.152.271.199,00	486.838.561,00	6.152.271.199,00	0,00	486.838.561,00
		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.316.702.961,00	220.510.478,00	5.316.702.961,00	0,00	220.510.478,00
		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.802.820.372,00	5.052.209.987,00	9.802.820.372,00	0,00	5.052.209.987,00
		Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP)	17.808.053,00	16.512.207,00	17.808.053,00	0,00	16.512.207,00
JUMLAH PIUTANG DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI (V)			**21.289.602.585,00**	**5.776.071.233,00**	**21.289.602.585,00**	**0,00**	**5.776.071.233,00**
PIUTANG LAINNYA							
1	DINAS KESEHATAN	BPJS	3.162.050,00	0,00	0,00	(3.162.050,00)	0,00
		Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar	1.480.000,00	0,00	0,00	(1.480.000,00)	0,00
JUMLAH PIUTANG LAINNYA (VI)			**4.642.050,00**	**0,00**	**0,00**	**(4.642.050,00)**	**0,00**
TOTAL PIUTANG (I+II+III+IV+V+VI)			**82.346.104.055,74**	**98.548.085.691,00**	**125.666.746.567,50**	**(168.538.646,38)**	**55.058.904.532,87**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
1	Pajak Reklame	332.860.227,00	61.424.115,25	271.436.111,75
2	Pajak Air Bawah Tanah	83.820,00	0,00	83.820,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.703.750,00	44.703.750,00	0,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2)	32.616.838.651,00	23.177.827.268,60	9.439.011.382,40
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.138.375,00	1.456.918,75	27.681.456,25
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.973.679.264,00	61.673.377,65	1.912.005.886,35
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)	*683.711.484,00*	*2.554.172,65*	*681.157.311,35*
	PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)	*661.863.160,00*	*59.119.205,00*	*602.743.955,00*
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)	*628.104.620,00*	*0,00*	*628.104.620,00*
JUMLAH (I)		**34.997.304.087,00**	**23.347.085.430,25**	**11.650.218.656,75**
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	90.205.050,00	7.514.200,00	82.690.850,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	12.576.747.201,17	2.020.008.393,32	10.556.738.807,85
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.262.000,00	17.611.000,00	12.651.000,00
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.593.622,00	259.362,20	2.334.259,80
5	Retribusi Pemanfaat Aset Daerah	47.481.000,00	0,00	47.481.000,00
JUMLAH (II)		**12.747.288.873,17**	**2.045.392.955,52**	**10.701.895.917,65**
PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.538.240.339,70	0,00	1.538.240.339,70
JUMLAH (III)		**1.538.240.339,70**	**0,00**	**1.538.240.339,70**
PENYISIHAN PIUTANG DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI				
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	5.776.071.233,00	0,00	5.776.071.233,00
JUMLAH (IV)		**5.776.071.233,00**	**0,00**	**5.776.071.233,00**
JUMLAH (I+II+III+IV)		**55.058.904.532,87**	**25.392.478.385,77**	**29.666.426.147,10**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH BERSIH
1	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	9.914.418.270,00	9.914.418.270,00	0,00

REKAP NET REALIZABLE VALUE DANA BERGULIR (BANK RIAU KEPRI SYARIAH)

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per Desember 2024										Keterangan
			Jumlah Debitur	Baki Debet per 1 Januari 2025	Pengembalian	Koreksi		Jumlah Debitur	Baki Debet per 31 Desember 2025	Porsentase Pencadangan	Pencadangan	NRV	
						Tambah	Kurang						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,5%	0,00	0,00	
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10%	0,00	0,00	
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50%	0,00	0,00	
4	Macet	diatas 5 Tahun	768	9.103.327.742,00	91.478.966,00	0,00	0,00	768	9.011.848.776,00	100%	9.011.848.776,00	0,00	
Jumlah			**768**	**9.103.327.742,00**	**91.478.966,00**	**0,00**	**0,00**	**768**	**9.011.848.776,00**		**9.011.848.776,00**	**0,00**	

REKAP NET REALIZABLE VALUE DANA BERGULIR (BPR KARIMUN)

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per Desember 2024										Keterangan
			Jumlah Debitur	Baki Debet per 1 Januari 2025	Pengembalian	Koreksi		Jumlah Debitur	Baki Debet per 31 Desember 2025	Porsentase Pencadangan	Pencadangan	NRV	
						Tambah	Kurang						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,5%	0,00	0,00	
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10%	0,00	0,00	
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50%	0,00	0,00	
4	Macet	diatas 5 Tahun	70	202.569.494,00	0,00	0,00	0,00	70	202.569.494,00	100%	202.569.494,00	0,00	
Jumlah			**70**	**202.569.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70**	**202.569.494,00**		**202.569.494,00**	**0,00**	

REKAP NET REALIZABLE VALUE DANA BERGULIR

MODAL KREDIT YANG DIKEMBANGKAN MELALUI UKM PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per Desember 2024										Keterangan
			Jumlah Debitur	Baki Debet per 1 Januari 2025	Pengembalian	Koreksi		Jumlah Debitur	Baki Debet per 31 Desember 2025	Porsentase Pencadangan	Pencadangan	NRV	
						Tambah	Kurang						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,5%	0,00	0,00	
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10%	0,00	0,00	
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50%	0,00	0,00	
4	Macet	diatas 5 Tahun	1	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	0,00	
Jumlah			**1**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**	**700.000.000,00**		**700.000.000,00**	**0,00**	
JUMLAH KESELURUHAN			**839**	**10.005.897.236,00**	**91.478.966,00**	**0,00**	**0,00**	**839**	**9.914.418.270,00**	**100%**	**9.914.418.270,00**	**0,00**	

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TA 2025

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2001	PT. Bank Riau Kepri		Penyertaaan modal	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
	2002				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	743.000.000,00	1.743.000.000,00	-	991.660.417,00	-	1.743.000.000,00
	2003				743.000.000,00	1.743.000.000,00	1.257.000.000,00	3.000.000.000,00	-	1.784.290.171,00	-	3.000.000.000,00
	2004				1.257.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	852.623.844,00	-	3.000.000.000,00
	2005				-	3.000.000.000,00	500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	470.255.223,00	-	3.500.000.000,00
	2006				500.000.000,00	3.500.000.000,00	700.000.000,00	4.200.000.000,00	-	917.152.362,00	-	4.200.000.000,00
	2007				700.000.000,00	4.200.000.000,00	1.590.000.000,00	5.790.000.000,00	-	2.284.750.608,00	-	5.790.000.000,00
	2008				1.590.000.000,00	5.790.000.000,00	1.400.000.000,00	7.190.000.000,00	-	1.392.217.949,00	-	7.190.000.000,00
	2009				1.400.000.000,00	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	2.171.862.573,00	-	7.190.000.000,00
	2010				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	2.160.208.349,00	-	7.190.000.000,00
	2011				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.979.523.654,00	-	7.190.000.000,00
	2012				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.519.718.101,00	-	7.190.000.000,00
	2013				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.533.377.132,00	-	7.190.000.000,00
	2014				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.907.066.091,00	-	7.190.000.000,00
	2015				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	2.241.022.941,00	-	7.190.000.000,00
	2016				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.255.710.036,00	-	7.190.000.000,00
	2017				-	7.190.000.000,00	310.300.000,00	7.500.300.000,00	-	1.862.001.592,00	-	7.500.300.000,00
	2018				310.300.000,00	7.500.300.000,00	-	7.500.300.000,00	-	1.854.719.732,00	-	7.500.300.000,00
	2019				-	7.500.300.000,00	-	7.500.300.000,00	-	1.702.082.284,00	-	7.500.300.000,00
	2020				-	7.500.300.000,00	-	7.500.300.000,00	-	1.286.930.605,00	-	7.500.300.000,00
	2021				-	7.500.300.000,00	(310.300.000,00)	7.190.000.000,00	-	1.818.842.803,00	-	7.190.000.000,00
	2022				(310.300.000,00)	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.492.116.656,00		7.190.000.000,00
	2023				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.467.565.698,00		7.190.000.000,00
	2024				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.141.358.177,00		7.190.000.000,00
	2025				-	7.190.000.000,00	-	7.190.000.000,00	-	1.363.425.644,00		7.190.000.000,00
2	2003	Perumda BPR		Penyertaaan modal	-	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00
	2004	Tuah Karimun			700.000.000,00	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	-	-	700.000.000,00
	2005				-	700.000.000,00	500.000.000,00	1.200.000.000,00	-	-	-	1.200.000.000,00
	2006				500.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	-	1.400.000.000,00
	2007				200.000.000,00	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	-	17.102.406,00	-	1.400.000.000,00
	2008				-	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	-	71.066.350,00	-	1.400.000.000,00
	2009				-	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	-	55.251.067,00	-	1.400.000.000,00
	2010				-	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00	2.400.000.000,00	-	-	-	2.400.000.000,00
	2011				1.000.000.000,00	2.400.000.000,00	(323.008.000,00)	2.076.992.000,00	-	-	-	2.076.992.000,00

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
	2012				(323.008.000,00)	2.076.992.000,00	(459.852.602,24)	1.617.139.397,76	-	-	-	1.617.139.397,76
	2013				(459.852.602,24)	1.617.139.397,76	49.570.332,45	1.666.709.730,21	-	-	-	1.666.709.730,21
	2014				49.570.332,45	1.666.709.730,21	(472.782.649,45)	1.193.927.080,76	-	-	-	1.193.927.080,76
	2015				(472.782.649,45)	1.193.927.080,76	(424.720.085,00)	769.206.995,76	-	-	-	769.206.995,76
	2016				(424.720.085,00)	769.206.995,76	2.209.189.334,76	2.978.396.330,52	-	-	-	2.978.396.330,52
	2017				2.209.189.334,76	2.978.396.330,52	362.001.879,48	3.340.398.210,00	-	-	-	3.340.398.210,00
	2018				362.001.879,48	3.340.398.210,00	831.382.851,00	4.171.781.061,00	-	-	-	4.171.781.061,00
	2019				831.382.851,00	4.171.781.061,00	32.551.257,51	4.204.332.318,51	-	-	-	4.204.332.318,51
	2020				32.551.257,51	4.204.332.318,51	303.339.261,75	4.507.671.580,26	-	264.404.637,79	-	4.507.671.580,26
	2021				303.339.261,75	4.507.671.580,26	24.002.742,75	4.531.674.323,01	-	-	-	4.531.674.323,01
	2022				24.002.742,75	4.531.674.323,01	525.365.783,99	5.057.040.107,00	-	-	-	5.057.040.107,00
	2023				525.365.783,99	5.057.040.107,00	(1.103.950.982,20)	3.953.089.124,80	-	-	-	3.953.089.124,80
	2024				(1.103.950.982,20)	3.953.089.124,80	(51.154.064,80)	3.901.935.060,00	-	-	-	3.901.935.060,00
	2025				(51.154.064,80)	3.901.935.060,00	3.691.129.545,00	7.593.064.605,00	-	-	-	7.593.064.605,00
3	2001	Perumda Bumi		Penyertaan modal	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
	2002	Berazam Jaya			500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
	2003				1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
	2004				3.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	70.000.000,00	-	5.000.000.000,00
	2005				-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	130.000.000,00	-	5.000.000.000,00
	2006				-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
	2007				-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
	2008				-	5.000.000.000,00	3.407.582.747,00	8.407.582.747,00	-	50.000.000,00	-	8.407.582.747,00
	2009				3.407.582.747,00	8.407.582.747,00	150.000.000,00	8.557.582.747,00	-	100.000.000,00	-	8.557.582.747,00
	2010				150.000.000,00	8.557.582.747,00	1.000.000.000,00	9.557.582.747,00	-	50.000.000,00	-	9.557.582.747,00
	2011				1.000.000.000,00	9.557.582.747,00	(2.317.541.147,00)	7.240.041.600,00	-	-	-	7.240.041.600,00
	2012				(2.317.541.147,00)	7.240.041.600,00	2.084.809.860,92	9.324.851.460,92	-	-	-	9.324.851.460,92
	2013				2.084.809.860,92	9.324.851.460,92	(674.692.662,52)	8.650.158.798,40	-	-	-	8.650.158.798,40
	2014				(674.692.662,52)	8.650.158.798,40	(124.651.188,31)	8.525.507.610,09	-	-	-	8.525.507.610,09
	2015				(124.651.188,31)	8.525.507.610,09	854.847.138,91	9.380.354.749,00	-	-	-	9.380.354.749,00
	2016				854.847.138,91	9.380.354.749,00	386.832.584,00	9.767.187.333,00	-	100.000.000,00	-	9.767.187.333,00
	2017				386.832.584,00	9.767.187.333,00	(1.404.115.736,00)	8.363.071.597,00	-	157.357.108,00	-	8.363.071.597,00
	2018				(1.404.115.736,00)	8.363.071.597,00	(247.091.209,00)	8.115.980.388,00	-	164.056.828,00	247.091.209,00	7.868.889.179,00
	2019				(247.091.209,00)	8.115.980.388,00	629.458.074,00	8.745.438.462,00	-	174.456.791,00	-	8.745.438.462,00
	2020				629.458.074,00	8.745.438.462,00	(23.615,00)	8.745.414.847,00	-	122.082.626,00	-	8.745.414.847,00
	2021				(23.615,00)	8.745.414.847,00	(358.667.381,00)	8.386.747.466,00	-	13.186.194,00	-	8.386.747.466,00
	2022				(358.667.381,00)	8.386.747.466,00	345.675.337,00	8.732.422.803,00	-	100.907.537,00	-	8.732.422.803,00
	2023				345.675.337,00	8.732.422.803,00	94.141.165,00	8.826.563.968,00	-	-	-	8.826.563.968,00
	2024				94.141.165,00	8.826.563.968,00	177.758.558,00	9.004.322.526,00	-	-	-	9.004.322.526,00
	2025				177.758.558,00	9.004.322.526,00	273.944.921,00	9.278.267.447,00	-	202.446.780,00	-	9.278.267.447,00

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
4	2009	PT. Pelabuhan		Modal Saham/Setor	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
	2010	Karimun (Perseroda)			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	2.298.274.618,04	-	1.000.000.000,00
	2011				-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	3.635.956.585,71	-	1.000.000.000,00
	2012				-	1.000.000.000,00	578.165.495,00	1.578.165.495,00	-	3.402.208.084,71	-	1.578.165.495,00
	2013				578.165.495,00	1.578.165.495,00	318.492.215,00	1.896.657.710,00	-	-	-	1.896.657.710,00
	2014				318.492.215,00	1.896.657.710,00	602.486.411,00	2.499.144.121,00	-	-	-	2.499.144.121,00
	2015				602.486.411,00	2.499.144.121,00	401.472.904,76	2.900.617.025,76	-	-	-	2.900.617.025,76
	2016				401.472.904,76	2.900.617.025,76	10.655.389.287,56	13.556.006.313,32	-	-	-	13.556.006.313,32
	2017				10.655.389.287,56	13.556.006.313,32	(4.474.971.221,32)	9.081.035.092,00	-	-	-	9.081.035.092,00
	2018				(4.474.971.221,32)	9.081.035.092,00	1.704.146.250,00	10.785.181.342,00	-	1.000.000.000,00	-	10.785.181.342,00
	2019				1.704.146.250,00	10.785.181.342,00	(2.445.015.153,00)	8.340.166.189,00	-	3.197.013.300,00	-	8.340.166.189,00
	2020				(2.445.015.153,00)	8.340.166.189,00	(1.400.190.058,00)	6.939.976.131,00	-	707.819.949,00	-	6.939.976.131,00
	2021				(1.400.190.058,00)	6.939.976.131,00	(2.687.047.959,00)	4.252.928.172,00	-	-	-	4.252.928.172,00
	2022				(2.687.047.959,00)	4.252.928.172,00	(825.604.413,00)	3.427.323.759,00	-	-	-	3.427.323.759,00
	2023				(825.604.413,00)	3.427.323.759,00	2.132.687.125,40	5.560.010.884,40	-	124.519.096,00	-	5.560.010.884,40
	2024				2.132.687.125,40	5.560.010.884,40	58.568.007,60	5.618.578.892,00	-	900.000.000,00	-	5.618.578.892,00
	2025				**58.568.007,60**	**5.618.578.892,00**	**1.368.851.221,00**	**6.987.430.113,00**	-	**438.335.331,00**	-	**6.987.430.113,00**
5	2017	Perumda Tirta		Modal Saham	-	-	1.283.421.661,00	1.283.421.661,00	-	-	-	1.283.421.661,00
	2018	Mulia Karimun			1.283.421.661,00	1.283.421.661,00	1.148.907.963,00	2.432.329.624,00	-	-	-	2.432.329.624,00
	2019				1.148.907.963,00	2.432.329.624,00	982.677.066,00	3.415.006.690,00	-	200.000.000,00	-	3.415.006.690,00
	2020				982.677.066,00	3.415.006.690,00	(186.290.514,00)	3.228.716.176,00	-	-	-	3.228.716.176,00
	2021				(186.290.514,00)	3.228.716.176,00	(1.346.229.572,00)	1.882.486.604,00	-	-	-	1.882.486.604,00
	2022				(1.346.229.572,00)	1.882.486.604,00	2.198.239.632,00	4.080.726.236,00	-	931.951.926,00	-	4.080.726.236,00
	2023				2.198.239.632,00	4.080.726.236,00	2.608.826.472,00	6.689.552.708,00	-	872.303.155,00	-	6.689.552.708,00
	2024				2.608.826.472,00	6.689.552.708,00	155.345.081,00	6.844.897.789,00	-	1.045.620.235,00	-	6.844.897.789,00
	2025				**155.345.081,00**	**6.844.897.789,00**	**130.930.079,00**	**6.975.827.868,00**	-	**703.622.232,00**	-	**6.975.827.868,00**
JUMLAH												**38.024.590.033,00**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	510.216.559.009,27	44.889.357.528,04	4.544.193.915,00	550.561.722.622,31
2	DINAS KESEHATAN	432.764.009.127,56	16.236.504.442,83	1.776.513.620,00	447.223.999.950,39
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.088.184.781.150,39	65.602.597.472,00	103.586.825.946,12	2.050.200.552.676,27
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	95.591.494.990,34	3.795.444.787,00	1.809.021.517,00	97.577.918.260,34
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.371.484.100,00	203.446.300,00	96.087.150,00	2.478.843.250,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.570.405.500,00	33.098.000,00	352.483.000,00	3.251.020.500,00
7	DINAS SOSIAL	2.506.087.431,00	0,00	0,00	2.506.087.431,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.063.646.900,00	23.800.000,00	111.612.000,00	3.975.834.900,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.159.577.906,00	0,00	1.130.000.000,00	4.029.577.906,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	26.745.532.504,00	34.133.000,00	7.093.020.000,00	19.686.645.504,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.079.958.973,00	5.786.028.350,00	2.091.100.000,00	23.774.887.323,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.588.303.125,00	158.707.800,00	3.385.500,00	3.743.625.425,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	679.320.400,00	60.750.000,00	142.550.000,00	597.520.400,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	231.640.795.344,45	22.632.441.400,00	1.966.384.000,00	252.306.852.744,45
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.125.721.130,00	158.785.000,00	0,00	1.284.506.130,00
16	DINAS KOPERASI MIKRO USAHA, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	71.242.053.045,00	58.653.175.060,00	6.721.730.000,00	123.173.498.105,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.275.265.785,00	0,00	0,00	9.275.265.785,00
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	56.303.362.497,00	302.803.000,00	22.193.353.702,00	34.412.811.795,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.111.894.377,00	5.862.000,00	5.862.000,00	8.111.894.377,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
20	DINAS PERIKANAN	15.947.017.229,00	0,00	423.098.000,00	15.523.919.229,00
21	DINAS PARIWISATA	13.356.152.037,00	395.608.750,00	3.406.172.000,00	10.345.588.787,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	205.235.589.959,00	5.652.779.254,71	18.978.646.180,00	191.909.723.033,71
23	SEKRETARIAT DPRD	23.936.279.684,00	3.777.847.655,00	1.075.818.300,00	26.638.309.039,00
24	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.063.530.518,00	41.452.500,00	437.785.000,00	10.667.198.018,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.479.614.061,00	365.880.000,00	380.977.000,00	10.464.517.061,00
26	BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH	100.869.134.331,00	0,00	6.386.553.000,00	94.482.581.331,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.985.577.500,00	123.650.000,00	0,00	9.109.227.500,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	7.674.642.209,00	42.700.000,00	0,00	7.717.342.209,00
29	KECAMATAN KARIMUN	8.950.190.321,00	157.227.300,00	9.000.000,00	9.098.417.621,00
30	KECAMATAN MERAL	5.234.114.084,00	22.100.000,00	825.624.000,00	4.430.590.084,00
31	KECAMATAN MERAL BARAT	4.503.583.545,00	8.900.000,00	87.812.000,00	4.424.671.545,00
32	KECAMATAN TEBING	7.992.314.000,00	0,00	73.762.000,00	7.918.552.000,00
33	KECAMATAN KUNDUR	12.827.168.500,00	0,00	507.445.000,00	12.319.723.500,00
34	KECAMATAN UNGAR	2.926.494.655,00	0,00	105.374.000,00	2.821.120.655,00
35	KECAMATAN KUNDUR UTARA	9.963.251.200,00	0,00	971.713.000,00	8.991.538.200,00
36	KECAMATAN BELAT	2.042.488.854,00	0,00	105.374.000,00	1.937.114.854,00
37	KECAMATAN KUNDUR BARAT	3.806.921.000,00	3.500.000,00	1.078.534.000,00	2.731.887.000,00
38	KECAMATAN MORO	5.751.946.324,00	0,00	436.249.000,00	5.315.697.324,00
39	KECAMATAN BURU	4.693.097.000,00	0,00	242.149.000,00	4.450.948.000,00
40	KECAMATAN DURAI	1.872.393.000,00	0,00	84.299.000,00	1.788.094.000,00
41	KECAMATAN SELAT GELAM	66.310.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	66.310.000,00
42	KECAMATAN SUGIE BESAR	53.230.000,00	17.495.000,00	3.225.000,00	67.500.000,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	994.298.692,00	1.582.000,00	1.582.000,00	994.298.692,00
TOTAL		**4.042.445.591.998,01**	**229.203.156.599,58**	**189.260.813.830,12**	**4.082.387.934.767,47**

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI
ASET TETAP

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	499.673.759.643,00	2.011.310.000,00	49.145.490.000,00	452.539.579.643,00
2	PERALATAN DAN MESIN	509.604.512.267,50	31.704.579.696,00	22.175.094.387,00	519.133.997.576,50
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	911.770.548.482,89	135.701.475.246,58	88.664.402.119,12	958.807.621.610,35
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.053.830.773.401,07	54.010.448.467,00	25.456.346.934,00	2.082.384.874.934,07
5	ASET TETAP LAINNYA	52.986.691.130,00	5.775.343.190,00	76.252.000,00	58.685.782.320,00
6	KONSTUKSI DALAM PEKERJAAN	14.579.307.073,55	0,00	3.743.228.390,00	10.836.078.683,55
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.874.328.259.128,97)	(114.400.564.069,55)	(29.508.681.582,99)	(1.959.220.141.615,53)
TOTAL		**2.168.117.332.869,04**	**114.802.592.530,03**	**159.752.132.247,13**	**2.123.167.793.151,94**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.549.707.073,55	-	-	-	-	-	3.743.228.390,00	-	-	-	9.806.478.683,55
2	DINAS PERHUBUNGAN	1.029.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029.600.000,00
TOTAL		**14.579.307.073,55**	-	-	-	-	-	**3.743.228.390,00**	-	-	-	**10.836.078.683,55**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI
ASET LAINNYA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	906.267.506,18	451.670.090,00	273.074.506,18	1.084.863.090,00
2	DINAS KESEHATAN	435.699.282,00	1.231.062.000,00	9.549.000,00	1.657.212.282,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.899.466.619,51	4.912.512.000,00	8.554.693.499,44	14.257.285.120,07
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.000.000,00	8.276.440.500,00	15.000.000,00	8.276.440.500,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.620.000,00	0,00	4.795.000,00	2.825.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	25.000.000,00	209.312.000,00	0,00	234.312.000,00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	19.000.000,00	108.887.000,00	0,00	127.887.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.291.900.000,00	0,00	1.291.900.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	39.655.000,00	0,00	0,00	39.655.000,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	243.634.500,00	1.369.368.000,00	5.400.000,00	1.607.602.500,00
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	119.957.700,00	0,00	119.957.700,00
13	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0,00	406.802.000,00	0,00	406.802.000,00
14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.445.000,00	246.144.000,00	49.445.000,00	246.144.000,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125.946.500,00	0,00	0,00	125.946.500,00
16	DINAS PARIWISATA	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	426.529.500,00	544.969.000,00	35.435.000,00	936.063.500,00
18	SEKRETARIAT DPRD	201.850.000,00	147.524.000,00	0,00	349.374.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	65.662.500,00	0,00	34.000.000,00	31.662.500,00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	433.078.500,00	198.000.000,00	65.278.500,00	565.800.000,00
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	980.847.000,00	165.610.730,00	887.784.000,00	258.673.730,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	342.405.000,00	0,00	47.260.000,00	295.145.000,00
23	INSPEKTORAT DAERAH	148.900.000,00	89.700.000,00	89.700.000,00	148.900.000,00
24	KECAMATAN MERAL	0,00	175.624.000,00	0,00	175.624.000,00
25	KECAMATAN MERAL BARAT	0,00	87.812.000,00	0,00	87.812.000,00
26	KECAMATAN TEBING	0,00	73.762.000,00	0,00	73.762.000,00
27	KECAMATAN KUNDUR	0,00	196.699.000,00	0,00	196.699.000,00
28	KECAMATAN UNGAR	0,00	105.374.000,00	0,00	105.374.000,00
29	KECAMATAN KUNDUR UTARA	0,00	189.673.000,00	0,00	189.673.000,00
30	KECAMATAN BELAT	0,00	105.374.000,00	0,00	105.374.000,00
31	KECAMATAN KUNDUR BARAT	0,00	328.534.000,00	0,00	328.534.000,00
32	KECAMATAN MORO	0,00	436.249.000,00	0,00	436.249.000,00
33	KECAMATAN BURU	0,00	242.149.000,00	0,00	242.149.000,00
34	KECAMATAN DURAI	0,00	84.299.000,00	0,00	84.299.000,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
TOTAL		**22.453.756.907,69**	**21.854.908.020,00**	**10.130.914.505,62**	**34.177.750.422,07**

Karimun, 21 Agustus 2026

BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XVI

DAFTAR
DANA CADANGAN DAERAH

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Transfer Dari Kas Daerah (Rp.)	Transfer Ke Kas Daerah (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H	I L				
JUMLAH			-	-	-	-	-	-

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XVII

DAFTAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		KOREKSI	SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5+6)
I	**UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)**	**1.494.098,00**	**16.000,00**	**1.494.098,00**	**0,00**	**16.000,00**
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.494.098,00	16.000,00	1.494.098,00	0,00	16.000,00
II	**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**	**620.394.600,00**	**549.777.600,00**	**618.806.700,00**	**0,00**	**551.365.500,00**
	Pendapatan Diterima dimuka	620.394.600,00	549.777.600,00	618.806.700,00	0,00	551.365.500,00
III	**UTANG BELANJA**	**171.179.112.755,60**	**32.655.214.850,40**	**78.079.228.916,13**	**(897.158.534,18)**	**124.857.940.155,69**
	Utang Belanja Pegawai	8.007.553.074,00	1.602.922.244,00	4.191.896.734,00	(53.336.000,00)	5.365.242.584,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	66.713.905.599,45	18.160.947.018,40	41.859.920.455,50	(588.868.507,00)	42.426.063.655,35
	Utang Belanja Hibah	21.146.993.216,00	1.824.299.584,00	5.621.374.013,00	(190.030.000,00)	17.159.888.787,00
	Utang Belanja Modal	65.934.200.017,34	6.135.744.200,00	19.140.513.600,63	(61.200.126,37)	52.868.230.490,34
	Utang Belanja Tidak Terduga	694.700.571,81	1.048.983.000,00	690.976.671,00	(3.723.900,81)	1.048.983.000,00
	Utang Belanja Transfer	8.681.760.277,00	3.882.318.804,00	6.574.547.442,00	0,00	5.989.531.639,00
JUMLAH (I+II+III)		**171.801.001.453,60**	**33.205.008.450,40**	**78.699.529.714,13**	**(897.158.534,18)**	**125.409.321.655,69**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	N I H I L				
JUMLAH		-	-	-	-

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

NO	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang Masih Harus Dianggarkan Kembali pada APBD Berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					
	JUMLAH		0	0	0	0	0	

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Perbankan																	
	Perumda BPR Tuah Karimun																	
	Tahun 2025			45.537.966.386,00	576.580.874,00	744.732.951,00	46.859.280.211,00	39.266.215.607,00	0,00	39.266.215.607,00	7.500.000.000,00	0,00		93.064.604,00	0,00	7.593.064.604,00	100,00	7.593.064.604,00
	Tahun 2024			45.003.133.271,00	650.986.280,00	681.624.274,00	46.335.743.824,00	42.433.808.764,00	0,00	42.433.808.764,00	5.000.000.000,00	0,00		(1.098.064.940,00)	0,00	3.901.935.060,00	100,00	3.901.935.060,00
2	Bidang Kepelabuhan																	
	PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)																	
	Tahun 2025			4.763.293.984,00	3.934.861.032,00	0,00	8.698.155.016,00	1.538.636.090,00	172.088.813,00	1.710.724.903,00	500.000.000,00	0,00		0,00	6.487.430.113,00	6.987.430.113,00	100,00	6.987.430.113,00
	Tahun 2024			4.274.666.651,00	3.536.545.495,00	0,00	7.811.212.146,00	1.346.826.915,00	845.806.339,00	2.192.633.254,00	500.000.000,00	0,00		0,00	5.118.578.892,00	5.618.578.892,00	100,00	5.618.578.892,00
3	Bidang Jasa Lainnya																	
	Perumda Bumi Berazam Jaya																	
	Tahun 2025			4.798.683.313,00	718.792.360,00	4.807.047.747,00	10.324.523.420,00	1.046.255.973,00	0,00	1.046.255.973,00	0,00	7.912.956.944,00		1.365.310.503,00	0,00	9.278.267.447,00	100,00	9.278.267.447,00
	Tahun 2024			4.575.706.084,00	769.891.000,00	4.807.047.747,00	10.152.644.829,00	1.174.487.519,00	0,00	1.174.487.519,00	0,00	7.912.956.944,00		1.065.200.366,00	0,00	8.978.157.310,00	100,00	8.978.157.310,00
4	Bidang Jasa Air Minum																	
	Karimun																	
	Tahun 2025			4.406.905.206,00	3.092.231.549,00	0,00	7.499.136.755,00	354.708.270,00	168.600.616,00	523.308.886,00	0,00	2.283.556.796,00		190.451.000,00	4.501.820.072,00	6.975.827.868,00	100,00	6.975.827.868,00
	Tahun 2024			4.621.619.836,00	3.095.882.515,00	0,00	7.717.502.351,00	594.191.594,00	215.825.927,00	810.017.521,00	0,00	2.283.556.796,00		18.050.000,00	4.605.878.035,00	6.907.484.831,00	100,00	6.907.484.831,00
Total Seluruh Bidang Industri																		
Tahun 2025				**59.506.848.889,00**	**8.322.465.815,00**	**5.551.780.698,00**	**73.381.095.402,00**	**42.205.815.940,00**	**340.689.429,00**	**42.546.505.369,00**	**8.000.000.000,00**	**10.196.513.740,00**		**1.648.826.107,00**	**10.989.250.185,00**	**30.834.590.032,00**	**100,00**	**30.834.590.032,00**
Tahun 2024				**58.475.125.842,00**	**8.053.305.290,00**	**5.488.672.021,00**	**72.017.103.150,00**	**45.549.314.792,00**	**1.061.632.266,00**	**46.610.947.058,00**	**5.500.000.000,00**	**10.196.513.740,00**		**(14.814.574,00)**	**9.724.456.927,00**	**25.406.156.093,00**	**100,00**	**25.406.156.093,00**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
	Perumda BPR Tuah Karimun								
	Tahun 2025			7.933.074.461,00	(8.113.025.540,00)	(179.951.079,00)	71.111.407,00	(83.411.610,00)	(192.251.282,00)
	Tahun 2024			9.731.937.623,00	(9.661.042.491,00)	70.895.132,00	43.804.600,00	(44.334.200,00)	70.365.532,00
2	Bidang Kepelabuhan								
	PT. Pelabuhan Karimun (Perseroda)								
	Tahun 2025			18.135.593.536,00	(16.136.134.203,00)	1.999.459.333,00	30.455.077,00	(61.754.149,00)	1.968.160.261,00
	Tahun 2024			15.565.492.236,00	(13.411.908.500,00)	2.153.583.736,00	39.122.916,00	(74.907.422,00)	2.117.799.230,00
3	Bidang Jasa Lainnya								
	Perumda Bumi Berazam Jaya								
	Tahun 2025			4.527.142.000,00	(4.274.860.785,00)	252.281.215,00	252.646.729,00	(2.371.027,00)	502.556.917,00
	Tahun 2024			4.061.376.500,00	(3.947.835.131,00)	113.541.369,00	133.374.612,00	(5.600.373,00)	241.315.607,00
4	Bidang Jasa Air Minum								
	Perumda Tirta Mulia Karimun								
	Tahun 2025			13.374.244.286,00	(12.354.269.165,00)	1.019.975.121,00	0,00	0,00	1.019.975.121,00
	Tahun 2024			12.991.762.632,00	(10.972.326.551,00)	2.019.436.081,00	0,00	0,00	2.019.436.081,00
Total Seluruh Bidang Industri									
Tahun 2025				**43.970.054.283,00**	**(40.878.289.693,00)**	**3.091.764.590,00**	**354.213.213,00**	**(147.536.786,00)**	**3.298.441.017,00**
Tahun 2024				**42.350.568.991,00**	**(37.993.112.673,00)**	**4.357.456.318,00**	**216.302.128,00**	**(124.841.995,00)**	**4.448.916.450,00**

Karimun, 21 Agustus 2026
BUPATI KARIMUN

ISKANDARSYAH

LAPORAN
BUMD

LAPORAN BUMD

PERUMDA
BPR TUAH KARIMUN

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dengan Perbandingan 2024

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN i

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ii

LAPORAN KEUANGAN

- Neraca 1
- Laporan Laba Rugi 2
- Laporan Perubahan Ekuitas 3
- Laporan Arus Kas 4
- Laporan Komitmen dan Kontijensi 5

Catatan Atas Laporan Keuangan 6

Analisa Laporan Keuangan 36

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BPR TUAH KARIMUN

Bersama Membangun Negeri

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Wan Abdul Rahman, S.E.
Alamat Kantor	: Jl. Pramuka No. 45, A, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Jabatan	: Direktur Utama

Dan

Nama	: Siska Naritasari, S.E.
Alamat Kantor	: Jl. Pramuka No. 45. A, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

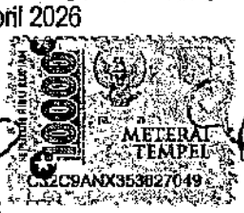
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN periode 31 Desember 2025.

2. Laporan keuangan PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN periode 31 Desember 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN periode 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
   b. Laporan keuangan PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN periode 31 Desember 2025 tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN periode 31 Desember 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tanjung Balai Karimun, 22 April 2026



WAN ABDUL RAHMAN, S.E	**SISKA NARITASARI, S.E**
Direktur Utama	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

KANTOR PUSAT:
Jl. Pramuka No. 45-A Tg. Balai Karimun
Kepulauan Riau 29616
Telp: 0777 - 328277
email: tuahbprkarimun@gmail.com

KANTOR CABANG:
Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Moro
Kepulauan Riau
Telp: 0778 - 511187
email: tuahbpekarimun@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00137/2.1358/AU.8/07/0906-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
Perumda BPR Tuah Karimun

Opini Wajar Dengan Pengecualian
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perumda BPR Tuah Karimun ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali mengenai pengaruh paragraf yang kami sebutkan pada bagian Basis Opini, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan Perumda BPR Tuah Karimun terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Bahwasanya atas saldo kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 168.511.920,- dalam Laporan Keuangan Perumda BPR Tuah Karimun pada per 31 Desember 2025 sebagaimana diungkapkan dalam catatan 3.b.7, 3.16 terlampir, kami tidak dapat meyakini perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut, sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 tentang "Imbalan Kerja", serta Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hal-Hal Lain
(i) Seperti yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan nomor "3.p.", bahwasanya Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Perumda BPR Tuah Karimun berdasarkan SK.OJK S-85/KO.1501/2025.
(ii) Laporan Keuangan Perumda BPR Tuah Karimun per 31 Desember 2024, diaudit oleh akuntan publik Sandra Pracipta dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, sesuai laporannya No: 00062/2.1269/AU.2/07/1394-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP. AP.0906
Yogyakarta, 22 April 2026: DK

00137

LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025 *(Audited)*	31 Des 2024 *(Audited)*
ASET			
Kas	3.	598.949.400	304.681.900
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	4.	329.949.299	408.172.632
Penempatan Pada Bank Lain	5.	3.911.097.568	6.250.739.342
PPKA Penempatan pada Bank Lain	5.	-	(5.741.801)
Kredit Yang Diberikan	6.	42.951.468.609	41.285.341.371
PPKA Kredit Yang Diberikan	6.	-	(3.240.080.173)
CKPN Kredit Yang Diberikan	6.	(2.253.498.490)	-
Agunan Yang Diambil Alih	7.	423.277.577	484.788.708
Aset Tetap dan Inventaris	8.	1.873.936.973	1.818.359.523
Akm Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	8.	(1.720.633.676)	(1.652.161.951)
Aset Tidak Berwujud	9.	-	-
Amortisasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	9.	-	-
Rupa-Rupa Aset	10.	744.732.951	681.624.274
Jumlah Aset		**46.859.280.211**	**46.335.743.824**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	11.	1.528.988.913	1.453.015.174
Utang Bunga	12.	53.655.492	77.089.645
Utang Pajak	13.	-	11.679.887
Simpanan:			
Tabungan	14.	17.395.666.855	16.576.890.257
Deposito	14.	20.108.011.028	22.190.200.000
Antar Bank Passiva	15.	-	2.000.000.000
Rupa-Rupa Pasiva	16.	179.893.320	124.933.801
Jumlah Kewajiban		**39.266.215.607**	**42.433.808.764**
EKUITAS			
Modal Saham	17.	7.500.000.000	5.000.000.000
Cadangan Umum	18.	124.593.860	124.593.860
Cadangan Tujuan	18.	124.593.860	124.593.860
Laba Yang Ditahan	18.	1.384.343.706	-
Laba/Rugi Tahun Lalu	18.	(1.348.215.539)	(1.405.938.304)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	18.	(192.251.282)	58.685.645
Jumlah Ekuitas		**7.593.064.604**	**3.901.935.060**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**46.859.280.211**	**46.335.743.824**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Tanjung Balai Karimun, 22 April 2026

WAN ABDUL RAHMAN, S.E
Direktur Utama

SISKA NARITASARI, S.E
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	*Catatan*	31 Des 2025	31 Des 2024
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	*19.*	5.890.957.151	6.724.963.023
Pendapatan Provisi dan Administrasi	*20.*	554.738.792	434.127.408
Pendapatan Operasional Lainnya	*21.*	1.487.378.518	2.572.847.193
Jumlah Pendapatan Operasional		**7.933.074.461**	**9.731.937.624**
Beban Operasional			
Beban Bunga	*22.*	1.910.157.364	2.108.260.239
Beban Tenaga Kerja	*23.*	3.480.302.159	3.698.123.382
Beban Administrasi dan Umum	*25.*	867.246.200	947.251.473
Beban Penyisihan/Penghapusan	*24.*	1.543.588.999	2.572.914.370
Beban Imbalan Pasca Kerja	*26.*	-	90.156.031
Beban Operasional Lainnya	*27.*	311.730.818	246.336.996
Jumlah Beban Operasional		**8.113.025.540**	**9.661.042.491**
Laba (Rugi) Usaha		**(179.951.079)**	**70.895.132**
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan non-operasional	*28.*	71.111.407	43.804.600
Beban non-operasional	*28.*	83.411.610	44.334.200
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		**(12.300.203)**	**(529.600)**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		**(192.251.282)**	**70.365.532**
Taksiran Pajak Penghasilan	*29.*	-	**11.679.887**
Laba (Rugi) Neto		**(192.251.282)**	**58.685.645**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Tanjung Balai Karimun, 22 April 2026

WAN ABDUL RAHMAN, S.E
Direktur Utama

SISKA NARITASARI, S.E
Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	5.000.000.000	-	-	-	-	-	124.593.860	124.593.860	(1.405.838.304)	3.843.249.415
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	58.685.645	58.685.645
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.000.000.000	-	-	-	-	-	124.593.860	124.593.860	(1.347.252.659)	3.901.935.060
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSM Ekuitas	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000.000
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(192.251.282)	(192.251.282)
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.380.826	1.383.380.826
Saldo per 31 Desember 2025	7.500.000.000	-	-	-	-	-	124.593.860	124.593.860	156.123.115	7.593.064.605

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	5.989.180.484	6.657.013.412
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	554.738.792	434.127.408
Pembayaran beban bunga	(1.910.157.364)	(2.108.260.239)
Pendapatan operasional lainnya	1.487.378.518	2.572.847.193
Beban operasional lainnya	(311.730.818)	(246.336.996)
Beban gaji dan tunjangan	(3.480.302.159)	(3.696.123.382)
Beban umum dan administrasi	(3.334.666.960)	(3.266.048.402)
Beban nonoperasional	(83.411.610)	(44.334.200)
Pendapatan nonoperasional	71.111.407	43.804.600
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	(11.679.887)
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Penempatan pada bank lain	2.339.641.773	(190.571.190)
Kredit yang diberikan	(1.666.127.238)	131.933.882
Aset yang diambil alih	61.511.131	(147.660.367)
Aset lain-lain	(63.108.677)	(311.024.909)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	40.859.699	440.037.139
Tabungan	818.776.598	(1.354.676.602)
Deposito	(2.082.188.972)	3.192.000.000
Simpanan dari bank lain	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Pinjaman yang diterima	-	-
Liabilitas imbalan kerja	43.578.119	64.251.540
Liabilitas lain-lain	11.381.400	-
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(3.533.535.877)	159.299.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(55.577.450)	(54.443.000)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	(55.577.450)	(54.443.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan/pembayaran DSM Ekuitas	2.500.000.000	-
Penerimaan/pembayaran lainnya	1.383.380.826	-
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.883.380.826	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**294.267.500**	**104.856.000**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**304.681.901**	**199.825.900**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**598.949.400**	**304.681.900**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
2. Fasilitas kredit kepada nasabah dan belum ditarik	630.000.000	171.000.000
3. Lain-lain	-	-
Jumlah Komitmen	**630.000.000**	**171.000.000**
KONTIJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.896.859.176	2.202.376.749
2. Aset produktif yang dihapusbukukan	325.376.145	325.376.145
3. Lain-lain	-	-
Jumlah Kontijensi	**3.222.235.321**	**2.527.752.894**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PD. BPR Karimun berlokasi di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 22 Tahun 2002, tanggal 31 Mei 2002 tentang Pendirian Perusahaan Derah Bank Perkreditan Rakyat Karimun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun tahun 2002 No. 26.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 05 Tahun 2003 tanggal 2 Juli 2003, mengenai peningkatan modal disetor. Perubahan tersebut telah Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun tahun 2003 No. 08, tanggal 25 Juli 2003.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 06 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor. Perubahan tersebut telah Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun tahun 2009 No. 06, tanggal 29 Januari 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 5 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012, mengenai perubahan Keempat atas Peraturan Daerah No 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun. Perubahan tersebut telah Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun tahun 2012 No. 05, tanggal 10 Oktober 2012.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun. Perubahan dari PD BPR Karimun menjadi Perumda BPR Tuah Karimun.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 3 Oktobe r 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun.

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-7/KO.1501/2023 Tentang Persetujuan pengalihan izin Usaha dan perubahan nama dari perusahaan daerah bank perkreditan rakyat karimun kepada perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat tuah karimun ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023.

Tempat dan Kedudukan Kantor Pusat Operasional : Jalan Pramuka No.45A, Tg. Balai Karimun Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perumda BPR Tuah Karimun adalah sebagai berikut:

1) Maksud dan tujuan dari Perumda BPR Tuah Karimun ini ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, bukan Asuransi dan Dana Pensiun
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun:
   Bank Perkreditan Rakyat (64131). Menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Perijinan Usaha

1) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 22 Tahun 2002, tanggal 31 Mei 2002 tentang Pendirian Perusahaan Derah Bank Perkreditan Rakyat Karimun.
2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510 / PERINDAG/SIUP/046/XX/2004/PPA tertanggal 6 November 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten.
3) Nomor Induk Berusaha dengan No. 2910210033244 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 29 Oktober 2021.
4) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 5/32/KEP.DGS/2003, tentang Pemberian Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Karimun, tanggal 21 Agustus 2003.
5) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No. 2363/DPM&PTSP/SITU-0939/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 29 November 2017.
6) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 02.157.277.1-233.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Penyuluhan Pajak Tanjung Pinang tertanggal 27 Agustus 2009.

d. Susunan Pengurus

Susunan manajemen Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas :

Ketua	: Djunaidy, S.Sos., M.Si
Anggota	: Syahrul, S.E., MM

Direksi :

Direktur Utama	: Wan Abdul Rahman, S.E.
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	: Siska Naritasari, S.E.

e. **Permodalan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun yang mengalami empat kali perubahan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2003, Nomor 24 Tahun 2007, Nomor 06 Tahun 2009 serta perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012, serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Akta notaris Jual Beli Saham Nomor 110 tanggal 25 Oktober 2021 terjadi pengalihan saham dari PT. Bank Riau Kepri kepada Pemerintah Daerah, modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun berjumlah Rp 12.500.000.000,- (Dua Belas miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan rincian kepemilikan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nominal (Rp)
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	7.500	7.500.000.000
Total		**7.500**	**7.500.000.000**

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perumda BPR Tuah Karimun menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2024 *Audited* disajikan berdasarkan:

1 SAK EP (Entitas Privat);

Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. Sedangkan PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat ini. PA BPR bukan merupakan pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR tersebut sesuai dengan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan BPR.

2 Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

3 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan

4 Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

3. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

b. **Bahasa laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

c. **Tanggung jawab atas laporan keuangan**

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Mata uang pelaporan

1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

e. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

f. Laporan Posisi Keuangan

a) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

1) Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes), dan mata uang emas.

2) Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing *(banknotes)* dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing.
BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi *(spot rate)* yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

3) Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.
Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

4) Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

4) Penempatan Pada Bank lain (Lanjutan)

- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang *(offsetting account)* dari penempatan tersebut.

5) Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya,

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

5) Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

6) Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

7) Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

7) Agunan Yang Diambil Alih (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

8) Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika asset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

9) Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

10) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode.

Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

11) Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

- Aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Sesuai kondisi BPR saat ini, bahwa kebijakan metode perhitungan CKPN BPR menggunakan Peer Group Data pada Perhitungan CKPN BPR Saudara sesuai dengan SK OJK S-85/KO.1501/2025 tanggal 24 Januari 2025.

b) Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

1) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

1) Simpanan (Lanjutan)

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan
posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2) Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang
disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

3) Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

3) Liabilitas Segera (Lanjutan)

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

4) Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

5) Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

5) Pinjaman (Lanjutan)

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit *(channeling)*.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (overdraft) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

6) Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

7) Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPRatas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur danmanajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalankerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto *(undiscounted amount).* (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlahterdiskonto *(discounted amount).*

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukurliabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada),pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi danpenghasilan komprehensif lain karena pesangon tidakmemberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan.Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPRmenunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggalpensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapatkemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencanatersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yangdilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerjasecara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik daripengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secarasukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlahpekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam posLiabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam posliabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

8) Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yangtidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dantidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

c) **Ekuitas**

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya *(substance over form).* (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

1) Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

2) DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuktujuan penambahan modal namun belum didukung dengankelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modaldisetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggotamaupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harusditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalandalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lainUndang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkaitkoperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajibanpenyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

3) Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
2. Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
   a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
   b) laba tahun berjalan.

3) Saldo Laba (Lanjutan)

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a) Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksidan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);

- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas

Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.

- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lainserta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsungdengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR,misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

1) Pendapatan Operasional (Lanjutan)

Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.

- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatanbunga akrual atas aset produktif yang mengalamipenurunan kualitas atau penurunan nilai,sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporanbulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point dan
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

2) Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saatterjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kasdibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dandilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR,seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilaikredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

2) Beban Operasional (Lanjutan)

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN asetproduktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masadatang yang berasal dari kredit yang diberikan;

Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

- Beban pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan denganpromosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasiterhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR,biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untukpromosi;

- Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yangberkaitan dengan penelitian dan pengembangan yangdilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yangdilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud;

- Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenagakerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, bebanpenyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris,beban amortisasi aset takberwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, bebanbarang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

- Beban lainnya

Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunannilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

b) **Pendapatan dan Beban Non Operasional**

1) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal daritransaksi antarkantor. Pelaporan pendapatan bungaantarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidaksaling hapus dengan beban bunga antarkantor *(gross)*, sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara salinghapus (offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seprti di atas.Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan BPR.

2) Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban non operasional diakui pada saat terjadinya sebesar

Beban Non Operasional terdiri dari:

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasaldari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bungaantarkantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuanumum secara gabungan disajikan secara saling hapus(offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

c. **Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan**

1) Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan)terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalanatau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPRsebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harusdilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsipakrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatandiperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yangberlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajakyang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatanatau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

2) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapatdipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dariBPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas padajumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajakkini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belumdimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporerdapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalahperbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporanposisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajaktangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belumdikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjangkemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersediauntuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dankredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan termporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

d) **Laporan Penghasilan Komprehensif Lain**

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugiyang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasiaset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan kelaba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasiaset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untukaset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris).Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

h. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasiperubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan.Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi danaktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

a. Kas terdiri atas:
1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
2) rekening giro pada bank lain;
3) tabungan pada bank atau BPR lain.
b. Setara kas, antara lain:
1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

i. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

j. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkandari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuanganmemuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan daninformasi penting lainnya.

k. Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).

- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

l. Suku Bunga Efeketif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

m. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46). Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan.

- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.

- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).

- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

n. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi *(amortised cost)* dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).

n. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)

- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

o. Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.

- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.

- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.

p. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Bank telah menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai kerangka pelaporan keuangan, menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Transisi ini merupakan perubahan kerangka pelaporan keuangan yang signifikan. SAK EP (Entitas Privat) menggantikan SAK ETAP dengan beberapa penyesuaian pada instrumen keuangan.

Perumda BPR Tuah Karimun menggunakan prinsip penyesuaian tersebut dengan metode prospektif yaitu dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal berlakunya SAK EP, sesuai dengan SK OJK S-85/KO.1501/2025.

	Dinyatakan dalam Rupiah	
	2025	2024
3. Kas		
Akun ini terdiri dari		
Kas	598.949.400	304.681.900
Jumlah Kas	**598.949.400**	**304.681.900**
4. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Kredit	328.535.600	406.156.194
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - ABA	1.413.699	2.016.438
Jumlah Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	**329.949.299**	**408.172.632**
5. Penempatan Pada Bank Lain		
Akun ini terdiri dari:		
Giro		
PT Bank Central Asia, Tbk	318.888.292	270.832.750
PT Bank Negara Indonesia Cab Moro	177.621.476	2.329.471.175
PT Bank Negara Indonesia	336.097.939	322.844.305
PT Bank Rakyat Indonesia	32.670.447	2.377.000
PT Bank Riau Kepri	1.500.000	-
Jumlah Giro	**866.778.154**	**2.925.525.230**
Tabungan		
PT Bank Riau Kepri	1.594.561.662	2.496.044.702
PT Bank Mandiri	272.667.455	250.757.114
PT BPR Karyajatnika Sadaya	177.090.298	178.412.297
Jumlah Tabungan	**2.044.319.415**	**2.925.214.112**
Deposito		
PD BPR Rokan Hulu	-	400.000.000
PD BPR Bestari	1.000.000.000	-
Jumlah Deposito	**1.000.000.000**	**400.000.000**
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**3.911.097.569**	**6.250.739.342**
PPKA - Penempatan Pada Bank Lain	**-**	**(5.741.801)**
CKPN - Penempatan Pada Bank Lain	**-**	**-**
6. Kredit yang Diberikan		
Akun ini terdiri dari:		
Kredit Modal Kerja	16.019.592.412	16.184.156.109
Kredit Aneka Manfaat	27.374.526.203	25.166.944.438
Kredit Kepemilikan Kendaraan	454.806.020	670.541.103
Kredit Usaha Rakyat Daerah	18.028.800	32.450.435
Provisi Kredit	(513.282.239)	(609.565.831)
Biaya Transaksi	15.683.358	43.094.065

6. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Pendapatan Kredit Restrukturisasi	(416.951.465)	(202.278.948)
Kerugian Restruktur	(934.480)	-
Jumlah	**42.951.468.609**	**41.285.341.371**
PPKA Kredit yang Diberikan	-	(3.240.060.173)
CKPN Kredit yang Diberikan	(2.253.498.490)	-
Jumlah	**40.697.970.119**	**38.045.281.198**

7. Agunan yang Diambil Alih

Akun ini terdiri dari:

Agunan yang Diambil Alih	423.277.577	484.788.708
Jumlah	**423.277.577**	**484.788.708**

8. Aset Tetap dan Inventaris

Akun ini terdiri dari:

Tahun Buku 2025	31-Dec-24 Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2025 Rp.
Harga Perolehan:				
Kendaraan	363.199.000	-	-	363.199.000
Meubelair	522.931.763	3.800.000	-	526.731.763
Mesin	254.800.000	-	-	254.800.000
Instalasi	64.628.500	-	-	64.628.500
Inventaris Lainnya	612.800.260	51.777.450	-	664.577.710
Jumlah Harga Perolehan	1.818.359.523	55.577.450	-	1.873.936.973
Akumulasi Penyusutan				
Akm. Peny. Kendaraan	(329.178.435)	(10.861.008)	-	(340.039.443)
Akm. Peny. Meubelair	(479.198.584)	(16.303.890)	-	(495.502.474)
Akm. Peny. Mesin	(246.987.540)	(6.250.020)	-	(253.237.560)
Akm. Peny. Instalasi	(50.834.264)	(2.966.628)	-	(53.800.892)
Akm. Peny. Inventaris Lainnya	(545.963.128)	(32.090.179)	-	(578.053.307)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.652.161.951)	(68.471.725)	-	(1.720.633.676)
Nila Buku Aset Tetap	**166.197.572**			**153.303.297**

Tahun Buku 2024	31-Dec-23 Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2024 Rp.
Harga Perolehan:				
Kendaraan	363.199.000			363.199.000
Meubelair	505.778.763	17.153.000		522.931.763
Mesin	254.800.000			254.800.000
Instalasi	64.628.500			64.628.500
Inventaris Lainnya	575.510.260	37.290.000		612.800.260
Jumlah Harga Perolehan	1.763.916.523	54.443.000	-	1.818.359.523

Akumulasi Penyusutan				
Akm. Peny. Kendaraan	(293.887.571)	(35.290.864)		(329.178.435)
Akm. Peny. Meubelair	(461.651.423)	(17.547.161)		(479.198.584)
Akm. Peny. Mesin	(240.259.358)	(6.728.182)		(246.987.540)
Akm. Peny. Instalasi	(47.867.630)	(2.966.634)		(50.834.264)
Akm. Peny. Inventaris Lainnya	(516.793.565)	(29.169.563)		(545.963.128)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.560.459.547)	(91.702.404)	-	(1.652.161.951)
Nila Buku Aset Tetap	**203.456.976**			**166.197.572**

9. Aset Tidak Berwujud

Akun ini terdiri dari:		
Program Software IT	-	-
Akumulasi Amortisasi IT	-	-
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	-	-

10. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:		
Biaya dibayar dimuka	379.646.736	461.162.284
Biaya Yang Ditangguhkan	159.037.851	9.037.851
Persediaan Operasional	35.250.750	25.719.130
Deposit Fastpay	165.797.614	180.705.009
Hadiah Promo Deposito	5.000.000	5.000.000
Saldo Aset Lain-lain	**744.732.951**	**681.624.274**

11. Liabilitas Segera

Akun ini terdiri dari:		
Pajak Bunga	25.446.217	25.758.957
Pajak Penghasilan pasal 21	2.011.844	1.262.800
Pajak Penghasilan pasal 23	4.408.510	4.408.510
Pajak Bumi dan Bangunan	622.907	622.907
Liabilitas Segera Lainnya	1.496.499.435	1.420.962.000
Jumlah Liabilitas Segera	**1.528.988.913**	**1.453.015.174**

12. Utang Bunga

Akun ini terdiri dari:		
Bunga Dep. Masyarakat	53.562.492	69.343.743
Bunga Deposito Bank Lain	93.000	7.745.902
Jumlah Utang Pajak	**53.655.492,00**	**77.089.645**

13. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:		
Utang Pajak	-	11.679.887
Jumlah Utang Pajak	-	**11.679.887**

14. Simpanan

Akun ini terdiri dari:

Tabungan Umum	17.395.666.855	16.576.890.257
Jumlah Tabungan	**17.395.666.855**	**16.576.890.257**
Deposito Berjangka	20.108.011.028	22.190.200.000
Jumlah Deposito	**20.108.011.028**	**22.190.200.000**
Jumlah Simpanan	**37.503.677.883**	**38.767.090.257**

15. Antar Bank Passiva

Akun ini terdiri dari:

Deposito		
Perumda BPR Bintan	-	2.000.000.000
Jumlah Deposito	**-**	**2.000.000.000**
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	**-**	**2.000.000.000**

16. Rupa-rupa Passiva

Akun ini terdiri dari:

Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang	168.511.920	124.933.801
Biaya Astek dan Jamsostek	11.381.400	-
Jumlah Rupa-rupa passiva	**179.893.320**	**124.933.801**

17. Modal

Akun ini terdiri dari:

Modal Dasar	12.500.000.000	12.500.000.000
Modal Belum Disetor	(5.000.000.000)	(7.500.000.000)
Jumlah Modal Disetor	**7.500.000.000**	**5.000.000.000**

18. Saldo Laba

Akun ini terdiri dari:

Cadangan Umum	124.593.860	124.593.860
Cadangan Tujuan	124.593.860	124.593.860
Laba Yang Ditahan	1.384.343.706	-
Laba/Rugi Tahun Lalu	(1.348.215.539)	(1.405.938.304)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(192.251.282)	58.685.645
Jumlah	**93.064.604**	**(1.098.064.940)**

19. Pendapatan Bunga

Akun ini terdiri dari:

Jasa Giro	27.648.451	40.588.238
Bunga Tabungan	37.780.451	5.247.941
Bunga Deposito	80.927.620	65.331.580
Bunga Kredit yang Diberikan	5.645.753.458	6.613.795.264

19. Pendapatan Bunga (Lanjutan)

Pendapatan Restruktur	98.847.171	-
Jumlah Pendapatan Bunga	**5.890.957.151**	**6.724.963.023**

20. Pendapatan Provisi Dan Administrasi

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan Provisi Kredit	522.088.792	402.377.479
Pendapatan Adm Kredit	32.650.000	31.749.929
Saldo Pendapatan Provisi dan Administrasi	**554.738.792**	**434.127.408**

21. Pendapatan Operasional Lainnya

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan Denda	10.322.614	9.155.226
Adm Tutup Tabungan	210.000	220.000
Restitusi ADM Tabungan	303.871.809	66.198.915
Pend. Denda Pinalti Deposito	18.110.000	5.930.820
Pend. Denda Pinalti Pelunasan Kredit	115.962.550	189.778.742
Pendapatan Lainnya	21.296.667	12.669.094
Pendapatan Adm Deposito	-	1.418.171
Pendapatan Pemulihan PPKA Kredit	107.985.787	2.229.097.030
Pendapatan Pemulihan PPKA ABA	93.966.612	58.379.195
Pendapatan Pemulihan CKPN Kredit	815.652.480	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**1.487.378.518**	**2.572.847.193**

22. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

Beban Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank :		
Beban Bunga Tabungan	450.333.770	431.945.071
Beban Bunga Deposito	1.253.795.031	1.195.085.233
Beban Insentif Deposito	-	416.666
Beban Jaminan Pemerintah (LPS)	81.527.090	80.147.276
Beban Bunga Pihak Ketiga Bank	87.017.292	285.843.112
Biaya Bunga Deposito-Cashback	8.591.494	2.566.663
Beban Lainnya	547.500	175.468
Koreksi Atas Pendapatan Bunga	27.410.707	95.128.177
Beban Kerugian Restruktur	934.480	16.952.573
Jumlah Beban Bunga	**1.910.157.364**	**2.108.260.239**

23. Beban Tenaga Kerja

Akun ini terdiri dari:

Gaji dan Honorarium	903.053.213	983.696.849
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	208.671.335	197.517.929
Tunjangan Karyawan	1.055.306.025	1.167.886.398
Cuti Pegawai	96.046.167	101.273.521

23. Beban Tenaga Kerja (Lanjutan)

Upah Tenaga Honorer	695.690.673	608.796.513
Tenaga Kerja Lainnya	521.534.746	636.952.172
Jumlah Beban Tenaga Kerja	**3.480.302.159**	**3.696.123.382**

24. Beban Penyisihan/Penghapusan

Akun ini terdiri dari:

Kredit Yang Diberikan	198.456.047	2.508.793.374
Penempatan Pada Bank Lain	88.224.811	64.120.996
CKPN Kredit Yang Diberikan	1.138.562.447	-
Aktiva Tetap dan Inventaris	68.471.694	-
Beban Yang Ditangguhkan	49.874.000	-
Jumlah Beban Penyisihan/Penghapusan	**1.543.588.999**	**2.572.914.370**

25. Beban Administrasi dan Umum

Akun ini terdiri dari:

Beban Pemasaran	102.604.468	50.946.949
Beban Pemeliharaan dan perbaikan	39.673.600	51.679.100
Beban Pendidikan dan pelatihan	104.251.403	238.146.954
Beban Penyusutan	-	91.702.404
Beban Sewa	550.000	5.500.000
Beban Perjalanan dinas	26.700.647	45.326.416
Beban Premi asuransi	139.251.312	-
Beban Pajak-pajak	2.557.981	1.841.618
Beban Keperluan kantor	405.700.189	424.365.032
Beban Lain-lain	45.956.600	37.743.000
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**867.246.200**	**947.251.473**

26. Beban Imbalan Pasca Kerja

Akun ini terdiri dari:

Beban Imbalan Pasca Kerja	-	90.156.031
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	**-**	**90.156.031**

27. Beban Operasional Lainnya

Akun ini terdiri dari:

Beban Operasional Lainnya	311.730.818	186.019.996
Beban Lain Yang Ditangguhkan	-	60.317.000
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	**311.730.818,00**	**246.336.996**

28. Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan Non-Operasional:		
Pend. Komisi Asuransi	18.984.407	424.600
Pend. Komisi Notaris	47.677.000	35.180.000
Pend. Non Operasional Lainnya	4.450.000	8.200.000
Jumlah	**71.111.407**	**43.804.600**

Beban Non-Operasional:			
Beban Denda Penyampaian Laporan Keuangan		1.537.610	2.203.200
Beban Sumbangan		1.000.000	16.050.000
Beban Non Operasional Lainnya		874.000	26.081.000
Beban Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar		80.000.000	-
Jumlah		**83.411.610**	**44.334.200**
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Operasional		**(12.300.203)**	**(529.600)**
29. Taksiran Pajak Penghasilan			
Peredaran Bruto	a.	8.004.185.868	**9.775.742.224**
Laba Sebelum Pajak		**(192.251.282)**	**70.365.532**
Laba Fiskal	b.	(192.251.282)	**70.365.532**
Fasilitas			
=(4,8M : a) x b		-	34.550.272
Tanpa Fasilitas			
=b - ((4,8M : a) x b)		-	35.815.260
Taksiran Pajak Penghasilan			
=50% x 22% x PKP memperoleh fasilitas		-	3.800.530
=22% x PKP yang tidak memperoleh fasilitas		-	7.879.357
Total Taksiran Pajak		**-**	**11.679.887**
Pembayaran Angsuran Pajak		0	-
Utang Pajak		**-**	**11.679.887**

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset Perumda BPR Tuah Karimun per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2025	46.859.280.211
Total asset tahun 2024	46.335.743.824
Kenaikan	**523.536.387**
Persentase Peningkatan (Penurunan)	**1,13%**

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Perumda BPR Tuah Karimun per 31 Desember 2025, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	**Tabungan**
Dana yang dihimpun tahun 2025	20.108.011.028	17.395.666.855
Dana yang dihimpun tahun 2024	22.190.200.000	16.576.890.257
Peningkatan (Penurunan)	**(2.082.188.972)**	**818.776.598**
Persentase Peningkatan (penurunan)	**-9,38%**	**4,94%**

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan Perumda BPR Tuah Karimun per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan tahun 2025	43.866.953.435
Pinjaman yang diberikan tahun 2024	42.054.092.085
Peningkatan	**1.812.861.350**
Persentase Peningkatan	**4,31%**

2. Permodalan

a. Aset Tertimbang Menurut Risiko (Rincian Terlampir)

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Bank Indonesia termasuk dalam bidang permodalan sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bilamana bank tidak memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang memengaruhi operasi bank

b. Ratio Kecukupan Modal (Rincian Terlampir)

Bank diwajibkan memenuhi persyaratan ratio kewajiban penyediaan modal (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, kewajiban dan akun of balance sheet tertentu juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan risiko tertimbang.

3. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid	
Kas	598.949.400
Penempatan pada bank lain (giro + tabungan)	2.911.097.569
Jumlah	**3.510.046.969**
Hutang Lancar	
Kewajiban segera dibayar	1.708.882.232
Tabungan	17.395.666.855
Deposito berjangka	20.109.000.000
Jumlah	**39.213.549.087**
Cash Ratio	**8,95%**

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (*Loan to Debt Ratio*)

Loan	
Jumlah kredit yang diberikan	**43.866.953.435**
Debt	
Simpanan pihak ketiga (non bank)	
Tabungan	17.395.666.855
Deposito berjangka	20.109.000.000
Jumlah	**37.504.666.855**
Loan to debt Ratio	**116,96%**

4. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional	8.113.025.540
Pendapatan operasional	7.933.074.461
BOPO	**102,27%**

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti	6.097.541.739
Modal pelengkap	143.880.381
Jumlah Modal	**6.241.422.120**
Pihak terkait (10%)	624.142.212
Pihak tidak terkait (20%)	1.248.284.424
Penyertaan BPR dan BPRS Lain (30%)	1.872.426.636

c. **Return On Aset (ROA)**

Rata-Rata Aset Bulanan	
Januari	48.654.992.040
Februari	48.826.763.801
Maret	46.082.696.713
April	45.613.176.658
Mei	46.514.614.500
Juni	48.061.891.902
Juli	47.025.292.605
Agustus	46.352.559.527
September	47.297.212.642
Oktober	46.093.427.062
Nopember	45.314.681.649
Desember	46.859.280.212
Jumlah	562.696.589.311
Rata-Rata Aset	**46.891.382.443**
Laba Sebelum Pajak	**(192.251.282)**
Return On Aset (ROA)	**-0,41%**

5. **Aset Produktif (Rincian terlampir)**

Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kualitas aset produktif bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025

	Keterangan	31 Desember 2025				
		Nominal Rp	CKPN	Nominal Stlh Dikurangi CKPN	Bobot Risiko %	ATMR Rp
1	Kas	598.949.400		598.949.400	0%	-
2	Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia			-	0%	-
3	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah			-	0%	-
4	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah			-	0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan tunai sesuai POJK KA BPR, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki			-	0%	-
6	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	423.277.577		423.277.577	0%	-
7	Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan					-
8	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan					-
9	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan tagihan lain kepadabank lain	3.911.097.568		3.911.097.568	20%	782.219.514
10	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah					-
11	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit			-	20%	-
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebanidengan hak tanggungan atau fidusia	16.510.431.215	274.870.050	16.235.561.165	30%	4.870.668.349
13	Kredit kepada BUMN/BUMD					-
14	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kreditnamun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluhpersen)					-
15	Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta denganpersyaratan tertentu					-
16	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	3.351.993.047	90.403.648	3.261.589.399	50%	1.630.794.700
17	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidakdibebani dengan hak			-	50%	-
18	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria			-	70%	-
19	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat,dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan buktikepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan	7.507.002.776	90.750.249	7.416.252.527	70%	5.191.376.769
20	Penyertaan Modal			-		-
21	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	9.609.978.410	114.152.077	9.495.826.333	100%	9.495.826.333
22	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	6.844.878.713	1.449.964.860	5.394.913.853	100%	5.394.913.853
23	Aset tetap, iventaris, dan aset tidak berwujud	153.303.297		153.303.297	100%	153.303.297
24	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan			-	100%	-
25	Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan			-	100%	-
26	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 25	1.074.682.250		1.074.682.250	100%	1.074.682.250
	JUMLAH ATMR	49.985.594.254	2.020.140.884	47.965.453.370		28.593.785.065

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan	31 Desember 2025		
	Jumlah Setiap komponen Rp	% Yang Diperhitungkan Rp	Jumlah Rp
I Modal Inti			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1 Modal disetor	7.500.000.000	100%	7.500.000.000
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)		100%	-
1.1.2.2 Dana Setoran Modal - Ekuitas		100%	-
1.1.2.3 Modal sumbangan			
1.1.2.4 Tambahan Modal Disetor Lainnya			
1.1.2.5 Cadangan umum	124.593.860	100%	124.593.860
1.1.2.6 Cadangan tujuan	124.593.860	100%	124.593.860
1.1.2.7 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	36.128.167	100%	36.128.167
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan	(192.251.282)	100%	(192.251.282)
1.1.2.9 -/- Pajak tangguhan	-	100%	-
1.1.2.10 -/- *Goodwill*	-	100%	-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah dan / atau bangunan			
1.1.2.11.1 -/- Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar	(423.277.577)	15%	(63.491.637)
1.1.2.11.2 -/- Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar	-	50%	-
1.1.2.11.3 -/- Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai	-	100%	-
1.1.2.12 AYDA berupa tanah dan / atau bangunan			
1.1.2.13 Properti Terbengkalai			
1.1.2.14 -/- Selisih kurang antara CKPN dan PPKA	(1.432.031.229)	100%	(1.432.031.229)
Sub Total Cadangan Tambahan Modal	**5.737.755.799**		
Jumlah Modal Inti Utama			**6.097.541.739**
I.2 Modal Inti Tambahan		100%	-
I.3 Jumlah Modal Inti (I.1 + I.2)			**6.097.541.739**
II Modal Pelengkap			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		50%	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap		100%	
II.3 PPKA umum atas aset produktif	143.880.381		143.880.381
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (II.1 + II.2 + II.3)	**143.880.381**		
III JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)			**6.241.422.120**
RASIO MODAL = Jumlah Modal / ATMR			**21,63%**
Rasio Modal Inti = Jumlah Modal Inti / ATMR			**21,32%**

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
KUALITAS ASET PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan	Lancar Rp	Dalam Perhatian Khusus - Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
1. Aset Produktif						
a. Kredit yang diberikan	28.776.075.197	2.745.616.908	2.470.494.509	3.095.902.780	6.778.864.041	43.866.953.435
b. Surat-surat berharga	-	-	-	-	-	-
c. Penempatan pada bank lain	3.911.097.568	-	-	-	-	3.911.097.568
Jumlah Aset Produktif	32.687.172.766	2.745.616.908	2.470.494.509	3.095.902.780	6.778.864.041	47.778.051.003
		0%	50%	75%	100%	
2. Jumlah aset produktif yang diklasifikasikan		-	1.235.247.254	2.321.927.085	6.778.864.041	10.336.038.380
3. Nilai agunan kredit		283.713.908	647.269.549	2.449.478.280	5.334.966.001	8.715.427.738
4. Kredit Back to Back						-
5. Dasar Perhitungan PPKA WD	32.687.172.766	2.461.903.000	1.823.224.960	646.424.500	1.443.898.040	39.062.623.266
6. Prosentase PPKA WD	0,50%	3,00%	10%	50%	100%	
7. Jumlah PPKA WD	230.208.614	73.857.090	182.322.496	323.212.250	1.443.898.040	2.253.498.490
8. Jumlah PPKA yang telah dibentuk						2.253.498.490
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPKA						-
10. Jumlah aset produktif yang diperhitungkan untuk rasio KAP						47.778.051.003
11. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (2:10) x 100%						21,63%
11. Rasio PPKA terhadap PPKA WD (8:7) x 100%						100,00%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	65,60%	6,26%	5,63%	7,06%	15,45%	100,00%
13. Rasio NPL						28,14%
			2.288.172.013	2.772.690.530	5.334.966.001	10.395.828.544
14. Rasio NPLs (Netto)						23,70%

LAPORAN BUMD

PERUMDA
BUMI BERAZAM JAYA

PERUM[illegible] BUMI [illegible]
STATE OWN[illegible] ENTER[illegible] OF KARIMUN REGENCY

















LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024

2025

Pasar Puan Maimun Blok B Lt. 3 – Jl. Ahmad Yani Kel. Sungai Lakam Timur
Tanjung Balai Karimun - Kepulauan Riau – INDONESIA

KATA PENGANTAR

Bismi-llāhi ar-rahmāni ar-rahīmi

Segala Puja Puji dan panjat syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Laporan Keuangan PERUMDA Bumi Berazam Jaya untuk periode yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 telah selesai disusun, laporan keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laba / (Rugi), Arus Kas, Ikhtisar Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan dan Laba/(Rugi) dan dilampiri dengan Daftar Aset

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance)

Tanjung Balai Karimun, Februari 2026
PERUMDA Bumi Berazam Jaya

PERUMDA BUMI BERAZAM JAYA

H.M.MAHSUN.SH
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2025 - 2024	1
Laporan Laba / (Rugi) Konsolidasi Tahun 2025 - 2024	2
Laporan Arus Kas Tahun 2025 - 2024	3
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 - 2024	4
Umum	5
Modal Perusahaan	5
Laba Perusahaan	6
Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan	6
Bidang Usaha	6
Kebijakan Akuntansi	7
Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan Tahun 2025	10
Penjelasan Pos Pos Laporan Laba / (Rugi) Tahun 2025	15
Daftar Aset Tahun 2025	19

Keterangan	Catatan	Per 31 Desember 2025		Per 31 Desember 2024	
		(Rupiah)			
		UNAUDITED		AUDITED	
AKTIVA					
Aktiva Lancar					
Kas dan Setara Kas	8	Rp	285.282.646	Rp	135.507.745
Piutang Usaha	9	Rp	3.765.504.000	Rp	3.689.051.672
Piutang Karyawan	10	Rp	225.796.667	Rp	229.046.667
Piutang Lain Lain	11	Rp	522.100.000	Rp	522.100.000
Biaya dibayar dimuka	12	Rp	-	Rp	-
Jumlah Aktiva Lancar		Rp	4.798.683.313	Rp	4.575.706.084
Aktiva Tetap					
Aset Tetap	13	Rp	3.123.456.060	Rp	3.123.456.060
(Less : Akumulasi Penyusutan)		Rp	(2.404.663.701)	Rp	(2.353.565.061)
Jumlah Aktiva Tetap		Rp	718.792.360	Rp	769.891.000
Aktiva Tidak Lancar					
Investasi	14	Rp	4.807.047.747	Rp	4.807.047.747
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		Rp	4.807.047.747	Rp	4.807.047.747
Total Aktiva		Rp	10.324.523.420	Rp	10.152.644.829
KEWAJIBAN dan EKUITAS					
Hutang Lancar					
Hutang Lainnya	15	Rp	946.255.973	Rp	1.074.487.519
Kewajiban Imbal Kerja	16	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000
Jumlah Kewajiban Lancar		Rp	1.046.255.973	Rp	1.174.487.519
Ekuitas					
Modal PEMKAB Karimun- PMP	17	Rp	7.912.956.944	Rp	7.912.956.944
Saldo Laba / (Rugi)	18	Rp	932.882.966	Rp	823.884.759
Koreksi Saldo Laba / (Rugi)		Rp	-	Rp	-
Setoran PAD ke Pemkab		Rp	(70.129.380)	Rp	(132.317.400)
Laba / (Rugi) Periode Berjalan		Rp	502.556.917	Rp	241.315.607
Jumlah Ekuitas		Rp	9.278.267.447	Rp	8.978.157.310
Total Kewajiban&Ekuitas		Rp	10.324.523.420	Rp	10.152.644.829

PERUMDA KARIMUN

PERUMDA BUMI BERAZAM JAYA

H.M.MARSUN,SH

Direktur

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BUMI PRAJAMUKTI JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF SUMEDANG REGENCY

LAPORAN LABA/(RUGI) KONSOLIDASI
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Catatan	Per 31 Desember 2025		Per 31 Desember 2024	
		(Rupiah)			
		UNAUDITED		AUDITED	
PENDAPATAN					
Pendapatan Usaha	19	Rp	4.527.142.000	Rp	4.061.376.500
Biaya Tenaga Kerja		Rp	(2.188.276.790)	Rp	(2.621.923.716)
Biaya Operasional		Rp	(2.086.583.995)	Rp	(1.325.911.415)
LABA / (RUGI) PENJUALAN		Rp	252.281.215	Rp	113.541.369
PENDAPATAN /(BEBAN) LAIN LAIN					
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha					
Pendapatan Bunga Deposito /Devident	20	Rp	252.450.000	Rp	133.169.194
Pendapatan Jasa Giro		Rp	196.729	Rp	205.418
Selisih Pembulatan					
Pendapatan Lainnya					
Beban Diluar Usaha					
Beban Administrasi Bank, Cheque, Materai dan PPh		Rp	(2.371.027)	Rp	(5.600.373)
Selisih Pembulatan					
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		Rp	250.275.702	Rp	127.774.239
LABA (RUGI)		Rp	502.556.917	Rp	241.315.607

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUM BUMI BAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISES OF BARINTIN REGENCY

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

No	KETERANGAN	Per 31 Desember 2025		Per 31 Desember 2024	
		(Rupiah)			
		UNAUDITED		AUDITED	
I	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**				
	Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	Rp	502.556.917	Rp	241.315.607
	Penyesuaian untuk :				
	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp	(52.720.557)	Rp	(68.760.350)
	Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Piutang				
	Laba (Rugi) Bersih Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**Rp**	**449.836.360**	**Rp**	**172.555.257**
	(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	Rp.	(76.542.328)	Rp.	(210.839.413)
	(Kenaikan) Penurunan Piutang Karyawan	Rp.	3.250.000	Rp.	1.370.000
	(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain-Lain	Rp.	-	Rp.	-
	(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	Rp.	-	Rp.	-
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Lancar	Rp.	128.231.681	Rp.	144.958.865
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	54.939.355	Rp.	64.510.548
II	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**				
	(Kenaikan) Pengurangan Aktiva Tetap Yang Tidak Berfungsi	Rp	-	Rp	()
	(Kenaikan) Pengurangan Aktiva Tetap	Rp	(193.000.000)	Rp	(193.000.000)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	-	Rp	()
III	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**				
	Kenaikan (Pengurangan) Penyertaan Pemerintah /PAD	Rp		Rp	-
	Laba/ (Rugi) Ditahan	Rp	108.998.207	Rp	170.103.098
	Laba / (Rugi) Tahun Lalu	Rp	(241.315.607)	Rp	(127.507.963)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(132.317.400)	Rp	(42.595.135)
IV	**Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas**	Rp	149.774.901	Rp	95.160.544
	Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp	135.507.745	Rp	40.347.201
	Kas dan Setara Kas Akhir Periode	Rp	285.282.646	Rp	135.507.745

PERUMDA BUMI KRAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KAUMAN REGENCY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	MODAL DASAR	SALDO LABA	JUMLAH EKUITAS
	(Rupiah)		
Saldo 1 Januari 2024 (Audited)			
Modal PEMKAB	Rp 7.912.956.944	Rp 781.289.624	Rp 8.694.246.569
Setoran PAD ke Pemkab		Rp (132.723.583)	Rp (132.723.583)
Koreksi Laba (Rugi)		Rp 42.595.135	Rp 42.595.135
Laba / (Rugi) Periode berjalan		Rp 241.315.607	Rp 241.315.607
Per 31 Desember 2024 (Audited)	**Rp 7.912.956.944**	**Rp 1.065.200.366**	**Rp 8.978.157.310**
Saldo 1 Januari 2025 (Unaudited			
Modal PEMKAB	Rp 7.912.956.944	Rp 932.882.966	Rp 8.845.839.910
Setoran PAD ke Pemkab		Rp (70.129.380)	Rp (70.129.380)
Koreksi Laba (Rugi)		Rp -	Rp -
Laba / (Rugi) Periode berjalan		Rp 502.556.917	Rp 502.556.917
Per 31 Desember 2025 (Unaudited)	**Rp. 7.912.956.944**	**Rp. 1.365.310.503**	**Rp. 9.278.267.447**

PERUMDA BUMI BERAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024

1. UMUM

Perusahaan Daerah Karimun merupakan **Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Sepenuhnya** yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Karimun No. 02 Tanggal 08 Februari 2001 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 No, 2 Seri C).

Sejak beroperasi, Perusda Karimun telah menjabarkan visi, misi dan strateginya untuk melakukan inventarisasi aset Perusda Bintan dan PDAM Tirta Janggi yang beralih kepengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Perusda Karimun) berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999

Perusahaan Karimun berkedudukan dan berkantor pusat Jalan Soekarno Hatta - Poros Lantai II Gedung SPBU Tanjung Balai Karimun

Sebagai BUMD (Perusda Karimun), mengemban misi ganda yaitu pelayanan dan menciptakan laba/bisnis, yang pada akhirnya diharapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membangun perekonomian Daerah.

Per 23 December 2014, telah diangkat Direktur Utama Perusda Karimun (Definitif) **Bapak Defanan Syam, ST** untuk menggantikan Direktur Utama (Plt) Bapak DR. H. Muhammad Hasbi. M.Si

Per 22 Desember 2023, telah diangkat (Plt) Pelaksanaan Tugas Bapak Tohap siahaan,S.E.,M.M.Pub untuk mengantikan Direktur Utama Perumda Bumi Berazam Jaya, Bapak Defanan Syam, ST, yang telah berakhir masa jabatannya.

Per 04 April 2024, telah diangkat Direktur Perumda Bumi Berazam Jaya (Definitif) **Bapak M. Mahsun. S.H** untuk menggantikan (PLT) Perumda Bumi Berazam Jaya, Bapak Tohap Siahaan, S.E.,M.M.Pub yang telah berakhir masa jabatannya.

2. MODAL PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Sepenuhnya (Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun), **kepemilikan modal saham adalah 100% (seratus) persen milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun,** sampai dengan tahun 2015 modal pemerintah sebesar **Rp. 13.748.363.995.00.**
Pada **Februari 2016** Pengelolaan Pasar Moro **diserahkan** kepada Perusda Karimun sehingga Modal Pemerintah bertambah **Rp. 6.687.000.00** dalam bentuk Kas tidak termasuk asset dan lain lainnya.
Pada **2 Maret 2016** Unit Air Bersih diserahkan penggelolaannya kepada PDAM Tirta Karimun dan modal pemerintah berkurang sebesar **Rp. 5,842,094,051.00.**

KETERANGAN **Kepemilikan Saham /Bentuk Penyerahan Saham**	**Per 31 Desember 2025**	
EKUITAS		
Modal PEMKAB Karimun - PMP	Rp.	333.345.890
Modal Penyertaan Pemkab OKBS	Rp.	3.407.582.747
Modal Penyerahan Aset Pemkab	Rp.	4.061.364.809
Modal Sumbangan	Rp.	96.000.000
Modal Peralihan - UPTBK	Rp.	7.019.151
Modal Peralihan - UPTBT	Rp.	957.347
Modal Peralihan - UPMORO	Rp.	6.687.000
Total Saham	**Rp.**	**7,912,956,944**

3. LABA PERUSAHAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun Bab XVII mengenal penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, didalam pasal 55 disebutkan bahwa

penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan Daerah dan terakhir telah diperbaharui dengan PERDA No. 1..... tertanggal 05 April tahun 2013, dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pendanaan Pembangunan Daerah	:	30 %
b. Untuk Anggaran Belanja Daerah	:	25 %
c. Untuk cadangan umum, social dan pendidikan	:.	45 %

4. DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN

Pada tanggal 04 April 2024 diangkat Direktur yang Baru Bapak M. Mahsun, S.H untuk menggantikan Pejabat lama yang berhalangan.

Pada tanggal 22 – 24 Juni 2019 Masa Jabatan Ketua Badan Pengawas Jhon Abrison, SE dan Sekretaris merangkap anggota M. Ikram berakhir, dan tanggal 2 December 2019. diangkat Pejabat Sementara Dewan Pengawas berikut :

Jabatan	Lembaga / Pejabat / Nama
Pejabat Dewan Pengawas	**Drs. SULARNO, S.sos.,M.si**
Direktur Perumda Bumi Berazam Jaya (Aktif Per 04 April 2024)	**M. MAHSUN, S.H**

5. BIDANG USAHA

Dengan diserahkan penggelolaan Unit Air Bersih Kepada PDAM Tirta Karimun maka Perusda Karimun sebagai Public service hanya mengelola Unit Usaha Pasar sebagai berikut :

a. Unit Usaha Pasar.

Untit usaha ini terbagi didalam tiga wilayah kerja di Kabupaten karimun yaitu :

a.1. Unit Usaha Pasar Tanjung Balai Karimun,
a.2. Unit Usaha Pasar Tanjung Batu Kundur
a.3. Unit Usaha Pasar Moro
a.4. Unit Usaha Pasar Sawang Tanjung Batu

a.1. Unit Usaha Pasar Tanjung Balai Karimun

Unit Usaha Pasar Tanjung Balai Karimun, mengelola Pasar-pasar :

- Pasar Sri Karimun
- Pasar Rombeng
- Pasar Baru Puakang (Maimun)
- Pasar Meral
- Pasar Teluk Uma
- Pasar Malam (Akau
- Ruko

a.2. Unit Usaha Pasar Tanjung Batu Kundur

Unit Usaha Pasar Tanjung Balai Batu Kundur, mengelola Pasar-pasar :

- Pasar Jl Merdeka
- Pasar Balai Pemuda
- Pasar Akau
- Rumah Potong dan Jualan Babi

a.3. Unit Usaha Pasar Moro

Pada Februari 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun mempercayakan Perusada Karimun untuk mengelola Unit Usaha Moro dan melalui Camat Moro diserahkan sisa dana kas sebesar Rp. 6.687.000.00

6. PERUSAHAAN AFILLIASI

Disamping usaha yang bersifat public service/Non profit oriented, Perusda Karimun juga menginvestasikan saham pada 2 (dua) perusahaan afiliasi yang bergerak dibidang pengadaan bahan bakar, yaitu PT. Ology Karimun Bumi Sukses (PT. OKBS) dan PT. Eka Daya Bahari Mas (PT. EDBM).

Pada tahun 2017 PT. Eka Daya Bahari Mas (PT. EDBM) mengalami kesulitan financial, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diputuskan bahwa perusahaan dinyatakan Bangkrut, dan terhadap asset yang masih ada akan dilakukan penjualan. Selanjutnya dilakukan perhitungan (Lihat Lampiran RUPS Luar Biasa) dan Perusda Karimun sebagai pemegang saham sebesar 30% dan atau senilai Rp. 850.000.000 memperoleh bahagian sebesar Rp 261,996,576.00 setelah dipotong biaya biaya, sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp. 588,003,424.00.

Selanjutnya sejak periode tersebut diatas 2017, investasi saham Perusda Karimun pada perusahaan afiliasi hanya ada pada PT. Ology Karimun Bumi Sukses (PT. OKBS) yang bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Umun (SPBU) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta - Poros Tanjung Balai Karimun kepemilikan saham Perusda Karimun sebesar 51% dengan komposisi sebagai berikut :

a. Perusda Karimun 51 %,
b. PT. Era Pradipta Cipta Mandiri 25 %,
c. PT. Karya Putra karimun 24 %.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost).

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas.
Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung (direct method).

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan Perusahaan, dijabarkan kedalam mata uang Rupiah.

b. Periode Akuntansi

Periode akuntansi dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu tahun. Dan Periode Pelaporan disampaikan dalam masa Triwulan

c. Piutang

Perusahaan belum melakukan penyisihan untuk piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Untuk itu piutang yang betul-betul tidak dapat ditagih dihapuskan dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih dan telah mendapat persetujuan penghapusannya dari pimpinan atau yang berwenang diperusahaan.

d. Persediaan

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai / harga perolehan dan nilai realisasi bersih.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus

f. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Bangunan	20 – 50 Tahun
Peralatan dan perabot	4 Tahun
Kendaraan bermotor	5 – 10 Tahun

Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak significant dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dengan nilai besar dan significant yang sifatnya meningkatkan kondisi aset dikapitalisasi pada asset yang bersangkutan.

g. Aset Lain-lain

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan kurang dari 20 % dicatat dengan metode biaya, sedangkan penyertaan saham denga persentase kepemilikan paling sedikit 20 % sampai denga 50 % dicatat deng metode ekuitas (equity method). Denga metode ekuitas, penyertaan dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah / (dikurang) denga bagian atas laba atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan

h. Kewajiban

Kewajiban / Hutang disajikan harga tunai ditambah beban bunga sehingga pada saat pembayaran tidak menjadikan beban

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan mengakui pendapatan dan penjualan dengan menggunakan metode full accrual method.

j. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 31E, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aktiva dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

k. Penggunaan estimasi

PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

I. **Imbalan Pasca Kerja**

PSAK No. 24 revisi 2004 (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 24) mengatur mengenai pencatatan Kewajiban Imbalan Kerja

Ketentuan diatas mengharuskan Perusahaan mengakui estimasi kewajiban yang menyangkut imbalan pasca kerja (uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja), sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003..

Perusahaan telah melakukan estimasi pencatatan atas kewajiban imbalan pasca kerja.

PERUSAHAAN BUMI KAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

8. KAS DAN SETARA KAS	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari:	UNAUDITED	AUDITED

Kas KP (Kantor Pusat)	Rp	-	Rp	30.850
Kas UPTBK (Pasar TBK)	Rp	975.950	Rp	144.100
Kas UPTBT (Pasar TBT Kundur)	Rp	7.286.000	Rp	5.696.500
Kas UPMORO (Pasar MORO)	Rp	153.450	Rp	676.950
MANDIRI - KP NO. REK. 109-000-7622186	Rp	-	Rp	-
BPD - UPTBK NO.REK. 111-05-70071	Rp	-	Rp	-
BPD - UPTBT KUNDUR NO.REK. 123-20-00687	Rp	-	Rp	87.775
BPD - UPTBK (LISTRIK) NO.REK. 111-05-700-72	Rp	-	Rp	-
BPR – UPMORO KP NO.REK. 0010 2002 880	Rp	3.597.033	Rp	4.625.340
BPR - UPMORO NO.REK. 0020 102 6142	Rp	30.981	Rp	87.184
BRI – UPTBT NO. REK. 336-501-057-887-533	Rp	31.275	Rp	99.275
BRI – PUSAT NO. REK. 5515-01-000035-30-0	Rp	240,081.926	Rp	123.000.000
BRI - PASAR TELUK UMA NO.REK. 061 801 000 619 303	Rp	33.126.031	Rp	1.059.771
Jumlah Kas dan Setara Kas	**Rp**	**285.282.646**	**Rp**	**135.507.745**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Kas dan Setara Kas sebesar	**Rp**	**285.282.646**

9. PIUTANG USAHA	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari ;	UNAUDITED	AUDITED

Piutang Usaha KP PT. Eka Daya Bahari Mas -16/3/12 – BNI	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
Piutang Usaha UPTBK	Rp	3.702.808.000	Rp	3.626.545.672
Piutang Usaha UPTBK - Sambungan LISTRIK	Rp	-	Rp	-
Piutang Usaha UPTBT KUNDUR	Rp	52.696.000	Rp	52.506.000
Jumlah Piutang Usaha	Rp	3.765.504.000	**Rp**	**3.689.051.672**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Piutang Usaha sebesar	**Rp**	**3.765.504.000**

Catatan:

Piutang Usaha	UPTBK		UPTBT KUNDUR		Piutang Usaha
*) RUKO	Rp	34.410.000	Rp	5.250.000	*) Ruko - 7 Unit
*) MEJA	Rp	1.493.007.000	Rp	16.510.000	*) Kios - Merdeka 86
*) KIOS	Rp	1.894.657.000	Rp	780.000	*) Kios - Pemuda 25
*) LOSD	Rp	71.153.000	Rp	2.460.000	*) Kios - B.Pemuda 24
*) LAIN (MCK)	Rp	209.581.000	Rp	27.696.000	*) Lain - Lain
Jumlah Piutang Usaha	Rp	3.702.808.000	Rp	52.696.000	

10. PIUTANG KARYAWAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024

PERUSAHAAN BUMI KRAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari :	UNAUDITED	AUDITED
Usmantono - Mantan Dirut	Rp 197.066.667	Rp 197.066.667
Piutang Karyawan (Audit BPK) & Kantor		
Mahsun	Rp -	Rp -
Salmi	Rp 3.700.000	Rp 4.500.000
Sarlin Warlina	Rp -	Rp -
Firmansyah	Rp 6.900.000	Rp 7.300.000
Siti Maryem (pinjaman kantor 3.000.000 + BPK-RI)	Rp 1.480.000	Rp 2.880.000
Melissa Monara	Rp -	Rp 500.000
Azwir	Rp -	Rp -
Jhony Yeremias	Rp 6.100.000	Rp 6.100.000
Baldatullati	Rp -	Rp -
Novariza Haryati	Rp -	Rp 150.000
Harjanto	Rp -	Rp -
Delima	Rp -	Rp -
Ahmad Bastari	Rp 7.050.000	Rp 7.050.000
MACHZA PUTRA RAFFI	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Jumlah Piutang Karyawan	**Rp 225.796.667**	**Rp 229.046.667**

Per 31 Desember 2025, Jumlah Piutang Karyawan sebesar	**Rp 225.796.667**

11. PIUTANG LAINNYA	**Per 31 Desember 2025**	**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari :	UNAUDITED	AUDITED
Mantan Direktursi Keuangan Mahzar Kadir	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Firmansyah	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000
Andi Bahtiar / Usmantono > Lihat Catatan	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
Jumlah Piutang Lainnya	**Rp 522.100.000**	**Rp 522.100.000**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Piutang Lainnya sebesar	**Rp 522.100.000**

Catatan :

Pembayaran untuk dan atas nama Andi Bahtiar sebesar Rp. 500.000.00,00 melalui rekening Bank Mandiri 119-000-533-9492 pada tanggal 8 Oktober 2010 yang dimaksudkan untuk pembayaran pengurusan Dana SILPA (?) / SILPA

12. PAJAK DIBAYAR DIMUKA	**Per 31 Desember 2025**	**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari :	UNAUDITED	AUDITED
PPh 21	Rp -	Rp -
PPh 25	Rp -	Rp -
Jumlah Piutang Lain-Lain	**Rp -**	**Rp -**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Pajak dibayar diniuka sebesar	**Rp**

13. AKTIVA TETAP	**Per 31 Desember 2025**			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**

PERUMDA BUMI ERAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

	(Rupiah)			
Harga Perolehan	UNAUDITED			
Tanah	Rp 289.545.450	Rp -	Rp -	Rp 289.545.450
Gedung Dan Bangunan	Rp 2.063.054.984	Rp -	Rp -	Rp 2.063.054.984
Kendaraan	Rp 32.700.000	Rp 183.000.000	Rp -	Rp 215.700.000
Inventaris & Peralatan	Rp 545.155.626	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 555.155.626
Jumlah	Rp 2.930.456.060	Rp 193.000.000	Rp -	Rp 3,123,456,060

AKUMULASI PENYUSUTAN

Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Gedungan dan Bangunan	Rp (1.762.972.932)	Rp (27.345.555)	Rp -	Rp (1.790.318.489)
Kendaraan	Rp (42.231.250)	Rp (22.875.000)	Rp -	Rp (65.106.250)
Inventaris & Peralatan	Rp (548.360.878)	Rp (2.500.002)	Rp -	Rp (549.238.962)
Jumlah	Rp (2.353.565.061)	Rp (52.720.557)	Rp -	Rp (2.404.663.701)
Nilai Buku Aktiva Tetap	Rp 769.890.999	Rp -	Rp -	Rp 718.792.359

13. AKTIVA TETAP	Per 31 December 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	(Rupiah)			
Harga Perolehan	AUDITED			
Tanah	Rp 289.545.450	Rp -	Rp -	Rp 289.545.450
Gedung Dan Bangunan	Rp 2.063.054.984	Rp -	Rp -	Rp 2.063.054.984
Kendaraan	Rp 32.700.000	Rp 183.000.000	Rp -	Rp 215.700.000
Inventaris & Peralatan	Rp 545.155.626	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 555.155.626
Jumlah	Rp 2.930.456.060	Rp 193.000.000	Rp -	Rp 3.123.456.060

AKUMULASI PENYUSUTAN

Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Gedungan dan Bangunan	Rp (1.717.712.212)	Rp (45.260.720)	Rp -	Rp (1.762.972.932)
Kendaraan	Rp (32.700.000)	Rp (9.531.250)	Rp -	Rp (42.231.250)
Inventaris & Peralatan	Rp (534.392.499)	Rp (13.968.379)	Rp -	Rp (548.360.878)
Jumlah	Rp (2.284.804.711)	Rp (68.760.350)	Rp -	Rp (2.353.565.061)
Nilai Buku Aktiva Tetap	Rp 645.651,349	Rp -	Rp -	Rp 769.890.999

Per 31 Desember 2025 Nilai Buku Aktiva Tetap sebesar ...	Rp 718.792.360

14. AKTIVA LAINNYA	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari :	UNAUDITED	AUDITED
Penyertaan Saham pada PT. OKBS	Rp 3.500.147.747	Rp 3.500.147.747

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

Penyertaan Saham pada PT. EDBM	Rp	-		Rp	-
Biaya Pra Operasional - PT. OKBS	Rp	1.063.400.000		Rp	1.063.400.000
Biaya Pra Operasional - PT. PTK SMELTER	Rp	243.500.000		Rp	243.500.000
Jumlah Aset Lain-Lain	**Rp**	**4.807.047.747**		**Rp**	**4.807.047.747**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Aset Lain-Lain sebesar	**Rp**	**4.807.047.747**

Catatan :
PT. Eka Daya Bahari Mas melalui RUPS-Luar Biasa dinyatakan TUTUP dan Perhitungan Investasi Lihat LampiranSebagai informasi, Akun Biaya Pra Operasi PT.OKBS DAN PT. PTK Smelter perlu dilakukan amortizasi atau dilakukan write off, karena proyek smelter sudah tidak dilanjutkan. Disamping itu menjadi beban bagi neraca perusahaan.

15. HUTANG LAINNYA	**Per 31 Desember 2025**		**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)		
Akun ini terdiri dari:	UNAUDITED		AUDITED

Hutang Sewa Kantor 2011 - Sekarang KP - PT. OKBS	Rp	181.000.000		Rp	181.000.000
Hutang Untuk Dana THR Tahun 2023 - PT. OKBS	Rp	193.046.584		Rp	243.049.806
KP -PT. Pandaman Putra Utama - Bantuan Listrik Masyarakat TBK	Rp	500.032.848		Rp	500.032.848
PT. Digital. Comp	Rp	-		Rp	5.446.000
Perumda BPR Tuah Karimun	Rp	72.176.541		Rp	150.404.865
Jumlah Hutang Lainnya	**Rp**	**946.255.973**		**Rp**	**1.074.487.654**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Hutang Lainnya sebesar	**Rp**	**946.255.973**

PT. Pandaman Putra Utama - Rp. 500.032.848,60

Hutang untuk Bantuan pengedaan Listrik masyarakat Tanjung Balai Karimun yang terjadi sejak krisis listrik tahun 2009. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perusda mendapat tugas dengan menggandeng PT. Pandaman Putra Utama dengan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Energi Listrik PLTD Pongkar dan PT PLN (PESERO) Wilayah Riau dan KEPRI Cabang Tanjungpinang, dengan Nomor Pihak Pertama : 002/SP-KSO/PERUSDA/VIII/2009 dan Nomor Pihak Kedua : 076.1.KSO/040/CCTPI/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. Dan disukung dengan Surat Bupati Karimun Nomor : 500/Eko/VII/2009/104.A tanggal 15 Agustus 2009.

16. KEWAJIBAN PASKA KERJA / IMBALAN KERJA	**Per 31 Desember 2025**		**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)		
Akun ini terdiri dari:	UNAUDITED		AUDITED

Kewajiban Paska Kerja / Imbalan Kerja	Rp	100.000.000		Rp	100.000.000
Jumlah Hutang Lainnya	**Rp**	**100.000.000**		**Rp**	**100.000.000**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Hutang Lainnya sebesar	**Rp**	**100.000.000**

17. EKUITAS	**Per 31 Desember 2025**		**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)		
Akun ini terdiri dari:	UNAUDITED		AUDITED

Modal Penyertaan Pemkab	Rp	333.345.890		Rp	333.345.890
Modal Penyertaan Pemkab OKBS	Rp	3.407.582.747		Rp	3.407.582.747

PERUM PERUMDA BUMI PRAJA SAMBAKUNG KRAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

Modal Penyerahaan Asset Pemkab	Rp	4.061.364.809	Rp	4.061.364.809
Modal Penyerahaan Asset PemProp	Rp	7.019.151	Rp	7.019.151
Modal UUP TBK	Rp	957.347	Rp	957.347
Modal UP TBT KUNDUR	Rp	6.687.000	Rp	6.687.000
Modal Sumbangan	Rp	96.000.000	Rp	96.000.000
Jumlah Modal	**Rp**	**7.912.956.944**	**Rp**	**7.912.956.944**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Modal sebesar	**Rp**	**7.912.956.944**

18. LABA / (RUGI)	**Per 31 Desember 2025**	**Per 31 Desember 2024**
	(Rupiah)	
Akun ini terdiri dari:	UNAUDITED	AUDITED

Saldo Laba (Rugi)	Rp	823.884.759	**Rp**	**553.781.661**
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	Rp	241.315.607	**Rp**	**127.507.963**
Setoran PAD ke Pemkab	Rp	(70.129.380)	Rp	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi)	Rp		Rp	42.595.135
Laba (Rugi) Periode Berjalan	Rp	502.556.917	Rp	-
Jumlah Saldo Laba / (Rugi)	**Rp**	**1.497.627.903**	**Rp**	**823.884.759**

Per 31 Desember 2025 Jumlah Saldo Laba / (Rugi) sebesar	**Rp**	**1.497.627.903**

PERUMDA BUMI ZAMZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISES OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Per 31 Desember 2025			
	Sub Total		Total	
PENDAPATAN USAHA			Rp	4.527.142.000
Pendapatan - UPTBK			Rp	3.792.848.000
Pendapatan Pengelolaan Ruko - UPTBK	Rp	143.500.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios - UPTBK	Rp	976.103.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios – UPTBK (BOT)	Rp	40.900.000		
Pendapatan Pengelolaan Meja - UPTBK	Rp	1.684.884.000		
Pendapatan Pengelolaan Losd - UPTBK	Rp	118.873.000		
Pendapatan Pengelolaan Listrik Tenant - UPTBK	Rp	200.511.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain Kaki Lima / Emperan - UPTBK	Rp	193.544.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain Kerangkeng - UPTBK	Rp	22.397.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain Etalase Makanan- UPTBK	Rp	34.447.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain Gudang - UPTBK	Rp	30.700.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain Parkir - UPTBK	Rp	101.850.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain - UPTBK	Rp	45.139.000		
Pendapatan - UPTBT KUNDUR			Rp	660.204.000
Pendapatan Pengelolaan Ruko A (Jl. Pemuda) 1 - UPTBT KUNDUR	Rp	13.200.000		
Pendapatan Pengelolaan Ruko B (Jl. Pemuda) 5 - UPTBT KUNDUR	Rp	50.250.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios (Jl. Merdeka 86) - UPTBT KUNDUR	Rp	134.300.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios (Jl. Merdeka 25) - UPTBT KUNDUR	Rp	11.332.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios (Jl. Pemuda 1) 21- UPTBT KUNDUR	Rp	13.160.000		
Pendapatan Pengelolaan Kios (Jl. Pemuda 2) 3 - UPTBT KUNDUR	Rp	4.515.000		
Pendapatan Pengelolaan Meja Ikan (Rp 10.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	105.438.000		
Pendapatan Pengelolaan Meja Sayur (Rp 9.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	106.014.000		
Pendapatan Pengelolaan Akau (Rp 10.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	73.660.000		
Pendapatan Pengelolaan Emperan (Rp 7.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	70.839.000		
Pendapatan Pengelolaan Emperan Ikan (Rp 9.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	19.176.000		
Pendapatan Pengelolaan Pemerasan Santan (Rp 10.000/hari) - UPTBT KUNDUR	Rp	3.600.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-lain (Parkir) - UPTBT KUNDUR	Rp	9.600.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-lain (Rumah Potong Hewan) - UPTBT KUNDUR	Rp	7.200.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-lain (Jualan Daging) - UPTBT KUNDUR	Rp	7.200.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-lain (Ruang ATM) - UPTBT KUNDUR	Rp	14.320.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-lain (Pelabuhan Rakyat) - UPTBT KUNDUR	Rp	16.400.000		
Pendapatan - UPMORO			Rp	74.090.000
Pendapatan Pengelolaan Kios - UPMoro	Rp	36.240.000		
Pendapatan Pengelolaan Meja - UPMoro	Rp	13.530.000		
Pendapatan Pengelolaan Listrik Tenant - UPMORO	Rp	2.560.000		
Pendapatan Pengelolaan Lain-Lain - UPMORO	Rp	21.760.000		

PERUMDA BUMI BERIZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

BIAYA TENAGA KERJA - KANTOR PASAR TG. BALAI KARIMUN			**Rp 1.905.737.264**
By - Upah Langsung – Kantor Pasar Tg. Balai Karimun	Rp	1.509.153.146	
By - Jamsostek – Kantor Pasar Tg. Balai Karimun	Rp	201.861.828	
By - THR-K – Kantor Pasar Tg. Balai Karimun	Rp	122.422.290	
By - Sagu Hati / Pesangon / PHK - Kantor Pasar Tg. Balai Karimun	Rp	72.300.000	
BIAYA OPERASIONAL - KANTOR PASAR TG. BALAI KARIMUN			**Rp 1.730.289.778**
By - Out Sourcing Kebersihan Pasar Maimun	Rp	192.000.000	
By - Listrik - UPTBK	Rp	567.050.024	
By - Kebersihan Pasar Sri Karimun Jaya - UPTBK	Rp	9.184.000	
By - Kebersihan Pasar ROMBENG - UPTBK	Rp	8.680.000	
By - Kebersihan Pasar MAIMUN - UPTBK	Rp	29.140.429	
By - Kebersihan Pasar BUKIT TEMBAK MERAL - UPTBK	Rp	8.160.000	
By - Kebersihan Pasar TELUK UMA - UPTBK	Rp	8.953.000	
By - Pemeliharaan Sarana Pasar SRI KARIMUN - UPTBK	Rp	32.275.000	
By - Pemeliharaan Sarana Pasar ROMBENG - UPTBK	Rp	9.887.000	
By - Pemeliharaan Sarana Pasar MAIMON - UPTBK	Rp	232.450.000	
By - Pemeliharaan Sarana Pasar BUKIT TEMBAK MERAL - UPTBK	Rp	10.868.000	
By - Pemeliharaan Sarana Pasar TELUK UMA - UPTBK	Rp	11.521.000	
By – Pemasangan dan Penambahan CCTV - UPTBK	Rp	2.500.000	
By - Konsumsi - UPTBK	Rp	48.257.100	
By - Telepon / Speedy - UPTBK	Rp	6.928.634	
By – Air PAM / Air Lori - UPTBK	Rp	5.944.100	
By - Perlengkapan Kantor (ATK), Cetak Karcis,Kwitansi dan Materai- UPTBK	Rp	89.376.700	
By - Bulletien, Koran - UPTBK	Rp	2.345.000	
By - Transport Lokal & BBM - UPTBK	Rp	17.851.283	
By – Servise Komputer,AC,Tabung Api,Pergantian Alat Listrik - UPTBK	Rp	11.866.000	
By – Servise Kendaraan Kantor, Mobil/Motor - UPTBK	Rp	11.297.000	
By - PBB - UPTBK	Rp	13.299.612	
By – Training / Pelatihan Direksi, Karyawan & Badan Pengawas- UPTBK	Rp	5.322.000	
By – Jasa Profesi (Audit) - UPTBK	Rp	45.000.000	
By – Akomodasi & Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Bdn Pengawas- UPTBK	Rp	17.043.000	
By – Akomodasi & Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Direktur - UPTBK	Rp	9.240.000	
By – Akomodasi & Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah Karyawan - UPTBK	Rp	15.142.000	
By – Komersial / Pemasaran (Spanduk/Iklan/Duka Cita/Promosi,dll) - UPTBK	Rp	41.804.316	
By – Pemeliharaan & Pergantian Peralatan Alat-alat Listrik Kantor - UPTBK	Rp	22.400.000	
By – Legalitas / Perizinan (Termasuk STNK) - UPTBK	Rp	1.147.000	
By – Pakaian Seragam dan Bagde Nama - UPTBK	Rp	6.650.000	
By – Renovasi Kantor yang Berada di Pasar Maimun – UPTBK	Rp	61.100.000	
By – Beban Pajak Pendapatan – UPTBK	Rp	50.000.000	
By - Lainnya - UPTBK	Rp	125.407.380	

PERUMDA BUMI BARIZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISES OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

BIAYA TENAGA KERJA - PASAR UPTBT KUNDUR			Rp	227.139.526
By - Upah Langsung - UPTBT KUNDUR	Rp	179.251.640		
By - Jamsostek - UPTBT KUNDUR	Rp	32.841.916		
By - THR-K - UPTBT KUNDUR	Rp	15.045.970		
By - Sagu Hati / Pesangon / PHK - UPTBT KUNDUR	Rp	-		
BIAYA OPERASIONAL - UPTBT KUNDUR			Rp	327.827.017
By - Listrik - UPTBT KUNDUR	Rp	112.735.434		
By - Pemeliharaan Sarana Pasar - UPTBT KUNDUR	Rp	84.007.000		
By – Pemeliharaan Kebersihan Pasar (Biaya Angkut Sampah) - UPTBT KUNDUR	Rp	9.801.000		
By - Telepon / Speedy - UPTBT KUNDUR	Rp	4.450.000		
By - Pemakaian Air PAM / Lori - UPTBT KUNDUR	Rp	7.245.000		
By – ATK,Photo Copy, Barang Cetakan (Kwitansi, Kartis Dll) - UPTBT KUNDUR	Rp	12.490.500		
By - Pos,Materai - UPTBT KUNDUR	Rp	840.000		
By - Bulletien, Koran - UPTBT KUNDUR	Rp	3.460.000		
By - Transport Lokal & BBM (Kendaraan Lainnya)- UPTBT KUNDUR	Rp	9.569.000		
By - Konsumsi (Jamuan Makan Minum Tamu GotongRoyong dll)- UPTBT KUNDUR	Rp	13.022.000		
By – Servise Komputer,AC,Tabung Api,Pergantian Listrik - UPTBT KUNDUR	Rp	5.625.000		
By – Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Kantor,Pasar / Taman - UPTBT KUNDUR	Rp	13.480.000		
By - PBB - UPTBT KUNDUR	Rp	1.633.887		
By – Komersial (Spanduk/Iklan/Duka Cita/Promosi,dll) - UPTBT KUNDUR	Rp	3.662.296		
By - Lainnya - UPTBT KUNDUR	Rp	45.427.000		

BIAYA TENAGA KERJA - PASAR UPMORO	Rp	55.408.000

PERUMDA BUMI ZAKAZAM JAYA
STATE OWNED ENTERPRISE OF KARIMUN REGENCY

PENJELASAN POS POS NERACA
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Dalam Rupiah)

By - Upah Langsung - UPMORO	Rp	55.400.000	
By – Jamsostek - UPMORO	Rp	-	
By - THR-K - UPMORO	Rp	-	
BIAYA OPERASIONAL - UPMORO			Rp 28.467.200
By - Listrik - UPMORO	Rp	12.249.700	
By –Pemeliharaan Sarana Pasar - UPMORO	Rp	10.172.000	
By – Kebersihan / Iuran Sampah - UPMORO	Rp	3.284.000	
By - Pemakaian Air PAM / Lori - UPMORO	Rp	391.000	
By - Perlengkapan Kantor (ATK) - UPMORO	Rp	832.500	
By - Transport Lokal & BBM (Kirim Dokumen) - UPMORO	Rp	440.000	
By - Lainnya - UPMORO	Rp	1.098.000	
PENDAPATAN & BEBAN DILUAR USAHA			Rp 250.275.702
PENDAPATAN DILUAR USAHA			Rp 252.646.729
Pendapatan Saham Dividen dari PT.Ology Karimun Bumi Sukses	Rp	252.450.000	
Pendapatan Jasa Giro	Rp	196.729	
Selisih Pembulatan	Rp	-	
Pendapatan Lainnya Non Operasional	Rp	-	
BEBAN DILUAR USAHA			Rp 2.371.027
Beban Administrasi Bank, Cheque, Materai dan PPh	Rp	2.371.027	
Selisih Pembulatan	Rp	-	

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

No	Keterangan	Penyusutan Berdasarkan Komersil									
		Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan		Total	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Tahun 2025		Akumulasi s/d 2025	
								Bln	Jumlah	Penyusutan	
	JENIS AKTIVA TETAP I										
I	**TANAH UNIT PASAR - TANJUNG BALAI KARIMUN**										
1	Tanah Desa Meral (Kios 30 Pintu)	01	Januari	2000		-	-	-	-	-	-
2	Tanah Desa Meral (Kios 4 Pintu)	01	Januari	2000		-	-	-	-	-	-
3	Tanah Desa Meral (Pasar Ikan 1 buah)	01	Januari	2000		-	-	-	-	-	-
4	Tanah Jl. Nusantara (Pasar Inpres)	01	Januari	1990		-	-	-	-	-	-
5	Tanah Jl. Nusantara (Pasar Inpres)	01	Januari	1990		-	-	-	-	-	-
6	Tanah Jl.Setia Budi (Ps.Baru, Belakang dan Kios)	01	Januari	1990		-	-	-	-	-	-
7	Tanah Jl.Setia Budi (Ruko)	01	Januari	1990		48,517,500	48,517,500	-	-	-	48,517,500
8	Tanah Bak Air	01	Januari	1990		2,605,000	2,605,000	-	-	-	2,605,000
9	Tanah Jl. Nusantara (Kios 6 Pintu)	01	Januari	1987		51,360,000	51,360,000	-	-	-	51,360,000
10	Tanah Jl.Nusantara (Ruko Eks. Ps.Ikan 2 Pintu)	01	Januari	1987		31,680,000	31,680,000	-	-	-	31,680,000
11	TanahDesa Meral (Los 1 Buah)	01	Januari	1979		52,380,000	52,380,000	-	-	-	52,380,000
12	Tanah Bangunan Sentral Listrik (Bukit Senang)	01	Januari	1978		3,125,000	3,125,000	-	-	-	3,125,000
13	Tanah Jl.Nusantara (Rumah Jual Babi)	01	Januari	1990		4,860,000	4,860,000	-	-	-	4,860,000
14	Tanah Rumah Mesin (Teluk Air)	01	Januari	1990		-	-	-	-	-	-
15	Tanah Bak Air 3 Skat (Teluk Air)	01	Januari	1990		-	-	-	-	-	-
16	Tanah Rumah Penjaga Genset (Teluk Air)	01	Januari	1990		48,665,000	48,665,000	-	-	-	48,665,000
17	Tanah Jl.Nusantara (Pertokoan 3 Pintu)	01	Januari	1990		6,030,000	6,030,000	-	-	-	6,030,000
18	Tanah Kios Akau (Jl.Pelabuhan)	01	Januari	1987		16,230,000	16,230,000	-	-	-	16,230,000
19	Tanah Desa Tebing (1 buah)	01	Januari	1985		23,017,500	23,017,500	-	-	-	23,017,500
20	Tanah Jl. Haji Arab	01	Januari	1990			-	-	-	-	-
						288,470,000	**288,470,000**			-	**288,470,000**
III	**TANAH UNIT PASAR - TANJUNG BATU KUNDUR**										
1	Jl. Pemuda (Tanah Kios 7 Pintu)					235,450	235,450	-	-	-	235,450
2	Jl. Merdeka (Tanah Pasar Sayur dan Kios)					380,000	380,000	-	-	-	380,000
3	Jl. Pasar Ikan (Tanah Kantor, Pasar Ikan dan Rumah Potong)			1982		260,000	260,000	-	-	-	260,000
4	Tanah Jl. Kartini			1996			-	-	-	-	-
5	Tanah Rumah Mesin Listrik			1993		200,000	200,000	-	-	-	200,000
						1,075,450	**1,075,450**			-	**1,075,450**
	SUB TOTAL ... > AKTIVA TETAP : TANAH					**289,545,450**	**289,545,450**	-	-	-	**289,545,450**
	JENIS AKTIVA TETAP II										
1	**BANGUNAN UNIT PASAR TANJUNG BALAI KARIMUN**										
1	Bangunan Pasar Rakyat Meral	11	Februari	2019	1	110,614,550	110,614,550	12	8,296,092	72,821,246	37,793,304
2	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan Prasarana Lift Pasar Malmun	31	Desember	2014	1	88,000,000	88,000,000	12	-	88,000,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Penyusutan Berdasarkan Komersil											
No	Keterangan	Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan Tahun 2025		Total Akumulasi s/d 2025	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Bln	Jumlah	Penyusutan	
3	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan/ Renovasi Pasar MERAL	31	Desember	2014	1	245,300,800	245,300,800	12	9,198,783	131,849,183	113,451,617
4	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan/ Renovasi Pasar PUAKANG	31	Desember	2014	1	38,812,700	38,812,700	12	1,455,480	20,861,830	17,950,870
5	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan/ Renovasi Pasar SRI KARIMUN	31	Desember	2014	1	48,013,800	48,013,800	12	1,800,522	25,807,422	22,206,378
6	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan/ Renovasi Pasar T. UMA	31	Desember	2014	1	142,199,800	142,199,800	12	5,332,491	76,432,381	65,767,409
7	Kapitalisasi Biaya pemeliharaan/ Renovasi Pasar Bkt. TEMBAK	31	Desember	2014	1	33,658,209	33,658,209	12	1,262,187	18,091,292	15,566,918
8	Bangunan Pasar Meral	01	Januari	2000	1	25,686,750	25,686,750	-	-	25,686,750	-
9	Pasar Sri Karimun	01	Januari	1996	1	12,131,940	12,131,940	-	-	12,131,940	-
10	Pasar Inpres (Permanen)	01	Januari	1990	1	34,126,000	34,126,000	-	-	34,126,000	-
11	Pasar Inpres (Semi Permanen)	01	Januari	1990	1	13,112,000	13,112,000	-	-	13,112,000	-
12	Rumah Jual Babi (Semi Permanen)	01	Januari	1990	1	1,663,000	1,663,000	-	-	1,663,000	-
13	Sentral Listrik (Semi Permanen)	01	Januari	1990	1	2,573,000	2,573,000	-	-	2,573,000	-
14	Kios Akau	01	Januari	1990	1	1,260,000	1,260,000	-	-	1,260,000	-
15	Bangunan Pertokoan (Eks.Ps.Ikan)	01	Januari	1990	1	127,400,000	127,400,000	-	-	127,400,000	-
16	Bangunan Pertokoan Pasar Baru	01	Januari	1990	1	117,600,000	117,600,000	-	-	117,600,000	-
17	Bangunan Pertokoan Pasar Baru	01	Januari	1990	1	78,400,000	78,400,000	-	-	78,400,000	-
18	Bangunan Pertokoan Pasar Baru (Reg.001-008)	01	Januari	1990	1	36,800,000	36,800,000	-	-	36,800,000	-
19	Bangunan Pertokoan 10 Pintu	01	Januari	1990	1	18,400,000	18,400,000	-	-	18,400,000	-
20	Bangunan Los Sayur	01	Januari	1990	1	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-
21	Bangunan Pertokoan Bertingkat 10 Pintu	01	Januari	1990	1	41,850,000	41,850,000	-	-	41,850,000	-
						1,219,202,549	**1,219,202,549**		**27,345,555**	**946,466,054**	**272,736,495**
II	**BANGUNAN UNIT PASAR TANJUNG BATU KUNDUR**										
1	Bangunan Kios Jl. Pemuda	01	Januari	2001	1	162,800,000	162,800,000	-	-	162,800,000	-
2	Bangunan Pasar Baru Jl. Merdeka	30	November	1997	1	424,977,435	424,977,435	-	-	424,977,435	-
3	Bangunan Pasar	01	Januari	1996	1	71,007,000	71,007,000	-	-	71,007,000	-
4	Bangunan Ruko 2 Lantai Jl. Pemuda	01	Januari	1996	1	161,143,000	161,143,000	-	-	161,143,000	-
5	Bangunan Pasar Sayur Jl. Merdeka	01	Januari	1990	1		-	-	-	-	-
6	Bangunan Kios Luar Jl. Merdeka	01	Januari	1990	1		-	-	-	-	-
7	Bangunan Kios Jl. Merdeka	01	Januari	1990	1		-	-	-	-	-
8	Bangunan Kios Jl. Mutiara	01	Januari	1990	1		-	-	-	-	-
9	Bangunan Jl. M. Daud (Ex Pasar Ikan)	01	Januari	1990	1	22,190,000	22,190,000	-	-	22,190,000	-
10	Bangunan Jl. Haji Harun (Rumah Potong Babi)	01	Januari	1990	1	72,000	72,000	-	-	72,000	-
11	Bangunan Jl. Pasar Gembol (Rumah Jual Babi)	01	Januari	1990	1	1,663,000	1,663,000	-	-	1,663,000	-
12	Bangunan Sentral Listrik	01	Januari	1990	1		-	-	-	-	-
						843,852,435	**843,852,435**		**-**	**843,852,435**	**-**
	SUB TOTAL ....> AKTIVA TETAP BANGUNAN					**2,063,054,984**	**2,063,054,984**		**27,345,555**	**1,790,318,489**	**272,736,495**
	JENIS AKTIVA TETAP IV										
I	**KENDARAAN - KANTOR PUSAT**										
1	Motor Honda Revo	01	Januari	2008	1	19,500,000	19,500,000	-	-	19,500,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Penyusutan Berdasarkan Komersil											
No	Keterangan	Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan Tahun 2025		Total Akumulasi s/d 2025 Penyusutan	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Bln	Jumlah		
2	TOYOTA RUSH 1.5 S A/T (F 700 RE-GQMFJ)	22	Juli	2024	1	183,000,000	183,000,000	-	22,875,000	32,406,250	150,593,750
						202,500,000	**202,500,000**		**22,875,000**	**51,906,250**	**150,593,750**
II	**KENDARAAN - UNIT PASAR TANJUNG BALAI KARIMUN**										
						-	-			-	-
III	KENDARAAN - UNIT PASAR TANJUNG BATU KUNDUR										
1	Motor dinas	01	Januari	2003	1	13,200,000	13,200,000		-	13,200,000	-
						13,200,000	**13,200,000**		-	**13,200,000**	-
	SUB TOTAL ..... > AKTIVA TETAP KENDARAAN					**215,700,000**	**215,700,000**		**22,875,000**	**65,106,250**	**150,593,750**
I	**PERALATAN KANTOR - KANTOR PUSAT**										
1	PRINTER EPSON KEUANGAN	06	September	2019	1	2,400,000	2,400,000	12	-	2,400,000	-
	Printer Canon IP2770	10	April	2024	1	1,500,000	1,500,000	9	375,003	750,003	749,997
	Pembelian Tangga Lipat pasar Maimun	10	Oktober	2024	1	2,500,000	2,500,000	3	624,996	833,329	1,666,671
	Laptop Hp 145-DQ0508 TV Ram 8G GB	10	Juli	2024	1	6,000,000	6,000,000	6	1,500,003	2,500,003	3,499,997
2	Printer Brother T 500 , Untuk bagian UMUM & PERSONALIA	27	Februari	2018	1	2,850,000	2,850,000	12	-	2,850,000	-
3	1 Set Sound System Complete	10	April	2018	1	16,500,000	16,500,000	12	-	16,500,000	-
4	Pembelian Mother board Untuk Kantor Pusat	13	Agustus	2018	1	750,000	750,000	12	-	750,000	-
5	Pembelian TV LED LG 28" Untuk Kantor Pusat	03	September	2018	1	2,400,000	2,400,000	12	-	2,400,000	-
6	DVR 16 Chanel (UNTUK Kantor Pusat)	19	September	2018	1	1,750,000	1,750,000	12	-	1,750,000	-
7	KURSI TP. 948 RUANG DIRUT KANTOR PUSAT	22	Maret	2016	1	2,900,000	2,900,000	-	-	2,900,000	-
8	PRINTER CANON BG. UMUM & PERSONALIA KP	27	Januari	2017	1	755,000	755,000	12	-	755,000	0
9	KURSI TP. 948 RUANG DIRUT KANTOR PUSAT	22	Maret	2016	1	2,900,000	2,900,000	-	-	2,900,000	-
10	LEMARI FILE RUANGAN DIRUT KANTOR PUSAT	15	Januari	2016	1	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
11	PRINTER + KABEL BAGIAN PENGEMBANGAN KP	03	Maret	2015	1	1,015,000	1,015,000	-	-	1,015,000	-
12	Camera Digital Merk NICON 20 MP Kantor Pusat	26	Februari	2014	1	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-
13	Meja + Kursi U/ Pengembangan Air + Ps. (KP)	26	Februari	2014	1	3,050,000	3,050,000	-	-	3,050,000	-
14	Komputer U/ Pengembangan Air + Ps. (KP)	26	Februari	2014	2	5,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-
15	Pembelian AC Panasonic 2 Pc 1 Pk + 1 1/2 Pk KP	11	Februari	2014	2	4,750,000	9,500,000	-	-	9,500,000	-
16	Dipenser dan Kipas Angin	11	Februari	2013	1	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
17	Motherboard	30	Juli	2013	1	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-
18	CCTV	30	September	2013	1	19,700,000	19,700,000	-	-	19,700,000	-
19	Infocus	30	September	2013	1	3,950,000	3,950,000	-	-	3,950,000	-
20	Mesin Absen	30	September	2013	1	9,200,000	9,200,000	-	-	9,200,000	-
21	Rak Piring	20	September	2013	1	800,000	800,000	-	-	800,000	-
22	AC Panasonic Ruangan Keu	27	Agustus	2013	1	4,900,000	4,900,000	-	-	4,900,000	-
23	Lemari Kayu File Keuangan (3 Pintu)	27	Agustus	2013	1	9,500,000	9,500,000	-	-	9,500,000	-
24	Rak Gudang	13	Desember	2012	1	3,654,000	3,654,000	-	-	3,654,000	-
25	Kursi plastik kp	23	Oktober	2012	1	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

No	Keterangan	Penyusutan Berdasarkan Komersil									
		Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan Tahun 2025		Total Akumulasi s/d 2025	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Bln	Jumlah	Penyusutan	
26	Printer canon 2770 kp	23	Oktober	2012	1	500,000	500,000	-	-	500,000	-
27	Komputer 2 bh acer + lcd 15.6"kp	19	Oktober	2012	1	10,302,000	10,302,000	-	-	10,302,000	-
28	Hardisk 500 GB	20	September	2012	1	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-
29	Gordyn	17	April	2012	1	550,000	550,000	-	-	550,000	-
30	Lemari File	04	Januari	2012	1	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-
31	Pembelian lemari file	24	Januari	2007	1	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
32	Meja makan mess	26	Februari	2007	1	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-
33	Kursi lipat 6 buah mess	26	Februari	2007	1	990,000	990,000	-	-	990,000	-
34	Lemari pakaian mess	26	Februari	2007	1	650,000	650,000	-	-	650,000	-
35	Beli AC untuk Mess	01	Maret	2007	2	2,250,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-
36	Beli kursi panjang	02	Maret	2007	1	1,160,000	1,160,000	-	-	1,160,000	-
37	Pemb.4 bh Kursi	26	Mei	2007	1	730,000	730,000	-	-	730,000	-
38	Komputer pentium IV	30	Juni	2005	1	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-
39	Meja-Kursi Komputer	13	April	2004	1	530,000	530,000	-	-	530,000	-
40	Meja Maket Smelter	26	April	2004	1	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
41	Meja Kantor	17	Mei	2004	1	900,000	900,000	-	-	900,000	-
42	Kursi Putar	17	Mei	2004	1	700,000	700,000	-	-	700,000	-
43	Meja Tulis	16	Juli	2004	1	500,000	500,000	-	-	500,000	-
44	Lemari Pakaian	16	Juli	2004	1	825,000	825,000	-	-	825,000	-
45	Meja Kantor	31	Agustus	2004	1	910,000	910,000	-	-	910,000	-
46	Filling Kabinet	31	Agustus	2004	1	990,000	990,000	-	-	990,000	-
47	Lemari Dapur Mess	06	Oktober	2004	1	900,000	900,000	-	-	900,000	-
48	Spring Bed	06	Oktober	2004	1	1,850,000	1,850,000	-	-	1,850,000	-
49	Kursi Goyang	06	Oktober	2004	1	500,000	500,000	-	-	500,000	-
50	Gorden	06	Oktober	2004	1	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
51	Gorden Jendela	13	Oktober	2004	1	2,775,000	2,775,000	-	-	2,775,000	-
52	Printer Canon BJ200SPx	01	Desember	2004	1	550,000	550,000	-	-	550,000	-
53	Komputer PC+Printer	06	April	2004	1	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-
54	Printer Canon S200Spx	08	Mei	2004	1	580,000	580,000	-	-	580,000	-
55	Komputer PC+Printer	13	Juni	2004	1	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-
56	AC 1,5 PK	17	Mei	2004	1	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-
57	LAPTOP P3	17	Mei	2004	1	4,900,000	4,900,000	-	-	4,900,000	-
58	KOMPUTER + Printer	27	September	2004	1	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	-
59	Facimile	01	Oktober	2004	1	1,250,000	1,250,000	-	-	1,250,000	-
60	Kulkas	06	Oktober	2004	3	1,200,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-
61	AC ICHIBAN	11	November	2004	1	2,650,000	2,650,000	-	-	2,650,000	-
62	Dispenser	01	Januari	2003	1	870,000	870,000	-	-	870,000	-
63	AC Split	01	Januari	2003	1	2,300,000	2,300,000	-	-	2,300,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Penyusutan Berdasarkan Komersil											
No	Keterangan	Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan Tahun 2025		Total Akumulasi s/d 2025	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Bln	Jumlah	Penyusutan	
64	Kursi Ruangan Rapat	01	Januari	2003	1	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	-
65	Meja Ruangan Rapat	01	Januari	2003	1	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-
66	Filling Cabinet	01	Januari	2003	1	3,800,000	3,800,000	-	-	3,800,000	-
67	Partisi / Gorden	01	Januari	2003	1	2,272,500	2,272,500	-	-	2,272,500	-
68	Bupet Ruangan rapat	01	Januari	2003	1	2,700,000	2,700,000	-	-	2,700,000	-
69	Meja Kantor 1/2 Biro	01	Januari	2003	1	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	-
70	Kursi Putar	01	Januari	2003	1	600,000	600,000	-	-	600,000	-
71	Partisi / Gorden	01	Januari	2003	1	843,600	843,600	-	-	843,600	-
72	Papan Tulis	01	Januari	2003	1	480,000	480,000	-	-	480,000	-
73	AC Split	01	Januari	2003	3	7,996,000	23,988,000	-	-	23,988,000	-
74	Pot Bunga	01	Januari	2003	1	550,000	550,000	-	-	550,000	-
75	Meja Kantor 1/2 Biro	01	Januari	2003	1	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
76	Kursi Kantor Biasa Standart	01	Januari	2003	1	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-
77	Dimo Pencetak Label	01	Januari	2003	1	130,000	130,000	-	-	130,000	-
78	Kamera Digital	01	Januari	2003	1	1,566,675	1,566,675	-	-	1,566,675	-
79	Partisi / Gorden	01	Januari	2003	1	240,600	240,600	-	-	240,600	-
80	Rak Tempat Koran	01	Januari	2003	1	334,300	334,300	-	-	334,300	-
81	Meja Komputer	01	Januari	2003	1	520,000	520,000	-	-	520,000	-
82	Meja Kantor Executive	01	Januari	2003	1	16,298,500	16,298,500	-	-	16,298,500	-
83	Lemari Kantor	01	Januari	2003	1	7,932,700	7,932,700	-	-	7,932,700	-
84	Kursi kantor Putar Besar	01	Januari	2003	1	4,548,500	4,548,500	-	-	4,548,500	-
85	Kursi Kantor Putar Standart	01	Januari	2003	1	4,130,800	4,130,800	-	-	4,130,800	-
86	Meja Bulat	01	Januari	2003	1	2,132,700	2,132,700	-	-	2,132,700	-
87	Filling Cabinet	01	Januari	2003	1	4,930,800	4,930,800	-	-	4,930,800	-
88	Kursi Kantor Putar Kecil	01	Januari	2003	1	3,669,300	3,669,300	-	-	3,669,300	-
89	Meja Kantor 1/2 Biro	01	Januari	2003	1	6,878,900	6,878,900	-	-	6,878,900	-
90	Kursi Putar	01	Januari	2003	1	565,000	565,000	-	-	565,000	-
91	Papan CPU	01	Januari	2003	1	680,000	680,000	-	-	680,000	-
92	Kursi Executive	01	Januari	2003	1	732,500	732,500	-	-	732,500	-
93	Coffee Maker	01	Januari	2003	1	160,000	160,000	-	-	160,000	-
94	Kursi Susun	01	Januari	2003	1	1,825,000	1,825,000	-	-	1,825,000	-
95	Meja Komputer Standart	01	Januari	2003	1	4,550,500	4,550,500	-	-	4,550,500	-
96	Filling kabinet	01	Januari	2003	1	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	-
97	Meja Dinding & walker	01	Januari	2003	1	600,000	600,000	-	-	600,000	-
98	Brankas	01	Januari	2003	1	1,605,000	1,605,000	-	-	1,605,000	-
99	Papan tulis	01	Januari	2003	1	350,000	350,000	-	-	350,000	-
100	Kursi Putar Sedang	01	Januari	2003	1	1,520,000	1,520,000	-	-	1,520,000	-
101	Kursi tamu	01	Januari	2003	1	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

Penyusutan Berdasarkan Komersil												
No	Keterangan	Tanggal Perolehan			Perolehan			Penyusutan Tahun 2025		Total Akumulasi s/d 2025	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Bln	Jumlah	Penyusutan	
102	Komputer	01	Januari	2003	1	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-
103	Kalkulator	01	Januari	2003	1	320,000	320,000	-	-	320,000	-
104	Meja Kantor 1/2 biro	01	Januari	2003	1	320,000	320,000	-	-	320,000	-
105	Kursi Lipat	01	Januari	2003	1	435,000	435,000	-	-	435,000	-
106	Kursi Putar Sedang	01	Januari	2003	1	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-
107	Air Condition	01	Januari	2003	1	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-
108	Meja Kantor Biro	01	Januari	2003	1	620,000	620,000	-	-	620,000	-
109	Lemari Kantor	01	Januari	2003	1	1,149,500	1,149,500	-	-	1,149,500	-
110	Handly Talky	01	Januari	2003	1	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
111	Printer Komputer	01	Januari	2003	1	2,080,000	2,080,000	-	-	2,080,000	-
112	Meja Komputer	01	Januari	2003	1	675,000	675,000	-	-	675,000	-
113	Lemari Map	01	Januari	2003	1	425,000	425,000	-	-	425,000	-
114	Kipas angin,Kalkulator	01	Januari	2003	1	560,000	560,000	-	-	560,000	-
115	Kipas angin Gantung	01	Januari	2003	1	378,500	378,500	-	-	378,500	-
116	Kursi Putar Tinggi	01	Januari	2003	1	700,000	700,000	-	-	700,000	-
117	Lemari / File Cabinet	17	Maret	2003	1	350,000	350,000	-	-	350,000	-
118	AC Merk Mitsubhisi	27	Maret	2003	1	5,550,000	5,550,000	-	-	5,550,000	-
119	Kalkulator	09	April	2003	1	300,000	300,000	-	-	300,000	-
120	Printer Canon S200SPx	16	Desember	2003	1	550,000	550,000	-	-	550,000	-
121	SOFI GL 2000	30	Juni	2003	1	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	-
						338,442,675	**368,834,875**		**2,509,002**	**362,918,210**	**5,916,665**
II	**PERALATAN KANTOR UNIT PASAR TANJUNG BALAI KARIMUN**										
1	Penambahan CCTV ON SET Ps. MAIMUN UNIT PASAR TBK,ASESORIS	20	Maret	2021	2	7,200,375	14,400,751	12		14,400,751	-
2	CCTV ON SET PASAR TELUK UMA	03	November	2020	8	1,587,500	12,700,000	12	-	12,700,000	-
3	LAPTOP ASUS X441UA-GA 322 PROCESSOR CORE3-7020V	21	November	2020	2	6,400,000	12,800,000	12	-	12,800,000	-
4	Meja TENIS PS. MAIMUN UNIT PASAR TBK	01	Februari	2019	1	3,740,000	3,740,000	12		3,740,000	0
5	JET PAM SUMUR BOR PS. MAIMUN UNIT PASAR TBK	14	Juni	2019	1	2,235,000	2,235,000	12		2,235,000	- 0
6	JET PUM MER SHIMIZU BLOK A PS. MAIMUN	01	November	2019	1	2,135,000	2,135,000	12		2,135,000	-
7	CCTV 4 CHANEL PS. MERAL UPTBK	05	Agustus	2018	1	6,860,000	6,860,000	12	-	6,860,000	-
8	TV LG 42" LED 43 W 500 T (2 set @ Rp 4.850.000) Ps. Maimun	24	Februari	2018	2	4,850,000	9,700,000	12	-	9,700,000	-
9	Kipas Angin Dinding 26" (5 set @ Rp 950.000) Ps. Maimun	24	Februari	2018	5	950,000	4,750,000	12	-	4,750,000	-
10	Bracket putar, Kabel Listrik 100 M, Stop Kontak, dan Ongkos	24	Februari	2018	1	4,000,000	4,000,000	12	-	4,000,000	-
11	Penambahan CCTV 4 Titik Untuk Pasar Meral	31	Oktober	2018	1	6,860,000	6,860,000	12	-	6,860,000	-
12	Mesin Jet Pump Pasar Maimun	25	Oktober	2017	1	2,450,000	2,450,000	10	-	2,450,000	-
13	CAMERA CCTV STANN HD INDOOR 1MP,DLL	23	Oktober	2017	1	34,625,000	34,625,000	12	-	34,625,000	-0
14	Mesin Jet PumpPasar Meral	09	Oktober	2017	1	2,888,000	2,888,000	9	-	2,888,000	-
15	Dispenser u/ keperluan pos satpam ps. Maimun	10	Januari	2017	1	130,000	130,000	-	-	130,000	-
16	Printer Brother + Infus PS Maimun	05	April	2016	1	2,370,000	2,370,000	3	-	2,370,000	-

PERUSDA KARIMUN
DAFTAR PENYUSUTAN ASSET TETAP
Tanggal : 31 Desember 2025

No	Keterangan	Penyusutan Berdasarkan Komersil									
		Tanggal Perolehan			Perolehan		Penyusutan		Total	Nilai Buku
		Tgl	Bulan	Tahun	Unit	Harga	Jumlah	Tahun 2025		Akumulasi s/d 2025	
								Bln	Jumlah	Penyusutan	
17	TV CCTV PS. MAIMUN UNIT PASAR TBK	19	Agustus	2016	1	1,900,000	1,900,000	8	-	1,900,000	-
18	Mesin Pompa Air U/ PS. T. UMA UNIT PASAR KARIMUN	10	Maret	2016	1	2,826,000	2,826,000	12	-	2,826,000	-
19	Mesin Jet/Bor Air U/ PS MAINUM UNIT PASAR KARIMUN	12	Januari	2016	1	4,040,000	4,040,000	-	-	4,040,000	-
20	Tangki Air Pinguin Pasar Teluk Uma	17	November	2015	1	1,750,000	1,750,000	-	-	1,750,000	-
21	Kipas Angin Ps Meral	13	Oktober	2014	1	600,000	600,000	-	-	600,000	-
22	Tangga Ps Baru Puakang	14	Juli	2014	1	560,000	560,000	-	-	560,000	-
23	MESIN AIR U/ PS. T UMA PASAR KARIMUN	13	Juni	2014	1	1,112,000	1,112,000	-	-	1,112,000	-
24	Kursi Kantor	11	Juni	2014	1	250,000	250,000	-	-	250,000	-
25	Kipas Angin	08	April	2014	1	230,000	230,000	-	-	230,000	-
26	Rolling Door U/ Ps. Meral	07	Februari	2014	1	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-
27	Meja	01	Januari	2003	5	700,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-
28	Kursi	01	Januari	2003	5	320,000	1,600,000	-	-	1,600,000	-
29	Lemari Arsip	01	Januari	2003	2	350,000	700,000	-	-	700,000	-
30	Komputer	01	Januari	2003	1	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
31	Printer	01	Januari	2003	1	500,000	500,000	-	-	500,000	-
32	Kalkulator	01	Januari	2003	1	100,000	100,000	-	-	100,000	-
						122,518,875	**160,311,751**		-	**160,311,752**	**- 0**
III	**PERALATAN KANTOR UNIT PASAR TANJUNG BATU KUNDUR**										
1	Air Conditioner	29	Juni	2020	1	3,800,000	3,800,000	12	-	3,800,000	-
2	Meja & Kursi Kantor	14	Februari	2019	1	1,600,000	1,600,000	12	-	1,600,000	0
3	Lemari Besi	14	Juni	2019	1	3,264,000	3,264,000	12	-	3,264,000	-
4	KOMPUTER SET TG. BATU KUNDUR	06	September	2019	1	5,500,000	5,500,000	12	-	5,500,000	- 0
5	Gelas U/ Kantor UP - TBT KK 025	19	Februari	2014	1	35,000	35,000	-	-	35,000	-
6	Meja Kantor	23	November	2016	1	700,000	700,000	-	-	700,000	-
7	Meja	01	Januari	2003	5	700,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-
8	Kursi	01	Januari	2003	4	320,000	1,280,000	-	-	1,280,000	-
9	Lemari Arsip	01	Januari	2003	1	350,000	350,000	-	-	350,000	-
10	Komputer	01	Januari	2003	1	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
11	Printer	01	Januari	2003	1	500,000	500,000	-	-	500,000	-
12	Kalkulator	01	Januari	2003	1	300,000	300,000	-	-	300,000	-
						20,069,000	**23,829,000**		-	**23,829,000**	**- 0**
IV	**PERALATAN KANTOR UNIT PASAR MORO**										
1	Meja kantor - UPTBK-KK114	07	Juni	2016	1	380,000	380,000	-	-	380,000	-
2	Meja kantor - UPMORO-KKL017	31	Januari	2017	1	1,800,000	1,800,000	12	-	1,800,000	-
						2,180,000	**2,180,000**		-	**2,180,000**	-
	Sub Total					**483,210,750**	**555,155,626**		**2,500,002**	**549,238,962**	**5,916,664**
	Total					**3,051,511,184**	**3,123,456,060**		**52,720,557**	**2,404,663,701**	**718,792,360**

LAPORAN BUMD

PT. PELABUHAN KARIMUN
(PERSERODA)

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)

Laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

Financial statements as of December 31, 2025 and for the years then ended with independent auditors' report

CONTENTS / DAFTAR ISI

I. **PERNYATAAN DIREKSI** _____ 3
DIRECTOR'S STATEMENT

II. **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN** _____ 4 - 6
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

III. **LAPORAN KEUANGAN**
FINANCIAL STATEMENTS

- Laporan laba rugi _____ 7
  Statements of profit or loss
- Laporan perubahan ekuitas _____ 8
  Statements of changes in equity
- Laporan posisi keuangan _____ 9
  Statement of financial position
- Laporan arus kas _____ 10
  Statements of cash flows
- Catatan atas laporan keuangan _____ 11 - 21
  Notes to financial statements

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)

DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)

Saya bertanda tangan di bawah ini :

I, the undersigned:

Nama	Zondervan, SE	*Name*
Alamat kantor	Jl. Pelabuhan Kargo Kelurahan Parit Benut Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau	*Office address*
Jabatan	Direktur Utama / *President Director*	*Position*

menyatakan bahwa:

declare that:

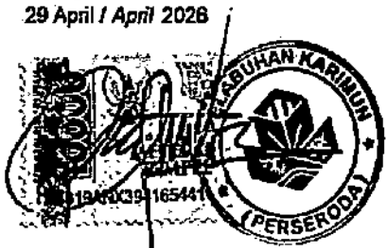
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelabuhan Karimun (Perseroda).

1. *We responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pelabuhan Karimun (Perseroda);*
2. *PT Pelabuhan Karimun (Perseroda)'s financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities;*
3. *a. All information in the PT Pelabuhan Karimun (Perseroda)'s financial statements have been disclosed in a complete and truthful manners.*
   b. PT Pelabuhan Karimun (Perseroda)'s financial statements do not contain any false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. *Responsible for PT Pelabuhan Karimun (Perseroda)'s internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Tanjung Balai Karimun,
29 April / *April* 2026



Zondervan, SE
Direktur Utama / *President Director*

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
No. : 00019/2.1346/AU.8/01/1502-5/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

The Shareholders, the Boards of Commissioners and Directors
PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)

Opinion
We have audited the financial statements of PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) (the Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan) /
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT *(Continued)*
No. : 00019/2.1346/AU.8/01/1502-5/1/IV/2026

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements *(Continued)*
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company"s reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan) / ***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*** *(Continued)*
No. : 00019/2.1346/AU.8/01/1502-5/1/IV/2026

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements *(Continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik / ***Certified Public Accountants***
ROBIN & SUPRIYANTO

Robin, CPA
Izin Akuntan Publik / *Public Accountant License* No. AP.1502
29 April / April 2026

00019

	2025	Catatan / *Notes*	2024	
Pendapatan	**18.135.593.536**	2c,3	15.565.492.236	*Revenue*
Biaya pokok pendapatan	**-**		-	*Cost of revenue*
Laba bruto	**18.135.593.536**		15.565.492.236	*Gross profit*
Biaya operasional	**(16.136.134.203)**	2c,4	(13.411.908.500)	*Operating expenses*
Laba operasional	**1.999.459.333**		2.153.583.736	*Operating profit*
Pendapatan/(biaya) lain-lain, neto	**(31.299.072)**	2c,5	(35.784.506)	*Other income/(expense), net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**1.968.160.261**		2.117.799.230	*Profit before income tax*
Pajak penghasilan:		2d,6b		*Income tax:*
Pajak kini	**(599.309.040)**		(544.366.360)	*Income tax expense*
Pajak tangguhan	**-**		-	*Deferred tax*
Laba neto	**1.368.851.221**		1.573.432.870	*Net profit*
Pendapatan komprehensif lainnya	**-**		-	*Other comprehensive income*
Jumlah laba komprehensif	**1.368.851.221**		1.573.432.870	***Total comprehensive income***

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham / *Share capital*	Laba ditahan / *Retained earnings*	Jumlah / *Total*	
Saldo per 01 Januari 2024	**500.000.000**	**4.883.481.352**	**5.383.481.352**	*Balance as of Januari 01, 2024*
Dividen	-	(1.338.335.330)	(1.338.335.330)	*Dividend*
Laba tahun 2024	-	1.573.432.870	1.573.432.870	*Profit for year 2024*
Saldo per 31 Desember 2024	**500.000.000**	**5.118.578.892**	**5.618.578.892**	*Balance as of December 31, 2024*
Laba tahun 2025	-	1.368.851.221	1.368.851.221	*Profit for year 2025*
Saldo per 31 Desember 2025	**500.000.000**	**6.487.430.113**	**6.987.430.113**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELABUHAN KARIMUN (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan / *Notes*	2024	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current assets***
• Kas dan setara kas	**515.565.373**	2e,18	1.110.346.393	*Cash and cash equivalents* •
• Deposito berjangka	**1.000.000.000**	19	1.000.000.000	*Time deposits* •
• Piutang usaha	**1.434.020.147**	2f,7	1.096.591.256	*Accounts receivable* •
• Piutang lain-lain	**615.228.648**	8	168.505.124	*Others receivable* •
• Persediaan	**427.912.502**	9	-	*Inventories* •
• Uang muka	**756.817.319**	2g,10	862.557.208	*Prepayments* •
• Biaya dibayar dimuka	**13.749.995**	2g,11	36.686.670	*Prepaid expenses* •
Jumlah aset lancar	**4.763.293.984**		4.274.686.651	***Total current assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
• Aset tetap, neto	**3.934.861.032**	2h,12	3.536.545.495	*Fixed assets, net* •
Jumlah aset tidak lancar	**3.934.861.032**		3.536.545.495	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET	**8.698.155.016**		7.811.212.146	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas lancar				***Current liabilities***
• Utang usaha	**9.572.088**	2k,13	-	*Accounts payable* •
• Utang biaya	**893.902.035**	14	665.278.676	*Accrueds expense* •
• Pendapatan diterima dimuka	**88.948.943**	15	102.434.310	*Unearned revenue* •
• Utang pajak	**546.213.024**	2d,6a	579.113.929	*Taxes payable* •
Jumlah liabilitas lancar	**1.538.636.090**		1.346.826.915	***Total current liabilities***
Liabilitas tidak lancar				***Non-current liabilities***
• Utang bank	**172.088.813**	16	845.806.339	*Bank loan* •
Jumlah liabilitas tidak lancar	**172.088.813**		845.806.339	***Total non-current liabilities***
Jumlah liabilitas	**1.710.724.903**		2.192.633.254	***Total liabilities***
Ekuitas				***Equity***
• Modal saham	**500.000.000**	17	500.000.000	*Share capital* •
• Laba ditahan	**6.487.430.113**		5.118.578.892	*Retained earnings* •
Jumlah ekuitas	**6.987.430.113**		5.618.578.892	***Total equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**8.698.155.016**		7.811.212.146	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Laba sebelum pajak penghasilan	**1.968.160.261**	2.117.799.230	*Profit before income tax expense*
Penyesuaian untuk:			*Adjustments for:*
• Penyusutan aset tetap	**853.411.095**	592.409.252	*Depreciation of fixed assets* •
Arus kas sebelum perubahan modal kerja	**2.821.571.356**	2.710.208.482	*Cash flows before changes in working capital*
Perubahan modal kerja:			*Changes in working capital:*
• Piutang usaha	**(337.428.891)**	(240.530.542)	*Accounts receivable* •
• Piutang lain-lain	**(446.723.524)**	(156.430.124)	*Other receivables* •
• Persediaan	**(427.912.502)**	-	*Inventories* •
• Uang muka	**105.739.889**	(729.097.208)	*Prepayments* •
• Biaya dibayar dimuka	**22.916.674**	(36.666.670)	*Prepaid expenses* •
• Utang usaha	**9.572.088**	(145.500.000)	*Accounts payable* •
• Utang biaya	**228.623.359**	315.905.053	*Accrued expenses* •
• Pendapatan diterima dimuka	**(13.485.367)**	35.087.838	*Unearned revenue* •
• Utang pajak	**(32.900.905)**	160.317.956	*Taxes payable* •
Arus kas sebelum pajak penghasilan	**1.929.972.177**	1.913.294.785	*Cash flows before income tax*
• Pembayaran beban pajak penghasilan	**(599.309.040)**	(544.366.360)	*Payment for income tax expense* •
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**1.330.663.137**	1.368.928.425	***Net cash flows provide from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
• Perolehan aset tetap	**(1.251.726.631)**	(1.446.570.201)	*Acquisition of fixed assets* •
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.251.726.631)**	(1.446.570.201)	***Net cash flows used for investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
• Dividen	**-**	(1.338.335.330)	*Dividend* •
• Utang bank	**(673.717.526)**	121.839.480	*Bank loan* •
Arus kas neto diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(673.717.526)**	(1.216.495.850)	***Net cash flows provide from / (used for) financing activities***
Peningkatan / (penurunan) neto kas dan setara kas	**(594.781.020)**	(1.294.137.626)	***Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas, awal tahun	**1.110.346.393**	2.404.484.019	***Cash and cash equivalents, beginning of year***
Kas dan setara kas, akhir tahun	**515.565.373**	1.110.346.393	***Cash and cash equivalents, end of year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. UMUM

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) (perusahaan), didirikan di Indonesia berdasarkan akta notaris Zulkhainen, SH nomor 39 tanggal 24 April 2009. Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-42477.AH.01.01 tahun 2009. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Zulkhainen, S.H., M.H., No. 16 tanggal 16 Februari 2024 sehubungan dengan perubahan nama PT Karya Karimun Mandiri diubah menjadi PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) dan perubahan maksud dan tujuan. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02.TAHUN 2024 pada tanggal 21 February 2024. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris berdasarkan akta No. 35 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris Zulkahainen, S.H., M.H. Akta perubahan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0353115 tanggal 21 Oktober 2025.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pelabuhan dalam arti seluas-luasnya.

Kantor perusahaan (kantor pusat) saat ini terletak dijalan Pelabuhan Cargo Prit Rempak, Kelurahan Sungan Raya, Kecamatan Meral - Kabupaten Karimun. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2009.

Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai

• Komisaris Utama	Abdullah
• Komisaris	Sri Rezeki
• Komisaris	Sjarifuddin
• Direktur Utama	Liza Bharlyantie Hilsya
• Direktur	Zondervan
• Direktur	-

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Entitas disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EP ini merupakan penerapan pertama kali oleh Entitas.

Sebelum penerapan SAK EP, Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang disajikan sebagai angka pembanding, telah disajikan kembali agar sesuai dengan penerapan SAK EP untuk tujuan perbandingan.

1. GENERAL

Establishment and the Company's General Information

PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 39 dated April 24, 2009 of Zulkhainen, S.H. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-42477.AH.01.01 dated April 24, 2009. The most recent amendment Articles of Association of the Company by Notarial Deed No. 16 dated February 16, 2024 of Zulkhainen, S.H., M.H., concerning with the change of name of PT Karya Karimun Mandiri which was changed to PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) and changes to the intent and purpose. That deed of amendment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0011603.AH.01.02.TAHUN 2024 dated February 21, 2024.The latest amendment to the Company's Articles of Association concerning changes to the Board of Directors and Board of Commissioners is based on Deed No. 35 dated October 21, 2025, drawn up before Notary Zulkahainen, S.H., M.H. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0353115 dated October 21, 2025.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to engaged in the field of ports in the broadest sense.

The company office (head office) is currently located on the road of Prit Rempak Cargo Port, Sungan Raya Village, Meral District - Karimun Regency. The company started its commercial activities in 2009.

Commissioner, Director and Employees

The composition of the Company's Commissioner and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as

Abdullah	*President Commissioner* •
Raja Syirwansyah	*Commissioner* •
Wijoyo Kusumo	*Commissioner* •
Yuwono	*President Director* •
Haji Aprilzal	*Director* •
Liza Bharlyantie Hilsya	*Director* •

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Presentation of the Financial Statements

The Entity's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) applicable in Indonesia. This represents the Entity's first-time adoption of SAK EP.

Prior to the adoption of SAK EP, the Entity prepared its financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP).

The financial statements for the year ended 31 December 2024, which are presented as comparative figures, have been restated to conform with the adoption of SAK EP for comparative purposes.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar lain sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar selama

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Entitas adalah Rupiah, yang sekaligus merupakan mata uang fungsional Entitas. Seluruh transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan

Pembukaan Entitas diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs spot pada tanggal terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang timbul diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi tahun berjalan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau masih harus diterima dan disajikan secara bruto, setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang dipungut atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, tidak diakui sebagai pendapatan.

Apabila pendapatan diterima secara tangguh, pendapatan diakui sebesar nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat bunga yang berlaku (imputed interest rate).

Penjualan Jasa

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian selama periode pelaporan, apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

a) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
b) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke Entitas;
c) penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
d) biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2. *BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES*
(Continued)

The financial statements are prepared on the historical cost basis, except for certain accounts that are measured on other bases, as disclosed in the relevant accounting policies.

The financial statements are prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, which is prepared based on cash receipts and payments during the reporting period.

b. Presentation Currency, Foreign Currency Transactions and Balances

The Entity's presentation currency is the Indonesian Rupiah, which is also the Entity's functional currency. All transactions and account balances are presented in thousands of Rupiah, unless otherwise stated.

The accounting records of the Entity are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using the spot exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using the exchange rates prevailing at the reporting date. Exchange differences arising from such translations are recognized as foreign exchange gains or losses in the current year's profit or loss.

c. Revenue and Expenses

Revenue is recognized at the fair value of the consideration received or receivable and is presented on a gross basis, net of sales discounts and volume rebates. Amounts collected on behalf of third parties, such as value-added tax, are not recognized as revenue.

When revenue is received on a deferred basis, it is recognized at the present value of all future receipts, determined using the applicable interest rate (imputed interest rate).

Sale of Services

Revenue from the sale of services is recognized using the percentage-of-completion method over the reporting period, provided that all of the following conditions are met:

a) the amount of revenue can be measured reliably;
b) it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Entity;
c) the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
d) the costs incurred, or to be incurred, in respect of the transaction can be measured reliably.

Expenses are recognized when incurred (on an accrual basis).

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Pajak penghasilan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak pada periode mendatang pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, saldo bank, dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi

Kas dan setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau tujuan lainnya.

f. Piutang

Sebagian besar penjualan dilakukan berdasarkan persyaratan kredit normal dan piutang tersebut tidak dikenakan bunga. Jika kredit diperpanjang melebihi persyaratan kredit normal, piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah tercatat piutang usaha dan piutang lain ditegaskan untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa jumlah tersebut tidak dapat dipulihkan. Jika demikian, kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran yang dilakukan di muka atas beban tertentu yang manfaat ekonomisnya akan diperoleh di masa mendatang dan disajikan sebagai aset lancar.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi secara sistematis selama periode manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan ke laporan laba rugi sesuai dengan periode penggunaannya.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Income tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and their corresponding tax bases.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences that will result in taxable amounts in future periods when the carrying amounts of the related assets or liabilities are recovered or settled.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the deferred tax asset to be recovered.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks, and time deposits with maturities of three months or less from the date of placement, which are not pledged as collateral and are not subject to any restrictions on use.

Cash and cash equivalents are held to meet short-term cash commitments rather than for investment or other purposes.

f. Accounts Receivable

Most sales are made under normal credit terms and the related receivables are non-interest bearing. When credit terms are extended beyond normal credit terms, the receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

At the end of each reporting period, the carrying amounts of trade receivables and other receivables are assessed to determine whether there is objective evidence that they are impaired. If such evidence exists, an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses represent advance payments made for certain expenses, the economic benefits of which will be received in future periods, and are presented as current assets.

Prepaid expenses are amortized systematically over their benefit periods using the straight-line method and are charged to profit or loss in accordance with the periods in which they are utilized.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dibebankan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, selama estimasi umur manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Tarif penyusutan tahunan yang digunakan adalah sebagai berikut:

	Tahun / *Years*	Persen / *Rates*	
Peralatan Kantor	4	25%	*Office equipments*
Peralatan Pelabuhan	4-20	5% - 25%	*Dock Equipments*
Kendaraan	4	25%	*Vehicles*

Jika terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam estimasi umur manfaat, nilai residu, atau metode penyusutan, maka penggunaan aset tersebut direvisi secara prospektif untuk mencerminkan estimasi yang baru.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang bersifat rutin, seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Sebaliknya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau memberikan manfaat ekonomis di masa depan dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dihentikan penggunaannya, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penghentian aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

i. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap tanggal pelaporan, aset tetap, aset takberwujud dan investasi pada entitas asosiasi ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami kerugian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi kemungkinan penurunan nilai, jumlah terpulihkan dari aset yang terpergai (atau kelompok aset terkait) diestimasi dan dibandingkan dengan jumlah tercatat. Jika jumlah terpulihkan estimasi adalah lebih rendah, maka jumlah tercatat akan dikurangi ke jumlah terpulihkan estimasi dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Depreciation is charged so as to allocate the cost of the assets, less their residual values, over their estimated useful lives using the straight-line method. The annual depreciation rates applied are as follows:

If there is a significant indication of changes in the estimated useful lives, residual values, or depreciation method, the depreciation of the assets is revised prospectively to reflect the new estimates.

Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment that are of a routine nature, such as repairs and maintenance costs, are charged to profit or loss when incurred.

Conversely, expenditures that extend the useful life of an asset or provide future economic benefits in the form of increased capacity, improved quality of output, or enhanced performance standards are capitalized as part of the carrying amount of property, plant and equipment.

Property, plant and equipment that are no longer in use or are disposed of are derecognized, and any gain or loss arising from the disposal or retirement of such assets is recognized in the current year's profit or loss.

i. Impairment of Assets

At each reporting date, property, plant and equipment, intangible assets, and investments in associates are reviewed to determine whether there is any indication that these assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the impaired asset (or related group of assets) is estimated and compared with its carrying amount. If the estimated recoverable amount is lower, the carrying amount is reduced to the estimated recoverable amount and the impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset (Lanjutan)
Serupa dengan hal tersebut, pada setiap tanggal pelaporan, persediaan dinilai untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah tercatat setiap item persediaan (atau kelompok item serupa) dengan harga jualnya dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika item persediaan (atau kelompok item serupa) mengalami penurunan nilai, jumlah tercatatnya dikurangi ke harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Jika suatu kerugian penurunan nilai kemudian dibalik, maka jumlah tercatat aset (atau kelompok aset terkait) ditingkatkan ke estimasi revisi atas jumlah terpulihkannya (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual), dalam kasus persediaan), tetapi tidak melebihi jumlah yang akan ditentukan seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut (kelompok aset terkait) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba

j. Sewa
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset sewaan kepada Grup. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Hak atas aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai aset Grup pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai sekarang pembayaran sewa minimum) pada saat inspeksi sewa. Liabilitas kepada pesewa tercatat dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dilakukan antara biaya keuangan dan pengurangan kewajiban sewa sehingga tercapai suku tingkat bunga konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan dalam menghitung laba atau rugi. Aset yang diakui dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, dan depresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang

Utang sewa dalam sewa operasi dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama jangka waktu sewa yang bersangkutan.

k. Utang Usaha
Utang usaha adalah kewajiban berdasarkan persyaratan kredit normal dan tidak dikenakan bunga. Utang usaha dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs termasuk sebagai penghasilan lain atau beban lain.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

***i. Impairment of Assets** (Continued)*
Similarly, at each reporting date, inventories are assessed for impairment by comparing the carrying amount of each inventory item (or group of similar items) with its selling price less the costs of completion and selling. If an inventory item (or group of similar items) is impaired, its carrying amount is written down to its selling price less the costs of completion and selling, and the impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

If an impairment loss is subsequently reversed, the carrying amount of the asset (or related group of assets) is increased to the revised estimate of its recoverable amount (or, in the case of inventories, to its selling price less the costs of completion and selling), but not exceeding the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or related group of assets) in prior years. The reversal of the impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

j. Leases
Leases are classified as finance leases if the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset to the Group. All other leases are classified as operating leases.

Assets held under finance leases are recognized as the Group's assets at the fair value of the leased asset (or, if lower, at the present value of the minimum lease payments) at the inception of the lease. The corresponding liability to the lessor is presented in the statement of financial position as a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance charges and the reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in profit or loss. Assets recognized under finance leases are included in property, plant and equipment and are depreciated and assessed for impairment in the same manner as owned assets.

Lease payments under operating leases are recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

k. Accounts Payable
Accounts payable are obligations under normal credit terms and are non-interest bearing. Accounts payable denominated in foreign currencies are translated into Indonesian Rupiah using the exchange rates prevailing at the reporting date. Any resulting foreign exchange gains or losses are included in other income or other expenses.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

l. Pinjaman bank dan cerukan
Beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif dan termasuk sebagai biaya keuangan.

m. Imbalan kerja
Liabilitas untuk kewajiban imbalan kerja berkaitan dengan pembayaran jangka panjang yang disyaratkan oleh pemerintah. Seluruh staf purnawaktu, tidak termasuk direksi, tercakup dalam program ini. Pembayaran dilakukan sebesar 5 persen dari gaji (ditetapkan untuk dua belas bulan sebelum pembayaran) pada akhir dari setiap lima tahun kontrak kerja. Pembayaran dilakukan sebagai bagian dari gaji bulan Desember di tahun kelima. Perusahaan tidak mendanai kewajiban ini di muka.

Biaya dan kewajiban Perusahaan untuk melakukan pembayaran jangka panjang kepada karyawan diakui selama periode jasa karyawan. Biaya dan kewajiban dihitung menggunakan metode projected unit credit, dengan ciri-ciri, dengan asumsi kenaikan gaji tahunan rata-rata 4 persen, dengan perputaran karyawan berdasarkan pengalaman karyawan Perusahaan, yang didiskontokan dengan menggunakan imbal hasil pasar kini (current market yield) untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi.

n. Kewajiban Kontinjensi
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Perusahaan. Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai liabilitas. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, termasuk uraian mengenai sifat kewajiban dan estimasi dampak keuangan, jika praktis dilakukan.

2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

l. Bank Loans and Overdrafts
Interest expense is recognized using the effective interest method and is included as finance costs.

m. Employee Benefits
The liability for employee benefit obligations relates to long-term payments required by government regulations. All full-time staff, excluding directors, are covered under this program. Payments are made at an amount equal to 5 percent of salary (based on the twelve months preceding the payment) at the end of each five-year employment contract period. The payment is made as part of the December salary in the fifth year. The Company does not fund this obligation in advance.

The Company's costs and obligations to provide long-term employee benefit payments are recognized over the employees' service periods. The costs and obligations are determined using the projected unit credit method, based on an assumed average annual salary increase of 4 percent and employee turnover rates derived from the Company's historical experience, and are discounted using current market yields on high-quality corporate bonds.

n. Contingent Liabilities
Contingent liabilities are possible obligations arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future events not wholly within the control of the Company. The Company does not recognize contingent liabilities as liabilities. Contingent liabilities are disclosed at the reporting date, including a description of the nature of the obligation and an estimate of its financial effect, where practicable.

3. PENDAPATAN / *3. REVENUE*

	2025	2024	
• Pass penumpang	11.264.861.250	10.699.144.500	*Passenger pass* •
• Gerai	1.667.568.705	37.058.700	*Outlet* •
• Jasa labuh, tambat dan dermaga	1.529.991.427	1.504.144.198	*Berthing, mooring and dock services* •
• Pass masuk dan inap kendaraan	985.460.750	1.095.871.300	*Vehicle entry pass and stay* •
• Bongkar muat	831.408.238	558.363.935	*Unloading and loading* •
• Sewa	619.211.664	671.035.026	*Rental* •
• Jasa sharing	800.682.071	4.006.000	*Sharing service TKBM* •
• Penginapan	348.030.073	570.404.313	*Lodging* •
• Jasa layanan dan ekspedisi	48.743.640	44.244.020	*Service and expedition charge* •
• Penjualan makanan dan minuman	12.694.000	192.664.186	*Frozen foods and drinks* •
• Lainnya	26.941.718	188.356.056	*Others* •
Jumlah pendapatan	18.135.593.536	15.565.492.236	*Total revenue*

4. BIAYA OPERASIONAL / *4. OPERATING EXPENSES*

	2025	2024	
• Gaji dan tunjangan	6.654.790.117	6.169.440.331	*Salaries and allowances* •
• Perbaikan dan pemeliharaan	1.282.142.189	1.178.778.685	*Repairs and maintenance* •
• Pajak	1.072.986.420	910.451.282	*Taxes* •
• Persediaan gerai	1.490.220.590	-	*Outlet inventories* •
• Jasa agen	1.042.300.000	788.075.000	*Agent service* •
• Utilitas	722.169.864	742.839.108	*Utilities* •
• Beban kegiatan	731.390.333	517.373.070	*Activity* •
• Perlengkapan kantor	448.832.521	524.544.701	*Office supplies* •
• Penyusutan aset tetap	853.411.095	592.409.252	*Depreciation of fixed assets* •
• Perjalanan dinas	545.423.665	459.797.569	*Travelling* •
• Transportasi	242.646.932	161.382.825	*Transportation* •
• Profesional	45.000.000	110.995.000	*Professional fees* •
• Sumbangan	139.065.970	87.581.641	*Donation* •
• Keamanan dan pembersihan	78.968.000	76.045.500	*Security and cleaning* •
• Jamuan	48.643.848	71.171.087	*Entertainment* •
• Kompensasi karyawan	103.829.170	69.596.800	*Employee compensation* •
• Sewa	92.916.675	58.333.330	*Rent* •
• Piutang tak tertagih	17.042.103	20.000.000	*Bad debt* •
• Operasional lainnya	524.354.711	673.093.319	*Others operating* •
Jumlah biaya operasional	16.136.134.203	13.411.908.500	*Total operating expenses*

5. PENDAPATAN/(BIAYA) LAIN-LAIN / *5. OTHER INCOME/(EXPENSES)*

	2025	2024	
• Bunga deposito	24.683.138	25.886.952	*Deposit interest* •
• Bunga bank	5.771.939	13.225.964	*Bank interest* •
• Bunga pinjaman	(56.206.774)	(63.823.040)	*Loan interest* •
• Administrasi bank	(4.531.402)	(8.343.651)	*Bank administration* •
• Pajak giro	(1.015.973)	(2.740.731)	*Interest tax* •
• Pendapatan lainnya	-	-	*Other incomes* •
Jumlah pendapatan/(biaya) lain-lain	(31.299.072)	(35.784.506)	*Total other income/(expenses)*

6. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Utang pajak / ***a. Taxes payable***

	2025	2024	
• Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	**48.785.545**	107.114.546	*Income tax article 4(2)* •
• Pajak penghasilan pasal 21	**25.106.286**	33.806.312	*Income tax article 21* •
• Pajak daerah	**17.673.113**	16.994.487	*Local tax* •
• Pajak penghasilan badan	**454.648.080**	421.198.584	*Corporate income tax* •
Jumlah utang pajak	**546.213.024**	579.113.929	*Total taxes payable*

b. Biaya/(manfaat) pajak penghasilan / ***b. Income tax expense/(benefit)***

	2025	2024	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	**1.968.160.261**	2.117.799.230	*Profit/(loss) before income tax*
Koreksi fiskal			*Fiscal correction*
• Positif	**1.849.855.786**	1.565.934.312	*Positive* •
• Negatif	**(679.201.006)**	(734.603.672)	*Negative* •
Taksiran laba kena pajak	**3.138.815.041**	2.949.129.870	*Estimated taxable income*
Penghasilan kenak pajak, pembulatan	**3.138.815.000**	2.949.129.000	*Taxable income, rounded*
PPh terutang	**599.309.040**	544.366.360	*Income taxable*
Dikurang kredit pajak			*Less prepaid tax*
• Uang muka PPh pasal 23	**(144.660.960)**	(123.167.776)	*Withholding tax article 23* •
Utang pajak penghasilan	**454.648.080**	421.198.584	*Corparate income tax payable*

7. PIUTANG USAHA / *ACCOUNTS RECEIVABLE*

	2025	2024	
• PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)	**1.156.290.343**	622.571.364	*PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)* •
• PT Rempak Karimun Indonesia	**30.876.596**	30.876.596	*PT Rempak Karimun Indonesia* •
• PT Sarana Dwi Persada	**-**	-	*PT Sarana Dwi Persada* •
• PT Saipem Indonesia	**17.042.103**	17.042.103	*PT Saipem Indonesia* •
• Dinas Kesehatan	**-**	156.065.000	*Dinas Kesehatan* •
• PT Gemilang Asia Sejahtera	**5.767.221**	52.650.686	*PT Gemilang Asia Sejahtera* •
• PT. Marine Master	**-**	-	*PT. Marine Master* •
• PT. Cahaya Nanga Galang Mustika	**-**	29.163.450	*PT. Cahaya Nanga Galang Mustika* •
• Lainnya (di bawah Rp 10.000.000)	**241.085.987**	188.222.057	*Others (below IDR 10.000.000)* •
Jumlah piutang usaha	**1.451.062.250**	1.096.591.256	*Total accounts receivable*
• Dikurangi cadangan kerugian piutang	**(17.042.103)**	-	*Less allowance for doubtful accounts* •
Jumlah piutang usaha, neto	**1.434.020.147**	1.096.591.256	*Total accounts receivable, net*

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *OTHER RECEIVABLES*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan piutang karyawan sebesar Rp 615.228.648,- dan Rp 168.505.124,-.

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents employee receivable amounting to Rp 615,228,648,- and Rp 168,505,124.-, respectively.

9. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan saldo persediaan barang dagang TPID dengan jumlah sebesar Rp 427.812.502.

As of December 31, 2025, this account represents the balance of TPID's merchandise inventory amounting to Rp. 427,912,502.

10. PEMBAYARAN DIMUKA / *10. PREPAYMENT*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan uang muka atas perawatan dan perbaikan pontoon, sumur bor, dan perjalanan dinas dengan jumlah sebesar Rp 756.817.319,- dan Rp 862.557.208,-.

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents prepayments for maintenance and repair of pontoon, well and travelling activities amounted to Rp 756,817,319.- and Rp 862,557,208.-, respectively.

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *11. PREPAID EXPENSES*

	2025	2024	
• Bangunan	2.083.325	25.000.000	*Building* •
• Lahan parkir	11.666.670	11.666.670	*Parkir lot* •
Jumlah beban dibayar dimuka	13.749.995	36.666.670	*Total prepaid expenses*

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

	2024	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	2025	
Harga perolehan					***Cost***
• Peralatan Kantor	2.168.532.700	76.094.000	-	2.244.626.700	*Office equipments* •
• Peralatan Pelabuhan	4.711.651.201	1.175.632.631	-	5.887.283.832	*Dock Equipments* •
• Kendaraan	216.648.000	-	-	216.648.000	*Vehicles* •
Jumlah harga perolehan	7.096.831.901	1.251.726.631	-	8.348.558.532	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
• Peralatan Kantor	1.972.598.192	93.104.421	-	2.065.702.613	*Office equipments* •
• Peralatan Pelabuhan	1.371.040.214	760.306.673	-	2.131.346.887	*Dock Equipments* •
• Kendaraan	216.648.000	-	-	216.648.000	*Vehicles* •
Jumlah akumulasi	3.560.286.406	853.411.094	-	4.413.697.500	*Total accumulated*
Nilai buku neto	**3.536.545.495**			**3.934.861.032**	***Net book value***

	2023	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	2024	
Harga perolehan					***Cost***
• Peralatan Kantor	2.098.712.700	69.820.000	-	2.168.532.700	*Office equipments* •
• Peralatan Pelabuhan	3.334.901.000	1.376.750.201	-	4.711.651.201	*Dock Equipments* •
• Kendaraan	216.648.000	-	-	216.648.000	*Vehicles* •
Jumlah harga perolehan	5.650.261.700	1.446.570.201	-	7.096.831.901	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
• Peralatan Kantor	1.892.484.624	80.113.568	-	1.972.598.192	*Office equipments* •
• Peralatan Pelabuhan	858.744.530	512.295.684	-	1.371.040.214	*Dock Equipments* •
• Kendaraan	216.648.000	-	-	216.648.000	*Vehicles* •
Jumlah akumulasi	2.967.877.154	592.409.252	-	3.560.286.406	*Total accumulated*
Nilai buku neto	**2.682.384.546**			**3.536.545.495**	***Net book value***

Berdasarkan hasil penelaahan aset tetap pada akhir tahun, Perusahaan berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai atas aset tetap.

Based on review of fixed assets at the end of the year, the Company's believes that there are no events or conditions that may indicate impairment of fixed assets.

13. UTANG USAHA / *13. ACCOUNTS PAYABLE*

Pada tanggal 31 Desember 2025, utang usaha sebesar Rp 9.572.088 merupakan utang atas pengembalian kelebihan potongan BPJS JHT karyawan untuk periode November 2025.

On December 31, 2025, trade payables amounting to Rp 9,572,088 represent the refund of employees JHT deductions for November 2025.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *14. ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
• Pihak ke tiga	**488.943.765**	46.243.164	*Pihak ke tiga* •
• Dividen	**-**	438.335.331	*Dividend* •
• Usaha	**105.226.289**	-	*Usaha* •
• Kontribusi tidak tetap	**177.077.032**	177.077.032	*Irregular contribution* •
• Titipan sharing KSO TPR	**122.654.949**	3.623.149	*TPR KSO sharing deposit* •
Jumlah beban yang masih harus dibayar	**893.902.035**	665.278.676	*Total accured expenses*

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *15. UNEARNED REVENUE*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan uang muka atas sewa ruangan ATM, gudang, dan sewa kantin masing-masing sebesar Rp 88.948.943,- dan Rp 102.434.310,-.

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents down payment on rental ATM room, storage, and canteen amounted to Rp 88,948,943,- and Rp 102,434,310,-, respectively.

16. UTANG BANK / *16. BANK LOAN*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, utang bank sebesar Rp 172.088.813,- dan Rp 845.806.339,- merupakan pinjaman untuk pembelian barang-barang perlengkapan hotel Tanjung Gelam dan renovasi pelabuhan tanjung maqom.

On December 31, 2025 and 2024, the bank debt amounting to Rp 172,088,813,- and Rp 845,806,339.- represents a loan for the purchase of equipment for the Tanjung Gelam hotel and renovation of harbor tanjung maqom.

Agunan tambahan berupa Deposito sebesar Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) No. Rekening 111-71-00001 No. Seri Deposito: 2022-003636 di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) KC Tanjung Balai Karimun.

Cash Collateral in the form of a deposito of IDR 1,000,0000,000.- (one billion rupiah) No. Account 111-71-00001 No. Deposito Series: 2022-003636 at PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) KC Tanjung Balai Karimun.

17. MODAL SAHAM / *17. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 dan 2024 as follows:

Pemegang saham / *Shareholders*	% kepemilikan / *% ownership*	Jumlah saham / *Number of shares*	Jumlah / *Amount* dalam / in IDR
• Pemerintah Daerah kabupaten Karimun	100%	500	500.000.000

18. KAS DAN SETARA KAS / *18. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
• Kas di tangan	**351.055.361**	252.833.701	*Cash on hand* •
• Kas di bank			*Cash in bank* •
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank Riau Kepri Syariah	**57.422.691**	623.665.650	*PT Bank Riau Kepri Syariah*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	**34.722.329**	74.358.039	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	**28.982.504**	116.675.637	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk*
PT BPR Karimun Sejahtera	**43.382.488**	42.813.366	*PT BPR Karimun Sejahtera*
Jumlah kas di bank	**164.510.012**	857.512.692	*Total cash in bank*
Jumlah kas dan setara kas	**515.565.373**	1.110.346.393	*Total cash and cash equivalents*

19. DEPOSITO BERJANGKA / *19. TIME DEPOSITS*

	2025	2024	
• PT Bank Riau Kepri Syariah	**1.000.000.000**	1.000.000.000	*PT Bank Riau Kepri Syariah* •
Jumlah deposito berjangka	**1.000.000.000**	1.000.000.000	*Total time deposit*

20. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 29 April 2026.

20. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements have been authorized for issue by the Directors of the Company, as the party responsible for the preparation and completion of the financial statements, on April 29, 2026.

LAPORAN BUMD

PERUMDA
TIRTA MULIA KARIMUN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

TIRTA MULIA KARIMUN

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
TIRTA MULIA KARIMUN
DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	-
Laporan Auditor Independen	-
Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun Yang Beakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	2
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	3
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	4
Catatan Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	5 - 22

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA MULIA KARIMUN
Jl. Pramuka No. 58 Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun-Kepulauan Riau
Telp (0777) 324717 email : perumdatmk@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ferry Kurniawan, S.H.
   Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 58, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661
   Alamat Domisili / sesuai KTP atau Kartu Identitas lain : Jl. Kampung Tengah Rt.003/RW.002 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Tirta Mulia Karimun;
2. Laporan keuangan Perumda Tirta Mulia Karimun telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Perumda Tirta Mulia Karimun telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perumda Tirta Mulia Karimun tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perumda Tirta Mulia Karimun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karimun, 22 April 2026

Ferry Kurniawan, S. H.
Direktur

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HARYONO, JUNIANTO dan ANWAR
No. Izin : 469/KM.1/2024

Nomor : 00123/2.1465/AU.8/05/1310-1/1/IV/2026

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
TIRTA MULIA KARIMUN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN** ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Mulai tahun buku 2025 perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penerapan SAK EP tersebut sesuai dengan keputusan Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai memberlakukan SAK EP untuk penyusunan laporan keuangan mulai 1 Januari 2025. Oleh karena itu untuk tujuan perbandingan laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali dengan pengaruh seperti dijelaskan dalam catatan 3 atas laporan keuangan.

Rukan Sentra Pemuda Kav. 18, Jl. Pemuda No. 61, Jakarta 13220
Telp. (021) 4755832, 4755842
e-mail : office@kaphja.com / kaphja@cbn.net.id
Website : www.kaphja.com

Hal Lain

Laporan keuangan **PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN** tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor 00054/3.0260/AU.2/05/0785-5/1/IV/2025 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 9 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

- Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Haryono, Junianto dan Anwar

00123

Svaiful Anwar, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik : *AP.1310*

22 April 2026

PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	CATATAN	2025	2024 (Disajikan Kembali)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	*2c, 5*	1.440.695.995	1.945.845.383
Piutang Usaha	*2e, 6, 7*	2.676.817.601	2.299.912.589
Piutang Lain-lain	*2f, 8*	27.633.000	27.633.000
Persediaan	*2g, 9*	253.160.200	342.608.204
Pajak dibayar dimuka	*13a*	8.598.410	5.620.660
Jumlah Aset Lancar		**4.406.905.206**	**4.621.619.836**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	*2i, 10*	2.936.825.688	3.033.218.183
Aset Lain - lain	*2o, 11*	11.042	77.291
Aset Pajak Tangguhan	*13c*	155.394.819	62.587.041
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.092.231.549**	**3.095.882.515**
JUMLAH ASET		**7.499.136.755**	**7.717.502.351**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	*12*	6.125.763	1.253.660
Utang Pajak	*13b*	274.800.107	508.989.309
Utang Lain - Lain	*14*	5.547.117	4.438.117
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun			
Utang Bank	*15*	68.235.284	79.510.508
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**354.708.270**	**594.191.594**
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun			
Utang Bank	*16*	168.600.616	215.825.927
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**168.600.616**	**215.825.927**
JUMLAH LIABILITAS		**523.308.886**	**810.017.521**
Ekuitas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	*17*	2.283.556.796	2.283.556.796
Hibah	*17*	190.451.000	18.050.000
Laba/(Rugi) Ditahan	*18*	4.501.820.072	4.605.878.035
Jumlah Ekuitas		**6.975.827.868**	**6.907.484.831**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.499.136.755**	**7.717.502.351**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	CATATAN	2025	2024 (Disajikan Kembali)
PENDAPATAN USAHA	*2l, 19*		
Pendapatan Air		12.506.827.300	11.771.193.000
Pendapatan Non Air		852.400.400	1.196.947.626
Pendapatan Lain - lain		15.016.586	23.622.006
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		**13.374.244.286**	**12.991.762.632**
BEBAN USAHA	*2l, 20*		
Beban Pegawai		6.416.263.340	5.396.296.217
Beban Energi		-	-
Beban Bahan Kimia		956.248.765	782.703.750
Beban Air Baku		7.240.348	3.499.690
Beban Pemeliharaan Sumber Air		2.457.760.180	2.487.226.655
Beban Operasional Lainnya		37.528.889	90.089.905
Beban Penyusutan Aset Tetap & Amortisasi		653.724.534	588.233.195
Beban Penyisihan Piutang		421.853.538	284.486.551
Beban Umum dan Administrasi		1.403.649.570	1.339.790.589
JUMLAH BEBAN USAHA		**12.354.269.165**	**10.972.326.551**
LABA (RUGI) USAHA		**1.019.975.121**	**2.019.436.081**
Kerugian Luar Biasa		-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**1.019.975.121**	**2.019.436.081**
Pajak Penghasilan Badan	*2m, 13b*	(181.992.328)	(368.082.914)
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**837.982.793**	**1.651.353.167**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA		-	-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**837.982.793**	**1.651.353.167**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

NO.	URAIAN	CATATAN	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	LABA (RUGI)	HIBAH	TOTAL
	Saldo 1 Januari 2024		**2.283.556.796**	**4.387.945.912**	**18.050.000**	**6.689.552.708**
	Koreksi / Eliminasi		-	(387.774.354)	-	(387.774.354)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	-
	Setoran Dividen		-	(1.045.648.714)	-	(1.045.648.714)
	Hibah		-	-	-	-
	Koreksi / Eliminasi atas Penyisihan Piutang		-	62.587.041	-	62.587.041
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	1.588.768.149	-	**1.588.768.149**
	Saldo per 31 Desember 2024		**2.283.556.796**	**4.605.878.034**	**18.050.000**	**6.907.484.830**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	-
	Setoran Dividen		-	(703.593.753)	-	(703.593.753)
	Pembayaran Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas		-	(79.438.407)	-	(79.438.407)
	Pembayaran Jasa Produksi		-	(159.010.621)	-	(159.010.621)
	Hibah		-		172.401.000	172.401.000
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	837.984.818	-	837.984.818
	Saldo per 31 Desember 2025		**2.283.556.796**	**4.501.820.071**	**190.451.000**	**6.975.827.867**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Yang Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih Setelah Pajak	**837.984.818**	**1.651.355.191**
Penyesuaian untuk:		
Penyisihan Piutang Usaha	421.853.538	284.486.551
Penyusutan Aset Tetap	653.658.286	585.571.948
Amortisasi	66.250	66.250
Laba Bersih sebelum Perubahan Modal Kerja	**1.913.562.892**	**2.521.479.940**
Perubahan Modal Kerja		
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(798.758.549)	(609.427.232)
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Lainnya	-	-
- Penurunan (Kenaikan) Persediaan	89.448.004	(183.965.752)
- Penurunan (Kenaikan) Pajak Dibayar Dimuka	(2.977.750)	(5.620.660)
- Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	-	-
- Penurunan (Kenaikan) Aset Pajak Tangguhan	(92.807.778)	(455.115.026)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	4.872.103	(16.762.725)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Lainnya	1.109.000	(167.500)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(234.189.202)	24.557.415
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**(1.033.304.173)**	**(1.246.501.480)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Penambahan/Pembelian Aset Tetap	(557.315.792)	(1.031.142.757)
- Pengurangan/(Penambahan) Aset Lain-Lain	50.000	2.075.806
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(557.265.792)**	**(1.029.066.951)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Utang Bank	(58.500.535)	177.356.875
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
- Hibah	172.401.000	-
- Koreksi Saldo Laba (Rugi)	-	4.753.631
- Setoran Dividen	(703.593.753)	(1.045.648.714)
- Pembayaran Tantiem untuk dewan direksi	(79.438.407)	-
- Pembayaran Jasa Produksi	(159.010.621)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**(828.142.316)**	**(863.538.208)**
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(505.149.388)**	**(617.626.699)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.945.845.383	2.563.472.082
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.440.695.995**	**1.945.845.383**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA TIRTA MULIA KARIMUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dan untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Mulia Karimun dahulu bernama PDAM Tirta Mulia Karimun adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih untuk memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Di dirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Serta perubahan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun. Perumda Tirta Mulia Karimun bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum dalam memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

b. Modal dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor

Modal Perumda terdiri atas semua Aktiva dan Pasiva pada saat pendirian dan penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan persetujuan DPRD, modal tidak terpecah dalam lembar saham dan keseluruhannnya merupakan milik Pemerintah Daerah.

c. Susunan Pengurus

Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun Kabupaten Karimun di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 338 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun Periode 2021-

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun nomor 829 tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun Periode 2024-2028.

Susunan Pengurus Perumda Tirta Mulia Karimun Kabupaten Karimun per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

			2025
o	Dewan Pengawas	:	Tohap Siahaan, S.E., M.M. Pub
o	Direktur	:	Herry Budhiarto, ST
			2024
o	Dewan Pengawas	:	Plt. Tohap Siahaan, S.E., M.M. Pub
o	Direktur	:	Herry Budhiarto, ST

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perusahaan disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan pada Perusahaan berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan keuangan

Efektif 1 Januari 2025, Perusahaan telah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ("SAK EP") dalam penyusunan laporan keuangan, yang sebelumnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabillitas Publik ("SAK ETAP").

Satu set lengkap laporan keuangan ini (untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025) merupakan laporan keuangan pertama entitas yang sesuai dengan SAK EP.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual (accrual basis), kecuali laporan arus kas, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut (jika ada).
Laporan keuangan disusun atas dasar akrual (accrual basis), kecuali laporan arus kas, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut (jika ada).

Sesuai dengan SAK EP Bab 7 tentang "Laporan Arus Kas", laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dengan mengelompokkan arus kas kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Instrumen Keuangan

Pada pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Biaya transaksi juga dimasukkan sebagai bagian dari pengukuran awal, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset dan liabilitas keuangan tersebut selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasinya. Klasifikasi ditentukan berdasarkan model bisnis di mana aset dan liabilitas keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset dan liabilitas keuangan, kecuali jika diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian akuntansi.

(i) Instrumen keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi atas aset keuangan atau liabilitas keuangan pada setiap tanggal pelaporan adalah nilai bersih dari jumlah berikut ini:
(a) jumlah di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada pengakuan awal;
(b) dikurangi setiap pelunasan pokok;
(c) ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara jumlah pada pengakuan awal dan jumlah jatuh temponya;
(d) dikurangi, dalam hal aset keuangan, setiap pengurangan (secara langsung atau melalui penggunaan akun penyisihan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, kelompok aset keuangan ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain. Sedangkan, kelompok liabilitas keuangan ini meliputi utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ii) Instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar dalam laba rugi
Instrumen keuangan yang tidak diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Umumnya, instrumen keuangan tersebut merupakan: (a) dimiliki untuk diperdagangkan, yaitu diperoleh dengan tujuan untuk dijual dalam jangka pendek dengan maksud memeroleh keuntungan, atau berupa derivatif; atau (b) ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal jika diperkenankan.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan
Perusahaan menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Bukti objektif tersebut antara lain mencakup kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur; pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau keterlambatan pembayaran; pemberi pinjaman memberikan konsesi kepada peminjam karena alasan ekonomi atau hukum yang tidak akan diberikan dalam kondisi normal; kemungkinan besar peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan tersebut; atau adanya data yang dapat diobservasi yang menunjukkan adanya penurunan yang terukur dalam estimasi arus kas masa depan.

Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian pasar saat ini untuk aset keuangan serupa.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas telah berakhir atau telah dialihkan dan Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikannya. Ketika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan sebagian atau seluruh nilai aset keuangan, maka nilai tercatatnya dihapuskan.

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya hanya ketika liabilitas tersebut berakhir - yaitu ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihentikan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil

Penurunan nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset, atau yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas, dalam suatu transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang mempertimbangkan variabilitas rentang estimasi yang masih dapat diandalkan. Dalam kondisi ketika rentang estimasi nilai wajar yang dapat diterapkan sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan secara andal, nilai wajar tidak dapat diukur. Jika estimasi nilai wajar yang andal tidak tersedia, aset diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai, tanpa adanya upaya atau biaya tambahan yang berlebihan pada tanggal pengukuran.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai *(spot rate)* pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK EP.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicarikan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaanya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

e. Transaksi - transaksi dengan Pihak - pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak - pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK EP Bab 33, "Pengungkapan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Transaksi dan saldo Perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah - jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu - ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi dari pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara rotal.

f. Transaksi - transaksi dengan Pihak - pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
   a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
   b. Memiliki kepemilikan dientitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
   c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;

ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

f. Transaksi - transaksi dengan Pihak - pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (lanjutan)

iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture;*
iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dan setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
vi. Pihak tersebut adalah entias yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang diuraikan dalam (iv) atau (v);
vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, isteri, anak atau tanggungannya.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan Piutang Usaha bagi pelanggan air dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

NO.	Golongan	% Tidak Tetagih	
		Aktif	Non Aktif
1	SOSIAL UMUM	93,90%	100%
2	SOSIAL KHUSUS	34,76%	100%
3	RUMAH TANGGA 1	36,17%	100%
4	RUMAH TANGGA 2	19,32%	100%
5	INSTANSI PEMERINTAH	36,67%	100%
6	NIAGA KECIL	21,82%	100%
7	NIAGA BESAR	18,07%	100%
8	INDUSTRI	0,00%	100%
9	GOLONGAN KHUSUS	42,97%	100%

Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

h. Piutang Lain - lain

Piutang Lain lain yang disajikan adalah piutang kepada pegawai/karyawan Perumda Tirta Mulia Karimun yang masing - masing disertai Surat Pernyataan Pengakuan Pinjaman dan untuk Piutang atas nama Ngat Puji, Asril, Proyek Sentani, Pinjaman Pembangunan Intake, Ahli Waris Tn Moro dihapus dari pencatatan Piutang/ dibebankan sebagai Beban Penyisihan 100% Karena sejumlah Rp 240.000.000 sudah masuk dalam materi perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan atas nama Usmantono.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan *Metode Perfectual* Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

Nilai Realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan entitas dikelompokkan kedalam tiga jenis :

1. Persediaan bahan Operasi, yang terdiri dari bahan kimia dan bahan instalasi (*water meter*, asessoris,
2. Persediaan Barang Pemerintah
3. Persediaan Alat

Persediaan Bahan Operasi meliputi bahan kimia dan bahan operasi lainnya serta Alat Tulis Kantor dicatat dengan menggunakan metode pencatatan *Physical Inventory Method* yaitu suatu teknik pencatatan/pemakaiannya yang dilakukan dengan cara hanya menghitung saldo persediaan dan atau pemakaiannya pada akhir bulan (tahun) dengan

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing - masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya - biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak - pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenalkan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.

Nilai aset tetap yang disajikan tidak termasuk nilai aset pinjam pakai, berupa gedung, jaringan dan instalasi hasil pembangunan dan pengadaan yang dilakukan melalui Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan perhitungan hasil usaha, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK EP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus *(Straight line method)* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun
Bangunan / Gedung	20
Mesin dan Peralatan	8
Instalasi Transmisi dan	8
Kendaraan dan Alat	8
Inventaris Kantor	4

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

k. Aset Tetap (Lanjutan)

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

l. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada. Entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual.

Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam perhitungan hasil usaha tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

m. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansi seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan

n. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait *(imputed interest rate).*

i. Penjualan barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu :

a) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
b) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang terjual;
c) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke
e) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan Jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut

a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal;
b) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke
c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
d) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini, ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

p. Imbalan Pascakerja

Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja" dan ketentuan Undang - undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Dalam menghitung imbalan pasca kerja perusahaan menyandarkan diri pada perhitungan actuarial yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dibentuk oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dengan nama DANA PENSIUN PERPAMSI, perhitungan actuarial tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC), untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait.

Perhitungan kewajiban pasca kerja tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tahun 2025 dan 2024 perusahaan belum mencatat imbalan pasca kerja, karena jumlah karyawan tetap 17 orang untuk tahun buku 2025.

q. Beban tangguhan dan aset lain - lain

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight-line method*).
Aset lain - lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangin dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang masa manfaaatnya terbatas diamortisasi sesuai masa manfaat tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

3. TRANSISI SAK EP

Dasar Transisi

Dalam menyusun laporan keuangan ini sesuai dengan SAK EP, Perusahaan telah menerapkan seluruh pengecualian wajib serta beberapa pengecualian opsional dari penerapan retrospektif penuh SAK EP.

Pengecualian dari penerapan retrospektif penuh
Perusahaan memilih untuk menerapkan pengecualian opsional berikut dari penerapan retrospektif penuh:

3. TRANSISI SAK EP (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan

Perusahaan memilih untuk menerapkan pajak penghasilan tangguhan secara prospektif sejak tanggal transisi ke SAK EP.

Penyesuaian ini mencerminkan dampak pajak tangguhan dari penyesuaian lainnya yang diakui pada saat transisi. Penyesuaian ini juga mencerminkan dampak pengakuan pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dan dasar pengenaan pajaknya, dibandingkan dengan pajak tangguhan yang dihitung atas perbedaan antara pos-pos yang termasuk dalam laba untuk tujuan akuntansi dan pos-pos yang termasuk dalam laporan pajak.

Rekonsiliasi berikut menunjukkan dampak transisi dari SAK ETAP menjadi SAK EP pada ekuitas grup pada 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025, serta dampak transisi tersebut pada laba Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

	31-Des-25	31-Des-24
Total ekuitas sebelum implementasi SAK EP	**6.804.011.284**	**6.844.897.789**
Penyesuaian pajak tangguhan	155.394.820	62.587.041
Total ekuitas setelah implementasi SAK EP	**6.975.827.868**	**6.907.484.831**
Total laba sebelum implementasi SAK EP	1.020.005.626	2.019.438.104
Penyesuaian pajak tangguhan	92.807.778	62.587.041
Total laba setelah implementasi SAK EP	**837.984.818**	**1.651.355.191**

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2025, perusahaan menerapkan SAK EP, laporan keuangan per 31 Desember 2024 telah dinyatakan kembali untuk komparasi pada saat laporan keuangan tahun 2025. Adapun dampak penerapan SAK EP pada laporan keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1) Laporan Posisi Keuangan	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1.945.845.383	-	1.945.845.383
Piutang Usaha	2.299.912.589	-	2.299.912.589
Piutang Lain-lain	27.633.000	-	27.633.000
Persediaan	342.608.204	-	342.608.204
Pajak dibayar dimuka	5.620.660	-	5.620.660
Jumlah Aset Lancar	4.621.619.836		4.621.619.836

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 (lanjutan)

1) Laporan Posisi Keuangan	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	3.033.218.182	-	3.033.218.182
Aset Lain - lain	77.292	-	77.292
Aset Pajak Tangguhan	-	62.587.041	62.587.041
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.033.295.474	-	3.095.882.515
Jumlah Aset	7.654.915.310	62.587.041	7.717.502.351
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	1.253.660	-	1.253.660
Utang Pajak	508.989.309	-	508.989.309
Utang Lain - Lain	4.438.117	-	4.438.117
Utang Bank	215.825.927	-	215.825.927
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	730.507.013		730.507.013
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank	215.825.927	-	215.825.927
JUMLAH LIABILITAS	946.332.940		946.332.940
EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.283.556.796	-	2.283.556.796
Hibah	18.050.000	-	18.050.000
Laba/(Rugi) Ditahan	4.543.290.993	(62.587.041)	4.480.703.952
JUMLAH EKUITAS	6.844.897.789		6.782.310.748
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.791.230.729	(62.587.041)	7.728.643.688

2) Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	11.771.193.000	-	11.771.193.000
Pendapatan Non Air	1.196.947.626	-	1.196.947.626
Pendapatan Lain - lain	23.622.006	-	23.622.006
Jumlah Pendapatan	12.991.762.632		12.991.762.632

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 (lanjutan)

2)	**Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya**	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
	BEBAN USAHA			
	Beban Pegawai	5.396.296.217	-	5.396.296.217
	Beban Bahan Kimia	782.703.750	-	782.703.750
	Beban Air Baku	3.499.690	-	3.499.690
	Beban Pemeliharaan Sumber Air	2.487.226.655	-	2.487.226.655
	Beban Operasional Lainnya	90.089.905	-	90.089.905
	Beban Penyusutan Aset Tetap & Amortisasi	588.233.195	-	588.233.195
	Beban Penyisihan Piutang	284.486.551	-	284.486.551
	Beban Umum dan Administrasi	1.339.790.589	-	1.339.790.589
		10.972.326.551		10.972.326.551
	LABA (RUGI) USAHA	2.019.436.081		2.019.436.081
	Pajak Penghasilan Badan	(430.669.955)	62.587.041	(368.082.914)
	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	1.588.766.125		1.651.353.167
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	-	-	-
	LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	1.588.766.125	62.587.041	1.651.353.167

5. KAS DAN SETARA KAS

	2025	2024
Terdiri dari :		
a. Kas		
Kas Kecil Khusus	50.000.000	30.000.000
Kas Kecil Karimun	8.892.658	5.091.688
Kas Kecil Cabang Moro	5.794.150	6.830.650
Kas Kecil Cabang Tanjung Batu	2.519.000	3.511.000
Kas Kecil Kundur Barat	1.101.000	1.335.000
Kas Perantara Mitracomm	730.300	256.900
Kas Perantara BRI MKM	790.600	-
Total Kas	**69.827.708**	**47.025.238**
b. Bank		
Bank Rakyat Indonesia	1.182.514.369	1.640.479.053
Bank Riau Kepri Cab. Karimun	180.483.906	250.587.682
BPR Cabang Moro	6.501.287	6.429.382
Bank BPR Karimun	1.150.276	1.105.596
Bank Riau Kepri Cab. Tanjung Batu	138.902	138.891
Bank Riau Kepri Cab. Kundur Barat	79.547	79.541
Total bank	**1.370.868.287**	**1.898.820.145**
JUMLAH	**1.440.695.995**	**1.945.845.383**

6. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Terdiri dari :		
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Rumah Tangga 1 (2A)	2.944.462.401	2.461.062.701
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Niaga Kecil (3A)	1.063.360.800	954.196.100
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Rumah Tangga 2 (2B)	188.357.000	163.419.500
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Instansi Pemerintah (2C)	145.618.000	108.866.200
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Niaga Besar (3B)	138.889.500	130.063.200
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Sosial Khusus (1B)	136.656.900	102.281.500
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Sosial Umum (1A)	114.658.450	62.896.200
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Industri (4)	15.111.700	8.279.900
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Golongan Khusus (KH)	1.400.000	980.400
Akumulasi Penyisihan Piutang Rekening Air	(2.206.071.650)	(1.784.218.112)
JUMLAH	**2.542.443.101**	**2.207.827.589**

Rincian Penyisihan Piutang Usaha sebagai berikut :

	Aktif	Non Aktif	Jumlah
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Rumah Tangga 1	558.307.747	841.881.367	1.400.189.114
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Niaga Kecil	91.539.529	373.006.100	464.545.629
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Sosial Umum	2.772.384	110.187.200	112.959.584
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Sosial Khusus	39.905.849	7.129.200	47.035.049
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Instansi Pemerintah	36.092.058	24.580.100	60.672.158
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Rumah Tangga 2	14.562.842	40.270.500	54.833.342
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Niaga Besar	6.040.875	59.795.900	65.836.775
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Industri	-	-	-
Piutang Rekening Air Pelanggan Kelompok Golongan Khusus	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Usaha	**749.221.283**	**1.456.850.367**	**2.206.071.650**

7. PIUTANG NON AIR	2025	2024
Terdiri dari :		
Piutang Denda	134.374.500	92.085.000
JUMLAH	**134.374.500**	**92.085.000**

8. PIUTANG LAIN-LAIN	2025	2024
Terdiri dari :		
a. Piutang Pegawai :		
Piutang Pegawai An. Arman TBT	3.600.000	3.600.000
Piutang Pegawai An. Arwani	9.000.000	9.000.000
Piutang Pegawai An. Dody Gusmiza	3.600.000	3.600.000
Piutang Pegawai An. Zainal Halem	2.100.000	2.100.000
Piutang Pegawai An. Dodi Firmantiaz	2.000.000	2.000.000
Piutang Pegawai An. Eko Haryono TBT	2.333.000	2.333.000
Piutang Pegawai An. Herwansyah	5.000.000	5.000.000
Jumlah Piutang Pegawai	**27.633.000**	**27.633.000**

b. Piutang Lain-lain :	2025	2024
Ngat Puji	-	-
Asril	-	-
Proyek Sentani	-	-
Pinjaman Pemb. Intake	-	-
Ahli Waris Tn Moro	-	-
Penyisihan Piutang lain lain	-	-
Jumlah piutang lain-lain	**-**	**-**
JUMLAH	**27.633.000**	**27.633.000**

9. PERSEDIAAN	2025	2024
Terdiri dari :		
Bahan Operasi :		
- Bahan Instalasi (Water meter, Asesoris dan perpipaan)	114.373.321	167.708.514
- Bahan Kimia	7.964.000	48.070.665
Persediaan Giboult	108.431.679	104.437.825
Barang Pemerintah	14.741.500	14.741.500
Alat Tulis Kantor	7.649.700	7.649.700
JUMLAH	**253.160.200**	**342.608.204**

10. ASET TETAP

Keterangan	2025			
	Saldo Awal 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Bangunan /Gedung Instalasi Pengolahan Air	2.235.563.600	-	-	2.235.563.600
Bangunan /Gedung Kantor	167.892.345	172.401.000	-	340.293.345
Mesin dan Peralatan Unit Air	2.112.673.957	83.645.454	-	2.196.319.411
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	4.576.908.563	253.289.335	-	4.830.197.898
Kendaraan & Alat Angkut	506.130.000	-	-	506.130.000
Inventaris Kantor	768.017.700	47.980.000	50.000	815.947.700
Jumlah Harga Perolehan	**10.367.186.165**	**557.315.789**	50.000	**10.924.451.954**
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan /Gedung Instalasi Pengolahan Air	1.948.460.873	38.294.682	-	1.986.755.555
Bangunan /Gedung Kantor	16.630.875	9.831.291	-	26.462.166
Mesin dan Peralatan Unit Air	1.863.288.234	50.155.648	-	1.913.443.882
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	2.682.376.648	433.175.624	-	3.115.552.272
Kendaraan & Alat Angkut	213.390.417	42.624.999	-	256.015.416
Inventaris Kantor	609.820.935	79.576.040	-	689.396.975
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**7.333.967.982**	**653.658.284**	-	**7.987.626.266**
Nilai Buku	**3.033.218.183**			**2.936.825.688**

Keterangan	2024			
	Saldo Awal 31 Des 2023	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan :				
Bangunan /Gedung Instalasi Pengolahan Air	2.235.563.600	-	-	2.235.563.600
Bangunan /Gedung Kantor	101.236.100	66.656.245		167.892.345
Mesin dan Peralatan Unit Air	1.939.281.000	173.392.957	-	2.112.673.957
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	4.088.405.818	489.380.552	877.806	4.576.908.563
Kendaraan & Alat Angkut	286.130.000	220.000.000	-	506.130.000
Inventaris Kantor	687.502.700	81.713.000	1.198.000	768.017.700
Jumlah Harga Perolehan	**9.338.119.218**	**1.031.142.754**	**2.075.806**	**10.367.186.165**
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan /Gedung Instalasi Pengolahan Air	1.909.823.277	38.637.596	-	1.948.460.873
Bangunan /Gedung Kantor	9.600.809	7.030.066		16.630.875
Mesin dan Peralatan Unit Air	1.830.123.953	33.164.280	-	1.863.288.234
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	2.291.837.477	390.539.171	-	2.682.376.648
Kendaraan & Alat Angkut	170.765.417	42.625.000	-	213.390.417
Inventaris Kantor	536.245.102	73.575.834	-	609.820.935
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**6.748.396.035**	**585.571.948**	-	**7.333.967.982**
Nilai Buku	**2.589.723.183**			**3.033.218.183**

11. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Terdiri dari :		
Perijinan SLO listrik	132.595.000	132.595.000
Amortisasi	(132.583.958)	(132.517.708)
JUMLAH	**11.042**	**77.292**

12. UTANG USAHA

	2025	2024
Terdiri dari :		
Utang Usaha	6.125.763	1.253.660
Utang Bahan Kimia (CV FRESH WATER)	-	-
JUMLAH	**6.125.763**	**1.253.660**

13. PERPAJAKAN

Terdiri dari :

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2025	2024
Pajak dibayar dimuka, terdiri dari:		
Pajak dibayar dimuka PPh Pasal 21	8.598.410	5.620.660
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	**8.598.410**	**5.620.660**

b. Utang Pajak

	2025	2024
Utang pajak, terdiri dari:		
Utang PPh Pasal 29	274.800.107	430.669.955
Utang PPh Pasal 21	-	-
Utang Denda Pajak	-	78.319.354
Utang Pajak Air Permukaan	-	-
Jumlah Utang Pajak	**274.800.107**	**508.989.309**

c. Pajak Penghasilan Badan

	2025	2024
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun berjalan, adalah sebagai berikut :		
Laba sebelum pajak	**1.019.977.146**	**2.019.438.104**
Beda Temporer :		
Beban Penyisihan Piutang	421.853.538	284.486.551
Beda tetap :		
Pendapatan Jasa Giro dan Lainnya	(15.003.286)	(23.598.906)
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	310.000	347.500
Biaya Iklan/Papan Ucapan	12.990.000	19.180.000
Biaya Sumbangan	26.462.000	34.605.000
Biaya Jamuan	9.541.502	15.790.700
Uang Pisah Pegawai	39.526.283	13.023.227

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)	2025	2024
Penghargaan dan uang pisah untuk Dewan Pengawas	-	30.700.000
Biaya Pajak Air Permukaan	4.019.248	3.499.690
Biaya Pajak Bank	2.958.260	4.682.659
JUMLAH	**502.657.545**	**382.716.421**
Laba (Rugi) Fiskal	1.522.634.691	2.402.154.526
Penghasilan Kena Pajak	1.522.634.000	2.402.154.000
Beban Pajak Kini		
Fasilitas	60.179.373	97.803.925
Non Fasilitas	214.620.733	332.866.030
PPh Badan Terhutang	**274.800.107**	**430.669.955**
Kredit Pajak PPh 25	-	-
Kurang (Lebih) PPh 29	**274.800.107**	**430.669.955**

d. Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan Aset Pajak Tangguhan tahun berjalan, adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2025	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2025
Biaya Penyisihan Piutang	62.587.041	92.807.778	-	155.394.819
Total Aset Pajak Tangguhan	**62.587.041**	**92.807.778**	-	**155.394.819**

14. UTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
Terdiri dari :		
Sambung Baru	4.263.000	4.263.000
Customer Deposit	1.272.500	163.500
Utang Pesangon An. Gunawan	11.617	11.617
Utang Gaji Dewan Pengawas An. Muhammad Tang	-	-
Utang Implementasi Penyewaan Aplikasi Terintegrasi (APPA)	-	-
Policarpus	-	-
JUMLAH	**5.547.117**	**4.438.117**

15. UTANG BANK

	2025	2024
Pada 31 Desember 2025 dan akun ini merupakan utang kepada PD BPR Karimun atas penerimaan fasilitas sebagai berikut:		
Pinjaman Tetap	168.600.616	215.825.927
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	(68.235.284)	(79.510.508)
JUMLAH UTANG BANK JANGKA PANJANG	**100.365.332**	**136.315.419**

15. UTANG BANK

Pada tahun 2025 dan 2024 Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PD BPR Karimun sebagai berikut:

	2025	
Fasilitas Kredit		
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Nomor Kontrak	:	0001.01.2024.01
Plafond Kredit	:	Rp. 225.000.000
Bunga	:	8,5%
Provisi	:	Rp. 3.375.000
Jangka Waktu	:	60 Bulan (31-1-2024 s/d 31-1-2029)

Pinjaman dari PD BPR Karimun dijamin dengan:
- Roda empat Toyota type Grand Avanza Veloz 1.5 AT Tahun 2019 a.n. PT Surya Anugerah Kencana

	2024	
Fasilitas Kredit		
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Nomor Kontrak	:	0362.03.2023.01
Plafond Kredit	:	Rp. 122.000.000
Bunga	:	9,5%
Provisi	:	Rp. 1.850.000
Jangka Waktu	:	60 Bulan (8-9-2023 s/d 8-9-2028)

Pinjaman dari PD BPR Karimun dijamin dengan:
- Mobil penumpang type AEV415P CL (4X2) M/T merk Suzuki tahun 2020 a.n Stevanus Rioni Cahyadi

16. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Akun ini mencatat modal pemerintah daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, masing - masing sebesar :

	2025	2024
Penyertaan Pemerintah Daerah	1.653.556.796	1.653.556.796
Penambahan Modal Kabupaten (Tunai 6 Desember 2023)	630.000.000	630.000.000
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	**2.283.556.796**	**2.283.556.796**

Modal Perumda yang berasal dari kekayaan Pemda yang dipisahkan telat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun. Modal Perumda Air Minum sejak pembentukan sampai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.283.556.796,-.

17. HIBAH

	2025	2024
Terdiri dari :		
Modal Hibah Pihak ke - 3 :		
- PT Cipta Alam Property	18.050.000	18.050.000
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun	172.401.000	
JUMLAH HIBAH	**190.451.000**	**18.050.000**

Berdasarkan naskah hibah barang dengan nomor 001/HIBAH-CAP/IX/2023 berupa 1 unit pompa dengan merk EBARA berjenis *Centrifugal and Suction Pump* senilai Rp. 18.050.000,-.

18. LABA DITAHAN	**2025**	**2024**
Terdiri dari :		
- Laba/(Rugi) Tahun Lalu	4.605.878.034	4.387.945.912
- Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	837.984.818	1.588.768.149
- Koreksi Saldo Laba (Rugi)	-	(387.774.354)
- Setoran Dividen	(703.593.753)	(1.045.648.714)
- Pembayaran Tantiem untuk dewan direksi	(79.438.407)	-
- Pembayaran Jasa Produksi	(159.010.621)	-
- Koreksi / Eliminasi atas Penyisihan Piutang	-	62.587.041
JUMLAH	**4.501.820.071**	**4.605.878.034**

19. PENDAPATAN USAHA	**2025**	**2024**
Terdiri dari :		
Pendapatan Air		
Pendapatan Air merupakan hasil penjualan air kepada pelanggan, terdiri dari:		
Air	11.488.076.800	10.779.819.500
Dana Meter	601.323.000	585.195.000
Jasa Administrasi	417.427.500	406.178.500
Denda	-	-
Pendapatan Air Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Air	**12.506.827.300**	**11.771.193.000**

Pendapatan Non Air	**2025**	**2024**
Pendapatan Non Air merupakan pendapatan diluar hasil penjualan air, terdiri dari:		
Pendapatan Sambung Baru	477.561.800	857.635.026
Pendapatan Denda	280.064.000	269.194.000
Pendapatan Penyambungan Kembali	94.424.600	69.918.600
Pendapatan Biaya Balik Nama	350.000	200.000
Pendapatan Non Air Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Non Air	**852.400.400**	**1.196.947.626**

Pendapatan Lain - lain	**2025**	**2024**
Pendapatan Lain - lain, terdiri dari:		
Pendapatan Jasa Giro	15.003.286	23.598.906
Pendapatan Lainnya	13.300	23.100
Jumlah Pendapatan Lain - lain	**15.016.586**	**23.622.006**
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**13.374.244.286**	**12.991.762.632**

20. BEBAN OPERASIONAL	**2025**	**2024**
Terdiri dari :		
Beban Pegawai	6.416.263.340	5.396.296.217
Beban Pemeliharaan Sumber Air	2.457.760.180	2.487.226.655
Beban Umum dan Administrasi	1.403.649.570	1.339.790.589
Beban Pemakaian Bahan Kimia	956.248.765	782.703.750
Beban Penyusutan Aset Tetap & Amortisasi	653.724.534	588.233.195
Beban Penyisihan Piutang	421.853.538	284.486.551
Beban Operasional Lainnya	37.528.889	90.089.905
Beban Energi	-	-
Beban Air Baku	7.240.348	3.499.690
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**12.354.269.165**	**10.972.326.551**
Beban Pegawai		
Beban Pegawai, terdiri dari:		
Beban Gaji Pegawai Admin dan Umum	2.362.755.143	2.057.391.589
Beban Gaji & Honor Pegawai Pengolahan Air	1.297.824.732	1.014.007.517
Beban Gaji dan Honor Pegawai Trandist	580.966.493	493.966.000
Beban Gaji Direktur	357.750.000	-
Beban Lembur pegawai pengolahan air	233.163.241	200.903.285
THR Pegawai Umum dan Administrasi	220.252.472	312.204.593
Pesangon Pegawai Transmisi dan Distribusi	211.812.589	-
BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Admin dan Umum	179.325.409	217.416.873
BPJS Kesehatan Pegawai Admin dan Umum	132.005.988	112.426.932
Pesangon Pegawai Pengolahan Air	130.386.927	-
THR Pegawai Pengolahan Air	109.069.815	-
BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Pengolahan Air	90.038.417	115.257.839
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21	83.271.984	36.662.376
BPJS Kesehatan Pegawai Pengolahan Air	69.387.306	57.928.333
THR Pegawai Transmisi dan Distribusi	51.717.067	-
Pesangon Pegawai Umum dan Administrasi	45.994.688	175.747.868
Uang Pisah Pegawai Umum dan Administrasi	39.526.283	13.023.227
Insentif hari besar Islam / Kesejahteraan Pegawai Umum dan Administrasi	39.005.500	76.176.000
BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Transmisi dan Distribusi	38.899.048	54.372.596
BPJS Kesehatan Pegawai Transmisi dan Distribusi	30.428.411	27.302.882
Beban Lembur pegawai admin dan umum	29.814.983	18.917.274
Beban Lembur pegawai transmisi dan distribusi	23.774.693	37.644.936
APD (Sepatu safety, Masker, Sarung Tangan, Helm, Rompi) Pegawai Pengolahan Air	23.447.689	-
Insentive / Kesejahteraan Pegawai Pengolahan Air	13.258.000	-
Kompensasi Kontrak Pegawai Umum dan Administrasi	6.578.962	1.537.140
Pendidikan dan Pelatihan	6.300.000	97.790.269
Insentive / Kesejahteraan Pegawai Transmisi dan Distribusi	5.926.000	-
Kegiatan Olahraga	1.449.500	26.600.000
Pakaian Dinas, Name Bed, Name Tag Pegawai Umum dan Administrasi	1.228.000	21.205.000
APD (Sepatu safety, Masker, Sarung Tangan, Helm, Rompi) Pegawai Transmisi dan Distribusi	904.000	-
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Pengolahan Air	-	-
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Transmisi dan Distribusi	-	-
Beban Gaji Dewan Pengawas	-	124.200.000
Beban Gaji Sekretaris Dewas	-	63.823.688
Penghargaan dan Uang Pisah untuk Dewan Pengawas	-	30.700.000
APD (Sepatu safety, Masker, Sarung Tangan, Helm, Rompi)	-	9.090.000
Kompensasi Pegawai Kontrak	-	-
Jumlah Beban Pegawai	**6.416.263.340**	**5.396.296.217**

20. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)

Beban Energi	**2025**	**2024**
Beban Energi, terdiri dari:		
Bahan Bakar Sumber Air	-	-
Listrik PLN Sumber Air	-	-
Jumlah Beban Energi	**-**	**-**

Beban Pemakaian Bahan Kimia	**2025**	**2024**
Beban Pemakaian Bahan Kimia, Terdiri Dari :		
Pemakaian Bahan Kimia	956.248.765	782.703.750
Jumlah Beban Bahan Kimia	**956.248.765**	**782.703.750**

Beban Air Baku	**2025**	**2024**
Beban Pajak Air Baku, Terdiri Dari :		
Biaya Pajak Air Permukaan	4.019.248	3.499.690
Biaya Pengujian Kualitas Air	3.221.100	-
Jumlah Beban Pajak Air Permukaan	**7.240.348**	**3.499.690**

Beban Pemeliharaan Sumber Air		
Beban Pemeliharaan Sumber Air, terdiri dari:		
Biaya Listrik PLN Pengolahan	1.755.065.393	1.531.395.074
Pemeliharaan Pipa Trans & Dist	207.388.791	348.420.650
Pemeliharaan Water Meter	172.791.091	183.574.814
Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi lainnya	110.398.290	65.845.174
Pemeliharaan & Perbaikan Pompa	47.884.500	163.656.054
Pemeliharaan & Perbaikan Panel Pompa IPA	36.055.000	-
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.406.700	29.561.000
Pemeliharaan & Kebersihan Instalasi Pengolahan Air, Reservoir	18.108.626	43.059.558
Perbaikan Panel	15.174.000	7.562.000
Biaya Pemeliharaan & Kebersihan Instalasi Pengolahan	13.090.600	14.064.200
Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	10.096.000	10.236.000
Pemeliharaan Gate Valve, Air Valve dan Foot Valve	9.688.300	-
Pemeliharaan Gate Valve	9.517.700	18.534.104
Pemeliharaan & Perbaikan Pompa IPA	8.008.832	-
Biaya Pemakaian Bahan/Perlengkapan	6.345.000	5.565.000
Pemeliharaan & Kebersihan Waduk Sumber Air	5.701.000	550.000
Pemeliharaan Genset/Listrik	2.030.000	12.010.330
Pemeliharaan Pipa Dinas	1.538.357	18.949.597
Pemeliharaan Reservoir	1.442.000	34.243.100
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	30.000	-
Pemakaian Bahan Pembantu Pengolahan Air	-	-
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	-
Biaya Bahan Pembantu/Pendukung	-	-
Pemeliharaan Bangunan Pengolahan	-	-
Pemeliharaan & Kebersihan Bak	-	-
Perbaikan Semenisasi Bekas Galian	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Sumber Air	**2.457.760.180**	**2.487.226.655**

20. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)

Biaya Operasional Lainnya	**2025**	**2024**
Beban operasional lainnya, terdiri dari:		
Beban Pekerjaan SR	30.784.389	79.313.905
Biaya Perlengkapan Instalasi Produksi	6.744.500	10.776.000
Rupa-rupa Beban Operasi & Distribusi	-	-
Biaya Bunga Pinjaman	-	-
Beban Pembelian Water Meter	-	-
Beban Pembelian Asesoris	-	-
Beban Perlengkapan & Peralatan Tran Dist	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	**37.528.889**	**90.089.905**

Beban Penyusutan & Amortisasi	**2025**	**2024**
Beban penyusutan & amortisasi, terdiri dari:		
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi (Pipa dan Jaringan)	433.175.628	390.539.170
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	79.576.042	73.575.834
Beban Penyusutan Kendaraan & Alat Angkut	42.624.996	45.219.998
Beban Penyusutan Bangunan/Gedung Instalasi Pengolahan Air	38.294.682	38.637.598
Penyusutan Sumber Air	50.155.647	33.164.280
Beban Penyusutan Bangunan/Gedung Kantor	9.831.287	7.030.065
Beban Amortisasi Perizinan SLO Listrik	66.252	66.251
Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan Unit Air	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	**653.724.534**	**588.233.195**

Beban Penyisihan Piutang Usaha		
Beban penyisihan piutang usaha, teridiri dari:		
Piutang Pelanggan Rek. RT 1	1.400.189.114	1.165.480.639
Piutang Pelanggan Niaga Kecil	464.545.629	388.808.109
Piutang Pelanggan Niaga Besar	65.836.775	64.049.916
Piutang Pelanggan Sosial Umum	112.959.584	43.061.949
Piutang Pelanggan Rek. RT 2	54.833.342	50.207.698
Piutang Pelangan Instansi Pemerintah	60.672.158	44.581.263
Piutang Pelanggan Sosial Khusus	47.035.049	28.028.538
Piutang Pelanggan Khusus	-	-
Beban Penyisihan Piutang Usaha		
Piutang Pelanggan Industri	-	-
Piutang Rek Air Industri Besar	-	-
Akumulasi Penyusutan Piutang	(1.784.218.112)	(1.499.731.561)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**421.853.538**	**284.486.551**

Beban Umum & Administrasi		
Beban Umum & Administrasi, terdiri dari		
Biaya Gaji Dewan Pengawas dan Sek. Dewas	237.548.540	-
Biaya Perjalanan Dinas	149.878.447	300.073.435
Biaya Perjalanan Dinas Dewan Pengawas dan Sek. Dewas	81.982.763	-
Biaya Sewa/cicilan Jasa Aplikasi Layanan Air Minum	79.920.000	79.920.000
Rupa-Rupa Biaya Umum	79.073.679	28.512.121
Beban Penunjang Operasional	74.598.400	71.896.241
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Transmisi dan Distribusi	66.786.000	64.861.000
Biaya Fasilitas Transportasi Dewan Pengawas Uang Pengganti Sewa Kendaraan	60.000.000	-
Biaya Listrik Kantor	52.345.000	43.389.250
Biaya Jasa Audit	49.200.906	42.717.664
Biaya ATK, Fotokopi & Barang Cetakan	48.633.800	59.087.500

20. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)	2025	2024
Beban Umum & Administrasi (lanjutan)		
Biaya Pengiriman, Angkut	43.095.900	42.588.000
Biaya Bunga Pinjaman	41.614.457	47.128.117
Biaya Speedy, Internet & Telepon	41.354.265	45.295.267
Biaya Sumbangan	26.462.000	34.605.000
Biaya Pembaca Meter	26.103.500	23.554.000
Biaya THR Dewan Pengawas dan Sek Dewas	21.511.343	-
Biaya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dewas dan Sek. Dewas	22.116.280	-
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Inventaris Kantor	21.675.000	27.153.500
Biaya Pemeliharaan & Kebersihan Kantor	20.551.700	58.750.100
Biaya Iuran Keanggotaan	17.878.200	34.654.400
Biaya Transportasi & BBM	14.655.000	18.650.000
Biaya Konsumsi	14.579.700	14.435.300
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	13.595.000	33.170.000
Biaya Iklan/Papan Ucapan	12.990.000	19.180.000
Biaya Cetak Rekening	12.200.000	11.940.000
Biaya Perlengkapan Kantor	9.680.200	16.880.000
Rupa-rupa Biaya Dewan Pengawas Lainnya	9.562.000	-
Biaya Jamuan	9.541.502	15.790.700
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	6.280.910	-
Biaya Langganan Media Cetak	5.400.000	5.120.000
Biaya Iuran BPJS Kesehatan Dewas dan Sek. Dewas	5.198.831	-
Biaya Konsumsi Rapat	4.178.000	4.238.993
Biaya tagihan Air kantor	3.517.100	4.507.800
Biaya BBM Pengantaran Surat Tagihan Rekening Air	3.024.000	2.196.000
Biaya Perijinan	3.000.000	-
Biaya Pajak Bank	2.958.260	4.682.659
Biaya benda Pos dan Materai	2.886.000	3.800.000
Biaya Administrasi Bank	2.801.563	7.488.099
Biaya Notaris	1.700.000	1.000.000
Biaya Jasa (Profesional)	1.500.000	24.834.387
Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 Dewas dan Sek. Dewas	1.409.299	-
Biaya Sewa Kendaraan Operasional	350.000	24.750.000
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	310.000	347.500
Biaya Dewan Pengawas	-	75.741.732
Biaya *Fee*	-	36.689.800
Biaya Sewa Kantor	-	6.000.000
Biaya Website Perusahaan	-	4.160.000
Biaya Pemeliharaan & Kebersihan Kantor	-	-
Biaya Langganan Koran, Majalah	-	-
By. BBM Penagihan	-	-
Biaya Pajak - Pajak	-	-
Biaya Keamanan	-	-
Kompensasi dari Dampak Kebocoran Pipa	-	-
Jumlah Beban Umum & Administrasi	1.403.649.570	1.339.790.589

21. KOREKSI ATAS LABA DI TAHAN

	2025	2024
Terdiri dari :		
- Koreksi Pajak Penghasilan Badan atas Lap. Keuangan Tahun 2021	-	309.455.000
- Denda Bunga Pasal 9 (2b) KUP Masa Tahun Pajak 2021	-	73.526.508
- Denda Bunga Pasal 8 (2) KUP Masa Tahun Pajak 2023	-	4.792.846
- Koreksi Pajak Penghasilan Badan atas Lap. Keuangan Tahun 2024	-	(62.587.041)
JUMLAH	**-**	**325.187.313**

22. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Akta no. 201/wr-not/II/2026 tentang Kuasa Pemilik Modal (KPM), mengusulkan :

1. Menetapkan BUMD Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun sebagai pemangku hutang kurang pajak atas air permukaan Tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp. 449.768.940.
2. Menetapkan jangka waktu pembayaran hutang yaitu selama 10 tahun dengan cara mengangsur kepada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau.
3. Mengusulkan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten Karimun terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPK perwakilan.
4. Mengusulkan agar Bupati Karimun selaku KPM mengajukan permohonan pengurangan hutang kurang atas pajak air permukaan.

23. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN

Manajemen Perumda Tirta Mulia Karimun bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 22 April 2026.

PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

Karimun
Melaju dalam Harmoni

